



Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.

dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029 PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029 terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Provinsi/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Provinsi/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, dampak *(impact)*.
20. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
21. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak *(impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

30. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, lembaga sosial masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat Daerah/desa, dunia usaha/ investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
31. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
32. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
37. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
38. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi.
39. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

40. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
41. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.

Pasal 2

(1) RPJMD Provinsi disusun berdasarkan asas:
    a. manfaat;
    b. berkeadilan;
    c. keterpaduan;
    d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
    e. tata kelola pemerintahan yang baik;
    f. berkelanjutan;
    g. berwawasan lingkungan;
    h. efektif dan efisien; dan
    i. kemandirian.
(2) RPJMD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

RPJMD Provinsi bertujuan untuk:

a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan Perencanaan pembangunan Nasional dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan
c. sebagai pedoman dalam:
    1. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
    2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
    3. penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJMD Provinsi merupakan:

a. penjabaran Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah ke dalam tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD Provinsi; dan

b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 5

(1) RPJMD Provinsi disusun dengan sistematika:
   a. BAB I PENDAHULUAN, meliputi:
      1. latar belakang;
      2. dasar hukum;
      3. hubungan antar dokumen;
      4. maksud dan tujuan; dan
      5. sistematika penulisan;
   b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, meliputi:
      1. gambaran umum kondisi Daerah;
      2. gambaran keuangan Daerah; dan
      3. permasalahan dan isu strategis;
   c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, meliputi:
      1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; dan
      2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, meliputi:
      1. Program Perangkat Daerah; dan
      2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   e. BAB V PENUTUP, meliputi:
      1. pedoman transisi; dan
      2. kaidah pelaksanaan.

(2) Dokumen RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang dalam negeri mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD Provinsi dapat dilakukan jika:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
   d. merugikan kepentingan nasional.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
   a. bencana alam;
   b. goncangan politik;
   c. krisis ekonomi;
   d. konflik sosial budaya;
   e. gangguan keamanan;
   f. pemekaran Daerah; atau
   g. perubahan kebijakan nasional.
(4) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(5) Perubahan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam hal masa jabatan Gubernur berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, Gubernur pada tahun terakhir menyusun RKPD mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi ini.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 AGUSTUS 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... DI-i

DAFTAR TABEL ..... DT-i

DAFTAR GAMBAR ..... DG-i

DAFTAR ISTILAH ..... DIS-i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-6

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-11

1.3.1 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJPN Tahun 2025-2045..... I-12

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029..... I-13

1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJPD Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045..... I-13

1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... I-14

1.3.5 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2023-2042 Beserta Perubahannya..... I-14

1.3.6 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD Kabupaten/Kota..... I-15

1.3.7 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029..... I-15

1.3.8 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.... I-15

1.3.9 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..... I-16

1.3.10 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan..... I-16

1.3.11 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya..... I-17

1.4 Maksud dan Tujuan I-17

1.5 Sistematika Penulisan……..……..... I-18

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi……. II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat……. II-75
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah……... II-126
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum……. II-179
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal……... II-205
2.1.6 Kerja Sama Daerah……. II-216
2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten/Kota……... II-228
2.1.8 BUMD dalam Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda…….. II-231
2.2 Gambaran Keuangan Daerah……. II-232
2.2.1 Kondisi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024……. II-232
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2020-2024……. II-249
2.2.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030……... II-256
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis……. II-265
2.3.1 Permasalahan Pembangunan……. II-265
2.3.2 Isu Startegis Daerah…… II-304

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran…….…….. III-1
3.1.1 Visi dan Misi…….. III-1
3.1.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029…….. III-16
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah… III-56
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029……. III-56
3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029……. III-88
3.2.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dalam RPJMN Tahun 2025-2029…… III-147
3.2.4 Dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN)…… III-158

3.2.5 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2043…….. III-160
3.2.6 Program Lintas Perangkat Daerah dan Kewilayahan…….. III-180

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah……. IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah……. IV-32

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi…….. V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan……. V-2

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023……..	II-3
Tabel 2.3	Perkembangan Produksi Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024…….	II-4
Tabel 2.4	Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……	II-6
Tabel 2.5	Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……..	II-7
Tabel 2.6	Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……	II-8
Tabel 2.7	Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……..	II-9
Tabel 2.8	Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……..	II-10
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-12
Tabel 2.10	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2020-2024…….	II-13
Tabel 2.11	Potensi dan Sebaran Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah……..	II-17
Tabel 2.12	Luas Penggunaan Lahan di Sulawesi Tengah Tahun 2023…….	II-18
Tabel 2. 13	Koordinat terluar dari Cagar Biosfer Lore Lindu……	II-23
Tabel 2.14	Proyeksi Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029……..	II-30
Tabel 2.15	Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional……	II-31
Tabel 2.16	Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	

		Halaman
	2029……	II-35
Tabel 2.17	Potensi Energi Provinsi Sulawesi Tengah……	II-37
Tabel 2.18	Potensi Tenaga Air Sulawesi Tengah……..	II-38
Tabel 2.19	Data Pembangkit EBT Eksisting Provinsi Sulawesi Tengah (*On Grid*)……..	II-40
Tabel 2.20	Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Sulawesi Tengah…	II-42
Tabel 2.21	Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik (GWh) 2025-2030……..	II-44
Tabel 2.22	Proyeksi Jumlah Pelanggan (Ribu) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030……..	II-44
Tabel 2.23	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik……..	II-44
Tabel 2.24	PoU Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……	II-50
Tabel 2.25	Komponen Pembentuk IKLH Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-51
Tabel 2.26	Perkembangan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan Kerentanan Baseline dengan Data 2021……..	II-54
Tabel 2.27	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Periode 2020-2024..……	II-58
Tabel 2.28	Tingkat Emisi Sektoral Tahun 2019-2023……..	II-60
Tabel 2.29	Perkembangan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Berdasarkan Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020-2024……	II-63
Tabel 2.30	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) Menurut Kabupaten dan Suku Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023…….	II-64
Tabel 2.31	Perkembangan Bonus Demografi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-75
Tabel 2.32	Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024…….	II-77
Tabel 2.33	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024……	II-78

		Halaman
Tabel 2.34	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-80
Tabel 2.35	Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-81
Tabel 2.36	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2024……..	II-82
Tabel 2.37	Perkembangan Persentase Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Periode 2020-2024…….	II-85
Tabel 2.38	Persentase Pengangguran Terbuka berdasarkan Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah Periode 2020-2024 Agustus……..	II-85
Tabel 2.39	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Dimensi Pembentuknya Tahun 2020–2024……	II-88
Tabel 2.40	Capaian IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……	II-89
Tabel 2.41	Capaian IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024…….	II-89
Tabel 2.42	Perkembangan Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Periode 2020-2024…….	II-93
Tabel 2.43	Capaian Usia Harapan Hidup Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……	II-94
Tabel 2.44	Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-96
Tabel 2.45	Anak Tidak Sekolah yang *Drop Out* di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024……	II-109
Tabel 2.46	Anak Tidak Sekolah (ATS) Lulus Tidak Melanjutkan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024……	II-111
Tabel 2.47	Anak Tidak Sekolah (ATS) Belum Pernah Bersekolah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024……	II-112
Tabel 2.48	Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024……..	II-113
Tabel 2.49	Peta Universal Coverage Jamsostek Provinsi Sulawesi Tengah sampai tahun 2025……	II-115

		Halaman
Tabel 2.50	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025……	II-116
Tabel 2.51	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa, BPD & RT/RW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025….	II-117
Tabel 2.52	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……...	II-123
Tabel 2.53	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……...	II-125
Tabel 2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-133
Tabel 2.55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-133
Tabel 2.56	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020-2024……	II-134
Tabel 2.57	Perkembangan Capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 20218-2024……..	II-136
Tabel 2.58	Unit, Tren, Batas Minimum dan Maksimum Setiap Indikator di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2024…….	II-138
Tabel 2.59	Bobot dan Nilai Pilar dan Sub-Pilar Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Sulawesi Tengah Tahun 2023…….	II-141
Tabel 2.60	Peringkat dan Nilai IBEI berdasarkan Provinsi 2022 – 2023…...	II-144
Tabel 2.61	Peringkat IBEI Provinsi Berdasarkan Pilar Tahun 2023…….	II-144
Tabel 2.62	Potensi Energi di Provinsi Sulawesi Tengah……..	II-145
Tabel 2.63	Potensi Tenaga Air Sulawesi Tengah……..	II-147
Tabel 2.64	Bauran Energi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023…….	II-149
Tabel 2.65	Penetapan RDTR di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025…..	II-167
Tabel 2.66	Progress RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025…….	II-167
Tabel 2.67	Progress RTRW Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025……..	II-167
Tabel 2.68	Perkembangan Status Desa berdasarkan IDM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024…….	II-174
Tabel 2.69	Pencapaian Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2024……	II-175

		Halaman
Tabel 2.70	Tingkat Inflasi Bulan Desember Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……..	II-179
Tabel 2.71	Hasil Penilaian Capaian Aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023……..	II-186
Tabel 2.72	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Masal Selama Setahun yang Lalu……..	II-191
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……	II-194
Tabel 2.74	Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024……...	II-218
Tabel 2.75	Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat (Sinergitas) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024……..	II-224
Tabel 2.76	Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024…….....	II-226
Tabel 2.77	Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024……..	II-237
Tabel 2.78	Target dan Realisasi PAD pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020-2024……	II-238
Tabel 2.79	Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024……..	II-242
Tabel 2.80	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024……	II-244
Tabel 2.81	Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……	II-244
Tabel 2.82	Rata – rata Pertumbahan Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024...	II-246
Tabel 2.83	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-249
Tabel 2.84	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah……	II-253
Tabel 2.85	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024……	II-255
Tabel 2.86	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi	

		Halaman
	Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024……	II-255
Tabel 2.87	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024…….	II-256
Tabel 2.88	Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030…….	II-259
Tabel 2.89	Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030……..	II-260
Tabel 2.90	Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030……..	II-260
Tabel 2.91	Proyeksi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 – 2030……..	II-261
Tabel 2.92	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 -2030……...	II-262
Tabel 2.93	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025 – 2030……...	II-263
Tabel 2.94	Target Inklusi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2030……..	II-264
Tabel 2.95	Pemetaan Masalah Utama serta Faktor Penghambat Sasaran Pembangunan Daerah……...	II-269
Tabel 2.96	Isu Strategis Wilayah Sulawesi…….	II-329
Tabel 2.97	Isu Strategis Regional Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara Berbasis Sumber Daya Alam…….	II-330
Tabel 2.98	Isu Strategis Regional Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Perlindungan Lingkungan……..	II-331
Tabel 2.99	Kesimpulan Isu Strategis Daerah……...	II-352
Tabel 3.1	Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……	III-3
Tabel 3.2	Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029…….	III-5
Tabel 3.3	Penjelasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029…….…….	III-6

		Halaman
Tabel 3.4	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029……..	III-8
Tabel 3.5	Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045……..	III-11
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 1 Misi 1……..	III-21
Tabel 3.7	Sasaran dan Indikator pada Tujuan 2 Misi 1…….	III-24
Tabel 3.8	Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan Misi 2…….....	III-30
Tabel 3.9	Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 1 Misi 3……	III-36
Tabel 3.10	Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 2 Misi 3……	III-41
Tabel 3.11	Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 1 Misi 4……...	III-47
Tabel 3.12	Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 2 Misi 4……..	III-50
Tabel 3.13	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029……..	III-52
Tabel 3.14	Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional..……	III-57
Tabel 3.15	Pentahapan Pembangunan Misi 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……..	III-59
Tabel 3.16	Pentahapan Pembangunan Misi 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……..	III-63
Tabel 3.17	Pentahapan Pembangunan Misi 3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……..	III-65
Tabel 3.18	Pentahapan Pembangunan Misi 4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……..	III-69
Tabel 3.19	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……..	III-73
Tabel 3.20	Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029…….	III-89
Tabel 3.21	Keselarasan Antara Janji Politik dengan Implementasi Program dalam RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029…..	III-116
Tabel 3.22	Keselarasan Antara Misi, Janji Politik dengan Implementasi Program dalam RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029…..	III-136
Tabel 3.23	Persandingan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029	

		Halaman
	dengan Prioritas Pembangunan Sulawesi Tengah 2025-2029……..	III-141
Tabel 3.24	Arah Pembangunan Kewilayahan Lokasi Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029…….	III-153
Tabel 3.25	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 untuk Indonesia Emas..……..	III-166
Tabel 3.26	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….	III-167
Tabel 3.27	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045……	III-168
Tabel 3.28	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045……...	III-169
Tabel 3.29	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….	III-170
Tabel 3.30	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….	III-171
Tabel 3.31	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….	III-172
Tabel 3.32	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….....	III-173
Tabel 3.33	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045……...	III-174
Tabel 3.34	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….	III-175
Tabel 3.35	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….....	III-176
Tabel 3.36	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045…….	III-177
Tabel 3.37	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045……	III-178
Tabel 3.38	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045……...	III-179

		Halaman
Tabel 3.39	31 Indikator Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting……	III-187
Tabel 3.40	Cross Cutting Program Pengembangan Pendidikan Vokasi Model Pentahelix Sulteng 2025-2029……..…….	III-195
Tabel 3.41	Logical Framework Program Petani Milenial…….....	III-200
Tabel 3.42	Logical Framework Pencapaian Indeks Ekonomi Biru……	II-209
Tabel 3.43	Logical Framework Pencapaian Indeks Ekonomi Hijau……..	III-221
Tabel 4.1	Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2029……..……..	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029…….....	IV-33
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urursan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030……..……	IV-35

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan antar Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-12
Gambar 2.1	Tahapan Kerja Analisis Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan kehutanan……..	II-11
Gambar 2.2	Peta Penutupan Lahan Sulawesi Tengah.....	II-20
Gambar 2.3	Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu……..	II-23
Gambar 2.4	Kawasan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una……..	II-24
Gambar 2.5	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air…….....	II-27
Gambar 2.6	Peta Jasa Ekosistem Fungsi Pengatur Tata Air……..	II-28
Gambar 2.7	Peta Indikasi Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020……	II-29
Gambar 2.8	Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Sulawesi Tengah……..	II-31
Gambar 2.9	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan…..…….	II-33
Gambar 2.10	Peta Indikasi Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019……..	II-34
Gambar 2.11	Peta Indikasi Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029……	II-35
Gambar 2.12	Peta Potensi Energi surya di Indonesia……...	II-38
Gambar 2.13	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024…….	II-45
Gambar 2.14	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024……...	II-45
Gambar 2.15	Akses Ketahanan Air Bagi Rumah Tangga Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024…….	II-46
Gambar 2.16	Perkembangan Persentase Capaian Akses Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-47
Gambar 2.17	Perkembangan Persentase Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2024…….	II-48
Gambar 2.18	Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2018-2024…….	II-49

		Halaman
Gambar 2.19	Perkembangan PoU (Prevalence of Undernourishment) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 …….……..	II-49
Gambar 2.20	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-51
Gambar 2.21	Perkembangan Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan Kerentanan Baseline dengan Data 2021…….	II-53
Gambar 2.22	Peta Multi Bahaya di Provinsi Sulawesi Tengah…….	II-55
Gambar 2.23	Peta Multi Kerentanan di Provinsi Sulawesi Tengah……..	II-56
Gambar 2.24	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……	II-58
Gambar 2.25	Grafik Profil Emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023…	II-59
Gambar 2.26	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024…….	II-61
Gambar 2.27	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024……	II-62
Gambar 2.28	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-65
Gambar 2.29	Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……...	II-66
Gambar 2.30	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……..	II-67
Gambar 2.31	Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……...	II-68
Gambar 2.32	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……	II-68
Gambar 2.33	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029……...	II-69
Gambar 2.34	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Provinsi Sulawesi Tengah (Jiwa)……..	II-69
Gambar 2.35	Proyeksi Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029……	II-70

		Halaman
Gambar 2.36	Proyeksi Penduduk dan Proporsi Usia Produktif (15-64 Tahun) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029……	II-71
Gambar 2.37	Proyeksi Jumlahdan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……	II-72
Gambar 2.38	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……	II-73
Gambar 2.39	Proyeksi Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……	II-74
Gambar 2.40	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024……	II-76
Gambar 2.41	Kontribusi 3 (tiga) Sektor Utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……...	II-78
Gambar 2.42	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-79
Gambar 2.43	Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…	II-81
Gambar 2.44	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2020-2024……	II-84
Gambar 2.45	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……	II-86
Gambar 2.46	Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-87
Gambar 2.47	Perkembangan Capaian PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)……..	II-92
Gambar 2.48	Capaian Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024……..…	II-94
Gambar 2.49	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-96
Gambar 2.50	Capaian Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……	II-97
Gambar 2.51	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2020-2024……..……	II-100
Gambar 2.52	Rata-Rata Lama Sekolah Se-Regional Sulawesi Periode 2020-2024……..……	II-101
Gambar 2.53	Harapan Lama Sekolah Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2020-	

		Halaman
	2024……..…….	II-102
Gambar 2.54	Harapan Lama Sekolah Se-Regional Sulawesi Periode 2020-2024……..…….	II-102
Gambar 2.55	Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Tengah Periode 2020-2024…	II-103
Gambar 2.56	Angka Kemampuan Literasi Sulawesi Tengah……	II-104
Gambar 2.57	Angka Numerasi Sulawesi Tengah……	II-105
Gambar 2.58	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……..	II-106
Gambar 2.59	Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2022….	II-107
Gambar 2.60	Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024/2025……...	II-108
Gambar 2.61	Indeks Kerukunan Umat Beragama Periode 2018-2023……..	II-118
Gambar 2.62	Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023……	II-119
Gambar 2.63	Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023…….	II-121
Gambar 2.64	Indeks Pembangunan Keluarga Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024….	II-122
Gambar 2.65	Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-123
Gambar 2.66	Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Tengah Periode 2020-2024…	II-124
Gambar 2.67	Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023…..	II-126
Gambar 2.68	Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Usia non produktif Terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……	II-127
Gambar 2.69	Perkembangan Rasio Lulusan SO/S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024……	II-127
Gambar 2.70	Pertumbuhan dan Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024……...	II-128
Gambar 2.71	Proposrsi PDRB ADHB Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024……	II-129
Gambar 2.72	Nilai Tambah PDRB ADHB Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024……	II-129
Gambar 2.73	Rasio PDRB ADHB Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024……...	II-130

		Halaman
Gambar 2.74	Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024……	II-131
Gambar 2.75	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024……..	II-131
Gambar 2.76	Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…..	II-132
Gambar 2.77	Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024……..	II-135
Gambar 2.78	Indikator Indeks Ekonomi Hijau di level provinsi ……..	II-138
Gambar 2.79	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)……..	II-140
Gambar 2.80	Potensi energi Surya di Sulawesi Tengah……	II-146
Gambar 2.81	Potensi Energi Surya di Provinsi Sulawesi Tengah……	II-147
Gambar 2.82	Persentase Target dan Realisasi Capaian EBT dalam Bauran Energi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……..	II-149
Gambar 2.83	Bauran Energi Provinsi Sulawesi Tahun 2024……	II-150
Gambar 2.84	Keterkaitan Indeks Yuridis Berkelanjutan Dengan Instrumen Keberlanjutan Lainnya……	II-151
Gambar 2.85	Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2023…….	II-153
Gambar 2.86	Nilai PDRB ADHB Komponen PMTB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024…….	II-155
Gambar 2.87	Proporsi Komponen PMTB Terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah (%) Tahun 2021-2024……	II-155
Gambar 2.88	Nilai dan Proporsi Komponen Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……..	II-156
Gambar 2.89	Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024…….	II-158
Gambar 2.90	Kondisi Kemantapan Irigasi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024 (Persen)…….	II-160
Gambar 2.91	Grafik Pertumbuhan Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah serta Diagram Presentase Permukiman Kumuh terhadap Luas Permukiman Tidak Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024…….	II-161
Gambar 2.92	Trend Perubahan Jumlah KK, Jumlah Rumah dan Backlog di Provinsi	

		Halaman
	Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-162
Gambar 2.93	Trend Perubahan Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-163
Gambar 2.94	Diagram Perbandingan Rumah Layak Huni (RLH) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024…….	II-164
Gambar 2.95	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-165
Gambar 2.96	Diagram Sebaran Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024…….	II-165
Gambar 2.97	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar di Provinsi Sulawesi Tengah……...	II-169
Gambar 2.98	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……...	II-170
Gambar 2.99	Perkembangan Persentase Capaian Rumah Tangga Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola secara Aman di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-171
Gambar 2.100	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024……..	II-171
Gambar 2.101	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024…….	II-172
Gambar 2.102	Capaian Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2024……...	II-173
Gambar 2.103	Perkembangan Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……...	II-177
Gambar 2.104	Tingkat Inflasi Year-on-Year Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2020-2024…….	II-178
Gambar 2.105	Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024…….	II-180
Gambar 2.106	Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2024…….	II-181
Gambar 2.107	Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi	

		Halaman
	Tengah Periode 2021 – 2024…….	II-181
Gambar 2.108	Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2024……	II-182
Gambar 2.109	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2024……	II-183
Gambar 2.110	Indeks Integritas Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024……..	II-184
Gambar 2.111	Persentase Penegakan Hukum Perda di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024…….	II-185
Gambar 2.112	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023……	II-187
Gambar 2.113	Capaian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024……..	II-189
Gambar 2.114	Kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)…..……..	II-192
Gambar 2.115	Nilai IDSD Sulawesi Tengah berbanding Nilai IDS Nasional Tahun 2022-2024…….	II-192
Gambar 2.116	Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (Rp.)……..	II-235
Gambar 2.117	Target dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (Rp.)……...	II-240
Gambar 2.118	Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terhadap Total Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 (%)…….	II-241
Gambar 2.119	Tujuan Utama Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis Untuk Siswa/Santri/Ibu Hamil/Ibu Menyusui dan Balita……	II-324
Gambar 2.120	Visi Ibu Kota Negara Baru……..	II-329
Gambar 3.1	Keselarasan Visi RPJMN dan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah...	III-4
Gambar 3.2	Diagram Keselarasan Misi 1…….	III-9
Gambar 3.3	Diagram Keselarasan Misi 2…….	III-10
Gambar 3.4	Diagram Keselarasan Misi 3…….	III-10
Gambar 3.5	Diagram Keselarasan Misi 4…….	III-11
Gambar 3.6	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi I…….	III-17
Gambar 3.7	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 1……	III-19

		Halaman
Gambar 3.8	Logframe Tujuan 2 dan Sasaran pada Misi 1……	III-23
Gambar 3.9	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2……	III-26
Gambar 3.10	Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 2……	III-27
Gambar 3.11	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3……	III-32
Gambar 3.12	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 3……	III-34
Gambar 3.13	Logframe Tujuan 2 dan Sasaran pada Misi 3……	III-38
Gambar 3.14	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4……	III-43
Gambar 3.15	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 4……	III-44
Gambar 3.16	Logframe Tujuan 2 dan Sasaran pada Misi 4……	III-48
Gambar 3.17	Perbandingan Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah……..	III-133
Gambar 3.18	Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Sulawesi Tengah 2025-2029…….	III-147
Gambar 3.19	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……	III-152
Gambar 3.20	Proyek Strategi Nasional (PSN)……	III-158
Gambar 3.21	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional……	III-160
Gambar 3.22	Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah……	III-161
Gambar 3.23	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 Berdasarkan 4 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah……..	III-164
Gambar 3.24	Cross Cutting Pengarustamaan Gender……	III-180
Gambar 3.25	Pohon Faktor Program Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting……	III-186
Gambar 3.26	Pohon Faktor Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu……..	III-192
Gambar 3.27	Cross Cutting Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029……..	III-193
Gambar 3.28	Cross cutting pengembangan pendidikan vokasi model pentahelix…...	III-196
Gambar 3.29	Cross Cutting Program Berani Menjadi Petani Milenial …….	III-199
Gambar 3.30	Cross Cutting Program Ekonomi Biru……	III-208
Gambar 3.31	Cross Cutting Pencapaian Indeks Ekonomi Hijau…….	II-220

		Halaman
Gambar 3.32	Kolaborasi Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Sulawesi Tengah……	II-225
Gambar 3.33	Crosscutting Pembangunan Rendah Karbon Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah……..	II-224

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan utama pembangunan negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur meliputi jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah, undang-undang tersebut juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2025-2030, yaitu Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dan dr. Reny A Lamadjido, M.Kes. Sp. PK. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 tersebut dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah di lantik. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 menekankan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib selaras berdasarkan pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Proses penyusunan RPJMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih.

Sebagaimana disebutkan paa pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh karena itu, muatan substansi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2029 telah diselaraskan dengan berbagai kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029, antara lain meliputi Asta Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2045. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 merupakan tahap I (periode 2025-2029) dalam pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045. Dalam mengimplementasikan tema pembangunan periode pertama RPJPD yakni penetapan Fondasi Transformasi maka RPJMD memuat perencanaan yang selaras dengan sasaran visi dan misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok serta indikator utama pembangunan RPJPD. Selain itu, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap perangkat daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaran urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan pada tingkat Perangkat daerah yaitu Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun RPJMD telah menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Pendekatan perencanaan pembangunan yang dimaksud tersebut, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini berdasarkan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat;

terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;

3. Pendekatan Politis, sebagai upaya dalam menjabarkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih atau dengan kata lain menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, hasil pendekatan bawah-atas melalui hasil penjaringan aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan atas-bawah, berupa penyelarasan dokumen perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas;
5. Pendekatan holistik-tematik, dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
6. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
7. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Selain menggunakan pendekatan di atas, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui implementasi pendekatan pentahelix-ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media), serta pelibatan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan;

3. Penerapan dynamic government sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pendekatan Spasial sesuai Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042;
5. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis e-planning;
6. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam:
   a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
   b. Satu Data Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan untuk mewujudkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen stratejik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

1.2 DASAR HUKUM

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5679)l
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Nomor 6987)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturann Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549));

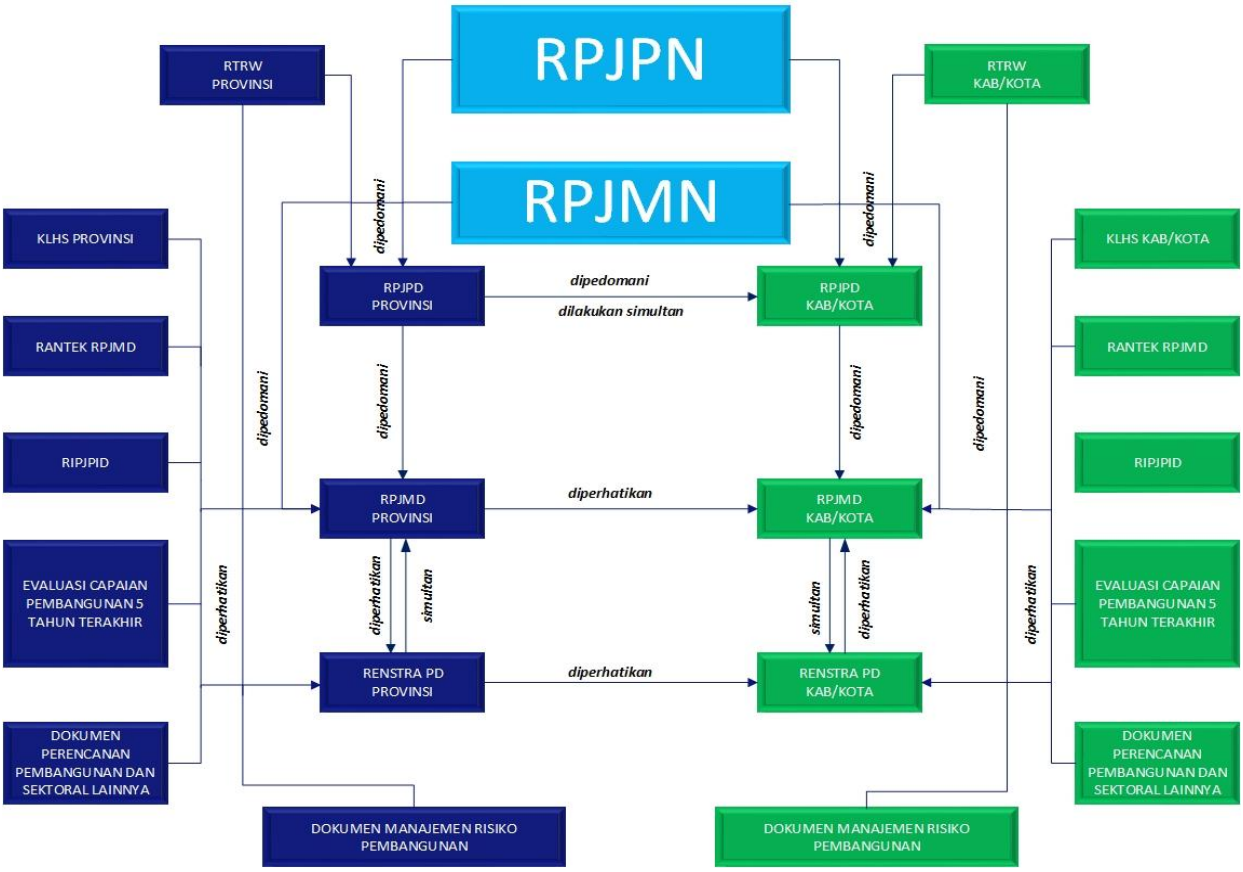
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 132);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan arahan dan amanat kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Terdapat 2 (dua) aspek utama keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dipahami pada uraian dan gambar berikut:


RPJPN
RPJMN
RTRW PROVINSI
RTRW KAB/KOTA
KLHS PROVINSI
KLHS KAB/KOTA
RANTEK RPJMD
RANTEK RPJMD
RIPJPID
RIPJPID
EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR
EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA
RPJPD PROVINSI
RPJPD KAB/KOTA
RPJMD PROVINSI
RPJMD KAB/KOTA
RENSTRA PD PROVINSI
RENSTRA PD KAB/KOTA
DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN
DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN
dipedomani
dipedomani
dipedomani

Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju dan sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yakni “Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”. Diselaraskan dengan usaha pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi.

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN 2025-2029 penyelarasan ini mencakup penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran dan target, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJPD Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta bagian dari pencapaian 8 Misi yang merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2045. Visi RPJPD tersebut adalah *“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*. Dengan demikian terjadi keselarasan antara misi, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah agenda pembangunan global mencakup 17 tujuan/*goals*, dan 4 pilar pembangunan yakni pilar Pembangunan Sosial 54 indikator, pilar Pembangunan Ekonomi 28 Indikator, pilar Pembangunan Lingkungan 63 indikator dan pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 36 indikator.

Selanjutnya, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan peta jalan nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat kebijakan strategis dalam pencapaian TPB periode 2017-2030. Oleh pemerintah daerah keterkaitan RPJMD 2025-2029 akan ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

1.3.5 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2023-2042 Beserta Perubahannya

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulteng digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulteng Tahun 2023-2043, telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang. RPJMD ini diselaraskan juga dengan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah beserta perubahannya, yang menjadi dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

1.3.6 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD Kabupaten/Kota

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator, strategi, kebijakan dan program pembangunan serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

1.3.7 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Regulasi yang terkait RPJMD menetapkan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dengan menyediakan kerangka kerja hasil analisis sistematis untuk mengintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga telah menetapkan agenda universal yang dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakan sosial, ekonomi dan lingkungan para pemangku kepentingan di daerah.

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD pada prinsipnya merupakan upaya memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah melalui pelaksanaan kebijakan, kegiatan, dan/atau program. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

1.3.8 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam periode yang sama dengan RPJMD. Renstra PD merupakan penjabaran tehnis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan serta sub kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah.

Penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dilakukan bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagai substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun.

1.3.9 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Provinsi Sulteng setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun memedomani RPJMD dan RKP serta hasil evaluasi RPJMD dan RKPD tahun lalu. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menysusun renja perangkat daerah setiap tahun selama 5 tahun berdassarkan renstra perangkat daerah. Dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan dan mewujudkan visi RPJMD. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.10 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(RIPJPID) tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan Kebijakan perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah disusun berbasis bukti, yaitu berlandaskan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh seluruh unsur kelembagaan IPTEK, sumber daya IPTEK dan jejaring IPTEK yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik pada lingkup daerah, antar-daerah dan nasional, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.

1.3.11 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Selain memperhatikan dokumen RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2023-2042 dan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang telah ada sebelumnya, antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, Rencana Umum Energi Daerah dan dokumen lainnya.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah perlu disusun secara sinergis dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya termasuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) agar arah pembangunan daerah selaras dengan pengembangan iptek yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. RIPJIPID merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sistemik, komprehensif dan memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah RIPJIPID akan mempedomani RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 sesuai regulasi dan aturan perundangan yang berlaku.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang dugunakan sebagai arah atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui sasaran, strategi, arah kebijakan dan rencana program yang jelas dan terukur;
2. Menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah;
3. Menjadi pedoman dalam operasional bagi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menjadi landasan dalam evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah (PD) dan kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan memberikan arah dan kerangka strategis sebagai acuan Renstra Perangkat Daerah agar kinerja Perangkat Daerah dapat diwujudkan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan sasaran RPJMD sehingga perencanaan pembangunan di daerah berjalan harmonis dan terintegrasi;
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan untuk kurun waktu 5 tahun yang kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun;
8. Meningkatkan pembangunan yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta transparan dalam menjalankan program pembangunan sehingga dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat serta mendorong mitra pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, filantropi, akademisi dan sektor swasta.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD;

BAB II: **GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang memuat bahasan tentang aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek daya saing daerah dan Aspek pelayanan umum, Standar pelayanan Minimal, Kerjasama Daerah, Rencana Pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota, BUMD yang Mendukung kinerja pelayanan Pemda, Subbab Gambaran Keuangan Daerah, Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

BAB III: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,

Bab ini memuat bahasan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur melalui target capaian indikator kinerja;

BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,

Bab ini memuat bahasan tentang daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD);

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042, ruang lingkup wilayah Sulawesi Tengah secara geografis terletak antara 2^{o} 22' Lintang Utara dan 3^{o} 48' Lintang Selatan dan di antara 119^{o} 22'-124^{o} 22' Bujur Timur serta dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 77.295,9 Km^{2} dengan jumlah pulau sebanyak 1.572 pulau.

Luas wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 13.467.538 hektare yang meliputi wilayah darat dan wilayah laut, dengan batas wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara;
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makasar.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025), Sulawesi Tengah memiliki total luas wilayah 61.605,718 km^{2} terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan dan 2.020 Desa/Kelurahan.

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi dan memiliki peran strategis baik secara geografis, ekonomi, maupun lingkungan. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Provinsi ini merupakan

penghasil kelapa, kakao, padi dan juga kelapa sawit yang berkontribusi terhadap pasokan nasional, bahkan beberapa komoditas sudah diekspor seperti kopi, kelor, coklat, dan lain-lain. Pada sektor perikanan Provinsi ini memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya (udang, rumput laut, ikan tuna) di perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi dan mendukung industri pengolahan ikan di wilayah sekitar. Sektor pertambangan memiliki cadangan nikel, emas, dan batu bara yang berkontribusi pada industri nasional. Destinasi seperti Taman Nasional Lore Lindu, Pantai Tanjung Karang, dan Danau Poso menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

B. Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Sektor Pertanian

Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi bagi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 15,80 persen. Kontribusi ini ditopang oleh seluruh produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan perikanan.

Produksi tanaman padi selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2020 produksi padi sebanyak 792.248,84 ton, selanjutnya pada Tahun 2021 produksinya meningkat menjadi 867.012,77 ton, dan pada Tahun 2022 menurun menjadi 744.408,70 ton, sementara pada Tahun 2023 produksi padi kembali meningkat hingga mencapai 821.367,41 ton, Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 761.936,39 ton. Dilihat dari sebaran produksi padi pada Tahun 2024, produksi padi terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 251.792,84 ton atau sebesar 33,05 persen dari total produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai sebanyak 159.031,44 ton (20,87 persen), dan Kabupaten Poso sebanyak 65.122,25 ton (8,55 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	3 010,66	1 880,25	992,99	2.015,93	1.885,27
Banggai	150 885,18	163 827,06	141.013,22	178.758,04	159.031,44
Morowali	42 068,22	44 595,26	35.483,73	26.388,96	29.817,70
Poso	99 359,51	101 237,39	77.879,42	94.049,50	65.122,25
Donggala	66 260,44	60 479,93	57.266,29	60.287,14	55.889,70
Tolitoli	83 556,72	63 800,78	57.937,49	55.429,25	60.469,03
Buol	20 866,59	26 235,29	16.798,44	18.310,71	15.384,52
Parigi Moutong	219 829,78	279 343,58	245.039,66	250.739,31	251.792,84
Tojo Una–Una	6 660,20	5 233,28	5.677,34	7.599,94	8.484,55
Sigi	83 143,90	87 082,49	80.066,14	94.957,24	83.689,33
Banggai Laut	–	–	–	–	5,03
Morowali Utara	34 133,56	32 533,18	25.365,23	32.146,12	29.533,41
Palu	333,5	764,28	888,75	685,27	831,32
Sulawesi Tengah	**792.248,84**	**867.012,77**	**744.408,70**	**821.367,41**	**761.936,39**

Sumber: BPS, Sulteng dalam Angka 2025

Pada Tahun 2023, struktur pendidikan pengelola usaha pertanian perorangan di Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Porsi terbesar berasal dari kelompok tamat SD sebesar 212.453 orang, selanjutnya disusul SLTA/Sederajat, SLTP/Sederajat, tidak/belum tamat SD kemudian tidak/belum pernah sekolah. Sementara itu, kontribusi lulusan Diploma (D1–D3) dan Sarjana (D4/S1 ke atas) relatif kecil dibanding jenjang lainnya. Pola ini menggambarkan bahwa sektor pertanian di Sulawesi Tengah masih ditopang oleh tenaga kerja dengan latar Pendidikan dasar–menengah.

Tabel 2.2
Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian (Orang)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	20.673
Tidak/Belum tamat SD	21.659
SD/Sederajat	212.453
SLTP/Sederajat	82.182
SLTA/Sederajat Pertanian	8.308
SLTA/Sederajat Non Pertanian	88.853
SLTA/Sederajat	97.161

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian (Orang)
D1/D2/D3 Pertanian	436
D1/D2/D3 Non Pertanian	4.265
D1/D2/D3	4.701
D4/S1 Pertanian	1.370
D4/S1 Non Pertanian	16.281
D4/D1	17.651
Profesi	208
S2/S3 Pertanian	112
S2/S3 Non Pertanian	654
S2/S3	766
Total	**457.454**

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2023

2. Potensi Sektor Perkebunan

Produksi tanaman kelapa selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2020 produksi tanaman kelapa 195.160,06 ton meningkat menjadi 195.179,72 ton pada Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 201.665,20 ton, sementara pada Tahun 2023 produksi kelapa menurun hingga mencapai 188.329,76 ton selanjutnya pada Tahun 2024 produksi kelapa meningkat menjadi 206.625,25 ton atau mengalami peningkatan sebesar 9,71 persen pada Tahun 2024.

Dilihat dari sebaran produksi kelapa di wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2024, produksi kelapa terbesar berada di Kabupaten Banggai yakni sebanyak 53.421,66 ton atau sebesar 25,85 persen dari total produksi kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 35.891,59 ton (17,37 persen), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 33.620,88 ton (16,27 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perkembangan Produksi Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	10 200,05	10.210,05	10.496,20	10.496,70	10.200,08
Banggai	49 116,34	49.120,34	49.760,01	49.819,74	53.421,66
Morowali	1 207,30	1.207,30	733,49	1.195,72	1.334,50

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Poso	4 394,21	4.395,21	5.310,35	5.310,49	13.367,16
Donggala	30 139,10	30.139,10	31.874,22	22.760,64	24.795,65
Tolitoli	17 742,52	17.743,52	17.474,89	17.474,89	19.011,42
Buol	8 035,50	8.035,70	8.000,85	4.381,23	6.871,13
Parigi Moutong	36 571,19	36.571,85	36.205,99	35.891,59	35.891,59
Tojo Una–Una	31 245,74	31.246,55	33.164,23	33.150,39	33.620,88
Sigi	2 670,90	2.671,91	3.070,25	3.070,25	3.069,45
Banggai Laut	3 161,42	3.161,72	3.688,25	3.834,04	3.984,42
Morowali Utara	401,53	401,95	488,77	506,38	619,62
Palu	274,26	274,52	397,70	437,70	437,70
Sulawesi Tengah	**195 160,06**	**195.179,72**	**201.665,20**	**188.329,76**	**206.625,25**

Sumber: BPS, 2025

Produksi tanaman kakao sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terlihat pada Tahun 2020 produksi tanaman kakao sebanyak 127.206,86 ton meningkat menjadi 130.649,96 ton pada Tahun 2021, selanjutnya pada Tahun 2022 menurun menjadi 125.989,47 ton, sementara pada Tahun 2023 produksi kakao mengalami peningkatan menjadi 128.255,28 ton, pada Tahun 2024 produksi kakao mengalami penurunan menjadi 125.202,15 ton atau produksinya mengalami penurunan sebesar -2,38 persen pada Tahun 2024.

Dilihat dari sebaran produksi kakao pada Tahun 2024, produksi kakao terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong yakni sebanyak 28.827,11 ton atau sebesar 22,91 persen dari total produksi kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Poso sebanyak 22.485,90 ton (17,96 persen), dan Kabupaten Donggala sebanyak 17.686,01 ton (14,13 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kakao di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Kakao (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	277,50	276,00	270,00	275,00	260,05
Banggai	15.530,30	15.534,05	15.338,48	15.418,21	16.292,40
Morowali	697,17	1.870,00	1.727,75	1.733,00	969,76
Poso	23.992,32	23.450,00	24.498,20	25.291,25	22.485,90
Donggala	17,952,48	18.200,00	18.287,62	18.314,10	17.686,01
Tolitoli	10.133,95	8.241,40	7.085,28	7.285,25	7.316,94
Buol	3.105,32	2.885,06	2.173,23	2.511,21	2.022,65
Parigi Moutong	23.323,80	28.690,84	28.713,23	28.827,11	28.689,40
Tojo Una-Una	5.200,00	5.451,20	3.603,60	3.995,75	3.604,22
Sigi	19.356,00	19.726,00	19.498,65	19.511,26	17.522,18
Banggai Laut	94,67	91,00	85,85	85,00	191,14
Morowali Utara	5.491,05	6.182.26	4.645.30	4.955,71	8.157,25
Kota Palu	52,30	52.15	52.30	52,43	4,25
Sulawesi Tengah	**127.206,86**	**130.649,96**	**125.989,47**	**128.255,28**	**125.202,15**

Sumber: BPS, 2025

Produksi tanaman kelapa sawit sepanjang periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat pada Tahun 2020 produksi tanaman kelapa sawit sebanyak 272.275,15 ton meningkat menjadi 310.435,97 ton pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 139.055,48 ton, dan Tahun 2023 produksi kelapa sawit mengalami penurunan signifikan menjadi 190.302,46 ton, selanjutnya pada Tahun 2024 produksi tanaman kelapa sawit mengalami penurunan menjadi 164.117,15 ton atau menurun sebesar -13,76 persen pada Tahun 2024.

Sementara dilihat dari sebaran produksi kelapa sawit di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, produksi kelapa sawit terbesar berada di Kabupaten Morowali yakni sebanyak 69.191,68 ton atau sebesar 42,16 persen dari total produksi kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai yaitu sebanyak 35.540,94 ton (21,66 persen), dan Kabupaten Donggala yaitu sebanyak 19.469,75 ton (11,86 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kelapa sawit di Provinsi

Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa Sawit (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-
Banggai	51 928,98	52 674,28	35.540,94	35.540,94	35.540,94
Morowali	77 284,90	74 092,52	48.360,13	62.324,06	69.191,68
Poso	49,22	2 995,77	3.371,71	3.371,71	4.248,49
Donggala	52 467,11	52 587,38	17.074,33	19.456,52	19.469,75
Tolitoli	4 132,60	6 537,60	1.167,50	9.479,00	1.440,50
Buol	63 781,47	70 170,99	16.850,37	43.050,00	17.770,70
Parigi Moutong	194,7	194,71	218,51	216,32	216,32
Tojo Una-Una	-	-	-	164,45	164,45
Sigi	-	-	15,00	22,50	22,5
Banggai Laut	-	-	-	-	-
Morowali Utara	22 436,17	51 182,72	16.457,00	16.676,96	16.051,83
Kota Palu	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	**272 275,15**	**310 435,97**	**139.055,48**	**190.302,46**	**164.117,15**

Sumber: BPS, 2025.

3. Potensi Sektor Peternakan

Perkembangan pupulasi ternak sapi sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni pada Tahun 2020 populasi sapi sebanyak 402.191 ekor meningkat menjadi 431.339 ekor pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 populasinya kembali meningkat menjadi 463.563 ekor, dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 522.794 ekor serta pada Tahun 2024 mengalami peningkatan hingga menjadi 550.969 ekor atau meningkat sebesar 5,39 persen pada Tahun 2024.

Sementara dilihat dari sebaran populasi sapi di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, populasi terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai yakni sebanyak 150.266 ekor atau sebesar 27,27 persen dari total populasi sapi di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Sigi sebanyak 64.330 ekor

(11,68%), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 48.175 ekor (8,74%). Secara rinci mengenai perkembangan populasi sapi di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2020-2024

Kabupaten/Kota	Populasi Sapi Potong (ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	19.403	20.336	20.455	20.624	20.793
Banggai	101.541	113.169	125.528	137.897	150.266
Morowali	9.020	9.394	11.263	13.142	15.021
Poso	21.353	21.606	21.705	21.784	21.863
Donggala	40.485	41.227	42.229	43.181	44.133
Tolitoli	17.891	18 903	19.935	20.967	21.999
Buol	30.518	33 052	35.586	38.142	40.698
Parigi Moutong	32.796	34 282	35.482	36.652	37.822
Tojo Una–Una	40.023	43 579	47.757	47.966	48.175
Sigi	47.262	51 504	56.131	60.728	64.330
Banggai Laut	3.112	3 229	3.298	3.377	3.456
Morowali Utara	31.797	34 049	36.627	39.167	41.707
Palu	6.990	7 009	7.567	39.167	40.706
Sulawesi Tengah	**402.191**	**431.339**	**463.563**	**522.794**	**550.969**

Sumber: BPS, 2025.

4. Potensi Sektor Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada Tahun 2021 produksinya sebanyak 207.940,50 ton dengan nilai produksi Rp.4.566.227.302.270,- mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga produksinya mencapai 373.509,36 ton dengan nilai produksi Rp.8.140.993.918.900,- pada Tahun 2023, selanjutnya pada Tahun 2024 produksinya menjadi 291.013,15 ton dengan nilai produksi mencapai Rp.5.282.662.044,61.

Dilihat dari sebaran produksi perikanan tangkap di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, produksi perikanan tangkap terbanyak terdapat di Kabupaten Donggala dengan produksi mencapai 59.455,22 ton

(20,43%) dengan nilai produksi sebesar Rp.627.359.719.300,- menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai Laut dengan produksi mencapai 40.473,8 ton (13,91%) dan nilai produksi sebesar Rp. 349.665.204.300,-, dan Kabupaten Morowali dengan produksi mencapai 33.036,9 ton (11,35%) dan nilai produksi sebesar Rp. 386.898.404.300,-. Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
DI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

KAB/KOTA	2021		2022		2023		2024	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)
Kabupaten Banggai Kepulauan	10.223,50	251.851.247,90	10.790,40	359.551.034,60	20.791,90	588.359.200,00	24.402,30	497.865.604,30
Kabupaten Banggai	22.657,90	482.920.820,00	23.618,20	672.217.905,00	57.963,90	298.339.938,10	28.261,70	497.865.604,30
Kabupaten Morowali	33.086,90	720.511.550,00	36.392,20	1.223.827.250,00	36.414,70	717.563.100,00	33.036,90	386.898.404,30
Kabupaten Poso	8.382,80	227.896.774,50	8.133,29	114.113.955,00	5.646,56	161.867.976,00	7.670,08	658.266.719,30
Kabupaten Donggala	25.184,40	440.269.553,87	30.423,20	779.403.689,43	115.335,00	3.414.536.443,00	59.455,22	627.359.719,30
Kabupaten Toli-Toli	18.436,80	436.448.292,20	20.239,20	504.345.300,00	20.031,40	483.347.796,10	14.455,30	408.868.052,80
Kabupaten Buol	22.397,60	435.414.000,00	23.286,10	244.300.450,00	20.035,10	465.372.535,60	21.118,70	503.686.704,30
Kabupaten Parigi Moutong	20.814,80	494.736.104,70	21.789,40	492.086.946,80	39.872,30	836.067.414,00	31.600,59	444.249.105,30
Kabupaten Tojo Una-Una	13.430,50	398.938.176,40	14.146,00	396.820.326,40	15.854,20	564.572.000,00	26.532,40	345.549.054,30
Kabupaten Morowali Utara	2.446,60	75.098.973,20	2.455,10	70.669.988,90	1.789,90	66.385.146,10	1.870,02	490.863.762,11
Kabupaten Banggai Laut	29.609,20	556.767.801,50	31.640,60	841.654.723,80	37.517,40	636.779.100,00	40.473,80	349.665.204,30
Kota Palu	1.119,30	45.117.000,00	1.264,60	114.354.500,00	1.897,30	75.899.500,00	2.070,60	70.704.000,00
Kabupaten Sigi	150,20	257.008,00	135,00	231.000,00	359,70	529.000,00	65,55	820.110,00
TOTAL	**207.940,50**	**4.566.227.302,27**	**224.313,29**	**5.813.577.069,93**	**373.509,36**	**8.309.619.148,90**	**291.013,15**	**5.282.662.044,61**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025.

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 731.966,58 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.5.147.292.566.000 pada Tahun 2021 meningkat produksinya menjadi 803.370,48 ton dengan nilai produksi mencapai Rp.4.964.793.465.000,- pada Tahun 2024.

Selanjutnya dilihat dari sebaran produksi perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, produksi perikanan budidaya terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan produksi mencapai 696.390,55 ton (86,68%) dan nilai produksi mencapai Rp.2.091.202.016,000,-, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai Laut dengan produksi sebanyak 27.429,72 ton (3,41%) dan nilai produksi sebesar Rp.69.670.025.000,-, dan Kabupaten Donggala dengan produksi sebanyak 22.089,00 ton (2,75%) dan nilai produksi sebesar Rp.1.158.165.000.000,-. Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan produksi perikanan budidaya di Provinsi

Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

KABUPATEN/KOTA	2021		2022		2023		2024	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	569.925,00	2.724.214.000,00	562.747,81	5.645.516.784,40	631.354,15	7.010.181.520,00	696.390,55	2.091.202.016,00
KABUPATEN BANGGAI	4.328,43	51.655.585,00	3.002,82	301.246.820,00	623,88	97.054.480,00	3.505,95	180.257.190,00
KABUPATEN MOROWALI	71.600,67	151.749.500,00	48.174,60	312.570.525,00	34.291,30	191.286.000,00	11.031,54	70.325.607,00
KABUPATEN POSO	3.777,81	77.724.306,00	4.118,35	95.015.509,00	4.496,38	93.817.871,00	4.928,49	97.171.511,00
KABUPATEN DONGGALA	20.344,00	928.760.000,00	20.551,00	1.891.152.000,00	21.778,00	1.142.704.000,00	22.089,00	1.158.165.000,00
KABUPATEN TOLI TOLI	591,02	18.695.660,00	919,58	115.251.965,00	1.565,75	117.290.290,00	2.047,65	132.897.960,00
KABUPATEN BUOL	227,69	9.619.450,00	710,33	52.104.610,00	716,74	32.151.205,00	728,10	32.217.845,00
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	26.510,74	976.732.250,00	14.796,60	616.255.907,00	24.378,23	762.361.626,00	20.004,18	910.908.505,00
KABUPATEN TOJO UNA-UNA	2.643,03	23.191.275,00	7.873,38	72.990.790,00	8.226,39	57.060.950,00	8.579,28	71.035.458,00
KABUPATEN SIGI	616,67	24.648.790,00	767,32	31.865.747,00	899,47	36.149.100,00	843,66	32.835.100,00
KOTA PALU	123,60	3.622.000,00	124,35	3.844.385,00	124,75	3.696.250,00	131,71	4.020.150,00
KABUPATEN BANGGAI LAUT	28.831,50	130.061.362,00	29.039,43	73.782.550,00	29.707,63	75.470.850,00	27.429,72	69.670.025,00
KABUPATEN MOROWALI UTARA	2.446,43	26.618.388,00	3.503,03	140.663.910,00	5.357,66	139.639.512,00	5.660,64	114.087.098,00
PROVINSI SULAWESI TENGAH	**731.966,58**	**5.147.292.566,00**	**696.328,60**	**9.352.261.502,40**	**763.520,32**	**9.758.863.654,00**	**803.370,46**	**4.964.793.465,00**

Sumber: BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah 2025.

Diperlukan tindakan awal berupa analisis inventarisasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan. Analisis inventarisasi yang dimaksud adalah tahapan kerja untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi keberadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, pestisida, akses lahan, air, pembiayaan, dan infrastruktur pendukung lainnya, serta kondisi kelaikan dan kecukupan jumlahnya untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. Analisis ini penting untuk memahami tantangan dan potensi, merencanakan perbaikan, dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian, demikian juga untuk sektor perikanan dengan melihat ketersediaan sarana pendukung seperti bibit ikan berkualitas, ketersediaan air bersih, sarana pelabuhan, kapal penangkap ikan, alat tangkap dan alat bantu tangkap ikan (*fish finder*) untuk meningkatkan volume hasil panen dan hasil tangkap (Gambar 2.1).



Gambar 2.1
Tahapan Kerja Analisis Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan kehutanan

5. Potensi Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,4 persen pada Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari mancanegara dan nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sebesar 1.824.916 wisatawan namun Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 714.703 wisatawan pada Tahun 2021. Melalui berbagai upaya akhirnya Tahun 2021 hingga Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan yang signifikan yakni, Tahun 2022 menjadi 1.321.238 wisatawan, Tahun 2023 sebanyak 5.148.361 wisatawan dan terus mengalami peningkatan menjadi 9.240.941 wisatawan pada Tahun 2024.

Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021 dibandingkan capaian jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2020, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang secara global berdampak pada terbatasnya mobilitas termasuk dalam berwisata. Tetapi di Tahun 2022, sektor pariwisata mulai bangkit kembali dengan pemberlakuan perjalanan wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang membuat capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara meningkat menjadi 9.240.941 wisatawan Tahun 2024.

Selanjutnya secara detail mengenai perkembangan kunjungan wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
	Mancanegara	Domestik	
2020	868	475.746	476.614
2021	178	484.841	485019
2022	3.280	1.317.958	1.321.238
2023	8.382	5.139.979	5.148.361
2024	23.973	9.216.969	9.240.942

Sumber: BPS, 2025

Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sebanyak 5.148.361 kunjungan meningkat Tahun 2024 menjadi 9.240.942 wisatawan. Jumlah kunjungan terbanyak berada di Kabupaten Morowali dengan jumlah kunjungan 1,338,490 kemudian Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah kunjungan wisatawan yaitu 566,158 kunjungan. Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kunjungan terkecil yaitu sebanyak 104,837 kunjungan. Sedangkan untuk Tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dengan capaian 9.240.942 kunjungan, dengan jumlah kunjungan terbanyak adalah di Kota Palu sebanyak 2.228.772 dan Kabupaten Morowali sebanyak 1.126.632, sedangkan jumlah kunjungan terkecil adalah di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 151.775 kunjungan.

Tabel 2.10
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2020-2024

No.	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	KOTA PALU	206,418	251,360	165,544	545,446	2,228,772
2	DONGGALA	19,100	18,719	119,192	312,897	906,029
3	SIGI	21,273	27,792	123,910	184,609	956,965
4	PARIGI MOUTONG	681	1,513	2,770	566,158	908,889
5	POSO	19,588	32,674	287,100	452,373	730,037
6	TOJO UNA-UNA	3,361	8,866	282,117	190,070	305,774
7	BANGGAI	55,644	45,310	62,680	504,501	475,926
8	BANGGAI KEPULAUAN	39,576	12,095	120,178	104,837	288,966
9	BANGGAI LAUT	22,816	27,266	18,919	133,155	151,775
10	MOROWALI	5,495	7,274	9,003	1,338,490	1,126,632
11	MOROWALI UTARA	2,181	4,856	7,222	425,160	628,419
12	BUOL	40,447	27,230	9,594	133,715	211,746
13	TOLI-TOLI	40,034	20,064	113,009	256,950	321,012
SULAWESI TENGAH		**476,614**	**485,019**	**1,321,238**	**5,148,361**	**9,240,942**

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Selanjutnya, beberapa potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan ke depan di Sulawesi Tengah yaitu:

a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Danau Paisupok Desa Wisata Luk Panenteng, Desa Wisata Manggis, Desa Wisata Lopito Bone Pololoba, Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Lilito, Desa Wisata Paleleh, Desa wisata mandaan Tanjung dako, Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;
c. **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Desa Wisata Towale, Desa Wisata Boneoge, Desa Wisata Ekowisata Tosale, Desa Wisata Masaingi, Pantai Kura – Kura, Sangganipa Beach, Pusat laut Towale, Prince Jhon Dive Resort, Danau Talaga, Pantai Bambarano, Hutan Mangrove Kabonga, Pantai Kaluku, Danau Rano, Danau Talaga, Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega

Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.

d. **Kabupaten Morowali** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu wisata Pesona Pulau Langala, Cagar Alam Morowali, Pulau Sombori, Menui Kepulauan, Mesjid Tua Bungku, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Air Terjun Pofua'a, Desa Wisata Bente, Desa Wisata Mbokita.
e. **Kabupaten Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Ungkea, Desa Wisata Korolaki, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah.
f. **Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Karosendaya, Desa Wisata Sausu Tambu, Desa Pelawa Kayu Bura, Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
g. **Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu 24 Situs Warisan Geologi Poso (Goa Latea, Tando bancea, Ngoyontava, Makilo, Lamusa, Tangkadao, Wawondoda 1, Wawondoda 2, kandela 1, Kandela 2, Tangkaboba, Watumpogaa, Posunga kodi, Posunga bangke, Gua Pamona, Gua Tonoho, Gua Labu 1, Gua Labu 2, Air Terjun Kolori, Taman Nasional Lore Lindu, Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Situs Megalith di Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalit Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs

Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;

h. **Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.

i. **Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Nasional Kepulauan Togean, Desa Wisata Labuan Belanda, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matako, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri.

j. **Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Desa Wisata Agromulyo, Desa Wisata Longkonga Barat, Desa Wisata Jaya Bhakti, Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permadian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;

k. **Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya dan Hutan Kota.

l. **Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Paralayang Desa Wayu, Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung

Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air TerjunTamunggu Indah, Desa Wisata Karunia Anggrek.

m. **Kabupaten Banggai Laut** dengan obyek dan daya tarik wisata Desa Wisata Bone Baru, Desa Wisata Mbuang-Mbuang, Pantai Lokotoi Oyama, Paisu matube, Pantai Lalong, Desa Lantimbung, Pantai Pasir Merah Bone Mute, Desa Dungkean.

6. Potensi Pertambangan

Sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian telah memberikan andil cukup besar dalam mendorong perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya nikel. Wilayah Sulawesi Tengah kaya akan nikel dan menjadi salah satu penggerak utama ekspor serta ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor pertambangan dan Penggalian berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 14,64 persen.

Potensi Mineral yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah yaitu nikel dengan luas areal bahan galian mencapai 322.200 Ha dengan besar cadangan diperkirakan mencapai 8.000.000 WMT. Cadangan Infered Imonit 14.062,20 juta ton, gelena potensi cadangan sebesar 100.000.000 ton, Emas 16.000.000 ton, Molibdenum 100 juta ton, Granit potensi cadangan terukur berdasarkan pemetaan semi mikro 1:50.000 sebesar 259.461.283.470 m^3.

Potensi cadangan minyak dan gas bumi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di dua Kabupaten yaitu, di Lapangan Tiaka Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali dan Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dengan kapasitas 16,5-23 juta barel per Tahun dan potensi gas bumi terdapat di Dongi Senoro Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan kapasitas 1,6 triliun kaki kubik.

Potensi cadangan emas yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu

- Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha,
- Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha,

- Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha,
- Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan
- Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
I.	**Batuan Ornamen/poles**		
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM
2	Marmer/pualam dan Sarpentin	Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una-una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
		Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	
II.	**Batuan Bahan Konstruksi**		
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan di semua Kabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakan batuan yang terdiri dari batuanGranit, Granodiorit, Basal, Gabro ,Andesit, Dasit, Serpentinit, Dunit, juga dari Breksi dan Konglomerat Di Kab. Donggala dan Kota Paludiantar-pulaukan ke Kalimantan Timur.
III.	**Mineral Non Logam lainnya**		

No	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, Banggai Kepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, Banggai Kepulauan mempunyai potensi Bahan Baku Semen yang sudah melalui studi Kelayakan dan AMDAL.
5	Lempung	Disemua Kabupaten se-Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata, Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan	Umumnya mempunyai kadar SiO3 kurang dari 75 %
7.	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Una-una	Berupa Sisipan pada batuan batuan Ultrabasa Pertanian (Kaptan), Kadar Mg 03
9.	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur (Magnesium) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng, 2024.

7. Luas Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), penggunaan lahan adalah modifikasi lahan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, permukiman. Sedangkan menurut Arsyad (1989) penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil dan spiritual. Berikut disajikan penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

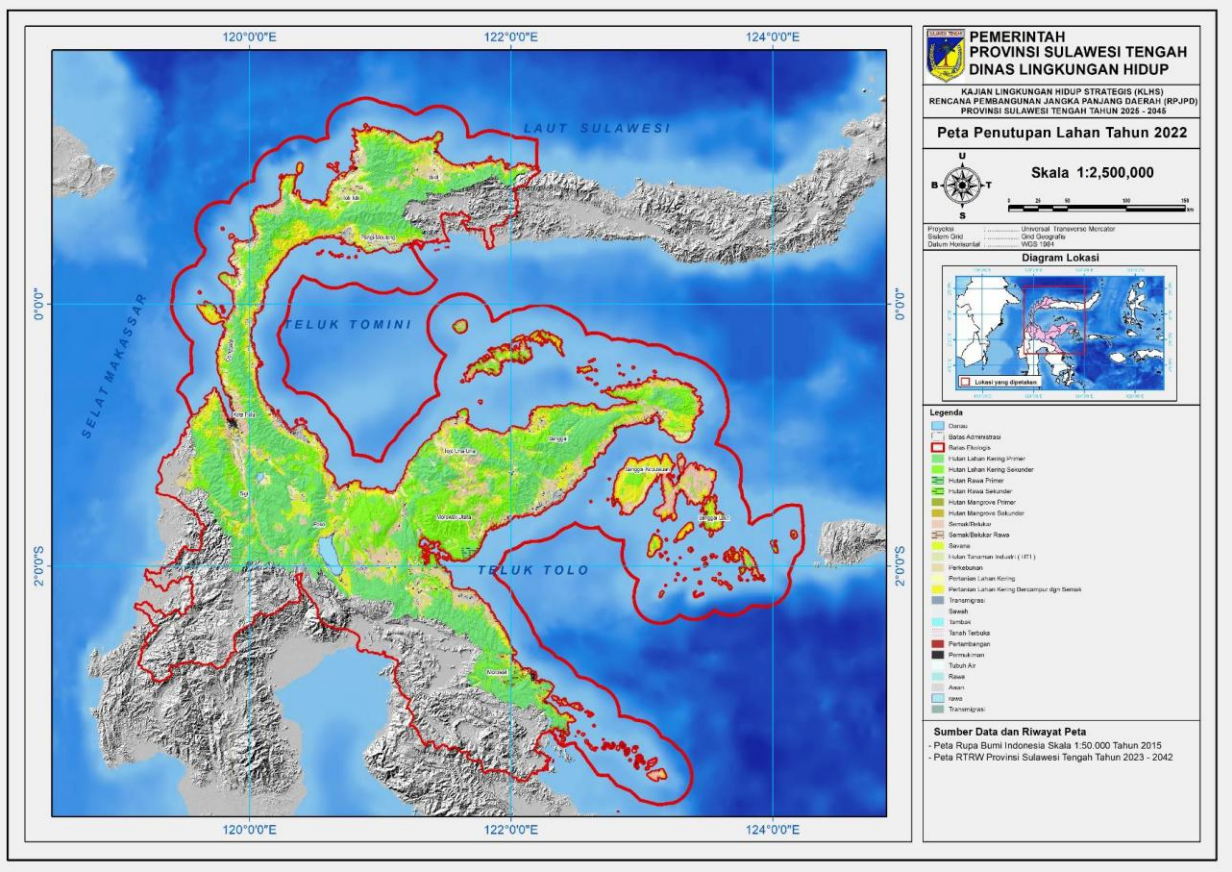
Tabel 2.12
Luas Penggunaan Lahan di Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSEN LUAS
1	Badan Air	69.971,01	1,14%
2	Bandara / Pelabuhan	588,45	0,01%
3	Belukar	535.350,13	8,70%
4	Belukar Rawa	7.533,52	0,12%
5	Hutan Lahan Kering Primer	2.187.297,12	35,53%
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.550.361,71	25,19%
7	Hutan Mangrove Primer	13.830,71	0,22%

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSEN LUAS
1	Badan Air	69.971,01	1,14%
8	Hutan Mangrove Sekunder	29.172,55	0,47%
9	Hutan Rawa Primer	7.764,67	0,13%
10	Hutan Rawa Sekunder	1.489,24	0,02%
11	Hutan Tanaman	9.199,35	0,15%
12	Pemukiman	72.148,43	1,17%
13	Perkebunan	302.966,61	4,92%
14	Pertambangan	12.861,60	0,21%
15	Pertanian Lahan Kering	282.138,47	4,58%
16	Pertanian Lahan Kering Campur	805.255,91	13,08%
17	Rawa	782,96	0,01%
18	Rumput	63.637,69	1,03%
19	Sawah	151.795,87	2,47%
20	Tambak	20.881,02	0,34%
21	Tanah Kosong	23.760,19	0,39%
22	Transmigrasi	7.077,64	0,11%
	Grand Total	**6.155.864,87**	**100,00%**

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel luas penggunaan lahan tersebut, terdapat penggunaan lahan terbesar di Sulawesi Tengah adalah hutan lahan kering primer sebesar 35,53 persen, hutan lahan kering sekunder 25,19 persen, dan pertanian lahan kering campur 13,08 persen, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Gambar 2.2
Peta Penutupan Lahan Sulawesi Tengah

8. Cagar Biosfer di Provinsi Sulawesi Tengah

Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik dan atau ekosistem yang mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nasional Nomor 32 Tahun 2024: Pasal 1 (ayat 19), Cagar Biosfer adalah kawasan terpadu yang mengharmonisasikan kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pembangunan sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberadaannya diakui di tingkat internasional. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1), dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kawasan Suaka Alam dan/atau kawasan tertentu lainnya dapat diusulkan sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya. Dalam hal status internasional, penetapan Cagar Biosfer diberikan oleh UNESCO, melalui Program Manusia

dan Bisofer (*Man and Biosfer*/MAB) di bawah koordinasi Komite Nasional MAB UNESCO Indonesia pada Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hingga Tahun 2023, terdapat 20 Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO dan 2 diantaranya terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Cagar Biofer Lore Lindu dan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una.

A. Cagar Biosfer Lore Lindu

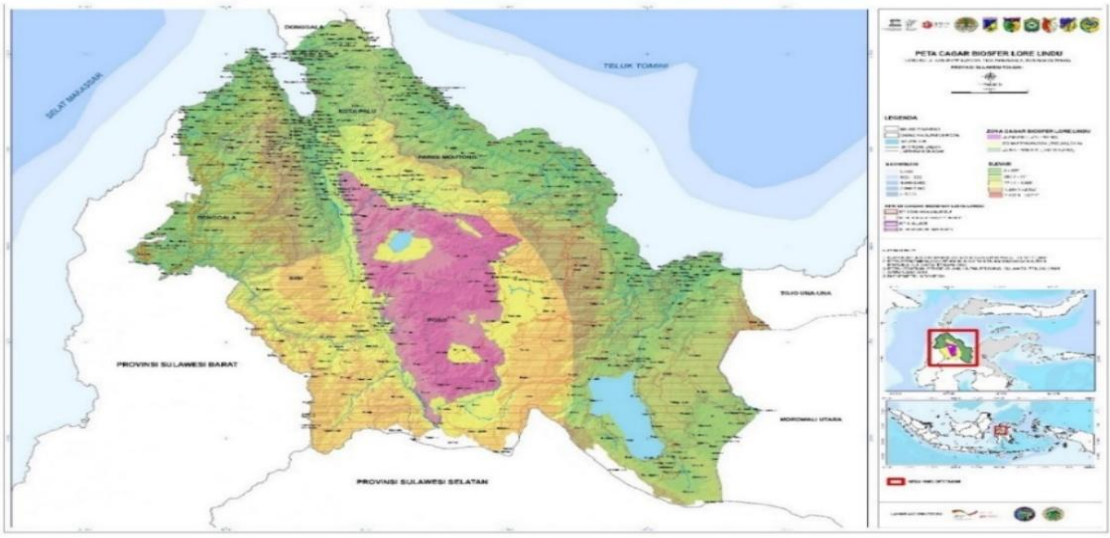
Cagar Biosfer Lore Lindu, yang ditetapkan pada Tahun 1977, mempunyai tujuan utama dari pengembangan Cagar Biosfer Lore Lindu adalah untuk mewujudkan pembangunan di kawasan Lore Lindu secara berkelanjutan. Pengelolaan daerah yang luas ini adalah penting untuk mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Secara administratif, Cagar Biosfer Lore Lindu terletak di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu. Zona inti Cagar Biosfer berupa Taman Nasional Lore Lindu seluas 215.733,70 Ha yang terletak di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Sedangkan Zona Penyangga seluas 510.223 Ha terletak di Kabuapten Poso, Kabupaten Sigi. Sedangkan Zona transisi seluas 948.198,30 Ha terletak di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu. Desa-desa yang berada didalam kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu terbagi atas dua zona yaitu Zona Penyangga (Kabupaten Sigi sebanyak 92 desa dan Kabupaten Poso sebanyak 38 desa) dan Zona Transisi (Kabupaten Sigi 66 desa, Kabupaten Donggala 72 desa, Kabupaten Poso 119 desa, Kabupaten Parigi Moutong 59 dan Kota Palu 43 kelurahan). Jumlah total desa di Zona Penyangga yaitu 130 desa dan total desa/kelurahan di Zona Transisi yaitu 359.

Area inti Cagar Biosfer Lore Lindu adalah Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang dibentuk merupakan gabungan dari tiga kawasan yaitu Suaka Margasatwa Lore Kalamanta dengan luas 131.000 Ha (SK Menteri Pertanian No. 522/Kpts/Um/10/37 tanggal 20 Oktober 1973; Hutan Wisata dan Hutan Lindung Danau Lindu dengan luas 31.000 Ha (SK Menteri Pertanian No.46/Kpts/Um/1/78 tanggal 25 Januari 1978) dan Suaka Margasatwa Sungai Sopu–Sungai Gumbasa dengan luas 67.000 Ha (SK

Menteri Pertanian No. 1012/Kpts/Um/12/81 tanggal 10 November 1982). Luas gabungan ketiga kawasan konservasi tersebut seluas 229.000 Ha. Namun demikian, berdasarkan surat pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang pengumuman sebagai Calon Taman Nasional dengan luasan 231.000 Ha sebagai tindak lanjut Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali Tahun 1982. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/1993 pada tanggal 5 Oktober 1993, luas Taman Nasional Lore Lindu adalah ± 229.000 Ha. Selanjutnya dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Kpts-II/2007 tanggal 1 Februari 2007, status pengelola Taman Nasional Lore Lindu berubah yang semula Balai Taman Nasional Lore Lindu menjadi Balai Besar Taman Nasional Tipe A, dengan 3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (BPTNW), yaitu BPTNW I Saluki, BPTNW II Makmur dan BPTNW III Poso. Setelah dilaksanakan pengukuran penataan batas oleh BIPHUT dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 464/Kpts-II/1999 pada tanggal 23 Juni 1999 dengan luas 217.991,18 Ha. Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan salah satu primadona tujuan wisata alam Provinsi Sulawesi Tengah (merupakan Daerah Tujuan Wisata ke-26). TNLL secara administratif terletak di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi sekitar 127.185 Ha dan Kabupaten Poso sekitar 107.321 Ha.

Dalam perjalanan proses pengelolaannya, zonasi Cagar Biosfer Lore Lindu kemudian disempurnakan pengelompokkan zona yang ada di dalamnya sehingga diperoleh *update* zonasi yaitu, Zona Inti seluas 215.733,70 Ha; Zona Penyangga 210.223 Ha; dan Zona Transisi seluas 948.198,30 Ha. Kawasan dan luas wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Sumber: Periodic review lore lindu boisphere reserve 2013-2023, Tahun 2024.

Gambar 2.3
Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu

Selanjutnya mengenai koordinat terluar dari Cagar Biosfer Lore Lindu di sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Koordinat terluar dari Cagar Biosfer Lore Lindu

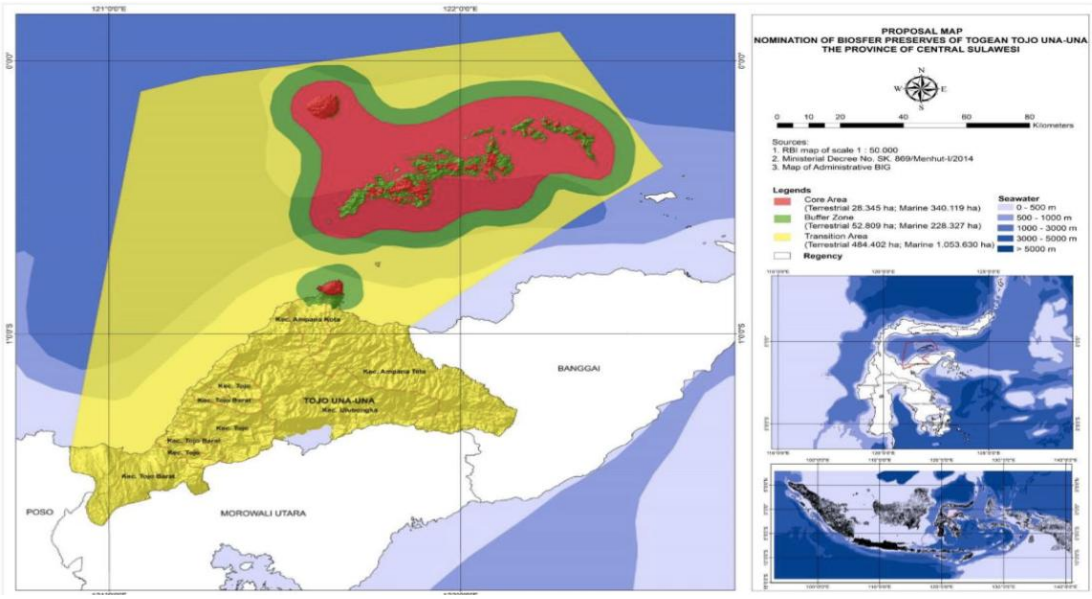
NO	LOKASI	KOORDINAT GEOGRAFIK
1	Taman Nasional Lore Lindu	Most central point: 119 ˚ 49' 03,77" BT 0˚ 39' 41,36" LS
2	Desa Malie Kabupaten Poso	Northernmost point: 120 ˚ 52' 38,24" BT 1˚ 24' 54" LS
3	Desa Mayoa Kabupaten Poso	Southernmost point: 120 ˚ 46' 11,80" BT 2˚ 13' 07,55" LS
4	Desa Polanto Jaya Kabupaten Donggala	Westernmost point: 119 ˚ 27' 47,16" BT 1˚ 19' 28,94" LS
5	Desa Labuan Kabupaten Donggala	Easternmost point: 120˚ 11' 09,13" BT 1˚ 27' 40,95" LS

Sumber: Periodic *Review Lore Lindu Biosphere Reserve* 2013-2023, 2024.

B. Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una

Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO pada tanggal 19 Juni 2019, dengan luas daratan 567.562 Ha dan lautan722.076 Ha dengan total 2.187.632 Ha. Termasuk dalamnya Zona Inti seluas 368.464 Ha (Taman Nasional Kepulauan Togean dan Cagar

Alam Tanjung Api), Zona Penyangga 281.136 Ha yang masuk dalam APL daratan di Kepulauan Togan dan Perairan/Laut mengelilingi wilayah perairan kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean dan Tanjung Api yang menjadi kewenangan Provinsi . Sedangkan Zona Transisi dengan luasan 1.538.032 Ha termasuk didalamnya APL perairan/laut Kabupaten Tojo Una-Una serta APL dan kawasan hutan (KPH Sivia Patuju) daratan Kabupaten Tojo Una-Una di Pulau Sulawesi.



Sumber: Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, 2024.

Gambar 2.4
Kawasan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una

C. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pengetahuan terhadap kondisi lingkungan hidup suatu wilayah menjadi sangat penting terutama dalam konteks perencanaan program dan kegiatan pembangunan serta kebutuhan evaluasi dalam proses pelaksanaannya. Provinsi Sulawesi Tengah yang antara lain memiliki daya tarik dengan keberadaan potensi sumber daya alam cukup beragam, sejauh ini telah mendorong berbagai upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk menjadi salah satu modal pembangunan ekonomi di daerah, yang tentunya diarahkan pada peningkatkan pendapatan daerah dan diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari penetapan beberapa kawasan strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama terkait dengan sektor pertambangan, telah

menjadi daya tarik penduduk sebagai tenaga kerja yang bermigrasi dari berbagai daerah sekitar wilayah Sulawesi Tengah. Sementara di sisi lain, potensi dan ancaman bencana di wilayah Sulawesi Tengah juga perlu disikapi dengan membudayakan perilaku masyarakat yang sadar dan siaga bencana, karena dapat berdampak terhadap kegiatan pembangunan. Hal ini karena selain dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kejadian bencana juga dapat mengancam keselamatan penduduk yang ada sekitar wilayah potensi bencana. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan fungsi dan manfaat kepada manusia. Tentunya kondisi tersebut dapat berimbas pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Tekanan jumlah penduduk yang besar tentu akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan lahan untuk bermukim.

Dalam hal ini, di Sulawesi Tengah akan berdampak terhadap kebutuhan akan ruang hidup dan kebijakan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan dasar, utamanya terkait air bersih dan pangan secara berkelanjutan sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut harus menjadi perhatian sebagai salah upaya dan kebijakan dalam mewujudkan kesetimbangan daya dukung lingkungan hidup. Kajian daya dukung lingkungan hidup yang dilakukan memanfaatkan data dari berbagai sumber dan beberapa-hasil studi yang tersedia untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah.

1) Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Lingkungan hidup memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat

sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam KLHS ini mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:297/Menlhk/Setjen/2019 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional yang merupakan salah satu amanat Pasal 12 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

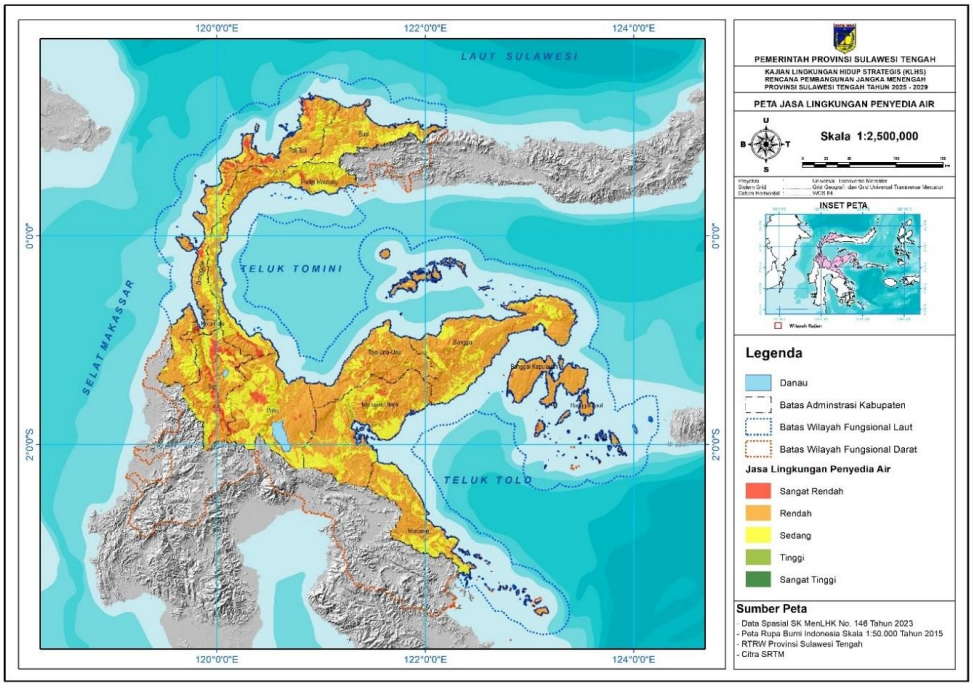
(a) Jasa Ekosistem Penyedia Air

Air, makanan dan energi adalah inti dari kebutuhan manusia dan ada siklus kompleks yang tak terbatas di antara ketiga unsur ini disebut sebagai "*water–food–energy nexus*". Untuk menghasilkan makanan, air dan energi dibutuhkan; sementara untuk menghasilkan energi, air dibutuhkan; dan untuk mengakses air, energi hampir selalu dibutuhkan (misalnya untuk menjalankan pompa). Karena kompleksitas hubungan antara ketiga elemen ini, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan secara bersamaan dalam pengambilan keputusan (Bazilian et al., 2011; Howells *et al*., 2013).

Layanan ekosistem utama juga terhubung dengan siklus hidrologi di wilayah sungai, misalnya pemurnian air, retensi air, dan regulasi iklim. Sebagian besar jasa ekosistem terkait air ini dapat dihargai secara langsung oleh masyarakat dan dikuantifikasi, tetapi beberapa, terutama jasa pengaturan dan pemeliharaan, kurang jelas. Padahal, semua jasa ekosistem harus dipertimbangkan untuk penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Air tanah tidak selalu berada pada suatu area. Serapan ulang dan pelepasan air tanah dapat terjadi dari dan ke sungai dan karena itu ekologi sungai juga bergantung pada air tanah untuk setidaknya pada sebagian waktu dalam satu tahun. Dengan tidak adanya input air tanah selama periode panjang tanpa hujan, misalnya pada musim kemarau, banyak sungai dan lahan

mengering. Ketergantungan fungsional sistem aliran dasar sungai pada air tanah terkait dengan skala spasial, jangkauan saluran, daerah tangkapan air dan lanskap, dan menilai empat fitur ketergantungan air tanah, yaitu hidrologi, fisik, kimia dan biologis. Sumber lain yaitu dari air permukaan, seperti sungai, dikelilingi oleh dan berinteraksi dengan vegetasi tepi sungai yang berdekatan. Hutan riparian juga dapat secara struktural, floristik dan topografi kompleks menentukan ketergantungan air tanah dari semua atau beberapa komponen hutan tersebut. Oleh karenanya, tutupan lahan, vegetasi, dan bentang lahan sangat berpengaruh pada kemampuan alam untuk menyediakan air.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024

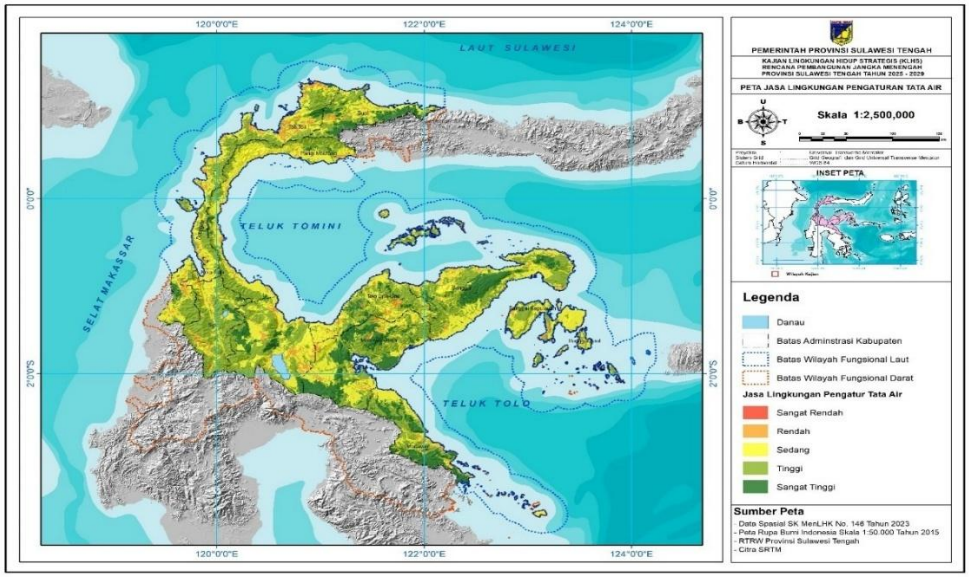
Gambar 2.5
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air

Berdasarkan data pada tabel dan gambar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kelas layanan jasa lingkungan penyedia air dengan kinerja yang rendah, yakni mencakup 63,64% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula luas wilayah dengan kelas layanan jasa lingkungan penyedia air dengan kinerja sangat tinggi bervariasi di setiap kabupaten/kota, dan dari data persentasi

luasannya terlihat bahwa wilayah Kabupaten Poso adalah wilayah yang memiliki luas wilayah tertinggi untuk kinerja jasa lingkungan yang sangat tinggi. Sementara wilayah yang paling luas dengan kondisi kinerja layanan jasa lingkungan yang sangat rendah, terdapat pada wilayah Kabupaten Sigi yaitu dengan persentasi mencapai 15,21% dari total luas sebaran wilayah dengan kinerja jasa lingkungan yang sangat rendah.

(b) Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan. Ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.



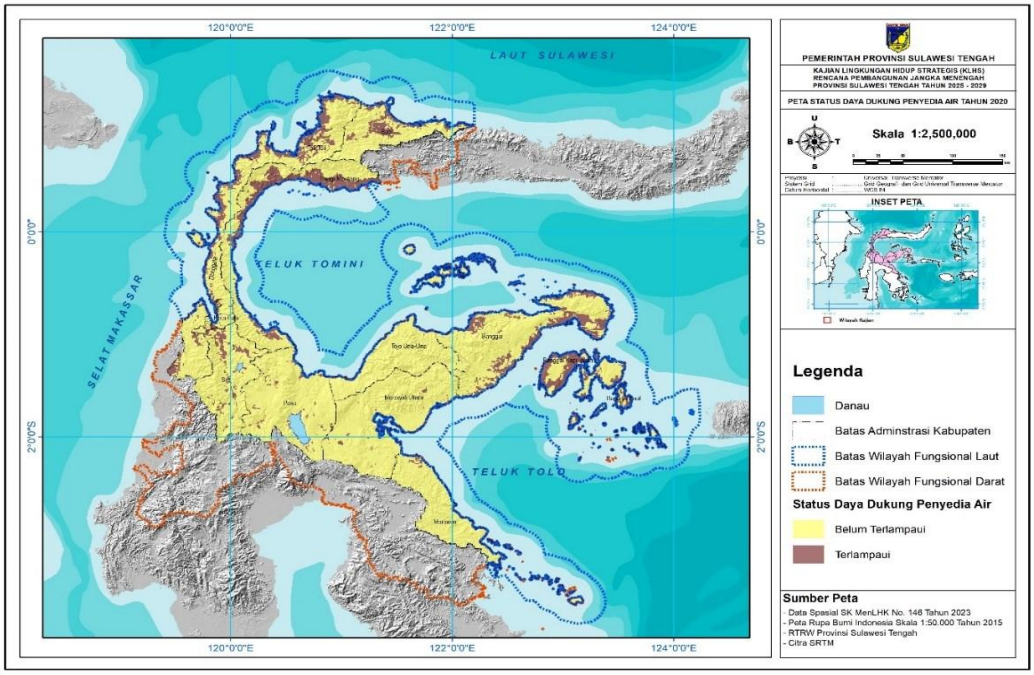
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2.6
Peta Jasa Ekosistem Fungsi Pengatur Tata Air

Berdasarkan gambar di atas umumnya wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kelas layanan jasa lingkungan pengatur tata air dengan kinerja yang tinggi dan sedang, yakni masing-masing 42,60% dan 35,55% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula luas wilayah dengan kelas layanan jasa lingkungan penyedia air dengan kinerja sangat tinggi bervariasi di setiap kabupaten/kota, dan dari data persentasi luasannya terlihat bahwa wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara adalah wilayah yang memiliki wilayah cukup luas untuk kinerja jasa lingkungan pengaturan tata yang sangat tinggi. Sementara wilayah yang paling luas dengan kondisi kinerja layanan jasa lingkungan yang rendah, terdapat pada wilayah Kabupaten Tolitoli yaitu dengan persentasi mencapai 18,64% dari total luas sebaran wilayah dengan kinerja jasa lingkungan yang sangat rendah.

(c) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Dalam kajian daya dukung penyedia air pada wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah di lakukan analisis data dalam 2 waktu yang berbeda, yaitu indikasi status daya dukung air pada Tahun 2020 dan Tahun 2029.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2.7
Peta Indikasi Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Tabel 2.14
Proyeksi Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029

KABUPATEN/ KOTA	DENSITAS POPULASI SISTEM GRID (2029)	KETERSEDIAAN AIR	KEBUTUHAN AIR UNTUK LAHAN	KEBUTUHAN AIR UNTUK DOMESTIK THN 2029	KEBUTUHAN AIR TOTAL THN 2029	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK	Luas Wilayah Sesuai Status Daya Dukung				Indikasi Status Daya Dukung Air
								Belum Terlampaui		Terlampaui		
	(Jiwa)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(Jiwa)	Ha	%	Ha	%	
Banggai	395,371	4,489,158,716	1,832,355,095	34,160,072	1,866,515,167	2,622,643,549	5,611,496	648,513.24	78.27%	180014.841	21.73%	Belum Terlamapaui
Banggai Kepulauan	129,759	808,625,634	566,054,884	11,211,146	577,266,030	231,359,604	1,010,876	137,201.26	57.52%	101344.628	42.48%	Belum Terlamapaui
Banggai Laut	75,743	285,389,590	144,881,140	6,544,160	151,425,299	133,964,291	356,763	40,861.26	62.37%	24652.1379	37.63%	Belum Terlamapaui
Buol	161,418	1,783,074,142	641,612,502	13,946,536	655,559,038	1,127,515,104	2,228,777	283,715.93	80.17%	70176.2126	19.83%	Belum Terlamapaui
Donggala	322,539	2,837,331,939	1,003,621,076	27,867,410	1,031,488,485	1,805,843,454	3,546,602	424,267.39	81.32%	97440.2358	18.68%	Belum Terlamapaui
Morowali	186,374	5,828,432,233	586,655,822	16,102,687	602,758,510	5,225,673,724	7,285,548	431,619.70	98.77%	5389.50176	1.23%	Belum Terlamapaui
Morowali Utara	136,711	10,329,292,391	1,107,958,424	11,811,840	1,119,770,264	9,209,522,127	12,912,259	872,780.21	98.93%	9407.86066	1.07%	Belum Terlamapaui
Parigi Moutong	483,658	3,399,114,279	1,936,523,301	41,788,021	1,978,311,322	1,420,802,957	4,248,379	419,394.78	69.23%	186375.648	30.77%	Belum Terlamapaui
Poso	265,388	6,160,341,651	941,107,648	22,929,519	964,037,167	5,196,304,484	7,700,663	736,841.40	96.98%	22918.3679	3.02%	Belum Terlamapaui
Sigi	287,369	2,869,261,244	742,515,868	24,828,666	767,344,534	2,101,916,711	3,586,051	446,864.81	89.06%	54891.5975	10.94%	Belum Terlamapaui
Tojo Una-Una	179,359	4,593,357,120	523,399,893	15,496,598	538,896,491	4,054,460,629	5,742,222	536,216.40	98.90%	5974.77409	1.10%	Belum Terlamapaui
Toli Toli	242,313	1,435,604,054	892,740,817	20,935,812	913,676,630	521,927,424	1,794,721	246,233.55	66.82%	122244.451	33.18%	Belum Terlamapaui
Kota Palu	417,184	170,298,575	38,278,935	36,044,699	74,323,634	95,974,940	212,876	28,662.53	85.75%	4762.89874	14.25%	Belum Terlamapaui
Total Sulawesi Tengah	3,283,185	44,989,281,570	10,957,705,405	283,667,166	11,241,372,572	33,747,908,998	56,237,233	5,253,172.46	85.57%	885593.154	14.43%	**Belum Terlamapaui**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024

Dari data hasil estimasi proyeksi hingga Tahun 2029 diketahui bahwa kurang lebih 85,57% wilayah Provinsi Sulawesi Tengah diindikasikan belum melampaui daya dukung air (ditandai dengan warna kuning), data ini menunjukkan berkurangnya luas wilayah dengan status daya dukung air belum terlampaui walaupun tidak cukup signifikan, yaitu sebesar 0,02%. wilayah kabupaten yang indikasi status daya dukung air telah terlampaui cukup luas, masih pada kabupaten Banggai Kepulauan, yakni 42,48% wilayahnya terindikasi daya dukung airnya telah terlampaui. Kemudian diikuti oleh wilayah kabupaten Banggai Laut, Tolitoli dan Parigi Moutong, yang semuanya mengindikasikan bahwa sekitar 30% luas wilayahnya terindikasi daya dukung airnya telah terlampaui, dan komposisi sebaran dan status wilayah ini tidak berbeda dengan kondisi pada Tahun 2020.

Berdasarkan SK 146 Tahun 2023 tentang penetapan daya dukung dan daya tampung air nasional, secara umum wilayah di Sulawesi Tengah di dominasi (84,96%) masih belum terlampaui daya dukung airnya. Namun, terdapat beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus karena telah terlampaui daya dukung airnya (14,32%). Kabupaten Banggai: Memiliki luas wilayah terbesar (824.017,92 ha) dengan sebagian besar (10,47%) belum terlampaui daya dukung airnya. Namun, ada juga wilayah yang terlampaui

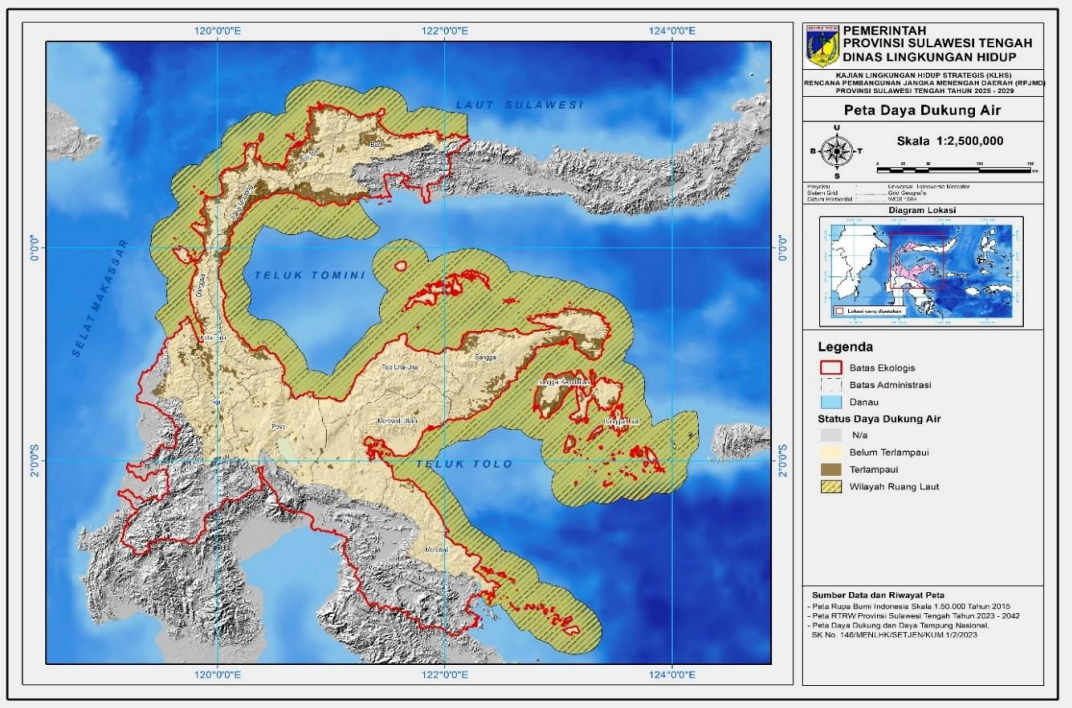
(2,92%). Kabupaten Morowali Utara: Memiliki persentase terbesar wilayah yang belum terlampaui daya dukung airnya (13,80%), menunjukkan potensi sumber daya air yang masih baik. Kabupaten Poso: Meskipun memiliki luas wilayah yang cukup besar, persentase wilayah yang terlampaui daya dukung airnya relatif kecil (0,38%).

Tabel 2.15
Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional

Kabupaten	Belum Terlampaui		Terlampaui		N/a		Tota Luas ha	Total Persen
	Luas ha	Persen Luas	Luas ha	Persen Luas	Luas ha	Persen Luas		
Banggai	644468.36	10.47%	179545.62	2.92%	3.94	0.00%	824017.92	13.39%
Banggai Kepulauan	137195.64	2.23%	101049.03	1.64%	0.50	0.00%	238245.17	3.87%
Banggai Laut	43150.52	0.70%	25594.27	0.42%			68744.80	1.12%
Buol	299778.49	4.87%	70224.34	1.14%	2134.87	0.03%	372137.70	6.05%
Donggala	420759.99	6.83%	92060.09	1.50%	24.38	0.00%	512844.46	8.33%
Kota Palu	30724.69	0.50%	4913.97	0.08%	16.82	0.00%	35655.48	0.58%
Morowali	429035.03	6.97%	5379.62	0.09%	9649.53	0.16%	444064.17	7.21%
Morowali Utara	849528.43	13.80%	9127.99	0.15%	14607.28	0.24%	873263.70	14.19%
Parigi Moutong	395282.98	6.42%	185633.32	3.02%	53.18	0.00%	580969.48	9.44%
Poso	716481.36	11.64%	23136.40	0.38%	15723.08	0.26%	755340.83	12.27%
Sigi	464948.22	7.55%	56477.34	0.92%	2037.11	0.03%	523462.66	8.50%
Tojo Una-Una	551121.36	8.95%	5970.90	0.10%	0.04	0.00%	557092.30	9.05%
Toli Toli	247686.83	4.02%	122497.99	1.99%	7.30	0.00%	370192.12	6.01%
Grand Total	**5230161.89**	**84.96%**	**881610.88**	**14.32%**	**44258.03**	**0.72%**	**6156030.81**	**100.00%**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024

Selanjutnya, Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung di sajikan pada gambar berikut.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Gambar 2.8
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Sulawesi Tengah

2) Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Daya dukung pangan dianalisa untuk mengetahui kemampuan Sulawesi Tengah menyediakan pangan secara mandiri bagi penduduknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum status daya dukung pangan di Sulawesi Tengah belum terlampaui. Meski demikian, terdapat wilayah-wilayah dengan daya dukung terlampaui dengan luasan yang cukup besar jika dilihat dari total luasan administrasi wilayah tersebut.

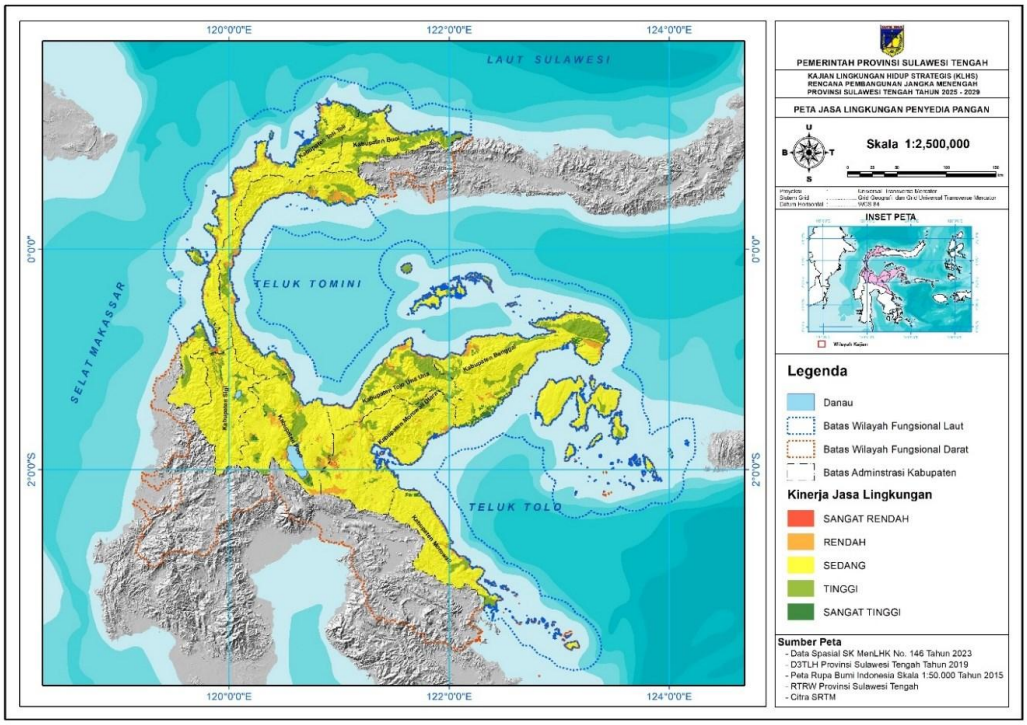
Upaya pelestarian jasa lingkungan penyedia pangan dapat ditempuh dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati sumber pangan lokal dan penguatan posisi tawarnya promosi konsumsi pangan lokal, pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal/biomassa sebagai energi alternatif, pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal bahan baku obat untuk kesehatan masyarakat dan pelestarian kawasan daerah tangkapan air, aliran sungai dan pengembangan embung-embung untuk ketersediaan air masyarakat. Selain itu, pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan juga terus dilaksanakan, meliputi Pengembangan dan peningkatan nilai tambah sumber pangan lokal, Pengembangan energi alternatif dengan memanfaatkan jasa lingkungan, pengembangan keanekaragaman hayati lokal untuk kesehatan dan perbaikan gizi keluarga serta peningkatan kualitas daerah tangkapan air dan penyediaan serta pemanfaatan air bersih melalui pengelolaan air permukaan.

Hasil kajian terhadap status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah untuk pangan, diketahui bahwa untuk status penyedia energi pangan di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum belum terlampaui, meskipun baru 28,01% wilayahnya telah melampaui ambang batas, faktor produksi pangan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk serta pemanfaatan lahan pangan yang tidak sesuai mengakibatkan status daya dukung penyedia pangan di wilayah ini akan bisa menjadi terlampaui.

- **Jasa Ekosistem Penyedia Pangan**

  Jasa lingkungan penyedia pangan adalah fungsi ekosistem yang memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala

sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Dalam kajian kinerja jasa lingkungan penyedia pangan, maka dilakukan identifikasi kinerja jasa lingkungan penyedia pangan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

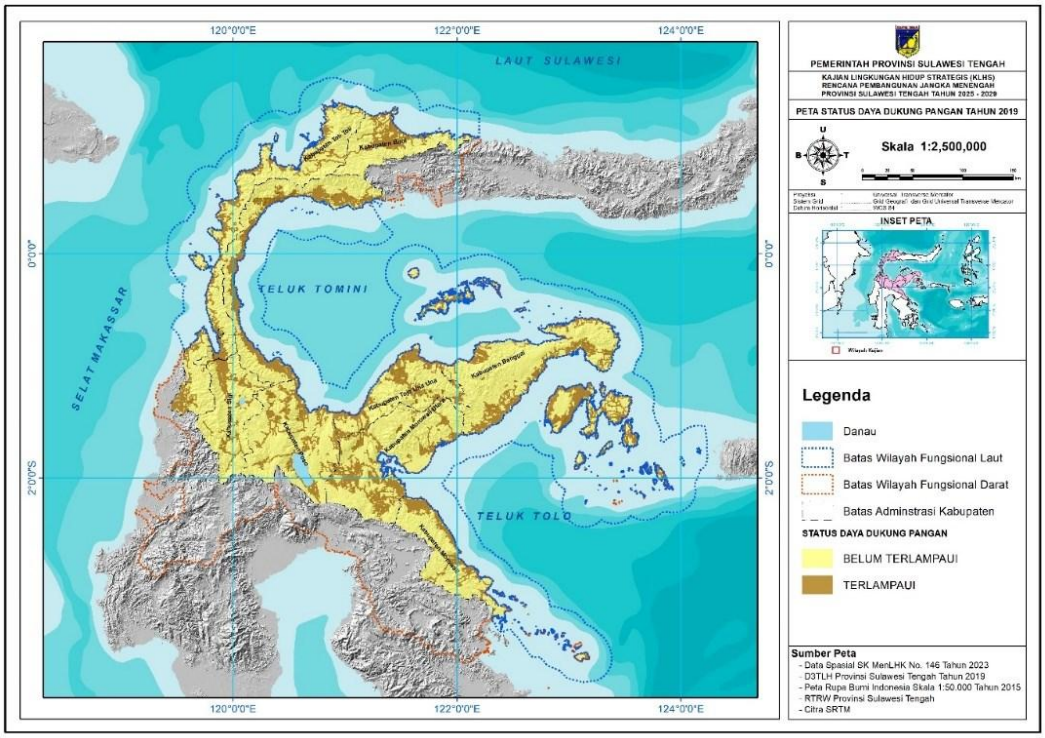


Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Gambar 2.9
Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Berdasarkan data di atas maka secara umum terlihat bahwa kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan lingkungan penyedia pangan di Provinsi Sulawesi Tengah berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan total luas 77,70%. Berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) seluas 17,30% dan berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) seluas 5,0% dari total luas Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan lingkungan penyedia pangan tersebar di seluruh Kabupaten/kota namun luas dominan berada di Kabupaten Morowali Utara dengan luas 12,54%, Kabupaten Banggai dengan luas 9,62% dan Kabupaten Poso dengan luas 8,86%. Sementara itu sebesar 17,30% luas wilayah yang berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Provinsi Sulawesi Tegah terdistribusi dominan di Kabupaten Banggai seluas 3,04% dan di Kabupaten Tojo Una-Una seluas 2,67%. Untuk kelas Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan penyedia pangan seluas 5,0% terdistribusi dominan di Kabupaten Parigi Moutong seluas 0,86% dan di Kabupaten Banggai dengan luas 0,78% dari total luas total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.



Sumber: D3TLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Gambar 2.10
Peta Indikasi Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Dari peta tersebut dapat diketahui beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, pada Tahun 2019, daya dukung lingkungan penyedia pangannya terindikasi telah terlampaui, yaitu kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Kota Palu, Parigi Moutong dan Tojo Una-una. Tetapi secara umum daya dukung daya

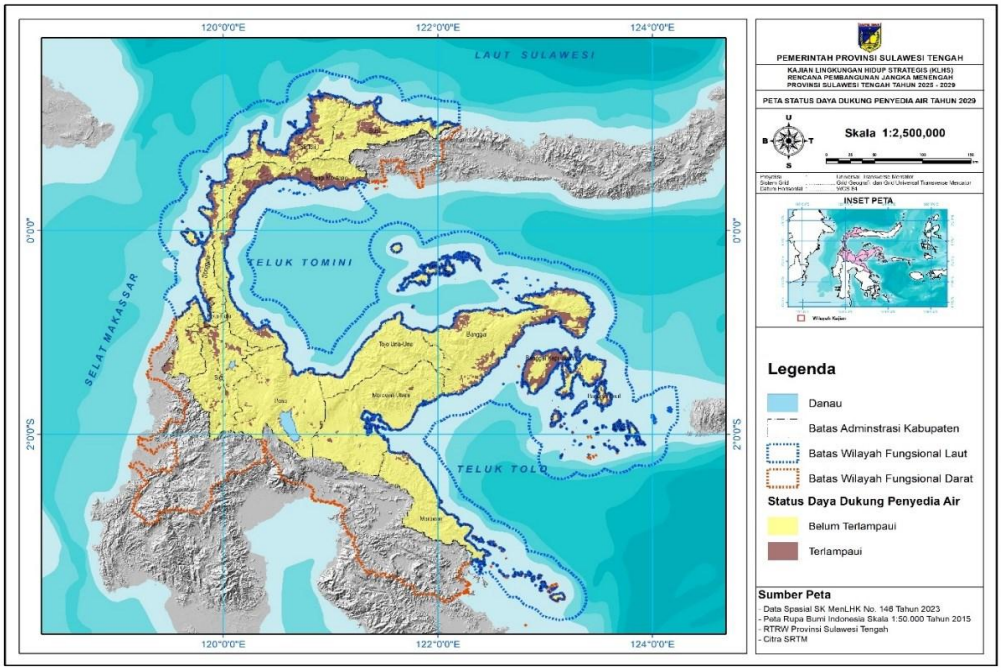
tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan Provinsi Sulawesi Tengah belum terlampaui. Selanjutnya untuk indikasi status daya dukung penyedia pangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2029 sesuai hasil estimasi berdasarkan proyeksi dinamika populasi penduduk pada Tahun 2029, dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel 2.16
Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029

KABUPATEN/ KOTA	DENSITAS POPULASI SISTEM GRID (2029)	KETERSEDIAAN PANGAN	KEBUTUHAN PANGAN THN 2029	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK	Luas Wilayah Sesuai Status Daya Dukung				Indikasi Status Daya Dukung Air
						Belum Terlampaui		Terlampaui		
	(Jiwa)	(Kkal)	(Kkal)	(Kkal)	(Jiwa)	Ha	%	Ha	%	
Banggai	394,385	622,422,696,266	309,493,628,750	312,929,067,516	791,244	613,391	74.53%	209,632	25.47%	Belum Terlampaui
Banggai Kepulauan	129,852	94,807,375,775	101,901,357,000	-7,093,981,225	121,134	101,798	42.72%	136,517	57.28%	Terlampaui
Banggai Laut	78,424	42,588,259,039	61,543,234,000	-18,954,974,961	54,117	28,763	41.82%	40,010	58.18%	Terlampaui
Buol	160,903	217,235,384,505	126,268,629,250	90,966,755,255	276,642	277,897	72.93%	103,154	27.07%	Belum Terlampaui
Donggala	322,189	496,219,308,941	252,837,817,750	243,381,491,191	632,507	377,967	73.70%	134,850	26.30%	Belum Terlampaui
Kota Palu	416,338	240,677,852,240	326,721,245,500	-86,043,393,260	306,698	19,013	50.07%	18,957	49.93%	Terlampaui
Morowali	186,127	161,619,516,488	146,063,163,250	15,556,353,238	205,534	327,918	74.20%	114,010	25.80%	Belum Terlampaui
Morowali Utara	136,158	96,567,933,930	106,849,990,500	-10,282,056,570	123,976	650,009	73.97%	228,722	26.03%	Terlampaui
Parigi Moutong	482,865	323,354,707,420	378,928,308,750	-55,573,601,330	412,808	359,424	61.13%	228,558	38.87%	Terlampaui
Poso	264,656	418,071,646,050	207,688,796,000	210,382,850,050	531,495	544,818	75.45%	177,226	24.55%	Belum Terlampaui
Sigi	286,399	554,961,342,410	224,751,615,250	330,209,727,160	707,249	421,067	81.03%	98,565	18.97%	Belum Terlampaui
Tojo Una-Una	178,955	21,639,442,398	140,434,936,250	-118,795,493,852	28,331	368,916	66.33%	187,270	33.67%	Terlampaui
Toli Toli	242,813	331,365,300,736	190,547,501,750	140,817,798,986	422,398	276,313	76.76%	83,644	23.24%	Belum Terlampaui
Total Sulawesi Tengah	3,280,064	3,621,530,766,198	2,574,030,224,000	1,047,500,542,198	4,614,133	4,367,292	71.26%	1,761,116	28.74%	**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024

Selanjutnya, Peta indikasi status daya penyedia air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029 disajikan pada gambar berikut



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2.11
Peta Indikasi Status Daya Dukung Penyedia Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029

Berdasarkan hasil estimasi proyeksi penduduk Tahun 2029 diketahui penduduk Sulawesi Tengah mengalami pertambahan populasi yang tersebar merata di semua wilayah kabupaten. Proyeksi Tahun 2029, 71,26% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang diindikasikan belum melampaui daya dukung air (ditandai dengan warna kuning). Dengan demikian secara umum status daya dukung penyedia pangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2029 masih berstatus belum terlampaui.

D. Berketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan

1) Ketahanan Energi

Kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan perlu diwujudkan, mengingat tujuan Kebijakan Energi Nasional merupakan pedoman untuk memberikan arah pengelolaan energi nasional. Kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi di tingkat nasional merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran yang berisi hasil permodelan kebutuhan pasokan energi hingga Tahun 2050.

Ketahanan energi adalah kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan energi guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sulawesi Tengah dengan cakupan wilayah yang luas dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan penduduk wilayah lain untuk bermigrasi ke wilayah ini. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap kebutuhan energi di Provinsi ini. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan energi di Sulawesi Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah ketergantungan terhadap energi fossil masih sangat tinggi, akses dan infrastruktur energi masih terbatas di beberapa wilayah serta belum optimalnya perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi EBT.

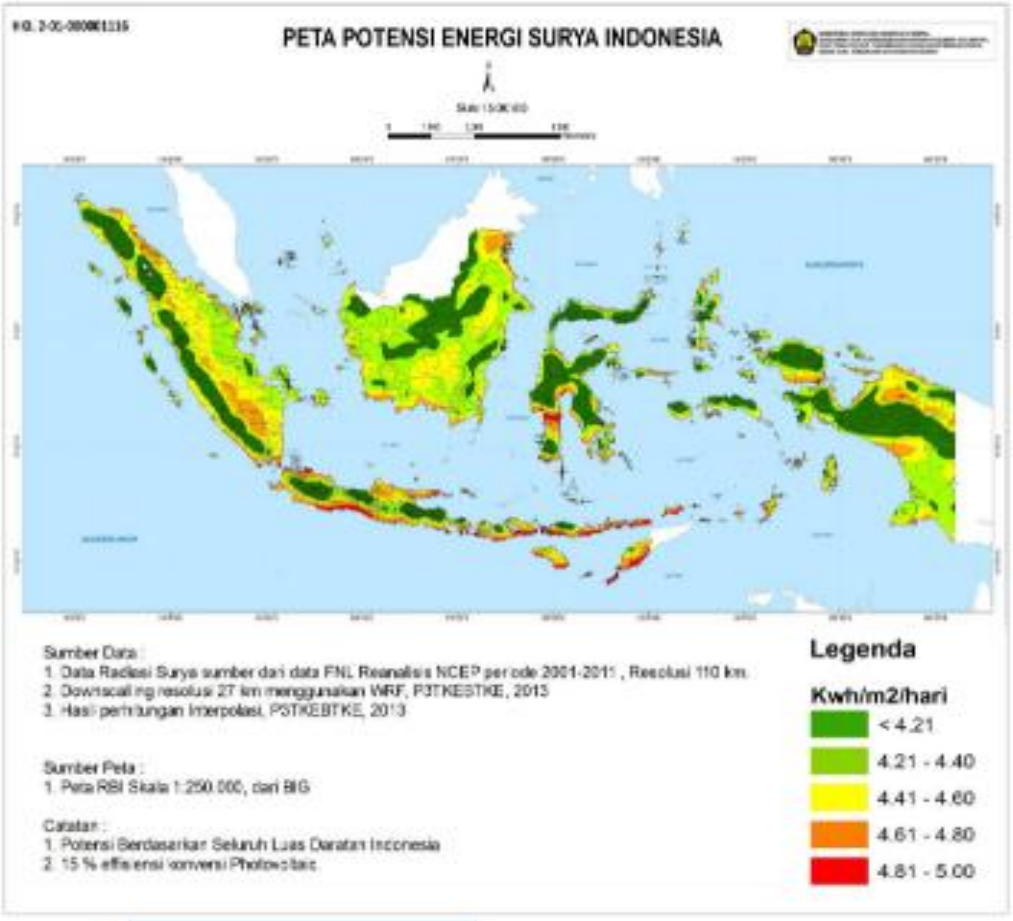
Berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional dan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, serta RUPTL 2018-2027, data potensi energi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Potensi Energi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Jenis Energi	Satuan	Potensi
1	Surya	MW	6.187
2	Bayu	MW	908
3	Biomassa	MW	326,9
4	Tenaga Air	MW	3.095
5	Panas Bumi	MW	368
6	Batubara	Juta Ton	2
7	Gas Bumi	BCF	2.030

Sumber : Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2015-2050 dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 .

Data potensi panas bumi terkini yang diperolah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah diketahui sumber daya spekulatif 405 MW, sumber daya hipotetik 67 MW, dan Cadangan terduga 289 MW. Potensi bioenergi dapat dikembangkan dengan memanfaatkan limbah dari potensi tanaman perkebunan dan hewan ternak. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beraneka ragam potensi bionergi seperti padi, jagung, kayu, kelapa sawit dan kelapa dalam. Sedangkan dari hewan ternak terdiri dari kerbau, sapi, kuda dan babi. Pengembangan bioenergi ini dilakukan dengan memanfaatkan limbah dari tanaman perkebunan dan hewan ternak. Pengembangan potensi bioenergi juga dapat memanfaatkan sampah kota. Adapun potensi energi surya dan energi air di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



Sumber: P3TEBTKE Kementerian ESDM dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019

Gambar 2.12
Peta Potensi Energi surya di Indonesia

Tabel 2.18
Potensi Tenaga Air Sulawesi Tengah

No	Proyek	Tipe	Jenis	Kapasitas (MW)	Status
1	Bambalo 2	ROR	PLTM	1,8	Potensi
2	Dako	ROR	PLTM	1,4	Potensi
3	Sampaya	ROR	PLTM	1,2	Potensi
4	Lobu	ROR	PLTM	5	Potensi
5	Banasu	ROR	PLTM	9	Potensi
6	Batunobota	ROR	PLTM	5	Potensi
7	Kilo	ROR	PLTM	10	Potensi
8	Paddumpu	ROR	PLTM	5	Potensi
9	Yaentu	ROR	PLTM	10	Potensi
10	Ponju	ROR	PLTM	3	Potensi
11	Bengkoli	ROR	PLTM	2,5	Potensi
12	Bongkasoa	ROR	PLTM	1,4	Potensi
13	Pono	ROR	PLTM	6	Potensi

No	Proyek	Tipe	Jenis	Kapasitas (MW)	Status
14	Koro Yaentu	ROR	PLTM	17	Potensi
15	Sajo Karangana	RES	PLTA	103	Potensi
16	Sajo Pebatua	RES	PLTA	426	Potensi
17	Lariang-7	RES	PLTA	257,6	Potensi
18	Kulawi	ROR	PLTA	150	Potensi
19	La'a	ROR	PLTA	160	Potensi
20	Lalindu	ROR	PLTA	50	Potensi
21	Palu 3	RES	PLTA	75	Potensi
22	SR-1 (Bada)	RES	PLTA	420	Potensi
23	SR-2 (Bada)	RES	PLTA	720	Potensi
24	Tinauka	RES	PLTA	300	Potensi
25	Lariang-4	ROR	PLTA	200	Potensi
26	Gumbasa	ROR	PLTA	156	Potensi
Total Potensi air				**3.095,9**	

Sumber : RUPTL 2018-2027 PLN

Ketahanan energi ini meliputi peningkatan akses dan ketersediaan energi bersih yang terus didorong untuk optimalisasi sumber energi terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Data pembangkit EBT eksisting Provinsi Sulawesi Tengah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Data Pembangkit EBT Eksisting Provinsi Sulawesi Tengah (*On Grid*)

No	Pemilik	Kab/Kota	Jenis	Nama Pembangkit	Bahan bakar	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang (KW)	DMN (KW)	DMP Tertinggi (kw)	Tahun COD
1	PT Poso Energi	Poso	PLTA	PLTA Poso	Air	3	193000	177960	19377	2010
2	PLN	Poso	PLTM	PLTM	Air	2	2550	2400	1000	1999
3	PT. Hantraco Indoperkasa	Morowali Utara	PLTM	PLTM Wawopada 1	Air	2	3000	2400	2500	2014
4	PT. Hantraco Indoperkasa	Morowali Utara	PLTM	PLTM Wawopada 2	Air	2	3500	3200	3300	2026
5	PT. Sakita Hydro Power	Morowali	PLTM	PLTM Sakta	Air	1	2000	1780	1765	2014
6	PLN	Banggai	PLTM	PLTM Hanga-Hanga	Air	1	1600	1040	1040	1935
7	PT. Buminta Cita Banggai Energi	Banggai	PLTM	PLTM Kalumpang	Air	1	1200	1000	1000	2025
8	PT. Buminta Cita Banggai Energi	Banggai	PLTM	PLTM Hanga-Hanga II	Air	1	2552	2200	1340	2005
9	PT. Lambangan Energi Utam	Banggai	PLTM	PLTM	Air	2	3000	2000	2000	2016
10	PLN	Tojo Una-Una	PLTM	PLTM Sansarino	Air	1	300	300	300	2015
11	PT. Adis Putra Pratama	Banggai	PLTM	PLTM IPP HEK	Air	1	2500	2350	200	2010
12	PLN	Toli-Toli	PLTM	PLTM	Air	2	1600	800	800	1998
13	PLN	Parigi Moutong	PLTM	PLTM Tomini 1 &2	Air	2	2000	1900	1800	2010
14	PT. Poso Energy	Poso	PLTA	PLTA Poso Peakar Unit 1	Air	4	50000	200000	200000	2019
15	PT. Arkora Sulawesi Selatan	Poso	PLTM	PLRM Tomasa	Air	2	5000	10000	10000	2020
16	PT. Poso Energy	Poso	PLTA	PLTA Poso Peakar Unit 3-	Air	4	30000	120000	120000	2020
17	PT. Trinusa Energy	Tojo Una-Una	PLTM	PLTM Koro Kabalo	Air	2	1100	2200	2200	2022
18	PT. Buminta Energi Perkasa	Morowali Utara	PLTM	PLTM Tomata	Air	1	10000	10000	10000	2022

DMN : Daya Mampu Netto
DMP : Daya Mampu Pasok
COD : *Commercial Operating Data*
Sumber : Buku Data dan Statistik DESDM, 2024

Aspek lainnya yang juga penting dalam mendukung ketahanan energi adalah ketahanan kelistrikan yang merupakan kemampuan suatu daerah dalam menjamin ketersediaan, keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Kondisi eksisting kelistrikan meliputi rasio elektrifikasi yakni persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik, dimana rasio elektrifikasi di Sulawesi Tengah dan distribusinya pada masing-masing kabupaten kota tercantum pada gambar berikut.

Sistem tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum terdiri dari sistem interkoneksi 70 kV, 150 kV, dan sistem 20 kV. Sistem interkoneksi 70 kV dan 150 kV saat ini membentang dari Palu sampai ke Poso, melayani beban Kota Palu, Donggala, Parigi, Poso, Tentena, dan sebagian Kabupaten Sigi. Sistem interkoneksi Sulawesi Tengah mendapatkan pasokan daya dari beberapa pembangkit utamanya dari PLTU Palu 3, PLTA Poso, dan PLTD Silae, disalurkan ke pelanggan melalui GI 70 kV Parigi, GI 150 kV Palu Baru (Sidera), GI 150 kV Silae, GI 150 kV Poso, GI 150 kV Tentena, GI 150 kV Donggala, GI 150 kV Tawaeli, GI 70 kV Talise, dan GI 150 kV Talise.

Sistem tenaga listrik yang dipasok melalui jaringan 20 kV meliputi Sistem Bungku, Sistem Kolonedale, Sistem Banggai Laut, Sistem Luwuk-Toili, Sistem Ampana-Bunta, Sistem Tolitoli, Sistem Moutong-Kotaraya, Sistem Leok, Sistem Bangkir, dan beberapa sistem kecil isolated tersebar lainnya.

Sistem tenaga listrik Provinsi Sulawesi Tengah dipasok oleh pusat-pusat pembangkit meliputi PLTU, PLTD, dan PLTA/M. Tabel berikut adalah daftar pembangkit eksisting di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.20
Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas	Daya Mampu Neto (Mw)	Dmp Tertinggi 1 Tahun Terakhir (Mw)
PLN					
PLTD	Sulbagsel	10	45,24	24,30	24,30
	Sulbagsel	1	3,77	3,77	3,80
	20 kV Luwuk-Toili	14	9,37	5,45	5,10
	20 kV Ampana-Bunta	9	7,15	4,91	4,70
	20 kV Tolitoli-Bangkir	13	8,45	6,20	4,80
	20 kV Moutong-Kotaraya	10	7,85	5,40	3,90
	20 kV Kolonedale	13	5,79	3,53	2,10
	20 kV Bungku	12	10,67	8,57	7,20
	20 kV Banggai	6	2,25	1,29	0,80
	20 kV Leok	7	5,60	4,35	2,50
	Isolated tersebar Area Tolitoli	11	2,10	1,80	1,20
	Isolated tersebar Area Luwuk	64	10,89	5,01	4,30
	Isolated tersebar Area Palu	27	2,97	2,05	0,90
PLTA/M	Sulbagsel	7	34,25	33,75	33,75
	20 kV Luwuk-Toili	1	1,60	0,90	0,90
	20 kV Ampana-Bunta	1	0,80	0,80	0,80
	20 kV Tolitoli-Bangkir	1	1,60	1,60	1,60
	20 kV Moutong-Kotaraya	2	2,00	2,00	2,00
PLTU	20 kV Ampana	1	3,50	3,50	3,50
Jumlah PLN		210	154,30	97,00	106,20
IPP					
PLTU	Sulbagsel	4	66,00	0,00	0,00
PLTA/M	Sulbagsel	6	531,75	529,64	529,60
	20 kV Luwuk-Toili	1	2,50	2,50	1,30
	20 kV Ampana-Bungku	1	6,50	2,50	2,50
	20 kV Kolonedale	1	2,00	0,55	0,50
	20 kV Bungku	1	2,20	2,20	2,20
Jumlah IPP		14	600,00	532,40	536,10
Sewa					
PLTD	20 kV Luwuk-Toili	2	15,00	17,40	17,40
	20 kV Ampana-Bunta	1	5,00	6,48	6,50
	20 kV Tolitoli-Bangkir	3	11,00	13,60	13,60
	20 kV Moutong-Kotaraya	3	7,00	8,15	8,20
	20 kV Banggai	1	2,00	2,85	3,10
	20 kV Leok	2	6,00	6,00	6,00
	Isolated tersebar Area Luwuk	1	2,00	2,06	1,80
Jumlah Sewa		13	0,00	19,54	50,60
Excess Power					
PLTU	20 kV Bungku	1	5,00	3,60	3,60
Jumlah *Excess Power*		1	5,00	3,60	3,60
Jumlah		238	759,2	652,51	696,45

Selanjutnya, di Kota Palu akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu di mana di kawasan tersebut akan terdapat industri baik yang berbasis potensi lokal maupun industri manufaktur. Beberapa proyek komoditas KEK Palu antara lain smelter nikel, pengolahan kakao,

pengolahan karet, pengolahan rumput laut, perakitan alat berat, dan pengolahan akhir produk elektrik. Adanya KEK Palu, diharapkan dapat meningkatkan penjualan tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, di Kabupaten Morowali telah dikembangkan kawasan industri Tsingshan untuk pengolahan hasil tambang mineral yaitu smelter nickel dan akan dikembangkan industri turunannya antara lain stainless steel. Diperkirakan ke depan akan tumbuh beberapa kawasan industri lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Adanya potensi KEK, KI dan pelanggan besar industri maupun bisnis membuka peluang tingginya kebutuhan tenaga listrik. Untuk pelanggan publik khususnya puskesmas, PLN akan memenuhi kebutuhan tenaga listrik puskesmas di kecamatan, dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertumbuhan permintaan tenaga listrik terbesar adalah dari sektor rumah tangga dan sektor industri. Pertumbuhan industri pertambangan dan smelter saat ini bertumbuh dengan cepat sehubungan dengan pembatasan pemerintah untuk melakukan ekspor hasil tambang mineral tanpa melalui proses pengolahan. Dengan adanya pembatasan ekspor tersebut, mendorong pihak swasta untuk membangun smelter dan pabrik pengolahan di Indonesia. Banyaknya calon pelanggan industri smelter dan pabrik pengolahan (selanjutnya disebut KTT atau Konsumen Tegangan Tinggi) di Sulawesi Tengah mendorong meningkatnya proyeksi pertumbuhan penjualan tenaga listrik. Pada umumnya, industri smelter dan pabrik pengolahan akan membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar sehingga tentunya akan membutuhkan investasi yang besar pula. Terdapat potensi risiko tidak jadinya pembangunan smelter ataupun pabrik pengolahan barang tambang. Oleh karena itu, seluruh potensi pelanggan KTT yang ada telah diperhitungkan dalam proyeksi penjualan tenaga listrik dengan mempertimbangkan confidence level operasi dari setiap pelanggan KTT tersebut. Sehingga, realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menyuplai pelanggan KTT dapat disesuaikan apabila confidence level dari potensi pelanggan KTT menjadi confidence level tinggi.

Berdasarkan realisasi penjualan tenaga listrik, dengan

mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi regional, pertambahan jumlah penduduk, peningkatan rasio jumlah rumah tangga berlistrik PLN di masa datang, dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi setelah terjadinya pandemi Covid-19 terjadi, maka proyeksi kebutuhan listrik Tahun 2025-2034 diperlihatkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.21
Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik (GWh) 2025-2030

No.	Kelompok Pelanggan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rumah Tangga	1.182,2	1.258,7	1.337,1	1.417,2	1.499,0	1.584,7
2	Bisnis	271,2	292,3	314,5	337,9	362,4	387,9
3	Publik	204,3	219,7	235,2	250,5	265,7	281,4
4	Industri	445,2	444,6	690,9	988,3	1.470,5	2.498,7
Jumlah		2.102,9	2.215,4	2.577,8	2.993,9	3.597,6	4.752,8
Pertumbuhan %		12,5	5,3	16,4	16,1	20,2	32,1

Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Tabel 2.22
Proyeksi Jumlah Pelanggan (Ribu) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030

No.	Kelompok Pelanggan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rumah Tangga	953,6	1.009,7	1.067,1	1.125,8	1.185,7	1.248,5
2	Bisnis	31,2	32,8	34,5	36,3	38,1	40,0
3	Publik	44,3	46,0	47,6	49,0	50,3	51,5
4	Industri	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Jumlah		1.29,5	1.089,0	1149,7	1.211,6	1.247,6	1.340,5
Pertumbuhan %		6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,2

Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034

Tabel 2.23
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik

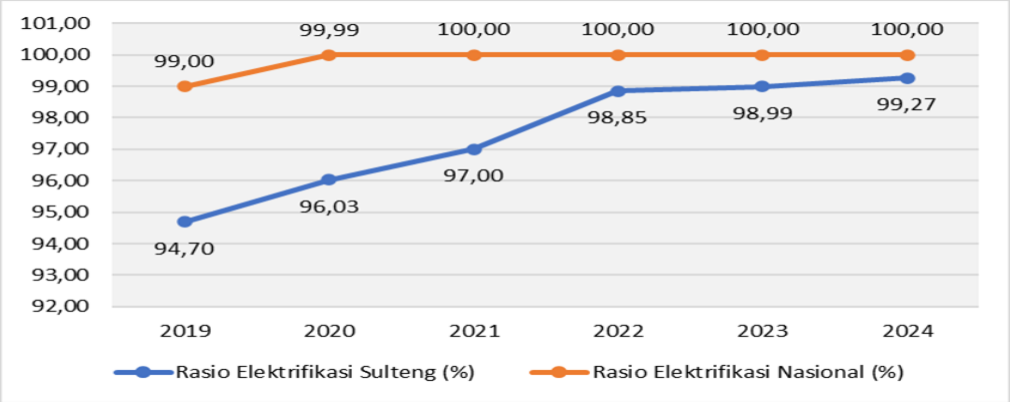
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penjualan (GWh)	Produksi (GWh)	Beban Puncak (MW)	Pelanggan
2025	7,24	2.103	2.437	434	1.029.531
2026	7,01	2.215	2.568	454	1.088.982
2027	6,78	2.578	2.989	525	1.149.692
2028	6,55	2.994	3.472	609	1.211.566
2029	6,33	3.598	4.173	762	1.274.586
2030	6,28	4.753	5.514	1.002	1.340.516

Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034

Proyeksi kebutuhan listrik di atas sudah memperhitungkan kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan seluruh potensi pelanggan besar lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah

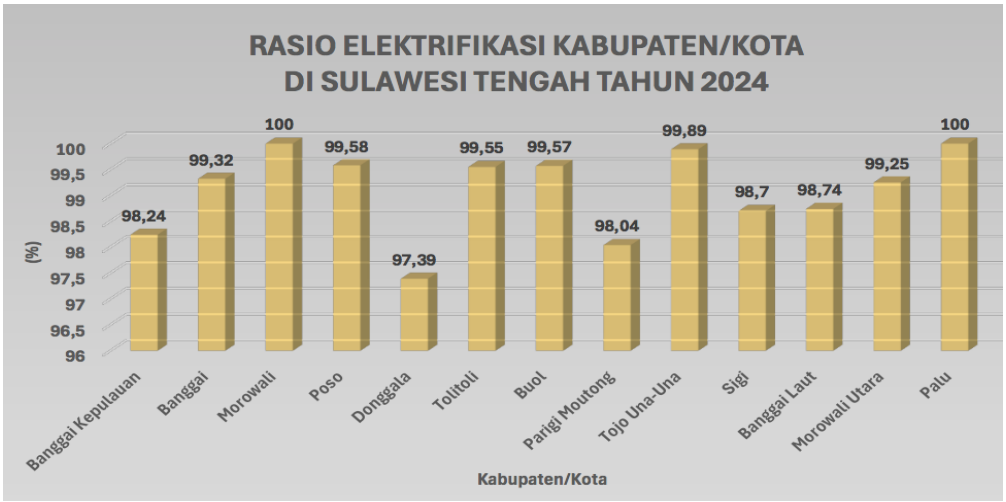
baik yang tingkat kepastiannya tinggi (sudah PJBTL) maupun tingkat kepastiannya rendah (masih tahap probing ataupun MoU).

Terkait jumlah rumah tangga yang memiliki akses listrik atau Rasio Elektrifikasi, distribusi pada baik Provinsi maupun masing-masing kabupaten/kota digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Buku Statistik ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Gambar 2.13
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024



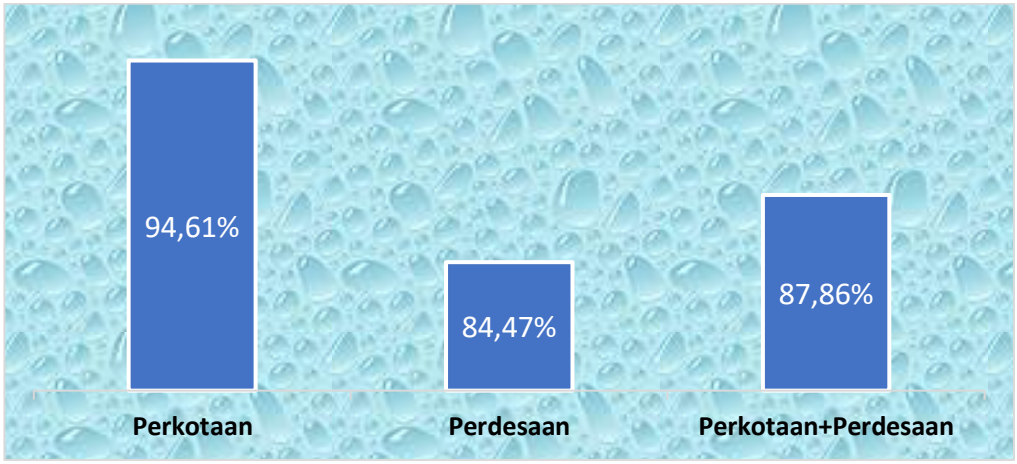
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025.

Gambar 2.14
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024

2) Ketahanan Air

Ketahanan air merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya air bagi kebutuhan domestik, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini adalah akses rumah tangga terhadap kondisi air minum. Di Provinsi Sulawesi Tengah,

persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak berdasarkan klasifikasi wilayah pada Tahun 2024 tercantum pada grafik berikut.

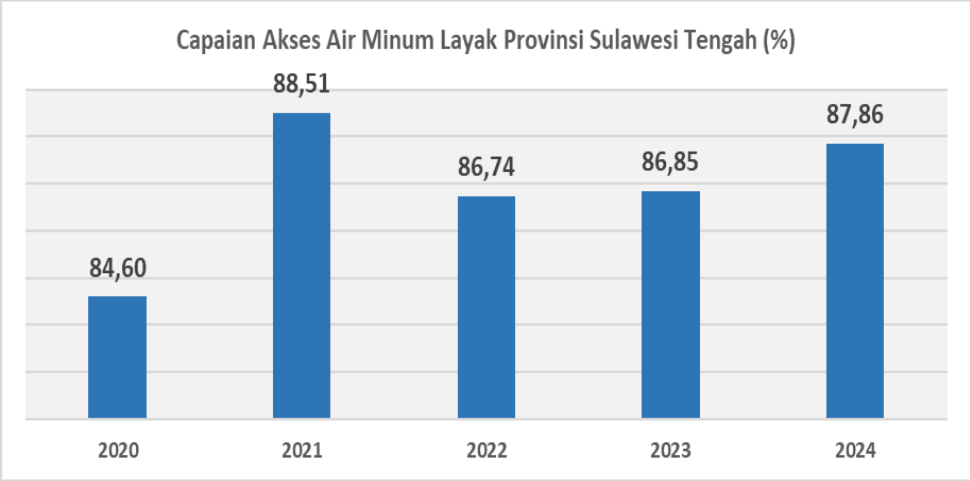


Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.15
Akses Ketahanan Air Bagi Rumah Tangga Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Provinsi karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perkembangan mengenai persentase rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah yang menggunakan air minum layak sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) BPS dapat dilihat pada gambar berikut:



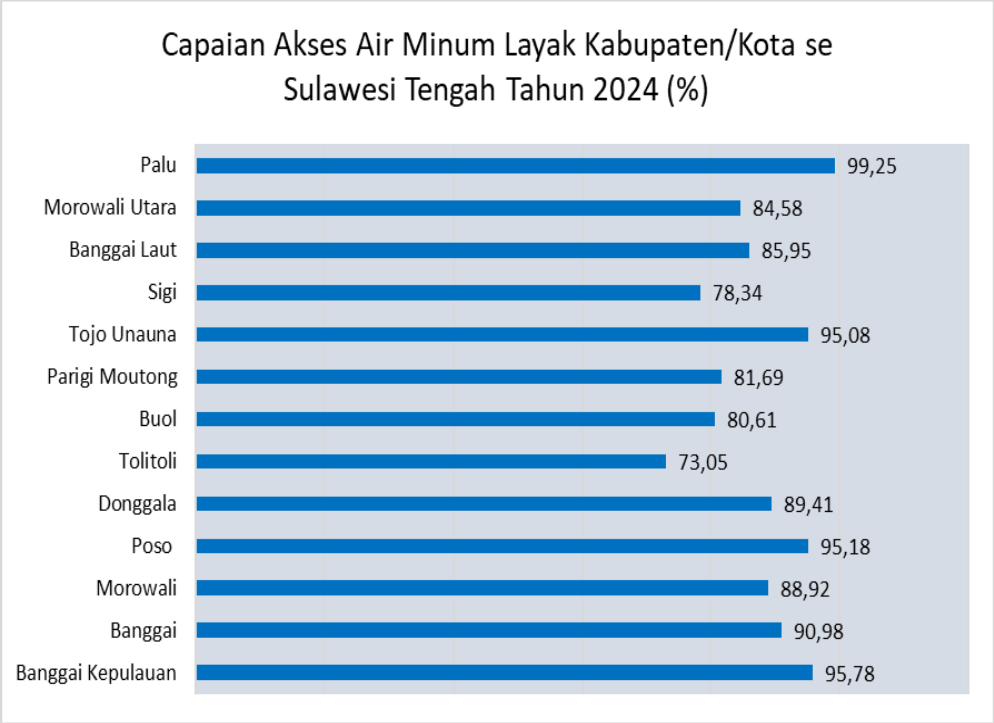
Sumber: BPS, 2024 (Data diolah kembali).

Gambar 2.16
Perkembangan Persentase Capaian Akses Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Perkembangan capaian akses air minum layak bagi rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuatif yakni pada Tahun 2020 sebesar 84,60 persen meningkat menjadi 88,51 persen pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 86,74 persen, selanjutnya pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 86,85 persen dan pada Tahun 2024 kembali meningkat hingga mencapai 87,86 persen. Terjadinya penurunan akses air minum layak pada Tahun 2022 disebabkan beberapa hal, antara lain: (a) tingginya mobilitas penduduk/tenaga kerja di Sulawesi Tengah tidak diimbangi dengan ketersediaan air minum layak, (b) tingginya kebocoran air pada pipa karena kurang maksimalnya pemeliharaan SPAM, dan (c) masih banyaknya SPAM yang mengalami *idle capacity* karena belum terbangun Sambungan Rumah (SR) yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota.

Capaian pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga Provinsi Sulawesi Tengah tidak lepas dari sinergitas dan peran kebijakan kabupaten/kota dalam pencapaian akses air minum layak bagi masyarakat. Adapun capaian akses air minum layak bagi rumah tangga di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yakni capaian akses air minum layak tertinggi terdapat di Kota Palu yaitu sebesar 99,25 persen, sedangkan pencapaian akses air minum

layak yang terendah terdapat di Kabupaten Tolitoli yaitu hanya sebesar 73,05 persen. Selanjutnya secara detail mengenai pencapaian akses air minum layak bagi rumah tangga di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025 (Data diolah kembali).

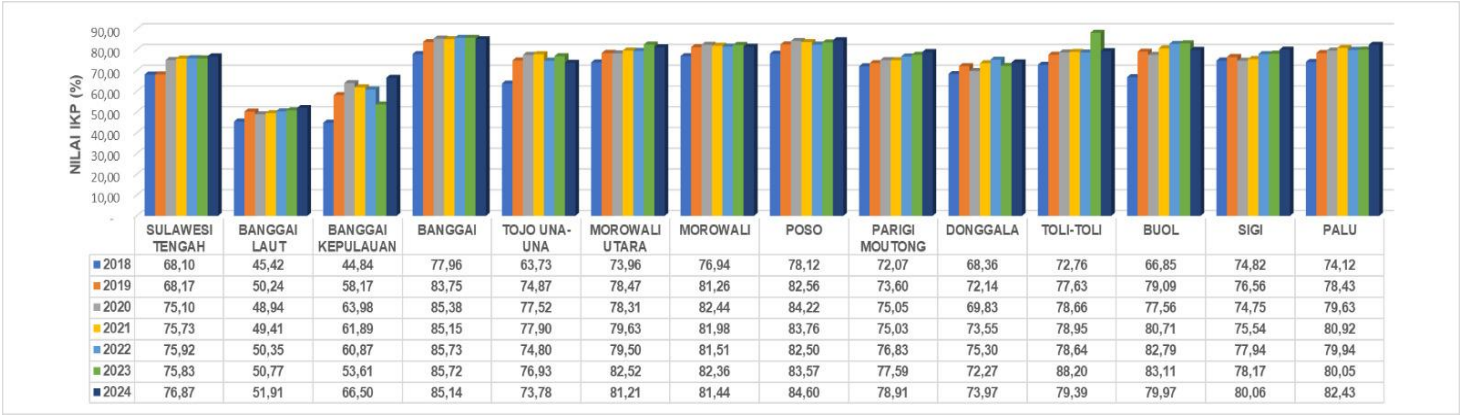
Gambar 2.17
Perkembangan Persentase Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2024

3) Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan merujuk pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, baik melalui produksi lokal maupun distribusi yang stabil. Indikator utama kemandirian pangan adalah indeks ketahanan pangan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan

dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi .

Indeks ketahanan pangan berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah tercantum pada gambar berikut.

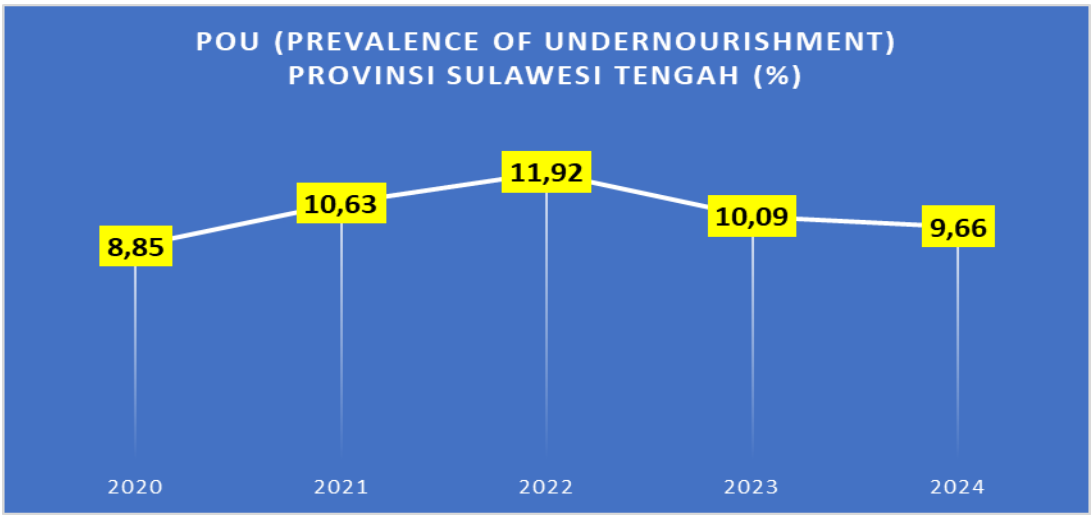


	SULAWESI TENGAH	BANGGAI LAUT	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	TOJO UNA-UNA	MOROWALI UTARA	MOROWALI	POSO	PARIGI MOUTONG	DONGGALA	TOLI-TOLI	BUOL	SIGI	PALU
2018	68,10	45,42	44,84	77,96	63,73	73,96	76,94	78,12	72,07	68,36	72,76	66,85	74,82	74,12
2019	68,17	50,24	58,17	83,75	74,87	78,47	81,26	82,56	73,60	72,14	77,63	79,09	76,56	78,43
2020	75,10	48,94	63,98	85,38	77,52	78,31	82,44	84,22	75,05	69,83	78,66	77,56	74,75	79,63
2021	75,73	49,41	61,89	85,15	77,90	79,63	81,98	83,76	75,03	73,55	78,95	80,71	75,54	80,92
2022	75,92	50,35	60,87	85,73	74,80	79,50	81,51	82,50	76,83	75,30	78,64	82,79	77,94	79,94
2023	75,83	50,77	53,61	85,72	76,93	82,52	82,36	83,57	77,59	72,27	88,20	83,11	78,17	80,05
2024	76,87	51,91	66,50	85,14	73,78	81,21	81,44	84,60	78,91	73,97	79,39	79,97	80,06	82,43

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2.18
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2018-2024

Indikator lainnya adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Angka PoU Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2020-2024 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,43% tercantum pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2.19
Perkembangan PoU (*Prevalence of Undernourishment*)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Adapun realisasi PoU untuk tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan PoU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
PALU	4,36	7,28	11,95	6,00	5,72
MOROWALI	4,97	7,03	6,69	7,90	7,55
TOLITOLI	9,58	14,30	14,23	13,66	13,08
BANGGAI LAUT	10,51	11,91	11,26	13,42	12,89
SIGI	10,66	12,56	14,12	14,11	13,49
DONGGALA	10,41	9,96	14,81	11,36	10,86
BANGKEP	13,27	16,14	16,26	16,56	15,86
TOJO UNA-UNA	8,70	9,61	9,31	10,78	10,30
BANGGAI	8,15	11,91	11,85	9,95	9,52
POSO	7,31	9,29	8,98	7,36	7,06
BUOL	8,06	10,44	10,03	8,48	8,10
PARIGI MOUTONG	11,27	10,63	12,36	9,92	9,47
MOROWALI UTARA	7,41	8,75	7,40	7,10	6,78

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

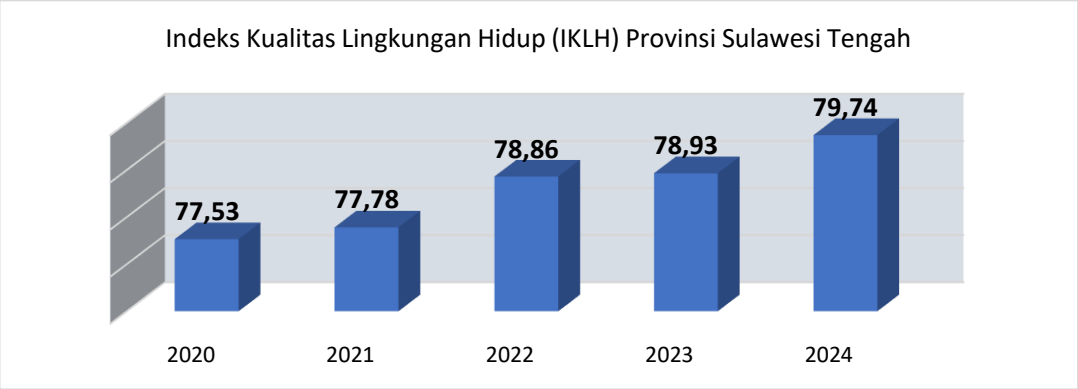
Lingkungan hidup yang berkualitas meliputi kondisi pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya berbagai tantangan, khususnya terkait pengelolaan sampah dan pertambangan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dan instansi terkait telah dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran tersebut, namun demikian implementasi kebijakan dan regulasi masih perlu ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting.

Kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi lingkungan yang memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kondisi Ini mencakup kualitas udara, air, tanah, dan juga aspek sosial seperti kebersihan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) salah satu indikator representatif yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang

kualitas lingkungan suatu wilayah, membantu pengambilan keputusan, dan menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan lingkungan yang efektif.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yakni dari 77,53 pada Tahun 2020 meningkat menjadi 79,74 pada Tahun 2024.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.20
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Adapun komponen pembentuk IKLH periode 2020-2024 disajikan berikut:

Tabel 2.25
Komponen Pembentuk IKLH Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Capaian				
	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
2020	61,67	91,8	83,88	61,76	77,53
2021	55,84	91,33	83,1	87,36	77,78
2022	57,71	91,86	82,48	88,42	78,66
2023	63,69	91,88	0	79,81	79,93
2024	62,07	92,93	82,97	79,08	79,74

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, 2025

F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi (ketangguhan) terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029 karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, perlindungan sosial, dan stabilitas lingkungan.

1) Indeks Resiko Bencana

Kebijakan penanganan risiko bencana di daerah menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini penting karena daerah adalah lokasi terjadinya bencana dan masyarakat paling rentan terhadap dampaknya. Prioritas ini mencakup identifikasi risiko, penyusunan rencana penanggulangan, peningkatan kesiapsiagaan, dan penguatan infrastruktur tahan bencana.

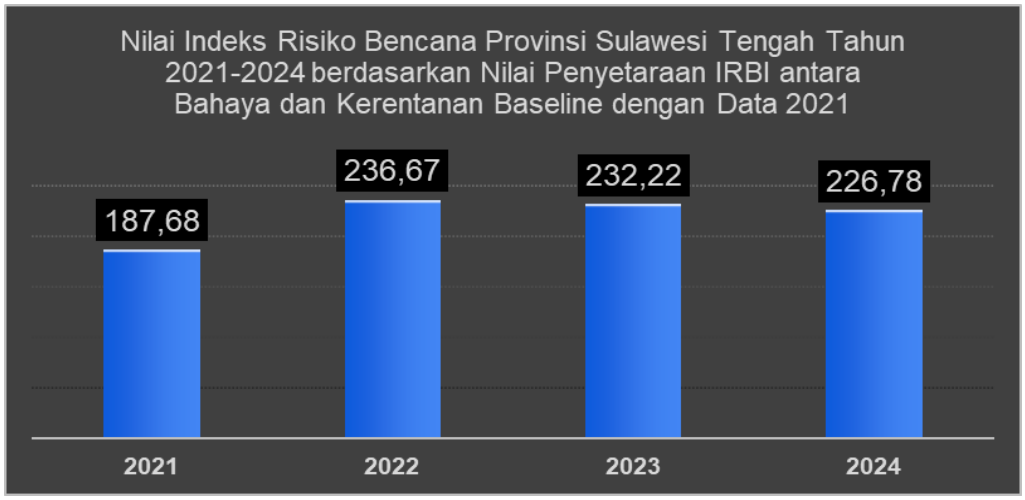
Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor *hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat bahwa ada sebanyak 60 kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni bencana banjir merupakan bencana tertinggi yang yang sering terjadi sebanyak 46 kejadian dan bencana puting beliung sebanyak 7 kejadian. Daerah yang sering terjadi bencana ada di daerah Tojo Una-Una dan Sigi. Tingkat risiko bencana tinggi yang ada di Sulawesi Tengah adalah bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrime, Gelombang ekstrime dan abrasi, Gempa bumi, Kebakaran hutan dan lahan, Kekeringan, Letusan Gunung Api colo, likuefaksi, Tanah longsor dan Tsunami.

Selanjutnya berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Tahun 2021-2024 antara data bahaya dan kerentanan *baseline* dengan data 2021 menunjukkan adanya peningkatan nilai IRBI secara umum. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan risiko bencana di berbagai daerah. Peningkatan IRBI ini disebabkan oleh perubahan data bahaya dan kerentanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan, dimana data *baseline* yang digunakan adalah data Tahun 2021 dengan memasukkan data bahaya

dan kerentanan (termasuk nilai likuefaksi yang terjadi Provinsi Sulawesi Tengah).

Hasil publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan Kerentanan *Baseline* dengan Data 2021, Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 cenderung fluktuatif dimana pada Tahun 2021 nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 187,68 meningkat menjadi 236,67 pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 menurun menjadi 232,22, serta kembali menurun di Tahun 2024 menjadi 226,78, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BNPB, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.21
Perkembangan Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan Kerentanan Baseline dengan Data 2021

Selanjutnya, Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan Kerentanan *Baseline* dengan Data 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

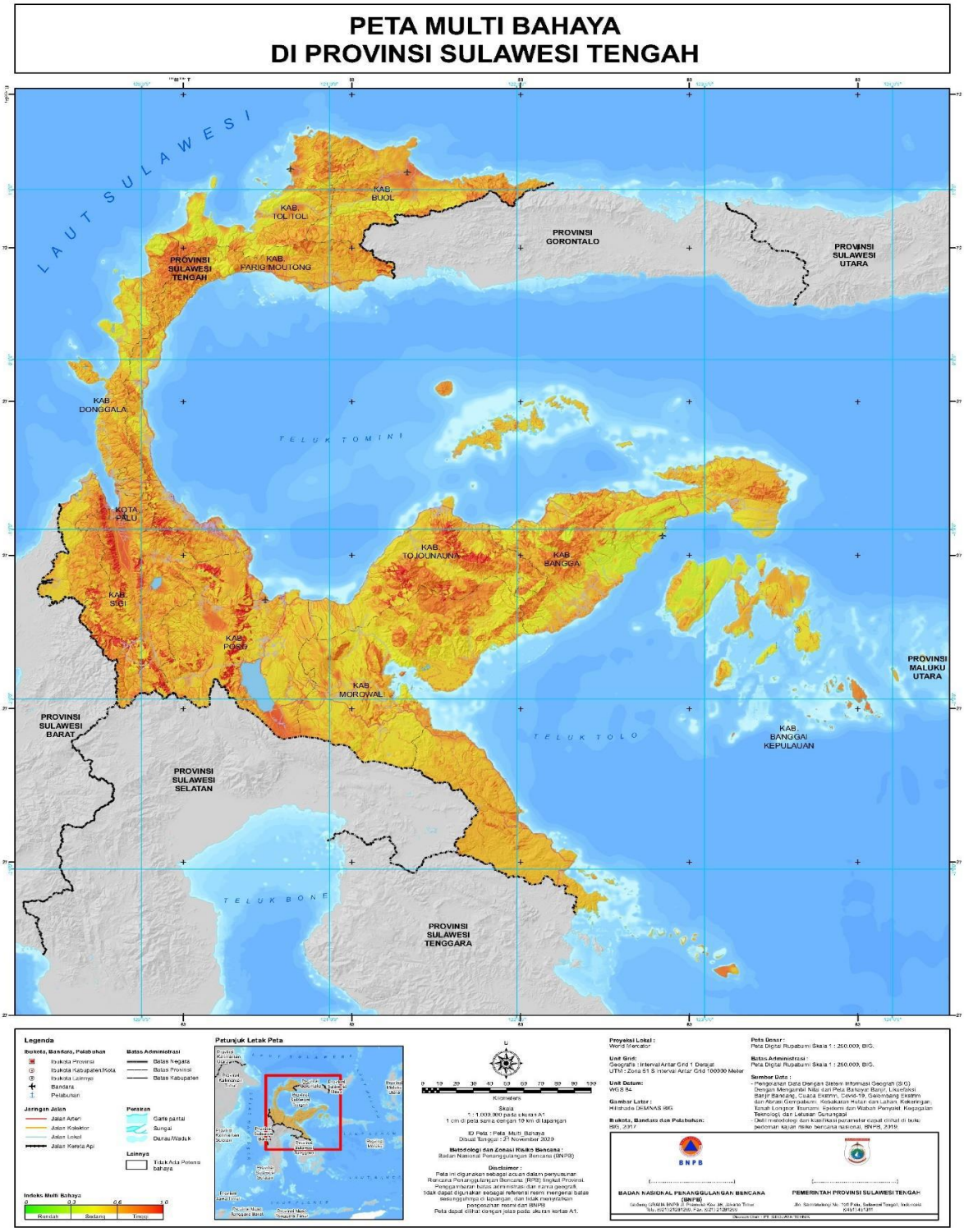
Tabel 2.26
Perkembangan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan Kerentanan *Baseline* dengan Data 2021

No	Kabupaten/Kota	Nilai IRB	Kelas Risiko
1	Banggai	284,74	TINGGI
2	Tojo Una Una	282,00	TINGGI
3	Morowali	275,20	TINGGI
4	Buol	271,20	TINGGI
5	Morowoli Utara	268,80	TINGGI
6	Donggala	266,40	TINGGI
7	Banggai Laut	240,80	TINGGI
8	Tolitoli	236,45	TINGGI
9	Banggai Kepulauan	230,40	TINGGI
10	Poso	183,02	TINGGI
11	Kota Palu	180,27	TINGGI
12	Sigi	172,94	TINGGI
13	Parigi Moutong	124,56	SEDANG

Sumber: BNPB, 2025.

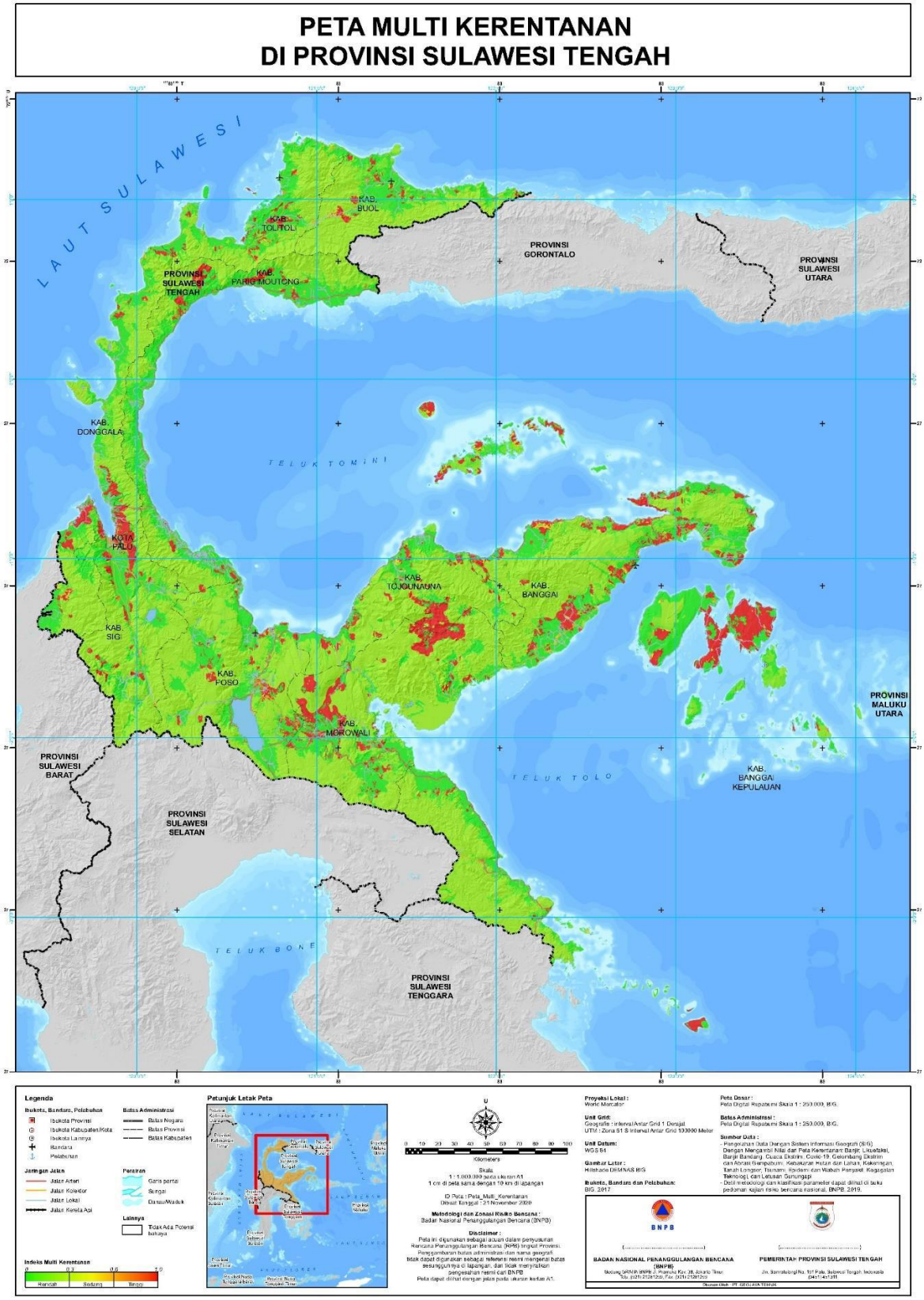
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hampir semua wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah memiliki daerah dengan kategori risiko tinggi kecuali Kabupaten Parigi Moutong dengan kategori sedang.

Selanjutnya kawasan rawan bencana Provinsi Sulawesi Tengah secara spasial disajikan dalam gambar di bawah ini.



Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Gambar 2.22
Peta Multi Bahaya di Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Gambar 2.23
Peta Multi Kerentanan di Provinsi Sulawesi Tengah

2) Indeks Ketahanan Daerah

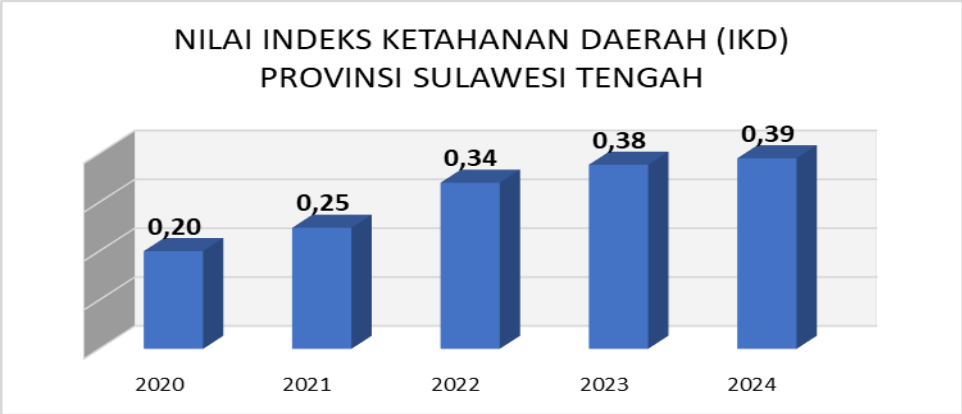
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi . Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah.

Indeks Ketahanan Daerah ini nantinya akan mempengaruhi Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap Provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadikan urusan bencana di Indonesia menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan baik ditingkat kabupaten/kota, Provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan penanggulangan bencana juga tidak hanya ketika terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana yakni prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahapan tersebut menjadi kewajiban yang mesti dijalankan di setiap daerah.

Dengan memperhatikan ketiga tahapan tersebut dalam upaya mengurangi indeks risiko bencana dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan baik dari tahapan perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Dalam upaya pengurangan indeks risiko bencana tersebut tidak hanya melibatkan BPBD saja sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana di daerah, tapi membutuhkan instansi-instansi lintas sektor dalam melaksanakan upaya tersebut.

Setidaknya terdapat 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan yang mesti dijawab dalam setiap pengisian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Ke-284 pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang tidak hanya dimiliki BPBD saja, tapi juga memerlukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait untuk bersinergi menuntaskannya seperti Bappeda dan Litbang, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan lainnya.

Berdasarkan data hasil publikasi BNBP dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yakni dari 0,20 (Kategori rendah) pada Tahun 2020 menjadi 0,39 (kategori rendah) pada Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Sulteng, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.24
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024

Selanjutnya, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Periode 2020 – 2024

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	0,20	0,20	0,24	0,31	0,35
Banggai	0,20	0,20	0,31	0,33	0,37
Morowali	0,20	0,20	0,30	0,34	0,34
Poso	0,20	0,49	0,45	0,45	0,45
Donggala	0,20	0,2	0,20	0,27	0,35
Tolitoli	0,20	0,25	0,42	0,47	0,48
Buol	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21
Parigi Moutong	0,20	0,20	0,63	0,65	0,67
Tojo Una-Una	0,20	0,20	0,24	0,23	0,20
Sigi	0,20	0,40	0,41	0,46	0,47

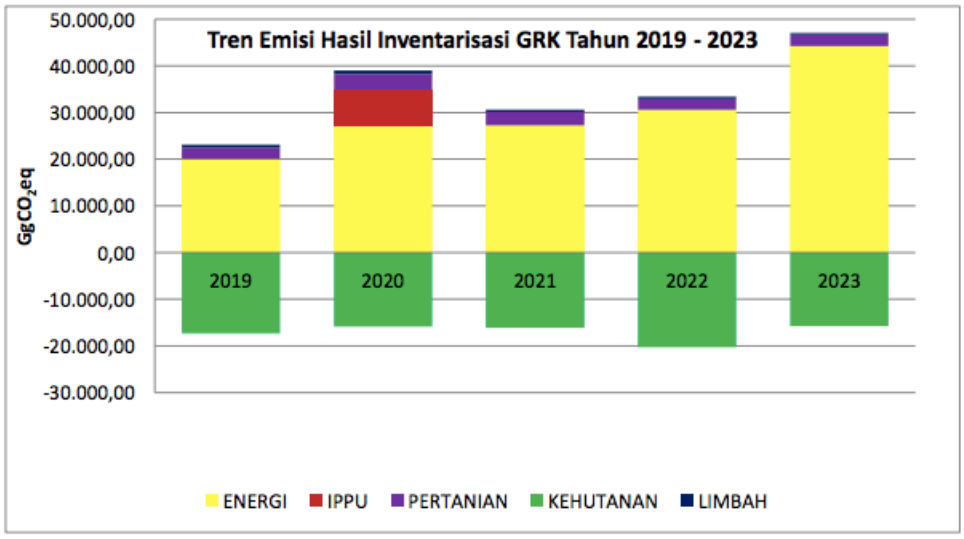
KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Laut	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22
Morowali Utara	0,20	0,28	0,29	0,30	0,30
Kota Palu	0,20	0,20	0,52	0,67	0,73

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Sulteng, 2025.

Dalam perspektif Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/kota Tahun 2024, daerah dengan IKD kategori sedang yaitu Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, sedangkan kabupaten lainnya masuk dalam IKD kategori rendah.

3) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi GRK merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya termasuk simpanan karbon. Setelah data dan informasi diperoleh, selanjutnya dilakukan penginputan pada aplikasi *Sign Smart*. Hasil dari perhitungan kemudian disajikan dalam grafik profil emisi daerah sebagaimana yang termuat pada Gambar dan Tabel berikut.



Sumber: Aplikasi Sign Smart

Gambar 2.25
Grafik Profil Emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Tabel 2.28
Tingkat Emisi Sektoral Tahun 2019-2023

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	ENERGI	20.051,35	27.257,44	27.294,84	30.653,68	44.231,09
2	IPPU	0,00	7.717,51	0,00	0,00	0,00
3	PERTANIAN	2.383,54	3.307,99	2.856,38	2.330,27	2.457,94
4	KEHUTANAN	-17.324,99	-15.867,02	-16.124,29	-20.255,48	-15.747,19
5	LIMBAH	649,90	713,91	475,40	423,81	401,91
TOTAL (GgCO2eq)		**5.759,81**	**23.129,83**	**14.502,34**	**13.152,28**	**31.343,76**

Sumber: Aplikasi *Sign Smart, 2024*

Tabel di atas menjelaskan deskripsi tren emisi dan tingkat emisi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

- Emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mencapai 47.091 $GgCO_2eq$. besaran angka emisi ini belum termasuk emisi yang dihasilkan oleh sektor IPPU. Kontribusi terbesar bersumber dari sektor energi yakni 94% atau sama dengan 44.231,09 $GgCO_2eq$;
- Sektor kehutanan menunjukkan kinerja baik dalam mereduksi emisi, dimana terjadi serapan emisi sebanyak 15.747,19 $GgCO_2eq$. Jika bandingkan dengan Tahun 2022 serapan emisi yang sebesar 20.255,48 $GgCO_2eq$, maka terjadi penurunan serapan emisi sebanyak 22%;
- Dengan membandingkan antara data emisi dan serapan, maka emisi netto Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mencapai 31.343,76 $GgCO_2eq$;
- Pola data emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data dari Tahun 2019, menunjukkan tren emisi pada sektor energi mengalami peningkatan. Hasil analisis menemukan bahwa penyebab peningkatan tren tersebut dikarenakan konsumsi batu bara yang dalam penyediaan energi untuk industri pertambangan mengalami peningkatan jumlah sehingga menyebabkan peningkatan emisi sektor energi antara Tahun 2022 ke Tahun 2023 mencapai 44%;
- Pertumbuhan emisi sektor limbah nampaknya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pada Tahun 2023 emisinya mencapai 409,91 $GgCO_2eq$ yang berarti mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan Tahun sebelumnya;

- ada halnya dengan sektor pertanian, tren emisinya mengalami peningkatan sekalipun secara kuantitatif tidak besar namun proporsinya sebesar 5%;
- Khusus di sektor kehutanan, kinerja sektor ini terhadap pengurangan emisi menunjukkan kondisi menurun dari Tahun sebelumnya. Sektor ini memiliki serapan emisi yang dihasilkan mencapai 15.747,19 $GgCO_2eq$ atau menurun sebanyak 22% dari Tahun 2022.

G. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

1) Jumlah Penduduk

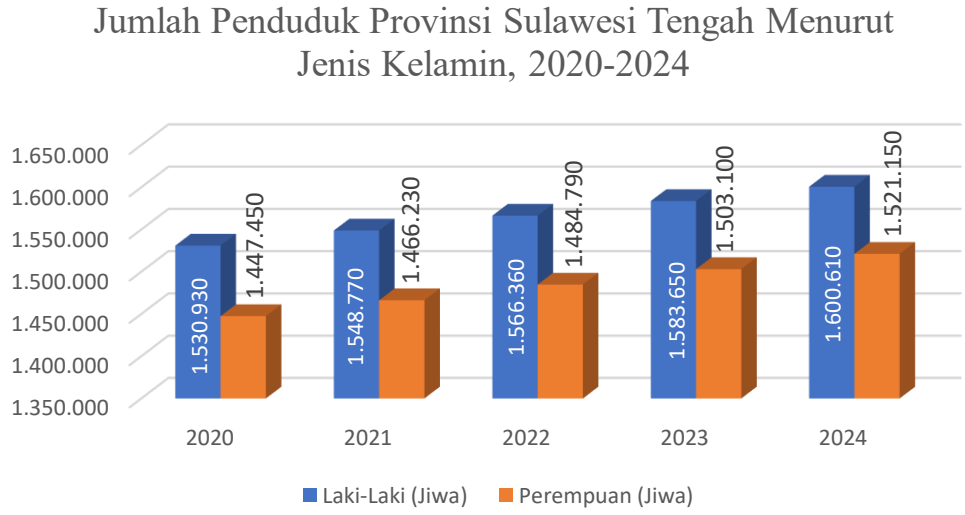
Adanya potensi sumber daya alam yang melimpah ruah menyebabkan mobilitas penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah cukup tinggi. Jumlah penduduk selama kurang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 2.978.380 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 3.121.750 jiwa pada Tahun 2024, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1-1,5 persen pertahunnya dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa per kilometer persegi.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.26
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 didominasi oleh kaum laki-laki yakni pada Tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.530.930 jiwa meningkat menjadi 1.600.610 jiwa pada Tahun 2024, sedangkan jumlah penduduk perempuan yakni dari 1.447.450 jiwa pada Tahun 2020 meningkat menjadi 1.521.150 jiwa pada Tahun 2024.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.27
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan penduduk kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan laki-laki dan perempuan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Berdasarkan Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Banggai Kepulauan	60.800	59.040	119.840	61.380	59.680	121.060	61.910	60.330	122.240	62.460	60.960	123.420	62.990	61.580	124.570
Banggai	184.680	176.860	361.540	186.630	179.020	365.650	188.550	181.160	369.710	190.430	183.260	373.690	192.270	185.330	377.600
Morowali	88.890	72.310	161.200	90.570	73.800	164.370	92.220	75.250	167.470	93.790	76.660	170.450	95.290	78.020	173.310
Poso	126.340	117.960	244.300	127.470	119.300	246.770	128.610	120.620	249.230	129.720	121.940	251.660	130.810	123.250	254.060
Donggala	154.540	145.360	299.900	155.860	146.890	302.750	157.160	148.390	305.550	158.430	149.880	308.310	159.660	151.330	310.990
Tolitoli	114.830	109.880	224.710	115.970	111.130	227.100	117.100	112.350	229.450	118.180	113.530	231.710	119.220	114.680	233.900
Buol	74.430	70.450	144.880	75.380	71.400	146.780	76.310	72.350	148.660	77.230	73.290	150.520	78.140	74.220	152.360
Parigi Moutong	225.330	213.580	438.910	227.930	216.340	444.270	230.490	219.040	449.530	232.990	221.700	454.690	235.460	224.330	459.790
Tojo Una-Una	84.020	79.400	163.420	85.020	80.290	165.310	86.010	81.170	167.180	86.970	82.030	169.000	87.920	82.890	170.810
Sigi	131.850	124.830	256.680	133.390	126.600	259.990	134.950	128.370	263.320	136.510	130.140	266.650	138.060	131.900	269.960
Banggai Laut	35.480	34.730	70.210	35.970	35.240	71.210	36.440	35.720	72.160	36.900	36.200	73.100	37.350	36.670	74.020
Morowali Utara	62.730	57.610	120.340	63.740	58.530	122.270	64.720	59.450	124.170	65.690	60.350	126.040	66.630	61.240	127.870
Kota Palu	187.010	185.450	372.460	189.450	188.010	377.460	191.890	190.580	382.470	194.340	193.150	387.490	196.790	195.710	392.500
Sulawesi Tengah	1.530.930	1.447.450	2.978.380	1.548.770	1.466.230	3.015.000	1.566.360	1.484.790	3.051.150	1.583.650	1.503.100	3.086.750	1.600.610	1.521.140	3.121.750

Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Dilihat dari distribusi penduduk berdasarkan kabupaten/kota Tahun 2024, konsentrasi penduduk terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebanyak 459.790 jiwa atau sebesar 14,73 persen dari populasi penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kota Palu yakni sebanyak 392.500 jiwa (12,57%) dan Kabupaten Banggai sebanyak 377.600 jiwa (12,10%). Sedangkan konsentrasi penduduk terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut yakni hanya 74.020 jiwa (2,37%).

2) Penduduk Dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki banyak Komunitas Adat Terpencil yang belum diberdayakan. Berdasarkan data Tahun 2023/2024, masih terdapat 16.679 jumlah Kepala Keluarga atau 66.711 jiwa komunitas adat yang tersebar di 12 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Persebaran tersebut terbagi atas beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel berikut:

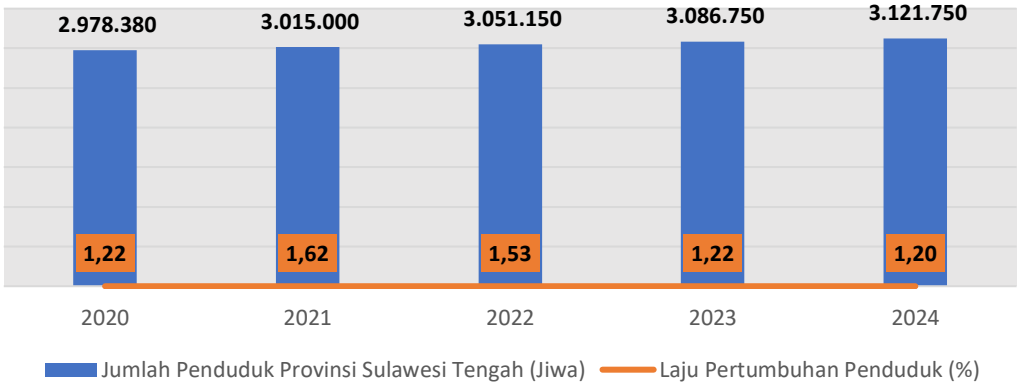
Tabel 2.30
Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) Menurut Kabupaten dan Suku Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023/2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	NAMA SUKU	KK	JIWA
1.	Banggai Kepulauan	1. Sea-Sea	275	1.100
2.	Banggai	1. Loinang (Saluan)	1.117	4.468
3.	Morowali	1. Wana (Taa)	392	1.568
4.	Poso	1. Mori	94	376
5.	Donggala	1.Tolare (Da'a)	1.259	5.036
6.	Tolitoli	1.Lautje	1.218	4.922
		2. Pendau	1.082	4.420
		3.Dondo	2.104	8.343
		4.Pandau dan Dondo	165	591
		5. Hanje	100	400
		6. Bajo	145	604
7.	Buol		-	-
8.	Parigi Moutong	1.Lauje	2.377	9.508
		2.Tara	-	-
		3.Pendau	-	-
9.	Sigi	1. Da'a	3.250	12.969
10.	Banggai Laut	1.Banggai	592	2.370
		2.Banggai Bajo	320	1.280
11.	Morowali Utara		1.032	4.128
12	Tojo Una-Una	Wana	1.157	4.628
Jumlah			**16.679**	**66.711**

Sumber: BPS, 2025 (data diolah Kembali)

3) Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.28
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

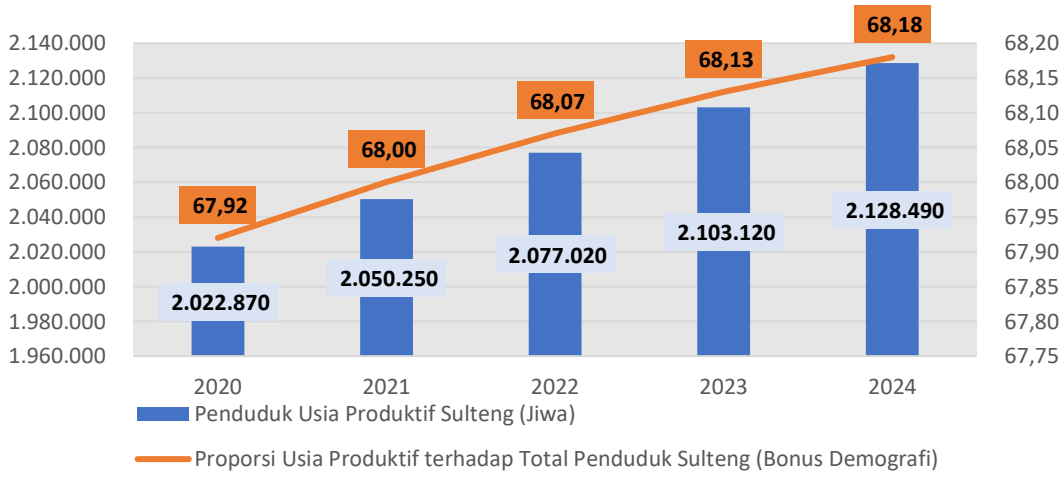
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung menurun dan angkanya relatif kecil yakni dari 1,22 persen pada Tahun 2020 menurun menjadi 1,20 persen pada Tahun 2024.

4) Penduduk Usia Produktif

Sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara Tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan.

Usia produktif sangat penting untuk mendukung produktivitas dan kualitas hidup. Usia produktif ditandai dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efektif dan efisien. Kategori usia produktif menurut BPS yakni penduduk yang berusia 15 Tahun sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan data BPS, Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 memiliki bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif terhadap total penduduk lebih dari 60 persen, yakni dari 67,92 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 68,18 persen pada Tahun 2024. Sementara jumlah penduduk usia produktif Provinsi Sulawesi Tengah

dari 2.022.870 jiwa pada Tahun 20219 meningkat menjadi 2.128.490 jiwa.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

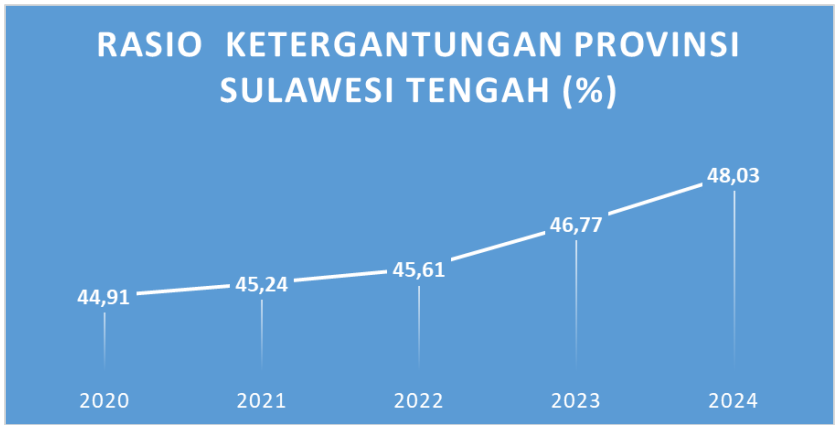
Gambar 2.29
Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

5) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk yang berumur 0–14 Tahun dan 65 Tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 Tahun dikalikan 100.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah mengindikasikan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Rasio ketergantungan Usia Non Produktif terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kecenderungan meningkat yakni dari 44,91 persen pada Tahun 2020 menjadi 48,03 persen pada Tahun 2024.



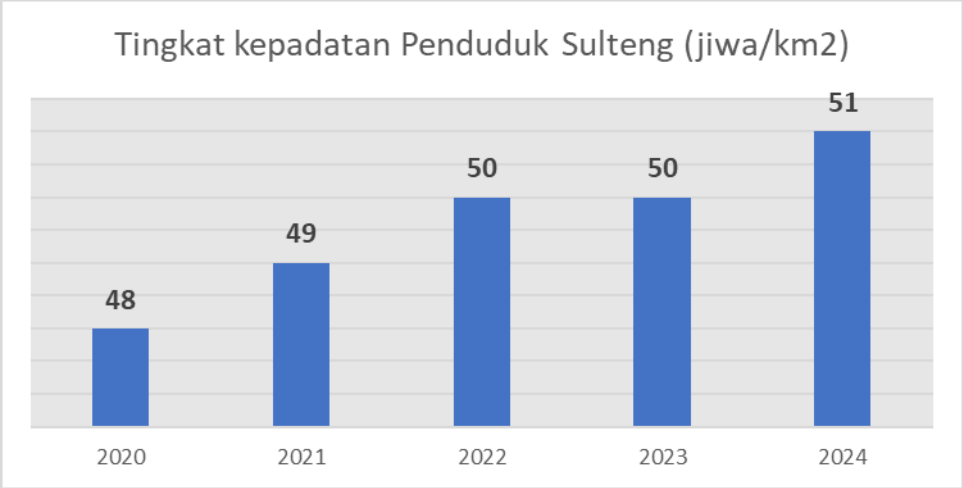
Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.30
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

6) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah per satuan luas, biasanya per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kekurangan sumber daya, masalah sanitasi, degradasi lingkungan, dan kesulitan dalam penyediaan infrastruktur. Dengan demikian, menekan kepadatan penduduk menjadi penting dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kecenderungan meningkat yakni dari 40 jiwa/km2 pada Tahun 2020 menjadi 51 jiwa/km2 pada Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



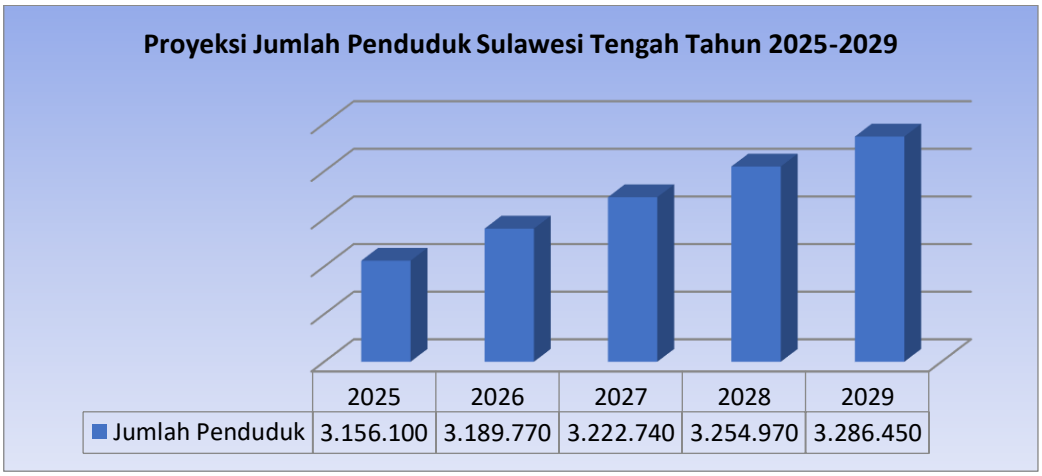
Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.31
Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

7) Proyeksi Penduduk

(A) Proyeksi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Juni 2020 sebesar 2,978 juta orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 3,15 juta orang pada Tahun 2025, dan sebesar 3,286 juta orang pada Tahun 2029.

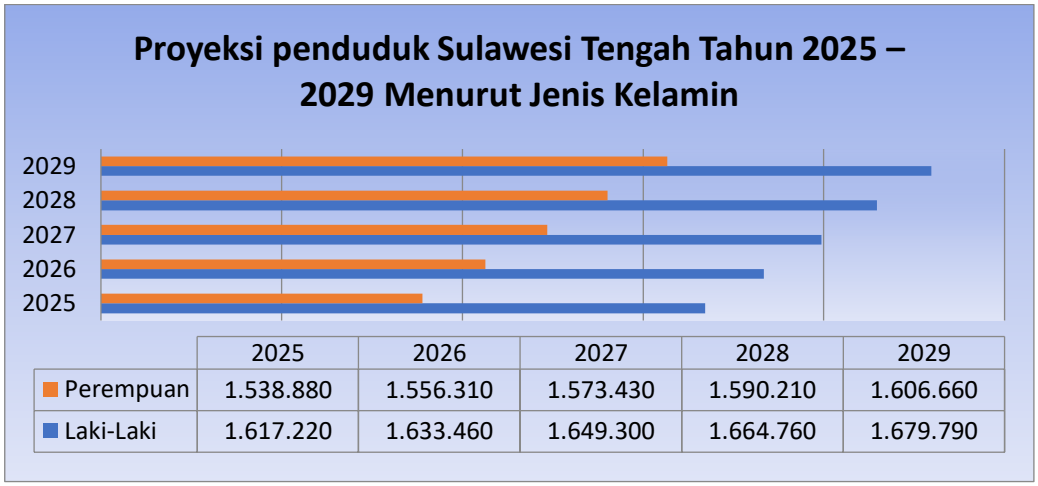


Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035

Gambar 2.32
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 menurut jenis kelamin tergambar bahwa penduduk Sulawesi Tengah

hingga Tahun 2029 di dominasi oleh laki-laki dengan rata-rata berkisar 51,18 persen, seperti tersaji dalam gambar berikut:

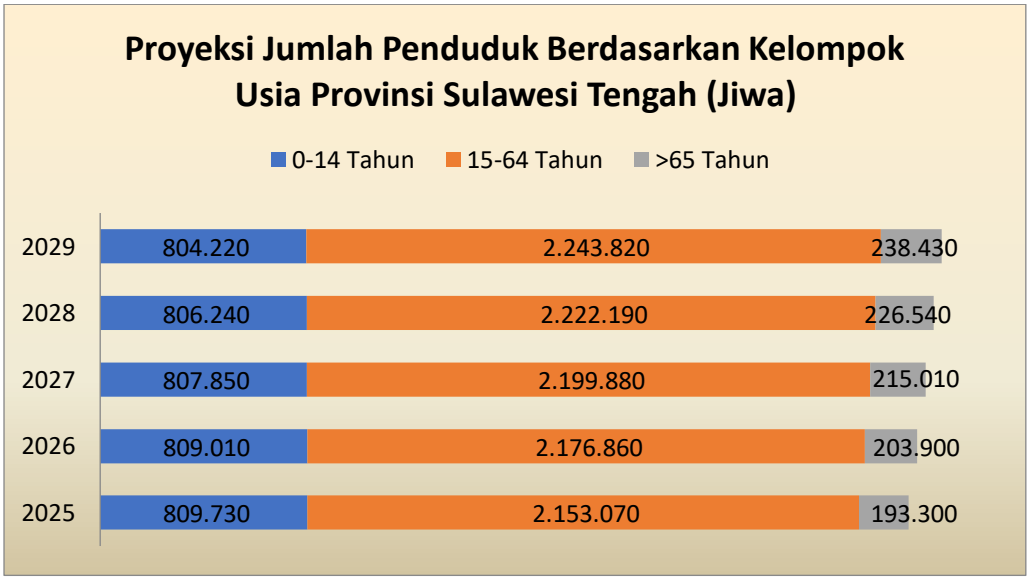


	2025	2026	2027	2028	2029
Perempuan	1.538.880	1.556.310	1.573.430	1.590.210	1.606.660
Laki-Laki	1.617.220	1.633.460	1.649.300	1.664.760	1.679.790

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035

Gambar 2.33
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029

Proyeksi menurut komposisi umum tergambar bahwa Penduduk Sulawesi Tengah didominasi oleh Usia Produktif yaitu 15 – 64 tahun, pada Tahun 2025 diprediksi penduduk produktif sebesar 68,22 persen sehingga angka ketergantungan di prediksi sebesar 46,80 persen. Berikut proyeksi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kelompok usia:



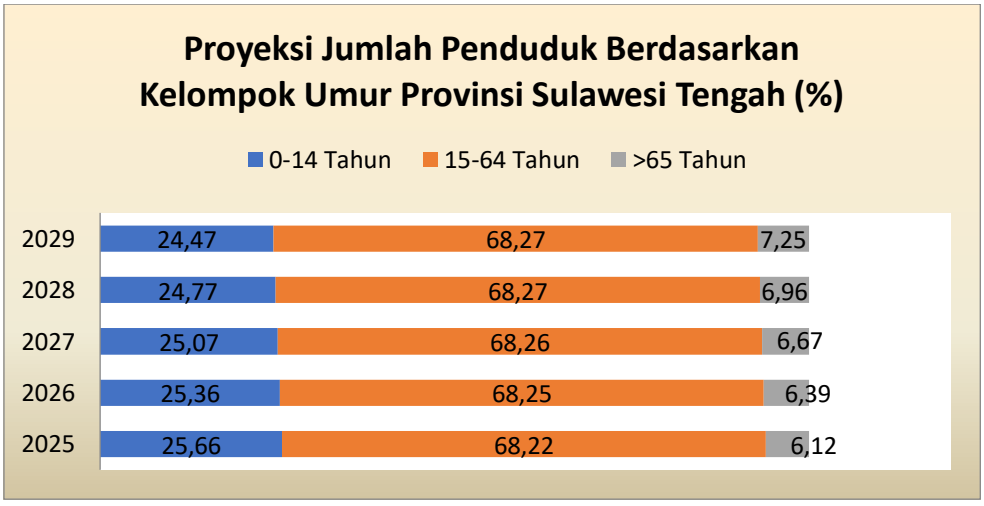
Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035

Gambar 2.34
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Provinsi Sulawesi Tengah (Jiwa)

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah hasil proyeksi didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 Tahun). Pada Tahun 2025, jumlah penduduk usia 15-64 Tahun mencapai 2.153.070 (jiwa), pada Tahun 2026 diproyeksikan sebanyak 2.176.860 (jiwa), Tahun 2027 sebanyak 2.199.880 (jiwa), Tahun 2028 sebanyak 2.222.190 (jiwa), dan pada Tahun 2029 sebanyak 2.243.820 (jiwa) dan menandai bonus demografi karena jumlah penduduk di dominasi oleh usia produktif.

(B) Penduduk Usia Produktif

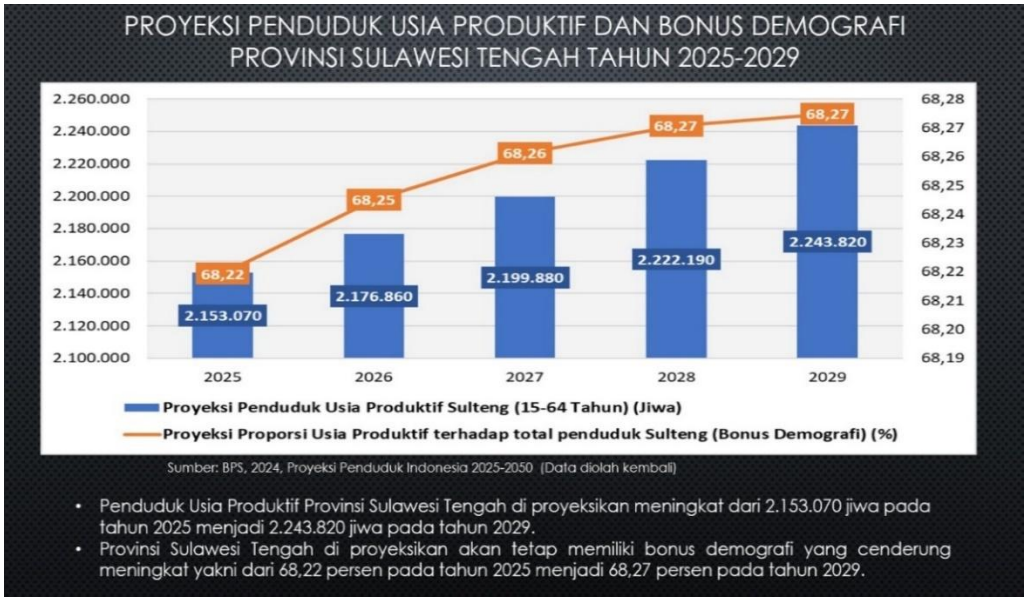
Penduduk usia produktif merujuk kepada bagian dari populasi suatu wilayah atau negara yang berada dalam rentang usia yang dianggap ideal untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan produktif. Meskipun batasan usia ini dapat bervariasi, namun biasanya mencakup kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun. Manajemen dan pengelolaan potensi penduduk usia produktif menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035 (data diolah kembali)

Gambar 2.35
Proyeksi Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029

Persentase jumlah usia produktif (15-64 tahun) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 di proyeksikan sebesar 68,22 persen meningkat menjadi 68,25 persen pada Tahun 2026, selanjutnya pada Tahun 2027 di proyeksikan akan bertambah menjadi 68,26 persen dan menjadi 68,27 persen pada Tahun 2028, dan pada Tahun 2029 usia produktif sama dengan Tahun 2028 yaitu menjadi 68,27 persen.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035 (data diolah kembali)

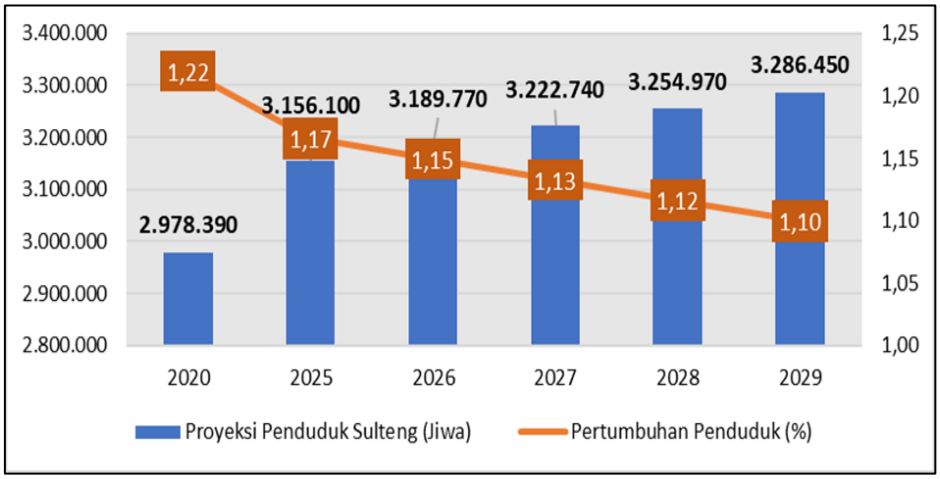
Gambar 2.36
Proyeksi Penduduk dan Proporsi Usia Produktif (15-64 Tahun) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa bonus demografi di Provinsi Sulawesi Tengah di proyeksikan masih akan berlangsung untuk 5 Tahun ke depan dengan nilai proporsi usia produktif terhadap total penduduk semakin meningkat yakni dari 2.153.070 jiwa (68,22 persen) pada Tahun 2025 menjadi 2.243.820 jiwa (68,27 persen) pada Tahun 2029.

(C) Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan

semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.37
Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

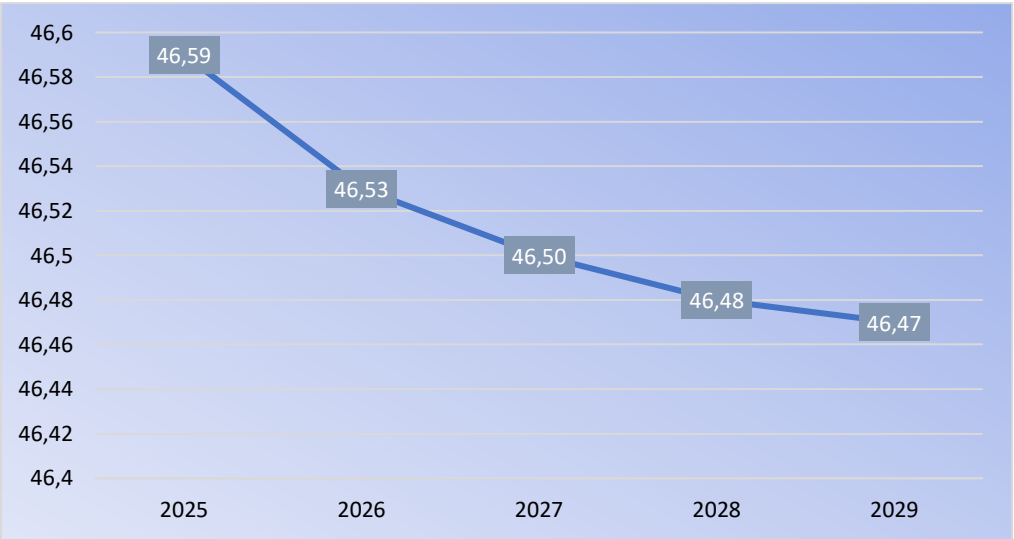
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 di proyeksikan akan terus mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2025–2029 diproyeksikan mengalami penurunan yakni dari 1,17 persen pada Tahun 2025 menurun menjadi 1,10 persen pada Tahun 2029.

(D) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk yang berumur 0–14 Tahun dan 65 Tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 Tahun dikalikan 100.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah mengindikasikan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Rasio ketergantungan Usia Non Produktif terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 di proyeksikan akan mengalami penurunan yakni pada Tahun 2025 sebesar 46,59 persen dan pada Tahun 2025 menurun menurun menjadi 46,47 persen pada Tahun 2029.



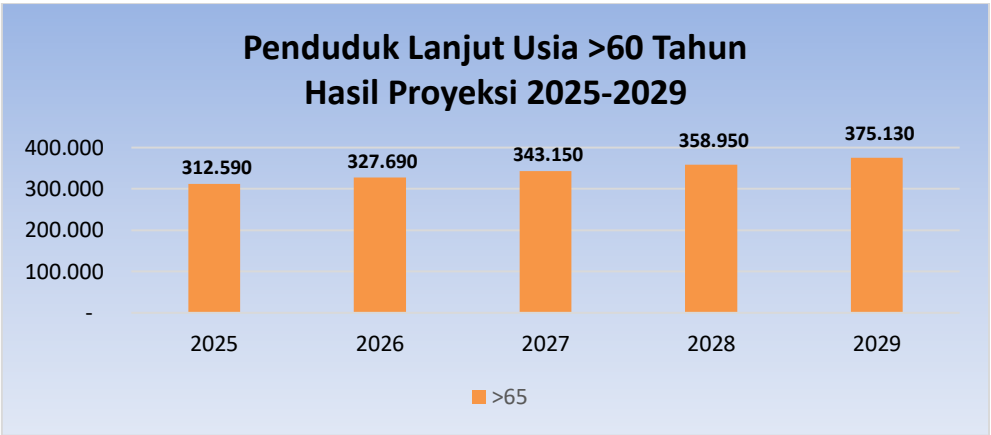
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035 (data diolah kembali)

Gambar 2.38
Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

(E) Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Penduduk lanjut usia adalah kelompok individu yang telah melewati usia pensiun dan biasanya berusia 60 Tahun ke atas. Fenomena ini menjadi semakin penting seiring pertumbuhan harapan hidup dan perkembangan masyarakat yang menua. Penduduk lanjut usia memainkan peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan kesehatan suatu negara.

Proyeksi penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2025–2029 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 60 Tahun ke atas (lanjut usia). Proporsi penduduk umur 60 Tahun ke atas pada 2025 sebesar 312.590 ribu penduduk dan meningkat menjadi 375.130 ribu penduduk pada Tahun 2029.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.39
Proyeksi Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

(F) Bonus Demografi

Bonus demografi adalah fenomena di mana suatu populasi memiliki proporsi besar dari kelompok usia produktif atau pekerja dibandingkan dengan kelompok usia yang tidak produktif, seperti anak-anak dan lansia. Bonus demografi terjadi ketika jumlah orang usia produktif meningkat secara signifikan, sementara jumlah anak-anak dan lansia relatif stabil. Ketika suatu negara atau wilayah mengalami bonus demografi, hal ini dapat menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan. Jika tidak dielola dengan baik, bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan demografi ketika populasi usia produktif menjadi lebih tua tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup. Oleh karena itu, perencanaan dan kebijakan yang berkelanjutan sangat penting untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi.

Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami perubahan atau bonus demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar Tahun 2035. Namun, pada saat yang sama angka ketergantungan mengalami penurunan karena jumlah penduduk usia anak menurun. Perkembangan bonus demografi di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Bonus Demografi Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Indikator Penduduk	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Provinsi Sulteng (Jiwa)	2.978.380	3.015.000	3.051.150	3.086.750	3.121.750
Jumlah Penduduk Usia Produktif Sulteng (Bonus Demografi) (Jiwa)	2.022.870	2.050.250	2.077.020	2.103.120	2.128.490
Proporsi Penduduk Usia Produktif (Bonus Demografi) (%)	67,92	68,00	68,07	68,13	68,18

Sumber: BPS, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

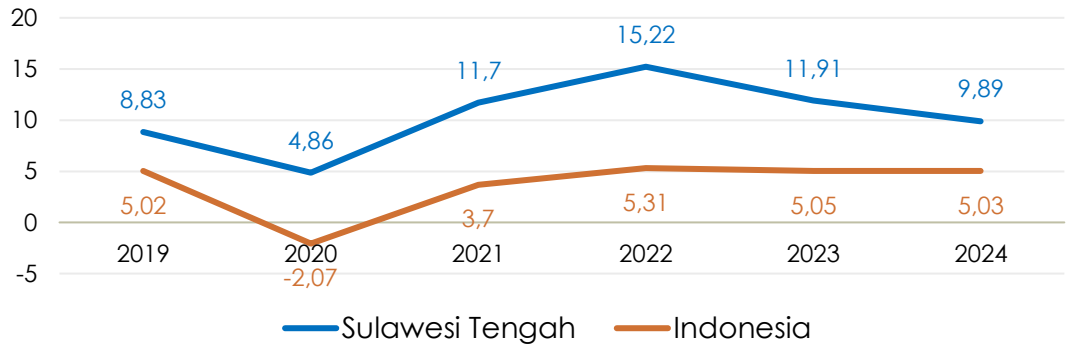
A. Kesejahteraan Ekonomi

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan prestasi yang spektakuler. Prestasi kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya, dan berada di atas nasional. Kecuali pada Tahun 2020 sedikit melambat sebagai konsekuensi adanya pembatasan larangan ekspor bahan mentah minerba sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta adanya Bencana Alam berupa gempa bumi tsunami dan likuefaksi serta bencana pandemi Covid-19. Selanjutnya pasca pandemi Covid-19 kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah kembali menunjukkan kinerja yang membaik hingga Tahun 2023. Secara detail

perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2019-2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.40
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019-2024

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif yakni pada Tahun 2019 LPE sebesar 8,83 persen menurun menjadi 4,86 persen pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 LPE meningkat menjadi 11,70 persen, dan kembali meningkat menjadi 15,17 persen pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 LPE menurun menjadi 11,91 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 9,89 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 9,89 persen mengalami perlambatan akibat dari melemahnya permintaan ekspor barang dan jasa terutama permintaan hasil pengolahan biji nikel ke luar negeri sebagai konsekuensi dari lesunya perekonomian global.

Dilihat dari sisi penawaran Tahun 2024, sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar dengan produktivitas tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 19,12 persen (didominasi oleh industri logam dasar), menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah sektor jasa keuangan dan asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar 11,48 persen dan sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 6,19 persen.

Tabel 2.32
Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2024

SEKTOR EKONOMI		2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	2,75	1,73	1,93
B	Pertambangan dan Penggalian	12,25	20,58	11,46	6,19
C	Industri Pengolahan	19,62	29,69	25,53	19,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,98	9,27	6,65	7,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	3,30	2,84	4,06
F	Konstruksi	18,21	9,10	1,02	3,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	11,32	11,44	5,76	5,55
H	Transportasi dan Pergudangan	6,49	26,26	6,12	4,66
I	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	13,37	11,79	9,59	7,58
J	Informasi dan Komunikasi	8,49	4,76	6,83	4,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,29	-1,10	1,16	11,48
L	Real Estat	2,40	8,87	7,53	4,67
M,N	Jasa Perusahaan	3,10	6,87	5,63	5,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,89	-0,18	2,08	5,32
P	Jasa Pendidikan	0,79	2,89	4,48	3,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,20	3,35	5,80	3,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,83	6,79	5,99	4,15
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SULTENG		**11,68**	**15,22**	**11,91**	**9,89**

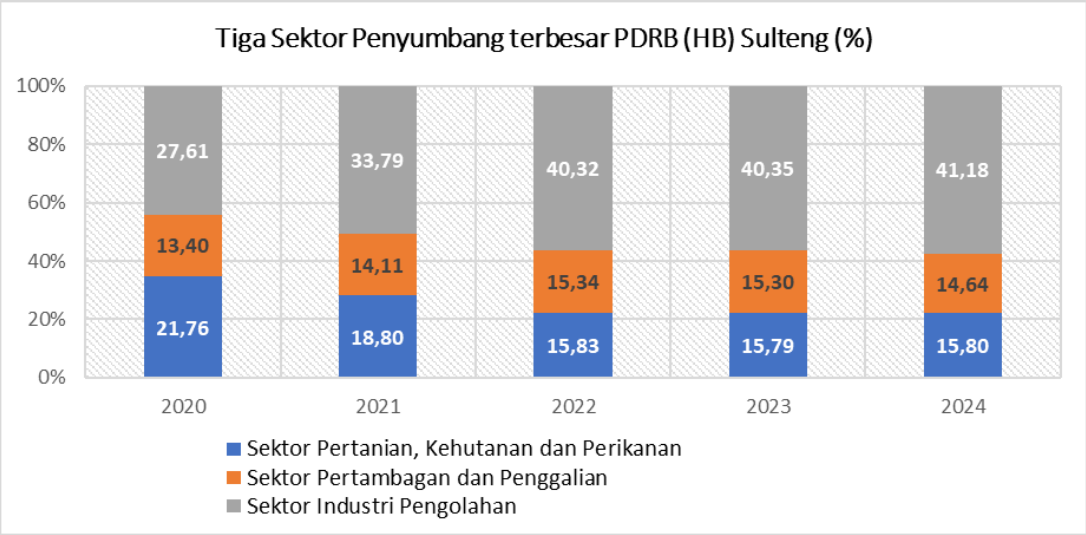
Sumber: BPS, 2025

Dilihat dari struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 3 (tiga) sektor yang berkontribusi besar dan memberikan andil dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

Perkembangan kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kecenderungan yang menurun yakni dari 21,76 persen pada Tahun 2020 menjadi 15,80 persen pada Tahun 2024. Sementara Kontribusi Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 27,61 persen pada Tahun 2020 menjadi 41,18 persen pada Tahun 2024, sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian relatif kecil peningkatannya yakni dari 13,40

persen pada Tahun 2020 menjadi 14,64 persen pada Tahun 2024. Untuk mengimbangi kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap kontribusi sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian perlu dilakukan upaya hilirisasi terhadap semua komoditi 3 (tiga) sub sektor tersebut, dengan ketentuan bahwa semua komoditi yang akan diekspor atau bernilai ekspor harus berada dalam bentuk setengah jadi atau jadi sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) di setiap rantai distribusinya dan meningkatkan kontribusi terhadap nilai PDRB.

Secara detail mengenai perkembangan kontribusi 3 (tiga) sektor utama dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.41
Kontribusi 3 (tiga) Sektor Utama terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Selanjutnya, mengenai capaian laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

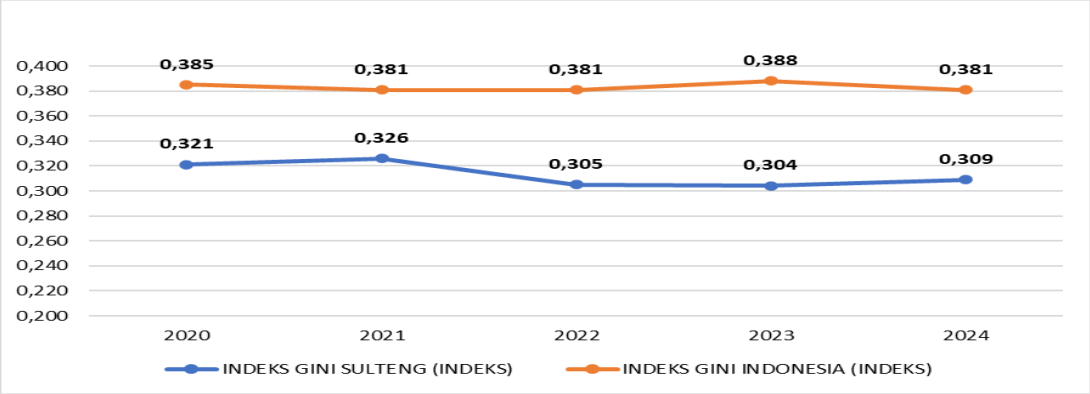
No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	-2,36	5,07	4,94	3,99	4,03
2	Kabupaten Banggai	-4,8	1,75	6,9	2,42	3,63
3	Kabupaten Morowali	28,74	25,28	28,4	20,34	16,26
4	Kabupaten Poso	-3,94	4,86	3,64	3,88	3,78

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
5	Kabupaten Donggala	-4,26	4,64	3,86	4,68	3,77
6	Kabupaten Tolitoli	-3,39	4,36	3,64	3,52	3,32
7	Kabupaten Buol	-2,89	4,88	3,66	3,59	3,31
8	Kabupaten Parigi Moutong	-4,95	4,67	3,71	3,58	3,58
9	Kabupaten Tojo Una-Una	-3,17	4,25	3,46	3,37	3,69
10	Kabupaten Sigi	-1,5	5,66	3,33	3,37	3,50
11	Kabupaten Banggai Laut	-3,97	4,37	4,09	3,83	3,52
12	Kabupaten Morowali Utara	-0,23	10,56	36,37	23,04	14,03
13	Kota Palu	-4,43	5,97	4,32	4,96	4,61

Sumber: BPS, 2025

2) Indeks Gini

Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat yakni indeks gini atau koefisien gini. Indeks gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna. Perkembangan capaian indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 2020 sampai dengan 2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, 2019-2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.42
Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Capaian indeks gini Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kecenderungan menurun, yakni dari 0,321 pada Tahun 2020 menjadi 0,309 pada Tahun 2024. Capaian indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih baik dibandingkan dengan capaian indeks gini Nasional. Hal ini memberikan makna bahwa distribusi pendapatan antar

kelompok masyarakat semakin merata. Selanjutnya, dilihat dari perspektif wilayah, capaian indeks gini kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	0,298	0,279	0,280	0,272	0,276
2	Banggai	0,308	0,277	0,315	0,283	0,316
3	Morowali	0,290	0,297	0,285	0,281	0,275
4	Poso	0,311	0,270	0,256	0,265	0,247
5	Donggala	0,276	0,261	0,280	0,237	0,251
6	Tolitoli	0,336	0,349	0,295	0,345	0,277
7	Buol	0,289	0,321	0,266	0,258	0,266
8	Parigi Moutong	0,293	0,287	0,279	0,298	0,250
9	Tojo Una-una	0,256	0,247	0,250	0,262	0,244
10	Sigi	0,281	0,291	0,265	0,281	0,246
11	Banggai Laut	0,251	0,251	0,247	0,244	0,221
12	Morowali Utara	0,319	0,301	0,269	0,284	0,245
13	Kota Palu	0,304	0,308	0,355	0,324	0,337

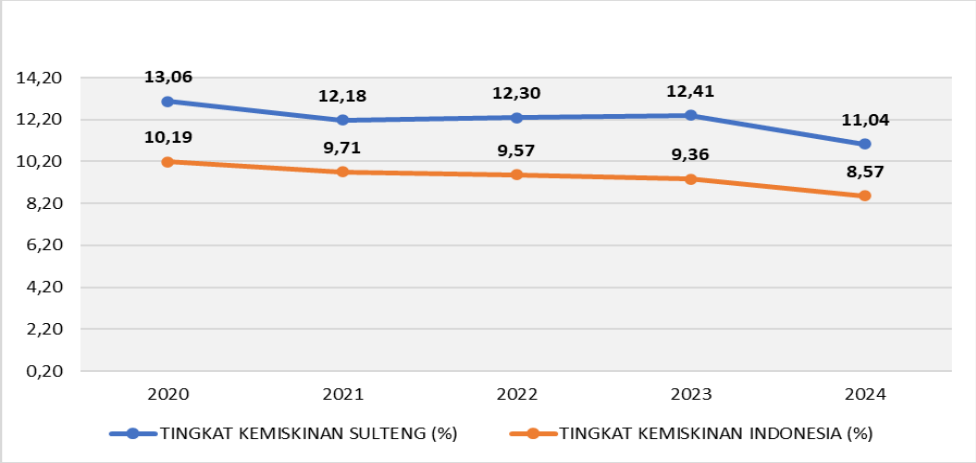
Sumber: BPS, 2025.

3) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni dari 13,06 persen (403.740 jiwa) pada Tahun 2020 menjadi 11,04 persen (358.330 jiwa) pada Tahun 2024. Hal ini menjadi luar biasa dimana untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah menyentuh angka di bawah 12 persen. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari kolaborasi dan sinergitas kebijakan program

penanggulangan kemiskinan daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 2020 sampai dengan 2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020-2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.43
Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Selanjutnya, mengenai perkembangan kondisi kemiskinan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.35
Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		Maret 2020	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023	Maret 2024
1	Banggai Kepulauan	13,44	13,72	13,44	12,90	12,32
2	Banggai	7,33	7,83	7,33	6,94	6,56
3	Morowali	12,58	13,75	12,58	12,31	11,55
4	Poso	15,18	15,92	15,18	15,61	14,23
5	Donggala	16,30	16,73	16,30	16,25	15,30
6	Tolitoli	12,74	13,51	12,74	12,85	12,45
7	Buol	12,85	14,06	12,58	13,36	13,08
8	Parigi Moutong	14,63	15,28	14,63	14,91	14,20
9	Tojo Una-una	16,12	16,60	16,12	16,74	16,36
10	Sigi	12,30	13,05	12,30	12,83	12,06
11	Banggai Laut	13,17	14,17	13,17	14,15	13,78

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		Maret 2020	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023	Maret 2024
12	Morowali Utara	12,97	13,90	12,97	12,85	11,95
13	Kota Palu	6,63	7,17	6,63	6,56	5,94

Sumber: BPS, 2025.

Dalam perspektif kemiskinan ekstrem, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yakni dari 3,15 persen pada Tahun 2021 menurun menjadi 1,27 persen pada Tahun 2024. Dilihat dari tingkat kemiskinan ekstrem kabupaten/kota Tahun 2024, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 2,16 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Sigi sebesar 1,83 persen, dan Kabupaten Buol sebesar 1,66 persen.

Tabel 2.36
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2024

No.	Nama Daerah	Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	1,50	1,34	1,87	1,41
2	Banggai	1,81	1,44	0,00	1,15
3	Morowali	2,86	3,24	0,73	1,23
4	Poso	4,17	3,36	1,80	1,33
5	Donggala	3,61	3,59	1,94	1,39
6	Toli-toli	1,26	1,51	1,14	1,26
7	Buol	2,69	1,24	0,52	1,66
8	Parigi Moutong	5,96	6,39	2,41	1,32
9	Tojo Unauna	5,27	3,42	1,31	2,16
10	Sigi	1,82	2,54	2,07	1,83
11	Banggai Laut	5,40	3,93	1,67	1,12
12	Morowali Utara	4,34	3,04	3,38	1,28
13	Kota Palu	0,90	1,63	0,58	0,36
Provinsi Sulawesi Tengah		**3,15**	**3,02**	**1,44**	**1,27**

Sumber: BPS, 2025.

Berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan angka kemsikinan melalui program-program prioritas pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Upaya program multi sasaran dalam rangka

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah bersama instansi terkait yang termasuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain melalui strategi 4K yaitu menjaga Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

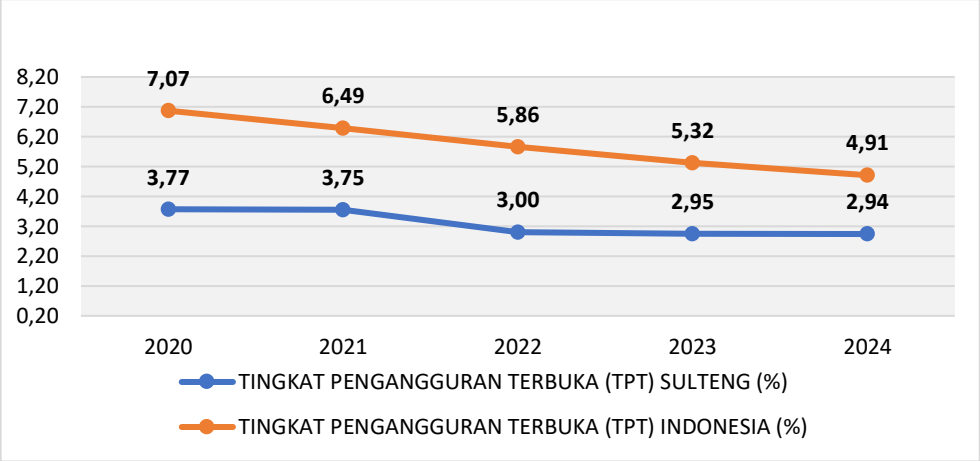
1. **Strategi Keterjangkauan Harga** dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga;
2. **Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga** komoditas bahan makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam komoditas penyumbang inflasi misalnya hortikultura di pekarangan rumah atau di dalam pot;
3. **Kelancaran Distribusi** dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerja sama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan digitalisasi pasar tradisional menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi;
4. **Strategi komunikasi efektif** untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni menggambarkan ketidakterpakaian persediaan tenaga kerja akibat kurangnya lapangan kerja

yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang: (1) tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Semakin rendah indikator tingkat pengangguran terbuka di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 secara terus menerus mengalami penurunan, yakni dari 3,77 persen pada Tahun 2020 menurun menjadi 2,94 persen pada Tahun 2024. Secara detail mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali).

Gambar 2.44
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2020-2024

Selanjutnya dalam perspektif kewilayahan Tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kota Palu yaitu sebesar 5,63 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan yakni sebesar 1,55 persen. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota selama Tahun Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.37
Perkembangan Persentase Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	2,47	2,95	1,48	1,56	1,55
2	Banggai	2,42	3,57	3,09	3,12	3,11
3	Morowali	5,21	5,08	3,20	2,84	2,84
4	Poso	2,39	2,47	1,68	1,67	1,77
5	Donggala	2,58	3,50	2,84	2,79	2,79
6	Tolitoli	3,74	3,13	3,31	3,12	3,11
7	Buol	4,36	3,64	3,07	3,14	3,13
8	Parigi Moutong	2,70	2,97	1,71	2,11	2,10
9	Tojo Una-Una	2,84	0,16	3,05	2,83	2,47
10	Sigi	3,36	2,38	3,01	2,60	2,55
11	Banggai Laut	3,09	3,35	3,60	3,64	3,60
12	Morowali Utara	5,16	2,98	2,25	2,23	2,38
13	Palu	8,38	7,61	6,15	5,65	5,63

Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Berdasarkan data, pada Agustus 2023 TPT tercatat sebesar 2,95 persen, sementara pada Agustus 2024 menurun tipis menjadi 2,94 persen. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan stabilitas dalam kondisi ketenagakerjaan di daerah. Berikut TPT berdasarkan jenis kelamin pada agustus periode 2020-2024.

Tabel 2.38
Persentase Pengangguran Terbuka berdasarkan Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah Periode 2020-2024 Agustus

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	3,91	3,75	2,81	2,62	2,60
Perempuan	3,53	3,74	3,32	3,52	3,50
Laki-laki + Perempuan	3,77	3,75	3,00	2,95	2,94

Sumber: BPS, 2025

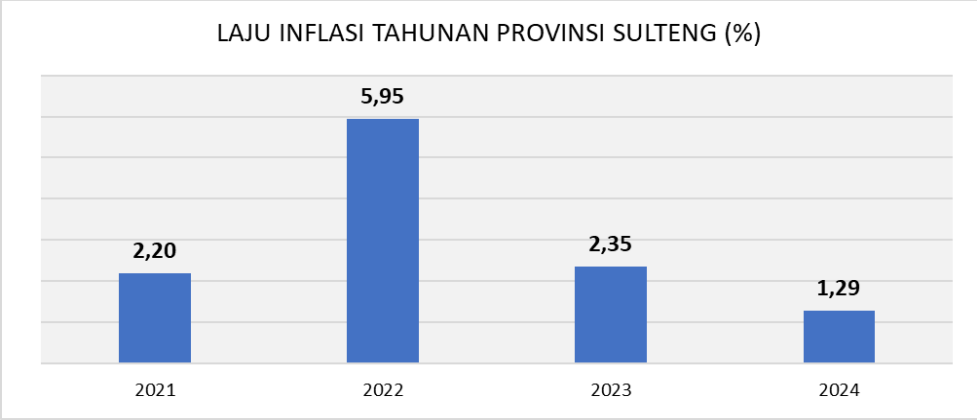
TPT laki-laki relatif stabil dengan angka 2,62 persen pada Agustus 2023 dan 2,60 persen pada Agustus 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja laki-laki cenderung lebih baik dan relatif tidak mengalami fluktuasi besar. Sementara itu, TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Agustus 2023, TPT perempuan sebesar 3,52 persen dan sedikit menurun menjadi 3,50 persen pada Agustus 2024.

Walaupun terjadi penurunan, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh kesempatan kerja.

5) Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Perkembangan inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi namun dapat terkendali dengan angka yang relatif stabil laju inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Tengah pada 2021 sebesar 2,20 persen meningkat menjadi 5,69 persen pada Tahun 2022 sebagai dampak dari adanya kenaikan BBM pada akhir Tahun 2021, selanjutnya laju inflasi ini dapat ditekan menjadi 2,35 persen pada Tahun 2023, dan pada Tahun 2024 laju inflasi kembali dapat di tekan hingga menjadi 1,29 persen.



Sumber: BPS, 2025

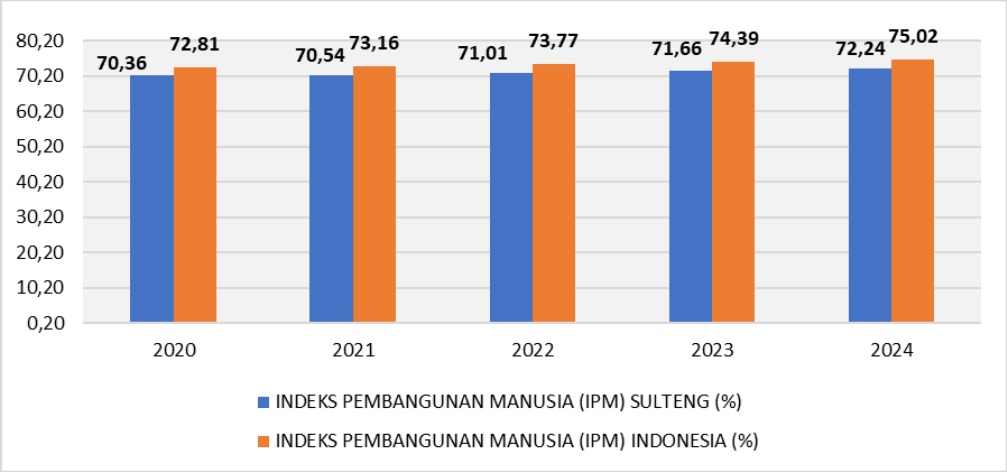
Gambar 2.45
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan

pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil per Kapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup. Selanjutnya, capaian IPM di suatu wilayah/daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Kategori Rendah: IPM < 60; (2) Kategori Sedang: 60 ≤ IPM < 70; (3) Kategori Tinggi: 70 ≤ IPM < 80; dan (4) Kategori Sangat tinggi: IPM ≥ 80.

Gambaran mengenai perkembangan capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.46
Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Kinerja pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan kinerja yang semakin membaik, yang direfleksikan melalui capaian indikator Indeks Pembangunan manusia (IPM). Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 secara terus menerus mengalami peningkatan yakni dari 70,36 pada Tahun 2020 meningkat menjadi 72,24 pada Tahun 2024, dengan status capaian kategori IPM tinggi. Peningkatan IPM ini didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Tiga indikator pembentuk IPM mengalami percepatan pertumbuhan.

Tabel 2.39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Dimensi Pembentuknya Tahun 2020–2024

Dimensi / Indikator Pembentuk IPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup	tahun	70,31	70,41	70,49	70,66	70,84
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,17	13,23	13,32	13,33	13,34
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,83	8,89	8,89	8,96	9,04
Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan)	Rp.	9.335.000	9.378.000	9.696.000	10.149.000	10.536.000

Sumber: BPS, 2025. (data diolah kembali)

Dimensi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari Tahun ke tahun. UHH selama periode 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni dari 70,31 Tahun pada Tahun 2020 menjadi 70,84 Tahun pada Tahun 2024.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 Tahun ke atas dan rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 Tahun ke atas. HLS selama Tahun 2020 sampai dengan 2019 hingga 2024 mengalami peningkatan yakni dari 13,17 Tahun pada Tahun 2020 menjadi 13,34 Tahun pada Tahun 2024. Sementara RLS meningkat dari 8,83 Tahun pada Tahun 2020 menjadi 9,04 tahun.

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per Tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pengeluaran riil perkapita selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni dari Rp.9,33 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp.10,53 juta pada Tahun 2024.

Dalam perspektif wilayah Tahun 2024, capaian IPM tertinggi terdapat di daerah Kota Palu dengan capaian IPM sebesar 84,12) dan terendah terdapat di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan capaian IPM sebesar 67,65. Selanjutnya detail perkembangan capaian IPM Kabupaten/Kota selama Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian IPM Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

No.	Kabupaten Kota	Capaian IPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	65,61	65,82	66,30	67,05	67,65
2	Banggai	71,09	71,090	71,58	72,19	72,86
3	Morowali	73,12	73,12	73,39	73,82	74,36
4	Poso	72,27	72,27	72,75	73,25	73,65
5	Donggala	66,96	66,96	67,49	68,17	68,71
6	Toli-Toli	68,31	68,31	68,77	69,68	70,38
7	Buol	68,92	68,92	69,37	70,18	70,89
8	Parigi Moutong	67,84	67,84	68,29	69,06	69,48
9	Tojo Una-Una	66,81	66,81	67,62	68,47	69,04
10	Sigi	68,84	68,84	69,40	70,28	70,90
11	Banggai Laut	67,82	67,82	68,40	69,12	69,65
12	Morowali Utara	69,52	69,52	70,02	70,74	71,64
13	Kota Palu	82,96	82,96	83,26	83,71	84,12

Sumber: BPS, 2025.

Dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia ini secara keseluruhan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak positif yang sangat luas, mencakup berbagai sektor kehidupan. Selain memperbaiki kualitas hidup masyarakat, peningkatan IPM juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan sosial, serta menciptakan stabilitas politik dan sosial.

Tabel 2.41
Capaian IPM Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin		Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribu Rupiah)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Sulawesi Tengah	**75,68**	**70,31**	**67,49**	**71,44**	**13,18**	**13,84**	**9,16**	**8,95**	**14559**	**8649**
Banggai Kepulauan	72,08	66,95	65,15	69,1	13,12	12,95	9,02	8,68	12152	8139
Banggai	76,74	70,42	69,16	73,12	13,04	13,62	8,96	8,69	15820	8616
Morowali	79,45	67,88	67,48	71,43	13,64	13,37	9,75	9,26	18933	6960
Poso	75,18	73,17	69,41	73,38	13,51	14,33	9,61	9,54	11414	9191
Donggala	72,68	65,05	66,07	70,06	12,31	13,04	8,52	7,86	12804	6514
Tolitoli	74,32	67,38	65,11	69,05	13,15	13,55	9,05	8,7	12567	6875
Buol	75,1	67,78	68,07	72,01	13,16	14,5	9,24	9,2	13282	6324
Parigi Moutong	72,17	66,98	62,79	66,63	12,08	13,03	8,3	7,96	14259	8327
Tojo Una-una	73,23	67,45	64,69	68,61	12,38	12,93	8,53	8,59	13236	7437
Sigi	74,08	69,94	68,56	72,49	13,03	13,31	9,04	9,09	12434	8449
Banggai Laut	73,88	68,59	64,41	68,31	13,07	13,04	9,17	8,35	12097	8386
Morowali Utara	73,63	71,53	68,14	72,08	12,16	12,99	9,38	9,08	11888	9658
Kota Palu	84,72	83,92	69,62	73,6	16,09	16,97	12,11	11,39	16748	15664

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa terdapat dinamika capaian pembangunan yang

mencerminkan adanya kemajuan namun juga masih menyisakan ketimpangan gender.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
    - Laki-laki: 75,68 Perempuan: 70,31, Selisih IPM sebesar 5,37 poin, menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih lebih rendah. Kesenjangan cukup konsisten di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Palu yang menampilkan capaian IPM perempuan sangat tinggi (83,92), mendekati IPM laki-laki (84,72). Ini menandakan bahwa akses perempuan pada pendidikan dan ekonomi masih lebih terbatas dibanding laki-laki, terutama di kabupaten dengan basis agraris dan kepulauan.

2. Umur Harapan Hidup (UHH)
    - Laki-laki: 67,49 Tahun Perempuan: 71,44 Tahun Selisih hampir 4 Tahun menunjukkan bahwa perempuan memiliki keunggulan dari sisi kesehatan dan ketahanan hidup. Pola ini konsisten di semua kabupaten/kota, dengan capaian tertinggi di Kota Palu (perempuan 73,6 tahun). Data ini menunjukkan keberhasilan sebagian program kesehatan ibu-anak, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas kesehatan laki-laki yang relatif rendah.

3. Harapan Lama Sekolah (HLS)
    - Laki-laki: 13,18 tahun; Perempuan: 13,84 tahun, menariknya, perempuan memiliki HLS lebih tinggi dari laki-laki, menandakan bahwa akses pendidikan formal bagi perempuan relatif sudah baik. Daerah dengan capaian HLS perempuan paling tinggi adalah Kota Palu (16,97 tahun), sementara paling rendah terdapat di Parigi Moutong (13,03 tahun). Namun, keunggulan ini belum sepenuhnya berdampak pada IPM perempuan, karena kualitas pendidikan dan peluang melanjutkan ke perguruan tinggi masih terbatas di beberapa daerah.

4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
    - Laki-laki: 9,16 Tahun Perempuan: 8,95 tahun. Perempuan masih tertinggal dalam pendidikan yang benar-benar ditamatkan. Walaupun harapan lama sekolah lebih tinggi, kenyataannya rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya drop-out lebih tinggi pada perempuan, kemungkinan dipengaruhi faktor ekonomi, pernikahan usia muda, dan

keterbatasan akses di daerah. Ketimpangan terbesar terlihat di Kabupaten Donggala dan Tolitoli, di mana RLS perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki.

5. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan
   - Laki-laki: Rp14,559 juta Perempuan: Rp8,649 juta. Terdapat kesenjangan besar hampir Rp6 juta antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tertinggi terlihat di Morowali, di mana pengeluaran per kapita laki-laki mencapai Rp18,933 juta sementara perempuan hanya Rp6,960 juta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan menghadapi keterbatasan signifikan dalam akses ekonomi, baik dari sisi pekerjaan formal, produktivitas kerja, maupun akses kepemilikan aset.

Implikasi terhadap Pengarusutamaan Gender

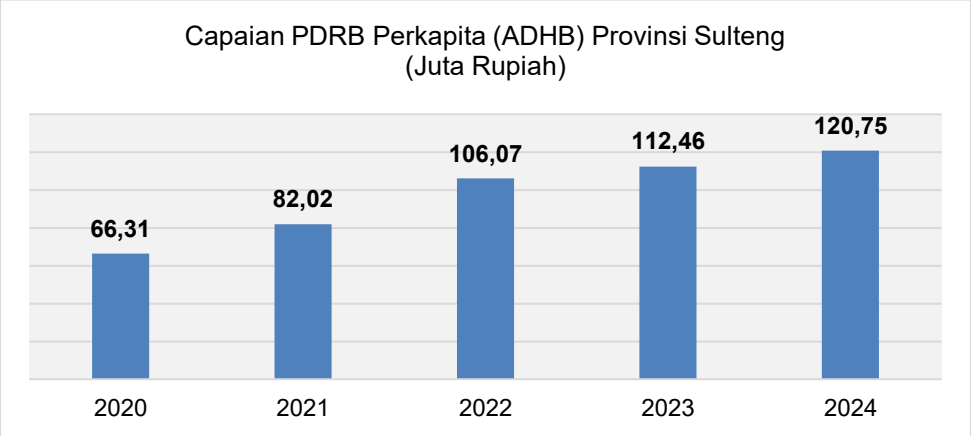
1. Ketimpangan IPM yang signifikan menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi perempuan.
2. Kesehatan perempuan relatif lebih baik, namun perlu langkah khusus untuk menekan kesenjangan IPM yang dipengaruhi faktor pendidikan dan ekonomi.
3. Pendidikan perempuan sudah setara bahkan lebih tinggi dalam HLS, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam RLS karena masalah putus sekolah.
4. Kesenjangan ekonomi sangat lebar, sehingga program pemberdayaan ekonomi perempuan, akses modal, dan perlindungan pekerja perempuan harus menjadi prioritas.
5. Kabupaten/kota dengan disparitas terbesar (Morowali, Banggai Kepulauan, Donggala, dan Tolitoli) perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program PUG, sementara Kota Palu dapat menjadi role model bagi daerah lain.

Pengarusutamaan gender di Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan besar pada aspek pendidikan yang ditamatkan (RLS) dan penguasaan ekonomi, meskipun terdapat capaian positif pada indikator kesehatan dan HLS. Upaya integratif lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan setara gender di seluruh wilayah.

7) PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita adalah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah/daerah dalam selang waktu satu Tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Capaian PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari Rp.66,31 juta pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp.120,75 juta pada Tahun 2024.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.47
Perkembangan Capaian PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sementara dilihat capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2024, terlihat bahwa Capaian PDRB Perkapita tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara yakni sebesar Rp.236,44 juta, sedangkan PDRB Perkapita terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut yakni hanya sebesar Rp.43,54 juta.

Selanjutnya, perkembangan Capaian PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten/Kota Periode 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita ADHB (RP)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	32.001.971	34.116.830	37.375.580	39.908.690	43.164.980
2	Banggai	75.696.924	84.300.340	110.263.080	101.816.100	107.883.220
3	Morowali	388.801.373	601.782.580	876.420.980	927.230.480	100.318.493
4	Poso	37.756.656	40.245.700	43.699.830	46.538.200	50.139.390
5	Donggala	39.124.183	41.480.950	45.101.490	48.833.850	53.142.540
6	Tolitoli	36.995.412	39.195.470	42.263.090	44.749.390	47.349.430
7	Buol	38.880.839	41.782.580	45.153.080	47.723.890	51.137.170
8	Parigi Moutong	39.124.325	41.504.120	44.627.710	47.618.820	51.058.960
9	Tojo Una-una	34.229.256	35.927.690	38.142.610	40.309.680	43.053.670
10	Sigi	35.191.901	37.417.430	40.254.060	42.649.110	46.533.590
11	Banggai Laut	33.706.677	35.469.720	38.853.620	41.278.160	43.548.600
12	Morowali Utara	92.644.315	107.121.760	169.774.170	209.709.790	236.448.700
13	Kota Palu	64.882.539	69.334.320	74.372.030	79.452.380	83.867.920

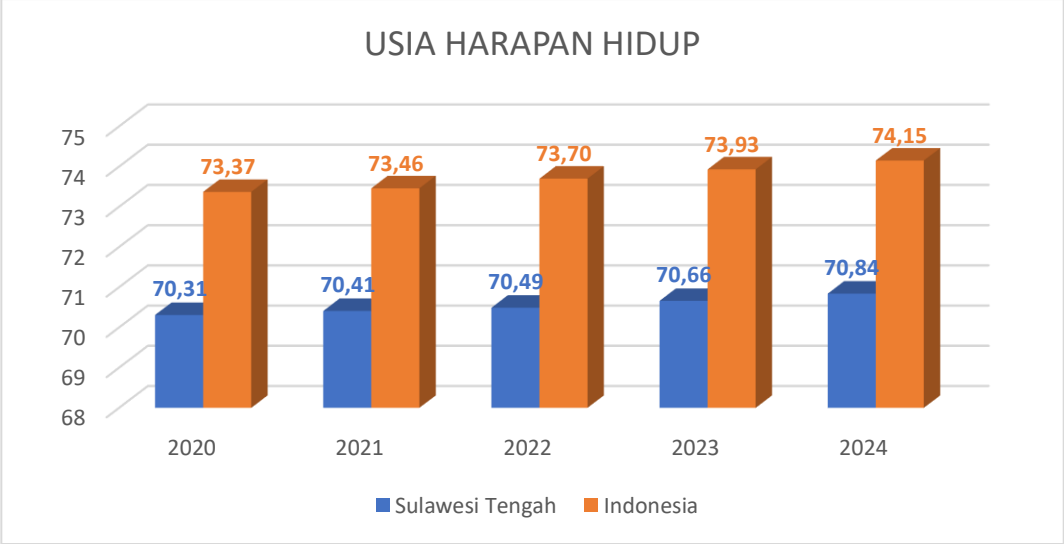
Sumber: BPS, 2025.

B. Kesehatan Untuk Semua

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah, serta mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Usia harapan hidup adalah perkiraan rata-rata jumlah Tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari Tahun ke tahun.

Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, UHH Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,53 Tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada Tahun 2020, UHH Sulawesi Tengah adalah 70,31 Tahun dan pada Tahun 2024 mencapai 70,84 tahun. UHH Tahun 2024 meningkat 0,18 Tahun (0,25 persen) dibanding Tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020—2023 (0,17 persen per tahun).



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.48
Capaian Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Selanjutnya, perkembangan capaian UHH Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Capaian Usia Harapan Hidup Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

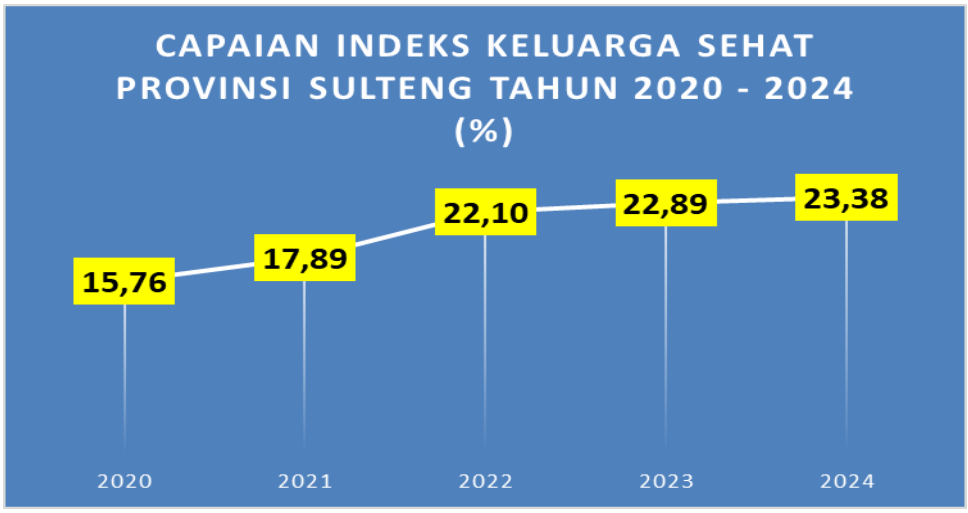
Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	66,71	67,03	67,19	67,35	67,54
Banggai	71,95	71,95	71,95	72,09	72,26
Morowali	70,93	70,95	70,95	71	71,09
Poso	72,97	72,97	72,97	72,98	73,02
Donggala	70,08	70,22	70,32	70,52	70,74
Tolitoli	70,23	70,49	70,71	71,09	71,31
Buol	70,23	70,49	70,73	71,06	71,3
Parigi Moutong	68,54	68,55	68,55	68,62	68,72
Tojo Una-una	70,23	70,44	70,6	70,89	71,05
Sigi	70,8	70,87	70,91	71,11	71,33
Banggai Laut	70,06	70,34	70,48	70,75	71,04
Morowali Utara	71,95	72,02	72,06	72,19	72,35
Kota Palu	73,46	73,49	73,56	73,71	73,91
Sulawesi Tengah	**70,31**	**70,41**	**70,49**	**70,66**	**70,84**

Sumber: BPS, 2025

2) Indeks Keluarga Sehat

Keluarga sehat merupakan pondasi masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 12 indikator keluarga sehat sebagai indeks komposit pembentuk yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai, serta diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Adapun 12 indikator tersebut yaitu: (1) Keluarga mengikuti program KB; (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; (4) Bayi mendapat ASI eksklusif; (5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; (8) Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan (12) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih.

Berdasarkan potret capaian Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perbaikan dan cenderung meningkat, yakni dari 15,76 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 23,38 persen pada Tahun 2024. Secara detail mengenai perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.49
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

Selanjutnya, dilihat capaian wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2024, capaian indeks keluarga sehat tertinggi terdapat di Kota Palu yakni sebesar 44,76 persen, sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar 11,42 persen. Secara rinci mengenai perkembangan capaian IKS di kabupaten/kota se Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	BANGGAI	20,41	21,52	22,76	23,23	23,51
2	POSO	17,28	17,92	20,08	21,63	21,95
3	DONGGALA	11,58	13,07	13,58	13,88	14,02
4	TOLI TOLI	9,12	9,32	14,16	15,56	15,85
5	BUOL	12,10	13,58	17,06	18,90	18,98
6	MOROWALI	21,26	39,11	43,19	43,37	44,37
7	BANGGAI KEPULAUAN	8,38	9,01	14,42	14,56	15,02
8	PARIGI MOUTONG	11,23	15,96	17,84	18,64	19,11
9	TOJO UNA UNA	10,28	11,90	14,23	14,16	14,55
10	SIGI	10,14	10,78	14,44	16,04	16,26
11	BANGGAI LAUT	9,37	9,62	10,94	11,27	11,42
12	MOROWALI UTARA	16,94	18,48	25,04	27,55	30,91

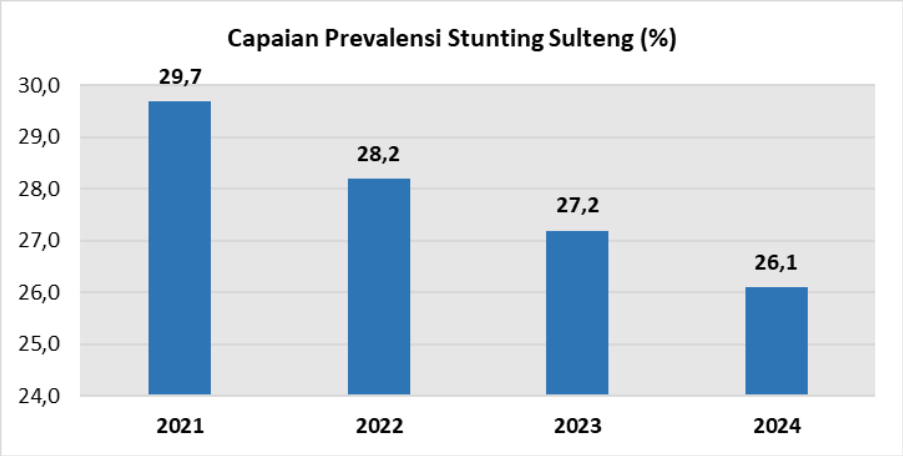
NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
13	KOTA PALU	23,58	24,38	43,78	44,23	44,76

Sumber: BPS, 2025

3) Prevalensi Stunting

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Berbagai strategi intervensi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang menggembirakan, tercermin dari penurunan angka prevalensi stunting secara konsisten selama empat Tahun terakhir.

Pada Tahun 2021, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 29,7%. Angka ini menurun menjadi 28,2% pada Tahun 2022, lalu kembali turun menjadi 27,2% di Tahun 2023. Terbaru, pada Tahun 2024, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga mencapai 26,1%.



Sumber: SSGI 2021-2023, SKI 2023, SSGI 2024, SSGI 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.50
Capaian Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2024

Penurunan sebesar 3,6 persen poin selama periode 2021 hingga 2024 ini merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, hingga keterlibatan aktif masyarakat. Program intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin, telah menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini.

Tak kalah penting, intervensi sensitif yang mencakup peningkatan akses air bersih dan sanitasi, edukasi gizi, serta penguatan ketahanan pangan keluarga juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, guna mencapai target yang diberikan oleh pemerintah pusat prevalensi stunting 23,9 pada Tahun 2025 Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi emas Sulawesi Tengah yang sehat dan berkualitas.

4) Schistosomiasis

Schistosomiasis merupakan penyakit endemik yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Lembah Napu, Lindu, dan Lengkeka. Dalam upaya pengendalian penyakit ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan komitmen kuat dan konsisten melalui pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Schistosomiasis sejak Tahun 2012, yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Eliminasi Schistosomiasis 2022–2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berkomitmen dalam upaya pengendalian penyakit schistosomiasis, yang merupakan penyakit endemik menahun di wilayah tertentu, khususnya Lembah Napu dan Lembah Bada. Berdasarkan data Tahun 2017–2024, terlihat adanya penurunan signifikan prevalensi schistosomiasis pada manusia, dari 0,75% pada Tahun 2017 menjadi 0,47% pada Tahun 2024. Meskipun sempat terjadi lonjakan pada Tahun 2022 hingga 1,4%, tren prevalensi kembali menurun sebagai hasil dari intervensi aktif berupa surveilans berkala, pengobatan massal, serta edukasi masyarakat. Target eliminasi nasional sebesar ≤0,99% telah berhasil dipertahankan selama delapan Tahun terakhir, menunjukkan efektivitas strategi kolaboratif lintas sektor. Pemeriksaan laboratorium secara rutin dan pemberdayaan petugas kesehatan di lapangan menjadi kunci keberhasilan pengendalian penyakit ini di Sulteng.

Strategi pengendalian dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang mencakup tiga pilar utama: pencegahan, surveilans, dan penanganan kasus. Pencegahan dilakukan melalui edukasi masyarakat, pemberian obat pencegahan massal (POPM), serta pengendalian faktor risiko berupa pemberantasan keong penular secara mekanis dan kimiawi. Surveilans dilaksanakan setiap Tahun melalui survei prevalensi dan deteksi dini. Penanganan kasus melibatkan penemuan aktif oleh tenaga kesehatan dan kader, serta tatalaksana medis bagi penderita.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengintegrasikan program pengendalian ini dengan sektor pertanian, perikanan, pekerjaan umum, dan kemendes melalui pembangunan saluran irigasi, kolam ikan, embung, serta rehabilitasi laboratorium. mendorong partisipasi aktif masyarakat dan tokoh lokal dalam kegiatan edukatif, penyemprotan molluskisida, dan pelatihan kader.

Strategi pengendalian dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan utama, yaitu: pencegahan, surveilans, dan penanganan kasus. Kegiatan pencegahan mencakup edukasi kepada masyarakat, pemberian obat pencegahan massal (POPM), serta pemberantasan keong penular. Surveilans dilakukan melalui survei prevalensi tahunan, deteksi dini, dan penyelidikan epidemiologi. Sementara penanganan kasus dilakukan secara aktif oleh tenaga kesehatan dan kader desa.

Program ini diperkuat oleh keterlibatan lintas sektor. Dinas Kesehatan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Kelautan dan Perikanan, hingga Kemendes turut berperan dalam pembangunan drainase, embung, irigasi, kolam ikan, jalan produksi, serta penyediaan fasilitas sanitasi. Inovasi lokal seperti GEMA BERAKSI di Kabupaten Poso menjadi contoh sukses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menggerakkan aksi komunitas.

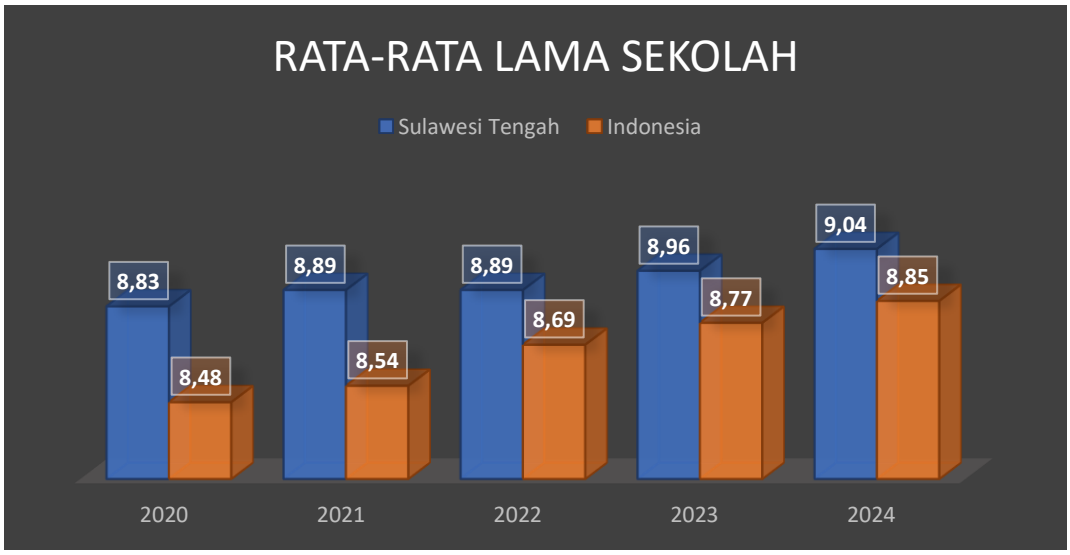
Meski capaian positif telah diraih, seperti penurunan prevalensi di Lengkeka menjadi 0% pada Tahun 2024, namun tantangan masih tersisa di wilayah Napu (0,56%) dan Lindu (0,39%), serta cakupan POPM yang masih rendah di beberapa desa. Oleh karena itu, upaya akselerasi eliminasi schistosomiasis terus ditingkatkan dengan pendekatan berbasis wilayah, pelibatan masyarakat, dan penguatan infrastruktur kesehatan dan lingkungan.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah Tahun belajar pada pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk berusia 25 Tahun ke atas. Capaian angka RLS Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yakni dari 8,83 Tahun pada Tahun 2020 meningkat menjadi 8,89 Tahun pada Tahun 2021, selanjutnya angka RLS tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 9,04 Tahun pada Tahun 2024 dan capaian tersebut berada di atas capaian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku sekolah setiap tahunnya semakin membaik dan meningkat.

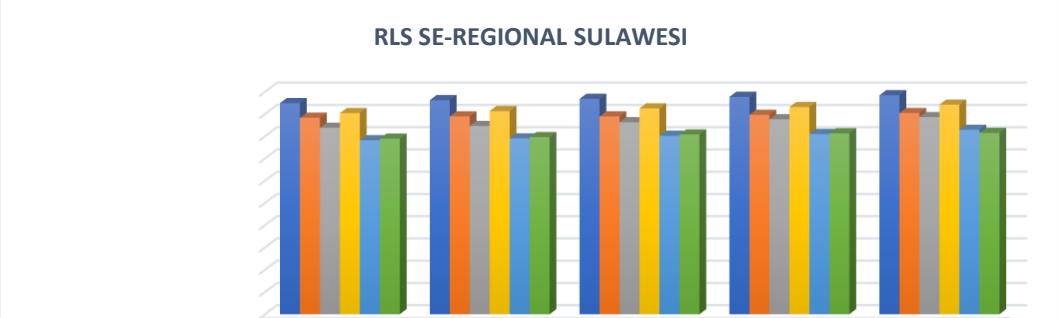
Perkembangan mengenai capaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.51
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024

Berdasarkan RLS Regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 berada di posisi ke 3 se-Regional Sulawesi. Berikut perbandingan RLS Provinsi Sulawesi Tengah dengan Regional Sulawesi:



	2020	2021	2022	2023	2024
SULAWESI UTARA	9,49	9,62	9,68	9,77	9,84
SULAWESI TENGAH	8,83	8,89	8,89	8,96	9,04
SULAWESI SELATAN	8,38	8,46	8,63	8,76	8,86
SULAWESI TENGGARA	9,04	9,13	9,25	9,31	9,42
GORONTALO	7,82	7,9	8,02	8,1	8,29
SULAWESI BARAT	7,89	7,96	8,08	8,13	8,15

Sumber : BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.52
Rata-Rata Lama Sekolah Se-Regional Sulawesi Tahun 2020-2024

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan angka HLS, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan tentang pendidikan dan perubahannya yang terjadi di masa datang.

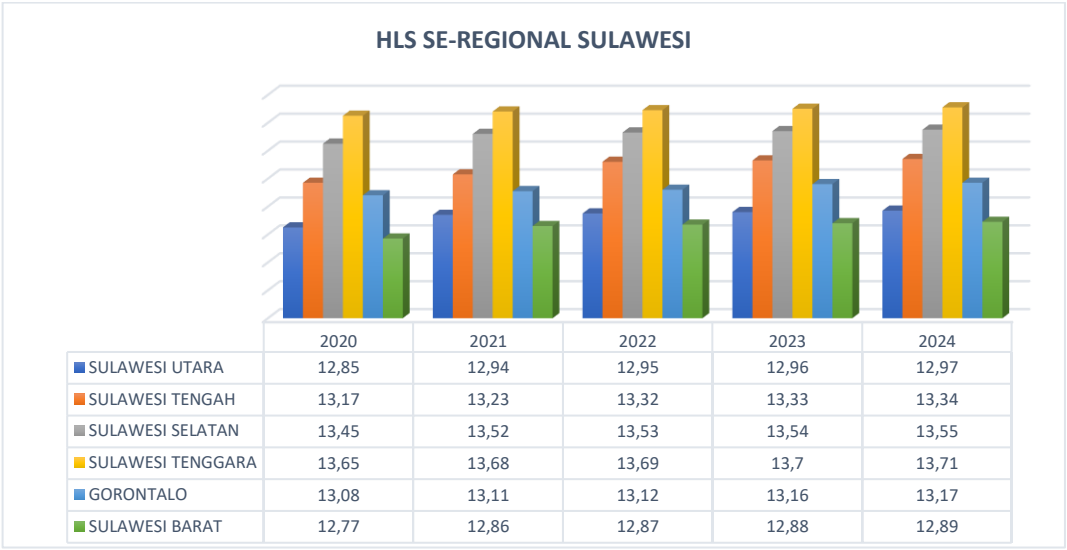
Perkembangan angka HLS di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 angka HLS sebesar 13,17 Tahun meningkat menjadi 13,23 Tahun pada Tahun 2021, selanjutnya setiap Tahun HLS mengalami peningkatan hingga mencapai 13,34 Tahun pada Tahun 2024 dan capaian HLS Provinsi Sulawesi Tengah berada di atas capaian nasional.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.53
Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan HLS Regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 berada di posisi ke 3 se-Regional Sulawesi. Berikut perbandingan HLS Provinsi Sulawesi Tengah dengan Regional Sulawesi:



	2020	2021	2022	2023	2024
SULAWESI UTARA	12,85	12,94	12,95	12,96	12,97
SULAWESI TENGAH	13,17	13,23	13,32	13,33	13,34
SULAWESI SELATAN	13,45	13,52	13,53	13,54	13,55
SULAWESI TENGGARA	13,65	13,68	13,69	13,7	13,71
GORONTALO	13,08	13,11	13,12	13,16	13,17
SULAWESI BARAT	12,77	12,86	12,87	12,88	12,89

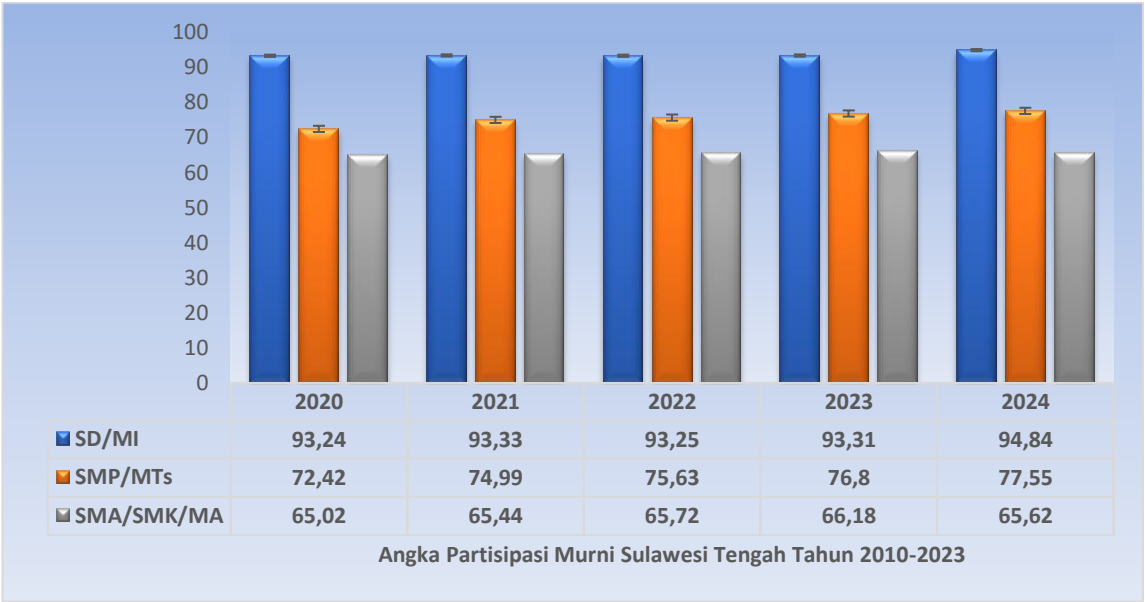
Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.54
Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah Se-Regional Sulawesi Tahun 2020-2024

3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 Tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Secara umum, APM pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi

Tengah tren 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan. Gambaran perkembangan angka partisipasi murni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.55
Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

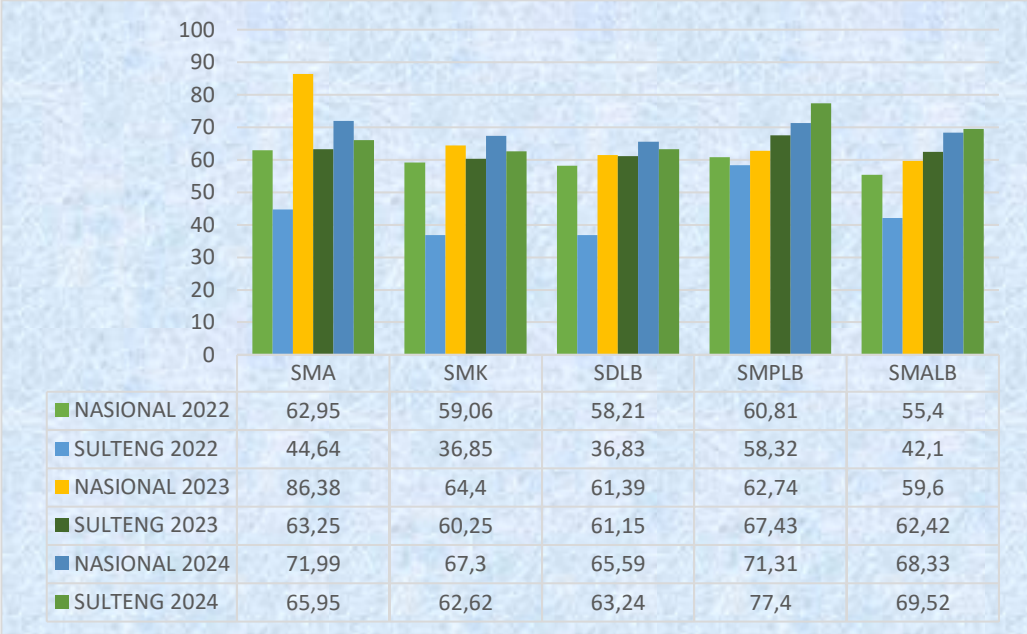
4) Angka Literas/Numerasi

- Angka Literasi

Literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Kemampuan literasi Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat pendidikan dasar dan menengah masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Pada tingkat SMALB Tahun 2022 sebesar 55,40 persen dan meningkat pada Tahun 2024 mencapai 69,52 persen, SMA Tahun 2022 sebesar 62,95 persen, dan meningkat pada Tahun 2024 mencapai 65,95 persen, selanjutnya tingkat SMK pada Tahun 2022 sebesar 59,06 persen, dan meningkat pada Tahun 2023 mencapai 60,25 persen, serta pada Tahun 2024 meningkat menjadi 62,62 persen dan angka ini pada Tahun 2024 masih berada di bawah nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, program yang akan dilakukan berdasarkan Rapor Pendidikan adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, pemenuhan sarana prasarana termasuk didalamnya adalah

perpustakaan sekolah dan ketersediaan buku diperpustakaan dan memaksimalkan dana BOS sebanyak 5 (lima) persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Perpustakaan. Berikut Angka Literasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024.



	SMA	SMK	SDLB	SMPLB	SMALB
NASIONAL 2022	62,95	59,06	58,21	60,81	55,4
SULTENG 2022	44,64	36,85	36,83	58,32	42,1
NASIONAL 2023	86,38	64,4	61,39	62,74	59,6
SULTENG 2023	63,25	60,25	61,15	67,43	62,42
NASIONAL 2024	71,99	67,3	65,59	71,31	68,33
SULTENG 2024	65,95	62,62	63,24	77,4	69,52

Sumber: Laporan Rapor Pendidikan Sulawesi Tengah, 2025 (data diolah kembali)

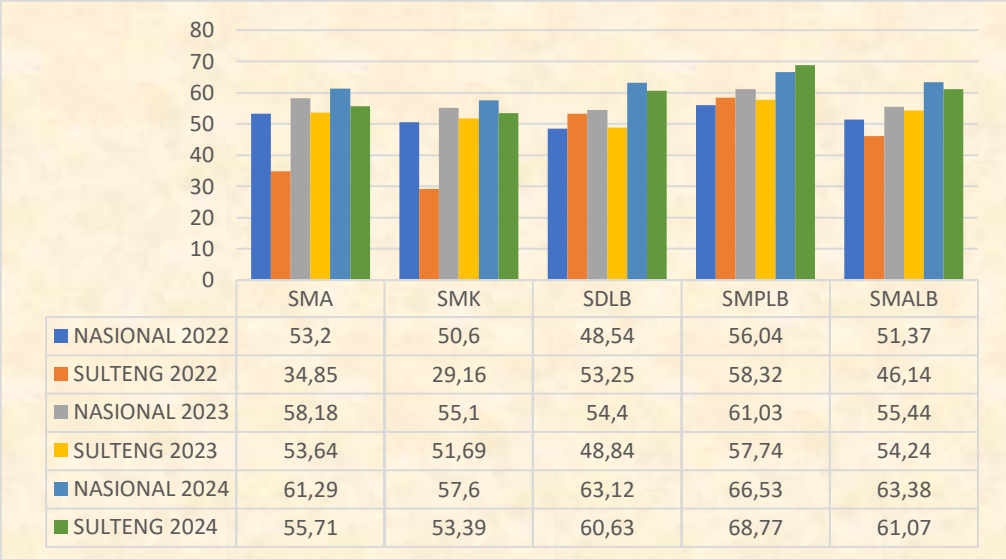
Gambar 2.56
Angka Kemampuan Literasi Sulawesi Tengah

- **Angka Numerasi**

Literasi Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi juga digunakan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan dan pemanfaatan interpretasi hasil analisis sebagai bahan prediksi dan pengambilan keputusan.

Seperti halnya kemampuan literasi, kemampuan numerasi juga angkanya masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tingkat SMA Tahun 2022 sebesar 53,2 persen dan meningkat menjadi 55,71 persen pada Tahun 2024. Selanjutnya pada tingkat SMK, sebesar 50,6 persen meningkat menjadi 53,39 persen pada Tahun 2024. Pada tingkat SDLB pada Tahun 2022 sebesar 48,54, meningkat menjadi 60,63 pada Tahun 2024. Tingkat SMPLB,

pada Tahun 2022 sebesar 56,04 persen dan meningkat pada Tahun 2024 mencapai 68,77 persen. Tingkat SMALB pada Tahun 2022 sebesar 51,37 persen dan meningkat mencapai 61,07 persen pada Tahun 2024. Angka Numerasi ini walaupun mengalami peningkatan, tapi masih berada dibawah rata-rata nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, program yang akan dilakukan berdasarkan Rapor Pendidikan adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, pemenuhan sarana prasarana termasuk didalamnya adalah perpustakaan sekolah dan ketersediaan buku diperpustakaan dan memaksimalkan dana BOS sebanyak 5 (lima) persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Perpustakaan. Angka kemampuan numerasi Sulawesi Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



	SMA	SMK	SDLB	SMPLB	SMALB
NASIONAL 2022	53,2	50,6	48,54	56,04	51,37
SULTENG 2022	34,85	29,16	53,25	58,32	46,14
NASIONAL 2023	58,18	55,1	54,4	61,03	55,44
SULTENG 2023	53,64	51,69	48,84	57,74	54,24
NASIONAL 2024	61,29	57,6	63,12	66,53	63,38
SULTENG 2024	55,71	53,39	60,63	68,77	61,07

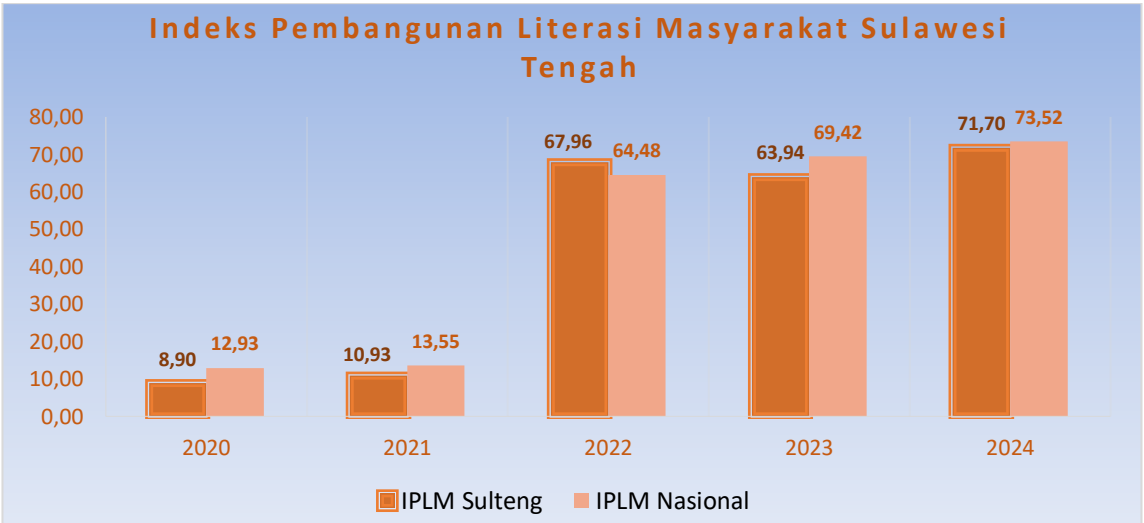
Sumber: Laporan Rapor Pendidikan Sulawesi Tengah, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.57
Angka Numerasi Sulawesi Tengah

5) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Pencapaian nilai IPLM Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami peningkatan yakni dari 8,9 poin pada Tahun 2020 meningkat menjadi 10,93 poin pada Tahun 2021, selanjutnya pada Tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 67,96 poin, dan capaian ini masuk

ke dalam kategori Sedang. Namun pada Tahun 2023, menurun menjadi 63,94 poin karena terdapat perbedaan rumus perhitungan. IPLM Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 meningkat menjadi 71,70 dan pada tingkat nasional sebesar 73,52 persen sehingga angka IPLM Sulawesi Tengah masih berada dibawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPLM maka strategi yang dilakukan kedepan yaitu meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan meningkatkan jumlah koleksi bacaan di perpustakaan termasuk juga pembuatan perpustakaan digital. Berikut Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Perpusnas, Kajian IPLM Tahun 2025 (data diolah kembali)

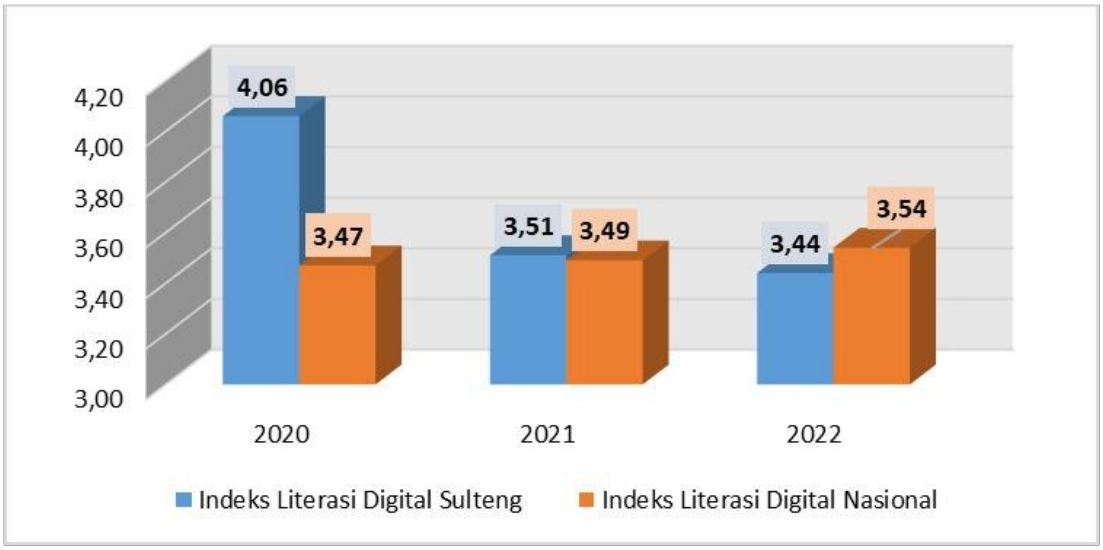
Gambar 2.58
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2020-2023

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diukur dengan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yang terdiri dari 7 komponen yaitu sebagai berikut.

1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1);
2. Perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (UPLM2);
3. Ketercukupan koleksi (UPLM3);
4. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM4);
5. Tingkat kunjungan Masyarakat per hari (UPLM5);
6. Anggota perpustakaan (UPLM6); dan
7. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM7)

6) Indeks Literasi Digital

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu pada kerangka kerja dalam *Road Map Literasi Digital* 2020-2024 (Kemenkominfo, Januari 2021), dengan empat pilar pengukuran literasi digital yaitu *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety*, dan *Digital Culture.* Berikut gambar perbandingan Indeks Literasi Digital Sulawesi Tengah dan Nasional periode 2020-2022:



Sumber: Kemenkominfo, 2022 (data diolah kembali)

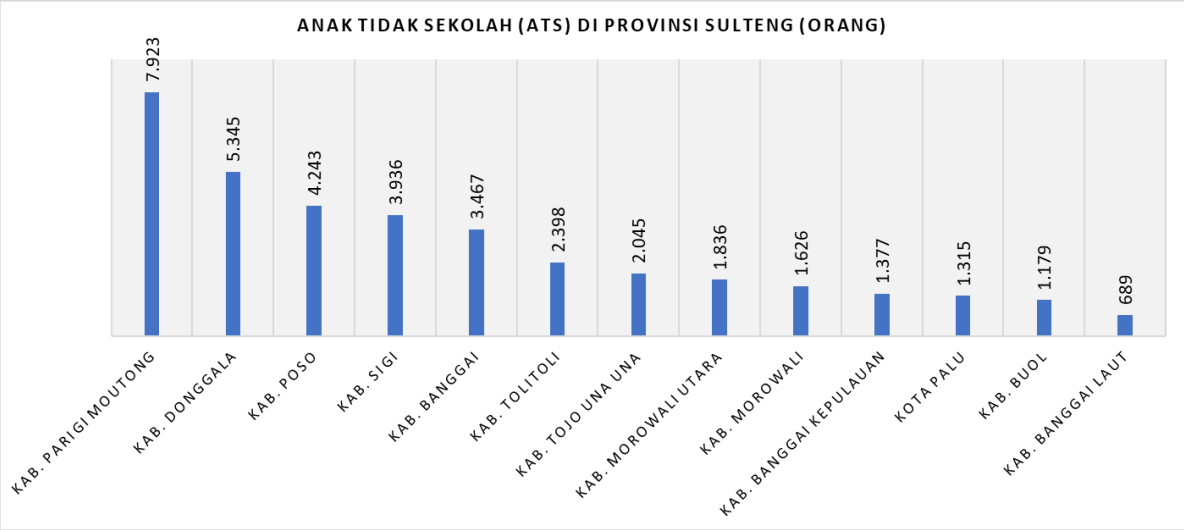
Gambar 2.59
Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2022

Indeks Literasi Digital Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 4,06 indeks berada di atas Nasional sebesar 3,47. Pada Tahun 2021 indeks literasi digital Sulawesi Tengah menurun menjadi 3,51 indeks dan masih berada di atas nasional sebesar 3,49. Tahun 2022 indeks literasi Sulawesi Tengah Kembali menurun sebesar 3,44 indeks dan berada di bawah nasional sebesar 3,54 indeks.

7) Angka Anak Yang Tindak Bersekolah dan Penyandang Disabilitas

Pemerintah berupaya mewujudkan kesetaraan kesempatan, keadilan, dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan anak penyandang disabilitas perlu menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam akses layanan pendidikan dan kesehatan hingga di daerah.

Anak tidak bersekolah, atau juga disebut anak putus sekolah merupakan anak-anak yang berusia antara 5 hingga 18 Tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan atau belum menyelesaikan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini menjadi salah satu perhatian dan prioritas utama dalam pembangunan bidang pendidikan, karena memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak dan masyarakat.



Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.60
Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024/2025

Pada gambar di atas menyajikan data jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang diidentifikasi berdasarkan wilayah kabupaten/kota dan kelas terakhir yang ditinggalkan oleh peserta didik. Jumlah keseluruhan ATS yang tercatat mencapai 37.379 anak.

Sebaran ATS terbanyak yakni terdapat tiga wilayah dengan ATS tertinggi, yaitu

1. Kab. Parigi Moutong sebanyak 7.923 anak
2. Kab. Donggala sebanyak 5.345 anak
3. Kab. Poso sebanyak 4.243 anak

Hal ini menandakan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki kerentanan tinggi terhadap putus sekolah, kemungkinan besar disebabkan adanya faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya.

Dengan demikian dibutuhkan:

1. Intervensi Transisi Sekolah Fokus pada pendampingan transisi SD–SMP dan SMP–SMA terutama di Parigi Moutong, Donggala, dan Poso.

2. Penguatan Akses dan Daya Tampung Sekolah Menengah Bangun atau perluas SMA/SMK di wilayah dengan DO tinggi di kelas 10–11, misalnya di Parigi Moutong, Donggala, dan Sigi.
3. Revitalisasi Program Penanggulangan Putus Sekolah. Aktifkan kembali program kejar paket (A, B, C) yang berbasis desa/kelurahan serta insentif pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
4. Pendekatan Berbasis Komunitas
   - Dorong pelibatan orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama dalam memotivasi anak untuk tetap sekolah.
   - Integrasi dengan **program penghapusan perkawinan usia anak dan pekerja anak**.

Tabel 2.45
Anak Tidak Sekolah yang *Drop Out* di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Pendidikan PAUD	Pendidikan Dasar (SD)	Pendidikan Menengah (SMP)	Pendidikan Atas (SMA/SMK)	Total
1	Kab. Banggai Kepulauan	0	225	258	210	693
2	Kab. Donggala	1	519	661	603	1.784
3	Kab. Poso	0	261	342	347	950
4	Kab. Banggai	0	417	507	473	1.397
5	Kab. Buol	0	354	493	404	1.251
6	Kab. Tolitoli	0	491	400	334	1.225
7	Kab. Morowali	0	342	305	294	941
8	Kab. Parigi Moutong	0	585	836	696	2.117
9	Kab. Tojo Una Una	0	379	526	465	1.370
10	Kab. Sigi	0	290	318	305	913
11	Kab. Banggai Laut	0	106	111	105	322
12	Kab. Morowali Utara	0	227	246	223	696
13	Kota Palu	0	380	388	408	1.176
	Provinsi Sulawesi Tengah	**1**	**4.576**	**5.391**	**4.867**	**14.835**

Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2025 (data diolah kembali)

Pada tabel di atas menujukan Data Anak Tidak Sekolah (ATS) - Drop Out Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik, yang mengklasifikasikan ATS berdasarkan jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) atau peserta didik yang mengalami *drop out* (DO) pada masing-masing jenjang pendidikan. Total ATS yang tercatat dalam tabel ini adalah

14.826 anak, tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Distribusi Drop Out per Jenjang Pendidikan dari total 14.826 anak tersebut yaitu:

- SD (Dasar) sebayak 4.567 anak (≈ 30,8%)
- SMP (Menengah) sebanyak 5.391 anak (≈ 36,4%)
- SMA/SMK (Atas) sebanyak 4.867 anak (≈ 32,8%)
- PAUD sebanyak 1 anak (tidak signifikan secara statistik)

ATS tersebar cukup merata pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, namun puncak tertinggi terjadi pada jenjang SMP, yang menandakan fase ini sebagai masa paling rawan anak putus sekolah di Sulawesi Tengah.

Fase Pendidikan Paling Rawan per Wilayah

- Parigi Moutong: ATS terbesar di jenjang SMP (836) dan SMA/SMK (696) → butuh penguatan akses dan keberlanjutan pendidikan menengah.
- Donggala: angka DO tinggi sejak jenjang SD (516) hingga SMA (603) → mengindikasikan masalah sistemik di seluruh jenjang.
- Poso: ATS terbanyak di SMA/SMK (347) → perlu intervensi pendidikan lanjutan.
- Sigi: mayoritas DO terjadi di SD (289) → perlu intervensi dini sejak jenjang dasar.

Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pendekatan Berbasis Jenjang Pendidikan
    - Fokuskan upaya intervensi di SMP, karena jenjang ini merupakan puncak angka putus sekolah secara umum.
    - Perkuat program keberlanjutan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK, khususnya di wilayah prioritas seperti Parigi Moutong, Donggala, dan Banggai.
b. Wilayah Prioritas Penanganan ATS
    - Kabupaten prioritas 1: Parigi Moutong, Donggala, Banggai
    - Kabupaten prioritas 2: Tojo Una-Una, Buol, Poso
c. Intervensi Lintas Sektor
    - Kembangkan pendekatan kolaboratif antara dinas pendidikan, sosial, dan desa.
    - Gunakan data ini untuk mendorong program beasiswa pendidikan menengah, transportasi sekolah, serta penguatan PKBM dan kejar paket.

Masalah putus sekolah tidak hanya terjadi di satu jenjang, tetapi sepanjang jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Diperlukan strategi penanganan yang holistik, lintas jenjang, dan berbasis wilayah.

Tabel 2.46
Anak Tidak Sekolah (ATS) Lulus Tidak Melanjutkan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total
1	Kab. Banggai Kepulauan	338	601	939
2	Kab. Donggala	1.088	1.582	2.670
3	Kab. Poso	285	575	860
4	Kab. Banggai	482	906	1.388
5	Kab. Buol	553	915	1.468
6	Kab. Tolitoli	953	1.064	2.017
7	Kab. Morowali	363	517	880
8	Kab. Parigi Moutong	1.562	1.820	3.382
9	Kab. Tojo Una Una	728	1.044	1.772
10	Kab. Sigi	430	862	1.292
11	Kab. Banggai Laut	152	168	320
12	Kab. Morowali Utara	276	386	662
13	Kota Palu	391	730	1.121
Provinsi Sulawesi Tengah		**7.601**	**11.170**	**18.771**

Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2025 (data diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan jumlah anak yang telah lulus dari satu jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik dari jenjang SD ke SMP, maupun dari SMP ke SMA/SMK. Total anak yang termasuk dalam kategori ini adalah 18.771 anak, terdiri atas:

- 7.601 anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP
- 11.170 anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK

Tiga kabupaten/kota dengan angka tertinggi yaitu:

- Kab. Parigi Moutong: 3.382 anak (1.562 dari SD, 1.820 dari SMP)
- Kab. Donggala: 2.670 anak (1.088 dari SD, 1.582 dari SMP)
- Kab. Tolitoli: 2.017 anak (953 dari SD, 1.064 dari SMP)

Kecenderuangan Pola umum menujukan angka anak yang tidak melanjutkan sekolah lebih tinggi di jenjang menengah (SMP ke SMA/SMK) daripada dari SD ke SMP. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak berhenti sekolah setelah lulus SMP. Kota Palu menunjukkan tren cukup baik: dari 1.121 total ATS, sebagian besar terjadi pasca SMP (730 anak), namun jumlahnya masih tergolong menengah dibandingkan kabupaten lain.

Masalah utama adalah tidak berlanjutnya pendidikan setelah SMP, yang dapat disebabkan oleh Keterbatasan akses ke SMA/SMK, Keterbatasan ekonomi keluarga, dan Kebutuhan untuk bekerja atau pernikahan dini.

Tabel 2.47
Anak Tidak Sekolah (ATS) Belum Pernah Bersekolah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Usia				Total
		< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	
1	Kab. Banggai Kepulauan	0	289	296	792	1.377
2	Kab. Donggala	0	1.046	1.057	3.242	5.345
3	Kab. Poso	0	784	816	2.643	4.243
4	Kab. Banggai	0	677	638	2.152	3.467
5	Kab. Buol	0	290	216	673	1.179
6	Kab. Tolitoli	0	561	557	1.280	2.398
7	Kab. Morowali	0	432	409	785	1.626
8	Kab. Parigi Moutong	0	1.471	1.633	4.819	7.923
9	Kab. Tojo Una Una	0	523	407	1.115	2.045
10	Kab. Sigi	0	951	950	2.035	3.936
11	Kab. Banggai Laut	0	145	111	433	689
12	Kab. Morowali Utara	0	502	444	890	1.836
13	Kota Palu	0	346	330	639	1.315
Provinsi Sulawesi Tengah		**0**	**8.017**	**7.864**	**21.498**	**37.379**

Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2025 (data diolah kembali)

Tabel ini memperlihatkan jumlah anak yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali, dikelompokkan berdasarkan rentang usia Usia 7–12 Tahun (usia SD), Usia 13–15 Tahun (usia SMP), dan Usia >15 Tahun (usia SMA ke atas). Total anak yang belum pernah bersekolah di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 37.379 anak, terdiri dari Usia 7–12 Tahun sebanyak 8.017 anak, Usia 13–15 Tahun sebanyak 7.864 anak, dan Usia >15 Tahun sebanyak 21.498 anak. Sementara Kabupaten dengan angka tertinggi, yaitu Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 7.923 anak, Kabupaten Donggala sebanyak 5.345 anak, dan Kabupaten Poso sebanyak 4.243 anak.

Mayoritas anak belum bersekolah berada di usia >15 Tahun → indikasi gagalnya akses pendidikan dasar di masa lalu. Usia SD (7–12 tahun) masih menyumbang jumlah signifikan (8.017 anak), yang menunjukkan tugas besar dalam pemenuhan wajib belajar 9 tahun. Kota Palu memiliki angka relatif lebih rendah (1.315 anak), mengindikasikan akses pendidikan dasar di perkotaan cenderung lebih baik. Tingginya angka anak belum pernah bersekolah, khususnya di usia di atas 15 tahun, menunjukkan adanya *backlog* pendidikan

yang harus ditangani melalui Pendidikan nonformal (PKBM, Kejar Paket) dan Akselerasi identifikasi dan penjangkauan ATS usia muda

Selanjutnya, anak penyandang disabilitas yang berusia antara 5 hingga 18 Tahun merupakan anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan serta dalam hal mengakses pendidikan.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2024, jumlah anak penyandang disabilitas yang berusia antara 5 hingga 18 Tahun di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 16.292 orang. Angka penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong yakni 2.324 orang dan terendah di Kabupaten Banggai Laut yaitu 315 orang. Sementara dilihat dari ragam disabilitas, yang terbanyak yakni tuna daksa/cacat tubuh yaitu sebanyak 4.018 orang dan yang terkecil yakni tuna netra, rungu, dan wicara yaitu 175 orang. Secara detail mengenai anak penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	RAGAM DISABILITAS	KABUPATEN BUOL	KABUPATEN PARIMO	KABUPATEN TOUNA	KABUPATEN SIGI	KABUPATEN BALUT	KABUPATEN MORUT	KOTA PALU	KABUPATEN BANGKEP	KABUPATEN BANGGAI	KABUPATEN MOROWALI	KABUPATEN POSO	KABUPATEN DONGGALA	KABUPATEN TOLI TOLI	JUMLAH
1	Tuna daksa/ cacat tubuh	259	565	254	325	89	172	284	231	524	128	487	398	302	**4.018**
2	Tuna netra/buta	204	372	138	215	47	100	113	201	428	105	202	284	187	**2.596**
3	Tuna rungu	144	198	73	165	44	64	35	136	258	41	176	141	120	**1.595**
4	Tuna wicara	76	236	64	149	27	54	76	93	159	51	173	133	100	**1.391**
5	Tuna rungu & wicara	40	92	33	70	11	35	33	38	69	17	94	63	46	**641**
6	Tuna netra & cacat tubuh	45	64	19	49	3	27	13	37	66	22	45	60	37	**487**
7	Tuna netra, rungu, & wicara	17	26	7	27	-	9	10	4	22	9	18	16	10	**175**
8	Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh	23	39	18	37	3	18	20	16	41	7	38	30	25	**315**
9	Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh	18	57	12	22	3	11	15	14	36	11	23	41	12	**275**
10	Cacat mental retardasi	114	270	102	136	49	97	125	129	243	84	236	197	112	**1.894**
11	Mantan penderita gangguan jiwa	53	126	48	87	10	37	51	38	105	25	83	139	40	**842**
12	Cacat fisik & mental	224	279	111	193	29	110	95	136	263	83	206	190	144	**2.063**
JUMLAH DISABILITAS		**1217**	**2324**	**879**	**1475**	**315**	**734**	**870**	**1073**	**2214**	**583**	**1781**	**1692**	**1135**	**16.292**

Sumber: Dinas Sosial (Data DTKS 2024)

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk

mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah yang ada pada sektor informal membutuhkan perlindungan yang dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan pekerja bukan penerima upah dan keluarganya.

Pekerja bukan penerima upah dan keluarganya sebagai kelompok masyarakat di Sulawesi Tengah yang rentan terhadap hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan meninggal dunia membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah melalui pengembangan Sistem Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program JKK merupakan program yang memberi manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Program JKM merupakan program yang memberi manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Peta *Universal Coverage* Jamsostek Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Peta Universal Coverage Jamsostek Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025

NO	Kabupaten/Kota	Formal				Informal				Total			
		Semesta	Realisasi	%	Selisih	Semesta	Realisasi	%	Selisih	Semesta	Realisasi	%	Selisih
a	b	c	d	e = d/c	f = d-c	g	h	i = h/j	k = h-g	l = c+g	m = d+h	n = m/l	o = m-l
1	Banggai	50.487	27.909	55%	-22.578	102.598	15.125	15%	-87.473	153.085	43.034	28%	**-110.051**
2	Banggai Kepulauan	13.285	9.634	73%	-3.651	35.585	1.004	3%	-34.581	48.870	10.638	22%	**-38.232**
3	Banggai Laut	8.041	113	1%	-7.928	23.149	23	0%	-23.126	31.190	136	0%	**-31.054**
4	Buol	15.974	11.308	71%	-4.666	44.711	6.884	15%	-37.827	60.685	18.192	30%	**-42.493**
5	Donggala	30.704	20.786	68%	-9.918	84.784	11.214	13%	-73.570	115.488	32.000	28%	**-83.488**
6	Morowali	88.906	50.054	56%	-38.852	64.160	28.112	44%	-36.048	153.066	78.166	51%	**-74.900**
7	Morowali Utara	34.372	23.369	68%	-11.003	26.197	14.413	55%	-11.784	60.569	37.782	62%	**-22.787**
8	Palu	18.844	28.319	150%	9.475	34.108	2.467	7%	-31.641	52.952	30.786	58%	**-22.166**
9	Parigi Moutong	36.851	25.663	70%	-11.188	169.271	11.187	7%	-158.084	206.122	36.850	18%	**-169.272**
10	Poso	28.365	22.243	78%	-6.122	82.509	5.897	7%	-76.612	110.874	28.140	25%	**-82.734**
11	Sigi	21.098	19.634	93%	-1.464	72.717	3.189	4%	-69.528	93.815	22.823	24%	**-70.992**
12	Tojo Una-una	17.439	14.922	86%	-2.517	45.015	7.622	17%	-37.393	62.454	22.544	36%	**-39.910**
13	Toli-toli	27.636	15.346	56%	-12.290	68.241	3.156	5%	-65.085	95.877	18.502	19%	**-77.375**
SULAWESI TENGAH		**392.002**	**269.300**	**69%**	**-122.702**	**853.045**	**110.293**	**13%**	**-742.752**	**1.245.047**	**379.593**	**30%**	**-865.454**

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng Tahun 2025

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan Formal sampai dengan Tahun 2025 di targetkan sebesar 392.002 jiwa, realisasi sebanyak 269.300 peserta (69%) masih ada yang belum menjadi peserta sebesar 122.702 Jiwa. Sedangkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan Informal sampai dengan Tahun 2025 di targetkan sebesar 853.045 jiwa, realisasi sebanyak 110.293 peserta (13%) masih ada yang belum menjadi peserta sebesar 742.752 Jiwa. Total target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah sebesar 1.245.047 Jiwa dengan realisasi sebesar 379.593 peserta (30%), masih ada yang belum menjadi peserta sebesar 865.454 Jiwa.

Salah satu yang menjadi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan adalah pegawai Non ASN seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	PESERTA	BELUM PESERTA
1	Sulawesi Tengah	4,548	0
2	Banggai	2,958	0
3	Banggai Kepulauan	1,369	0
4	Banggai Laut	2,549	0
5	Buol	1,178	0
6	Donggala	3,003	0
7	Morowali	2,095	0
8	Morowali Utara	2,479	0
9	Palu	22,204	0
10	Parigi Moutong	5,230	0
11	Poso	2,463	0
12	Sigi	1,718	0
13	Tojo Unauna	2,754	0
14	Tolitoli	3,994	0
Total		**58,542**	**0**

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng Tahun 2025

Hingga Tahun 2025 di Sulawesi Tengah terdapat 58.542 tenaga Non ASN yang sudah terlindungi manfaat dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terbanyak di Kota Palu sebesar 22.204 peserta dan terendah di Kabupaten Buol sebesar 1.178 Peserta.

Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Di Sulawesi Tengah aparatur desa yang sudah menjadi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa, BPD & RT/RW
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	Kabupaten/Kota	Peserta	Belum Peserta
1	Banggai	1.448	2.106
2	Banggai Kepulauan	966	985
3	Banggai Laut	0	756
4	Buol	1.495	859
5	Donggala	2.060	1.100
6	Morowali	1.638	0
7	Morowali Utara	1.525	61
8	Palu	1.198	0
9	Parigi Moutong	4.932	0
10	Poso	1.368	1.196
11	Sigi	5.540	0
12	Tojo Una-una	2.060	270
13	Toli-toli	905	1.428
SULAWESI TENGAH		**25.135**	**8.761**

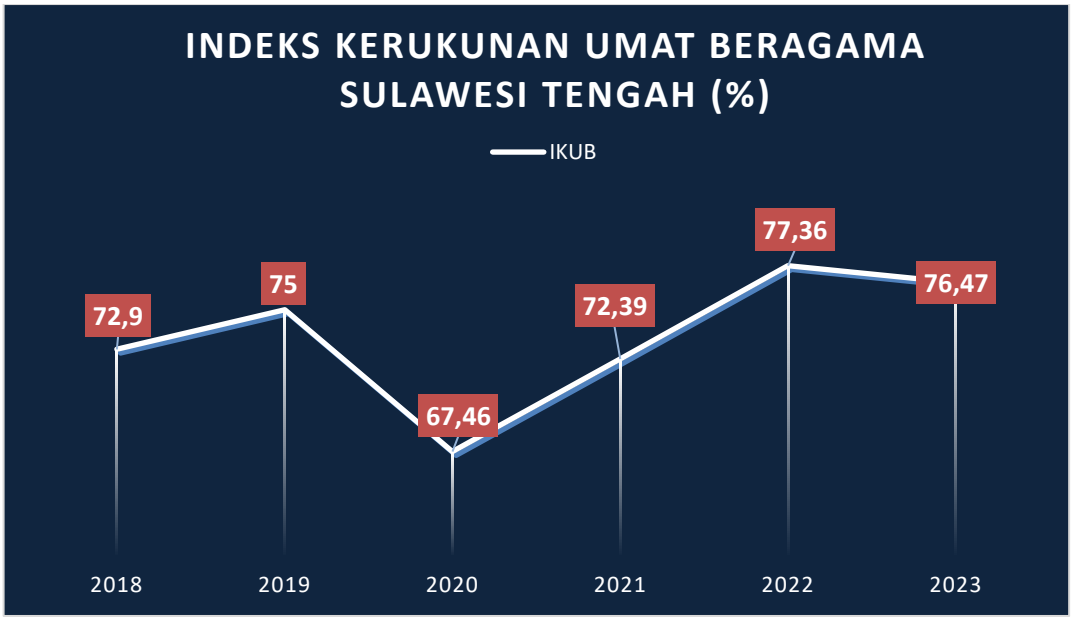
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng Tahun 2025

Di Sulawesi Tengah terdapat 25.135 Perangkat Desa, BPD dan RT/RW yang sudah terlindungi manfaat dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sebanyak 8.761 belum terlindungi.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Pengukuran Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama diukur menggunakan 3 (tiga) variabel utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.



Sumber : Kementerian Agama RI, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.61
Indeks Kerukunan Umat Beragama Periode 2018-2023

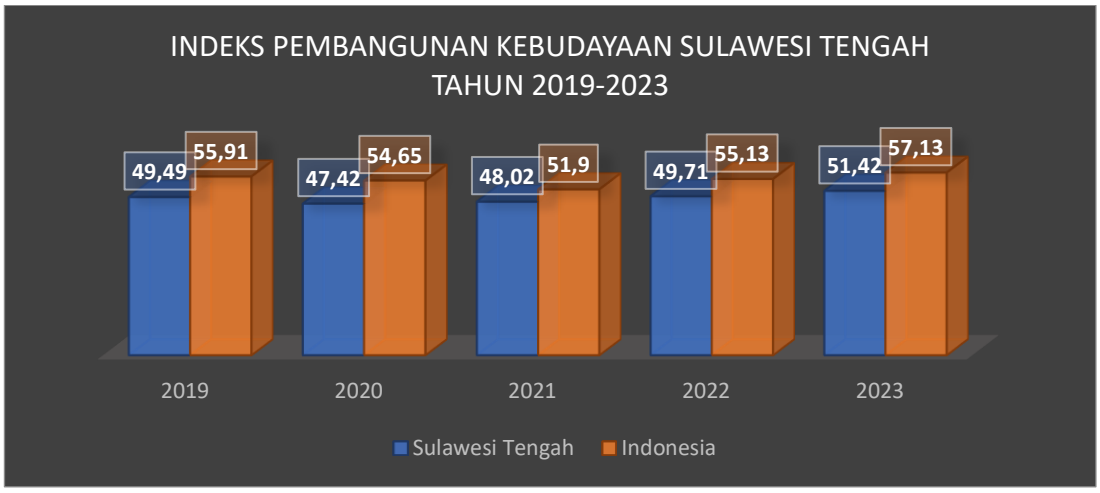
Pada Tahun 2019, Indeks Kerukanan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Sulawesi Tengah dengan skoring sebesar 75,00 dan berada pada posisi ke 12 secara nasional. Hal itu sesuai rilis Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan Tahun 2021, posisi KUB Sulawesi Tengah tidak masuk 10 besar. Pada Tahun 2022 Sulawesi Tengah baru masuk 10 besar dengan urutan ke sembilan, dengan nilai skoring 77,36. Pada Tahun 2023 mengalami penurunan sedikit menjadi 76,47%. IKUB Provinsi Sulawesi Tengah membuktikan besarnya toleransi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Tengah.

2) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai kebijakan bidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Berdasarkan potret capaian, IPK di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 masih dibawah rata-rata capaian nasional dan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2019 IPK sebesar 49,49 persen menurun menjadi 47,42 persen pada Tahun 2020, selanjutnya pada Tahun 2021 meningkat menjadi

48,02 persen, sedangkan pada Tahun 2022 IPK mengalami peningkatan menjadi 49,71 persen, serta pada Tahun 2023 meningkat menjadi 51,13 persen dan masih di bawah capaian nasional yaitu 57,13 persen.

Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.62
Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

a. Pencapaian 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Tengah Lima Tahun Terakhir

Untuk tradisi lisan ada beberapa yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia antara lain tradisi lisan Kakula, Dadendate, Vaino, Kayori , Bahasa Buol, Lelegesan. Untuk Manuskrip telah dilakukan upaya yaitu mengarsipkan data colonial dalam beberapa cetakan, salah satunya koleksi arsip colonial Sulawesi Tengah dalam bahasa belanda dan sudah diterjemahkan dan mengarsipkan beberapa catatan sejarah daerah dalam sebuah buku cetakan sebagai bahan ajar dan bacaan masyarakat. Untuk Adat Istiadat ada beberapa yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia antara lain Molabot Tumpe, Padungku, Modulu-dulu, Nobalia, Mongunom Manginano, Monuni, Movunja, Momago, Moraa. Untuk Ritus ada beberapa adat istiadat yang juga merupakan ritus juga sudah Telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Untuk permainan rakyat gasing dan beberapa permainan lainya sering dilombakan

baik di tingkat SD, SMP yang rutin dilaksanakan Oleh UPT museum dan taman budaya. untuk Olahraga Tradisional Sumpit atau Sopu sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan sering dilombakan sampai tingkat Nasional. Untuk Pengetahuan Tradisional ada beberapa yang telah Telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia antara lain: Kain Tenun Donggala, Kain Kulit Kayu, Kuliner Kaledo, Guma Sulawesi Tengah, Lalove, Rumah Adat Tambi, Tombak Doke Sulawesi Tengah, Kuliner Lybul, Banua Oge, Duhunga, Waru Ranta, Geso-Geso, Lobo Kuliner Tombouat. Untuk Teknologi Tradisional ada beberapa bagian dari OPK lain misalnya yang telah ditetapkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia antara lain Teknologi Pembuatan Kain: Tenun Donggala**,** Kain Kulit Kayu**,** Teknologi Senjata: Guma**,** Doke**,** Sumpit (Sovu) Teknologi Alat Musik Lalove, Geso-Geso. Untuk Seni ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tari Raigo, Tari Torompio, Modero, Tari Pamonte, Karambangan Poso, Tari Dondi Telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Untuk Bahasa Bahasa Buol telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan akan menyusul Bahasa Kaili dan Bahasa Taa dalam proses pengusulan Tahun 2025.

b. Pencapaian Cagar Budaya Sulawesi Tengah Lima Tahun Terakhir.

Ada 20 Cagar Budaya yang ditetapkan Tingkat Provinsi antara lain: Situs Sepe/Palindo, Situs Tumpuara, Situs Langkebulava, Situs Bulu Loga, Situs Panto, Situs Arca Tatandua, Situs Suso, Situs tadulako, Situs ryumah Adat Tambi, Situs Pokekea, Situs Watulumu, Situs Pakasele, Situs Kintasae, Situs Watunongko, Situs Maradindo, Situs Pekaloa, Situs Sindi Melei, Situs Lembo, Situs Bukit Luo, Situs Lempeh dan satu Usulan Unesco yang masuk daftar tentative list yaitu Kawasan Megalit Lore Lindu

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Capaian Indeks Perlindungan Anak di Sulawesi Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif pada 5 (lima) Tahun terakhir dan angkanya masih dibawah angka rata-rata nasional. Terlihat pada Tahun 2019 Indeks Perlindungan anak sebesar 57,91 persen mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 56,52 persen dan sebesar 53,60 persen pada Tahun 2021, kemudian terjadi peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 56,74 persen serta naik menjadi 58,54 persen pada Tahun 2023 tapi masih di bawah nasional yaitu 63,83 persen. Secara detail mengenai perkembangan Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kementerian PPPA, 2024 (data diolah kembali)

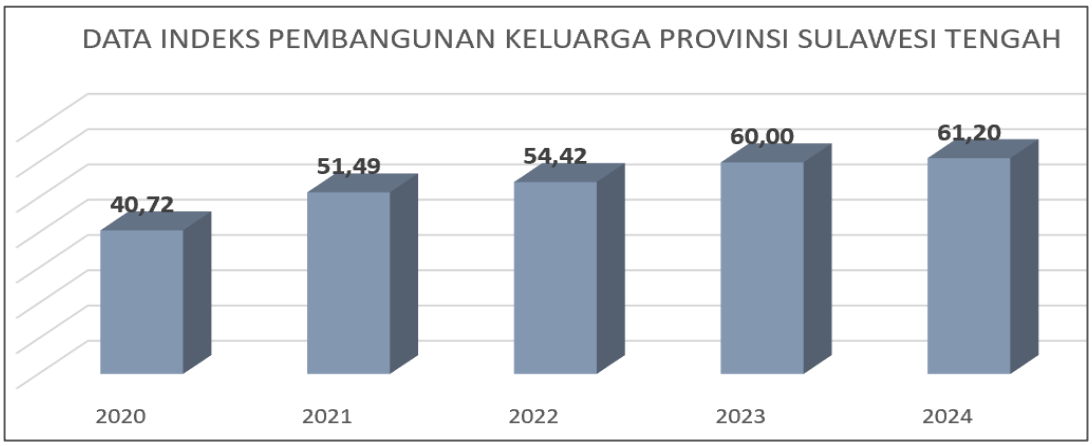
Gambar 2.63
Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

2) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.

Berdasarkan potret capaian, Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Provinsi Sulawesi Tengah selama tiga Tahun terakhir menunjukkan perbaikan dan peningkatan yang signifikan, yakni dari 40,72 persen pada

Tahun 2020 meningkat menjadi 61,20 persen pada Tahun 2024. Secara detail mengenai perkembangan IBangga di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BKKBN, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.64
Indeks Pembangunan Keluarga Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

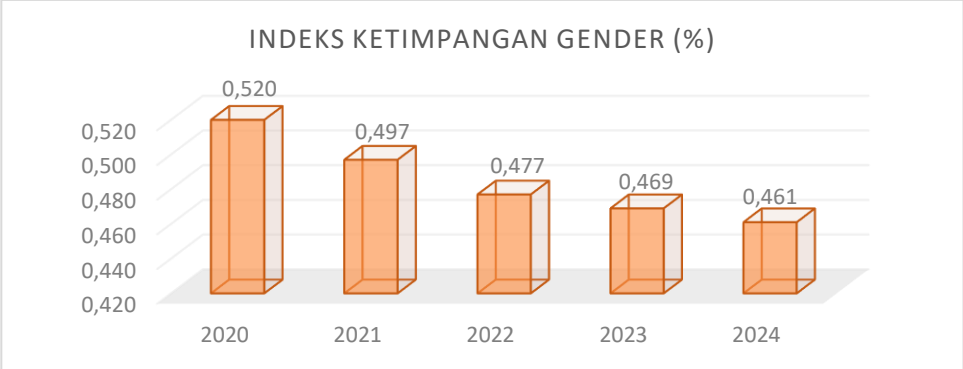
3) Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu tujuan dan menjadi agenda pembangunan nasional adalah upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sedangkan keadilan gender suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia, tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Perspektif mutu modal manusia (*human capital*) telah menekankan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan tuntutan pembangunan dan tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi.

Menurut Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (2016), bahwa ketimpangan/ketidaksetaraan gender atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) digunakan untuk menunjukkan masih adanya kesenjangan gender pada berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan (partisipasi ekonomi).

Berdasarkan potret capaian IKG di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami

perbaikan dan angkanya semakin menurun yakni dari 0,520 pada Tahun 2020 menurun signifikan menjadi 0,461 pada Tahun 2024. Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan IPG di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.65
Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

Selanjutnya, perkembangan nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

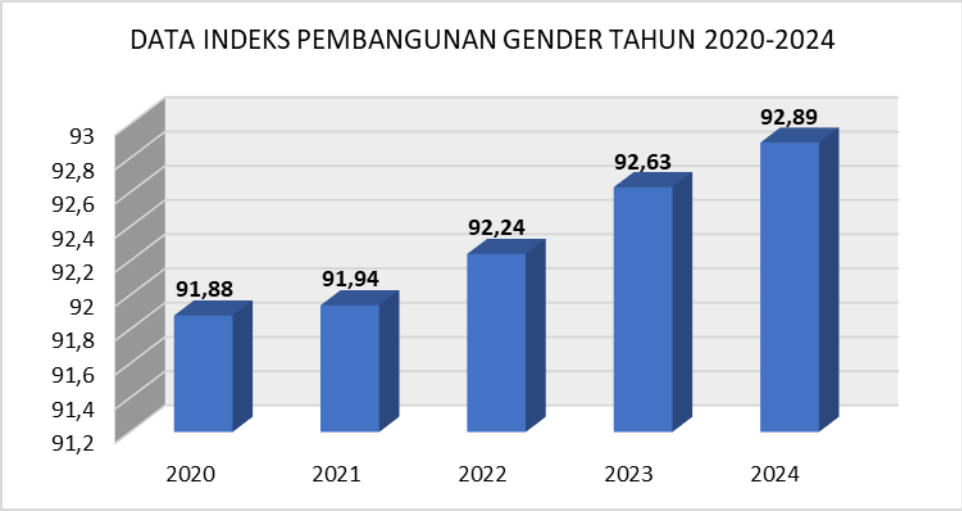
No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	0,544	0,558	0,560	0,539	0,525
2	Banggai	0,522	0,501	0,463	0,479	0,450
3	Morowali	0,568	0,601	0,581	0,570	0,476
4	Poso	0,521	0,383	0,445	0,386	0,336
5	Donggala	0,571	0,576	0,559	0,600	0,530
6	Tolitoli	0,480	0,537	0,458	0,371	0,365
7	Buol	0,517	0,446	0,454	0,438	0,349
8	Parigi Moutong	0,589	0,547	0,538	0,528	0,510
9	Tojo Una-una	0,614	0,598	0,603	0,565	0,491
10	Sigi	0,560	0,502	0,470	0,517	0,444
11	Banggai Laut	0,622	0,583	0,573	0,575	0,542
12	Morowali Utara	0,516	0,491	0,458	0,472	0,435
13	Kota Palu	0,440	0,466	0,349	0,209	0,300
Provinsi Sulawesi Tengah		**0,520**	**0,497**	**0,477**	**0,469**	**0,461**

Sumber: BPS, 2024

4) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, hanya kalau IPG memberikan makna atau mengungkapkan adanya ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Komponen penghitungan IPG adalah Angka harapan hidup, harapan pendidikan, dan indeks distribusi pendapatan dengan Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan potret capaian, perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan capaian yang fluktuatif, dimana pada Tahun 2018 sebesar 92,08 persen menurun menjadi 92,01 persen pada Tahun 2019, dan sebesar 91,88 persen pada Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2021 IPG meningkat menjadi 91,94 persen, pada Tahun 2022 kembali meningkat hingga mencapai angka 92,24 persen, pada Tahun 2023 meningkat mencapai 92,63 persen dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 92,89 persen. Secara detail mengenai perkembangan IPG di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gamber berikut:



Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.66
Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

Selanjutnya, perkembangan nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

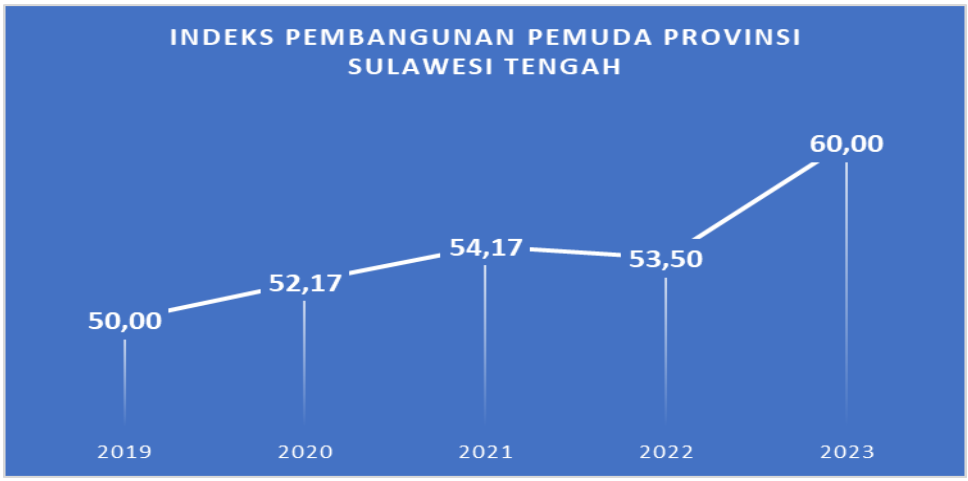
Tabel 2.53
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulaun	92.42	92.28	92.29	92.35	92,86
2	Banggai	90.93	90.96	90.97	91.49	91,73
3	Morowali	84.86	84.98	85.09	85.19	85,42
4	Poso	96.71	96.90	96.97	97.29	97,23
5	Donggala	88.42	88.51	88.99	89.15	89,5
6	Tolitoli	89.88	90.46	90.56	90.61	90,6
7	Buol	89.27	89.11	89.50	89.87	90,22
8	Parigi Moutong	92.41	92.61	92.86	92.74	92,66
9	Tojo Una-una	91.35	91.31	91.33	91.65	92,02
10	Sigi	93.29	93.53	94.15	94.30	94,37
11	Banggai Laut	91.45	91.92	92.37	92.49	92,73
12	Morowali Utara	96.00	95.95	96.48	96.67	97,06
13	Kota Palu	98.29	98.48	98.42	98.77	98,57
Provinsi Sulawesi Tengah		**91,88**	**91,94**	**92,24**	**92,63**	**92,89**

Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

5) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan domain, yaitu: pembangunan individu; pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan partisipasi dan diskriminasi. Terlihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami perbaikan dan peningkatan, yakni 50,00 persen pada Tahun 2019 meningkat menjadi 60,0 persen pada Tahun 2023. Secara rinci mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gamber berikut:



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (data diolah kembali)

Gambar 2.67
Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah
Tahun 2019-2023

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

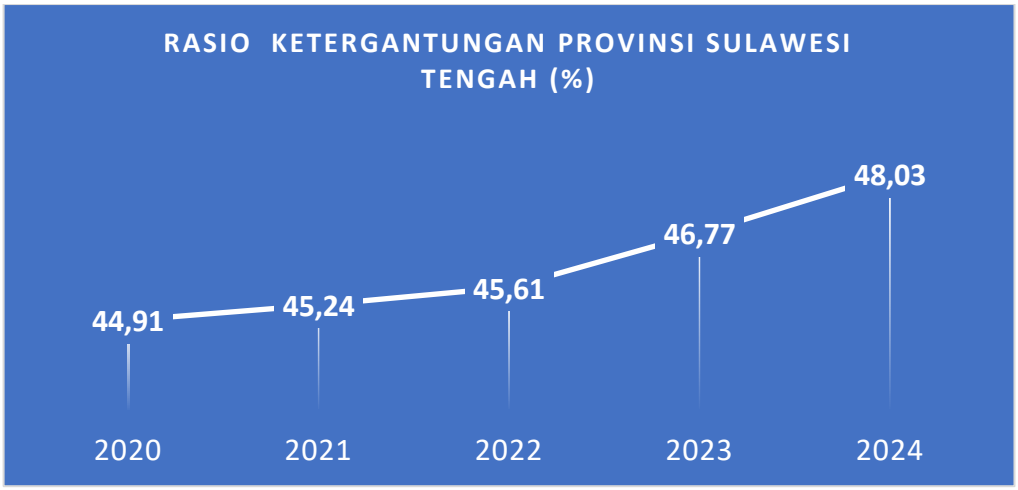
Aspek daya saing daerah dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia, fasilitas wilayah atau infrastruktur serta iklim investasi. Dalam konteks otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Angka Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat dilihat dari indikator *dependency ratio* atau rasio ketergantungan. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 44,91 persen pada Tahun 2020 menjadi 48,03 persen pada Tahun 2024, sebagaimana tertera pada gambar berikut.

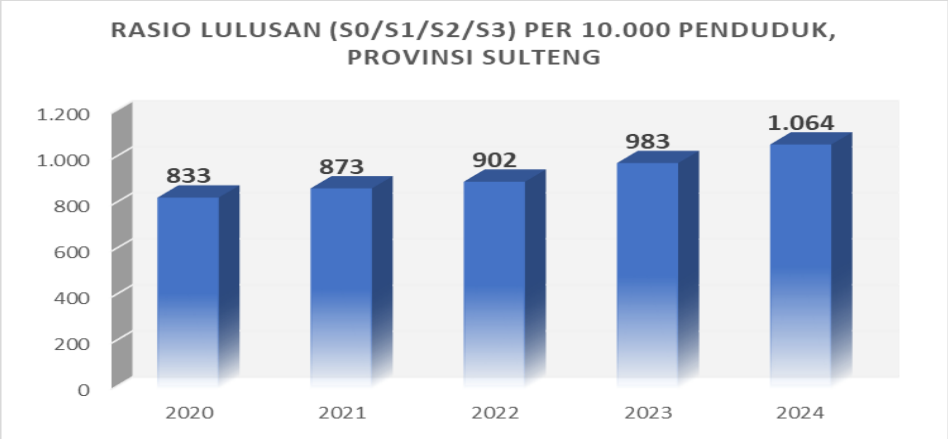


Sumber: BPS, 2024 (Data Diolah Kembali)

Gambar 2.68
Tren Rasio Ketergantungan Penduduk Usia non produktif Terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023

2) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (SO/S1/S2/S3) per 10.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2020 rasionya sebesar 833 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 873 per 10.000 penduduk pada Tahun 2021, selanjutnya setiap Tahun rasionya mengalami peningkatan hingga mencapai 1.064 per 10.000 penduduk pada Tahun 2024.



Sumber: BPS, 2025 (Data Diolah Kembali)

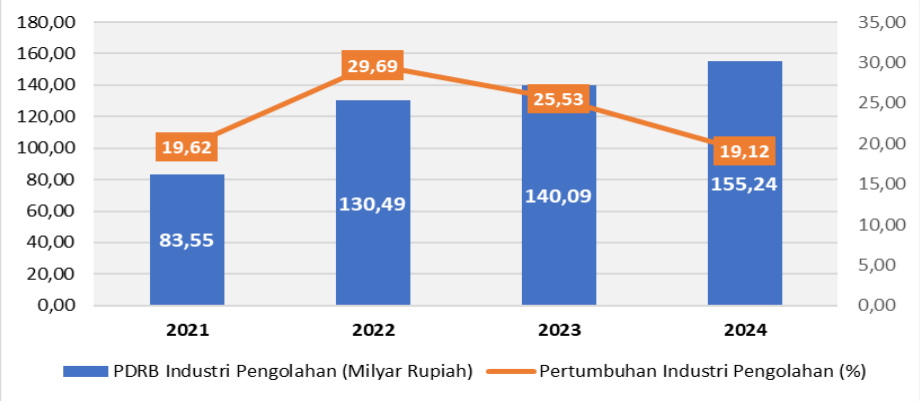
Gambar 2.69
Perkembangan Rasio Lulusan SO/S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan memainkan peran penting dalam perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Sektor ini juga mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian.

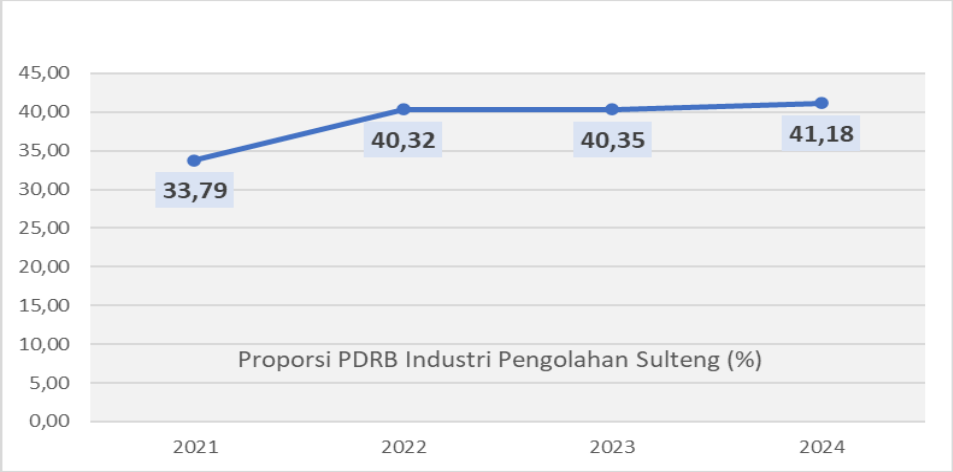
Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 cenderung meningkat yakni dari Rp.83,55 Milyar pada Tahun 2021 menjadi Rp.155,24 Milyar pada Tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,43 persen pertahun.



Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.70
Pertumbuhan dan Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024

Rasio industri PDRB industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yakni dari 33,79 persen pada Tahun 2021 menjadi 41,18 persen pada Tahun 2024.



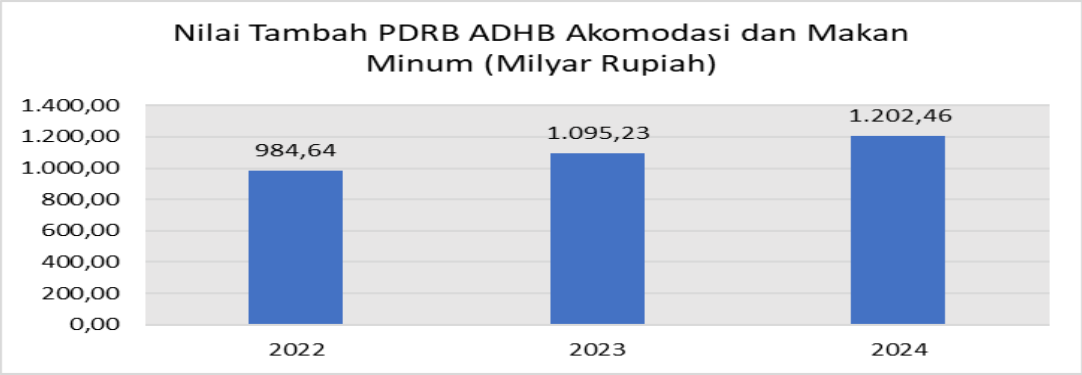
Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.71
Proporsi PDRB ADHB Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024

2) Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Sektor akomodasi dan makan minum memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan dasar wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Selain itu, akomodasi dan makan minum juga mendukung sektor-sektor lain seperti transportasi dan pergudangan.

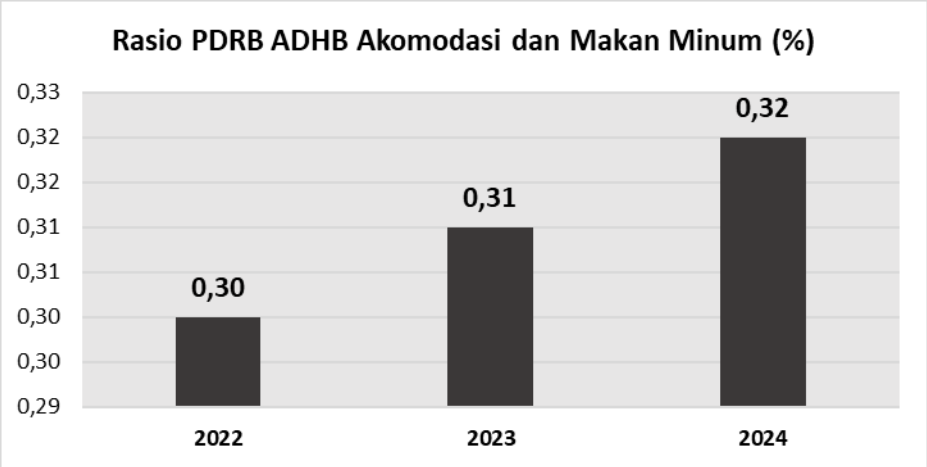
Tercatat perkembangan nilai tambah Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni dari Rp.984,64 Milyar pada Tahun 2022 menjadi Rp.1.202,46 Milyar pada Tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen pada Tahun 2024.



Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.72
Nilai Tambah PDRB ADHB Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024

Selanjutnya, sejalan dengan meningkatnya nilai tambah, rasio PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tengah juga cenderung mengalami peningkatan yakni dari 0,30 persen pada Tahun 2022 menjadi 0,32 persen pada Tahun 2024.



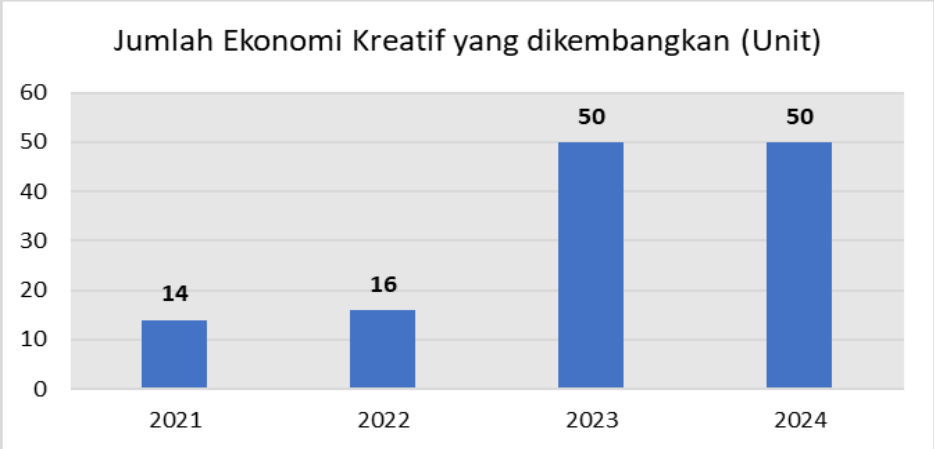
Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.73
Rasio PDRB ADHB Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024

3) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mempromosikan identitas budaya lokal. Sektor ekonomi kreatif ini mendorong inovasi, pengembangan produk baru, dan kolaborasi antar sektor di daerah.

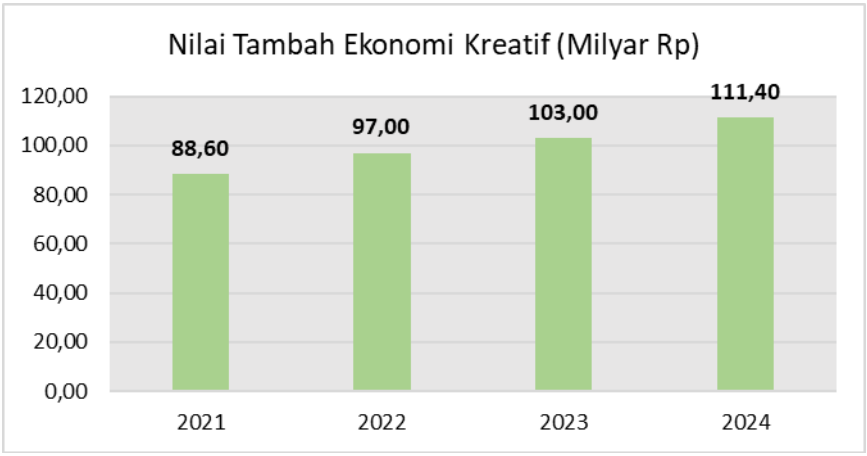
Tercatat bahwa jumlah ekonomi yang di kembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni dari 14 unit pada Tahun 2021 berkembang menjadi 50 unit pada Tahun 2024. Jumlah ini masih dirasakan terbatas, dan ke depan perlu untuk dikembangkan mengingat potensi ekonomi kreatif masih signifikan untuk di kembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah.



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Gambar 2.74
Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024

Selanjutnya, nilai tambah ekonomi kreatif yang tercipta di Provinsi Sulawesi Tengah empat Tahun terakhir mengalami peningkatan yakni dari Rp.88,60 Milyar pada Tahun 2021 menjadi Rp.111,40 Milyar pada Tahun 2024.



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

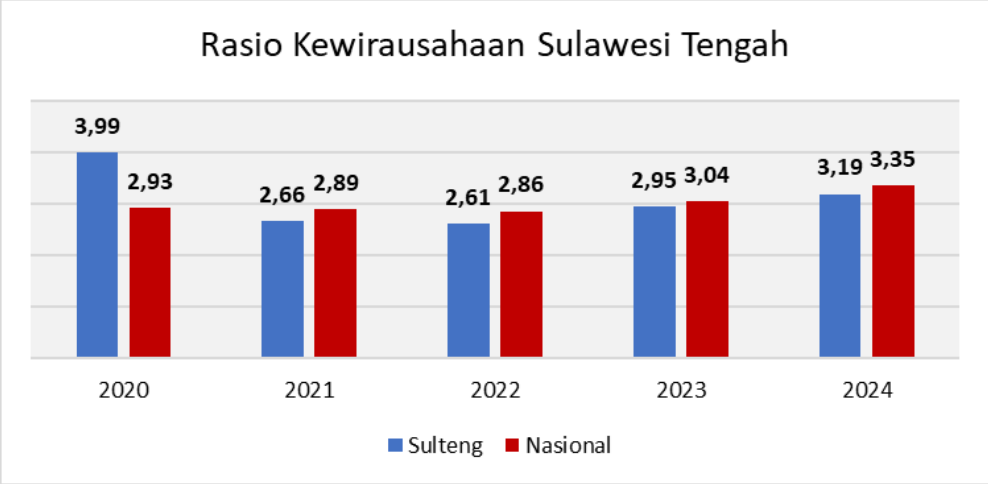
Gambar 2.75
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024

4) Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan sangat penting keberadaannya karena mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Dengan memiliki jiwa kewirausahaan, seseorang dapat menciptakan peluang usaha sendiri, mengurangi ketergantungan pada lapangan kerja konvensional, dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, kewirausahaan

juga melatih keterampilan penting seperti pemecahan masalah, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Perkembangan rasio kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kecenderungan fluktuatif dimana pada Tahun 2020 rasionya mencapai 3,99 menurun menjadi 2,66 pada Tahun 2021, dan sebesar 2,61 pada Tahun 2022, selanjutnya pada Tahun 2023 rasio kewirausahaan meningkat menjadi 2,95, serta rasionya kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 3,19. Namun demikian capaian ini masih dibawa rata-rata nasional, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Kemenkop UKM, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.76
Perkembanagan Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 69,85 persen.

TPAK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif pada periode Tahun 2019 hingga Tahun 2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulaun	72,97	71,98	74,63	72,76	73,48
2	Banggai	69,79	71,8	73,48	71,7	71,7
3	Morowali	64,7	63,75	60,74	58,52	61,49
4	Poso	74,78	73,54	72,41	71,07	68,65
5	Donggala	63,93	67,47	72,03	66,57	68,42
6	Tolitoli	65,95	64,04	64,7	68,8	68,91
7	Buol	69,75	67,52	69,18	69,43	70,5
8	Parigi Moutong	72,5	68,82	74,05	73,3	74,68
9	Tojo Una-Una	75,33	74,86	68,47	75,06	75,08
10	Sigi	69,24	70,76	72,69	70,94	75,92
11	Banggai Laut	67,2	61,42	58,37	59,17	68,98
12	Morowali Utara	69,85	68,47	69,93	70,33	70,35
13	Kota Palu	66,46	65,07	64,68	69,28	70,5
Provinsi Sulawesi Tengah		69,44	68,73	69,99	69,85	71,10

Sumber : BPS, Sulteng dalam Angka 2025

Selanjutnya TPAK menurut jenis kelamin selama periode 2020-2024 menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara laki-laki dan perempuan. Berikut TPAK berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.55
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	85,82	84,78	85,83	85,42	85,94
Perempuan	52,5	52,17	53,71	53,4	55,47

Sumber: BPS, 2025

TPAK laki-laki berada pada tingkat yang relatif tinggi dan stabil di atas 84 persen sepanjang periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki tercatat sebesar 85,82 persen, sedikit menurun menjadi 84,78 persen pada 2021, namun kembali naik ke 85,83 persen di tahun 2022. Angka tersebut hanya mengalami sedikit fluktuasi pada 2023 sebesar 85,42 persen, dan meningkat lagi pada 2024 yaitu 85,94 persen. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi keterlibatan laki-laki dalam pasar kerja Sulawesi Tengah. Sebaliknya, TPAK perempuan menunjukkan tren yang lebih dinamis, meskipun relatif jauh di bawah laki-laki. Pada tahun 2020, TPAK perempuan hanya 52,50 persen, bahkan menurun ke 52,17 persen pada 2021. Namun,

sejak 2022 tren ini mulai membaik dengan capaian 53,71 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 53,40 persen pada 2023, dan capaian tahun 2024 yaitu 55,47 persen. Kenaikan signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam partisipasi perempuan pada pasar kerja, meski kesenjangan gender masih cukup lebar.

Tabel 2.56
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020	2021	2022	2023	2024
SD ke Bawah	40,24	39,03	41,78	37,85	36,76
Sekolah Menengah Pertama	17,68	17,09	16,57	16,69	17,16
Sekolah Menengah Atas	21,06	21,23	22,10	25,68	26,11
Sekolah Menengah Kejuruan	7,20	8,06	6,29	6,30	6,22
Diploma I/II/III	2,33	2,21	1,93	2,04	1,85
Diploma IV, S1, S2, S3	11,49	12,38	11,33	11,43	11,90

Sumber: BPS, 2025

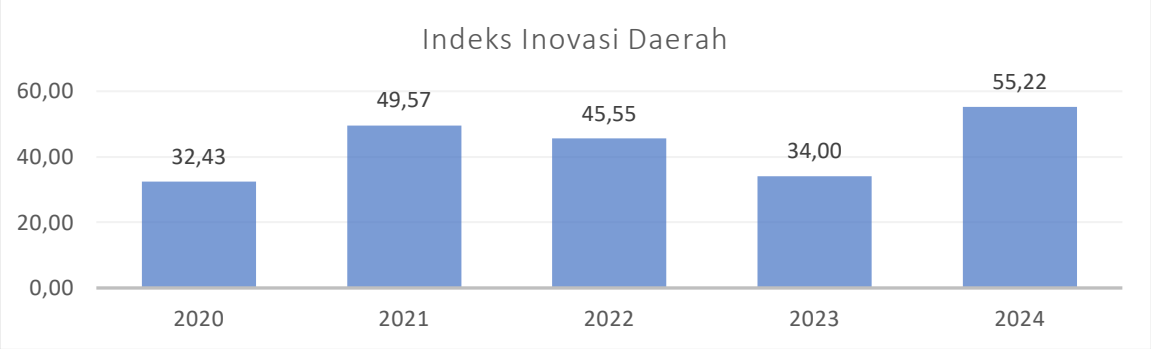
Persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Agustus Periode 2020–2024 menunjukkan adanya pergeseran tingkat pendidikan penduduk Sulawesi Tengah. Persentase lulusan SD ke bawah menurun dari 40,24 persen pada Tahun 2020 menjadi 36,76 persen di Tahun 2024, menandakan berkurangnya dominasi pendidikan SD ke bawah. Lulusan SMA meningkat cukup konsisten, dari 25,68 persen Tahun 2023 menjadi 26,11 persen pada Tahun 2024. Sebaliknya, lulusan SMK serta Diploma I/II/III cenderung menurun, sementara lulusan SMP relatif stagnan di kisaran 16–17 persen. Lulusan pendidikan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) masih relatif stabil, hanya naik tipis dari 11,43 persen Tahun 2023 menjadi 11,90 persen pada Tahun 2024. Secara umum, tren ini menggambarkan arah positif dengan meningkatnya lulusan pendidikan menengah.

6) Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan alat evaluasi penting yang memberikan gambaran holistik tentang kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan, mengadopsi, dan menerapkan inovasi. Selain itu, inovasi daerah juga memberikan pandangan yang mendalam tentang tingkat kesiapan dan performa inovatif suatu daerah. Daerah yang memiliki indeks Inovasi yang

tinggi menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang inovatif, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Ini memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2020 hingga 2024 meningkat dari predikat Kurang Inovatif menjadi Inovatif, namun apabila melihat skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 mengalami fluktuatif yakni Tahun 2020 sebesar 32,43 meningkat menjadi 49,57 pada Tahun 2021, dan selanjutnya menurun menjadi 45,55 pada Tahun 2022. Secara rinci mengenai perkembangan IID Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.77
Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru dan Yuridiksi Berkelanjutan

1) Indeks Ekonomi hijau

Penerapan ekonomi hijau terus digalakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif dan secara sosial. Pemahaman terhadap pentingnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth Planning/GGP)* juga sebagai indikator pendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi

Hijau atau *Green Economy Index (GEI)* sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat Nasional maupun Provinsi .

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dimana pada Tahun 2018 nilai Indeks Ekonomi Hijau sebesar 42,19 menurun menjadi 41,17 pada Tahun 2019, selanjutnya pada Tahun 2020 nilainya meningkat menjadi 42,26, sedangkan pada Tahun 2021 Indeks Ekonomi Hijau kembali meningkat menjadi 43,83, dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 52,38, selanjutnya pada Tahun 2023 nilainya menurun menjadi 51,38 serta pada Tahun 2024 angkanya kembali meningkat menjadi 51,65.

Perkembangan mengenai nilai Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 secara detail dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Perkembangan Capaian Indeks Ekonomi Hijau
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 20218-2024

PILAR	NO.	INDIKATOR	SKOR INDEKS/TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lingkungan	1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan	69,39	68,41	68,20	67,88	67,66	67,45	67,45
	2	Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer	1,79	2,29	1,90	3,12	3,29	6,88	14,79
	3	Kualitas air permukaan pada parameter BOD	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	87,25	75,00
	4	Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut)	11,79	11,25	11,22	10,18	9,64	9,64	9,29
	5	Kualitas udara pada parameter NO2	91,07	90,97	91,18	89,92	90,05	90,16	90,38
	6	Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	31,12	27,71	28,78	25,97	23,66	22,26	20,60
	SKOR PILAR LINGKUNGAN:		34,19	33,44	33,55	32,84	48,97	47,27	46,25
Ekonomi	7	Intensitas emisi	95,69	82,18	89,14	85,98	87,22	88,72	89,28
	8	Intensitas energi final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per kapita	30,69	32,56	34,10	40,24	42,52	44,56	48,08
	10	Produktivitas pertanian (padi, kelapa sawit, perikanan budidaya)	46,28	36,44	40,11	47,78	33,33	33,33	35,22
		a. Produktivitas padi	2,50	6,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		b. Produktivitas kelapa sawit	36,33	3,33	12,00	43,33	0,00	0,00	5,67
		c. Produktivitas perikanan budidaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	87,72	90,01	97,81	94,99	100,00	100,00	100,00
	12	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	30,88	28,91	32,20	54,67	57,14	59,33	61,16
	SKOR PILAR EKONOMI:		48,54	45,02	48,89	53,94	53,37	54,32	55,62
Sosial	13	Rata-rata lama sekolah	59,70	61,20	62,90	65,20	67,50	68,30	68,90
	14	Angka harapan hidup	60,00	60,20	60,24	62,49	64,83	67,07	67,71
	15	Tingkat kemiskinan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31
	16	Tingkat pengangguran	90,83	97,58	93,25	96,92	99,08	93,58	93,75
	SKOR PILAR SOSIAL:		52,63	54,74	54,10	56,15	59,43	57,24	59,17
SKOR INDEKS EKONOMI HIJAU			42,19	41,17	42,26	43,83	52,38	51,38	51,65

Sumber: Capaian & Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2018-2024, Kementerian PPN/Bappenas 2025.

Green economy atau ekonomi hijau adalah gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara

signifikan (Bappenas, 2000), selanjutnya ekonomi hijau dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial *(un partnership for action on green economy-un-page, 2000).*

Adapun konsep Ekonomi Hijau yaitu pembangunan yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial *(well-being and social equity)* dan secara signifikan menurunkan risiko lingkungan serta kelangkaan *ekologi (environmental risks and ecological scarcities)*. UNEP juga menekankan pemikiran pada pelestarian modal alam, yang meliputi ekosistem dan sumber daya alam *(united nations environment programme-UNEP,* 1990*).*

Sehubungan dengan kebijakan ekonomi hijau menjadi salah satu jalan menuju Indonesia Emas 2045 dan Sulawesi Tengah Emas 2045, maka diperlukan penghitungan terhadap komponen-komponen pilar penyusunnya seperti Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial untuk mendapatkan bobot indeks, tetapi sebelum penghitungan maka dibutuhkan kesepakatan dan kesepahaman atas angka *data base* (data awal) penghitungan dan tentunya kesepakatan dan komitmen dari pemerintah Provinsi , kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah dalam menetapkan target indikator setiap komponen penyusun pilarnya. Selain itu, bagi daerah diperlukan hitungan tagging program dan kegiatan dinas/biro/badan yang mendukung pembangunan ekonomi hijau *(green budget tagging)* yang digunakan untuk mendesign perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi.

Indeks Ekonomi Hijau dibangun atas 3 pillar yaitu : Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial, dimana Pilar Lingkungan terdiri atas 5 pilar seperti: tutupan lahan (vegetasi/hutan) (%), penerapan energy baru terbarukan (%), sampah terkelola (%), penurunan emisi (%) dan lahan gambut terdegradasi (%). Untuk pilar ekonomi terdiri atas 6 sub pillar, seperti: intensitas emisi (TCO2eq/Bnrp), intensitas energi Akhir (Boe/Bnrp), pendapatan nasional bruto (GNI)/Capita (USD/Capita), produktivitas hasil pertanian (Ton/Ha/Years), produktivitas tenaga kerja sektor industri (MNRP/Person) dan produktivitas tenaga kerja sektor pelayanan (MNRP/Person). Sedangkan untuk pilar sosial, terdiri atas 4 pilar seperti: rata-rata lama sekolah (years), angka harapan hidup (years), tingkat

kemiskinan (%) dan tingkat pengangguran terbuka (%). Adapun unit, batas minimum dan maksimum setiap indikator di Sulawesi Tengah ditampilkan pada tabel berikut.



Sumber: Bappenas, 2024

Gambar 2.78
Indikator Indeks Ekonomi Hijau di level Provinsi

Selanjutnya hasil penghitungan skor masing-masing Pilar Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Unit, Tren, Batas Minimum dan Maksimum Setiap Indikator di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Unit	Tren Positif	Batas minimum (ymin)	Target (ymax)
1	**Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan**	%	Naik	**0,50**	**93,17**
2	**Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer**	%	Naik	**0**	**42**
3	**Kualitas air permukaan pada parameter BOD**	mg/l	Turun	**6**	**2**
4	**Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut)**	%	Turun	**100**	**9**
5	**Kualitas udara pada parameter NO2**	µg/m3	Turun	**40**	**2,7**
6	**Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline**	%	Naik	**0,37**	**97,25**
	SKOR PILAR LINGKUNGAN:				
7	**Intensitas emisi**	Milyar Rupiah (2010)	Turun	**812,35**	**0,00**
8	**Intensitas energi final**	(2010)	Turun	**125**	**63**
9	**Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per kapita**	USD/kapita	Naik	**729**	**11673**
10	**Produktivitas pertanian (padi, kelapa sawit, perikanan budidaya)**				
	a. Produktivitas padi	Ton/Ha/tahun	Naik	**5**	**11**
	b. Produktivitas kelapa sawit	Ton/Ha/tahun	Naik	**2**	**5**
	c. Produktivitas perikanan budidaya	Ton/Ha/tahun	Naik	**3**	**19**
11	**Produktivitas tenaga kerja sektor industri**	Rupiah (2010)/orang	Naik	**20.000.000**	**200.000.000**
12	**Produktivitas tenaga kerja sektor jasa**	Rupiah (2010)/orang	Naik	**20.000.000**	**200.000.000**
	SKOR PILAR EKONOMI:				
13	**Rata-rata lama sekolah**	Tahun	Naik	**2**	**12**
14	**Angka harapan hidup**	Tahun	Naik	**55**	**75,5**
15	**Tingkat kemiskinan**	%	Turun	**13**	**0**
16	**Tingkat pengangguran**	%	Turun	**15**	**3**
	SKOR PILAR SOSIAL:				

Sumber : Bappenas (2024)

Penghitungan indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 0,10 persen.

Sesuai klasifikasi, skor Indeks Ekonomi Hijau dibagi menjadi 6 kategori yaitu: 0,00-25,00 (kurang); 25,01-37,50 (sedang Tier 1); 37,51-50,00 (sedang Tier 2); 50,01-62,50 (baik Tier 1); 65,51-75,00 (baik Tier 2) dan 75,01-100,00 (sangat baik), maka pada tabel 2.56, memperlihatkan bahwa Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Tengah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 masih berada di bawah klasifikasi sedang Tier 2 dengan skor pilar lingkungan yang angka pencapaiannya paling rendah di antara 2 pilar lainnya, tetapi di atas Tahun 2021, klasifikasi indeks Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang membaik pada klasifikasi baik Tier 1 atau baik pada posisi dasar yang ditopang oleh skor pilar lingkungan yang membaik.

Pada tahun-tahun berikutnya untuk Sulawesi Tengah masih diperlukan sejumlah intervensi yang lebih mendukung dan masif untuk meningkatkan performa pada sektor-sektor prioritas seperti energi, pertanian, dan investasi di setiap kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Selain itu, pelestarian lingkungan (termasuk lahan kering, tandus dan kualitas air) serta penanggulangan kemiskinan dan daerah rawan pangan juga menjadi isu penting daerah, khususnya di kabupaten kepulauan.

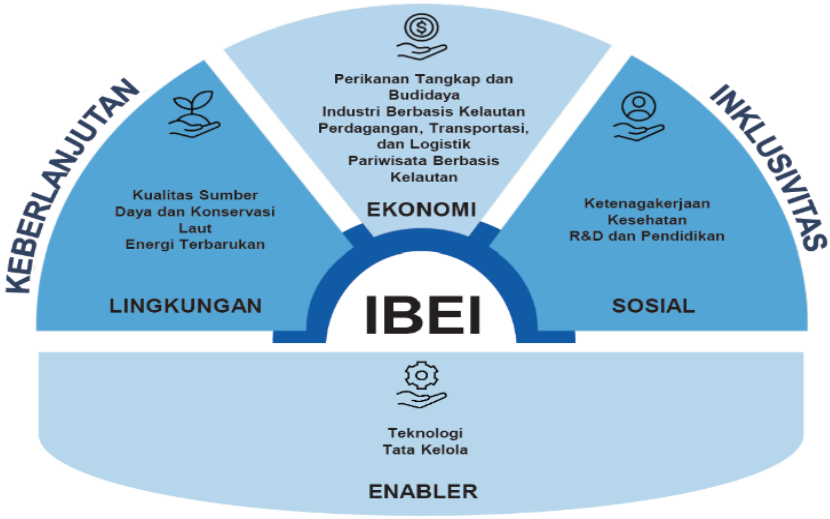
Pembangunan Ekonomi Hijau di Sulawesi Tengah mengacu pada Indeks Ekonomi Hijau sebagai indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan dijadikannya Indeks Ekonomi Hijau Provinsi sebagai salah satu indikator pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sulawesi Tengah diharapkan memiliki peran penting dalam mendukung capaian pemerintah pusat terutama penyediaan dan validasi berbagai data indikator ekonomi hijau, serta memastikan pencapaian target ekonomi hijau daerah.

2) Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Sulawesi Tengah Termasuk Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai 7.010,06 Km dengan jumlah pulau 1.572 buah yang semuanya terhubung oleh laut. Laut Sulawesi Tengah terdiri atas 4 perairan yaitu Selat

Makassar, Teluk Tomini, Teluk Tolo dan Laut Sulawesi, dengan luas lautan sekitar 74.452,37 km^2. Transformasi Ekonomi Indonesia yang termaktub dalam RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPD Sulawesi Tengah 2025-2045 akan memanfaatkan kekuatan maritim dengan menggabungkan pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik. oleh karena itu, sangat penting bagi daerah untuk memiliki perencanaan dan implementasi kebijakan yang sesuai terkait sektor kelautan yang disebut dengan ekonomi biru.

Ekonomi Biru adalah program strategis yang menjadi bagian dari Game Changer untuk mencapai visi Indonesia 2045. Ekonomi biru termasuk dalam strategi kedua yang berfokus pada produktivitas di sektor ekonomi. Produktivitas menyiratkan transformasi ekonomi yang akan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia yang kuat dengan menerapkan manajemen sumber daya laut yang baik untuk mencapai sektor maritim yang berkelanjutan. Ekonomi biru diukur dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI) yang dibangun di atas 3 pilar yang menjadi komponen utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar tersebut adalah **ekonomi, sosial, dan lingkungan** dengan beberapa subsektor dan indikator yang mewakili masing-masing pilar. Selain 3 pilar tersebut, terdapat tambahan dua indikator penting lainnya, yaitu Teknologi dan Tata Kelola yang berfungsi sebagai pemungkin (enabler) yang akan mendukung akselerasi sektor-sektor ekonomi biru



Gambar 2.79
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

Terdapat 5 prinsip dalam pelaksanaan IBEI di Sulawesi Tengah yaitu: pembangunan berkelanjutan, pengelolaan adaptif, pengelolaan berbasis ekosistem, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola kelautan yang baik. Selanjutnya tujuan pelaksanaan IBEI di Sulawesi Tengah yaitu:

1. Instrumen untuk memantau kinerja sektor-sektor ekonomi biru di Sulawesi Tengah sebagai aset untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia 2045.
2. Berfokus pada pengembangan kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Sulawesi Tengah yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi biru.
3. Mendorong koordinasi yang lebih baik di antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam sektor-sektor ekonomi biru, seperti pariwisata, perikanan, dan transportasi.
4. Memberikan masukan mengenai kabupaten mana yang perlu difokuskan untuk mengatasi masalah ketimpangan atau target kebijakan lainnya.

Penerapan ekonomi biru di Sulawesi Tengah baru dilaksanakan secara terpadu di Tahun 2023 dengan pencapaian pilar dan indikator dari sektor prioritas yang melaksanakannya, seperti : perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis kelautan, perdagangan, transportasi dan logistik, pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, konservasi dan jasa ekosistem laut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Bobot dan Nilai Pilar dan Sub-Pilar Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Index	Normalized Weight	Subpilar Index	Normalized Weight	Indikator	Normalized Weight	Value
Index Pilar Ekonomi	32,58%	Index subpilar perikanan tangkap dan budidaya. Value = 21,12	4,94%	Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)(%)	0,33%	**3,72**
				Volume produksi akuakultur(ton)	0,84%	**9,22**
				Volume produksi budidaya tambak(ton)	0,81%	**0,33**
				Volume produksi perikanan(ton)	0,20%	**0,09**
				Volume produksi budidaya rumput laut(ton)	0,91%	**6,73**
				Volume ekspor ikan olahan(ton)	0,88%	**0,01**
				Volume produksi garam(ton)	0,98%	**0,03**

Index	Normalized Weight	Subpilar Index	Normalized Weight	Indikator	Normalized Weight	Value
		Index subpilar industri berbasis kelautan. Value = 33,48	7,68%	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan(unit)	2,71%	**55,32**
				Volume angkutan laut(ton)	0,14%	**3,15**
				Jumlah penumpang angkutan laut(orang)	2,12%	**7,58**
				Jumlah penumpang angkutan laut di 25 pelabuhan strategis(orang)	2,72%	**0,00**
		Index subpilar perdagangan, transport dan logistik. Value = 4,78	6,29%	Volume ekspor perikanan(ton)	2,13%	**0,10**
				Peran ekspor produk perikanan terhadap total ekspor(%)	1,66%	**0,00**
				Volume ekspor perikanan dan akuakultur(ton)	2,50%	**0,08**
		Index subpilar pariwisata berbasis kelautan. Value = 53,44	7,20%	Jumlah wisata bahari(titik)	3,60%	**13,90**
				Jumlah usaha /perusahaan wisata tirta komersial(usaha)	3,60%	**0,10**
		Index subpilar teknologi. Value = 0,1	1,32%	Jumlah kapal perikanan tangkap laut - kapal motor > 30 GT(unit)	1,32%	**0,03**
		Index subpilar tatakelola. Value = 13,92	5,15%	Jumlah pelabuhan perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)(pelabuhan)	5,15%	**11,00**
Index Pilar Lingkungan	36,90%	Index subpilar kualitas sumber daya dan konservasi laut. Value = 51,79	18,45%	Kawasan terumbu karang berkualitas baik(%)	0,69%	**20,76**
				Kawasan lamun berkualitas baik(%)	1,58%	**0,00**
				Kawasan hutan mangrove berkualitas baik(%)	0,06%	**0,00**
				Jumlah desa pesisir dan tempat pembuangan sampah(desa)	3,46%	**16,2**
				Jumlah desa pesisir dengan tempat buang air besar dan saluran air limbah(desa)	3,83%	**90,7**
				Penanaman/rehabilitasi hutan mangrove, rawa, dan lahan gambut(Ha)	1,25%	**0,00**
				Luas kawasan konservasi perairan(Ha)	4,06%	**17,00**

Index	Normalized Weight	Subpilar Index	Normalized Weight	Indikator	Normalized Weight	Value
				Reversed dr Jumlah Sampah dibuang di Laut	2,75%	**0,39**
				Reversed dr Jumlah Sampah dibuang di darat	0,77%	**0,0002**
		Index subpilar energi terbaharukan. Value = 12,64	18,45%	Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)(MW)	4,53%	**0,00**
				Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)(GWh)	4,47%	**0,00**
				Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)(MW)	4,89%	**3,15**
				Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)(GWh)	4,57%	**11,51**
Index Pilar Sosial	30,52%	Index subpilar kesejahteraan. Value = 20,55	5,55%	Jumlah nelayan dan petani ikan(orang)	0,48%	**11,85**
				Jumlah perempuan di sektor perikanan(orang)	0,48%	**11,85**
				Reverse dari jumlah peserta PKH (%)	4,59%	**0,06**
		Index subpilar pendidikan. Value 14,47	4,19%	Jumlah lulusan sekolah perikanan(orang)	0,62%	**0,00**
				Jumlah peserta pelatihan perikanan(orang)	0,72%	**3,33**
				Jumlah SMK kemaritiman - 2023 (unit)	0,94%	**6,00**
				Proporsi jenjang pendidikan terakhir SMA (%)	0,89%	**0,03**
				Proporsi ijazah terakhir SMA (%)	0,89%	**0,03**
				Reverse dari jumlah peserta PIP	0,13%	**0,00**
		Index subpilar kesehatan. Value = 70,87	20,78%	Rata-rata konsumsi ikan per kapita(kkal)	7,18%	**7,30**
				Rata-rata konsumsi protein per kapita(kkal)	7,03%	**13,51**
				Memiliki jaminan kesehatan (%)	6,23%	**0,04**
				Reversed dari jumlah penduduk miskin (%)	0,34%	**0,92**

Sumber: Background Paper IBEI, 2023 (Bappenas, 2023)

Nilai rata-rata IBEI di tingkat nasional pada Tahun 2023 adalah 43,98. Rentang indeks terstandarisasi antara 1 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi berarti nilai yang lebih baik. Berdasarkan pilar, nilai rata-rata pilar sosial adalah 53,21, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pilar lingkungan sebesar 28,94 dan pilar ekonomi sebesar 20,15. Adapun Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memiliki nilai rata-rata IBEI sebesar 50,16 dan Tahun 2023 sebesar 59,87 dan menempati peringkat ke-9 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Tabel 2.60
Peringkat dan Nilai IBEI berdasarkan Provinsi 2022 - 2023

Peringkat 2023	Provinsi	IBEI 2022	IBEI 2023	Peringkat 2023	Provinsi	IBEI 2022	IBEI 2023
1	Sulawesi Selatan	78,59	80,86	18	Kalimantan Timur	33,46	37,33
2	Jawa Timur	73,52	71,63	19	Riau	27,09	32,87
3	Nusa Tenggara Timur	69,81	68,5	20	Bengkulu	34,79	31,47
4	Sulawesi Utara	42,73	67,98	21	Kep. Bangka Belitung	29,17	31,27
5	Maluku	72,59	67,22	22	Sulawesi Barat	33,77	31,23
6	Jawa Tengah	58,84	65,3	23	Kalimantan Utara	34,19	30,66
7	Nusa Tenggara Barat	46,63	61,83	24	Bali	33,84	30,28
8	Sulawesi Tenggara	60,19	60,57	25	Sumatera Barat	26,29	29,73
9	**Sulawesi Tengah**	**50,16**	**59,87**	26	Papua	34,27	29,68
10	Sumatera Utara	50,12	58,77	27	Banten	30,90	29,05
11	Papua Barat	50,47	57,85	28	Kalimantan Selatan	26,64	28,97
12	Aceh	46,50	55,01	29	Kalimantan Tengah	24,79	27,75
13	Jawa Barat	49,44	54,65	30	Lampung	33,97	27,65
14	Maluku Utara	50,40	54,57	31	DKI Jakarta	27,59	26,90
15	Gorontalo	44,85	47,55	32	Sumatera Selatan	17,44	23,83
16	Kepulauan Riau	42,52	45,49	33	Jambi	15,35	18,01
17	Kalimantan Barat	41,94	39,54	34	DI Yogyakarta	10,67	11,47

Sumber: Background Paper IBEI, 2023 (Bappenas, 2023)

Untuk indeks berdasarkan pilar Tahun 2023, peringkat IBEI Provinsi Sulawesi Tengah, disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.61
Peringkat IBEI Provinsi Berdasarkan Pilar Tahun 2023

Peringkat	Provinsi	Ekonomi	Lingkungan	Sosial	IBEI	Peringkat	Provinsi	Ekonomi	Lingkungan	Sosial	IBEI
1	Sulawesi Selatan	52,00	50,20	85,50	80,86	18	Kalimantan Timur	11,90	18,80	57,70	37,33
2	Jawa Timur	74,30	39,40	51,80	71,63	19	Riau	10,70	15,40	52,00	32,87
3	Nusa Tenggara Timur	36,60	70,10	47,10	68,50	20	Bengkulu	8,50	23,10	41,40	31,47
4	Sulawesi Utara	23,00	61,10	71,10	67,98	21	Kep. Bangka Belitung	9,70	10,00	55,70	31,27
5	Maluku	31,60	52,00	71,00	67,22	22	Sulawesi Barat	5,90	10,50	58,90	31,23
6	Jawa Tengah	52,70	48,00	46,70	65,30	23	Kalimantan Utara	8,50	6,30	59,80	30,66
7	Nusa Tenggara Barat	22,90	67,00	48,80	61,83	24	Bali	28,30	13,20	29,30	30,28
8	Sulawesi Tenggara	28,10	40,30	72,40	60,57	25	Sumatera Barat	8,10	16,40	45,80	29,73
9	**Sulawesi Tengah**	**30,20**	**49,90**	**56,80**	**59,87**	26	Papua	11,50	21,80	35,40	29,68
10	Sumatera Utara	24,00	47,00	64,20	58,77	27	Banten	17,20	6,60	46,10	29,05
11	Papua Barat	9,60	58,20	63,70	57,85	28	Kalimantan Selatan	9,90	9,50	50,30	28,97
12	Aceh	32,70	27,70	68,80	55,01	29	Kalimantan Tengah	4,10	10,80	51,80	27,75
13	Jawa Barat	38,40	39,20	47,90	54,65	30	Lampung	11,20	16,20	37,50	27,65
14	Maluku Utara	11,80	39,00	76,30	54,57	31	DKI Jakarta	16,60	2,00	47,00	26,90
15	Gorontalo	8,20	47,60	52,30	47,55	32	Sumatera Selatan	2,40	9,40	45,60	23,83
16	Kepulauan Riau	25,20	26,20	55,00	45,49	33	Jambi	0,90	1,50	42,20	18,01
17	Kalimantan Barat	12,40	27,70	52,00	39,54	34	DI Yogyakarta	6,10	2,00	19,70	11,47

Sumber: Background Paper IBEI, 2023 (Bappenas, 2024)

3) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional dan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, serta RUPTL 2018-2027, data potensi energi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Potensi Energi di Provinsi Sulawesi Tengah

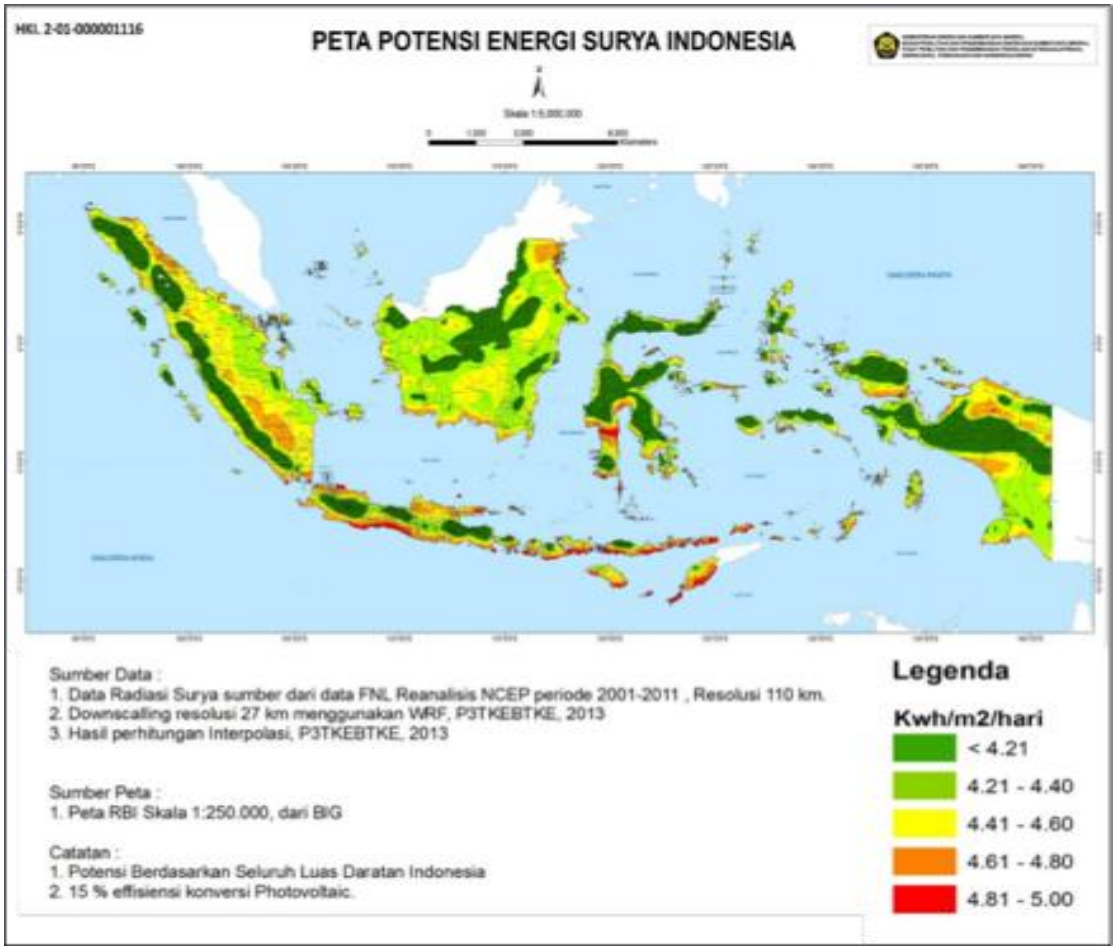
No	Jenis Energi	Satuan	Potensi
1	Surya	MW	6.187
2	Bayu	MW	908
3	Biomassa	MW	326,9
4	Tenaga Air	MW	3.095
5	Panas Bumi	MW	368
6	Batubara	Juta Ton	2
7	Gas Bumi	BCF	2.030

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2025.

Data potensi panas bumi terkini yang diperolah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah diketahui sumber daya spekulatif 405 MW, sumber daya hipotetik 67 MW, dan Cadangan terduga 289 MW.

Potensi bioenergi dapat dikembangkan dengan memanfaatkan limbah dari potensi tanaman perkebunan dan hewan ternak. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beraneka ragam potensi bionergi seperti padi, jagung, kayu, kelapa sawit dan kelapa dalam. Sedangkan dari hewan ternak terdiri dari kerbau, sapi, kuda dan babi. Pengembangan bioenergi ini dilakukan dengan memanfaatkan limbah dari tanaman perkebunan dan hewan ternak. Pengembangan potensi bioenergi juga dapat memanfaatkan sampah kota.

Adapun potensi energi surya di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: P3TEBTKE Kementerian ESDM.

Gambar 2.80
Potensi Energi Surya di Sulawesi Tengah

Selanjutnya potensi energi angin di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: P3TEBTKE Kementerian ESDM

Gambar 2.81
Potensi Energi Angindi Provinsi Sulawesi Tengah

Lebuh lanjut, potensi Tenaga Air di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Potensi Tenaga Air Sulawesi Tengah

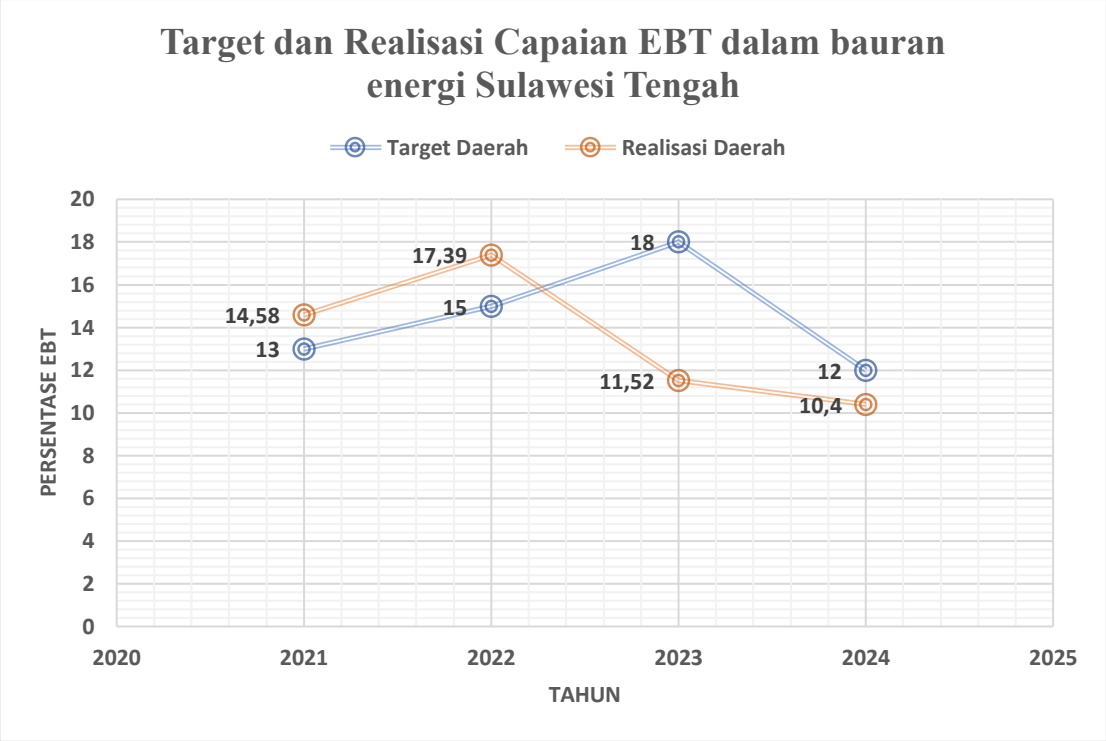
No	Proyek	Tipe	Jenis	Kapasitas (MW)	Status
1	Bambalo 2	ROR	PLTM	1,8	Potensi
2	Dako	ROR	PLTM	1,4	Potensi
3	Sampaya	ROR	PLTM	1,2	Potensi
4	Lobu	ROR	PLTM	5	Potensi
5	Banasu	ROR	PLTM	9	Potensi
6	Batunobota	ROR	PLTM	5	Potensi
7	Kilo	ROR	PLTM	10	Potensi
8	Paddumpu	ROR	PLTM	5	Potensi
9	Yaentu	ROR	PLTM	10	Potensi
10	Ponju	ROR	PLTM	3	Potensi
11	Bengkoli	ROR	PLTM	2,5	Potensi
12	Bongkasoa	ROR	PLTM	1,4	Potensi
13	Pono	ROR	PLTM	6	Potensi
14	Koro Yaentu	ROR	PLTM	17	Potensi
15	Sajo Karangana	RES	PLTA	103	Potensi
16	Sajo Pebatua	RES	PLTA	426	Potensi
17	Lariang-7	RES	PLTA	257,6	Potensi

No	Proyek	Tipe	Jenis	Kapasitas (MW)	Status
18	Kulawi	ROR	PLTA	150	Potensi
19	La'a	ROR	PLTA	160	Potensi
20	Lalindu	ROR	PLTA	50	Potensi
21	Palu 3	RES	PLTA	75	Potensi
22	SR-1 (Bada)	RES	PLTA	420	Potensi
23	SR-2 (Bada)	RES	PLTA	720	Potensi
24	Tinauka	RES	PLTA	300	Potensi
25	Lariang-4	ROR	PLTA	200	Potensi
26	Gumbasa	ROR	PLTA	156	Potensi
Total Potensi air				**3.095,9**	

Sumber: RUPTL 2018-2027 PLN

Bauran Energi Dearah Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh minyak bumi, dimana hasil pemodelan LEAP Tahun dasar 2015, minyak bumi senilai 15,62%, batubara sebesar 34,7%, EBT sebesar 15,62% dan gas hanya 9,96%. Pada Tahun 2017 bauran energi batubara 66,5%, EBT 17,97%, minyak bumi 12,08%, dan gas 3,45%. Meningkatnya batubara karena adanya pembangunan PLTU Batubara di Kawasan Industri Morowali yang mencapai 1.880 MW. Porsi EBT meningkat karena adanya pembangunan PLTA. Porsi minyak bumi turun karena ada pengurangan PLTD. Namun, pada Tahun 2024, porsi EBT dalam bauran Energi Daerah adalah 10,40% sedangkan minyak bumi menurun hingga 4,29% sedangkan batubara mendominasi sebesar 85,31%. Peningkatan konsumsi batubara ini karena meningkatnya pemakaian untuk mesin pembangkit listrik tenaga uap oleh industri smelter di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, sedangkan porsi EBT dalam bauran energi mengalami penurunan.

Pemanfaatan energi baru terbarukan Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari energi air dan matahari. Total pemanfaatan EBT sampai pada Tahun 2024 adalah sebesar 1.036.920,83 *tonne of oil equivalent* (TOE), sedangkan total pemanfaatan energi adalah sebesar 9.967.459,32 TOE sehingga persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi Sulawesi Tengah adalah sebesar 10,40%.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

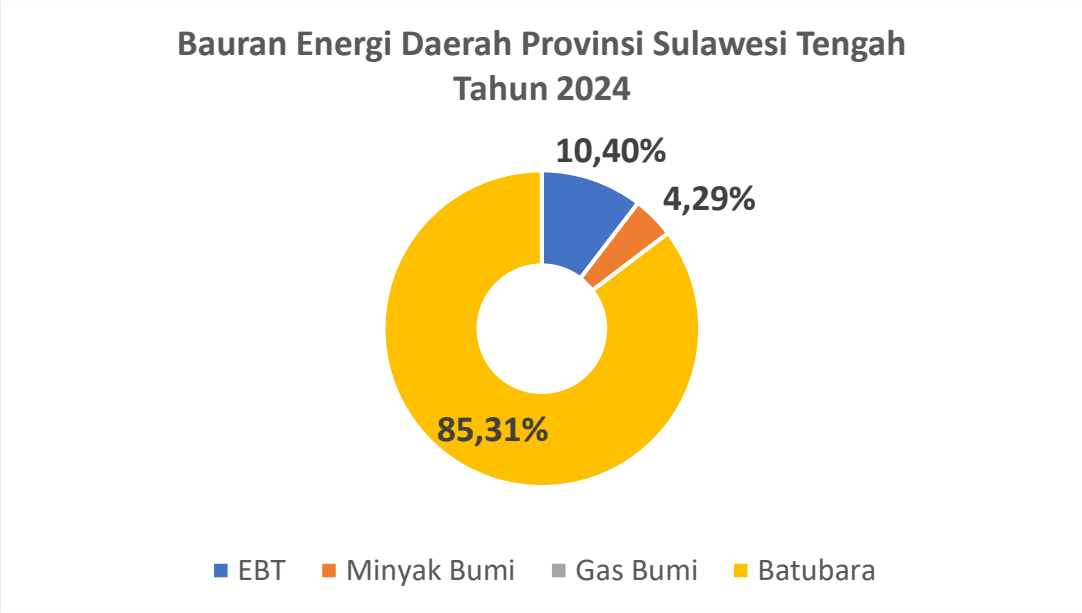
Gambar 2.82
Persentase Target dan Realisasi Capaian EBT dalam Bauran Energi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

Adapun untuk Porsi EBT dalam Bauran Energi hingga Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.64
Bauran Energi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

BAURAN ENERGI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023					
NO		BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	7.406.577,34	1.036.920,83	1,04	10,40%
2	Minyak Bumi	3.050.870,30	427.121,84	0,43	4,29%
3	Gas Bumi	594,38	83,21	0,00008	0,00%
4	Batubara	60.738.095,97	8.503.333,44	8,50	85,31%
Total		71.196.137,99	9.967.459,32	9,97	100,00%

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2025



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Gambar 2.83
Bauran Energi Provinsi Sulawesi Tahun 2024

Nilai dari indikator ini didapatkan dengan membandingkan produksi EBT dengan total produksi energi. Dari target yang ditentukan sebelumnya yaitu 12%, realisasi dari porsi EBT hanya dapat mencapai 10.40%.

Persentase penggunaan EBT di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat rendah dikarenakan oleh nilai investasinya yang masih relative tinggi sehingga belum kompetitif dengan energi fosil. Meskipun demikian, penggunaan EBT memiliki banyak keuntungan, di antaranya yaitu biaya operasional dan pemeliharaan yang sangat rendah. Di samping itu, EBT tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim.

4) Indeks Yurisdiksi Berkelanjutan

Yurisdiksi berkelanjutan adalah suatu pendekatan tata kelola wilayah administratif (seperti kabupaten, Provinsi , atau negara) yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial secara seimbang dan berkelanjutan, dalam satu sistem tata kelola yang kolaboratif dan terukur.

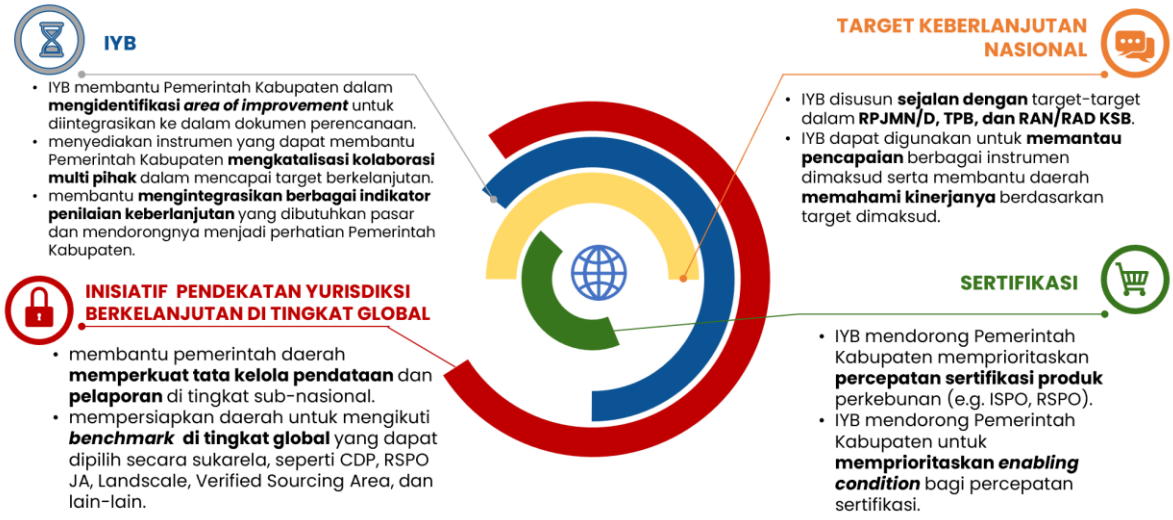
Yurisdiksi mengacu pada wilayah administratif yang memiliki kewenangan hukum dan pemerintahan, seperti kabupaten, kota, atau Provinsi . Pemerintah di wilayah ini memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, regulasi, dan pengawasan atas pembangunan di wilayah tersebut.

Berkelanjutan (*Sustainability*) mengandung arti pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Ini mencakup:

- Ekonomi: produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- Sosial: keadilan sosial, hak masyarakat adat, dan kesejahteraan warga.
- Lingkungan: perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, dan pengendalian perubahan iklim.

Tujuan Yurisdiksi Berkelanjutan:

- Mewujudkan pembangunan rendah emisi dan inklusif.
- Melindungi hutan dan ekosistem penting lainnya.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk petani kecil dan masyarakat adat.
- Menarik investasi berkelanjutan dari sektor swasta.



Gambar 2.84
Keterkaitan Indeks Yuridis Berkelanjutan
Dengan Instrumen Keberlanjutan Lainnya

Manfaat Yurisdiksi Berkelanjutan Bagi Pemerintah Daerah

- Mengukur dan mencapai keberlanjutan serta inklusifitas dalam pembangunan pertanian secara bertahap
- Berkontribusi untuk mencapai pembangunan daerah, terutama untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- Meningkatkan kontribusi PDRB sektor-sektor pembangunan hijau
- Membangun dan menyediakan portofolio daerah terkait investasi hijau

- Membantu memantau perkembangan daerah dalam siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan
- Mempermudah bagi pakai dan akses data komoditas perkebunan dan kinerja daerah
- Menjadi rujukan pemberian insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif Bagi Masyarakat
- Mendukung petani kecil dalam mengakses dan memperluas pasar bagi komoditas yang berkelanjutan
- Membantu menciptakan peluang sukses yang setara dan adil bagi seluruh produsen, perusahaan dan petani kecil
- Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi
- Membantu meningkatkan keberterimaan produk-produk pertanian Indonesia di pasar global dan memastikan bahwa produsen komoditas, masyarakat sipil, negara pembeli, investor, dan perusahaan pembeli komoditas terinformasikan dengan baik
- Mendukung sektor swasta dalam pemenuhan komitmen keberlanjutan

D. Transformasi Digital

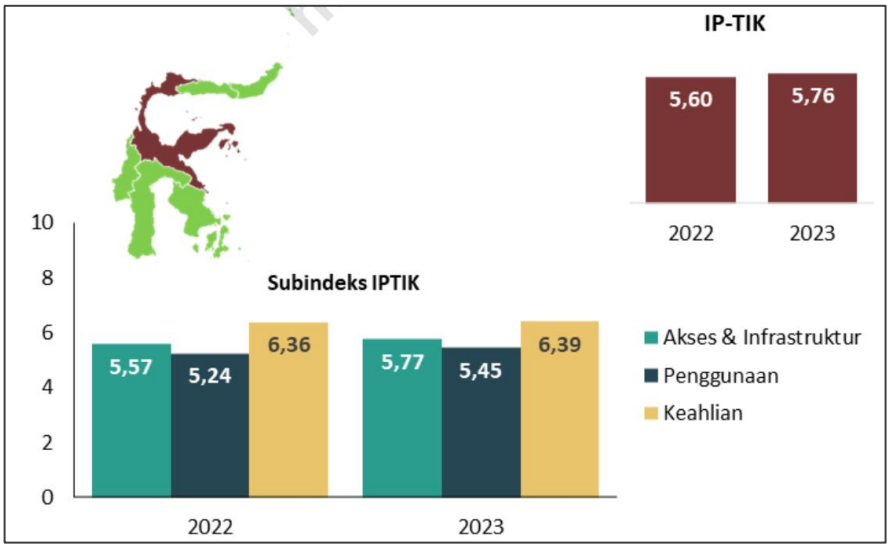
1) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Adanya kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

Peranan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bermanfaat untuk mempercepat dalam mencapai Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Manfaat konektivitas terhadap TIK dan internet sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman. Keberhasilan transformasi pembangunan digital, teknologi informasi dan komunikasi tentu tidak hanya diukur dari kecepatan adopsi teknologi yang mendukung kemampuan memastikan inklusifitas dan dampak konkretnya pada ekonomi lokal.

Untuk melihat posisi pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di masing-masing wilayah, nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi: kategori tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50). Selanjutnya nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat di lihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS 2024, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023

Gambar 2.85
Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2023

Pada gambar di atas memperlihatkan bahwa selama dua Tahun terakhir, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yakni dari 5,60 pada Tahun 2022 menjadi 5,76 pada Tahun 2023 dengan kategori sedang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pembentukan tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Berdasarkan SK Gubernur No. 500.2.1/589/DKIPS-

G.ST/2024 tentang pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) langkah ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mewujudkan Tanggap Insiden Siber melalui bidang persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pembentukkan TTIS di perluas hingga Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2024 telah terbentuk TTIS di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya pada Tahun 2025 telah resmi dikukuhkan TTIS di 10 Kabupaten/Kota lainnya.

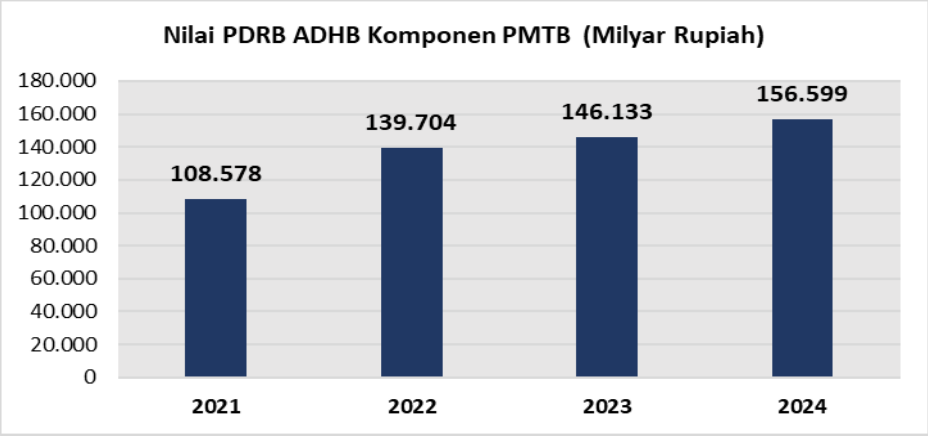
E. Integritas Ekonomi Domestik Dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu wilayah karena merupakan indikator investasi dalam bentuk aset tetap dan merupakan salah satu pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Pembentukan modal atau investasi memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian. Selain mampu meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, investasi juga akan menciptakan kesempatan kerja serta perluasan pasar. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan. Olehnya itu dapat dinyatakan bahwa investasi adalah motor suatu perekonomian yang akan menggerakkan sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja.

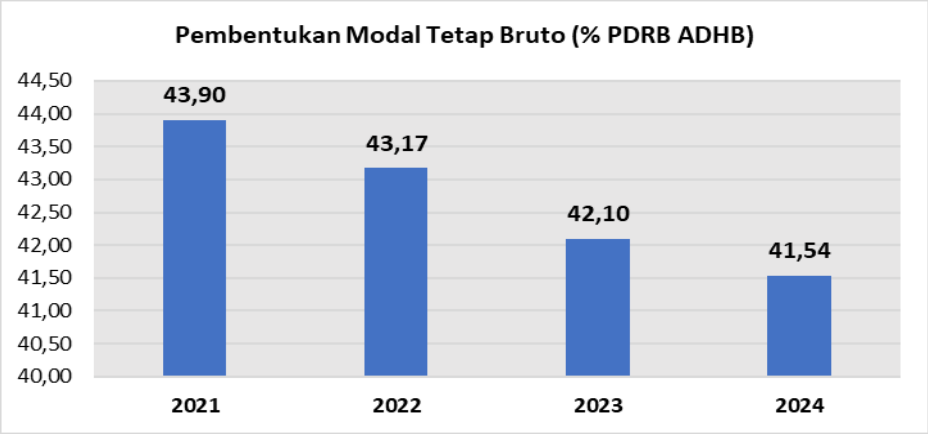
Perkembangan nilai PDRB Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni dari Rp.108.578 Milyar.



Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.86
Nilai PDRB ADHB Komponen PMTB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

Selanjutnya Proporsi komponen PMTB terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami penurunan, yakni dari 43,90 persen pada Tahun 2021 menjadi 41,54 persen pada Tahun 2024.



Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.87
Proporsi Komponen PMTB Terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah (%) Tahun 2021-2024

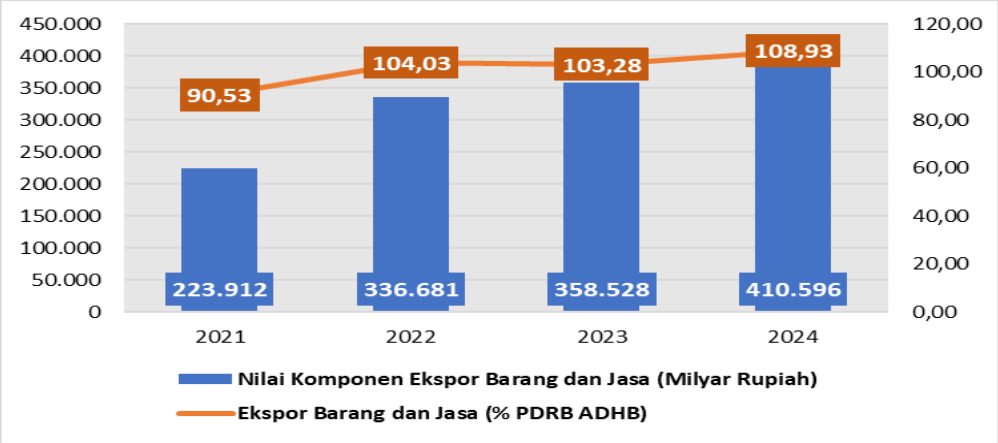
2) Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memainkan peran penting dalam perekonomian daerah dengan meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Nilai tambah Komponen Ekspor Barang dan Jasa di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni dari Rp.223.912 Milyar pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp.410.596 Milyar pada Tahun 2024. Sementara Proporsinya terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami

peningkatan yaitu dari 90,53 persen pada Tahun 2021 menjadi 108,93 persen pada Tahun 2024.

Nikel merupakan salah satu komoditas unggulan dan penyumbang utama ekspor di Provinsi Sulawesi Tengah. Komoditi ekspor lainnya meliputi besi dan baja, rempah-rempah (seperti lada putih, pala biji, dan bunga pala), kakao, kelapa dan produk turunannya, serta beberapa komoditas pertanian lainnya seperti durian, nangka, anggur, dan manggis.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.88
Nilai dan Proporsi Komponen Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

F. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah merupakan alat ukur yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur di suatu wilayah atau daerah. Infrastruktur yang dimaksud mencakup sektor jaringan transportasi, air bersih/air minum, sanitasi, hunian layak, listrik, sumber daya air (irigasi dan air baku), hingga infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi dasar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengukuran indeks ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana suatu daerah mampu menyediakan fasilitas pendukung yang memadai bagi warganya dan sektor usaha. Daerah dengan indeks infrastruktur yang tinggi menunjukkan kesiapan yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta menarik investasi.

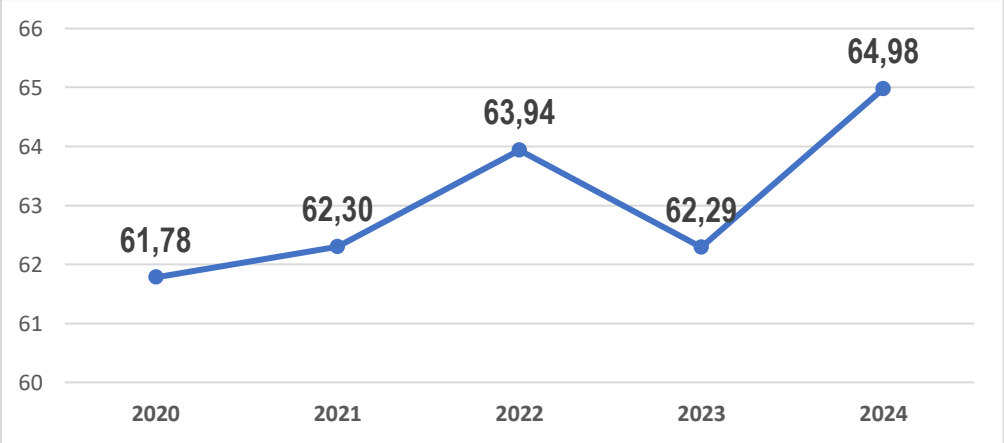
Namun, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan rendahnya indeks infrastruktur, yang berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan menurunnya daya saing daerah tersebut. Oleh karena itu, indeks ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam merancang kebijakan pembangunan infrastruktur secara terfokus dan prioritas. Dengan meningkatkan indeks infrastruktur daerah secara berkelanjutan, pemerintah dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Capaian Indeks Infrastruktur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 34,15 persen. Capaian ini diperoleh melalui beberapa capaian indikator kinerja pada beberapa sektor antara lain indikator persentase kemantapan jalan, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, persentase konektivitas simpul transportasi Provinsi , rasio elektrifikasi, indeks kinerja sistim irigasi, dan persentase kapasitas air baku.

- **Infrastruktur Jalan**

Pembangunan bidang infrastruktur jalan khususnya kewenangan Provinsi berdasarkan data kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan sampai Tahun 2022, namun terjadi penurunan kondisi kemantapan jalan pada Tahun 2023 akibat perubahan total Panjang jalan kewenangan Provinsi . Pada Tahun 2023 terjadi perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang Fungsi dan Status jalan dari Nomor: 620/299/DIS.BMPR-G.ST/2017 dengan total panjang kewenangan Provinsi : 1.643,74 Km menjadi Surat Keputusan Gubernur Nomor: 600.1.7/735/DBMPR-G.ST/2023 dengan total panjang kewenangan Provinsi : 1,684,33 Km dimana jumlah dan total panjang jalan bertambah 40,59 Km dengan 9 ruas sehingga menjadi 89 ruas pada

Tahun 2023 yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah dan tersebar di 13 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal itu maka perkembangan kondisi jalan mantap Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuatif, yaitu pada Tahun 2020 sebesar 61,78 persen meningkat menjadi 62,30 persen pada Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 63,94 persen, selanjutnya pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 62,29 persen, dan pada Tahun 2024 kondisi jalan mantap Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 64,98 persen, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.89
Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Capaian indikator persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Capaian ini dihitung berdasarkan kemantapan seluruh ruas-ruas jalan Provinsi di Sulawesi Tengah, yaitu persentase seluruh ruas-ruas jalan Provinsi di Sulawesi Tengah.

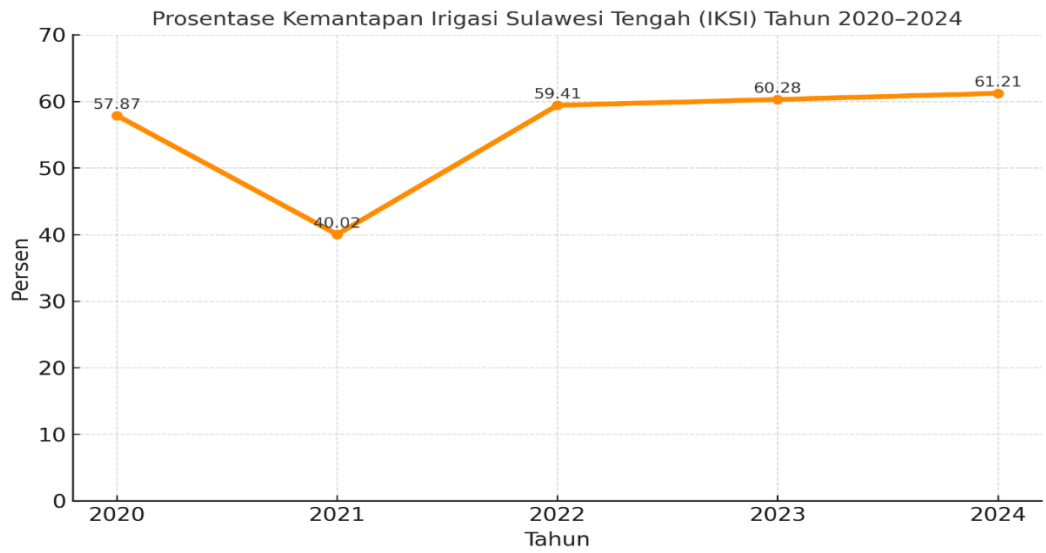
- **Kondisi Kemantapan Irigasi**

Pembangunan infrastruktur bidang irigasi yang selama ini telah dilaksanakan tidak akan dapat bertahan lama, tanpa didukung kegiatan

pemeliharaan yang berkesinambungan. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestarianya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Secara umum pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi (Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2015).

Pemeliharaan jaringan irigasi telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan Irigasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para petani dan masyarakat yang membutuhkan air, melalui jaringan irigasi dan bangunan air yang telah ada, agar tercipta kesetimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air yang dibutuhkan untuk mencukupi semua keperluan masyarakat terutama petani.

Selanjutnya, perkembangan kondisi kinerja pemeliharaan irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari kondisi kemantapan irigasi selamat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut.



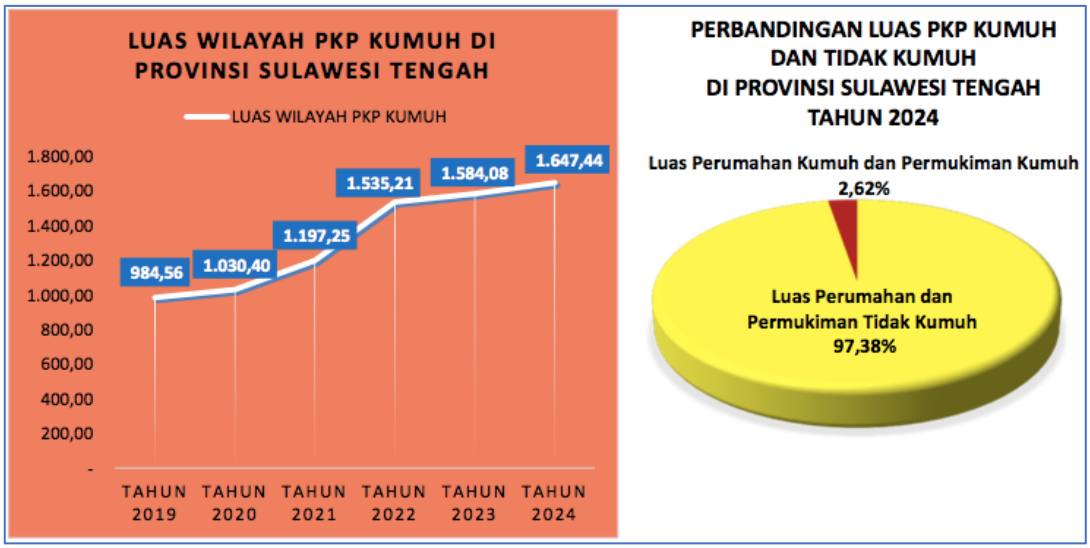
Sumber : Dinas CIKASDA, 2024 (data diolah kembali).

Gambar 2.90
Kondisi Kemantapan Irigasi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024 (Persen)

Capaian Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika pengelolaan jaringan irigasi yang masih menghadapi tantangan struktural, namun mengarah pada tren perbaikan yang positif. Nilai IKSI sempat menurun pada Tahun 2021, namun meningkat secara bertahap Tahun 2024 mencapai 61,21% (kinerja kurang, perlu perhatian), mengindikasikan adanya proses konsolidasi fungsi irigasi. Fluktuasi tersebut mencerminkan pengaruh dari enam komponen utama IKSI, yaitu: kondisi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi dan personalia, dokumentasi teknis, serta kondisi kelembagaan. Di antara komponen tersebut, faktor antropogenik-kelembagaan turut menjadi kendala signifikan, seperti masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani pemakai air, keterbatasan dokumentasi teknis, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan. Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan perlu difokuskan pada modernisasi infrastruktur, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem irigasi yang tangguh, adaptif dan berkelanjutan.

2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Luas wilayah permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan dalam 6 Tahun terakhir. Tahun 2019, luas permukiman sebesar 51.286 Ha kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 mencapai 72.492 Ha atau 1,18% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, pada Tahun 2024 luas wilayah permukiman mengalami penurunan kembali menjadi 62.835 Ha atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun wilayah permukiman terluas berada di Kabupaten Parigi Moutong yang mencapai 38,12% dari keseluruhan luas permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Laut merupakan kabupaten dengan luas wilayah permukiman terkecil yakni seluas 479 Ha atau sekitar 0,76% dari luas permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah.

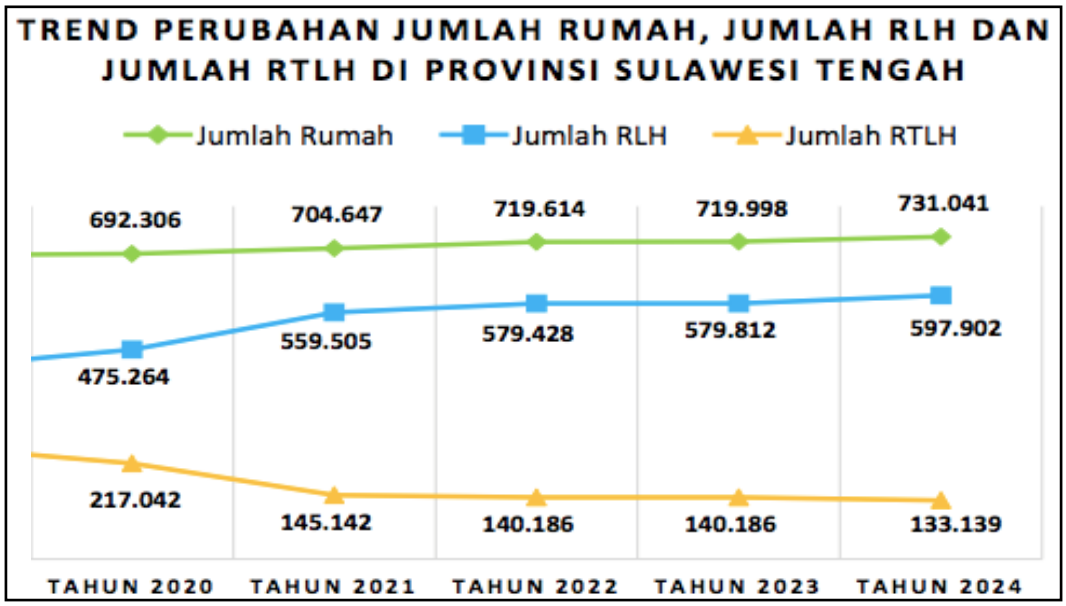


Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Gambar 2.91
Grafik Pertumbuhan Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah serta Diagram Presentase Permukiman Kumuh terhadap Luas Permukiman Tidak Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Database perumahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan data sektoral yang terdiri atas jumlah rumah, rumah layak huni, rumah tidak layak huni, dan kebutuhan rumah (*backlog*). Data-data tersebut mengalami perubahan dari Tahun ke Tahun baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Kecenderungan (tren) perubahan data dalam 5 Tahun terakhir dari variable-variabel pendataan memiliki karakteristik

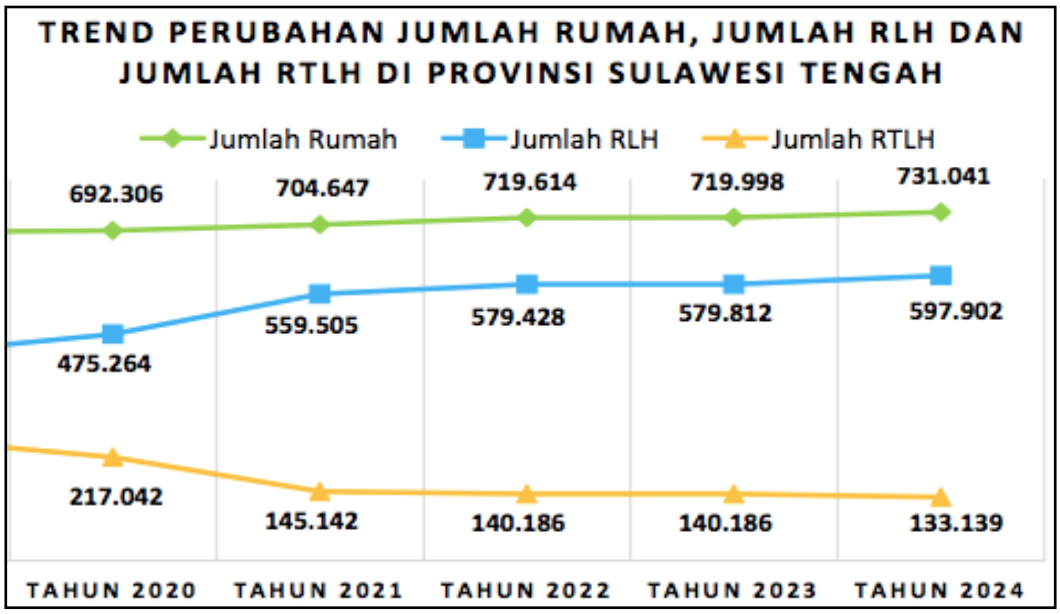
yang berbeda-beda. Beberapa grafik di bawah ini menyajikan perubahan data dari setiap variable dari Tahun 2020-2024.



Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Gambar 2.92
Trend Perubahan Jumlah KK, Jumlah Rumah dan *Backlog* di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

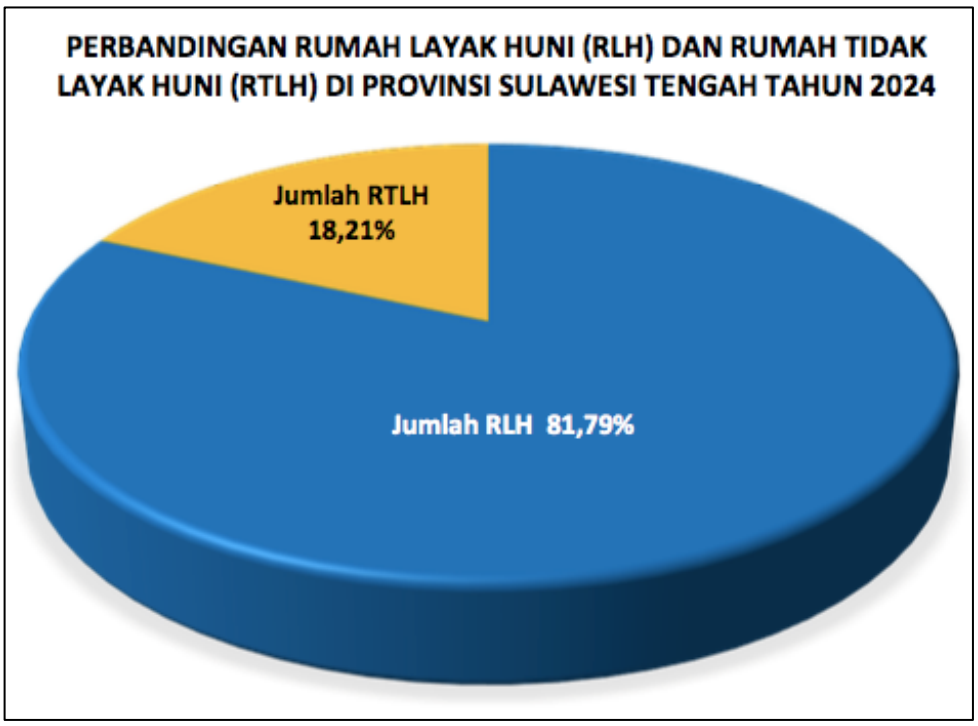
Secara ideal, 1 kepala keluarga seharusnya menempati 1 unit rumah. Namun pada kenyataannya pada Tahun 2024, Sulawesi Tengah baru memiliki 69,01% kepala keluarga yang telah memiliki rumah atau sejumlah 731.041 KK sehingga masih terdapat sekitar 30,99% kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Hal ini mengakibatkan kebutuhan rumah yang masih harus dipenuhi sejumlah 328.219 unit. Kebutuhan rumah ini meningkat dari Tahun yang sebelumnya hanya berjumlah 310.752 unit karena peningkatan jumlah kepala keluarga.



Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Gambar 2.93
Trend Perubahan Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Dari jumlah rumah yang dimiliki oleh kepala keluarga, sekitar 81,79% atau 597.902 unit merupakan rumah layak huni yang telah memenuhi persyaratan kecukupan luas, kenyamanan ruang (penghawaan dan pencahayaan yang baik), keselamatan bangunan (kelayakan struktur dan material bangunan) dan PSU dasar hunian. Sedangkan sekitar 18,21% atau 133.139 unit rumah yang ada masih merupakan rumah tidak layak huni yang membutuhkan peningkatan kualitas agar menjadi layak huni. Berbagai bantuan peningkatan kualitas rumah dari berbagai sumber pendanaan dan skema pengelolaan telah diberikan oleh pemerintah sehingga Tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yang berjumlah 140.186 unit.

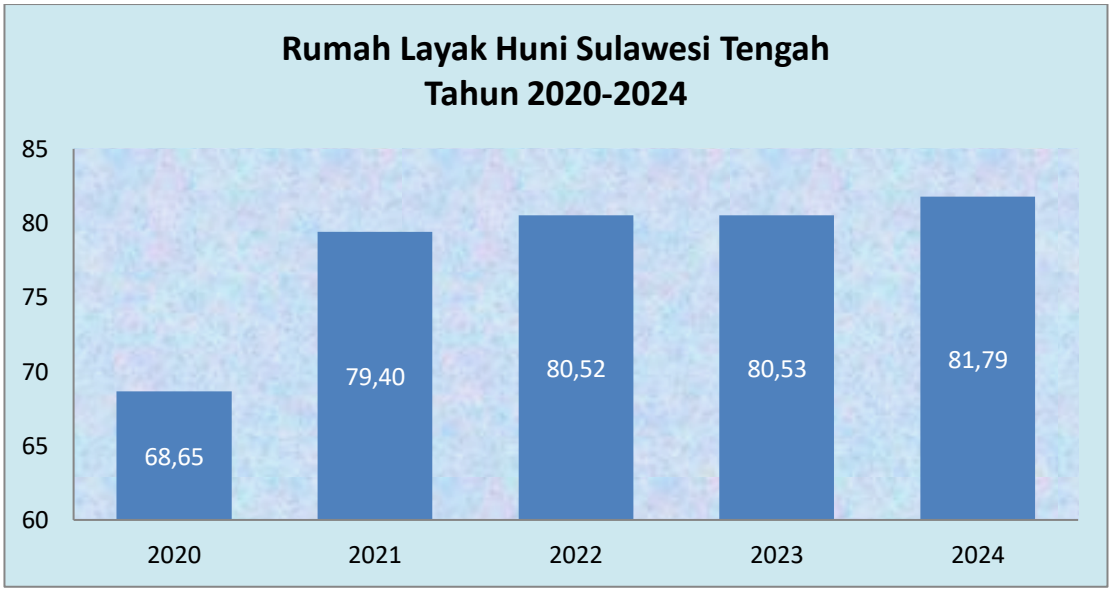


Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Gambar 2.94
Diagram Perbandingan Rumah Layak Huni (RLH) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

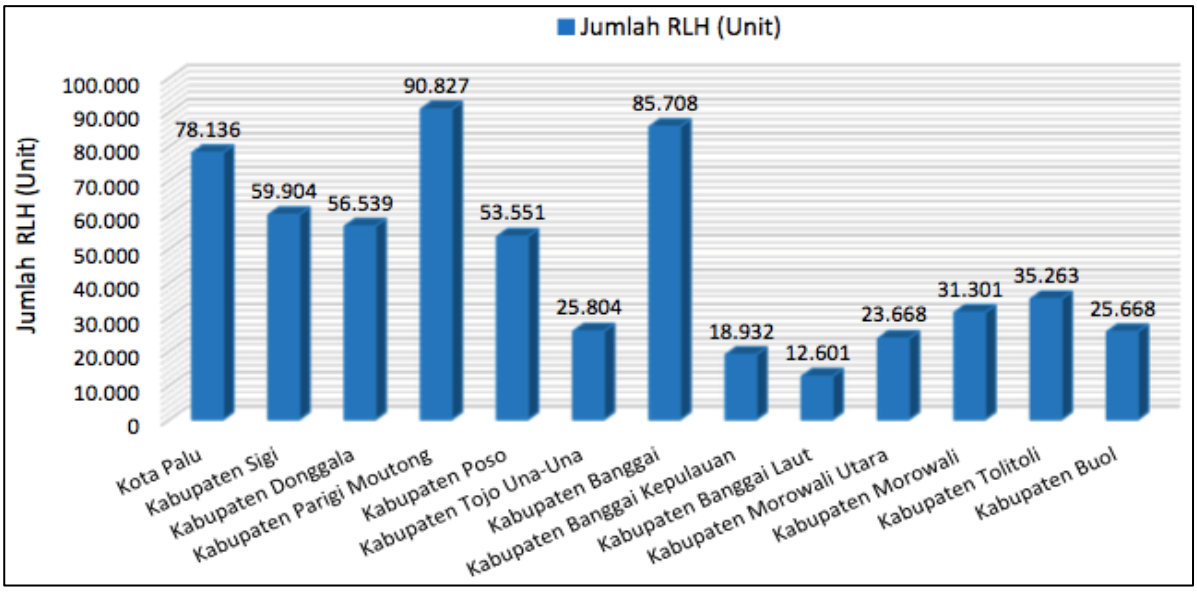
Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks pemukiman kumuh dalam kerangka kerja monitoring SDGs, menggunakan lima kriteria yaitu (1) Ketahanan bangunan; (2) Kecukupan luas tempat tinggal; (3) Akses air minum layak; (4) Akses sanitasi layak; dan (5) Keamanan bermukim.

Pertumbuhan rumah layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah dalam 6 (enam) Tahun terakhir mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah pusat, Provinsi , dan kabupaten dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan jumlah rumah layak huni yang cukup signifikan pada Tahun 2021 mencapai 79,40% dan mulai meningkat secara perlahan hingga mencapai 81,79% pada Tahun 2024. Peningkatan jumlah rumah layak huni tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata 3,78% setiap tahunnya.



Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.95
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Gambar 2.96
Diagram Sebaran Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sebaran jumlah rumah layak huni pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di atas. Diagram tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah rumah terbesar memiliki rumah layak huni tertinggi mencapai 90.827 unit. Selanjutnya di urutan kedua dan ketiga terdapat Kabupaten Banggai

85.708 unit dan Kota Palu 78.136 unit. Kabupaten Banggai laut yang memiliki jumlah rumah terkecil juga memiliki rumah layak huni paling rendah sekitar 12.601 unit.

Pada Tahun 2025 terjadi perubahan formulasi rumah layak huni yang berimplikasi terhadap capaian Tahun 2025 yaitu indikator Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dimana berkelanjutan dengan adanya penambahan pembentuk RLH yang memiliki IMB/PBG (Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah baru akan melakukan pemetaan terkait penambahan pembentuk di atas pada Tahun 2026.

Provinsi Sulawesi Tengah mengelola urusan pertanahan pada lingkup lintas kabupaten/kota dan fungsi koordinasi. Beberapa kewenangan utamanya:

1. Koordinasi & Sinkronisasi
    - Mengkoordinasikan kebijakan pertanahan di seluruh kabupaten/kota se-Sulteng.
    - Menjadi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Provinsi , diketuai oleh Gubernur.
2. Pengaturan & Pengawasan
    - Memberikan rekomendasi dan fasilitasi atas peruntukan tanah skala Provinsi (misalnya: kawasan transmigrasi, kawasan strategis Provinsi , dan lintas kabupaten).
    - Mengawasi pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikasi yang dijalankan oleh Kantor Wilayah BPN di Sulteng.
3. Penanganan Sengketa/Lintas Kabupaten
    - Menangani dan memfasilitasi sengketa pertanahan yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.
    - Membantu mediasi konflik tanah adat, tanah ulayat, dan tanah perkebunan/perusahaan skala Provinsi .
4. Perencanaan Tata Ruang & Pertanahan
    - Menyusun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi acuan penataan penggunaan tanah lintas kabupaten.
    - Memberi masukan dalam penyusunan RDTR kabupaten/kota agar

sinkron dengan kebijakan Provinsi dan nasional.

Tabel 2.65
Penetapan RDTR di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Kab/Kota	RDTR
1.	Kota Palu	Perwali No. 1 Tahun 2023 tentang RDTR Perkotaan Palu (Proses Peninjauan Kembali)
2.	Kab. Sigi	Perbup No. 7 Tahun 2023 tentang RDTR Perkotaan Bora
		Perbup No. 10 Tahun 2024 tentang RDTR WP Kulawi
		Perbup No. 11 Tahun 2024 tentang RDTR WP Kulawi Selatan
3.	Kab. Donggala	Perbup No. 21 Tahun 2021 tentang RDTR Perkotaan Banawa
		Perbup No. 5 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Sirenja
		Perbup No. 9 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Rio Pakava
4.	Kab. Banggai	Perbup No. 107 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Luwuk
		Perbup No. 2 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kintom Batui
5.	Kab. Banggai Kepulauan	Perbup No. 1 tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Salakan
6.	Kab. Morowali	Perbup No. 13 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Kolono
		Perbup No. 18 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bungku
7.	Kab. Banggai Laut	Perbup No. 30 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kec. Banggai
		Perbup No. 8a Tahun 2021 RDTR Kawasan Perkotaan Kec. Banggai Utara, Banggai Tengah, Banggai Selatan
8.	Kab. Buol	Perbup No. 2 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Biau
9.	Kab. Morowali Utara	Perbup No. 10 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Mori Utara
10.	Kab. Poso	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang RDTR Perkotaan Poso (Proses Revisi)
		Perda No. 2 Tahun 2015 tentang RDTR Perkotaan Tentena
11.	Kab. Parigi Moutong	Perda No. 7 Tahun 2014 tentang RDTR Perkotaan Parigi (Proses Revisi)

Tabel 2.66
Progress RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Daerah	Keterangan	Tahun Penyusunan	Target Penetapan
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Perda No. 1 Tahun 2023	2018	2023

Tabel 2.67
Progress RTRW Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Status	Tahun Penyusunan	Target Penetapan
1	Sigi	Perda No. 1 Tahun 2021	2018	
2	Palu	Perda No. 2 Tahun 2021	2018	
3	Banggai Laut	Pembahasan Gubernur		2025
4	Parigi Moutong	Perda No. 5 Tahun 2020 (proses peninjauan Kembali)	2018	
5	Morowali Utara	Melengkapi persyaratan Linsek		2025
6	Tojo Una-una	Melengkapi persyaratan Linsek	2020	2025
7	Banggai	Melengkapi persyaratan Linsek		2025
8	Buol	Perda No. 13 Tahun 2024	2018	
9	Poso	Perda No. 4 Tahun 2024		
10	Donggala	Perda No. 2 Tahun 2022	2018	

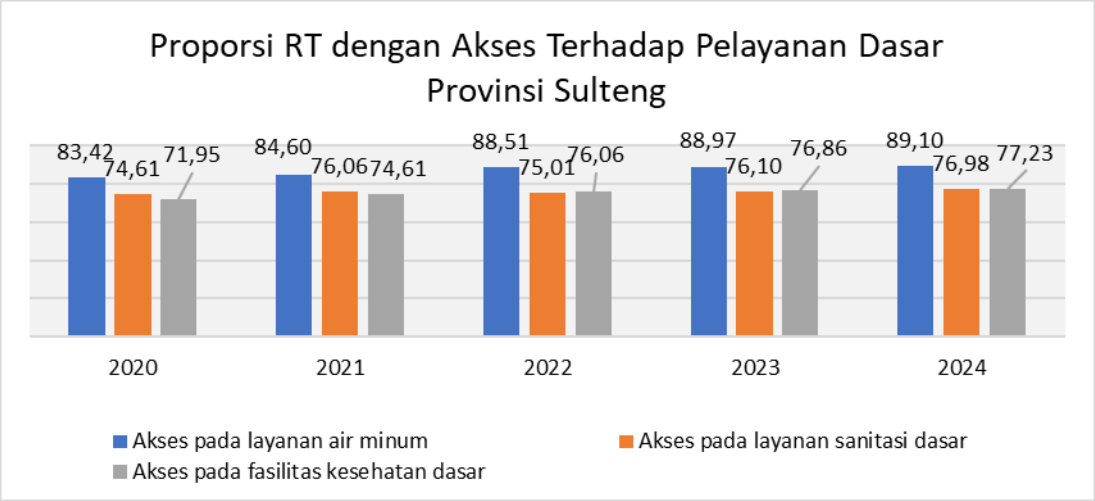
No.	Kabupaten/Kota	Status	Tahun Penyusunan	Target Penetapan
11	Banggai Kepulauan	Perda No. 6 Tahun 2023		
12	Morowali	Perda No. 7 Tahun 2019 (proses peninjauan Kembali)	2019	
13	Tolitol	Perda No. 1 Tahun 2023	2019	

5. Pengadaan Tanah Skala Provinsi
    - Melaksanakan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan strategis Provinsi atau proyek nasional yang lokasinya lintas kabupaten/kota (contoh: jalan Provinsi, pelabuhan regional, kawasan industri Morowali yang lintas kabupaten).
6. Fasilitasi Reforma Agraria
    - Bersama Kanwil ATR/BPN, Provinsi berperan dalam redistribusi tanah, legalisasi aset, dan pemberdayaan masyarakat penerima tanah di level Provinsi.

3) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Pelayanan Dasar

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar di Provinsi Sulawesi Tengah yang diukur dengan akses pada layanan air minum, akses pada fasilitas kesehatan dasar dan akses pada layanan sanitasi dasar. Pada Tahun 2024, akses pada layanan air minum mencapai angka 89,10 persen mengalami peningkatan dari tahun-t ahun sebelumnya. Sementara itu, akses pada layanan sanitasi dasar mencapai 76,98 persen angka ini meningkat dari Tahun sebelumnya. Selanjutnya akses pada fasilitas kesehatan dasar mencapai 77,23 persen angka ini meningkat dari tahun-Tahun sebelumnya.

Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan proporsi Rumah Tangga dengan akses terhadap Pelayanan Dasar di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.97
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar di Provinsi Sulawesi Tengah

4) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Sulawesi Tengah

Akses sanitasi layak merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Sebuah sanitasi disebut layak apabila fasilitas ini memenuhi sejumlah syarat kesehatan tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia 2023, ada beberapa kriteria sanitasi disebut layak yaitu: (a) Kloset menggunakan leher angsa, (b) tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau septic tank, (c) tempat pembuangan akhir tinja ada instalasi/sistem pengolahan air limbah (IPAL/ SPAL).

Sanitasi mencakup sejumlah fasilitas, kebiasaan, dan pelayanan, guna mencegah penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. fasilitas sanitasi mengacu pada infrastruktur yang didedikasikan untuk pembuangan, pengangkutan, atau pengolahan kotoran manusia dan limbah padat lainnya.

Definisi akses sanitasi layak merujuk pada definisi yang tercantum pada indikator SDGs, khususnya indikator tujuan 6 (enam) dan tujuan 11 yaitu sebagai berikut:

- Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengolahan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- Tujuan 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan

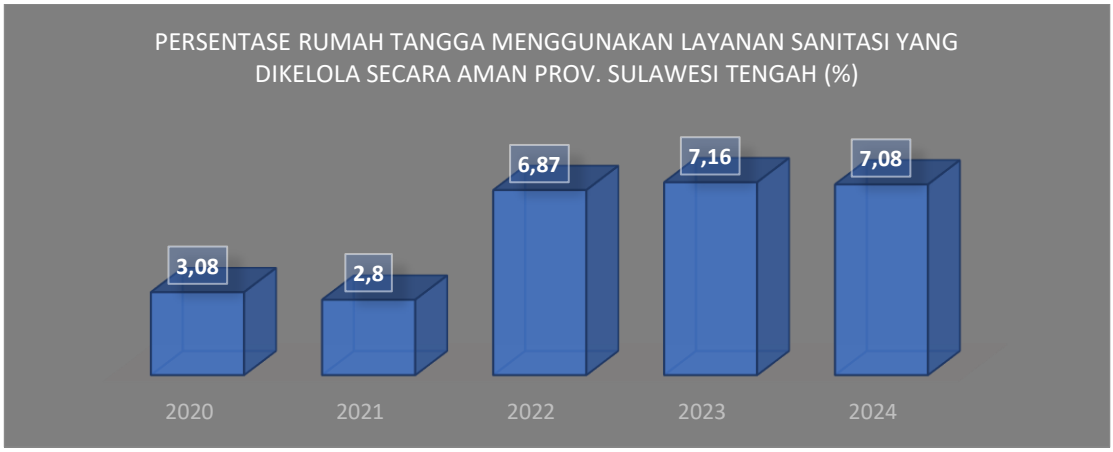
Perkembangan capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada Tahun 2020 sebesar 74,61 persen meningkat menjadi 76,06 persen pada Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 angkanya menurun menjadi 73,35 persen, selanjutnya setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai 77,4 persen pada Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.98
Persentasi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Sementara capaian persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kecenderungan meningkat yakni dari 3,08 persen pada Tahun 2020 menjadi 7,08 persen pada Tahun 2024.

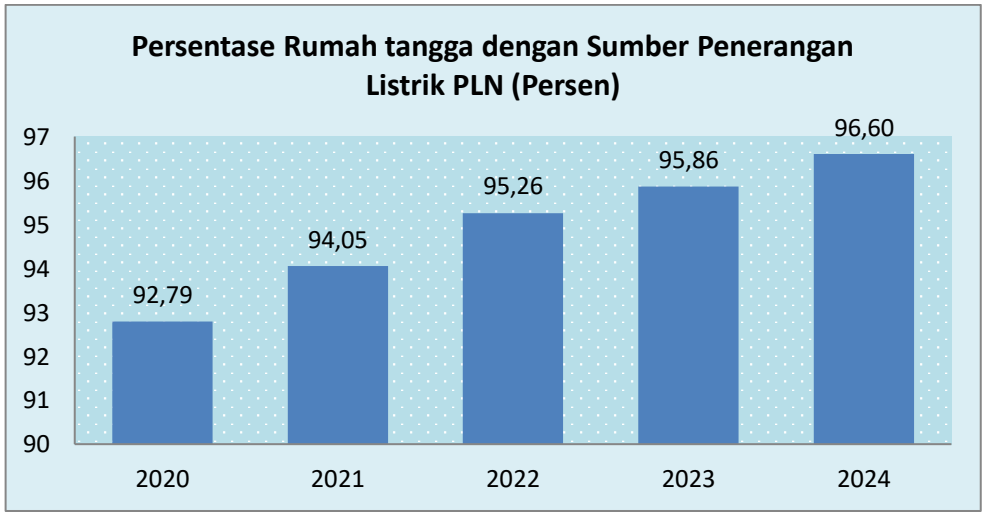


Sumber: BPS, 2024 (Data diolah kembali).

Gambar 2.99
Perkembangan Persentase Capaian Rumah Tangga Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola secara Aman di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

5) Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN

Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN setiap tahunnya bertambah. Persentase peningkatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



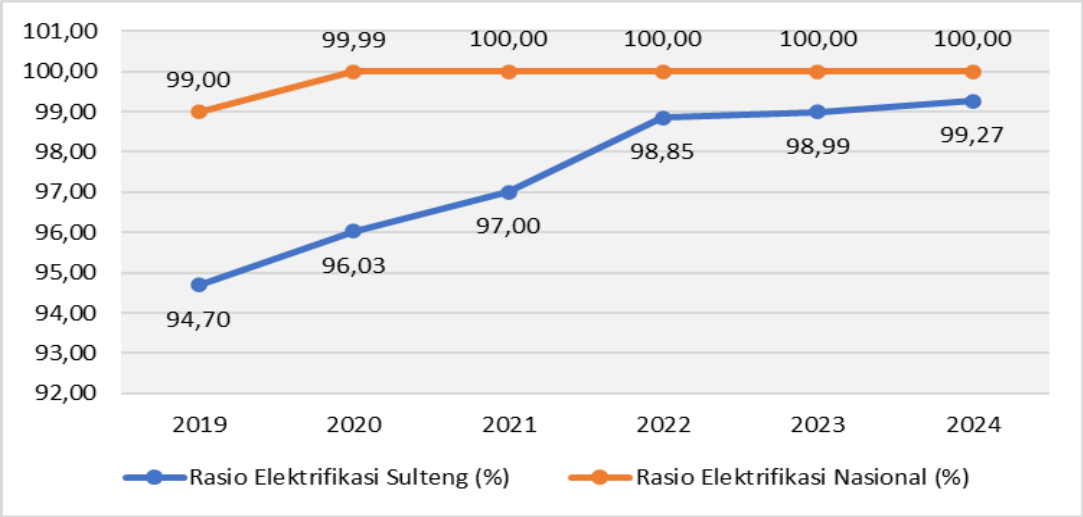
Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.100
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

6) Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan berlistrik dengan jumlah total rumah tangga di suatu wilayah. Pentingnya rasio elektrifikasi yaitu sebagai indikator akses masyarakat terhadap energi listrik, yang merupakan kebutuhan dasar dan penting untuk menunjang berbagai aktivitas, baik di rumah tangga maupun di sektor ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan agar seluruh daerah dapat menikmati listrik.

Rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Tengah semakin Tahun semakin meningkat, bahkan mendekati angka target capaian rasio elektrifikasi nasional. Target capaian rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah pada Tahun berikutnya diharapkan mampu mencapai target Nasional. Pada Tahun 2024, rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah berada di angka 99,27 persen.



Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.101
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024

Selanjutnya, jika dilihat dari capaian kabupaten/kota Tahun 2024 capaian 100 terdapat di Kabupaten Morowali dan Kota Palu, sedangkan rasio elektrifikasi terendah terdapat di Kabupaten Parigi Moutong (98,04%) dan Kabupaten Banggai Kepulauan (98,24%).



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Gambar 2.102
Capaian Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2024

Rasio elektrifikasi ini adalah penjumlahan rasio elektrifikasi yang dihasilkan oleh PLN dan rasio elektrifikasi yang didukung oleh sumber listrik alternatif lainnya. Dari diagram di atas terlihat bahwa Kota Palu dan Kabupaten Morowali memiliki rasio elektrifikasi terbesar yaitu 100%, sedangkan kabupaten lainnya masih memiliki rasio elektrifikasi di bawah 100%. Hal ini dikarenakan oleh topografi beberapa daerah yang merupakan daerah kepulauan. Jaringan ketenagalistrikan PLN belum dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan tersebar disebabkan keterbatasan akses masuk untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu kendala peningkatan rasio elektrifikasi. Selain itu, dinas memiliki keterbatasan anggaran dalam hal penyambungan meteran listrik gratis bagi daerah yang telah dilalui jaringan listrik PLN dan dikhususkan untuk masyarakat yang masuk ke dalam kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS). Instalasi infrastruktur ketenagalistrikan oleh Dinas yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti pemasangan *Solar Home System* (SHS), Lampu Tenaga Surya Hemat Listrik.

7) Persentase Desa Mandiri

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari implementasi kebijakan pembangunan desa berkelanjutan. Untuk menilai

capaian pembangunan desa, dua alat ukur yang digunakan secara resmi oleh pemerintah adalah Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Desa (ID). Kedua indeks ini memiliki fungsi strategis dalam menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta menjadi dasar perencanaan intervensi pembangunan secara lebih terarah dan terukur.

Berikut ini perkembangan status Desa berdasarkan IDM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.68
Perkembangan Status Desa berdasarkan IDM di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019-2024

STATUS DESA BERDASARKAN IDM	Tahun											
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Madani	2	0,00	12	0,65	19	1,03	42	2,28	132	7,17	279	15,15
Maju	168	9,12	267	14,50	346	18,78	522	28,34	666	36,16	782	42,45
Berkembang	1005	54,56	1096	59,50	1096	59,50	995	54,02	893	48,48	750	40,72
Tertinggal	615	33,39	436	23,67	355	19,27	266	14,44	151	8,20	31	1,68
Sangat Tertinggal	52	2,82	31	1,68	26	1,41	17	0,92	0	0,00	0	0,00
Jumlah Desa	1842		1842		1842		1842		1842		1842	
	BERKEMBANG		BERKEMBANG		BERKEMBANG		BERKEMBANG		BERKEMBANG		MAJU	

Sumber: Kemendes, 2025

Selama periode Tahun 2019 hingga 2024, Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan capaian yang signifikan dalam peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Jumlah desa berstatus mandiri mengalami peningkatan drastis dari hanya 2 desa (0,00%) pada 2019 menjadi 279 desa (15,15%) pada Tahun 2024. Begitu pula desa maju yang meningkat dari 168 desa (9,12%) pada 2019 menjadi 782 desa (42,45%) pada 2024.

Sementara itu, jumlah desa dengan status berkembang cenderung mengalami fluktuasi, namun tetap mendominasi pada awal periode, yakni 1005 desa (54,56%) pada 2019 dan menjadi 750 desa (40,72%) pada 2024.

Kemajuan yang paling mencolok terlihat dari penurunan jumlah desa tertinggal, dari 615 desa (33,39%) pada 2019 menjadi hanya 31 desa (1,68%) pada 2024. Sedangkan desa sangat tertinggal telah berhasil dieliminasi sepenuhnya dari 52 desa (2,82%) pada 2019 menjadi 0 desa pada 2023 dan 2024.

Secara keseluruhan, dari total 1.842 desa di Provinsi Sulawesi Tengah, peningkatan status desa menuju kategori lebih maju dan mandiri menjadi bukti nyata keberhasilan intervensi pembangunan dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota

IDM, sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, merupakan indeks komposit berbasis tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. IDM berorientasi pada ketahanan desa terhadap berbagai tantangan pembangunan, dengan fokus pada aspek sosial-budaya, ekonomi produktif, dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Indeks Desa (ID) yang tertuang dalam Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 merupakan penguatan dan penyempurnaan dari IDM. Indeks Desa disusun melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan enam dimensi pengukuran, yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa, yang masing-masing mencakup subdimensi dan indikator yang lebih rinci dan terukur. ID mencerminkan paradigma pembangunan desa yang berorientasi pada ketersediaan akses, kualitas layanan, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Desa kini mencakup lebih banyak dimensi, indikator yang lebih terukur dan sistem pelaporan yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Desa. Ini menjadikan ID sebagai alat yang lebih strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, perumusan kebijakan afirmatif, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

Berikut ini data komparasi pencapaian status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Desa Tahun 2024

Tabel 2.69
Pencapaian Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2024

DATA TINGKAT KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	NAMA KABUPATEN	STATUS DESA TAHUN 2024					JUMLAH DESA	STATUS DESA TAHUN 2024 (%)					DATA TINGKAT KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 BERDASARKAN INDEKS DESA									
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
1	BANGGAI	56	151	84	0	0	291	19.24	51.89	28.87	0.00	0.00	81	116	92	2	0	27,84%	39,86%	31,62%	0,69%	0,00%
2	BANGGAI KEPULAUAN	4	44	93	0	0	141	39.72	31.21	65.96	0.00	0.00	20	54	62	5	0	14,18%	38,30%	43,97%	3,55%	0,00%
3	BANGGAI LAUT	2	15	40	6	0	63	88.89	23.81	63.49	9.52	0.00	11	19	26	7	0	17,46%	30,16%	41,27%	11,11%	0,00%
4	BUOL	10	46	52	0	0	108	51.85	42.59	48.15	0.00	0.00	19	45	42	2	0	17,59%	41,67%	38,89%	1,85%	0,00%
5	DONGGALA	34	82	34	8	0	158	35.44	51.90	21.52	5.06	0.00	53	55	41	9	0	33,54%	34,81%	25,95%	5,70%	0,00%
6	MOROWALI	33	33	60	0	0	126	44.44	26.19	47.62	0.00	0.00	39	36	40	11	0	30,95%	28,57%	31,75%	8,73%	0,00%
7	MOROWALI UTARA	33	52	37	0	0	122	45.90	42.62	30.33	0.00	0.00	31	44	45	2	0	25,41%	36,07%	36,89%	1,64%	0,00%
8	PARIGI MOUTONG	33	134	110	1	0	278	20.14	48.20	39.57	0.36	0.00	56	105	99	17	1	20,14%	37,77%	35,61%	6,12%	0,36%
9	POSO	40	60	42	0	0	142	39.44	42.25	29.58	0.00	0.00	40	51	47	4	0	28,17%	35,92%	33,10%	2,82%	0,00%
10	SIGI	22	75	66	13	0	176	31.82	42.61	37.50	7.39	0.00	21	82	63	10	0	11,93%	46,59%	35,80%	5,68%	0,00%
11	TOJO UNA UNA	8	38	85	3	0	134	41.79	28.36	63.43	2.24	0.00	45	34	50	5	0	33,58%	25,37%	37,31%	3,73%	0,00%
12	TOLI TOLI	4	49	50	0	0	103	54.37	47.57	48.54	0.00	0.00	19	34	47	3	0	18,45%	33,01%	45,63%	2,91%	0,00%
	TOTAL	279	779	753	31	0	1842	15.15	42.29	40.88	1.68	0.00	435	675	654	77	1	23,62%	36,64%	35,50%	4,18%	0,05%

Sumber: Kemendes, 2025

Berdasarkan data komparasi capaian Tahun 2024:

- Berdasarkan IDM :
  - Desa Mandiri: 15,15%
  - Desa Maju: 42,29%
  - Desa Berkembang: 40,88%
  - Desa Tertinggal: 1,68%
  - Desa Sangat Tertinggal: 0%
- Berdasarkan ID :
  - Desa Mandiri: 23,62%
  - Desa Maju: 36,64%
  - Desa Berkembang: 35,50%
  - Desa Tertinggal: 4,18%
  - Desa Sangat Tertinggal: 0,05%

Peralihan dari IDM ke ID sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Permendesa Nomor 9 Tahun 2024, bukan sekadar perubahan teknis pengukuran, tetapi merupakan transformasi sistematis dalam memahami kondisi desa secara lebih holistik. ID mengakomodasi unsur tata kelola dan akuntabilitas, layanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional pasca 2024 yang menekankan pada integrasi data, penguatan kelembagaan, dan peningkatan efektivitas intervensi pembangunan berbasis data mikro desa.

Komparasi antara IDM dan ID Tahun 2024 memperlihatkan kemajuan signifikan pada sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, baik dari sisi jumlah desa mandiri maupun pengurangan desa tertinggal. ID sebagai instrumen baru lebih merefleksikan kompleksitas dan kebutuhan pembangunan desa masa kini. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendataan, konsistensi pembaruan data, serta kolaborasi multi pihak menjadi kunci untuk mempercepat transformasi desa menuju kemandirian yang berkelanjutan.

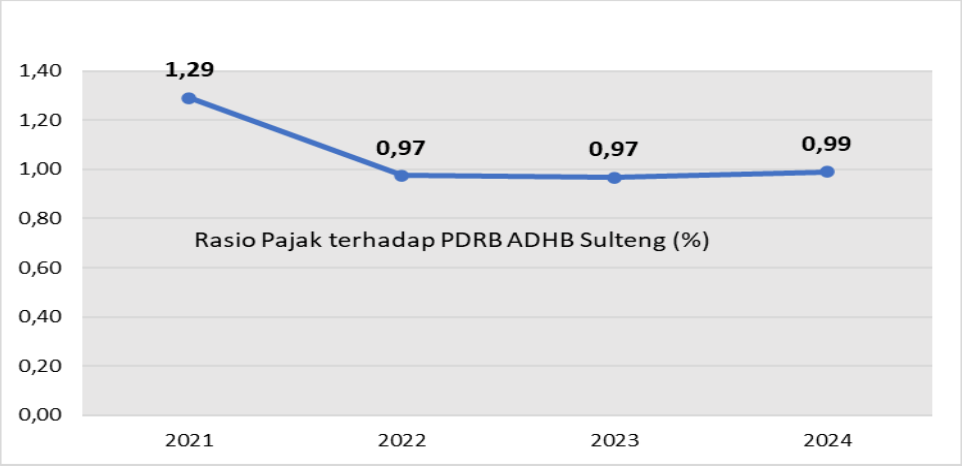
G. Stabilitas Ekonomi Makro

1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB sangat penting untuk diketahui dan dijadikan sebagai indikator makro pembangunan daerah. Penting karena mencerminkan efektivitas sistem perpajakan dan kesehatan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak, semakin besar kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan regional domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan serta menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola pemerintahan daerah.

Selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 perkembangan rasio pajak terhadap PDRB ADHB di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif, dimana pada Tahun 2021 rasionya sebesar 1,29 persen menurun di Tahun 2022/2023 menjadi 0,97 persen, selanjutnya pada Tahun 2024 rasio pajak terhadap PDRB mengalami peningkatan yakni menjadi 0,99 persen.



Sumber : BPS, 2024 (data diolah kembali)

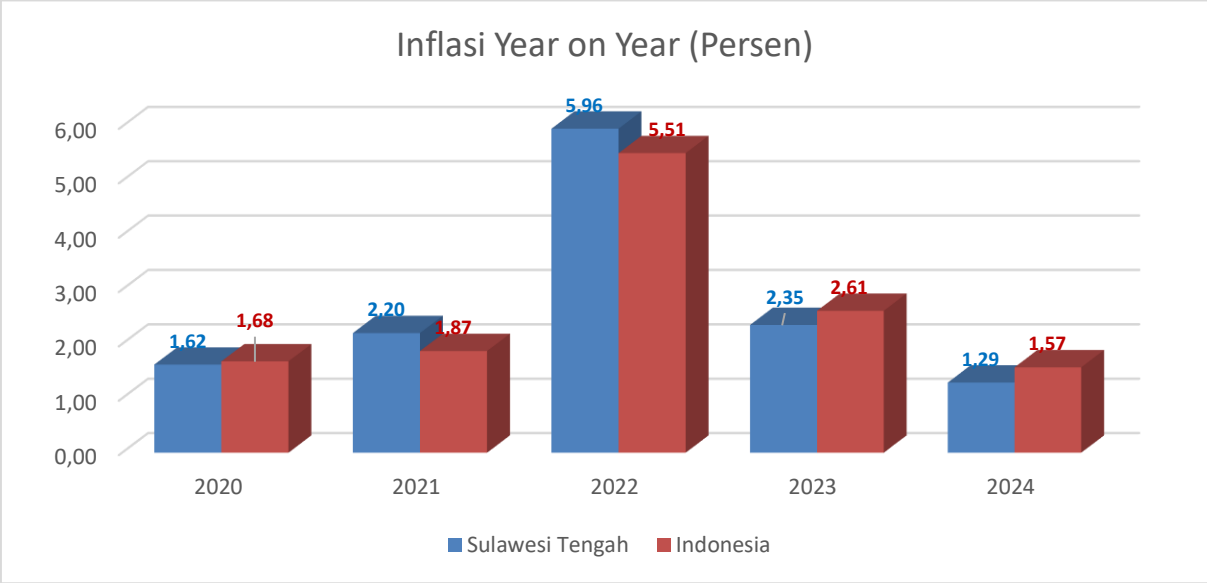
Gambar 2.103
Perkembangan Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

2) Inflasi

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi merupakan suatu proses

terjadinya harga-harga secara umum dan terus-menerus *(continue)* berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Perkembangan laju inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kecenderungan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2020 laju inflasi sebesar 1,62 persen naik menjadi 2,20 persen pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 inflasi melonjak hingga 5,96 persen dan dapat ditekan kembali hingga menjadi 2,35 persen pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 1,29 persen serta berada di bawah capaian nasional. Kenaikan inflasi 2022 ini masih merupakan dampak dari adanya kenaikan BBM pada September 2022. Selanjutnya, mengenai perkembangan inflasi Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada grafik berikut ini.



Sumber: BPS 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.104
Tingkat Inflasi *Year-on-Year* Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2020-2024

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Tahun 2020 sampai dengan 2023 BPS melakukan penghitungan Inflasi di 2 (dua) Kota yakni Kota Palu dan Kota Luwuk. Terlihat inflasi di Kota Palu pada Desember 2020 sebesar 0,63 persen meningkat menjadi 0,77 pada Desember 2021, dan sebesar 0,80 persen pada Desember 2022, selanjutnya pada Desember 2023 inflasi di Kota Palu menurun

menjadi 0,13 persen. Untuk di Kota Luwuk pada Desember 2020 mengalami deflasi sebesar -0,26 persen, selanjutnya pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 1,05 persen, menurun menjadi 0,82 persen pada Desember 2022, serta sebesar 0,59 persen pada Desember 2023.

Selanjutnya Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Tengah di 4 kabupaten/kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi di Kota Palu sebesar 0,46 persen, di Kota Luwuk inflasi sebesar 0,04 persen, Inflasi di Kabupaten Morowali sebesar 0,34 persen dan di Kabupaten Tolitoli mengalami deflasi sebesar -0,06 persen.

Tabel 2.70
Tingkat Inflasi Bulan Desember Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024

	Kabupaten Luwuk	Kota Palu	Kabupaten Morowali	Kabupaten Tolitoli
2020	-0,26	0,63	-	-
2021	1,05	0,77	-	-
2022	0,82	0,8	-	-
2023	0,59	0,13	-	-
2024	0,04	0,46	0,34	-0,06

2.1.4 Aspek pelayanan umum

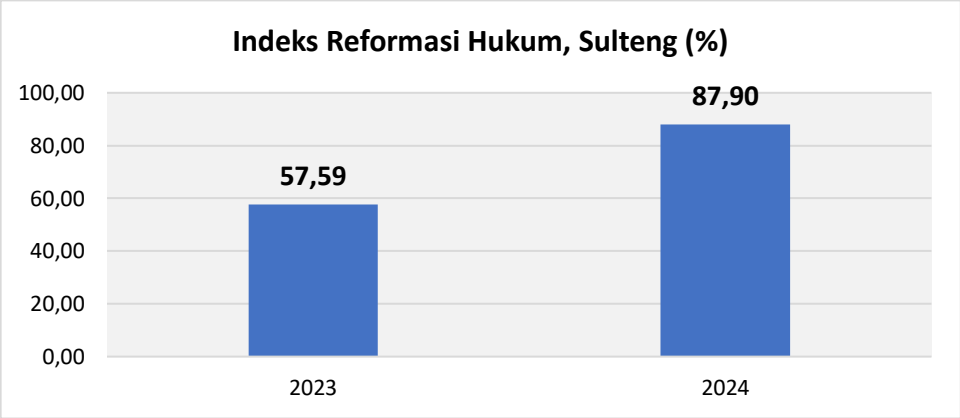
A. Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah proses perubahan sistem hukum secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan efektivitasnya. Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana reformasi hukum telah dilakukan oleh pemerintah. IRH mengidentifikasi dan memetakan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan, serta memperkuat sistem regulasi nasional. Penilaian IRH dilakukan pada empat variabel, yaitu koordinasi harmonisasi regulasi, regulasi/deregulasi, penyederhanaan regulasi, dan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan.

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator strategis yang digunakan untuk menilai kemajuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum, termasuk aspek regulasi, tata kelola, dan pelayanan publik berbasis hukum.

Provinsi Sulawesi Tengah mencatat pencapaian luar biasa dalam reformasi hukum dengan memperoleh Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 87,90 pada Tahun 2024. Angka ini tidak hanya jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 60, tetapi juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan nilai IRH Tahun sebelumnya 2023 sebesar 57,59. Kenaikan tajam dalam IRH Provinsi Sulawesi Tengah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mendorong reformasi hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peningkatan IRH ini merupakan buah dari kerja keras, baik dari pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat Sulawesi Tengah. dan kedepan angka ini masih perlu diupayakan untuk di tingkatkan.



Sumber : Kementerian Hukum dan HAM, 2025.

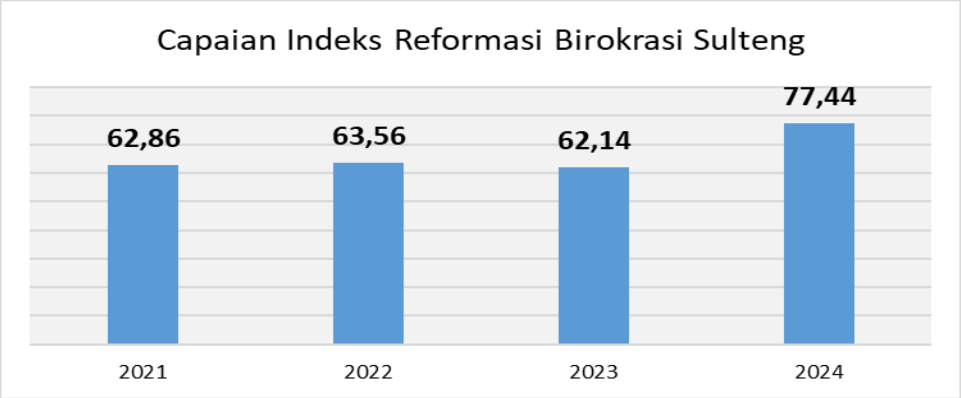
Gambar 2.105
Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023-2024

2) Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah dimana Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang

fluktuatif, dimana pada Tahun 2021 sebesar 62,86 meningkat menjadi 63,56 pada Tahun 2022, selanjutnya pada Tahun 2023 menurun menjadi 62,14, dan pada Tahun 2024 Indeks reformasi birokrasi dapat ditingkatkan kembali hingga mencapai 77,44 pada Tahun 2024.

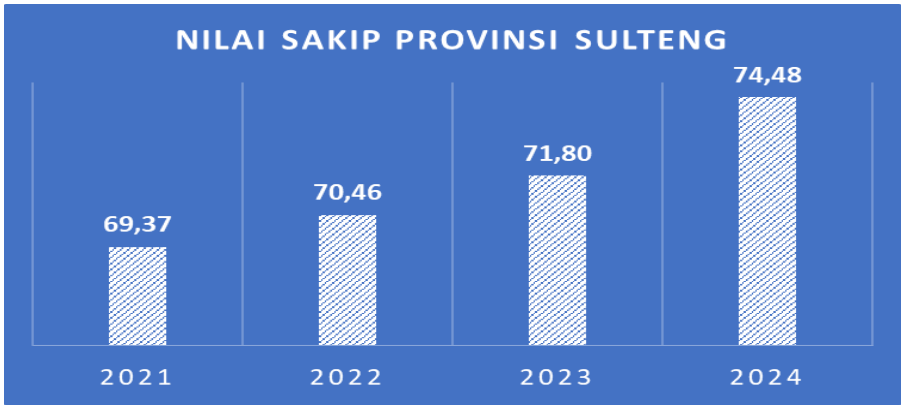


Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2025

Gambar 2.106
Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabilitas.

Terlihat sepanjang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yakni dari 69,37 (Kategori B) pada Tahun 2021 menjadi 74,48 (Kategori BB) pada Tahun 2024.

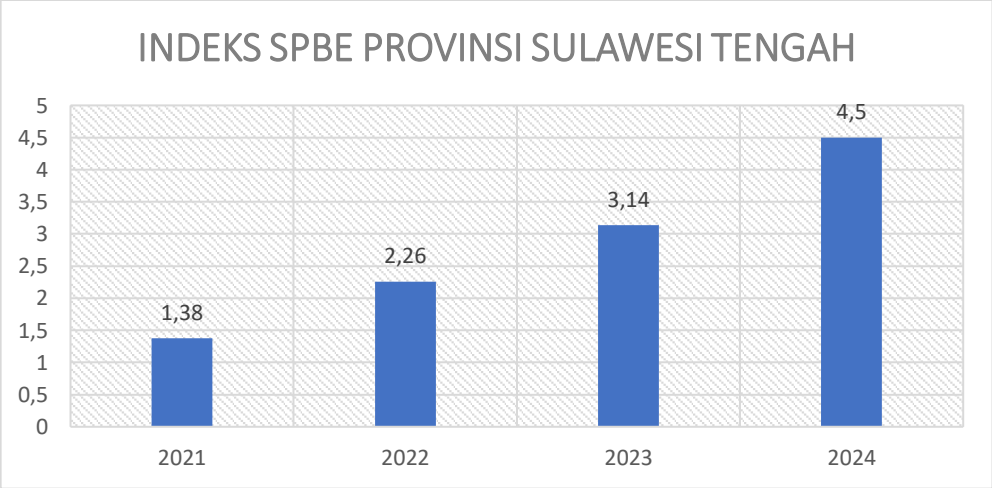


Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2025

Gambar 2.107
Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2024

3) Indeks System Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, terutama dalam hal komunikasi dan informatika, pemerintah daerah perlu mengadopsi digitalisasi untuk memastikan bahwa kinerja instansi pemerintahan bersifat transparan dan akuntabel. Hal ini melibatkan pembangunan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, serta upaya menuju pelayanan publik yang bersih dan peningkatan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Penggunaan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menjadi alat pengukuran efektivitas upaya pemerintah dalam mencapai tingkat digitalisasi yang optimal.



Sumber: KemenpanRB, 2025 (data diolah kembali)

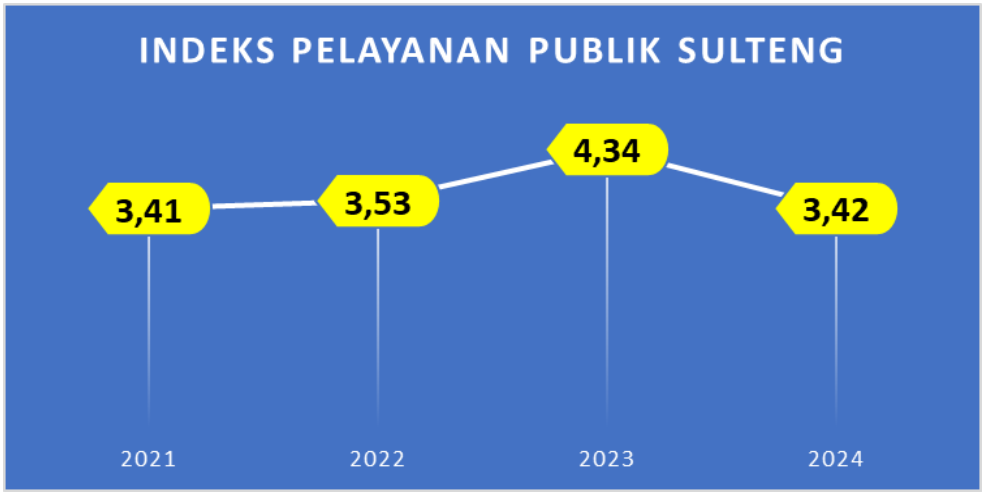
Gambar 2.108
Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2024

Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB tentang Evaluasi SPBE di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni dari sebesar 1,38 pada Tahun 2021, meningkat menjadi 4,5 pada Tahun 2024 dengan predikat "Baik".

4) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan warganya hingga transparansi

dalam penyelenggaraan layanan publik. indeks pelayanan publik dapat mencakup parameter-parameter seperti kecepatan dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan yang diberikan. Tingginya indeks pelayanan publik biasanya mencerminkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang responsif, transparan, dan mampu memberikan layanan berkualitas tinggi biasanya akan mendapatkan indeks pelayanan publik yang tinggi pula. Sebaliknya, jika terdapat hambatan atau ketidakmampuan dalam menyediakan layanan yang memadai, indeks tersebut dapat menurun.



Sumber: Biro Organisasi, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.109
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

Perkembangan capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktiatuf dimana pada Tahun 2021 sebesar 3,41 meningkat menjadi 3,52 pada Tahun 2022, dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 4,34, sedangan pada Tahun 2024 angkanya menurun menjadi 3,42. dengan kategori “B -“ (Baik dengan catatan).

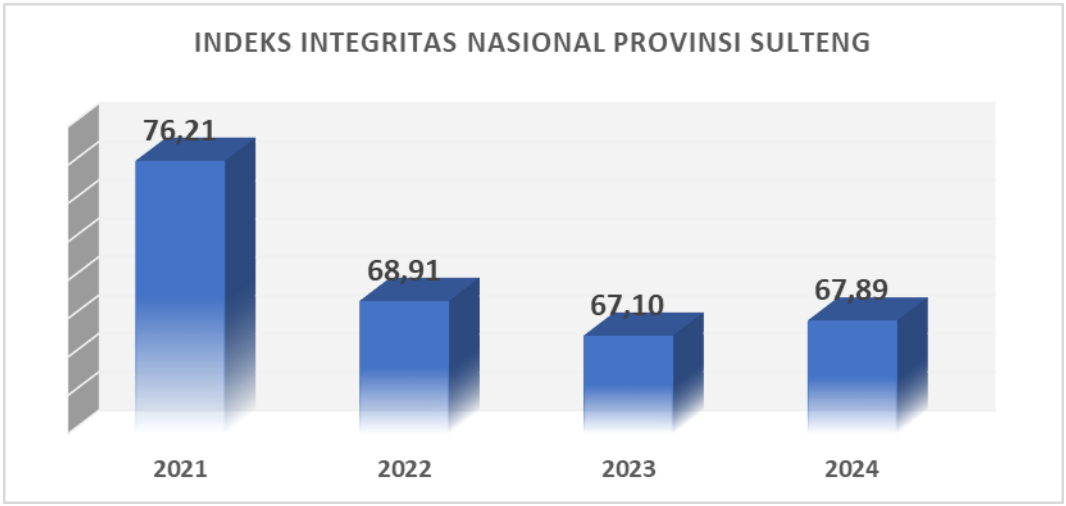
Selanjutnya pada Tahun 2025 indeks pelayanan publik akan mengalami perubahan formulasi perhitungan yang berimplikasi terhadap capaian di Tahun 2025 karena ada penambahan sampel dan instrumen penilaian yang berubah.

5) Indeks Intgritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) daerah sangat penting karena memberikan gambaran objektif tentang tingkat integritas di suatu wilayah. IIN ini membantu mengidentifikasi area yang rentan korupsi, mendorong perbaikan sistem, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pemerintah daerah.

Indeks Integritas Nasional (INN) daerah adalah hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas di pemerintah daerah. INN daerah bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah. Survei ini melibatkan penilaian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengguna layanan, dan pihak internal pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, Dalam SPI kategori pemerintah daerah, Nilai indeks integritas nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 67,89 meningkat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya 2023 sebesar 67,10. Oleh karena itu, ke depan dalam rangka peningkatan indeks integritas membutuhkan komitmen pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi. integritas harus dibiasakan hadir secara sistematis dalam keseharian, sehingga berkembang menjadi sebuah kesadaran.



Sumber: KPK, 2025

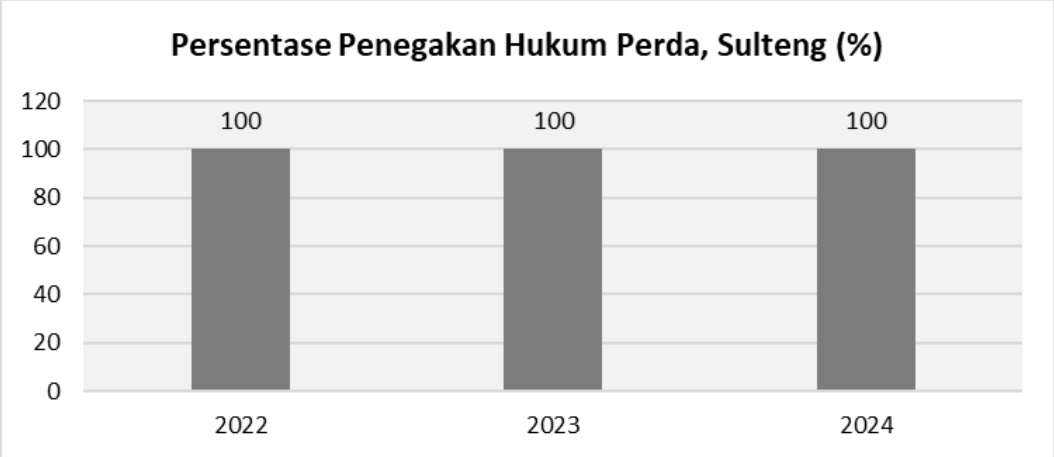
Gambar 2. 110
Indeks Integritas Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2024

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1) Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) memiliki banyak manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Perda yang ditegakkan dengan baik dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum di masyarakat. Selain itu, penegakan Perda juga dapat mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik.

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses untuk memastikan bahwa Perda, yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, ditegakkan dan ditaati oleh semua pihak. Ini termasuk pengawasan, penindakan, dan upaya yustisi untuk pelanggaran Perda. Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum di tingkat daerah, serta instansi terkait lainnya.



Sumber: Satpop PP Provinsi Sulawesi Tengah, 2025.

Gambar 2.111
Persentase Penegakan Hukum Perda di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022-2024

2) Persentase Capaian Aksi HAM

Pembangunan berbasis HAM berarti pembangunan yang mempertimbangkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan kebebasan.

- Pembangunan harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan.
- Pembangunan harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan layanan publik.
- Pembangunan harus mendorong kebebasan individu dan kebebasan berekspresi, serta menjamin hak-hak sipil dan politik, dan
- Pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi.

Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memajukan, melindungi, dan menegakkan HAM. Aksi Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam menjamin pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Capaian Aksi HAM ini mencakup berbagai indikator, seperti peningkatan pemenuhan hak, pengurangan pelanggaran HAM, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM, dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada HAM.

Hasil penilaian capaian aksi HAM di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 80,43, dengan predikat sedang. Secara rinci mengeai hasil penilaian capaian aksi HAM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Hasil Penilaian Capaian Aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

KELOMPOK SASARAN	AKSI	B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2023 $\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
Perempuan	Aksi 1	80	100	100	93,33
	Aksi 2	100	100	100	100
Anak	Aksi 3	85	40	40	55
	Aksi 4	70	25	40	45
	Aksi 5	100	100	60	86,67
Penyandang Disabilitas	Aksi 6	100	100	65	88,33
	Aksi 7	100	85	80	88,33
Masyarakat Adat	Aksi 8	100	100	60	86,67
*Rata-Rata Capaian	**80,42**				

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2024.

3) Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya. Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009-2020 terdiri dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.



Sumber : BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.112
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 sebesar 77,27 persen, dan mengalami kenaikan dan penuruan yang fluktuatif hingga pada Tahun 2020 mencapai angka 75,85 persen. Sementara, Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 menggunakan metode pengukuran baru yang terdiri dari aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara Nasional, capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada Tahun 2020 capain IDI Sulteng sebesar 75,85 persen, meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 80,92 persen pada Tahun 2022, sedangan pada Tahun 2022 angkanya menurun menjadi 79,13 persen, dan pada Tahun 2024 angka IDI Sulteng meningkat menjadi 80,76 persen.

4) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk dapat beraktivitas dengan baik dan lancar setiap hari. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mutu pelayanan dasar trantibum meliputi: standar operasional prosedur Satpol PP, standar sarana prasarana Satpol PP, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada meliputi pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan. Penerima layanan dasar SPM Trantibum

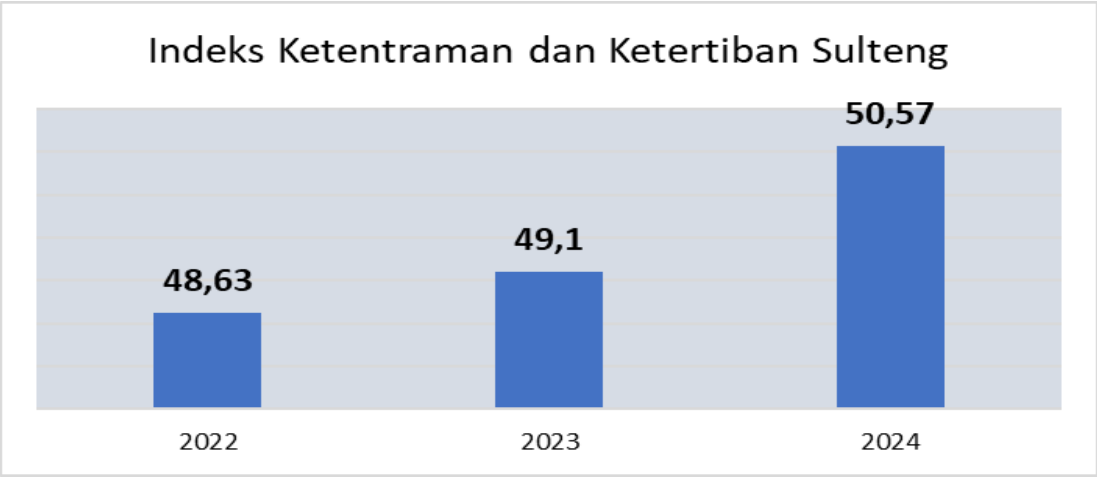
Penerima layanan dasar trantibum yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda Provinsi dan kabupaten/kota serta perkada, dengan kriteria: yang mengalami kerugian materil dan atau cidera fisik akibat penegakan perda dan

perkada dan atau berada pada jarak antara nol sampai dengan 50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada.

Dalam hal terdapat warga negara terkena dampak kerugian materil akibat penegakan perda dan perkada, maka Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak. Jika terdapat warga negara terkena dampak kerugian cidera fisik ringan akibat penegakan perda dan perkada, maka Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama dan jika kerugian cidera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut maka Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum pemerintah daerah. Berikut ini adalah indikator layanan terkait ketentraman dan ketertiban umum :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
5. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Perkembangan capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni dari 48,63 pada Tahun 2022 meningkat menjadi 50,57 pada Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Satpol PP Provinsi Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.113
Capaian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024

5) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian adalah persentase penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang menyatakan merasa aman ketika berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya pada siang dan malam hari. Indikator ini menggambarkan tingkat rasa aman masyarakat yang bersifat subjektif, tetapi penting sebagai cerminan kualitas hidup dan kondisi sosial di daerah.

Rasa aman merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang merasa aman akan lebih produktif, lebih aktif dalam kegiatan sosial, dan lebih percaya terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Indikator ini mendukung pencapaian tujuan RPJMD dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Data tingkat Provinsi yang dipublikasikan BPS untuk indikator ini hanya tersedia untuk Tahun 2014 nilai Sulawesi Tengah = 72,00%, Tahun 2017 nilai Sulawesi Tengah = 50,43%, dan Tahun 2020 nilai Sulawesi Tengah = 53,25%. Untuk Tahun lain BPS belum merilis deret waktu Provinsi secara terbuka.

Saat ini, rasa aman masyarakat masih menghadapi tantangan, antara lain adanya kasus kriminalitas, keterbatasan fasilitas penerangan jalan umum, serta belum meratanya keberadaan pos keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor melalui:

1. Peningkatan peran aparat keamanan dan Satpol PP dalam patroli wilayah.
2. Penyediaan fasilitas penerangan jalan umum di kawasan rawan.
3. Revitalisasi siskamling dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan lingkungan.

Pada Tahun 2024, terdapat 27 desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami kejadian konflik massal selama seTahun terakhir, atau setara dengan 1,34 persen dari total desa/kelurahan. Angka ini

menunjukkan tren penurunan dibandingkan Tahun 2021 (36 desa/kelurahan atau 1,78 persen) maupun Tahun 2018 (98 desa/kelurahan atau 4,85 persen).

Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik di tingkat desa/kelurahan, baik melalui peningkatan peran masyarakat, forum komunikasi, maupun efektivitas kelembagaan di daerah. Meski demikian, keberadaan konflik di sejumlah desa/kelurahan menunjukkan bahwa potensi kerentanan masih ada, sehingga penguatan mekanisme deteksi dini dan mediasi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.72
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Masal Selama SeTahun yang Lalu

Tahun	Jumlah	Persentase
2018	98	4,85
2021	36	1,78
2024	27	1,34

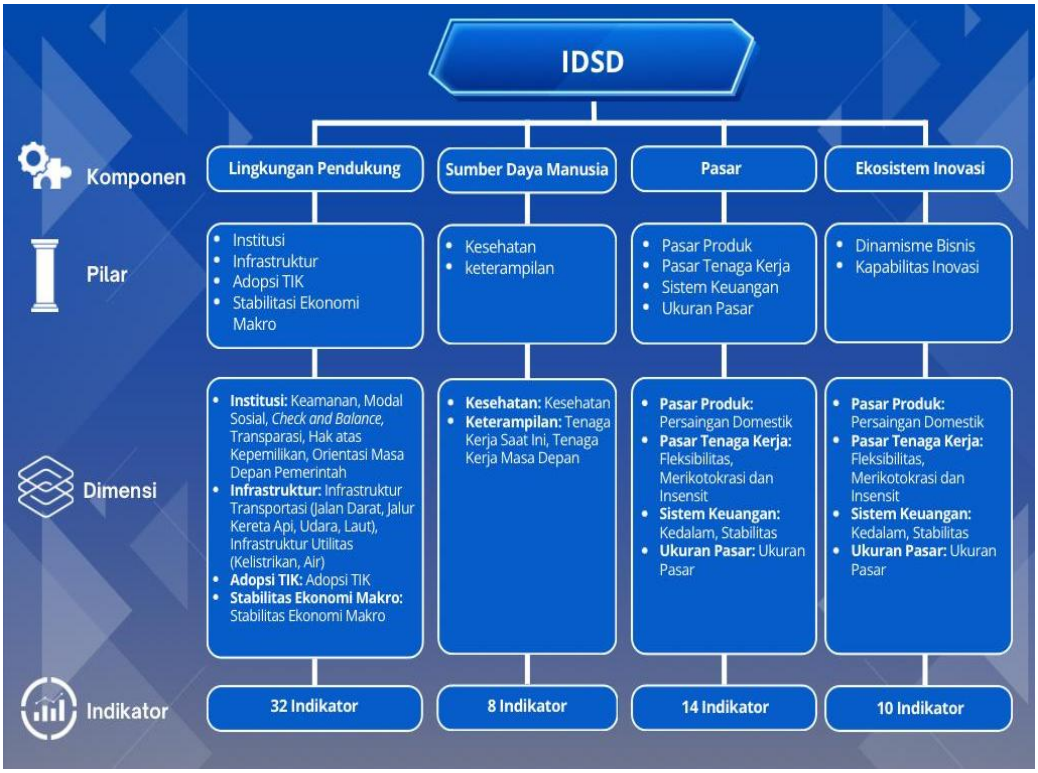
Sumber: BPS (Statistik Kriminal), 2024

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

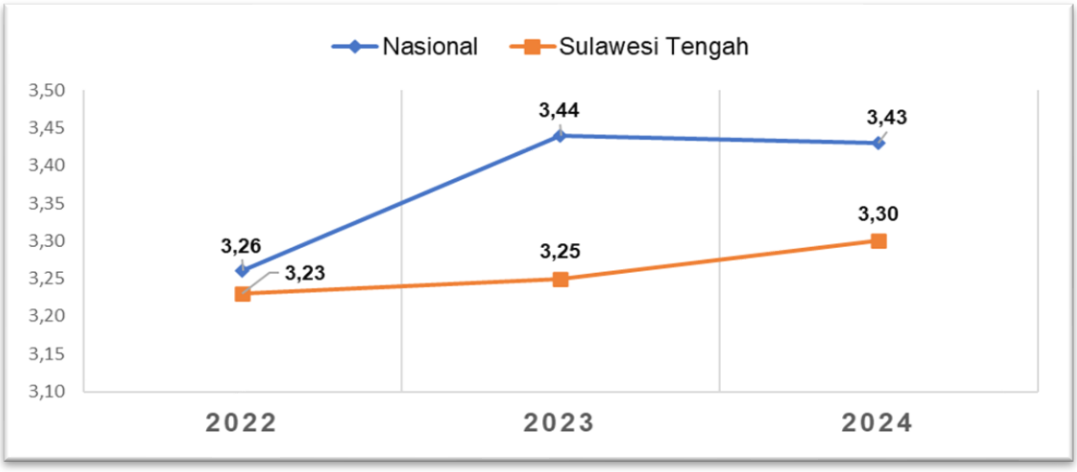
1) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada suatu daerah yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen pembentuk daya saing tersebut diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

IDSD diharapkan dapat menjadi data rujukan dalam mendukung penelitian serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing di Sulawesi Tengah. Nilai IDSD Sulawesi Tengah untuk rentang Tahun 2022 sampai dengan 2024 ditampilkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.114
Kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)



Sumber: BRIN (Buku Indeks Daya Saing Daerah), 2022-2024

Gambar 2.115
Nilai IDSD Sulawesi Tengah berbanding Nilai IDS Nasional Tahun 2022-2024

Indeks daya saing daerah (IDSD) memiliki rentang nilai 0,00 (batas bawah) hingga 5,00 (batas atas) dengan ketentuan semakin tinggi nilainya maka indeks daya saing daerah tersebut semakin baik. IDSD Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,08 persen walaupun nilainya masih berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 2,62 persen.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selanjutnya, perkembangan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
I,	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**																	
1,1,	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**																	
1,1,1,	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
1,1,1,1	Laju Inflasi	1,81	1,62	89,50	4,5	2,2	48,89	1,52	5,96	392,11	1,91	2,35	123,04	2,18	1,29	59,17	142,54	Sangat Tinggi
1,1,1,2	PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	63,78	63,78	100,00	58,09	81,86	140,92	67,13	105,55	157,23	70,2	112,46	160,20	73,79	160,33	217,28	155,13	Sangat Tinggi
1,1,1,3	PDRB Per Kapita (HK Rp Juta)	43,32	43,32	100,00	53	50,8	95,85	66,09	56,29	85,17	69,64	79,22	113,76	73,96	98,2	132,77	105,51	Sangat Tinggi
1,1,1,4	Total PDRB (HB Rp Miliar)	197.440,78	197.440,78	100,00	202.000,00	200.502,00	99,26	209.922,63	323617	154,16	224010,42	347139	154,97	240915,77	358812	148,94	131,46	Sangat Tinggi
	Total PDRB (HK Rp Miliar)	134.152,00	134.152,00	100,00	139.000,00	148.402,00	106,76	144735,44	172578	119,24	153435,94	1931818	1259,04	163379,38	162362	99,38	336,88	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah (persen)	22,4	22,4	100,00	5,75	17,51	304,52	21,18	14,54	68,65	20,51	11,32	55,19	19,93	21,22	106,47	126,97	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	23,68	23,68	100,00	10,7	19,62	183,36	24,1	29,69	123,20	24,5	25,53	104,20	24,9	24,96	100,24	122,20	Sangat Tinggi
	Total penduduk (jiwa)	3.096.976	3.096.976	100,00	3.100.000,00	3.099.717,00	99,99	3.176.143,00	3.051.150,00	96,06	3.216.480,00	3.086.750,00	95,97	3.257.329,00	3.121.750,00	95,84	97,57	Sangat Tinggi
1,1,1,5	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (persen)	20,95	20,95	100,00	20,95	21,08	100,62	20,95	22,96	109,59	20,95	23,11	110,31	20,95	24,05	114,80	107,06	Sangat Tinggi
1,1,1,6	Indeks Ketimpangan Williamson (poin)	0,54	0,54	100,00	0,523	1,36	260,04	0,54	1,52	281,48	0,54	1,5	277,78	0,54	0,3	55,56	194,97	Sangat Tinggi
1,1,1,7	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	86,96	86,96	100,00	85,4	92,82	91,31	87,82	93,66	93,35	89,16	93,79	94,81	90,35	98,57	90,90	94,07	Sangat Tinggi
1,1,1,8	Jumlah penduduk miskin (jiwa, september)	403.740,00	403.740,00	100,00	382.000,00	381.210,00	100,21	389.963,60	389.710,00	100,07	359.393,20	395.660,00	89,91	383.537,60	358.330,00	106,57	99,35	Sangat Tinggi
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	2,58	2,58	100,00	2,25	2,24	99,56	2,32	2,41	103,88	2,25	2,12	94,22	2,24	2,1	93,75	98,28	Sangat Tinggi
1,1,1,9	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	9.335.000,00	9.335.000,00	100,00	9378000	9378000	100,00	9.696.000,00	9.696.000,00	100,00	10.149.000,00	10.149.000,00	100,00	10.536.000,00	10.536.000,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
1,2,	**Kesejahteraan Sosial**																	
1,2,1	Pendidikan																	
1,2,1,1	Angka Melek Huruf (persen)	98,35	98,24	99,89	96,5	99,82	103,44	98,7	100	101,32	98,89	96,96	98,05	99,05	97,42	98,35	100,21	Sangat Tinggi
1,2,1,2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,83	8,83	100,00	8,89	**8,89**	100,00	**8,89**	**8,89**	100,00	8,96	8,96	100,00	9,04	9,04	100,00	100,00	Sangat Tinggi
1,2,1,3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,17	13,17	100,00	13,23	13,23	100,00	13,32	13,32	100,00	13,33	13,33	100,00	13,34	13,34	100,00	100,00	Sangat Tinggi
1,2,1,4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (persen)	86,17	88,42	102,61	75,19	51,18	68,07	65,22	75,84	116,28	86,5	65,99	76,29	87	64,52	74,16	87,48	Tinggi
1,2,1,6	Angka Partisipasi Murni SMA (persen)	65	65,02	100,03	68,5	38,7	56,50	65,72	98,09	149,25	67,5	66,18	98,04	68	65,62	96,50	100,07	Sangat Tinggi
1,2,1,7	Angka Kelulusan (AL) SMA	98,15	99,46	101,33	97,75	99,84	102,14	95,7	97,65	102,04	98,25	67,41	68,61	98,5	98,7	100,20	94,86	Sangat Tinggi
1,2,1,8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (persen)	89,22	88,42	99,10	73,19	29,6	40,44	96,36	82,87	86,00	86,5	89,1	103,01	87	100,02	114,97	88,70	Tinggi
1,2,1,9	Angka Partisipasi Murni SMK (persen)	65,15	65,02	99,80	66,5	55,52	83,49	48,78	72,8	149,24	67,5	65,82	97,51	68	71,2	104,71	106,95	Sangat Tinggi
1,2,1,10	Angka Kelulusan (AL) SMK	99	99,21	100,21	97,75	99,53	101,82	95,7	97,65	102,04	98,25	99,6	101,37	98,5	98,57	100,07	101,10	Sangat Tinggi
1,2,1,11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB/ Paket C (persen)	84,5	82,5	97,63	64,5	64,5	100,00	1,48	2,22	150,00	66,75	67,8	101,57	67	68,21	101,81	110,20	Sangat Tinggi
1,2,1,12	Angka Partisipasi Murni SLB/ Paket C (persen)	65,5	64,4	98,32	71,19	71,19	100,00	1,12	1,51	134,82	74,75	75,21	100,62	75	75,89	101,19	106,99	Sangat Tinggi
1,2,2	**Kesehatan**																	
1,2,2,2	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	69,98	70,31	100,47	68,5	70,41	102,79	72	70,49	97,90	69,98	70,66	100,97	69,1	70,84	102,52	100,93	Sangat Tinggi
1,2,2,3	Persentase balita gizi buruk (persen)	0,25	0,34	136,00	0,12	0,5	416,67	0,4	0,3	75,00	0,3	21,6	7200,00	0,2	7,3	**3650,00**	2295,53	Sangat Tinggi
1,2,3	**Sumberdaya**																	
1,2,3,2	Angka partisipasi angkatan kerja (persen)	69,75	69,75	100,00	69,75	70,01	100,37	69,36	70,22	101,24	70,23	70,55	100,46	70,1	71,21	101,58	100,73	Sangat Tinggi
1,2,3,3	Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen)	69,44	69,44	100,00	70,56	68,73	97,41	72,28	69,99	96,83	73,87	69,85	94,56	74,79	71,1	95,07	96,77	Sangat Tinggi
1,2,3,4	Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	96,23	96,23	100,00	96,24	96,25	100,01	96,93	96,99	100,06	97,16	97,05	99,89	97,46	97,06	99,59	99,91	Sangat Tinggi
1,2,3,5	Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupah/TK)	9.372,60	9.372,60	100,00	9,614	16,2	168,50	10,055	10,357	103,00	51,21	54,283	106,00	60,32	64,542	107,00	116,90	Sangat Tinggi
1,2,3,6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)	67,79	67,79	100,00	68,97	96,25	139,55	68,69	96,99	141,20	68,96	97,05	140,73	68,39	69,01	100,91	124,48	Sangat Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1,2,3,7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	28,44	28,44	100,00	28,44	49,29	173,31	29,46	49,44	167,82	29,52	50,1	169,72	29,59	41,02	138,63	149,90	Sangat Tinggi
1,2,3,8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (persen)	48,99	48,99	100,00	35	34,22	97,77	42,99	41,05	95,49	39,99	39,88	99,72	36,99	36,52	98,73	98,34	Sangat Tinggi
1,2,3,10	Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)	26,78	26,78	100,00	28,34	26,59	93,82	30,47	31,86	104,56	30,57	37,74	123,45	31,3	38,07	121,63	108,69	Sangat Tinggi
1,2,3,11	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	100,00	Sangat Tinggi
1,2,3,12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90,4	90,4	100,00	90,62	90,88	100,29	90,82	90,95	100,14	91,02	91,34	100,35	91,22	91,89	100,73	100,30	Sangat Tinggi
1,2,3,13	Penguatan cadangan pangan (persen)	225,57	225,57	100,00	226,07	60,1	26,58	226,57	78,08	34,46	227,07	536,44	236,24	227,57	668,37	293,70	138,20	Sangat Tinggi
1,2,3,14	Penanganan daerah rawan pangan (%)	68,03	68,03	100,00	22	23,4	106,36	21	49	233,33	19	17,05	89,74	15	15,34	102,27	126,34	Sangat Tinggi
1,2,3,15	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (persen)	1,33	1,33	100,00	1,28	1,12	87,50	1,19	1,88	157,98	1,11	1,87	168,47	1,04	3,43	329,81	168,75	Sangat Tinggi
1,2,3,18	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	6,48	6,48	100,00	11,59	11,67	100,69	6,11	6,13	100,33	5,99	6,01	100,33	5,87	6,03	102,73	100,82	Sangat Tinggi
1,3,	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**																	
1,3,3	Rasio Jumlah klub olahraga per 10,000 penduduk (angka)	0,03	0,03	100,00	0,04	0,04	100,00	0,057	0,007	12,28	0,072	0,007	9,72	0,086	0,08	93,02	63,01	Rendah
1,3,4	Rasio Jumlah gedung olahraga per 10,000 penduduk (angka)	0,13	0,13	100,00	0,147	0,147	100,00	0,15	0,01	6,67	0,152	0,01	6,58	0,158	0,01	6,33	43,91	Sangat Rendah
II,	**ASPEK PELAYANAN UMUM**																	
2,1,	**Layanan Urusan Pemerintah Wajib**																	
2,1,1,	**Wajib Layanan Dasar**																	
2,1,1,1	**Pendidikan**																	
2.1.1.1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki (angka)	99,74	99,8	100,06	96,34	99,82	103,61	96,89	99,82	103,02	97,86	99,81	101,99	98,44	99,82	101,40	102,02	Sangat Tinggi
2,1,1,1k	Angka Putus Sekolah SMA	0,22	0,21	95,45	2,25	0,15	6,67	2	0,26	13,00	1,75	0,34	19,43	1,5	0,27	18,00	30,51	Sangat Rendah
2,1,1,1l	Persentase SMA berakreditasi minimal B	70,47	70,12	99,50	46,26	46,26	100,00	52,27	75,33	144,12	53,5	74,57	139,38	54,5	72,65	133,30	123,26	Sangat Tinggi
2,1,1,1m	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	61,56	61,09	99,24	62,25	63,89	102,63	60,5	61,45	101,57	62,75	65,89	105,00	70	71,22	101,74	102,04	Sangat Tinggi
2,1,1,1n	Angka Putus Sekolah SMK	2,21	0,26	11,76	2,25	0,15	6,67	2	2	100,00	1,75	0,43	24,57	1,5	0,41	27,33	34,07	Sangat Rendah
2,1,1,1o	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	47,55	47,31	99,50	48,91	48,91	100,00	40	49	122,50	49	62,64	127,84	50	58,24	116,48	113,26	Sangat Tinggi
2,1,1,1p	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60,07	60,07	100,00	62,25	63,05	101,29	60,5	61,44	101,55	60,75	61,54	101,30	70	71,76	102,51	101,33	Sangat Tinggi
2,1,1,1q	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus	26	26	100,00	34	29	85,29	18	32	177,78	33	33	100,00	34	33	97,06	112,03	Sangat Tinggi
2,1,1,1r	Persentase guru di SMA bersetifikasi	34,71	62,81	180,96	35,9	63,25	176,18	48	64,87	135,15	39,5	33,55	84,94	40	33,39	83,48	132,14	Sangat Tinggi
2,1,1,1s	Persentase guru di SMA bersetifikasi S1	46,76	46,89	100,28	47,01	48,8	103,81	48	49,46	103,04	58,25	59,46	102,08	59,5	60,22	101,21	102,08	Sangat Tinggi
2,1,1,1t	Persentase guru di SMA bersetifikasi S2	47,33	47,21	99,75	47,5	48,18	101,43	48	49,54	103,21	48,5	60,53	124,80	49	60,81	124,10	110,66	Sangat Tinggi
2,1,1,1u	Persentase guru di SMK bersetifikasi	66,83	65,75	98,38	34,8	67,25	193,25	48	69,56	144,92	40	34,16	85,40	43	34,97	81,33	120,65	Sangat Tinggi
2,1,1,1v	Persentase guru di SMK bersetifikasi S1	46,2	45,29	98,03	47,04	47,75	101,51	48	49,39	102,90	52	51,2	98,46	53	52,3	98,68	99,92	Sangat Tinggi
2,1,1,1w	Persentase guru di SMK bersetifikasi S2	45,15	43,02	95,28	47,5	45	94,74	46,4	45,4	97,84	47,2	46,4	98,31	49	60,26	122,98	101,83	Sangat Tinggi
2,1,1,1z	Persentase perizinan SMA swasta	46,77	41,32	88,35	48	45	93,75	50,5	100	198,02	60	100	166,67	65	100	153,85	140,13	Sangat Tinggi
2,1,1,1aa	Persentase perizinan SMK swasta	46,91	41,15	87,72	48	45	93,75	50,5	100	198,02	60	100	166,67	65	100	153,85	140,00	Sangat Tinggi
2,1,1,1bb	Persentase perizinan SLB swasta	45,34	42,77	94,33	48	45	93,75	50,5	100	198,02	60	100	166,67	65	100	153,85	141,32	Sangat Tinggi
2,1,1,2	**Kesehatan**																	
2,1,1,2,1	Angka Stunting (%)	30	31	96,67	27	29,7	90,00	24	28,2	82,50	22	27,2	76,36	20	26,1	69,50	83,01	Tinggi
2,1,1,2,2	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (rasio)	0,06	0,06	100,00	0,07	0,05	71,43	0,09	1,15	1277,78	0,1	0,05	50,00	0,11	0	0,00	299,84	Sangat Tinggi
2,1,1,2,3	Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,1,1,2,4	Persentase pelayanan kesehatan bagipenduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen)	100	96	96,00	100	97	97,00	98	100	102,04	100	97	97,00	100	98	98,00	98,01	Sangat Tinggi
2,1,1,2,5	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian Luar Biasa (KLB) (persen)	100	97	97,00	100	92	92,00	100	94	94,00	100	97	97,00	100	98	98,00	95,60	Sangat Tinggi
2,1,1,2,6	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka)	8,05	8,06	100,12	8,04	7,97	99,13	7,39	9	121,79	6,81	6,7	98,38	6,23	6,7	107,54	105,39	Sangat Tinggi
2,1,1,2,7	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka)	7,5	8	93,33	7	6	114,29	6	7,68	72,00	6	5,98	100,33	5	4,76	104,80	96,95	Sangat Tinggi
2,1,1,2,8	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka)	190	185	102,63	180	148,01	117,77	130	128	101,54	110	108	101,82	106,49	105	101,40	105,03	Sangat Tinggi
2,1,1,2,9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio)	9,29	9,07	97,63	9,36	10,76	114,96	10,97	10,76	98,09	11,19	11,02	98,48	11,4	11,34	99,47	101,73	Sangat Tinggi
2,1,1,2,10	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio)	0,07	0,07	100,00	0,08	0,07	87,50	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07	100,00	0,08	0,07	87,50	95,00	Sangat Tinggi
2,1,1,2,11	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk (rasio)	1,06	1,04	98,11	1,06	1,19	112,26	1,29	1,26	97,67	1,39	1,36	97,84	1,49	1,47	98,66	100,91	Sangat Tinggi
2,1,1,2,12	Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk (rasio)	0,25	0,19	76,00	0,24	0,23	95,83	0,23	0,23	100,00	0,22	0,22	100,00	0,22	0,22	100,00	94,37	Sangat Tinggi
2,1,1,2,13	Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio)	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	100,00	0,02	0,01	50,00	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00	90,00	Tinggi
2,1,1,2,14	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio)	0,23	0,22	95,65	0,23	0,23	100,00	0,25	0,3	120,00	0,26	0,3	115,38	0,28	0,28	100,00	106,21	Sangat Tinggi
2,1,1,2,15	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio)	2,23	2,24	100,45	2,28	2,39	104,82	2,45	5,3	216,33	2,51	5,3	211,16	2,58	5,3	205,43	167,64	Sangat Tinggi
2,1,1,2,16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (persen)	72,85	72,98	100,18	73,6	82,5	112,09	83	63,41	76,40	83,5	82,16	98,40	84	82,13	97,77	96,97	Sangat Tinggi
2,1,1,2,17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (persen)	69,17	68,12	98,48	69,43	67,68	97,48	76	74,97	98,64	76,5	75,69	98,94	77	76,12	98,86	98,48	Sangat Tinggi
2,1,1,2,18	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,2,19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																	
2,1,1,3,1	Indeks Infrastruktur kebinamargaan dan Penataan Ruang	N/a	N/a	N/a	0,8	0,58	72,50	0,77	0,79	102,60	0,81	0,92	113,58	0,88	0,91	103,41	98,02	Sangat Tinggi
2,1,1,3,2	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	N/a	N/a	N/a	0,82	0,79	96,34	0,77	0,8	103,90	0,88	0,93	105,68	0,91	0,91	100,00	101,48	Sangat Tinggi
2,1,1,3,3	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	N/a	N/a	N/a	0,5	0,79	158,00	0,79	0,86	108,86	1	1	100,00	1	1	100,00	116,72	Sangat Tinggi
2,1,1,3,4	Ketaatan terhdap RT/RW	N/a	N/a	N/a	15,73	15,73	100,00	32,58	53,93	165,53	65,17	68,54	105,17	76,4	76,4	100,00	117,68	Sangat Tinggi
2,1,1,3,5	Rasio Jaringan Irigasi kewenang provinsi (angka)	0,71	0,71	100,00	0,74	5,24	708,11	0,76	2,43	319,74	0,79	4,34	549,37	0,81	2,26	279,01	391,24	Sangat Tinggi
2,1,1,3,6	Persentase rumahtangga yang menempati hunian dengan akses Air Minum layak (persen)	84,6	84,6	100,00	86,09	88,51	102,81	86,97	86,74	99,74	87,84	86,85	98,87	88,72	87,86	99,03	100,09	Sangat Tinggi
2,1,1,3,7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (angka)	0,09	0,09	100,00	0,1	0,1	100,00	0,1	0,1	100,00	0,1	0,1	100,00	0,11	2,18	1981,82	476,36	Sangat Tinggi
2,1,1,3,8	Persentase Areal Kawasan kumuh (persen)	5,29	5,29	100,00	4	4	100,00	4,39	4,39	100,00	3,94	3,94	100,00	3,49	3,49	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,3,9	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk (angka)	2,46	2,46	100,00	2,11	2,11	100,00	2,53	2,53	100,00	2,57	2,57	100,00	2,61	2,61	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,3,10	Persentase luas sawah beririgasi (persen)	50	50	100,00	60	60	100,00	70	70	100,00	75	74,3	99,07	80	79,1	98,88	99,59	Sangat Tinggi
2,1,1,3,11	Persentase rumahtangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (persen)	10	10	100,00	12	19,48	162,33	14	28,82	205,86	16	30,77	192,31	18	31	172,22	166,55	Sangat Tinggi
2,1,1,3,12	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (angka)	62,59	62,59	100,00	68	68	100,00	69,42	69,42	100,00	71,43	71,43	100,00	73,32	73,32	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,3,13	Indeks infrastruktur DasarPerumahan (angka)	32,99	32,99	100,00	42	42	100,00	43,85	43,85	100,00	49,64	49,64	100,00	50,96	50,96	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**																	
2,1,1,4,1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	28,76	28,76	100,00	42,32	42,32	100,00	65,7	48,56	73,91	89,4	100	111,86	89,83	89,83	100,00	97,15	Sangat Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,1,1,4,2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda Provinsi yang memperoleh Fasiltasi rumah layak huni (%)	N/a	N/a	N/a	4	4	100,00	5	5	100,00	5	5	100,00	10	10	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,4,3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	0,09	0,09	100,00	1,21	1,21	100,00	8,64	4,68	54,17	10,55	8,21	77,82	12,43	7,72	62,11	78,82	Tinggi
2,1,1,4,4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	2,53	2,53	100,00	12,54	12,54	100,00	13,04	19,88	152,45	13,78	19,33	140,28	14,68	135,07	920,10	282,57	Sangat Tinggi
2,1,1,5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**																	
2,1,1,5,1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,5,2	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelematan kebakaran	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,6	**Sosial**																	
2,1,1,6,1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	100	100,00	48	100	208,33	50	100	200,00	50	50	100,00	57	50	87,72	139,21	Sangat Tinggi
2,1,1,6,2	Persentase PMKS yang tertangani	0,21	0,2	95,24	0,21	0,24	114,29	90	87,3	97,00	20	10	50,00	26	24,12	92,77	89,86	Tinggi
2,1,1,6,3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,26	0,25	96,15	0,33	0,32	96,97	53,8	52	96,65	43	43	100,00	52	50,92	97,92	97,54	Sangat Tinggi
2,1,1,6,4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	0,21	0,2	95,24	0,22	0,23	104,55	0,08	0,06	75,00	0,02	0,03	150,00	2,5	2,42	96,80	104,32	Sangat Tinggi
2,1,1,6,5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,95	1	105,26	1,1	1,1	100,00	3,51	2,56	72,93	0,04	0,04	100,00	0,05	0,05	100,00	95,64	Sangat Tinggi
2,1,1,6,6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	63,15	60	95,01	65	61,4	94,46	80	76	95,00	82,46	79,21	96,06	85,36	84	98,41	95,79	Sangat Tinggi
2,1,1,6,7	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)	100	100	100,00	100	100	100,00	200	200	100,00	250	250	100,00	300	300	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,6,8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,1,7	**Kesatuan Bangsa Politik**																	
2,1,1,7,1	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/a	N/a	N/a	80	75	93,75	80	75	93,75	80	76	95,00	80	78	97,50	95,00	Sangat Tinggi
2,1,1,7,1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	N/a	N/a	N/a	76	77,95	102,57	76,5	80,92	105,78	76,8	79,13	103,03	77,1	Belum rilis	Belum rilis	103,79	Sangat Tinggi
2,1,1,8	**Penanggulangan Bencana**																	
2,1,1,8,1	Indeks kapasitasencana/ Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (angka)	0,77	0,77	100,00	114,96	146,07	127,06	141,14	143,44	101,63	138,26	140,56	101,66	0,62	Belum rilis	Belum rilis	107,59	Sangat Tinggi
2,1,2,	**Urusan Wajib Non Layanan Dasar**																	
2,1,2,1	**Tenaga Kerja**																	
2,1,2,1,1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	288	288	100,00	125	54,25	43,40	156	179	114,74	138	135	97,83	165	168	101,82	91,56	Sangat Tinggi
2,1,2,1,2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (kasus)	64,93	64,93	100,00	60	55,44	92,40	62	113	182,26	66	66	100,00	73	64	87,67	112,47	Sangat Tinggi
2,1,2,1,3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (persen)	13,87	13,87	100,00	10	7,21	72,10	10,74	23,98	223,28	11,48	19,15	166,81	12,2	89,8	736,07	259,65	Sangat Tinggi
2,1,2,1,4	Keselamatan dan perlindungan (persen)	86	86	100,00	78	70,74	90,69	79	79,16	100,20	80	81,05	101,31	81	0,24	0,30	78,50	Tinggi
2,1,2,1,5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)	75	75	100,00	75	80	106,67	81	112	138,27	100	101	101,00	100	166	166,00	122,39	Sangat Tinggi
2,1,2,1,6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)	89	89	100,00	89	78	87,64	81	113	139,51	84	90	107,14	87	168	193,10	125,48	Sangat Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,1,2,1,7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (persen)	72	72	100,00	72	191	265,28	81	305	376,54	84	87	103,57	87	87,5	100,57	189,19	Sangat Tinggi
2,1,2,1,8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)	75	75	100,00	78	81,12	104,00	81	81	100,00	87	87,5	100,57	87		0,00	80,91	Tinggi
2,1,2,1,9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	400	400	100,00	400	224	56,00	246	256	104,07	271	272	100,37	328	471	143,60	100,81	Sangat Tinggi
2,1,2,1,10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (persen)	45	45	100,00	43	48	111,63	53	148	279,25	58	112	193,10	64	190	296,88	196,17	Sangat Tinggi
2,1,2,1,11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (persen)	105	105	100,00	105	92	87,62	84	84	100,00	92	92	100,00	100	100	100,00	97,52	Sangat Tinggi
2,1,2,1,12	Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka)	86,12	86,12	100,00	87,92	0	0,00	89,75	0	0,00	91,62	0	0,00	93,54	11,84	12,66	22,53	Sangat Rendah
2,1,2,1,13	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK (persen)	68	68	100,00	70	78,14	111,63	73	82,43	112,92	74	83,05	112,23	75	100	133,33	114,02	Sangat Tinggi
2,1,2,1,14	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	89	89	100,00	90	91,12	101,24	91	43,3	47,58	92	99,77	108,45	93	65,7	70,65	85,58	Tinggi
2,1,2,1,15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	69,44	69,44	100,00	70,56	68,73	97,41	72,28	69,99	96,83	73,87	69,85	94,56	74,79	71,1	95,07	96,77	Sangat Tinggi
2,1,2,2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																	
2,1,2,2,1	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG) (angka)	75,79	75,8	100,01	76	76	100,00	76	77,52	102,00	76	77,52	102,00	78	78	100,00	100,80	Sangat Tinggi
2,1,2,2,2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	55,13	55,52	100,71	56,25	56,25	100,00	56,37	56,37	100,00	56,46	56,55	100,16	56,53	32,26	57,07	91,59	Sangat Tinggi
2,1,2,2,3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (persen)	27,62	28,89	104,60	28,89	28,89	100,00	56,73	31,11	54,84	30,67	28,89	94,20	35,56	7,01	19,71	74,67	Sedang
2,1,2,2,4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (persen)	80,12	85,5	106,71	89,72	89,72	100,00	91,52	91,88	100,39	93,32	93,32	100,00	95,12	95,12	100,00	101,42	Sangat Tinggi
2,1,2,2,5	Rasio KDRT(KDRT/jumlah Rumahtangga) (angka)	0,03	0,02	66,67	0,02	0,02	100,00	0,02	0,12	600,00	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00	193,33	Sangat Tinggi
2,1,2,2,6	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (persen)	30,15	30,1	99,83	30,33	30,33	100,00	28,33	28,33	100,00	26,33	26,33	100,00	24,33	24,33	100,00	99,97	Sangat Tinggi
2,1,2,2,7	Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	95,65	95,6	99,95	96,75	96,75	100,00	97,12	97,12	100,00	97,48	97,48	100,00	97,84	97,84	100,00	99,99	Sangat Tinggi
2,1,2,2,8	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (persen)	86,2	85,2	98,84	86,16	86,16	100,00	87,48	87,84	100,41	86,99	86,99	100,00	86,88	86,88	100,00	99,85	Sangat Tinggi
2,1,2,2,9	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (angka)	95,45	95,5	100,05	96,09	96,09	100,00	94,96	94,96	100,00	93,83	94,01	100,19	92,7	91,12	98,30	99,71	Sangat Tinggi
2,1,2,2,10	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (angka)	98,13	98,2	100,07	99,62	99,62	100,00	97,56	97,56	100,00	95,51	94,13	98,56	93,45	92,16	98,62	99,45	Sangat Tinggi
2,1,2,2,11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (angka)	100	108,7	108,70	113,31	113,31	100,00	114,45	114,45	100,00	115,59	113,77	98,43	116,73	114,73	98,29	101,08	Sangat Tinggi
2,1,2,3	**Pangan**																	
2,1,2,3,1	Persentase cadangan pangan masyarakat (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	236,24	236,24	100	293,69	293,69	165,99	Sangat Tinggi
2,1,2,3,2	Ketersediaan pangan utama (%)	14,81	14,81	100,00	10	23	230,00	10	30	300,00	20	31	155,00	20	42	210,00	199,00	Sangat Tinggi
2,1,2,3,3	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):	3000	5498	183,27	3000	5309	176,97	3040	3765	123,85	3040	3478	114,41	3040	3040	100,00	139,70	Sangat Tinggi
2,1,2,3,4	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	65	92,94	142,98	67	98,85	147,54	69,2	87,32	126,18	70,2	111,08	158,23	71,2	73,6	103,37	135,66	Sangat Tinggi
2,1,2,3,5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (angka)	79	79,5	100,63	79,5	97	122,01	81	77,8	96,05	82	90,42	110,27	83	86,65	104,40	106,67	Sangat Tinggi
2,1,2,3,6	Persentase penanganan daerah rawan pangan (persen)	n/a	n/a	-	22	23,4	106,36	21	49	233,33	19	17,05	89,74	15	15,34	102,27	106,34	Sangat Tinggi
2,1,2,4	**Pertanahan**																	
2,1,2,4,1	Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	8,45	8,45	100,00	9,29	9,29	100,00	10,22	9,29	90,90	11,24	11,24	100,00	12,37	12,37	100,00	98,18	Sangat Tinggi
2,1,2,5	**Lingkungan Hidup**																	
2,1,2,5,1	Tersusunnya RPPLH Provinsi (dokumen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,5,2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi (dokumen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,5,3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi (dokumen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,5,4	Indeks kualitas air (poin)	61,67	61,67	100,00	61,67	65,19	105,71	55,84	86	154,01	55,71	88,39	158,66	63,63	97,31	152,93	134,26	Sangat Tinggi
2,1,2,5,5	Indeks kualitas udara (poin)	91,18	91,18	100,00	91,18	90,28	99,01	91,33	91,86	100,58	91,86	101,64	110,65	91,88	101,54	110,51	104,15	Sangat Tinggi
2,1,2,5,6	Indeks kualitas lahan (poin)	83,88	83,88	100,00	83,88	84,68	100,95	83,1	98,13	118,09	86,27	82,48	95,61	83,19	96,43	115,92	106,11	Sangat Tinggi
2,1,2,5,7	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	61,76	61,76	100,00	61,76	70,03	113,39	87,36	124,75	142,80	88,42	125,21	141,61	71,81	79,81	111,14	121,79	Sangat Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,1,2,5,13	Emisi GRK (Juta Ton CO^2eq)	na	na	-	187861,62	187861,62	100,00	22849,42	85000,41	372,00	13125,64	49000,41	373,32	13309	48000,69	360,66	241,20	Sangat Tinggi
2,1,2,6	**Penduduk dan Capil**																	
2,1,2,6,1	Rasio bayi berakte kelahiran (angka)	0,8	0,8	100,00	0,82	0,81	98,78	0,84		0,00	0,86		0,00	0,88	0,87	98,86	59,53	Rendah
2,1,2,6,2	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (persen)	80	80	100,00	82	91,84	112,00	86	100	116,28	90	100	111,11	94	99,64	106,00	109,08	Sangat Tinggi
2,1,2,6,3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (data)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	Ada	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,6,4	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,6,5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,6,6	Pemanfaatan data kependudukan (persen)	50	50	100,00	55	100,1	182,00	60	58	96,67	65	64,12	98,65	70	69,15	98,79	115,22	Sangat Tinggi
2,1,2,7	**Pemberdayaan Masyrakat dan Desa**																	
2,1,2,7,1	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tatakelola Pemerintahan Desa	2830	2850	100,71	2988	2988	100,00	3040	168	5,53	4060	5.796	142,76	5080	5080	100,00	89,80	Tinggi
2,1,2,7,2	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik	65	65	100,00	70	70	100,00	75,05	75,05	100,00	80	80	100,00	85,05	85,05	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,7,3	Persentase PKK aktif	90	90	100,00	92	100	108,70	95,94	100	104,23	96,88	100	103,22	97,78	98	100,22	103,27	Sangat Tinggi
2,1,2,7,4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	1674	1674,00	414,80	Sangat Tinggi
2,1,2,7,5	Jumlah Desa Mandiri	12	12	100,00	19	19	100,00	24	42	175,00	29	132	455,17	34	100	294,12	224,86	Sangat Tinggi
2,1,2,7,6	Jumlah Desa Maju	267	267	100,00	346	346	100,00	351	522	148,72	356	666	187,08	361	100	27,70	112,70	Sangat Tinggi
2,1,2,7,7	Jumlah Desa Berkembang	1098	1096	99,82	1096	1096	100,00	1101	995	90,37	1106	893	80,74	1111	279	25,11	79,21	Tinggi
2,1,2,7,8	Jumlah Desa Tertinggal	434	436	100,46	355	355	100,00	345	266	77,10	332	151	45,48	321	779	242,68	113,14	Sangat Tinggi
2,1,2,7,9	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	31	31	100,00	26	26	100,00	21	17	80,95	19	0	0,00	15	753	5020,00	1060,19	Sangat Tinggi
2,1,2,7,10	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	25,35	25,35	100,00	20,68	20,68	100,00	19,87	3052	15359,84	19,06	0	0,00	18,24	31	169,96	3145,96	Sangat Tinggi
2,1,2,8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																	
2,1,2,8,1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen)	1,25	1,22	97,60	1,33	1,62	121,80	1,26	1,53	121,43	1,2	1,22	101,67	1,14	1,2	105,26	109,55	Sangat Tinggi
2,1,2,8,2	Rasio akseptor KB (angka)	75,62	75,6	99,97	78,7	78,7	100,00	0,78	0,59	75,64	0,78	0,78	100,00	0,78	0,78	100,00	95,12	Sangat Tinggi
2,1,2,8,3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (persen)	73,31	73,2	99,85	75,3	75,3	100,00	78,09	46,78	59,91	78,13	78,13	100,00	78,15	67,72	86,65	89,28	Tinggi
2,1,2,9	**Perhubungan**																	
2,1,2,9,1	Rasio konektivitas provinsi	0,55	0,55	100,00	0,56	0,56	100,00	0,57	0,57	100,00	0,58	0,77	132,76	0,6	0,77	128,33	112,22	Sangat Tinggi
2,1,2,9,2	Indeks kepuasan masyarakat terhdap layanan public sector transportasi	0,000005	0,000005	100,00	0,7	0,67	95,71	0,8	0,69	86,25	0,9	0,7	77,78	1	0,77	77,00	87,35	Tinggi
2,1,2,9,3	Rasio kejadian kecelakan transportasi per 100,000 keberangkatan	0,01	0,01	100,00	0,1	0,01	10,00	0,1	11,3	11300,00	0,01	0,02	200,00	0,01	0	0,00	2322,00	Sangat Tinggi
2,1,2,9,4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara /Terminal Bis	35	35	100,00	35	8	22,86	35	8	22,86	35	8	22,86	35	35	100,00	53,71	Rendah
2,1,2,9,5	Persentase layanan angkutan darat (persen)	9,83	9,83	100,00	100	60	60,00	100	60	60,00	100	80	80,00	100	80	80,00	76,00	Tinggi
2,1,2,9,6	Rasio panjang jalan per jumlah kendarann (angka)	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	100,00	0,01	0,05	500,00	0,01	0,01	100,00	180,00	Sangat Tinggi
2,1,2,9,7	Jumlah barang yang terangkut angktan umum (ton)	87.309	87.309	100,00	103984	11360	10,92	94207	7200	7,64	92867	5964	6,42	95167	95167	100,00	45,00	Sangat Rendah
2,1,2,9,8	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	100,00	0,2	0	0,00	0,19	0,19	100,00	80,00	Tinggi
2,1,2,9,9	Pemasangan rambu-rambu	151	151	100,00	160	219	136,88	165	165	100,00	170	601	353,53	175	329	188,00	175,68	Sangat Tinggi
2,1,2,10	**Komunikasi dan Informatika**																	
2,1,2,10,1	Indeks Pelayanan Komunikasi Publik yang Infromatif	39	50	128,21	40	88,98	222,45	45	93,8	208,44	93,8	78,11	83,27	84	82,16	97,81	148,04	Sangat Tinggi
2,1,2,10,2	Persentase Sistem Jaringan dan Aplikasi Informatika	2,14	2,14	100,00	2,24	2,24	100,00	2,39	2,26	94,56	2,54	3,14	123,62	3,15	2,91	92,38	102,11	Sangat Tinggi
2,1,2,10,3	Cakupan data statistik sektoral	35	35	100,00	40	40	100,00	43	43	100,00	45	45	100,00	47	160	340,43	148,09	Sangat Tinggi
2,1,2,10,4	Indeks keamanan informasi	15	15	100,00	20	20	100,00	25	25	100,00	20	14,11	70,55	25	67,13	268,52	127,81	Sangat Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,1,2,10,5	Persentase konten informasi terkkait program dan kebijakan pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemda (tema protocol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)	20	20	100,00	20	20	100,00	25	25	100,00	30	30	100,00	35	35	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,10,6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (persen)	0,57	0,57	100,00	0,57	0,57	100,00	1,14	5,14	450,88	1,71	6,86	401,17	2,29	2,29	100,00	230,41	Sangat Tinggi
2,1,2,10,7	Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jml Tower)	0,94	0,94	100,00	80	80	100,00	96	96	100,00	97	97	100,00	98	98	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,10,8	Persentase penduduk yang menggnakan HP/telpon (persen)	60,23	60,23	100,00	79,01	79,01	100,00	65,23	77,47	118,76	67,73	0	0,00	70,23	70,23	100,00	83,75	Tinggi
2,1,2,10,9	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase) (angka)	0,25	0,25	100,00	0,45	0,45	100,00	0,47	0,47	100,00	0,58	0,58	100,00	0,69	0,69	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,10,10	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (angka)	0,35	0,35	100,00	0,5	0,5	100,00	0,55	0,55	100,00	0,65	0,65	100,00	0,75	0,75	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,10,11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (poin)	2,14	2,14	100,00	61,61	1,38	2,24	2,39	2,26	94,56	2,54	3,14	123,62	2,69	4,5	167,29	97,54	Sangat Tinggi
2,1,2,11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																	
2,1,2,11,1	Persentase Koperasi aktif	55,45	55,45	100,00	65,7	55,2	84,02	55,92	66,36	118,67	56,15	67,57	120,34	56,38	69,67	123,57	109,32	Sangat Tinggi
2,1,2,11,2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	50	50	100,00	53	53	100,00	54	0	0,00	56	0	0,00	58	0	0,00	40,00	Sangat Rendah
2,1,2,11,3	Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM) (pesen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,42	99,42	100,00	97,1	97,5	100,41	99,48	99,52	100,04	99,51	99,52	100,01	99,54	99,41	99,87	100,07	Sangat Tinggi
	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	2,00	3,04	152,00	1,35	2,94	217,78	1,35	1,47	108,89	1,45	1,47	101,38	1,54	2,81	182,47	152,50	Sangat Tinggi
2,1,2,11,4	Persentase Koperasi Berkualitas	5,60	11,54	206,07	5,77	21,67	375,56	5,77	7,25	125,65	3,85	8,11	210,65	3,85	12,67	329,09	249,40	Sangat Tinggi
2,1,2,11,5	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	5,00	4,5	90,00	6,5	1,39	21,38	5,57	6,24	112,03	4,06	4,04	99,51	4,44	4,44	100,00	84,58	Tinggi
2,1,2,12	**Penanaman Modal**																	
2,1,2,12,1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	67,8	287	423,30	68	425	625,00	403	1127	279,65	461	4943	1072,23	519	878	169,17	513,87	Sangat Tinggi
2,1,2,12,2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)	30,8	**30,9**	100,32	18550510	18550510	100,00	33750000	33750000	100,00	35750000	35750000	100,00	37750000	37750000	100,00	100,06	Sangat Tinggi
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,00	97,00	121,25	81,26	98	120,60	93	98	105,38	94	99	105,32	95	87	91,58	108,82	Sangat Tinggi
2,1,2,13	**Kepemudaan dan Olah Raga**																	
2,1,2,13,1	Indeks Pembangunan Pemuda	55,58	52,17	93,86	58,01	54,17	93,38	60,18	52,17	86,69	62,35	60	96,23	64,52	0	0,00	74,03	Sedang
2,1,2,13,2	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi)	8	10	125,00	2	0,33	16,50	54	0,33	0,61	56	2	3,57	58	0	0,00	29,14	Sangat Rendah
2,1,2,13,3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen)	11,68	11,5	98,46	12	12	100,00	15	15	100,00	20	20	100,00	25	25	100,00	99,69	Sangat Tinggi
2,1,2,13,4	Jumlah atlet berprestasi	12	12	100,00	15	15	100,00	20	32	160,00	25	25	100,00	30	30	100,00	112,00	Sangat Tinggi
2,1,2,13,5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (jumlah)	15	15	100,00	18	18	100,00	20	20	100,00	22	22	100,00	24	24	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,14	**Statistik**																	
2,1,2,14,1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,14,2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,14,3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,15	**Persandian**																	
2,1,2,15,1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi (persen)	20	20	100,00	20	20	100,00	40	40	100,00	60	60	100,00	80	80	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,16	**Kebudayaan**																	
2,15,1	Penyelanggara festival seni dan budaya (event/kegiatan)	15	15	100,00	18	18	100,00	18	18	100,00	18	18	100,00	19	19	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,15,2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (benda/situs)	60	60	100,00	62,5	62,5	100,00	67,5	67,5	100,00	72,5	72,5	100,00	77,5	77,5	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,15,3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	3	100,00	3	3	100,00	4	4	100,00	5	5	100,00	6	6	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,15,4	% penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni sebagai sumber penghasilan	60	60	100,00	70	65	92,86	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	98,57	Sangat Tinggi
2,15,5	Pembinaan dan pengelolaan seni budaya, dan perfiliman	70	70	100,00	71	65	91,55	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	98,31	Sangat Tinggi
2,15,6	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	70	70	100,00	72	65	90,28	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	98,06	Sangat Tinggi
2,15,7	% penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong	70	70	100,00	73	65	89,04	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	97,81	Sangat Tinggi
2,15,8	% CB yang telah ditetepkan	25	25	100,00	30	25	83,33	30	30	100,00	35	35	100,00	40	40	100,00	96,67	Sangat Tinggi
2,15,9	% WB yang telah ditetapkan	25	25	100,00	30	25	83,33	30	30	100,00	35	35	100,00	40	40	100,00	96,67	Sangat Tinggi
2.15.11	% penduduk >10 th menonton pertunjukkan seni	25	25	100,00	30	25	83,33	30	30	100,00	35	35	100,00	40	40	100,00	96,67	Sangat Tinggi
2.15.12	% penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah	25	25	100,00	30	25	83,33	30	30	100,00	35	35	100,00	40	40	100,00	96,67	Sangat Tinggi
2.15.13	% RT menyelenggaeakan ucapan adat	25	25	100,00	25	25	100,00	30	30	100,00	35	35	100,00	40	40	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2.15.14	% penduduk >10 th yang terlibat pelaku pertunukkan seni	65	65	100,00	70	65	92,86	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	98,57	Sangat Tinggi
2.15.15	% RT menyelenggarakan upacara adat	25	25	100,00	70	65	92,86	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	98,57	Sangat Tinggi
2.15.16	Jumlah grup kesenian per 10000 penduduk	0,7	0,7	100,00	0,9	0,88	97,78	0,9	0,9	100,00	1	1	100,00	1,5	1,5	100,00	99,56	Sangat Tinggi
2.15.17	% penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	60	60	100,00	65	65	100,00	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2.15.18	% penduduk > 10 th yang mengunungi	60	60	100,00	65	65	100,00	70	70	100,00	75	75	100,00	80	80	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,17	**Perpustakaan**																	
2,1,2,17,1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	87000	85000	97,70	8665	17.069	196,99	10377	26065	251,18	12089	25064	207,33	13801	34348	248,88	200,42	Sangat Tinggi
2,1,2,17,2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	420360	420360	100,00	45873	373.096	813,32	52492,8	373096	710,76	59112,6	373096	631,16	65732,4	37663	57,30	462,51	Sangat Tinggi
2,1,2,17,3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (angka)	0,12	0,12	100,00	0,17	0,15	88,24	0,18	0,15	83,33	0,19	0,15	78,95	0,2	0,15	75,00	85,10	Tinggi
2,1,2,17,4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	700	700	100,00	722	1.422	196,95	865	2172	251,10	1007	2089	207,45	1150	2029	176,43	186,39	Sangat Tinggi
2,1,2,17,5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	20000	20000	100,00	2500	2.817	112,68	2654	3817	143,82	2808	2808	100,00	2962	2962	100,00	111,30	Sangat Tinggi
2,1,2,17,6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki setrifikat (orang)	25	25	100,00	28	29	103,57	29	38	131,03	30	29	96,67	30	23	76,67	101,59	Sangat Tinggi
2,1,2,18	**Kearsipan**																	
2,1,2,18,1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,1,2,18,2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	8	8	100,00	8	8	100,00	8	14	175,00	8	9	112,50	11	11	100,00	117,50	Sangat Tinggi
2,2,	**Urusan Pemerintahan Pilihan**																	
2,2,1	**Pariwisata**																	
2,2,1,1	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp milyar)	10	10	100,00	45	45	100,00	50	50	100,00	100	100	100,00	150	150	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,2,1,2	Capaian Kunjungan Wisata (persen)	47,77	47,77	100,00	17,85	17,85	100,00	80,88	92,57	114,45	81,19	288	354,72	81,5	167,58	205,62	174,96	Sangat Tinggi
2,2,1,3	Rata-rata Lama kunjungan Wisata (hari)	1,5	1,5	100,00	01-Feb	01-Feb	100,00	3,5	6	171,43	6,5	5	76,92	7,5	5	66,67	103,00	Sangat Tinggi
2,2,1,4	Lama kunjungan Wisata (Wisman) (hari)	1	1	100,00	01-Feb	01-Feb	100,00	1	1,45	145,00	5	5	100,00	5	5	100,00	109,00	Sangat Tinggi
2,2,1,5	Lama kunjungan Wisata (Wisnus) (hari)	2	2	100,00	01-Feb	01-Feb	100,00	6	3	50,00	8	3	37,50	10	3	30,00	63,50	Rendah
2,2,1,6	Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata	1	1	100,00	1	1	100,00	4	7	175,00	5	11	220,00	6	7	116,67	142,33	Sangat Tinggi
2,2,1,7	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kegiatan)	2	2	100,00	3	3	100,00	4	7	175,00	5	11	220,00	6	7	116,67	142,33	Sangat Tinggi
2,2,1,8	Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan (unit)	5	5	100,00	14	14	100,00	9	16	177,78	11	50	454,55	13	50	384,62	243,39	Sangat Tinggi
2,2,1,9	Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata (kali)	2	2	100,00	3	3	100,00	4	5	125,00	5	1	20,00	6	1	16,67	72,33	Sedang
2,2,1,10	Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan (kali)	5	5	100,00	7	7	100,00	9	8	88,89	11	1	9,09	13	1	7,69	61,13	Rendah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,2,1,11	Jumlah potensi baru pariwisata (objek)	1	1	100,00	487	487	100,00	30	30	100,00	3	3	100,00	4	4	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,2,3	**Pertanian**																	
2,2,3,1	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB) (persen)	32,02	32,02	100,00	14,03	14,03	100,00	22,39	14,03	62,66	21,92	21,92	100,00	21,57	21,57	100,00	92,53	Sangat Tinggi
	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK) (persen)	22,06	22,06	100,00	15,82	15,82	100,00	20,84	15,82	75,91	20,16	20,16	100,00	19,59	19,59	100,00	95,18	Sangat Tinggi
2,2,3,2	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	3,03	3,03	100,00	2,9	2,45	84,48	2,74	2,45	89,42	2,6	2,08	80,00	2,48	2,17	87,50	88,28	Tinggi
2,2,3,3	Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	2,03	2,03	100,00	4,05	1,69	41,73	4,13	1,69	40,92	4,26	1,43	33,57	2,48	1,48	59,68	55,18	Rendah
2,2,3,4	Peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) (%)(persen)	n/a	n/a	n/a	1,03	1,03	100,00	1,1	1,11	100,91	1,2	1,2	100,00	1,3	1,3	100,00	100,23	Sangat Tinggi
2,2,3,5	Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ ha)																	
2,2,3,5	Padi	4,49	4,49	100,00	4,49	4,67	104,01	4,51	4,51	100,00	4,54	4,59	101,10	4,61	4,43	96,10	100,24	Sangat Tinggi
	Jagung	4,23	4,23	100,00	4,23	4,33	102,36	4,31	4,65	107,89	4,35	4,35	100,00	4,43	4,66	105,19	103,09	Sangat Tinggi
2,2,3,6	Kedelai	1,5	1,5	100,00	1,25	1,25	100,00	1,27	1,27	100,00	1,3	1,45	111,54	1,47	1,43	97,28	101,76	Sangat Tinggi
2,2,3,7	Kacang Tanah	0,71	0,71	100,00	1,02	1,03	100,98	1,15	1,16	100,87	1,2	1,66	138,33	1,67	1,44	86,23	105,28	Sangat Tinggi
	Kacang Hijau	0,66	0,66	100,00	0,75	0,93	124,00	0,77	0,94	122,08	0,78	0,98	125,64	0,99	0,89	89,90	112,32	Sangat Tinggi
	Ubi Kayu	26,51	26,51	100,00	24,79	23,97	96,69	24,98	24,98	100,00	25,35	20,99	82,80	25,45	22,39	87,98	93,49	Sangat Tinggi
	Ubi Jalar	15,74	15,74	100,00	11,52	18,55	161,02	11,75	18,9	160,85	11,95	11,97	100,17	12,09	12,17	100,66	124,54	Sangat Tinggi
	Tomat	16,86	16,86	100,00	6	6	100,00	6,15	6,3	102,44	6,03	5,52	91,54	6,18	6,19	100,16	98,83	Sangat Tinggi
	Cabe rawit	6,12	6,12	100,00	5,1	5,1	100,00	5,15	14,15	274,76	5,25	4,66	88,76	5,35	5,36	100,19	132,74	Sangat Tinggi
	Bawang merah	5,23	5,23	100,00	6,55	5,97	91,15	6,56	6,57	100,15	6,58	7,68	116,72	7,69	7,72	100,39	101,68	Sangat Tinggi
	Durian	1,74	1,74	100,00	6,28	16,8	267,52	6,3	16,82	266,98	6,45	5,95	92,25	6,73	6,74	100,15	165,38	Sangat Tinggi
	NTP Tanaman Pangan	97,58	97,58	100,00	93,98	96,96	103,17	97,6	95,68	98,03	98,86	96,34	97,45	99,57	95,39	95,80	98,89	Sangat Tinggi
	NTP Hortikultura	95	95	100,00	102,54	99,38	96,92	103,65	112,16	108,21	103,76	106,56	102,70	116,47	135,84	116,63	104,89	Sangat Tinggi
2,2,4,	**Perkebunan, Peternakan dan Keswan**																	
2,2,4,1	Kontribusi terhadap PDRB (persen)																	
	- Sub Sektor Perkebunan	8,75	8,75	100,00	8,2	8,2	100,00	8,14	8,2	100,74	7,03	7,03	100,00	7	7	100,00	100,15	Sangat Tinggi
	"- Sub Sektor Peternakan	1,67	1,67	100,00	1,46	1,46	100,00	1,46	1,4	95,89	1,25	1,25	100,00	1,28	1,28	100,00	99,18	Sangat Tinggi
2,2,4,2	Produktivitas Komoditas Unggulan perkebunan (Kg/Ha)																	
	- Kelapa Dalam	1.187	1.187	100,00	0,91	0,91	100,00	1195	98,68	8,26	1202	100,59	8,37	1155	99,48	8,61	45,05	Sangat Rendah
	- Cengkeh	394	394	100,00	0,3	0,3	100,00	398	88,44	22,22	416	99,05	23,81	420	94,17	22,42	53,69	Rendah
	- Kopi	602	602	100,00	0,37	0,37	100,00	644	106,1	16,48	661	108,54	16,42	536	86,59	16,15	49,81	Sangat Rendah
	- Kakao	692	692	100,00	0,47	0,47	100,00	708	95,03	13,42	729	104,14	14,29	707	99,16	14,03	48,35	Sangat Rendah
	- Pala	239	239	100,00	0,05	0,05	100,00	220	86,27	39,21	175	102,94	58,82	151	95,57	63,29	72,27	Sedang
	- Kelapa Sawit	2.893	2.893	100,00	2,17	2,17	100,00	3405	119,14	3,50	3529	123,39	3,50	3487	97,29	2,79	41,96	Sangat Rendah
2,2,4,3	Populasi Ternah Sapi (Ekor)	402.191	402.191	100,00	434070	434070	100,00	468796	434070	92,59	491743	461563	93,86	546803	207356	37,92	84,88	Tinggi
2,2,4,4	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)																	Sangat Rendah
	- Perkebunan	47,89	47,89	100,00	47,89	47,89	100,00	59,81	59,81	100,00	70,23	108,56	154,58	160	160	100,00	110,92	Sangat Tinggi
	- Peternakan	32,97	32,97	100,00	32,97	32,97	100,00	38,49	38,49	100,00	50,21	108,26	215,61	220	220	100,00	123,12	Sangat Tinggi
2,2,4,5	NTP Perkebunan	93,5	93,5	100,00	101,16	107,93	106,69	101,41	103,5	102,06	101,66	111,19	109,37	101,91	133,63	131,13	109,85	Sangat Tinggi
2,2,4,6	NTP Peternakan	96,36	96,36	100,00	98,25	97,98	99,73	99	100,26	101,27	99,75	103,36	103,62	100,5	104,33	103,81	101,69	Sangat Tinggi
2,2,5,	**Kehutanan**																	
2,2,5,1	Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	N/a	N/a	N/a	2,17	4,74	218,43	2,27	5,19	228,63	8,65	9,09	105,09	9,28	9,81	105,71	164,47	Sangat Tinggi
2,2,5,2	Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	N/a	N/a	N/a	27,91	27,91	100,00	0,45	1,62	360,00	2,06	4,41	214,08	1,34	4,82	359,70	258,44	Sangat Tinggi
2,2,6,	**Energi dan Sumber Daya Mineral**																	
2,2,6,1	Persentase rumah tangga pengguna listrik (persen)	96,03	96,03	100,00	97	97	100,00	98,84	98,84	100,00	99,14	98,99	99,85	99,44	99,44	100,00	99,97	Sangat Tinggi
2,2,6,2	Persentase desa teraliri listrik(persen)	99,8	99,8	100,00	99,86	99,86	100,00	99,9	99,9	100,00	100	100	100,00	100		0,00	80,00	Tinggi
2,2,6,3	Porsi EBT dalam bauran	9,96	9,96	100,00	14,58	14,58	100,00	15	15	100,00	18	11,06	61,44	20	10,4	52,00	82,69	Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,2,7,	**Perdagangan**																	
2,2,7,1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	4.623,43	4.623,43	100,00	3828,92	4986,17	130,22	5203,94	8659,53	166,40	9525,71	10222,21	107,31	10668,8	10540,85	98,80	120,55	Sangat Tinggi
2,2,7,2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	5,8	96,67	6,5	7	107,69	7,5	7,9	131,66	8	6,9	86,25	8,5	5,7	67,06	89,42	Tinggi
2,2,7,3	Inflasi pangan bergejolak (%)	2	2,5	125,00	3	2,58	86,00	4	2,95	98,33	5	0,52	10,40	6	1,07	35,66	71,08	Sedang
2,2,8,	**Perindustrian**																	
2,2,8,1	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US$ juta)	823	823	100,00	1097	11034,43	1005,87	1371	17087,26	1246,34	13000	17106,95	131,59	16000	17828,09	111,43	519,05	Sangat Tinggi
2,2,8,2	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.735	67.735	100,00	67823	101240	149,27	67911	133240	196,20	134490	134900	100,30	136000	135160	99,38	129,03	Sangat Tinggi
2,2,8,3	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	13,83	100,00	13,83	13,83	100,00	11	12,43	113,00	11	15,23	138,45	11	14,34	130,36	116,36	Sangat Tinggi
2,2,9,	**Transmigrasi**																	
2,2,9,1	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	50	50	100,00	50	50	100,00	53	51,42	97,02	56	55,65	99,38	59	52,25	88,56	169,49	Sangat Tinggi
		260 KK	260 KK	100,00	280 KK	280 KK	100,00	300 KK	300 KK	100,00	320 KK	320 KK	100,00	350 KK	350 KK	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,2,9,2	Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	35	35	100,00	35	25,53	72,94	25,89	30,61	118,23	27,24	68	249,63	28,85	50,39	174,66	143,09	Sangat Tinggi
2,2,9,3	Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	1000	1000	100,00	1567	1567	100,00	1738	590	33,95	1909	620	32,48	2080	383	18,41	56,97	Rendah
2,2,10,	**Perikanan**																	
2,2,10,1	Produksi Perikanan (ton)	1.350.480,00	1.118.120,73	82,79	1.473.544,00	939.907,08	63,79	1.491.003,02	921.126,39	61,78	1.553.448,08	1.137.029,68	73,19	1.618.991,18	1.094.383,60	67,60	69,83	Sedang
	Persentase produksi (persen)	75	60,05	80,07	80	63,79	79,73	85	61,78	72,68	90	73,19	81,33	95	67,60	71,15	76,99	Tinggi
	- Produksi Perikanan Budidaya	1.110.780,00	940.767,93	84,69	1.223.089,22	731.966,58	59,85	1.238.813,65	696.328,60	56,21	1.300.754,33	763.520,32	58,70	1.365.792,04	803.370,46	58,82	63,65	Rendah
	- Produksi Perikanan Tangkap	239.700,00	177.352,80	73,99	250.454,78	207.940,50	83,03	252.189,37	224.797,79	89,14	252.693,75	373.509,36	147,81	253.199,14	291.013,15	114,93	101,78	Sangat Tinggi
2,2,10,1	Produksi Perikanan yang diolahan (Kg)	3.123,42	5.646.000	########	312442	5073437	1623,80	3185,89	13079322	410539,03	3249,61	6432115	197934,98	3314,6	6844871	206506,70	199473,58	Sangat Tinggi
2,2,10,2	Konsumsi Ikan (Kg / Kap /Thn)	57,54	57,54	100,00	55,39	67,04	121,03	55,39	67,36	121,61	57,05	71,85	125,94	58,77	71,85	122,26	118,17	Sangat Tinggi
2,2,10,3	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku, %)	4,55	4,55	100,00	4,68	3,72	79,49	4,68	3,1	66,24	4,79	3,06	63,88	4,95	3,06	61,82	74,29	Sedang
2,2,10,4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (persen)	48,78	48,78	100,00	54,15	64,54	119,19	58,89	40,62	68,98	67,77	56,87	83,92	76,72	66,26	86,37	91,69	Sangat Tinggi
2,2,10,5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	0,31	0,31	100,00	0,26	0,31	119,23	0,26	0,35	134,62	0,27	0,48	177,78	0,28	0,66	235,71	153,47	Sangat Tinggi
2,2,10,6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	9,8	9,8	100,00	< 50%	< 50%	100,00	< 50%	< 50%	100,00	< 60%	< 60%	100,00	< 60%	< 60%	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,2,10,7	Nilai Tukar Nelayan	98,11	98,11	100,00	108,76	103,27	94,95	108,98	104,4	95,80	109,2	104,04	95,27	109,41	93,88	85,81	94,37	Sangat Tinggi
	Nilai Tukar Pembudidaya	100,01	100,01	100,00	87	99,94	114,87	100	105,12	105,12	100,5	100,47	99,97	101	92,01	91,10	102,21	Sangat Tinggi
2,2,10,8	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (kasus)	86	86	100,00	86	100	116,28	87	87	100,00	88	150	170,45	89	110	123,60	122,07	Sangat Tinggi
2,2,10,9	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	150	150	100,00	150	222	148,00	200	228	114,00	250	265	106,00	89	277	311,24	155,85	Sangat Tinggi
2,2,10,10	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (angka)	17,84	17,84	100,00	0,18	0,18	100,00	0,19	0,18	94,74	19,98	0,2	1,00	0,21	0,19	90,48	77,24	Tinggi
2,3,	**Urusan Penunjang**																	
2,3,1,	**Perencanaan Pembangunan**																	
2,3,1,1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (angka)	70	71	101,43	72	72	100,00	73	75,05	102,81	74	74,05	100,07	75	75,1	100,13	100,89	Sangat Tinggi
2,3,1,2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,1,3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,2,	**Keuangan**																	
2,3,2,1	Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2,3,2,2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2,3,2,3	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan (persen)	26	26,78	103,00	28,34	28,84	101,76	30,47	31,86	104,56	30,57	37,74	123,45	31,3	38,07	121,63	110,88	Sangat Tinggi
2,3,3,	**Kepegawaian dan Diklat**																	
2,3,3,1	Indeks profesionalitas ASN (angka)	58	60	103,45	60	36,97	61,62	61	67,59	110,80	71	76,38	107,58	80	0	0,00	76,69	Tinggi
2,3,3,2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (persen)	14	14,38	102,71	17,59	25,71	146,16	20,97	30,21	144,06	25,34	37,94	149,72	30,86	49,38	160,01	140,54	Sangat Tinggi
2,3,3,3	Persentase Pejabat ASN yang telah manejerial (persen)	58	57,6	99,31	60,9	59,32	97,41	62,4	42,6	68,27	68	44,51	65,46	73,5	49,28	67,05	79,50	Tinggi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2,3,4,	**Penelitian dan pengembangan**																	
2,3,4,1	Persentase implementasi rencana kelitbangan, (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100		0,00	100		0,00	60,00	Rendah
2,3,4,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,4,3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,4,4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, (persen)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,5	**Pengawasan**																	
1,3,5,1	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	2	2,08	104,00	2,08	2,08	100,00	10,42	18,75	179,94	33,33	38,78	116,35	100	100	100,00	120,06	Sangat Tinggi
1,3,5,2	Nilai Muturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3,1	3,1	100,00	3,1	3,1	100,00	3,9	3,1	79,49	3,2	3,2	100,00	3,5	2,87	82,00	92,30	Sangat Tinggi
2,3,6	**Kesekretariatan Daerah**																	
2,3,6,1	Status Kinerja LPPD	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,6,2	Indeks Kualitas Kebijakan	80-82	80-82	100,00	80-82	80-82	100,00	83-85	83-85	100,00	86-88	86-88	100,00	89-91	89-91	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,6,3	MoU (Perjanjian kerja sama)	8	8	100,00	23	23	100,00	12	23	191,67	14	14	100,00	16	16	100,00	118,33	Sangat Tinggi
2,3,6,4	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	95,74	95,74	100,00	95,75	95,75	100,00	95,78	95,78	100,00	95,81	95,81	100,00	95,85	95,85	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,6,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	107,14	80	88,62	110,78	90	88,56	98,40	85	85	100,00	88,5	88,5	100,00	103,26	Sangat Tinggi
2,3,6,6	Jumlah kajian akademik persiapan DOB (dokumen)	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,3,7	**Sekwan**																	
2,3,7,1	Indeks Kepuasan Layanan Dprd	n/a	n/a	n/a	79	79	100,00	80	87,25	109,06	85	86,73	102,04	88,5	89,19	100,78	103,96	Sangat Tinggi
2,3,7,2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Dprd	n/a	n/a	n/a	88,62	88,62	100,00	80	88,56	110,70	85	86,81	102,13	88,5	88,42	99,91	103,18	Sangat Tinggi
2,4	**ASPEK DAYA SAING**																	
2,4,1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**																	
2,4,1,1,	Total pengeluaran rumah tangga (Rp)	1052616	1552616	147,50	110948	1264589	1139,80	1121395	1121395	100,00	1165842	1165842	100,00	1210289	1210289	100,00	317,46	Sangat Tinggi
2,4,1,2,	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen)	50	100,32	200,64	50,75	50,75	100,00	48,02	48,02	100,00	47,85	47,85	100,00	47,7	47,7	100,00	120,13	Sangat Tinggi
	Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)	1035777	1035777	100,00	641744	641744	100,00	538452	538452	100,00	557889	557889	100,00	577325	577325	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,4,1,3,	Nilai Tukar Petani Gabungan (persen)	97,58	97,58	100,00	99,7	99,7	100,00	101,58	101,62	100,04	103,58	103,58	100,00	105,58	105,58	100,00	100,01	Sangat Tinggi
2,4,1,4,	Indeks Inovasi Daerah (angka)	32,43	32,43	100,00	32,2	49,57	153,94	33,5	45,55	135,97	35	34	97,14	40	55,22	138,05	125,02	Sangat Tinggi
2,4,1,5,	Indeks Daya Saing Daerah (angka)	2,31	2,41	104,33	2,71	3,15	116,24	2,91	3,23	111,00	3,2	3,25	101,56	3,5	3,3	94,29	105,48	Sangat Tinggi
2,4,2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**																	
2,4,2,1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	0,01	0,01	100,00	0,01	0,015	150,00	0,01	0,01	100,00	0,01	0,05	500,00	0,01	0,01	100,00	190,00	Sangat Tinggi
2,4,2,2	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut) (orang)	79013	79013	100,00	700241	750532	107,18	98732	98732	100,00	180479	180479	100,00	66617	66617	100,00	101,44	Sangat Tinggi
2,4,2,3	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa)	87309	87309	100,00	160344	160344	100,00	141045	141045	100,00	257853	257853	100,00	95167	95167	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,4,2,4	Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)	815	815	100,00	815	815	100,00	900	900	100,00	900	900	100,00	900	900	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,4,3	**Fokus Iklim Berinvestasi**																	
2,4,3,1	Angka kriminalitas (kasus)	7208	7208	100,00	6739	6739	100,00	5863	5453	93,01	5191	8944	172,30	4519	9252	204,74	134,01	Sangat Tinggi
2,4,3,2	Rasio Ekspor + Impor/ pdrb(indiktor keterbukan ekonomi) (angka)	0,99	0,99	100,00	1,02	1,02	100,00	1,04	1,04	100,00	1,07	1,07	100,00	1,09	1,09	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,4,4	**Fokus Sumberdaya Manusia**																	
2,4,4,1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	86,12	86,12	100,00	87,92	87,92	100,00	89,75	89,75	100,00	91,62	91,62	100,00	93,54	93,54	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2,4,4,2	Rasio Ketergantungan (angka)	51,02	51,02	100,00	48,92	47,11	96,30	50,54	46	91,02	50,3	46,77	92,98	50,06	48,03	95,94	95,25	Sangat Tinggi

2.1.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Keberadaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting karena merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal berperan penting dalam menjamin kualitas dan pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat. SPM menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang minimal dan berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial. SPM di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dan pengakuan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan Kinerja Terbaik Regional Sulawesi dalam SPM *Awards* 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan atas penerapan dan pelaporan capaian SPM yang optimal, dengan penilaian berdasarkan indikator kinerja, konsistensi pelaporan, dan dampak nyata kepada masyarakat. Selain itu, ada pula pelatihan pengawasan penerapan SPM bagi pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah.

Capaian SPM untuk masing-masing bidang urusan adalah sebagai berikut:

1. Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			91.94%	
1 .	**Pendidikan Menengah**					98.77%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	120.327	120.327	**0**	**100.00%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.77%**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	93.83%	
	SMA					92.36%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.41	**-6.41**	**100.00%**	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	76.29	**23.71**	**76.29%**	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	65.34	60.93	**4.41**	**93.25%**	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	54.43	56.15	**-1.72**	**100.00%**	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.83	2.83	**0**	**100.00%**	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.45	1.45	**0**	**100.00%**	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77.95	70.7	**7.25**	**90.70%**	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75.23	73.93	**1.3**	**98.27%**	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.87	57	**4.87**	**92.13%**	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	**0**	**100.00%**	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.78	0.39	**0.39**	**50.00%**	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	28.19	28.19	**0**	**100.00%**	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00%**	
	SMK					95.30%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.41	**-6.41**	**100.00%**	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	76.29	**23.71**	**76.29%**	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	60.92	53.88	**7.04**	**88.44%**	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	52.13	49.6	**2.53**	**95.15%**	
	5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	84.91	80.83	**4.08**	**95.19%**	
	6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	74.19	**4.81**	**93.91%**	
	7 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.75	2.75	**0**	**100.00%**	
	8 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.69	0.69	**0**	**100.00%**	
	9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	76.02	68.12	**7.9**	**89.61%**	
	10 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.75	71.34	**1.41**	**98.06%**	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.32	0.32	**0**	**100.00%**	
	12 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.11	54.86	**4.25**	**92.81%**	
	13 . Kecukupan formasi guru ASN	%	33.29	33.29	**0**	**100.00%**	
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	36.42	36.42	**0**	**100.00%**	
	15 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00%**	
2 .	**Pendidikan Khusus**					85.12%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA		**Jumlah Total Yang**	**Jumlah Total Yang**	**Yang Belum**		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	LAYANAN DASAR (80%)		**Harus Dilayani**	**Terlayani**	**Terlayani**	**66.85%**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2324	1942	**382**	**83.56%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**18.27%**				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	91.37%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.41	**-6.41**	**100.00%**	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	56.24	**43.76**	**56.24%**	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	65.97	46.14	**19.83**	**69.94%**	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	54.87	46.14	**8.73**	**84.09%**	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.06	2.06	**0**	**100.00%**	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.23	5.23	**0**	**100.00%**	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	85.6	72.62	**12.98**	**84.84%**	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.5	73.45	**0.05**	**99.93%**	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	71.41	66.26	**5.15**	**92.79%**	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	61.82	61.82	**0**	**100.00%**	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.11	0.11	**0**	**100.00%**	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	19.62	19.62	**0**	**100.00%**	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00%**	

2. Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.67%	
1 .	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**					93.33%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1201	1201	**0**	**100.00%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**13.33%**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	66.67%	
	1 . Obat-obatan dan bahan medis habis pakai **(pendukung pelayanan kesehatan)**	Orang	1201	1201	**0**	**100.00%**	
	2 . Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI **(penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)**	Orang	0	0	**0**	**0.00%**	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	3 . Makanan Tambahan untuk ibu hamil kekurangan enegi kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi **(penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)**	Orang	0	0	**0**	**0.00%**	
	4 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit) **(Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)**	Orang	0	0	**0**	**0.00%**	
	5 . Tenaga medis : Dokter	Orang	2	2	**0**	**100.00%**	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	14	14	**0**	**100.00%**	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	17	17	**0**	**100.00%**	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2	2	**0**	**100.00%**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2	2	**0**	**100.00%**	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2	2	**0**	**100.00%**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2	2	**0**	**100.00%**	
	12 . Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	0	0	**0**	**0.00%**	
2 .	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**					**100.00%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1557	1557	**0**	**100.00%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00%	
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit **(melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)**	Unit	45	45	**0**	**100.00%**	
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin **(diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)**	Unit	50	50	**0**	**100.00%**	
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier **(untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)**	Unit	4	4	**0**	**100.00%**	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	4 . Tempat sampah biologis **(sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)**	Unit	13	13	**0**	**100.00%**	
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan **(untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)**	Formulir	4	4	**0**	**100.00%**	
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) **(untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)**	Unit	2	2	**0**	**100.00%**	
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) **(untuk membantu penegakan diagnosis)**	Unit	4	4	**0**	**100.00%**	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	**0**	**100.00%**	
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	6	6	**0**	**100.00%**	
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	6	6	**0**	**100.00%**	
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	3	3	**0**	**100.00%**	
	12 . Tenaga Laboratorium	Orang	2	2	**0**	**100.00%**	
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	4	**0**	**100.00%**	
	14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	28	28	**0**	**100.00%**	

3. Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi TengahTahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100.00%	
1 .	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota**					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**	
Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	75840	75840	**0**	**100.00%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00%	
	1 SPAM Lintas Regional		105.34	105.34	**0**	**100.00%**	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	52.67	52.67	0	100.00%	
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	52.67	52.67	0	100.00%	
	2 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00%	
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**	
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	395	395	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00%	
	1 SPALD Lintas Regional	-	237	237	0	100.00%	
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	79	79	0	100.00%	
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah	Rumah Tangga	79	79	0	100.00%	
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	79	79	0	100.00%	
	2 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00%	

4. Capaian SPM Bidang Urusan Trantibum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			PENCAPAIAN	AKSI
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			94.58 %	
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi**					94.58 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	50	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**14.58 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	72.88 %	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada KID20240307113203001924 KI20240222065935400224	unit	59	22	**37** 37 37	**37.29 %**	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* KID20240307113211001925 KI20240222065935400224	dokumen	9	9	**0** 0 0	**100.00 %**	
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** KID20240307113219001926 KI20240222065935400224	orang	30	30	**0** 0 0	**100.00 %**	
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal KID20240307113228001927 KI20240222065935400224	dokumen	1	1	**0** 0 0	**0.00 %**	
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil KID20240307113244001928 KI20240222065935400224	orang	0	0	**0** 0 0	**100.00 %**	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan KID20240307113254001929 KI20240222065935400224	orang	0	0	**0** 0 0	**100.00 %**	

5. Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			90.61%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti					92.73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	406	406	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.73%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	63.64%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	406	406	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1	1	0	100.00%
	4. Penyediaan alat bantu	Orang	19	19	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	0	0	0	0.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	329	329	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	10	10	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0.00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti					96.67%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Yang Harus Dilayani**	**Yang Terlayani**	**Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	**160**	**160**	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**16.67%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**83.33%**
	1 . Pengasuhan	Orang	35	35	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	160	160	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan sandang	Orang	35	35	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1	1	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	15	15	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	160	160	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	10	10	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	**0**	**0.00%**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	30	30	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	0	0	**0**	**0.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti**					**98.33%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	**1127**	**1127**	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.33%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**91.67%**
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	45	45	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	14	14	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	8	8	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	45	45	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1032	1032	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	45	45	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	**0**	**0.00%**
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	45	45	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	12 . Pemulasaraan	Orang	2	2	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**
4.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi**					**90,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**55.34%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	**2920**	**2920**	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**12.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**60.00%**
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	2920	2920	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	**0**	**0.00%**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	**0**	**0.00%**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	140	140	**0**	**100.00%**
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi**					**90,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**55.34%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	**2920**	**2920**	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**12.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**60.00%**
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	2920	2920	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	**0**	**0.00%**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	**0**	**0.00%**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	140	140	**0**	**100.00%**

6. Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	106.918	RT	97,01
		100%	97,01%	%	97,01%
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	9	9	Kab/Kota	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Berdasarkan capaian SPM tersebut, maka tindak lanjut ke depan akan menjadi salah satu tolok ukur pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat. Capaian SPM Tahun 2023 akan menjadi tolok ukur dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024, sehingga pengalokasian anggaran pemerintah daerah dapat diprioritaskan untuk belanja urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana amanat pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)”. Dengan demikian, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah akan terlayani semua pelayanan dasar yang berhak diterima setiap warga negara tanpa terkecuali dan masyarakat akan semakin sejahtera dapat tercapai.

2.1.6 KERJA SAMA DAERAH

Dinamika dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini terus meningkat, yang menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran menjadi permasalahan klasik yang harus dituntaskan. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Pusat khususnya pada ruang lingkup desentralisasi dan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tiga strategi, salah satunya adalah pengembangan kerja sama antardaerah

otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.

Alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kerja sama daerah yang dipandang dapat mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi daerah, karena pendekatan ini menitikberatkan pada aspek sinergi, efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat 1 menyebutkan “dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dalam upaya mendorong pemerintah daerah menerapkan kerja sama daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerja sama antar daerah merupakan salah satu agenda strategis pembangunan daerah. Dengan membangun kerja sama antar daerah dapat mengurangi disparitas dengan meningkatkan potensi ekonomi daerah, saling melengkapi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.

Kerja sama daerah ini merupakan upaya transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal secara sinergis dan meningkatkan kerja sama antar pelaku dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi daerah. Kerja sama daerah akan menjadi sarana perekat bagi ketahanan nasional, karena kerja sama daerah akan lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerja sama daerah juga dimaksudkan untuk menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah

dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil.

Penyelenggaraan kerja sama daerah dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemetaan potensi yang akan dikerjasamakan, merencanakan objek-objek yang akan dikerjasamakan, melaksanakan kerja sama daerah, hingga melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama daerah tersebut. Kesemua hal tersebut memerlukan koordinasi yang intensif, sesuai ketentuan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi yang menjadi leading sektor dalam melakukan penyiapan pembentukan TKKSD dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah saat ini tengah berusaha melakukan fasilitasi, supervisi dan pembinaan pelaksanaan kerja sama daerah.

Tabel 2.74
Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
1	Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/28/PEMPROV.ST/2024 dan 06/KESBER/KP-PEMPROV.ST/IV/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
2	Pemerintah Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/23/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/34.2006/SETDA	18/04/2024 (5 Tahun)
3	Pemerintah Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/31.1/PEMPROV.ST/2024 dan 100/0148/BAG.TAPEM/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
4	Pemerintah Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/29/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/1798/BAG.KERJASAMA	18/04/2024 (5 Tahun)
5	Pemerintah Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/21/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7.1/1034/TAPEM.PSO/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
6	Pemerintah Kab. Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/22/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/29/TKKSD-KESBER/2024	18/04/2024 (5 Tahun)

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
7	Pemerintah Kab. Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/24/PEMPROV.ST/2024 dan 130/1378/313/BAG.TAPEM	18/04/2024 (5 Tahun)
8	Pemerintah Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/31/PEMPROV.ST/2024 dan 100/01.01/BAG.PEM/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
9	Pemerintah Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/30/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/0423/UMUM/IV/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
10	Pemerintah Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/27/PEMPROV.ST/2024 dan 135/177/PEM/IV/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
11	Pemerintah Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/20/PEMPROV.ST/2024 dan 415.4/10/KESBER/Bag.Kerjasama	18/04/2024 (5 Tahun)
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/26/PEMPROV.ST/2024 dan 100/01/MOU-KSDD/BAG.PEM/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
13	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah	Kesepakatan Bersama	Tentang Percepatan Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Semua urusan pemerintahan	100.3.7.1/25/PEMPROV.ST/2024 dan 01/KB/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
14	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Kesepakatan Bersama	Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pelayanan Publik	Semua Urusan Pelayanan Publik	100.3.7.1/89/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7.1/8476	25/11/2024 (5 Tahun)
15	Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Donggala)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/1126/Ro.Ekon dan 074/116/Bag.Perekonomian dan SDA	14/06/2024 (3 Tahun)
16	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/1131/Ro.Ekon dan 16/PKS/KP-EKONOMI/VI/2024	14/06/2024 (3 Tahun)
17	Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Tojo Una-Una)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/1124/Ro.Ekon dan 100.3.7/37/TKKSD-PKS/2024	14/06/2024 (3 Tahun)

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
18	Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Tolitoli)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/1133/Ro.Ekon dan 500/2273/Bag.ekosda	14/06/2024 (3 Tahun)
19	PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Morowali)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/1125.Ro.Ekon dan 000.4.7.2/0649/EKON.SDA/VI/2024	14/06/2024 (3 Tahun)
20	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Morowali Utara)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/1127/Ro.Ekon dan 120.23/0126/UMUM/VI/2024	14/06/2024 (3 Tahun)
21	Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Banggai)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/1132/Ro.Ekon dan 500.1/1350/Bag.Ekon	14/06/2024 (3 Tahun)
22	Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	595/6767/DKTP3 dan 3793/HK.03.01/Disnakertrans	13/06/2024 (5 Tahun)
23	Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Setda Kab. Buol)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/112/PEMPROV.ST/2024 dan 100/01.08/BAG.PEM/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
24	Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Setda Kab. Donggala)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/111/PEMPROV.ST/2024 dan 074/0211/BAG.KESRA/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
25	Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kota Palu)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/100/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/3275/KESRA/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
26	Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/110/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/1279/TAPEM/2024	23/12/2024 (5 Tahun)

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
	Setda Kab. Morowali)					
27	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Setda Kab. Parigi Moutong)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/102/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/12.598/BAG. KESRA	23/12/2024 (5 Tahun)
28	Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Setda Kab. Tolitoli)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/104/PEMPROV.ST/2024 dan 130/38/5391/BAG.PEM	23/12/2024 (5 Tahun)
29	Pemerintah Kota Palu (Bapenda Kota Palu)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/54/bapenda /2024 dan 973/847.a/X/bapenda /2024	28/10/2024 (5 Tahun)
30	Pemerintah Kabupaten Sigi (Bapenda Kab. Sigi)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/64/bapenda /2024 dan 800..I.II/749.2/BAPENDA/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
31	Pemerintah Kabupaten Donggala (Bapenda Kab. Donggala)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/63/bapenda /2024 dan 074/1997/bapenda/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
32	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Bapenda Kab. Parigi Moutong)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/55/bapenda /2024 dan 100.3.7/10.903/BAPENDA/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
33	Pemerintah Kabupaten Poso (Bapenda Kab. Poso)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/56/bapenda /2024 dan 100.3.7.1/3211/TAPEM/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
34	Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Bapenda Kab. Touna)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/62/bapenda /2024 dan 3.7.1/53/TKKSD-PKS/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
35	Pemerintah Kabupaten Buol (Bapenda Kab. Buol)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/61/bapenda /2024 dan 970/43.12/bapenda/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
36	Pemerintah Kabupaten Tolitoli (Bapenda Kab. Tolitoli)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/60/bapenda /2024 dan 970/10.827/set.bapenda/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
37	Pemerintah Kabupaten Banggai (Bapenda Kab. Banggai)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/58/bapenda /2024 dan 900.1.3/857/bapenda	28/10/2024 (5 Tahun)
38	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut (Bapenda Kab. Banggai Laut)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/65/bapenda /2024 dan 970/446-a/Bapenda/2024	28/10/2024 (5 Tahun)

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
39	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapenda Kab. Bangkep)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/59/bapenda /2024 dan 900.1.13/426/bapend a/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
40	Pemerintah Kabupaten Morowali (Bapenda Kab. Morowali)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/57/bapenda /2024	28/10/2024 (5 Tahun)
41	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Bapenda Kab. Morowali Utara)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	900.1.13/66/bapenda /2024 dan 000.5.7.2/I/BAPEND A/X/2024	28/10/2024 (5 Tahun)
42	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Banggai Laut)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.2.2/2041/RO.EK ON dan 100/02/MOU-KSDD/BAG.PEM/202 4	14/05/2024 (3 Tahun)
43	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Banggai Kepulauan)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.2.2/2049/Ro.Eko n dan 02.PKS/2024	14/05/2024 (3 Tahun)
44	Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Sigi)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.2.2/2048/Ro.Eko n dan 100.3.7/41.2913/SET DA	14/05/2024 (3 Tahun)
45	Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Buol)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan		14/05/2024 (3 Tahun)
46	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan SDA Setda Kab. Parigi Moutong)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan		14/05/2024 (3 Tahun)
47	Pemerintah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian administrasi perekonomian dan	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Syariah	Unsur pendukung urusan pemerintahan		14/05/2024 (3 Tahun)

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
	SDA Setda Kab. Poso)					
48	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Morowali Utara)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/106/PEMPROV.ST/2024 dan 032/0296/B-MU/XII/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
49	Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Sigi)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/108/PEMPROV.ST/2024 dan 400.B/1018.54737/PEMKABSIGI/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
50	Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Tojo Una-Una)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/103/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/63/TKKSD-PKS/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
51	Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Banggai)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/109/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/84/PKS/Bag. Kerjasama	23/12/2024 (5 Tahun)
52	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Banggai Laut)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/101/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/01/BUPATI/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
53	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan	100.3.7/107/PEMPROV.ST/2024 dan 5/PKS/2024	23/12/2024 (5 Tahun)
54	Pemerintah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Poso)	Perjanjian Kerja Sama	Tentang Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Unsur pendukung urusan pemerintahan		23/12/2024 (5 Tahun)

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulteng, 2025

Selanjutnya, kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat (Sinergitas) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
1	RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo dengan RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu dan Pemkab Parimo dan Pemkab Banggai	Nota Kesepakatan	Tentang jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus pemprov sulteng	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	HK.03.01/D.IX/18320/2024 dan HK.03.01/D.XIX/7718/2024 dan 100.3.7/30.2/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/1670/Dinkes/2024 dan 415.4/41/NK/Dinkes dan 100.3.7.2/55/NK/Bag.Kerjasama	18/04/2024 (5 Tahun)
2	RSU Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo dengan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Pemprov Sulteng	Nota Kesepakatan	Tentang jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	HK.03.01/D.IX/18232/2024 dan HK.03.01/D.XIX.7720/2024 dan 100.3.7/30.5/PEMPROV.ST/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
3	RS Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi dengan Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu dan Pemkab Banggai dan Pemkab Poso dan Pemkab Tolitoli	Nota Kesepakatan	Tentang jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	HK.03.01/D.XXXV/2896/2024 dan 400.7.6/55/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7.2/52/NK/Bag.kerjasama dan 100.3.7.1/1037.Dinkes.Pso/2024 dan 042.94.13/Dinkes.Th/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
4	RSUP Persahabatan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu dan Pemkab Sigi dan Pemkab Parimo dan Pemkab Banggai dan Pemkab Tolitoli dan Pemkab Morowali dan Pemkab Poso	Nota Kesepakatan	Tentang jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	HK.03.01/D.XX/7222.3/2024 dan HK.03.01/D.XIX/7719/2024 dan 100.3.7/30.1/PEMPROV.ST/2024 dan 100..3.7/1668/Dinkes/2024 dan 100.3.7/67.8245/SETDA/dan 415.4/42/Dinkes dan 100.3.7.2/NK/Bag.Kerjasama dan 042.19.16/Dinkes/2024 dan 100.3.7/0665/DKPPKBD/VI/2024 dan 100.3.7.1/1038/Dinkes.Pso/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
3	RS Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi dengan Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu dan Pemkab Banggai dan Pemkab Poso dan Pemkab Tolitoli	Nota Kesepakatan	Tentang jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	HK.03.01/D.XXXV/2896/2024 dan 400.7.6/55/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7.2/52/NK/Bag.kerjasama dan 100.3.7.1/1037.Dinkes.Pso/2024 dan 042.94.13/Dinkes.Th/2024	18/04/2024 (5 Tahun)

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
4	RSUP Persahabatan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu dan Pemkab Sigi dan Pemkab Parimo dan Pemkab Banggai dan Pemkab Tolitoli dan Pemkab Morowali dan Pemkab Poso	Nota Kesepakatan	Tentang jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	HK.03.01/D.XX/7222.3/2024 dan HK.03.01/D.XIX/7719/2024 dan 100.3.7/30.1/PEMPROV.ST/2024 dan 100..3.7/1668/Dinkes/2024 dan 100.3.7/67.8245/SETDA/dan 415.4/42/Dinkes dan 100.3.7.2/NK/Bag. Kerjasama dan 042.19.16/Dinkes/2024 dan 100.3.7/0665/DKPPKBD/VI/2024 dan 100.3.7.1/1038/Dinkes.Pso/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
7	RS Anak dan Bunda Harapan Kita dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan Pemprov Sulteng Pemkot Palu dan Pemkab Banggai dan Pemkab Poso dan Pemkab Sigi dan Pemkab Tolitoli dan Pemkab Parigi Moutong dan Pemkab Morowali	Nota Kesepakatan	tentang jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	HK. 03.01/ D.XXII/338/2024 dan HK. 03.01/ D.IX/ 18232/2024 dan 100.3.7/30.3/PEMPROV .ST/2024 dan 100.3.7/1671/Dinkes/2024 dan 100.3.7.2/56/NK.Bag. Kerjasama dan 100.3.7.1/1035/Dinkes/2024 dan 100.3.7/67.8244/SETDA dan 042.17.16/DINKES/2024 dan 415.4/43/NK/Dinkes dan 100.3.7/0666/DKPPKBD/VI/2024	18/04/2024 (5 Tahun)
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nota Kesepakatan	Tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah	Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	500.1.2.9/59/PEMPROV.ST/2024 dan 164/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/07/2024	27/07/2024 (3 Tahun)
9	Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	Perjanjian Kerja Sama	Tentang penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-sulawesi tengah	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	W24.HH.04.02-5244 dan 400.7.1/83/PEMPROV.ST/2024	19/09/2024 (5 Tahun)
10	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Nota Kesepakatan	Tentang Sinergi Pengoperasian Dan Perawatan Jaringan Peralatan Dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	PK.120/PPKL/PPU/KUM.3.1/B/11/2024 dan 100.3.7.1/80/PEMPROV.ST/2024 dan 100.3.7/1150/Tapem/XI/2024	25/11/2024 (5 Tahun)

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DAN JANGKA WAKTU
11	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah X	Nota Kesepakatan	Tentang Optimalisasi program jaminan kesehatan nasional	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	400.7.24/97/PEMPROV.ST/2024 dan 33/KTR/KEPWIL X/1224	16/12/2024 (3 Tahun)
12	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Nota Kesepakatan	Tentang Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	100.3.7/98/PEMPROV.ST/2024 dan B-204/P.2/6/6PS/12/2024	16/12/2024 (2 Tahun)

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulteng, 2025

Selanjutnya, kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL PENETAPAN/ JANGKA WAKTU
1	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan BPKAD	PRJANJIAN KERJA SAMA	Penempatan dan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	No. 900.1.13/19.1/Pemprov.ST/2024 dan No. JRB.R.10.Ar. PAU/491/2024	01/04/2024 5 Tahun
2	PT. Bank Mega (Persero) Tbk dan BPKAD	PRJANJIAN KERJA SAMA	Penempatan dana Pemerintah daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan keuangan	No. 900.1.13/19.4/Pemprov.ST/2024 Dan No. 003/PKS/BM/PLU/2024	01/04/2024 5 Tahun
3	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan BPKAD	PRJANJIAN KERJA SAMA	Penempatan dana Pemerintah Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	No. 900.1.13/19.7/Pemprov.ST/2024 No. Plu/05/002/2024 /PKS	01/04/2024 5 Tahun
4	PT. BRI (Persero) Tbk	PRJANJIAN	Penempatan dana Pemerintah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	No. 900.1.13/19.6/	01/04/2024
	dan BPKAD	KERJA SAMA	Daerah	Keuangan	Pemprov.ST/2024 No. B.1050-KC/XII/RTL/06/2024	5 Tahun
5	PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Palu Gajah Mada dan BPKAD	PRJANJIAN KERJA SAMA	Penempatan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	No. 900.1.13/19.2/Pemprov.ST/2024 dan No. 03/1857-3/038	01/04/2024 5 Tahun
6	PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Palu M. Yamin dan BPKAD	PRJANJIAN KERJA SAMA	Penempatan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	No. 900.1.13/19.3/Pemprov.ST/2024 dan No. 04/764-3/8050	01/04/2024 5 Tahun

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL PENETAPAN/ JANGKA WAKTU
7	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan BPKAD	PRJANJIAN KERJA SAMA	Penempatan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	No. 900.1.13/19.5/ Pemprov.ST/2024 dan No. 196/PKS/PLU.III/FSU/IV/2024	01/04/2024 5 Tahun
8	Universitas Alkhairaat	KESEPAKATAN BERSAMA	Pengembangan Potensi Sumber Daya Sulawesi Tengah dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Semua Urusan Pemerintahan	No. 124/SK.s/UA/I/2024 No. 400.3/II/PEMPROV.ST/2024	21/02/2024 5 Tahun
9	Universitas Tadulako (UNTAD)	KESEPAKATAN BERSAMA	Kerja sama pengembangan Pendidikan Pengabdian masyarakat, Riset dan Penelitian	Semua Urusan Pemerintahan	No. 1483/UN28/LP/00.01/2024 dan No. 400.3/62/PEMPROV.ST/2024	02/08/2024 4 Tahun
10	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Cabang Palu & BPKAD	PRJANJIAN KERJA SAMA	Pemberian pembiayaan kepada pegawai pd lingkungan Pemerintah Prov. Sulteng	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	No. BSI/04/001/PKS dan No. 100.2.3/1385/Ro. Pem. OTDA	5 Tahun 08/07/2024
11	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	PRJANJIAN KERJA SAMA	Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	900/257.07/BPKAD/XII/2024 dan 1227/BPD-ST/PKS/DIR/PMSR/XVII/2024	2 Tahun
12	Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia (IPAS)	KESEPAKATAN BERSAMA	Kerjasama Program Pemberdayaan Dampak Perubahan Iklim (Cerah) Di wilayah Provinsi SulTeng	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	No. YIPASI-MOU/2024/Ags/005 dan No. 400.2/66.2/PEMPROV.ST/2024	26/08/2024 3 Tahun
13	Unismuh Palu	KESEPAKATAN BERSAMA	Kerja Sama dlm Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Pendidikan & Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter & Pembentukan Fakultas Kedokteran Unismuh Palu	Semua Urusan Pemerintahan	No. 260/14/II.3.UMP/J/VI/2024 dan No. 400.3/40/PEMPROV.ST/2024	11/06/2024 5 Tahun

NO.	MITRA KERJASAMA	JENIS DOKUMEN	JUDUL KERJASAMA	URUSAN PEMERINTAHAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL PENETAPAN/ JANGKA WAKTU
14	Pengurus Wilayah IKA UNHAS	KESEPAKATAN BERSAMA	Kerja Sama Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Sosial Kemasyarakatan	Semua Urusan Pemerintahan	No. 400.3.1/64/ PEMPROV.ST/ 2024 dan No. 001/KS/IKA.UH-SULTENG/VIII/ 2024	02/08/2024 4 Tahun Tidak melalui pembahasan
15	Sekolah Tinggi Ilmu Adminiatrasi (STIA) Panca Marga Palu	KESEPAKATAN BERSAMA	Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Semua Urusan Pemerintahan	No. 224/STIA-PM/ A.1/VIII/2024 dan No. 400.3/66.1/ PEMPROV.ST/2024	20/08/2024 5 Tahun
16	Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri	KESEPAKATAN BERSAMA	Kerja Sama Promosi Potensi Sumber Daya dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pariwisata dan Budaya Sulawesi Tengah serta Pengembangan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri	Semua Urusan Pemerintahan	No. 400.14.9/58/ PPEMPROV.ST/ 2024 dan No. HK.201/111/1/ PLW-2024	23/07/2024 3 Tahun
17	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	PKS	Pemungutan & Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dll, Pendapatan Asli Daerah yang Sah Secara Digital/Online Sistem	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	N0.900.1.13/16/ Bapenda/2024 dan No.760/BPD-ST/ PKS/DIR/PMSR/ XVII/2024	12/08/2024 3 Tahun
18	Universitas Terbuka	KESEPAKATAN BERSAMA	Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi dan Kerjasama Kelembagaan	Semua Urusan Pemerintahan	N0.400.37.75/Pemprov. ST/2024 dan No.2956/UN 31/HK. 08.00/2024	5 Tahun

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulteng, 2025.

2.1.7 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ATAU APBD PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN/KOTA

Infrastruktur yang kuat merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Konektivitas wilayah adalah keterhubungan antara berbagai wilayah atau daerah yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang. Pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara memainkan peran penting dalam memperlancar pergerakan barang dan penumpang. Hal ini memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien, yang pada gilirannya mengurangi biaya logistik dan membuka akses ke market baru.

Membuka konektivitas antar daerah dapat membantu meningkatkan daya saing daerah dalam konteks ekonomi nasional maupun internasional. Selain itu, infrastruktur yang baik mendukung mobilitas tenaga kerja, memungkinkan pekerja untuk berpindah dengan lebih mudah antara tempat tinggal dan tempat kerja, serta memperluas peluang ekonomi. Dalam sektor pariwisata, transportasi yang efisien meningkatkan akses ke destinasi wisata, menarik lebih banyak pengunjung, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pembangunan infrastruktur daerah dan menjadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Adapun Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah melalui sumber pembiayaan APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, sesuai proyek strategis Nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis Industri di Kabupaten Morowali;
3. Penguatan Hilirisasi industry berbasis mineral di Kabupaten Morowali Utara dan Morowali Utara;
4. Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai, melalui penguatan konektivitas laut, dengan output pengembangan pelanuhan salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Pengembangan Kawasan perdesaan prioritas kabupaten morowali, melalui penyediaan layanan dasar, dengan output Pembangunan infrastruktur air minum berbasis Masyarakat, Pembangunan system pengolahan air limbah domestic terpusat skala permukiman dan system pengolahan persampahan berbasis Masyarakat, serta pengembangan OM BTS 4G/Lastmile dan akses internet;
6. Pengembangan Kawasan perikanan dan hilirisasi tongkol, cakalang, tuna (TCT) di kabupaten Parigi mouton, kabupaten donggala, kabupaten morowali, kabupaten banggai laut, dan kabupaten banggai kepulauan, melalui penguatan konektivitas laut, dengan output : pengembangan pelabuhan bungin di

kabupaten banggai laut, dan Pelabuhan salakan di kabupaten banggai kepulauan, penguatan konektivitas udara dengan output optimalisasi layanan dan prasarana bandara banggai laut di kabupaten banggai laut;

7. Pembangunan Kawasan perbatasan di Kecamatan perbatasan prioritas melalui pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan output Pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, maupun layanan konektivitas;
8. Pengembangan Kawasan transmigrasi tampolore dikabupaten poso, Kawasan transmigrasi bungku dikabupaten morowali, dan Kawasan transmigrasi palolo dikabupaten sigi melalui Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistic dengan output Pembangunan dan pengembangan jalan non status, jembatan, system drainase dan sarana permukiman;
9. Penguatan konektvititas udara, laut, jalan dan darat;
10. Pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman termasuk penyediaan air minum, Listrik dan telekomunikasi/internet, layanan sanitasi dan persampahan.

Sementara rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah melalui sumber pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Peningkatkan konektivitas di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Rencana Pembangunan dan rekonstruksi pada ruas jalan dan jembatan yang ada di 12 Kabupaten dan 1 kota serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat dan laut yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Mendukung ketahanan pangan melalui Pembangunan dan rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Mendukung ketahanan air melalui Pembangunan dan rehabilitasi Air Baku dan system pengelolaan air minum (SPAM) pada wilayah Regional dan Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten/Kota;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan permukiman, melalui Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni dan Prasarana sarana Utilitas (PSU) bagi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional, system air limbah Regional, serta sistem drainase yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.8 BUMD DALAM MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA DAN PENDANAAN INOVATIF

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berperan penting dalam mendukung pelayanan pemerintah daerah melalui kontribusi pembangunan daerah dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan. BUMD juga berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi dan pembangunan, termasuk meningkatkan layanan publik dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha. Dengan demikian pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kondisi dan Perkembangan Kinerja BUMD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

BUMD di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat BUMD yaitu PT Pembangunan Sulteng dan PT Bank Sulteng selaku Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kinerja PT bank Sulteng mempunyai kinerja baik dan sehat yaitu setiap Tahun terus memberikan kontribusi Deviden ke Pemda Provinsi Sulteng dan memberikan dukungan serta pengembangan perekonomian di wilayah Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan PT Pembangunan Sulteng, mempunyai kinerja yang kurang baik dan belum memberikan kontribusi Deviden ke Pemda Provinsi Sulteng.

Dengan demikian, megingat BUMD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, kebijakan pemerintah daerah ke depan untuk terus mendorong pengembangan dan pembentukan BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi memandang perlu untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar skema konvensional. Tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, kemiskinan, pengelolaan sampah, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur membutuhkan sumber pendanaan tambahan yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan inovatif.

Pendanaan inovatif sebagai pendekatan pembiayaan alternatif yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta,

masyarakat sipil, lembaga donor, dan institusi keuangan serta mitra pembangunan lainnya.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah merupakan tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau *baseline data* yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah secara tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah memerlukan upaya pengelolaan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat target serta dengan menganalisis keuangan daerah di masa lalu maka dapat diproyeksi jumlah surplus dan minus antara pendapatan dan belanja (kapasitas riil) dari suatu daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemampuan keuangan daerah yang disusun melalui kerangka pendanaan dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja penyelenggaran pemerintah daerah. Di sisi lain gambaran pengelolaan keuangan daerah masa lalu diperlukan untuk menjadi dasar membangun asumsi proyeksi kemampuan pendanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di masa berikutnya (Permendagri 86 Tahun 2017).

2.2.1 KONDISI KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020 - 2024

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis melalui kinerja keuangan masa lalu dan landasan kebijakan pengelolaannya yang terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD, Neraca Daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan juga bahwa hal

utama yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yaitu penginventarisasian jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan pada struktur APBD dan selanjutnya analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah menggambarkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian melakukan analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini ditujukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) Tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Untuk mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah maka perlu terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi keuangan daerah periode sebelumnya baik dari sisi kebijakan yang melandasi pengelolaannya maupun kinerja pencapaiannya. Hasil analisis kinerja keuangan periode Tahun 2020-2024 akan menjadi dasar untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendanai rencana pembangunan periode 2025-2029 melalui pendapatan, belanja dan pembiayaan.

A. KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020 - 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan

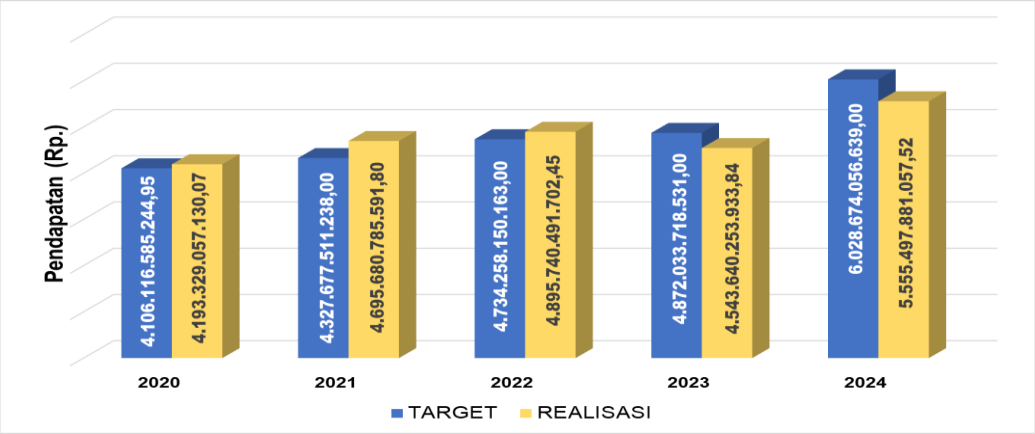
Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2024

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan dipungut sesuai dengan ketetapan Peraturan Daerah. Adapun obyek pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada pengelolaan anggaran pendapatan daerah dengan memperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak, retribusi daerah (Provinsi) dengan tidak menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, (d) Berkembangnya investasi di sektor pertambangan, dan (e) Kondisi daerah yang cukup aman. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, (d) Berkembangnya investasi disektor pertambangan, dan (e) Kondisi daerah yang cukup aman.



Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025)

Gambar 2.116
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (Rp.)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2022 atau lebih tinggi realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2023 realisasi pendapatan mengalami penurunan yang tidak begitu siginifikan atau realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan, tetapi pada Tahun 2024 realisasi pendapatan meningkat sebesar Rp. 1.020.146.152.902,68 atau sebesar 122,45 persen dari Tahun 2023. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan APBD pada kurun waktu 5 (lima) Tahun mencapai 7,88 persen. Gambaran pendapatan kurun waktu 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Efektivitas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan tetapi belum signifikan di 1 (satu) Tahun terakhir yaitu Tahun 2023. Target Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp. 4.106.116.585.244,95 dengan realisasi sebesar Rp 4.193 329.057.130,07 (102,12 persen), sedangkan pada Tahun 2021 target pendapatan sebesar Rp. 4.327.677.511.238,00 dengan angka realisasi sebesar Rp. 4.695.680.785.591,80 (108,50 persen), pada Tahun 2022 kembali memperlihatkan peningkatan dari target pendapatan sebesar Rp. 4.734.258.150.163,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.895.740.491.702,45 (103,41 persen), tetapi untuk Tahun 2023 menunjukkan penurunan pencapaian realisasi dimana target pendapatan sebesar Rp. 4.872.033.718.531,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.543.640.253.933,84 (93,26 persen). Selanjutnya realisasi pendapatan Sulawesi Tengah Tahun 2024 kembali meningkat dengan target pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp.

6.028.674.056.639,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.555.497.881.057,52 atau meningkat sebesar 92,15 persen. Efektivitas rata-rata realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2020–2024 adalah sebesar 7,88 persen. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Pada rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Pendapatan Daerah meningkat konsisten dari Rp. 4.193.329.057.130,07 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 5.555.497.881.057,52 pada Tahun 2024, atau meningkat rata-rata 7,88 persen pertahun. Perbedaan rata-rata laju pertumbuhan di antara sumber-sumber utama Pendapatan Daerah mempengaruhi Struktur Pendapatan Daerah sebagai berikut: *Pertama,* Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata laju pertumbuhan 17,81 persen perTahun menunjukkan peningkatan dengan kontribusi setiap tahunnya selalu meningkat walaupun pada Tahun 2023 memiliki kontribusi menurun dengan nilai pendapatan Rp. 4.543.640.253.933,84 lebih rendah dari Tahun sebelumnya yaitu Rp. 4.895.740.491.702,45. Kondisi keuangan tersebut menggambarkan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah stabil, dimana jumlah pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer menunjukkan jumlah yang hampir *balance. Kedua,* Pendapatan Transfer dengan rata-rata laju pertumbuhan 3,75 persen pertahun menurunkan kontribusinya dalam rata-rata pembentukan Pendapatan Daerah sebesar 7,88 persen. Hal ini berarti bahwa dalam periodisasi 5 (lima) Tahun sebelumnya Tingkat Ketergantungan Fiskal Daerah Sulawesi Tengah menurun dan sebaliknya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat yang menjelaskan bahwa kondisi kemandirian fiskal daerah semakin membaik; *Ketiga,* Lain-lain Pendapatan Yang Sah dengan rata-rata laju pertumbuhan 49,73 persen per Tahun meningkatkan kontribusinya dalam rata-rata pembentukan Pendapatan Daerah yang menghasilkan angka positif.

Pencapaian realisasi pendapatan asli daerah yang memberikan konstribusi diantaranya adalah Pajak Daerah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,35 persen. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor pajak maka kebijakan pengelolaan pajak daerah harus lebih maksimal, terarah dan didukung oleh regulasi untuk mendapatkan sumber-sumber pajak daerah lainnya mendukung penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Kelompok Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2020 s.d 2024 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Realisasi pendapatan transfer Tahun

2020 sebesar Rp. 3.055.555.418.224,00, selanjutnya Tahun 2021 sebesar Rp. 3.149.096.842.573,00, Tahun 2022 sebesar Rp. 3.319.202.639.678,00, dan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.823.279.573.833,00 serta Tahun 2024 sebesar Rp. 3.429.876.216.802,00 dengan capaian rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 3,75 persen.

Tabel 2.77
Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 – 2024

URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	RATA RATA PERTUMBUHAN
PENDAPATAN DAERAH	**4.193.329.057.130,07**	**4.695.680.785.591,80**	**4.895.740.491.702,45**	**4.543.640.253.933,84**	**5.555.497.881.057,52**	**7,88%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.122.670.398.589,07**	**1.494.246.273.498,51**	**1.559.706.290.296,45**	**1.714.725.360.539,84**	**2.115.097.954.885,52**	**17,81%**
PAJAK DAERAH	914.780.331.698,60	1.074.422.295.409,10	1.294.028.035.420,28	1.397.586.816.951,10	1.774.182.144.129,46	**8,14%**
HASIL RETRIBUSI DAERAH	14.690.106.655,58	19.111.110.345,00	13.275.580.510,00	23.345.948.082,00	19.497.629.593,00	**7,33%**
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	21.914.954.430,00	32.558.872.743,29	36.390.219.835,19	52.412.250.973,00	51.244.848.172,00	**25,35%**
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	171.285.005.804,89	368.153.995.001,12	216.012.454.530,98	241.380.344.533,74	270.173.332.991,06	**12,09%**
PENDAPATAN TRANSFER	**3.055.555.418.224,00**	**3.149.096.842.573,00**	**3.319.202.639.678,00**	**2.823.279.573.833,00**	**3.429.876.216.802,00**	**3,75%**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**3.030.626.794.224,00**	**3.149.096.842.573,00**	**3.319.202.639.678,00**	**2.823.279.573.833,00**	**3.429.876.216.802,00**	**3,14%**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	275.921.110.604,00	-	572.451.108.014,00	473.808.061.173,00	1.079.362.461.000,00	**18,64%**
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488.847.818.000,00	3.104.061.844.573,00	1.488.995.344.513,00	1.561.232.130.595,00	1.616.772.456.028,00	**2,08%**
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.265.857.865.620,00	-	1.196.798.117.151,00	782.635.716.565,00	733.741.299.774,00	**1,20%**
Dana Insentif Daerah (DID)		45.034.998.000,00	60.958.070.000,00	5.603.665.500,00	0,00	**0,62%**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA	**24.928.624.000,00**	**-**	**-**	**-**		**0,00%**
Dana Penyesuaian	24.928.624.000,00	-				**0,00%**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**15.103.240.317,00**	**52.337.669.520,29**	**16.831.561.728,00**	**5.635.319.561,00**	**10.523.709.370,00**	**-8,66%**
Pendapatan Hibah	14.422.159.791,00	16.767.305.768,00	16.831.561.728,00	5.570.037.321,00	10.463.080.495,00	**1,20%**
Pendapatan Lainnya	681.080.526,00	35.570.363.752,29	-	65.282.240,00	60.628.875,00	**-45,38%**

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diperuntukkan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Proporsi pendapatan untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan Hibah dan pendapatan lainnya memberikan kontribusi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,40 persen dan 1.228,88 persen.

Mengukur kinerja keberhasilan pemerintah daerah Sulawesi Tengah dapat dilihat dari kemampuan merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan angka di atas dari target yang ditetapkan, selanjutnya dapat diukur dengan Rasio

Efektivitas. Rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pendapatan yang akan dicapai, dan akan disesuaikan serta dibandingkan dengan aturan target yang telah ditetapkan yang dilihat dari potensi riil daerah Sulawesi Tengah. Apabila Tingkat keefektivitasan daerah Sulawesi Tengah semakin meningkat maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah Sulawesi Tengah semakin baik. Rasio efektivitas dihitung dari membandingkan antara target dan realisasi PAD. Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu Tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.74

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah menaikkan target Pendapatan Asli Daerah rata-rata setiap Tahun sebesar 16,77 persen. Demikian juga, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai setiap Tahun meningkat sebesar 14,25 persen. Rasio efektivitas yaitu rasio realisasi PAD terhadap target PAD secara rata-rata dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebesar 101,61 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sudah efektif dalam merealisasikan Rencana Pendapatan Asli Daerah melalui langkah-langkah pro-aktif dan dapat menggali secara efektif sumber-sumber pendapatan daerah dalam perekonomian, walaupun masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyaknya potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber-sumber pendapatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih ditingkatkan lagi secara nyata.

Tabel 2.78
Target dan Realisasi PAD pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektifitas
	PAD (Rp)	*Growth* (%)	PAD (Rp)	*Growth* (%)	
2020	1.054.606.448.582,08	0	1.122.670.398.589,07	0	106,45
2021	1.247.983.639.798,00	18,34	1.494.246.273.498,51	33,10	119,73
2022	1.561.939.035.510,00	25,16	1.559.706.290.296,45	4,38	99,86
2023	1.955.221.037.883,00	25,18	1.714.725.360.539,84	9,94	87,70
2024	2.251.661.212.139,00	15,16	2.123.386.480.664,52	23,83	94,30
Rata-rata per tahun		**16,77**	**Rata-rata per tahun**	**14,25**	**101,61**

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025).

b. Kinerja Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024

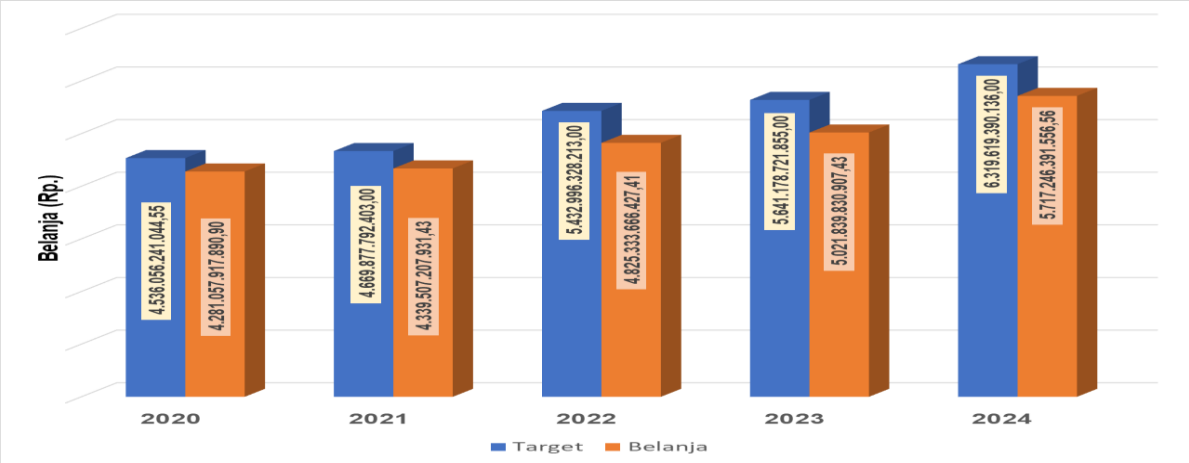
Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan, Kebijakan belanja daerah Tahun 2020-2024 dilaksanakan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi . Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD pada periode sebelumnya sangat diperlukan untuk analisis pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya.

Setelah dilakukan analisis pendapatan daerah, dilakukan analisis belanja daerah yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode Tahun anggaran sebelumnya. Analisis belanja digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja daerah dianggarkan dengan batas tertinggi untuk setiap belanja sehingga realisasi belanja tidak melebihi jumlah anggaran belanja yang ditetapkan.

Proporsi alokasi belanja Provinsi Sulawesi Tengah dalam rentang waktu Tahun 2020-2024 terhadap APBD menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana jumlah Belanja memiliki rata-rata pertumbuhan yaitu: 7,63 persen. Hal ini terjadi karena pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan beberapa kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi termasuk pembiayaan aset dan personil pada sektor pendidikan, kehutanan, pertambangan dan kelautan sehingga meningkatkan pembiayaan pada belanja.

Jika dilihat dari total belanja di tiap tahunnya selama 5 (lima) Tahun menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 dan Tahun 2024 kecenderungan realisasi belanja lebih rendah dari anggaran belanja yang ditetapkan dan itu menunjukkan bahwa pemanfaatan belanja berada di bawah ambang batas target belanja yang ditetapkan.



Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025)

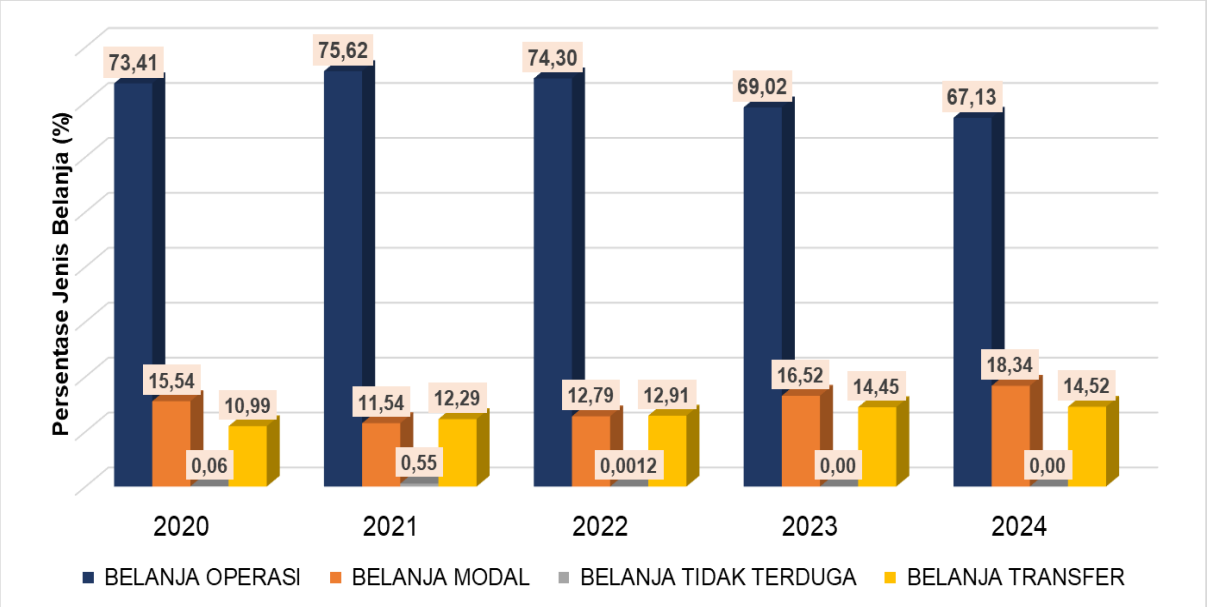
Gambar 2.117
Target dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (Rp.)

Pengalokasian untuk belanja Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2020 s.d 2024 terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan proporsi anggaran belanja diarahkan untuk belanja pelayanan publik yaitu belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Untuk kebijakan alokasi belanja sebagian besar ditujukan pada :

1. Peningkatan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien melalui peningkatan kemampuan motivasi, disiplin, etos kerja dan mobilitas aparatur daerah;
2. Mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menunjang tugas-tugas ke pemerintahan;
3. Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
4. Penanganan berbagai kejadian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan pengelompokan Belanja. Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi yang merupakan biaya untuk kegiatan rutin dan memberikan manfaat jangka pendek, terdiri atas (i) Belanja Pegawai yang diadakan sebagai kompensasi pembiayaan Kepala Daerah, DPRD, ASN; (ii) Belanja Barang dan Jasa; (iii) Belanja Bunga; (iv) Belanja Subsidi; (v) Belanja Hibah dan (vi) Belanja Bantuan Sosial. belanja modal yang merupakan biaya untuk mendapatkan aset

tetap dan aset lainnya, belanja tidak terduga untuk keperluan biaya darurat dan belanja transfer untuk biaya pengeluaran provinsi ke kabupaten/kota atau pemerintah desa yang terdiri atas: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun proporsi masing-masing belanja tersebut, terhadap total belanja disajikan pada Gambar 2.118.



Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025)

Gambar 2.118
Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terhadap Total Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Realisasi Total Belanja dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan peningkatan terutama diakibatkan oleh Belanja Pegawai yang pembiayaannya setiap tahunnya cenderung meningkat.

Pertumbuhan rata rata realisasi belanja selama periode 2020-2024 terdiri atas: Belanja Operasi memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 5,28 persen lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata Belanja Modal sebesar 14,83 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 219,79 persen dan Belanja Transfer sebesar 15,27 persen. Meningkatnya alokasi Belanja Operasi disebabkan besarnya belanja Bantuan Sosial, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 365,34 persen. Sedangkan besarnya persentase rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga yaitu 219,79 persen, disebabkan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Adapun

Belanja Transfer meningkat dikarenakan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,27 persen.

Selain itu, untuk belanja pegawai setiap tahunnya menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan bertambahnya tanggungan pembayaran gaji ASN yang pindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah karena kebijakan pengalihan kewenangan, sebesar 4,53 persen. Sedangkan pada Belanja Modal memiliki pertumbuhan rata-rata yang lebih rendah yaitu sebesar 14,83 persen jika dibandingkan dengan komponen Belanja lainnya, seperti belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pengukuran kinerja keuangan daerah memperhitungkan rasio aktivitas yaitu gambaran bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanjanya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentasi dana yang dialokasi untuk Belanja Operasi berarti persentasi Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 2.79
Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2.1	BELANJA OPERASI	3.142.577.173.852,95	3.281.689.920.334,27	3.585.101.226.080,89	3.466.265.238.916,47	3.837.724.338.579,96	5,27
2.1.1	Belanja Pegawai	1.348.495.563.229,00	1.309.674.547.600,00	1.358.025.925.643,00	1.352.486.363.084,00	1.591.031.082.089,00	4,51
2.1.2	Belanja Barang & Jasa	907.419.260.623,95	1.394.665.635.462,27	1.581.877.051.000,84	1.658.813.402.647,88	1.905.793.276.794,96	13,99
2.1.3	Belanja Hibah	885.470.850.000,00	574.190.239.272,00	603.252.821.142,00	349.306.544.295,19	323.245.519.696,00	2,40
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.191.500.000,00	3.159.498.000,00	41.945.428.295,05	105.658.928.889,40	17.654.460.000,00	7,10
2.2	BELANJA MODAL	665.439.891.390,95	500.901.019.442,16	617.282.123.075,52	829.728.871.005,96	1.048.818.023.742,60	11,21
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.399.381.313,00	23.674.085.565,00	56.859.575,00	-	109.304.921,00	- 53,80
2.4	BELANJA TRANSFER	470.641.471.334,00	533.242.182.590,00	622.893.457.696,00	725.845.720.985,00	830.594.724.313,00	5,30
	TOTAL BELANJA	4.281.057.917.890,90	4.339.507.207.931,43	4.825.333.666.427,41	5.021.839.830.907,43	5.717.246.391.556,56	7,62

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025)

c. Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2020 - 2024

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2019 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas: penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan (Tabel 2.76).

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada periodisasi Tahun 2020-2024 ditujukan untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

Tabel 2.80
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	SURPLUS/DEFISIT	-87.728.860.760,83	356.172.977.660,37	70.406.825.275,04	725.845.720.985,00	-161.748.510.499,04	86,33
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	429.929.141.925,60	342.565.200.390,51	698.738.178.050,88	769.144.909.470,92	290.945.332.497,33	7,89
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	429.929.141.925,60	342.565.200.390,51	698.738.178.050,88	769.144.909.470,92	290.945.332.497,33	24,09
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		429.929.141.925,60	342.565.200.390,51	698.738.178.050,88	769.144.909.470,92	290.945.332.497,33	7,89
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		342.200.281.164,77	698.738.178.050,88	769.145.003.325,92	1.494.990.630.455,92	129.196.821.998,29	44,24

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025)

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun SILPA Tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari SiLPA Tahun sebelumnya dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila SiLPA tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi surplus atau defisit dari selisih komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan akibat kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pembiayaan daerah pada tahun-Tahun anggaran sebelumnya. Tujuan utama analisis yaitu untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit rill anggaran yang terjadi. Penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.77 berikut :

Tabel 2.81
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	4.193.329.057.130,07	4.695.680.785.591,80	4.895.740.491.702,45	4.543.640.253.933,84	5.555.497.881.057,52
	Dikurangi Realisasi:					
2.	Belanja Daerah	4.281.057.917.890,90	4.339.507.207.931,43	4.825.333.666.427,41	5.021.839.830.907,43	5.717.246.391.556,56
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Defisit Riil	- 87.728.860.760,83	356.173.577.660,37	70.406.825.275,04	-478.199.576.973,59	-161.748.510.499,04
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan;					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	429.929.141.925,60	342.565.200.390,51	698.738.178.050,88	769.144.909.470,92	290.945.332.497,33
5.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	429.929.141.925,60	342.565.200.390,51	698.738.178.050,88	769.144.909.470,92	290.945.332.497,33
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	342.200.281.164,77	698.738.778.050,88	769.145.003.325,92	290.945.332.497,33	129.196.821.998,29

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 kondisi anggaran pemerintah daerah mengalami defisit riil berturut-turut sebesar minus Rp.87.728.860.760,83; Rp. 356.173.577.660,37 Rp.70.406.825.275,04; minus Rp.478.199.576.973,59 dan minus Rp.161.748.510.499,04. Kebijakan penutup defisit riil ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komposisi penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 pada Tabel 2.77 memperlihatkan bahwa komponen total penerimaan mempengaruhi sisa lebih pembiayaan pada anggaran Tahun berkenan seperti ditunjukkan pada Tahun 2020 untuk proporsi dari total komponen penerimaan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 429.929.141.925,60 memberikan total sisa lebih pembiayaan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 342.200.281.164,77 7 (surplus), demikian juga untuk Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dengan jumlah SiLPA yang tersedia memberikan total sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan masing-masing bernilai Surplus.

B. NERACA DAERAH

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Standar Akuntasi Pemerintah). Dengan demikian, Neraca Daerah merupakan sumber informasi kepada manajemen pemerintah daerah mengenai likuiditas keuangan daerah yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana.

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyusun sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang

memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Sedangkan Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Tabel 2.82
Rata – rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**	
1.1	**ASET LANCAR**	**14,93**
1.1.1	Kas	**18,18**
1.1.2	Piutang	**61,42**
1.1.3	Persediaan	**26,38**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**4,51**
1.2.1	Investasi non permanen	
1.2.2	Investasi permanen	**4,51**
1.3	**ASET TETAP**	**4,53**
1.3.1	Tanah	**10,34**
1.3.2	Peralatan dan mesin	**8,81**
1.3.3	Gedung dan bangunan	**6,12**
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1,42**
1.3.5	Aset tetap lainnya	**32,33**
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	**71,21**
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	**7,47**
1.4	**ASET LAINNYA**	**36,24**
1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	**0,14**
1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**519,56**
1.4.5	Aset Lainnya	**72,49**
1.4.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**18,68**
1.4.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**-25,15**
	JUMLAH ASET	**6,39**
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	
2	**KEWAJIBAN**	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**38,37**
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**0,36**
2.1.2	Pendapatan Diterima dimuka	**38,89**
2.1.3	Utang Belanja	**39,42**
2.1.6	Utang jangka pendek lainnya	**5,51**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**38,37**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**38,37**
3	**EKUITAS DANA**	
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	**5,58**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**6,39**

Sumber : Laporan Neraca Daerah (Audited) Tahun 2020-2024, data telah diolah (2024)

Berdasarkan informasi Neraca Daerah pada Tabel 2.78, aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 6,39 persen yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara rata-rata mengalami peningkatan positif atau bertambahnya aset setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pertumbuhan rata-rata Aset Lancar senilai 14,93 persen, dengan Aset Lancar Kas senilai 18,18 persen, tetapi nilai Piutang dan Persediaan mengalami kenaikan rata-rata per-Tahun yaitu 61,42 persen dan 26,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap struktur modal demikian juga sebaliknya tetapi tingkat pertumbuhan aset yang tinggi akan mengurangi pendapatan karena mendanai pertumbuhan atau penambahan aset tersebut secara internal. Kebijakan dengan mengurangi pertumbuhan jumlah aset akan menggeser pendanaan pada yang lebih prioritas.

Kewajiban Jangka Pendek, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang meliputi penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 Tahun (2020-2024) dengan rata-rata sebesar 38,37 persen, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 Tahun mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,58 persen. Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar *(current ratio),* rasio kas *(cash ratio)* dan rasio cepat *(quick ratio).* Sedangkan rasio lancar *(current ratio)* adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Aset lancar Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu Tahun 2020-2024 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada Tahun 2020 mencapai 383,59 persen yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3 (kali) kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai rasio cepat (*quick ratio*) mencapai 106,69 persen pada Tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu yang singkat karena persentase rasio lancar adalah merupakan satu ukuran likuiditas keuangan terbaik, untuk rasio solvabilitas Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena menghitung rasio solvabilitas yaitu perbandingan total aset dengan total utang. Untuk rata-rata umur persediaan selama kurun waktu 2020-2024 mencapai 365 hari per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada tingkat aman karena mempunyai persediaan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan selama kurang lebih 365 hari, karena rata-rata umur persediaan yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Pada sektor pelayanan publik semakin lama rata-rata umur persediaan adalah semakin baik. Rata-rata umur persediaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 365 hari. Hal ini menunjukkan bahwa posisi keuangan ini sangat mendukung kemampuan daerah untuk mengambil kebijakan fiskal yang lebih agresif atau adaptif terhadap perubahan

Tabel 2.83
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(%-hari)	(%-hari)	(%-hari)	(%-hari)	(%-hari)
1.	Rasio lancar (current ratio)	383,59	505,08	466,51	221,13	136,73
2.	Rasio quick (quick ratio)	339,20	452,44	404,03	166,62	106,69
3.	Rasio hutang terhadap modal	1,81	2,31	2,64	2,76	4,84
4.	Rasio total hutang terhadap total aset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Rata-rata umur piutang	1 hari	-	-	-	-
6.	Rata-rata umur persediaan	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00

Sumber : Laporan Neraca Daerah (Audited) Tahun 2020-2024, data telah diolah (2025)

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 2020-2024

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 - 2024 dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka secara umum kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 - 2024, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan guna menjaga ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan semua sumber-sumber Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat, seperti: DBH Pajak mencakup DBH PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), DBH PPh (Pajak Penghasilan) dan DBH CHT (Cukai Hasil Tembakau). Selanjutnya DBH SDA mencakup DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH Pertambangan Industri dan Umum, DBH Kehutanan dan DBH Perikanan.
2. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah sekaligus menjalin kerja sama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat (PAB), Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
3. Membangkitkan dan membangun kesadaran wajib retribusi untuk membayar kewajiban diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan publik dan pembaruan sistem pemungutan, peningkatan kualitas pegawai pengelola, penggunaan teknologi, dan peningkatan pengawasan. Dengan retribusi seperti: Retribusi Jasa Umum (pelayanan kesehatan, pelayanan kepelabuhanan, Pelayanan Penyeberangan Barang (ASDP), retribusi pengujian kendaraan bermotor dan lainnya); Retribusi Jasa Usaha (pemakaian kekayaan daerah, pendapatan BLUD RSUD Undata dan Madani, tempat pelelangan, terminal, rumah potong hewan, registrasi pemeriksaan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan, pelayanan kepelabuhanan tempat pelelangan ikan, penjualan produksi usaha daerah penjualan hasil produksi pembenihan, penjualan produksi usaha daerah penjualan hasil produksi, pelayanan penggantian biaya cetak peta, pelayanan kepelabuhanan dan lainnya); Retribusi Perizinan Tertentu (izin mendirikan

bangunan, pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi tenaga kerja asing (izin menetap tenaga kerja asing), izin gangguan, izin trayek dan lainnya).

4. Memaksimalkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil penyertaan modal. Untuk itu optimalisasi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilakukan dengan memberdayakan badan usaha daerah (PERUSDA) dengan menata kembali regulasi dan manajemen perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, sehingga penyertaan modal yang diberikan dapat diterima kembali melalui deviden dari badan usaha daerah tersebut, seperti: PT Bank Sulteng, PT Bangun Askirida dan Perusahaan Perseroan Daerah BUMD Pangan.
5. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima, dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

- Pengelolaan Belanja Daerah

  Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2020-2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimal atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pusat, Provinsi , dan kabupaten/kota terutama merespon prioritas Pembangunan Nasional yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

  1. Belanja Operasi

     Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja ini

merupakan pengeluaran yang bersifat internal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu unit kerja, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai yang diadakan sebagai kompensasi pembiayaan Kepala Daerah, DPRD, ASN;
b. Belanja Barang dan Jasa;

   Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang dan jasa dapat meliputi:

   - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda
   - Belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri
   - Belanja jasa seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU)
   - Belanja pemeliharaan aset
   - Belanja barang BLU

c. Belanja Hibah

   Belanja hibah adalah pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada pihak lain. Pemberian ini bersifat sukarela, tidak wajib, dan tidak mengikat. Kriteria Pemberian Hibah:

   - Peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan;
   - Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap Tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
   - Memenuhi persyaratan penerima hibah

d. Belanja Bantuan Sosial.

   Belanja bantuan sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Bentuk belanja bantuan sosial Rehabilitasi sosial, Perlindungan sosial, Pemberdayaan sosial, Jaminan sosial, Penanggulangan kemiskinan, Penanggulangan bencana.

2. Belanja Modal

   Belanja Modal Adalah adalah pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan negara, perusahaan swasta, hingga UMKM. Belanja modal terdiri dari Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, Belanja infrastruktur, Belanja aset tak berwujud.

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Belanja ini juga disebut BTT.

4. Belanja Transfer

   Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari satu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Pengeluaran ini wajib dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

a. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN 2020-2024

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2020-2024 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK-RI.

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja untuk masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun Anggaran 2021	1.309.674.547.600,00	3,029,833,260,331.43	43
2	Tahun Anggaran 2022	1.358.025.925.643,00	3,467,307,740,784.41	39
3	Tahun Anggaran 2023	1.352.486.363.084,00	3,669,353,467,823.43	36,85

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
4.	Tahun Anggaran 2024	1.591.031.082.089,00	4.126.215.309.467,6	38,58
	Jumlah	5.611.217.918.416,00	14.292.709.778.407,00	39,26

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah

b. ANALISIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat pengeluaran pembiayaan daerah berupa Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulteng. Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun Tahun 2022-2024 dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.895.740.491.702,45	4.543.640.253.933,84	5.563.786.406.836,52
2	Realisasi Belanja daerah	4.825.333.666.427,41	5.021.839.830.907,43	5.717.246.391.556,56
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-
	Surplus/ Defisit riil	70.406.825.275,04	(478.199.576.973,59)	(153.459.984.720,04)

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah

Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa anggaran Pemerintah Sulawesi Tengah mengalami surplus pada Tahun Anggaran 2022 surplus riil sebesar Rp 70.406.825.275,86,- kemudian pada Tahun Anggaran 2023 mengalami Defisit riil sebesar Rp (478.199.577.101,00) dan pada Tahun Anggaran 2024 juga mengalami defisit sebesar Rp (153.459.984.7206,04),-. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun Tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	10,92	(60,84)	(87,91)
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah

Berdasarkan data surplus anggaran dari Tahun 2022-2024 dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022-2024 terlihat bahwa angka SiLPA lebih besar dibandingkan dengan defisit riil anggaran. Pembiayaan daerah sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan akan diterima Kembali, baik pada Tahun anggaran berkenan maupun Tahun Tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran.

Untuk realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah, dengan kurun waktu yang sama pada Tahun 2022-2024, gambarannya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024

No.	Uraian	2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	769.145.003.325,92	100	290.945.332.497,33	100	129.196.821.998,29	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD						
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah						

Sumber : LRA Tahun 2020-2024, data telah diolah

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025 – 2030

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima Tahun ke depan atau dimaksudkan untuk memberikan gambaran proyeksi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah dalam suatu jangka waktu tertentu.

Pengalokasian sumber pendapatan ke dalam pos belanja pengeluaran dan pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan, sebagai berikut :

1. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, penyertaan modal daerah termasuk lain-lain PAD yang sah digunakan untuk membiayai alokasi belanja pada sektor peningkatan pelayanan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan PAD tersebut diperoleh;
2. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau semua penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dialokasikan kembali untuk pembiayaan peningkatan kapasitas penyertaan dana tersebut sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih baik sebagai sumber pemasukan kas daerah. Transfer;
3. Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa yang bersifat rutin sedangkan untuk Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi dari Perangkat Daerah selaku penerima DAK.
4. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sewajarnya untuk perbaikan dan peningkatan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil yang diperoleh.
5. Proyeksi pertumbuhan pendapatan telah disusun dengan dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan Opsen Pajak yang akan mulai berlaku efektif pada Tahun 2026, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

Dalam menentukan angka proyeksi baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan selain melihat rata-rata pertumbuhan lima Tahun sebelumnya juga harus mempertimbangkan kondisi makro agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik, Hal ini bertujuan agar dalam melalukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Penyesuaian terhadap target pajak dan retribusi daerah serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dan pendapatan transfer juga perlu dipertimbangkan.

A. ANALISIS PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2025 – 2030

Analisis keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

a. Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksikan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya yaitu proyeksi pajak yang menjadi tumpuan dan andalan di dalam peningkatan pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan disusun dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pencanangan Sulawesi Tengah sebagai Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan;
2. Pertumbuhan PAD berupa pajak, selain itu bagi hasil pajak dan bukan pajak yang memiliki trend meningkat dampak hasil dari perluasan investasi khususnya di Sektor Industri (Industri Logam Dasar) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (Pertambangan Bijih Logam).
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertumbuh secara eksponensial, kemitraan Perusahaan Daerah dengan Perusahaan Besar untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah;
4. Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional;

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan

sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.115.097.954.885,52**	**2.537.812.176.594,00**	**2.521.600.000.000,00**	**2.743.770.850.000,00**	**2.985.919.512.175,00**	**3.249.888.211.693,11**	**3.537.694.231.806,42**
1.1.1	Pajak Daerah	1.774.182.144.129,46	2.058.500.000.000,00	2.086.500.000.000,00	2.261.766.000.000,00	2.451.754.344.000,00	2.657.701.708.896,00	2.880.948.652.443,26
1.1.2	Retribusi Daerah	19.497.629.593,00	52.255.916.170,00	120.000.000.000,00	128.796.000.000,00	138.236.746.800,00	148.369.500.340,44	159.244.984.715,39
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	51.244.848.172,00	50.100.000.000,00	100.000.000,00	125.350.000,00	157.126.225,00	196.957.723,04	246.886.505,83
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	270.173.332.991,06	376.956.260.424,00	315.000.000.000,00	353.083.500.000,00	395.771.295.150,00	443.620.044.733,64	497.253.708.141,93
1.2	**Pendapatan Transfer**	**3.429.876.216.802,00**	**3.178.594.553.000,00**	**3.212.969.887.622,14**	**3.400.246.134.711,33**	**3.615.079.387.053,66**	**3.862.467.888.894,46**	**4.148.338.853.173,40**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.429.876.216.802,00	3.178.594.553.000,00	3.212.969.887.622,14	3.400.246.134.711,33	3.615.079.387.053,66	3.862.467.888.894,46	4.148.338.853.173,40
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	1.079.362.461.000,00	1.027.150.000.000,00	769.245.474.912,12	912.632.831.435,74	1.082.747.591.215,36	1.284.571.742.217,91	1.524.015.914.967,33
	Dana Alokasi Umum	1.616.772.456.028,00	1.590.676.442.000,00	1.655.022.456.028,00	1.689.446.923.113,38	1.724.587.419.114,14	1.760.458.837.431,71	1.797.076.381.250,29
	Dana Alokasi Khusus	733.741.299.774,00	560.768.111.000,00	788.701.956.682,02	798.166.380.162,20	807.744.376.724,15	817.437.309.244,84	827.246.556.955,78
	Dana Insentif Daerah							
1.3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**10.523.709.370,00**	**38.274.936.981,00**	**1.929.412.500,00**	**1.952.565.450,00**	**1.975.996.235,40**	**1.999.708.190,22**	**2.023.704.688,51**
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.463.080.495,00	38.274.936.981,00	1.929.412.500,00	1.952.565.450,00	1.975.996.235,40	1.999.708.190,22	2.023.704.688,51
1.3.3	Pendapatan Lainnya	60.628.875,00						
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**5.555.497.881.057,52**	**5.754.681.666.575,00**	**5.736.499.300.122,14**	**6.145.969.550.161,33**	**6.602.974.895.464,05**	**7.114.355.808.777,80**	**7.688.056.789.668,32**

b. Proyeksi Belanja

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasional, belanja modal dan belanja-belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Adapun proyeksi belanja mempertimbangkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan prioritas-prioritas daerah melalui program dan kegiatan yang berada perangkat daerah.

Proyeksi belanja disusun dengan asumsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan masyarakat Sulawesi Tengah sebagai masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Menjadikan masyarakat Sulawesi Tengah hidup bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang memiliki konektivitas infrastruktur dengan pola pembangunan berbasis Tata Ruang dan berbasis lingkungan berkelanjutan.

Adapun proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.89
Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
a	**Belanja Operasi**	**3.837.724.338.579,00**	**4.326.810.604.044,83**	**4.372.916.221.961,02**	**4.755.115.805.191,24**	**4.995.371.307.179,26**	**5.217.001.146.505,66**	**5.596.270.527.950,60**
	Belanja Pegawai	1.591.031.082.089,00	2.180.545.637.914,51	2.268.254.027.283,20	2.301.889.265.153,47	2.343.964.835.759,61	2.437.723.429.189,99	2.535.232.366.357,59
	Belanja Barang dan Jasa	1.905.793.276.794,00	2.012.530.769.407,26	1.616.378.624.025,31	1.419.667.390.362,30	1.475.034.418.586,43	1.528.436.732.859,90	1.588.045.765.441,44
	Belanja Hibah	323.245.519.696,00	108.335.032.938,06	154.620.448.153,51	109.851.470.561,19	115.344.044.089,25	121.111.246.293,71	127.166.808.608,40
	Belanja Bantuan Sosial	17.654.460.000,00	25.399.163.785,00	333.663.122.499,00	923.707.679.114,28	1.061.028.008.743,98	1.129.729.738.162,06	1.345.825.587.543,18
b	**Belanja Modal**	**1.048.818.023.742,56**	**464.847.985.196,84**	**390.083.078.161,12**	**402.604.744.970,09**	**604.399.102.284,80**	**878.985.313.468,14**	**1.058.039.742.030,47**
c	**Belanja Tidak Terduga**	**109.304.921,00**	**2.487.061.768,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
	Belanja Tidak Terduga	109.304.921,00	2.487.061.768,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
d	**Belanja Transfer**	**830.594.724.313,00**	**1.089.052.442.450,62**	**1.063.500.000.000,00**	**1.078.249.000.000,00**	**1.093.204.486.000,00**	**1.108.369.348.804,00**	**1.123.746.519.687,26**
	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	813.045.161.419,00	1.069.852.442.450,62	1.053.500.000.000,00	1.068.249.000.000,00	1.083.204.486.000,00	1.098.369.348.804,00	1.113.746.519.687,26
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	17.549.562.894,00	19.200.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA	**5.717.246.391.555,56**	**5.883.198.093.460,29**	**5.836.499.300.122,14**	**6.245.969.550.161,33**	**6.702.974.895.464,05**	**7.214.355.808.777,80**	**7.788.056.789.668,32**

c. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah selama periode 2026 - 2030, proyeksi menunjukkan adanya defisit murni sebesar Rp 100 miliar yang seluruhnya ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya. Tidak ada pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal, atau pembiayaan inovatif lain yang tercantum. Ketergantungan pembiayaan dari SiLPA berisiko apabila realisasi anggaran tidak sesuai proyeksi atau terjadi penurunan SiLPA signifikan akibat krisis fiskal.

Tabel 2.90
Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
3.1	Penerimaan pembiayaan							
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	290.945.333.497,00	128.516.426.885,29	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**290.945.333.497,00**	**128.516.426.885,29**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**290.945.333.497,00**	**128.516.426.885,29**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**
	SILPA Tahun Berkenan	**129.196.822.998,96**	- **0,00**	-	-	-		-

Secara lengkap proyeksi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 – 2030 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Proyeksi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 – 2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.115.097.954.885,52**	**2.537.812.176.594,00**	**2.521.600.000.000,00**	**2.743.770.850.000,00**	**2.985.919.512.175,00**	**3.249.888.211.693,11**	**3.537.694.231.806,42**
1.1.1	Pajak Daerah	1.774.182.144.129,46	2.058.500.000.000,00	2.086.500.000.000,00	2.261.766.000.000,00	2.451.754.344.000,00	2.657.701.708.896,00	2.880.948.652.443,26
1.1.2	Retribusi Daerah	19.497.629.593,00	52.255.916.170,00	120.000.000.000,00	128.796.000.000,00	138.236.746.800,00	148.369.500.340,44	159.244.984.715,39
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	51.244.848.172,00	50.100.000.000,00	100.000.000,00	125.350.000,00	157.126.225,00	196.957.723,04	246.886.505,83
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	270.173.332.991,06	376.956.260.424,00	315.000.000.000,00	353.083.500.000,00	395.771.295.150,00	443.620.044.733,64	497.253.708.141,93
1.2	**Pendapatan Transfer**	**3.429.876.216.802,00**	**3.178.594.553.000,00**	**3.212.969.887.622,14**	**3.400.246.134.711,33**	**3.615.079.387.053,66**	**3.862.467.888.894,46**	**4.148.338.853.173,40**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.429.876.216.802,00	3.178.594.553.000,00	3.212.969.887.622,14	3.400.246.134.711,33	3.615.079.387.053,66	3.862.467.888.894,46	4.148.338.853.173,40
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	1.079.362.461.000,00	1.027.150.000.000,00	769.245.474.912,12	912.632.831.435,74	1.082.747.591.215,36	1.284.571.742.217,91	1.524.015.914.967,33
	Dana Alokasi Umum	1.616.772.456.028,00	1.590.676.442.000,00	1.655.022.456.028,00	1.689.446.923.113,38	1.724.587.419.114,14	1.760.458.837.431,71	1.797.076.381.250,29
	Dana Alokasi Khusus	733.741.299.774,00	560.768.111.000,00	788.701.956.682,02	798.166.380.162,20	807.744.376.724,15	817.437.309.244,84	827.246.556.955,78
	Dana Insentif Daerah							
1.3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**10.523.709.370,00**	**38.274.936.981,00**	**1.929.412.500,00**	**1.952.565.450,00**	**1.975.996.235,40**	**1.999.708.190,22**	**2.023.704.688,51**
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.463.080.495,00	38.274.936.981,00	1.929.412.500,00	1.952.565.450,00	1.975.996.235,40	1.999.708.190,22	2.023.704.688,51
1.3.3	Pendapatan Lainnya	60.628.875,00						
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**5.555.497.881.057,52**	**5.754.681.666.575,00**	**5.736.499.300.122,14**	**6.145.969.550.161,33**	**6.602.974.895.464,05**	**7.114.355.808.777,80**	**7.688.056.789.668,32**
a	**Belanja Operasi**	**3.837.724.338.579,00**	**4.326.810.604.044,83**	**4.372.916.221.961,02**	**4.755.115.805.191,24**	**4.995.371.307.179,26**	**5.217.001.146.505,66**	**5.596.270.527.950,60**
	Belanja Pegawai	1.591.031.082.089,00	2.180.545.637.914,51	2.268.254.027.283,20	2.301.889.265.153,47	2.343.964.835.759,61	2.437.723.429.189,99	2.535.232.366.357,59
	Belanja Barang dan Jasa	1.905.793.276.794,00	2.012.530.769.407,26	1.616.378.624.025,31	1.419.667.390.362,30	1.475.034.418.586,43	1.528.436.732.859,90	1.588.045.765.441,44
	Belanja Hibah	323.245.519.696,00	108.335.032.938,06	154.620.448.153,51	109.851.470.561,19	115.344.044.089,25	121.111.246.293,71	127.166.808.608,40
	Belanja Bantuan Sosial	17.654.460.000,00	25.399.163.785,00	333.663.122.499,00	923.707.679.114,28	1.061.028.008.743,98	1.129.729.738.162,06	1.345.825.587.543,18
b	**Belanja Modal**	**1.048.818.023.742,56**	**464.847.985.196,84**	**390.083.078.161,12**	**402.604.744.970,09**	**604.399.102.284,80**	**878.985.313.468,14**	**1.058.039.742.030,47**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi							
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
	Belanja Modal Aset Lainnya							
c	**Belanja Tidak Terduga**	**109.304.921,00**	**2.487.061.768,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
	Belanja Tidak Terduga	109.304.921,00	2.487.061.768,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
d	**Belanja Transfer**	**830.594.724.313,00**	**1.089.052.442.450,62**	**1.063.500.000.000,00**	**1.078.249.000.000,00**	**1.093.204.486.000,00**	**1.108.369.348.804,00**	**1.123.746.519.687,26**
	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	813.045.161.419,00	1.069.852.442.450,62	1.053.500.000.000,00	1.068.249.000.000,00	1.083.204.486.000,00	1.098.369.348.804,00	1.113.746.519.687,26
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	17.549.562.894,00	19.200.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA	**5.717.246.391.555,56**	**5.883.198.093.460,29**	**5.836.499.300.122,14**	**6.245.969.550.161,33**	**6.702.974.895.464,05**	**7.214.355.808.777,80**	**7.788.056.789.668,32**
	Surplus Defisit							
3.1	Penerimaan pembiayaan							
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	290.945.333.497,00	128.516.426.885,29	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**290.945.333.497,00**	**128.516.426.885,29**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**290.945.333.497,00**	**128.516.426.885,29**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**
	SILPA Tahun Berkenan	**129.196.822.998,96**	- **0,00**	-	-	-		-

B. ANALISIS KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Analisis kerangka pendanaan sangat dibutuhkan untuk mengukur kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah Tahun 2025-2030, melalui analisis terhadap pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah.

Kapasitas riil keuangan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan. Kapasitas riil keuangan dihitung untuk mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Jangka Menengah selama 5 (lima) Tahun dengan mengidentifikasi

sumber-sumber penerimaan daerah yang akan dialokasikan untuk berbagai pembiayaan pos-pos belanja dan pengeluaran yang tepat. Kapasitas riil keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 -2030

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
	PENDAPATAN DAERAH	**5.754.681.666.575,00**	**5.736.499.300.122,14**	**6.145.969.550.161,33**	**6.602.974.895.464,05**	**7.114.355.808.777,80**	**7.688.056.789.668,32**
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	**128.516.426.885,29**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**
	TOTAL PENERIMAAN	**5.883.198.093.460,29**	**5.836.499.300.122,14**	**6.245.969.550.161,33**	**6.702.974.895.464,05**	**7.214.355.808.777,80**	**7.788.056.789.668,32**
	DIKURANGI:						
	TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT						
	- Belanja Pegawai	2.180.545.637.914,51	2.268.254.027.283,20	2.301.889.265.153,47	2.343.964.835.759,61	2.437.723.429.189,99	2.535.232.366.357,59
	- Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.069.852.442.450,62	1.053.500.000.000,00	1.068.249.000.000,00	1.083.204.486.000,00	1.098.369.348.804,00	1.113.746.519.687,26
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	**3.702.652.455.545,78**	**2.514.745.272.838,94**	**3.944.080.285.007,86**	**4.359.010.059.704,45**	**4.776.632.379.587,81**	**5.252.824.423.310,73**

Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung masing-masing anggaran berdasarkan prioritas I dan II dengan rincian sebagai berikut :

1. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas I, berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada Tahun rencana, belanja Infrastruktur serta belanja modal. Selain itu, program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik dalam memenuhi standar pelayanan minimal seperti kesehatan dan pendidikan, berskala besar, dan memiliki kepentingan pada capaian visi dan misi kepala daerah terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030.
2. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas II diperuntukkan untuk pembiayaan program dan kegiatan sifatnya penunjang seperti biaya operasional kantor, dan lainnya.

Tabel 2.93
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025 – 2030

NO	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	**3.702.652.455.545,78**	**2.514.745.272.838,94**	**3.944.080.285.007,86**	**4.359.010.059.704,45**	**4.776.632.379.587,81**	**5.252.824.423.310,73**
A	PRIORITAS PERTAMA	3.391.188.670.376,01	2.154.777.383.712,21	3.552.403.934.312,98	3.930.991.911.997,29	4.306.895.905.508,92	4.734.919.329.407,76
B	PRIORITAS KEDUA	311.463.785.169,77	359.967.889.126,73	391.676.350.694,88	428.018.147.707,16	469.736.474.078,89	517.905.093.902,97

Kapasitas Pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari Sektor Publik pusat dan daerah, serta non publik masih relatif terbatas dalam hal pembiayaan pembangunan. Terdapat sejumlah tantangan dan isu utama yang dihadapi, antara lain belum berkembangnya inovasi pembiayaan Pembangunan, tingginya *cost of fund*, dangkalnya sektor keuangan (terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non bank, utamanya dana pensiun, asuransi dan pasar modal) serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan, dimana inklusi keuangan baru mencapai 85,10 persen pada Tahun 2022.

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal secara mudah, cepat, aman, dan terjangkau. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memperluas inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah strategis yang dilakukan dalam meningkatkan inklusi keuangan daerah yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
2. Mendorong pertumbuhan pelaku UMKM melalui kemudahan pembiayaan.
3. Meningkatkan literasi dan edukasi keuangan masyarakat.
4. Menurunkan tingkat masyarakat yang tidak memiliki rekening atau akses finansial.
5. Mendukung sistem keuangan yang sehat dan berdaya saing di daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan Indeks Inklusi Keuangan Daerah pada Tahun 2025 hingga Tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 2.94
Target Inklusi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025- 2030

Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Inklusi Keuangan Daerah (%)	85,25	85,86	86,47	87,09	87,70	88,94

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi saat ini, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1) Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Identifikasi permasalahan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah disajikan pada Bab 2, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan melihat penyebab kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, maka dapat di rumuskan permasalahan utama pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Relatif Masih Rendah;
2. Hilirisasi Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan Belum Optimal;

3. Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata;
4. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal;
5. Potensi Bencana Daerah yang cukup Tingi serta Adanya Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup.

Dari uraian permasalahan di atas dan hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, diidentifikasi bahwa yang menjadi faktor penghambat utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. **Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Relatif Masih Rendah.**

   Faktor penghambat pada kualitas sumberdaya manusia yang belum berdaya saing. Hal ini telihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang masih dibawah rata-rata nasional. Komponen IPM terdiri dari Sumberdaya Manusia (SDM) Pendidikan dan SDM Kesehatan. SDM Pendidikan yang ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih kurang hal ini dapat dilihat pada capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), walaupun capaian Sulawesi Tengah untuk capaian RLS dan HLS sudah diatas rata-rata nasional, tetapi masih dibawah regional wilayah sulawesi yaitu RLS (Sulawesi Utara dan sulawesi Tenggara) dan HLS (Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan). Tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata nasional yaitu Umur Harapan Hidup serta Angka prevalensi Stunting. Selain itu faktor tersebut diatas faktor penghambat lainnya adalah rendahnya kualitas SDM tenaga kerja Sulawesi Tengah yang masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah serta ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2. **Hilirisasi Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan Belum Optimal.**

   Sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sektor Pertanian (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan) dan Pariwisata serta pertambangan, namun pemanfaatan potensi-potensi tersebut belum bisa terwujud secara optimal hal ini disebabkan oleh produktivitas sektor

unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja di sektor petanian memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pengetahuan, keahlian dan akses petani/pekebun/nelayan terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan, peralatan dan modal. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah belum berdampak sepenuhnya kepada kesejateraan masyarakat. Rendahnya daya saing juga menjadi faktor penghambat, Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan belum memberikan dampak secara optimal dalam penurunan persentase penduduk miskin. Aspek pembiayaan yaitu share penyaluran kredit perbankan khususnya kredit investasi dan kredit sektor jasa masih cenderung rendah.

3. Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata.

Faktor penghambat pada disparitas pembangunan antar wilayah disebabkan Kondisi geografis Sulawesi Tengah berupa kepulauan, perbukitan, pedalaman dan hutan membuat sulit dalam penataan aksesibilitas dan konektivitas atau jaringan penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan sulitnya suatu daerah untuk dijangkau sehingga terjadi perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Sarana dan prasarana infrastruktur jalan sebagian besar masih belum kondisi mantap, pembangunan seperti fasilitas pelabuhan di Sulawesi Tengah menyebabkan kapal-kapal konteiner belum beroperasi secara maksimal, sektor perhubungan udara juga masih memerlukan pengembangan baik dari sisi kapasitas maupun integrasi terhadap wilayah hinterland dan multimoda untuk menunjang pariwisata dan sebagai simpul logistik angkutan barang. Sarana prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi dan persampahan belum terpenuhi secara optimal, sistem pengolahan limbah dan kinerja sistem irigasi yang masih rendah, jaringan telekomunikasi juga masih relatif rendah serta pasokan listrik belum menjangkau semua wilayah, kualitas dan kuantitas jalan belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.

4. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal.

Sektor penghambat pada tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya terwujud utamanya terkait pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah masih belum optimal atau belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi terutama dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi.

5. Potensi Bencana Daerah yang Cukup Tinggi serta Adanya Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki resiko bencana yang cukup tinggi, terutama terkait dengan gempa bumi dan likuefaksi. Potensi resiko bencana geologi seperti gempa tektonik dijalur patahan Palu Koro yang membelah dari Teluk Palu hingga Lembah Bone masih dominan. Bahaya Tsunami juga dapat mengancam kawasan di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan resiko bahaya dan terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana akan meningkatkan resiko terhadap bencana. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pencemaran air, udara dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas Pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*). Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaaan lahan untuk pertanian dan Perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Dari permasalahan utama diatas dapat dijabarkan kedalam tabel beserta faktor penghambat masing-masing permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.95
Pemetaan Masalah Utama serta Faktor Penghambat Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing	1. Kualitas dan keterjangkauan Layanan Kesehatan belum optimal, responsif dan merata	1. Kendala geografis pada beberapa wilayah menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas Kesehatan; 2. Sarana dan prasarana di fasilitas dan pelayanan kesehatan belum memadai; 3. Ketersediaan Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas dan belum merata; 4. Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah; 5. Pola Asuh, Pola Makan dan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak belum memadai sehingga menyebabkan tingginya privalensi stunting.
	2. Pendidikan belum berkualitas dan merata	1. Kendala geografis pada beberapa wilayah menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas Pendidikan 2. Akses terhadap pelyanan Pendidikan 3. Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pembelajaran relatif belum memadai, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan Non Formal; 4. Pemenuhan SPM Pendididikan Menengah belum optimal; 5. Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah belum optimal sehingga digitalisasi Pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar masih terkendala; 6. Jumlah Guru professional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah; 7. Sebaran, Kualitas dan Kuantitas Tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang dan tidak merata; 8. Kemampuan literasi, matematika dan sains peserta didik belum memenuhi standar nasional; 9. Peran serta masyarakat dalam Pendidikan masih perlu di tingkatkan;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		10. Cakupan layanan perpustakaan dan Gerakan literasi masyarakat masih rendah.
	3. Perlindungan Sosial Belum Inklusif, adaptif dan berkeadilan	1. Data Satu Data Indonesia (DT-SEN) belumsepenuhnya dapat diakses; 2. Masih adanya Ego Sektoral 3. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial masih kurang; 4. Program penanggulangan kemiskinan bersifat parsial dan belum menyentuh langsung substansi masalah; 5. Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah; 6. Pemenuhan SPM Sosial Belum Optimal.
2. Hilirisasi Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan Belum Optimal	1. Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan swasembada pangan	1. Belum optimalnya dukungan sarana produksi pertanian; 2. Penyediaan benih/bibit belum memenuhi prinsip 5 T yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga; 3. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, bibit unggil dan pupuk serta sarana dan prasarana pertanian; 4. Masih kurangnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian dan penerapan teknologi pasca panen; 5. Kapasitas SDM Pertanian masih rendah dan peran Kelembagaan Pertanian belum optimal; 6. Adanya gangguan suplai air irigasi yan dapat berasal dari berkuranya debit air di reservoir maupun karena bencana alam; 7. Banyaknya Irigasi yang sudah tdak berfungsi secara optimal; 8. Adanya ahli fungsi lahan pertanian.
	2. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	1. Industri pengolahan hasil perkebunan masih kurang; 2. Penerapan teknologi pasca panen untuk meningkatkan

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	masih perlu di tingkatkan	nilai tambah hasil perkebunan belum di terapkan secara optimal; 3. Konflik lahan industri perkebunan besar masih sering terjadi; 4. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana Perkebunan; 5. Tingginya alih fungsi lahan ke aktivitas ekonomi yang dirasa lebih menguntungkan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lain sebagainya.
	3. Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan swasembada daging	1. Usaha peternakan umumnya masih tradisional; 2. Jaminan ketersediaan dan kestabilan harga pakan ternak bagi petani ternak belum ada; 3. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum optimal, di sebabkan oleh wilayah kerja yang luas tidak sebanding dengan tenaga keswan serta biaya operasional pelayanan terbatas; 4. Usaha atau unit pembibitan ternak masih belum memadai; 5. Teknologi dan SDM pengembangan peternakan belum memadai.
	4. Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan	1. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional; 2. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan akses terhadap teknologi perikanan; 4. Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya/tangkap dan pengolahan hasil

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, TPI, dan pelabuhan perikanan).
	5. Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak dan nelayan yang belum berfungsi optimal	1. Belum adanya jaminan ketersediaan pupuk sepanjang waktu dan harga yang tetap serta berubsidi bagi kelompok tani; 2. Belum terlaksananya pembentukan institusi usaha agribisnis bagi kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian; 3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan pengetahuan kelompok petani/pternak/nelayan dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian/perikanan/kelautan; 4. Rendahnya akses pemasaran dan permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
	6. Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi Masyarakat	1. Masih banyak terdapat wilayah Rawan pangan; 2. Laju alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan cukup tinggi; 3. Lahan tidur dan Lahan pekarangan belum di manfaatkan secara optimal; 4. Belum ada Jaminan ketersediaan pangan daerah dan kestabilan harga; 5. Kesadaran yang masih rendah terhadap keanekaragaman bahan makanan pokok selain beras.
	7. Belum Optimalnya Pengelolaan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif	Kolaborasi dan koordinasi antar Stakeholder baik internal maupun eksternal yang belum optimal; • Jaringan promosi dan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri belum optimal • Pengembangan Industri pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		• Pendampingan terhadap destinasi unggulan belum optimal Infrastruktur yang belum memadai • Fasilitas dasar belum terpenuhi (Listrik, air bersih, jalan, dermaga, persampahan) • Fasilitas di destinasi belum memenuhi standard (Toilet, Klinik Kesehatan, Internet, Fasilitas Disabilitas, Tempat Ibadah, Jasa Akomodasi, Jasa Makan Minum, Galeri Cenderamata) • Kurangnya armada untuk konektivitas laut/pulau (Kapal wisata, speedboat) • Belum Tersedianya creative center untuk mendukung terwujudnya Ekosistem Ekonomi Kreatif dan wirausaha baru di sektor Ekonomi Kreatif Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum memadai • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap wisata berkelanjutan khususnya dalam menangani kebersihan dan pengelolaan sampah • Tenaga kerja pariwisata dan Ekraf yang belum sesuai Standard Kerja Kompetensi Nasional
	8. Kesenjangan Ekonomi masih cukup tinggi	1. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tinggi selama ini dan bahkan

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional masih bersifat ekslusif karena belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat; 2. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat; 3. Nilai komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan belum maksimal memberikan nilai tambah (add value) bagi masyarakat dan daerah dikarenakan industri hilirisasi yang masih minim; 4. Masih banyak komoditas mentah yang diekspor dan memberikan harga rendah sehingga biaya operasional ditingkat petani lebih rendah dari harga jual komoditas; 5. Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat diakibatkan dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang, sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.
	9. Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif	1. Kualitas koperasi dan usaha mikro masih rendah serta pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal; 2. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika, utamanya untuk distribusi dan pemasaran;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		3. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang, utamanya bantuan modal usaha dan Inovasi Produk; 4. Iklim usaha UMKM belum sepenuhnya mendukung; 5. Pengetahuan dan literasi Digital para pelaku UMKM masih terbatas; 6. Nilai Ekspor daerah masih rendah; 7. Ekonomi Kreatif di Sektor Pariwisata Belum Berkembang Dengan Baik; 8. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah belum optimal; 9. Akses Industri Kecil Menengah terhadap modal dan pemasaran terbatas; 10. Belum siapnya IKM di era Digitalisasi ekonomi saat ini.
3. Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum Optimal dan Merata	1. Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah	1. Lokasi Kawasan kumuh dan Rumah Tidak layak Huni di perkotaan masih belum memadai; 2. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sanitasi dan persampahan belum memadai.
	2. Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata	1. Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah untuk membiayai infrastruktur transportasi/konektivitas masih terbatas; 2. Moda transportasi masih terbatas, belum memadai, terpadu dan nyaman; 3. Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan belum memadai; 4. Kontribusi sektor perhubungan terhadap peningkatan PAD belum optimal.
	3. Kualitas	1. Aksesibilitas, keberlanjutan,

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	Jaringan Irigasi sesuai kewenangan masih perlu ditingkatkan	keamanan dan ketersediaan potensi Sumber Daya Air terbatas; 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi partisipatif; 3. Banyaknya Irigasi yang sudah rusak;
	4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang untuk mendukung ekonomi digital dan Egoverment belum optimal	1. Masih terdapat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang Blank Spot; 2. Jaringan komunikasi dan informatika berteknologi terkini masih belum tersedia secara merata; 3. Kompetensi Aparatur di bidang TIK masih terbatas; 4. Literasi TIK masyarakat (digital Society) masih rendah.
	5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pelaksanaan konservasi energi di semua sektor	1. Keterbatasan kewenangan pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan EBT; 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pelaksanaan konservasi energi di semua sektor.
	6. Disparitas pembangunan antar wilayah masih cukup tinggi	1. Pemerataan dan Pembangunan wilayah belum optimal dan seimbang; 2. Adanya perbedaan kandungan potensi sumberdaya alam antar wilayah Provinsi Sulawesi.
4. Tata Kelola Pemerintahan belum Optimal	1. Kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memadai	1. Sistem, mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan publik masih kurang; 2. Kualitas dan Kuantitas aparatur pelayanan publik masih kurang; 3. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
	2. Indeks Inovasi Daerah Cukup Baik, namun perlu di Tingkatkan	1. Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan; 2. Inovasi dari berbagai Perangkat Daerah masih

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		minim.
	3. Kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal	1. Tenaga Fungsional perencana dan Fungsional peneliti masih kurang, belum memenuhi kuota yang dibutuhkan; 2. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan belum maksimal; 3. Hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan; 4. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media masa dalam pembangunan masih rendah.
	4. Kualitas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan	1. Masih adanya temuan BPK berkaitan dengan kesalahan administrasi pengelolaan keuangan daerah; 2. Pengamanan asset daerah belum optimal;
	5. Belum Maksimalnya Penggalian Potensi Pendapatan asli Daerah	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal dilakukan; 2. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal dilaksanakan; 3. Pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat belum maksimal.
	6. Pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemda masih perlu ditingkatkan	1. Fungsi Pengawasan belum memadai; 2. Nilai SAKIP perlu di tingkatkan implementasinya.
	7. Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal	Masih tingginya kasus pelanggaran Perda Oleh Masyarakat.
	8. Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih rendah;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksana yang belum berbasis TIK	2. Penataan Arsip Daerah belum maksimal.
	9. Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah belum sesuai yang diharapkan	Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Pemerintah masih rendah.
	10. Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal	1. Kesejahteraan dan profesionalisme ASN belum optimal.; 2. Kapasitas SDM Aparatur masih rendah; 3. Sistem Merit belum spenuhnya di terapkan.
	11. Belum Adanya inovasi pembiayaan Pembangunan Daerah	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terbatas; 2. Pembangunan Daerah khususnya Infrastruktur membutuhkan Investasi yang cukup besar.
5. Potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup	1. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah belum optimal serta tidak terdatanya potensi bencana	1. Bencana yang terjadi sifatnya alami maupun non alami atau akibat ulah manusia, seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor dan pencemaran sebagai indikasi terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2. Pemanfaatan sumber daya alam belum dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup; 3. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana Daerah belum optimal; 4. Sistem Peringatan Dini Bencana belum tersedia secara optimal; 5. Manajemen bencana berbasis masyarakat belum terlaksana dengan baik, terutama untuk sistem logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana baik alam maupun

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		non alam; 6. Kurangnya data geologi Provinsi Sulawesi Tengah terkait potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan kebencanaan lainnya; 7. RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah.
	2. Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi dan terlaksana dengan baik	1. Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, mengakibatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di sejumlah kawasan di Sulawesi Tengah mengalami perubahan dan penurunan; 2. Sebaran kemampuan lingkungan dalam mendukung penyediaan pangan telah mengalami penurunan yang diindikasikan dengan tingginya persentase daerah rawan pangan, alih fungsi lahan yang tinggi dan beralihnya profesi petani ke profesi non petani; 3. Sulawesi Tengah terindikasi adanya degradasi DAS berupa lahan gundul lahan kritis dan erosi akibat digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan dikarenakan mengabaikan potensi yang ada di lingkungan DAS sendiri; 4. Tingginya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah seperti: kegiatan pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya memberikan dampak pada berkurangnya kemampuan dari ekosistem pendukung (supporting) berupa produksi

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		utama formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan dan ketersediaan habitat; 5. Kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan Lingkungan Hidup masih belum konsisten; 6. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah; 7. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca tidak di implementasikan dengan optimal; 8. Data dan informasi geospasial belum tersedia.

2). Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Urusan Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan pembentukan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berdaya saing. Namun, capaian pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah kendala yang secara langsung berimplikasi pada rendahnya Indeks Modal Manusia

Permasalahan geografis pada beberapa wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Hal ini diperparah dengan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif belum memadai, baik untuk pendidikan formal maupun nonformal, sehingga berdampak pada keterbatasan daya tampung dan kualitas layanan pendidikan.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menegah masih belum optimal. Banyak sekolah belum sepenuhnya memenuhi standar sarana, prasarana, jumlah guru, maupun kualitas pembelajaran. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan akses internet, terutama di daerah pedesaan dan kepulauan, sehingga upaya digitalisasi pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar belum berjalan maksimal.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan distribusinya belum merata. Sebaran, kualitas, dan kuantitas tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dampaknya, kualitas layanan pembelajaran antarwilayah tidak merata.

Hasil belajar, kemampuan literasi, matematika, dan sains peserta didik masih berada di bawah standar nasional. Rendahnya capaian ini berkaitan dengan keterbatasan kualitas pembelajaran, minimnya budaya baca, serta rendahnya inovasi metode mengajar di sekolah.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan. Dukungan keluarga, komunitas, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan masih relatif rendah. Cakupan layanan perpustakaan daerah juga belum optimal, sementara gerakan literasi masyarakat masih berjalan terbatas dan belum menjadi budaya yang kuat.

Secara umum, permasalahan ini menunjukkan adanya tantangan ganda: di satu sisi, akses dan pemerataan pendidikan belum merata; di sisi lain, mutu pembelajaran dan budaya literasi masyarakat juga masih lemah. Keduanya saling terkait dan memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif agar capaian pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat meningkat secara signifikan.

Peningkatan Indeks Modal Manusia di Sulawesi Tengah memerlukan kebijakan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi mutu, mencakup pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil, peningkatan kompetensi guru, penguatan sarana prasarana dan infrastruktur digital, serta pengembangan budaya literasi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat benar-benar menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif, serta mendorong kemajuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b) Urusan Penyelenggaraan Kesehatan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang berimplikasi langsung terhadap capaian Indeks Modal Manusia (HCI).

Pertama, sarana dan prasarana pada fasilitas dan pelayanan kesehatan belum memadai, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Keterbatasan infrastruktur kesehatan menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti imunisasi, persalinan aman, dan gizi anak, belum merata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya status kesehatan dan harapan hidup sehat masyarakat.

Kedua, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan masih terbatas dan belum merata. Konsentrasi tenaga medis lebih banyak terdapat di ibu kota Provinsi dan kabupaten, sementara wilayah terpencil kekurangan dokter, bidan, maupun tenaga gizi. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan ini menghambat pemerataan layanan kesehatan dan berkontribusi pada rendahnya kualitas tumbuh kembang anak.

Ketiga, kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. Rendahnya perilaku preventif, seperti cuci tangan pakai sabun, pola konsumsi sehat, serta kesadaran menjaga kebersihan lingkungan, memperbesar risiko penyakit menular maupun gizi buruk. Hal ini menurunkan produktivitas dan kualitas kesehatan jangka panjang.

Keempat, pola asuh dan pola makan yang kurang tepat, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di Sulawesi Tengah. Anak-anak yang mengalami stunting berpotensi memiliki kecerdasan kognitif yang lebih rendah dan produktivitas yang terbatas di masa depan, yang pada gilirannya menekan kualitas modal manusia.

Permasalahan kesehatan di Sulawesi Tengah—mulai dari keterbatasan layanan, ketidakmerataan tenaga kesehatan, rendahnya kesadaran PHBS, hingga tingginya prevalensi stunting—secara langsung menurunkan komponen kesehatan dan produktivitas dalam HCI.

Angka kematian ibu (AKI) masih relatif tinggi, AKI dalam tiga Tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan, namun tetap memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan ibu belum optimal. Tingginya angka kematian ibu berdampak langsung pada kualitas hidup anak dan keluarga, serta menurunkan produktivitas generasi berikutnya.

Dengan kondisi tersebut, Indeks Modal Manusia di Sulawesi Tengah terhambat oleh persoalan kesehatan, gizi, dan kesenjangan pelayanan kesehatan. Akses layanan kesehatan yang belum merata, masih tingginya

stunting, serta tingginya angka kematian ibu memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kualitas SDM harus diarahkan pada penguatan sistem kesehatan dan gizi masyarakat.

c) Urusan Penyelenggaraan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum tercapai meliputi sebagai berikut:

1. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola diwilayah kewenangan Provinsi dari target 30,77% dengan Capaian 10,08% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena anggaran yang ada masih menyusun dokumen rencana induk persampahan regional Provinsi Sulawesi Tengah dan sosialisasi pemahaman pengelolaan persampahan di kabupaten Parigi Moutong;
2. Selain itu permasalahan yang muncul adalah luas fungsional daerah irigasi kewenangan Provinsi berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi seluas 47.640 Ha yang tersebar di 30 Daerah irigasi tersebut, 13 diantaranya memerlukan penanganan rehabilitasi bendung yang usianya sudah lebih dari 30 tahun.

   Panjang garis Pantai di Sulawesi Tengah yaitu 7.016 Km, dan garis Pantai yang rawan abrasi kurang lebih sekitar 5% yaitu 350 Km. Untuk target renstra periode 2021-2026 baru bisa menargetkan 10% dari total luasan yaitu kurang lebih sekitar 34,04 Km. capaian penanganan daerah rawan abrasi pantai sampai dengan Tahun 2023 baru mencapai angka 18% atau sekitar 6,314,4 Ha dari luas daerah rawan banjir sekitar 35,080 Ha.

   Terdapat 4 (empat) wilayah sungai (WS) kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah yakni WS Bongka Metawa dengan panjang sekitar 3.173 Km, WS Laa Tambalako dengan panjang sekitar 707,24 Km, WS Lambunu Buol dengan panjang sekitar 1.898 Km dan Wilayah Sungai Kepualaun Banggai dengan panjang sekitar 373 Km. total panjang sungai kewenangan Provinsi sekitar 6.150,8 Km dengan panjang daaerah rawan banjir sekitar 488,5 Km. Sampai dengan Tahun 2023 daerah rawan banjir yang tertangani baru mencapai angka 31%.
3. Permasalahan pada sektor kebinamargaan di Provinsi Sulawesi Tengah juga perlu mendapat perhatian serius, dimana persentase kemantapan jalan Provinsi masih tergolong rendah. Hingga Tahun 2024 persentase kemantapan jalan

Provinsi Sulawesi Tengah baru mencapai 64, 98% dimana kondisi jalan baik baru mencapai 40,44% dan kondisi jalan sedang sebesar 24,54%. Sedangkan kondisi tidak mantap jalan Provinsi masih sebesar 35,02% dengan kondisi rusak ringan sebesar 5,27% dan kondisi rusak berat sebesar 29,75%.

d) Urusan Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Bidang Perumahan

- Masih tingginya angka rumah tidak layak huni dan *backlog* perumahan.
- Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 1/2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman serta Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, khususnya terkait kewenangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum sejalan.
- Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana yang belum tuntas sesuai target.
- Terbatasnya informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR serta akses terhadap bantuan pembiayaan perumahan

2. Bidang Kawasan permukiman

- Luasan permukiman kumuh yang cenderung meningkat.
- Kewenangan luasan kawasan kumuh pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan luas Lokasi SK kawasan kumuh.
- Capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah.
- Dokumen RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya ditetapkan.
- Bertambahnya Rumah tidak layak huni di kabupaten/ kota

3. Bidang PSU dan Sertifikasi

- Belum adanya deliniasi kewenangan penanganan PSU permukiman Provinsi dan PSU perumahan Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan PSU permukiman belum optimal dalam penyelenggaraannya.
- Tumpang tindih penanganan PSU permukiman dengan perangkat daerah teknis lain.

- Belum terlaksananya sertifikasi dan registrasi perorangan atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

4. Bidang Pertanahan

- Belum optimalnya pendataan terkait permasalahan Sengketa Tanah Garapan.
- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik.

e) Urusan Penyelenggaraan Sosial

Permasalahan dalam urusan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah masih ditandai dengan kompleksitas intervensi terhadap kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS terdiri dari beragam kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, fakir miskin, dan kelompok marginal lainnya yang memerlukan perhatian dan layanan khusus. Namun, penanganan terhadap PPKS khususnya masyarakat miskin masih menghadapi tantangan akibat perbedaan sumber data seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Hal tersebut sering menimbulkan tumpang tindih penerima manfaat maupun ketidaktepatan sasaran intervensi sehingga berimplikasi pada belum maksimalnya efektivitas program bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan. Kehadiran DTSEN (Data Tunggal Sistem Nasional) diharapkan mampu mengatasi perbedaan sumber data tersebut dengan menyediakan basis data tunggal yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk intervensi sosial.

Selain permasalahan data, Sulawesi Tengah juga memiliki tantangan khusus terkait keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di beberapa wilayah. Komunitas ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas sosial ekonomi, sehingga tingkat kesejahteraan mereka relatif tertinggal dibandingkan masyarakat umum. Upaya pemberdayaan KAT belum sepenuhnya terintegrasi dalam program pembangunan sosial, sehingga masih diperlukan pendekatan khusus yang sensitif terhadap budaya, kearifan lokal, serta kondisi geografis. Permasalahan ini menjadi penting untuk diperhatikan agar intervensi urusan sosial tidak hanya menyasar kelompok masyarakat umum, tetapi juga

menjangkau kelompok rentan dan terisolasi secara lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

f) Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Trantibum Provinsi berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal dengan menggunakan indeks Pencapaian SPM yang meliputi: (a). Capaian mutu Pelayanan Dasar; (b). Capaian Penerima Pelayanan Dasar. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan standar minimal ini adalah :

1. Kurangnya jumlah personil.
    a. Jumlah Personil SatPolPP yang bertugas di lapangan yang berstatus PNS masih sangat Minim yaitu 30 orang;
    b. Tenaga Kontrak (PHL) yang bertugas di lapangan 74 orang;
    c. Jumlah PPNS yang ada di Satpolpp 4 orang.
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).
    a. Pelaksanaan tugas Satpolpp juga sangat dipengaruhi oleh kualitas personil dimana aparat Satpolpp Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih banyak berpendidikan SMA/SLTA dan bahkan ada yang memeiliki tingkat pendidikan SMP dan SD;
    b. Sebagian personil Satpolpp belum mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya;
    c. Operasional masih terfokus pada pengamanan kegiatan, pengamanan aset dan rumah jabatan pejabat daerah;
    d. PPNS dan Satlinmas Provinsi Sulawesi Tengah belum berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Sarana dan Prasarana yang tersedia banyak yang mengalami kerusakan akibat umur dengan beban kerjanya.
4. Kegiatan hanya berfokus pada Perda Trantibum yang ditegakkan.

g) Urusan Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pembangunan yang muncul dalam Urusan Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Implementasi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD) di lingkungan Masyarakat;
2. Kondisi objektif alamiah dan wilayah Sulawesi Tengah dengan kemajemukan suku, etnis, agama, budaya serta kondisi geografis dengan kandungan kekayaan alamnya yang tidak merata;
3. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis serta masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik;
4. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum mampu menciptakan pemerataan antar daerah;
5. Lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme;
6. Lunturnya pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada masyarakat.

3). Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan wajib yang tidak berkaitan layanan dasar meliputi berbagai urusan sebagai berikut:

a) Urusan Penyelenggaraan Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Tengah pada bulan Agustus 2024 sebesar 2,94 persen. TPT laki-laki di Sulawesi Tengah pada Agustus 2024 sebesar 2,14 persen lebih kecil dibandingkan dengan TPT Perempuan.

Kurangnya SDM yang kompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi permasalahan urusan penyelenggaraan tenaga kerja. Keterserapan tenaga kerja dilihat dari kualifikasi pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih rendah. Pada Agustus tahun 2024 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan, masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan SD ke bawah yaitu 36,76%. Sedangkan tenaga kerja yang

berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 13,75%. ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran tingkat ketidaksetaraan gender yang mencakup aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah.

Pada Tahun 2024, IKG Nasional berada pada angka 0,421, menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dibandingkan Tahun sebelumnya (2023 sebesar 0,447). Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam upaya kesetaraan gender di Indonesia, baik dari sisi peningkatan akses kesehatan, pendidikan, maupun partisipasi perempuan di bidang ketenagakerjaan dan politik.

Sementara itu, IKG Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan capaian nasional, yaitu masih berada di kisaran 0,461. Dimana Tahun 2023 IKG Provinsi Sulawesi Tengah 0,469 Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Sulawesi Tengah masih relatif lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Artinya, kesetaraan gender di Sulawesi Tengah belum secepat perbaikan yang dicapai secara nasional.

Permasalahan utama yang menyebabkan tingginya IKG di Sulawesi Tengah antara lain:

1. Dimensi Kesehatan Reproduksi – masih tingginya angka kematian ibu serta pernikahan usia dini yang berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan perempuan.
2. Dimensi Pemberdayaan – keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun posisi pengambil keputusan masih terbatas.
3. Dimensi Pasar Tenaga Kerja – tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, ditambah adanya kesenjangan upah dan lapangan kerja yang belum ramah gender.

Dengan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam menurunkan ketimpangan gender, khususnya pada dimensi kesehatan dan ketenagakerjaan. Maka kesenjangan ini akan berdampak pada rendahnya kualitas modal manusia, produktivitas daerah.

c) Urusan Penyelenggaraan Pangan

Permasalahan pembangunan yang muncul dalam Urusan Penyelenggaraan Pangan sebagai berikut:

1. Konsumsi komoditas pangan pokok terutama beras, masih cukup tinggi, sehingga program konsumsi diversifikasi pangan non beras atau alternatif makanan pokok selain beras masih sulit tercapai;
2. Masih rendahnya akses pangan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya daya beli dan pendapatan;
3. Jumlah kecamatan/desa rawan pangan dan penduduk dengan akses pangan terbatas masih cukup tinggi, meskipun telah menunjukkan tren yang menurun;
4. Tata kelola dan upaya pengembangan lumbung pangan dan lantai jemur belum belum tertata dengan baik;
5. Dewan Ketahanan Pangan belum maksimal melakukan kegiatannya terutama dalam hal advokasi pangan;
6. Belum maksimalnya sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masih terdapat sekitar 70 % pangan segar yang beredar dimasyarakat mengandung residu pestisida;
7. Produsen (petani dan pengusaha) pangan segar belum menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dalam sistem usaha taninya;
8. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan segar yang aman dikonsumsi.

d) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan urusan pertanahan sesuai dengan kewenangan provinsi yang lintas kabupaten/kota meliputi:

1. Tidak terinventarisasinya urusan pertanahan kewenangan provinsi yang lintas kabupaten/kota;
2. Tidak teridentifikasinya pemanfaatan tanah lintas kabupaten/kota dengan konflik atau persengketaannya;
3. Tidak teridentifikasinya tanah ulayat/lahan adat lintas kabupaten/kota termasuk konflik atau persengketaannya;
4. Tidak teridentifikasinya sengketa tanah aset daerah milik Provinsi, padahal masih banyak aset tanah milik provinsi yang belum bersertifikat dan berpotensi sengketa;

5. Belum Optimalnya Koordinasi Reforma Agraria dan Penataan Aset Daerah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menata dan menyelesaikan konflik tanah skala provinsi.

e) Urusan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan urusan lingkungan hidup meliputi permasalahan berikut:

1. Tingginya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan;
2. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal.;
3. Tingginya degradasi dan pencemaran di wilayah pesisir dan laut;
4. Tingginya tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Sulawesi Tengah;
5. Menurunnya kuantitas/debit badan air (sungai/air tanah) dan kualitas sumber air baku;
6. Pencemaran lingkungan yang kompleks pada areal pertambangan dan sekitarnya;
7. Emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah akibat lemahnya peran para pihak dalam perubahan iklim;
8. Penanganan Sampah yang belum optimal;
9. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
10. Pelestarian sumber daya hayati dan cagar budaya serta kearifan lokal (*local wisdom*) yang belum optimal.

f) Urusan Penyelenggaraan Penduduk dan Catatan Sipil

Permasalahan Pembangunan urusan penduduk dan catatan sipil meliputi:

1. Belum semua penduduk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran terutama penduduk kabupaten/kota di wilayah terpencil karena minimnya alat pencetakan dan petugas tehnis;
2. Rasio bayi berakta kelahiran dan pasangan berakta nikah belum tersedia secara memadai.

g) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu permasalahan utama dalam meningkatkan persentase desa mandiri di Sulawesi Tengah adalah masih rendahnya capaian indeks desa di sebagian besar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak desa belum mampu memenuhi indikator utama kemandirian, seperti kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, akses layanan dasar, dan kekuatan ekonomi lokal. Perbedaan

hasil antara Indeks Desa Membangun (IDM) yang relatif lebih tinggi dengan Indeks Desa yang lebih ketat menegaskan bahwa capaian kemandirian desa belum merata dan masih ada gap signifikan antarwilayah. ID yang tertuang dalam Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 merupakan penguatan dan penyempurnaan dari IDM. Indeks Desa disusun melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan enam dimensi pengukuran, yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa, yang masing-masing mencakup subdimensi dan indikator yang lebih rinci dan terukur. ID mencerminkan paradigma pembangunan desa yang berorientasi pada ketersediaan akses, kualitas layanan, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa juga menghadapi kendala berupa terbatasnya kapasitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat dalam mengelola potensi desa secara optimal. Akses masyarakat terhadap layanan dasar belum merata, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah, serta pemanfaatan potensi lokal belum maksimal untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi agar upaya pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan jumlah desa maju serta mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.

h) Urusan Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan berkaitan dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi :

1. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk yang berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata;
2. Adanya rentang kendali manajemen pelayanan pengendalian penduduk dan KB antara Provinsi dengan Kabupaten Kota akibat dari struktur kelembagaan Provinsi dan kabupaten/ Kota yang tidak seragam serta masih adanya tugas

dan kewenangan oleh pusat masih dilaksanakan oleh perwakilan BKKBN sebagai perwakilan pusat yang belum diserahkan ke pemerintah Provinsi;

3. Belum adanya Akses dan Kualitas Penyelenggaraan KBKR yang Komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran;
4. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang berbasis pengendalian penduduk organisasi perangkat daerah lainnya;
5. Masih kurangnya pemahaman tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga;
6. Belum adanya sarana dan prasarana dalam hal peningkatan advokasi dan penggerakan program KKBPK sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
7. Belum maksimalnya pemahaman remaja dan masyarakat untuk berperan dalam intensitas generasi berencana yang berbasis komunitas (*Genre to community*);
8. Belum adanya Pemaduan dan Sinkronisasi tentang Kebijakan Pengendalian Penduduk;
9. Adanya pemahaman dimasyarakat bahwa KB dan kespro adalah urusan perempuan;
10. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
11. Semakin meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan remaja.

i) Urusan Penyelenggaraan Perhubungan

Permasalahan pembangunan urusan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut:

1. Belum berkembangnya sistem angkutan umum masal dan integrasi antar moda;
2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
3. Belum optimalnya angkutan darat dalam melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah;
4. Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau;
5. Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan penyeberangan;
6. Masih rendahnya kualitas keselamatan angkutan;

7. Belum optimalnya pelayanan uji laik jalan pada pengujian kendaraan bermotor;
8. Belum adanya tindak lanjut dari perencanaan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Tengah.

j) Urusan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan urusan penyelenggaraan komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) :
2. Belum maksimalnya pengelolaan layanan infomasidan komunikasi publik;
3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum Optimal;
4. Terbatasnya infrastruktur akses internet dan jaringan intra Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menghubungkan antar OPD Provinsi dan OPD Provinsi dengan OPD 13 kabupaten/kota.

k) Urusan Penyelenggaraan Statistik

Permasalahan Pembangunan urusan statistik pada penerapan penyelenggaraan pembangunan statistik yang belum optimal, antara lain :

1. Kinerja forum satu data Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan dan mendukung Satu Data Indonesia yang belum memadai;
2. Penguatan regulasi daerah yang belum tersedia dalam mendukung satu data Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) teknis bidang statistik yang masih minim.

l) Urusan Penyelenggaraan Persandian

Permasalahan pembangunan urusan persandian terutama pada sektor sumberdaya manusia yang belum memadai, infrastruktur belum memadai dan Peralatan persandian yang belum dapat digunakan secara maksimal, antara lain:

1. Kurangnya tenaga IT dalam penyelenggaran persandian dan keamanan informasi;
2. Belum maksimalnya penggunaan peralatan persandian.

m) Urusan Penyelenggaraan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh pelaku UMKM
2. Jumlah koperasi yang berkualitas, sehat dan koperasi aktif masih kurang;
3. Pertumbuhan wirausaha baru masih rendah;

4. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi;
5. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap perbankan;
6. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM;
7. Belum optimalnya literasi digital bagi para pelaku KUMKM dalam memasarkan produknya; dan
8. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

n) Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan dalam urusan penyelenggaraan penanaman modal meliputi sebagai berikut:

1. Kualitas SDM masih rendah serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
2. Belum optimalnya realisasi investasi serta persebaran penanaman modal baik PMA maupun PMDN; dan
3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum maksimal;
4. Pembangunan mall pelayanan publik sebaiknya di semua kabupaten/kota tetapi tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup memadai dan belum dapat melaksanakan pembangunan MPP ini, sehingga dinilai menghambat pelayanan perizinan.

o) Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan dalam urusan kepemudaan dan olahraga meliputi sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi pemuda Sulawesi Tengah dalam lapangan dan kesempatan kerja;
2. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan;
3. Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
5. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, dan Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
6. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
7. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Sulawesi Tengah yang memenuhi standar nasional dan internasional.

p) Urusan Penyelenggaraan Kebudayaan

Berdasarkan data Tahun 2023, capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sulawesi Tengah berada pada angka 51,42, menempatkan daerah ini di peringkat 34 dari 38 Provinsi. Angka ini relatif rendah bila dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai 57,89. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pelestarian, pemanfaatan, maupun pemberdayaan kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah.

1. Dimensi dengan Capaian Rendah
    - Ekonomi Budaya (2,08) Angka yang sangat rendah pada dimensi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor budaya terhadap perekonomian daerah hampir tidak signifikan. Hal ini mencerminkan masih lemahnya ekonomi kreatif berbasis budaya, minimnya investasi dan dukungan kebijakan untuk mengembangkan industri kreatif lokal, serta kurangnya akses pasar bagi produk-produk budaya masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan ekosistem kelembagaan yang mampu menghubungkan pelaku budaya dengan rantai ekonomi modern.
    - Ekspresi Budaya (34,11) Capaian rendah pada dimensi ini menandakan masih terbatasnya ruang ekspresi bagi masyarakat, komunitas, maupun pelaku seni dan budaya. Rendahnya nilai juga dapat diartikan bahwa akses masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan masih minim, baik dari sisi sarana (gedung kesenian, pusat budaya) maupun dari sisi fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan event budaya. Hal ini mengakibatkan ekspresi budaya tradisional maupun kontemporer tidak berkembang optimal dan berisiko hilang ditelan perubahan zaman.
    - Warisan Budaya (38,44) Nilai ini menunjukkan masih lemahnya upaya pelestarian warisan budaya, baik warisan budaya benda (cagar budaya, situs sejarah, peninggalan arkeologis) maupun warisan budaya tak benda (tradisi lisan, upacara adat, tarian, musik, dan pengetahuan lokal). Permasalahan yang muncul antara lain: keterbatasan dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya, minimnya regenerasi pelaku budaya tradisional, serta rendahnya kesadaran generasi muda terhadap nilai warisan budaya daerah.
2. Dimensi dengan Capaian Sedang hingga Tinggi

- Pendidikan (73,31) Dimensi ini menunjukkan bahwa aspek pendidikan berbasis budaya relatif cukup baik. Artinya, ada dukungan melalui kurikulum, kegiatan pendidikan non-formal, atau muatan lokal yang membantu menjaga nilai budaya. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menghubungkan pendidikan berbasis budaya ini dengan pembangunan karakter serta ekonomi budaya agar lebih berdaya guna.
- Ketahanan Sosial Budaya (73,72) Nilai yang tinggi di dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah masih memiliki ikatan sosial dan modal budaya yang kuat, seperti nilai gotong royong, solidaritas, dan tradisi lokal. Akan tetapi, bila tidak dikuatkan dalam kebijakan yang berorientasi pada penguatan identitas budaya, ketahanan sosial ini bisa melemah di tengah arus modernisasi dan globalisasi.
- Gender (64,47) Angka ini relatif baik, menunjukkan adanya pengarusutamaan gender dalam kebijakan kebudayaan. Namun, bila dilihat dari sektor budaya secara luas, keterlibatan perempuan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya, ruang ekspresi, dan peluang ekonomi kreatif berbasis budaya.

3. Perbandingan dengan Nasional

Dibandingkan dengan capaian nasional (57,89), Sulawesi Tengah tertinggal hampir 6,5 poin. Selisih ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan adanya kesenjangan dalam hal:

- Pemanfaatan budaya sebagai sumber daya pembangunan,
- Kelemahan ekosistem kebudayaan daerah (kebijakan, kelembagaan, SDM, sarana prasarana),
- Kurangnya integrasi antara sektor kebudayaan dengan sektor lain, seperti pariwisata, ekonomi, dan pendidikan.

4. Permasalahan Utama yang Mengemuka
    1. Rendahnya kontribusi budaya terhadap ekonomi daerah, akibat lemahnya dukungan ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya.
    2. Kurang optimalnya pelestarian warisan budaya, baik benda maupun tak benda, yang terancam hilang akibat minimnya dokumentasi, regenerasi, dan perhatian publik.
    3. Terbatasnya ruang ekspresi budaya, yang membuat masyarakat tidak leluasa mengekspresikan identitas budaya dan kreativitasnya.

4. Kelembagaan kebudayaan yang lemah, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, maupun koordinasi antar-sektor.
5. Kesenjangan capaian antar-dimensi budaya, di mana ketahanan sosial budaya relatif kuat tetapi tidak ditopang oleh dimensi ekonomi dan ekspresi budaya.

q) Urusan Penyelenggaraan Perpustakaan

Permasalahan dalam urusan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah masih terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang berada pada angka 71,70 pada Tahun 2024. Nilai ini menempatkan Sulawesi Tengah pada kategori sedang dan masih tertinggal dibandingkan beberapa Provinsi dengan capaian tinggi seperti Sulawesi Selatan (88,24) maupun DI Yogyakarta (86,39). Kondisi ini mencerminkan bahwa layanan, infrastruktur, koleksi, serta kualitas sumber daya perpustakaan di Sulawesi Tengah masih belum optimal dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat. Rendahnya capaian IPLM menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses terhadap fasilitas dan layanan perpustakaan di berbagai wilayah, khususnya di desa-desa dan daerah terpencil, masih menjadi tantangan utama.

Selain itu, capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 juga hanya mencapai 67,48, masih berada di bawah rata-rata nasional (72,44). Nilai ini mengindikasikan bahwa minat dan kebiasaan membaca masyarakat masih terbatas. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan ketersediaan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan, serta belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat aktivitas literasi dan pembelajaran masyarakat. Rendahnya kegemaran membaca tersebut berdampak langsung terhadap kualitas literasi dan daya saing sumber daya manusia. Permasalahan ini menjadi catatan penting dalam rangka memperkuat peran perpustakaan tidak hanya sebagai penyedia bahan bacaan, tetapi juga sebagai pusat literasi, inovasi, dan pengembangan budaya baca masyarakat di Sulawesi Tengah.

r) Urusan Penyelenggaraan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Sistem kearsipan yang ada belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah sehingga arsip sulit diakses secara cepat dan konsisten. Pemetaan terhadap arsip dinamis maupun arsip statis juga belum

berjalan optimal, sehingga dokumen penting berisiko tercecer, tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan berisiko hilang. Standar layanan kearsipan juga belum seragam dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keterbukaan informasi serta pelayanan publik masih rendah.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan masih terbatas, baik dari sisi jumlah arsiparis maupun kompetensi ASN yang ditugaskan di unit kearsipan. Banyak proses pengelolaan arsip yang masih bersifat manual, sehingga meningkatkan risiko kehilangan dan kerusakan arsip, terutama yang berbasis fisik. Belum optimalnya implementasi digitalisasi arsip juga membuat sistem *backup* data belum tersedia secara memadai, sehingga arsip daerah belum dapat berfungsi optimal sebagai dasar perencanaan, bahan pertanggungjawaban, maupun memori kolektif daerah.

s) Urusan Penyelenggaraan Perencanaaan

Urusan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tapi bersifat strategis karena mengkoordinasikan, menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi urusan daerah. Urusan ini memegang peranan penting karena berfungsi sebagai arah, kendali, dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi perencanaan di daerah.

Pertama yaitu ketersediaan dan kualitas data pembangunan masih menjadi kendala utama. Data sektoral sering kali berbeda antar perangkat daerah, sementara integrasi data dalam sistem informasi pembangunan daerah belum sepenuhnya berjalan baik. Kondisi ini berpengaruh pada akurasi analisis dan penetapan target pembangunan.

Kedua, kapasitas sumber daya manusia perencana masih terbatas. Jumlah pejabat fungsional perencana relatif sedikit dan kapasitas fungsional perencana terbatas.

Ketiga, banyaknya permasalahan pembangunan tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran disebabkan kapasitas fiskal daerah yang tersedia tidak sebanding.

Keempat, sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal masih menghadapi kendala.

Kelima, sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota belum sepenuhnya selaras sehingga efektivitas pembangunan menjadi kurang optimal.

4) Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Urusan Pilihan

Permasalahan Pembangunan di Provinsi Sulteng berkaitan dengan urusan pilihan meliputi urusan penyelenggaraan perikanan, urusan penyelenggaraan pariwisata, urusan penyelenggaraan pertanian, urusan penyelenggaraan kehutanan, urusan penyelenggaraan energi dan sumber daya mineral, urusan penyelenggaraan perdagangan, urusan penyelenggaraan transmigrasi sebagai berikut:

a. Urusan Penyelenggaraan Perikanan dan Kelautan

1. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional;
2. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat produktivitas yang rendah;
3. Terbatasnya sarana pada dan prasarana produksi perikanan budidaya dan akses terhadap teknologi perikanan;
4. Keterbatasan perikanan infrastruktur budidaya/tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, TPI, dan pelabuhan perikanan).;
5. Rendahnya akses pemasaran dan permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.

b. Urusan Penyelenggaraan Pariwisata

Permasalahan pembangunan berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pariwisata meliputi sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang Belum Memadai

Sarana dan prasarana pendukung pariwisata, termasuk infrastruktur transportasi yang efisien, masih terbatas dan perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas destinasi wisata.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM di industri pariwisata masih relatif rendah, yang berdampak pada pelayanan yang kurang baik.

3. Promosi dan Kampanye yang Belum Optimal

Desain kampanye wisata belum efektif dan promosi pariwisata melalui media digital dan cetak masih perlu dioptimalkan agar dapat menjangkau target pasar yang lebih luas.

4. **Peran Aktif Masyarakat Lokal**

   Masih rendahnya kesadaran wisata masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.

5. **Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

   Kurangnya penerapan konsep pembangunan pariwisata yang berwawasan ekologi, inovatif, serta memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

6. **Kurangnya Investasi dan Perhatian Lingkungan**

   Masih kurangnya investasi yang masuk ke sektor pariwisata serta perhatian terhadap aspek lingkungan hidup di destinasi wisata.

7. **Ekonomi Kreatif**

   Masi kurangnya inovasi dan diferensiasi produk lokal, keterbatasan akses pasar dan promosi digital, serta kesenjangan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam industri kreatif. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan minimnya pemanfaatan potensi kearifan lokal juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

c. Urusan Penyelenggaraan Pertanian

Permasalahan pembangunan dalam urusan penyelenggaraan pertanian meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jaminan ketersediaan pupuk sepanjang waktu dan harga yang tetap bagi kelompok tani;
2. Belum optimalnya institusi usaha agribisnis bagi kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian;
3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan pengetahuan kelompok petani/peternak/nelayan dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian/perikanan.

d. Urusan Penyelenggaraan Perkebunan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Permasalahan pembangunan dalam urusan penyelenggaraan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan meliputi sebagai berikut:

1. Usaha peternakan umumnya masih tradisional;
2. Jaminan ketersediaan dan kestabilan harga pakan ternak bagi petani ternak belum ada;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan insiminasi buatan;
4. Pelayanan masyarakat kesehatan hewan dan kesehatan veteriner, dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum optimal, disebabkan oleh wilayah kerja yang luas tidak sebanding dengan tenaga keswan serta biaya operasional pelayanan terbatas;
5. Usaha atau unit pembibitan ternak masih perlu optimalkan.

e. Urusan Penyelenggaraan Kehutanan

Permasalahan pembangunan dalam urusan kehutanan meliputi sebagai berikut:

1. Banyaknya perizinan pembukaan lahan baik tambang maupun PBPH;
2. Di beberapa wilayah kelola UPT KPH yakni adanya kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (tambang/hph/lainnya) sehingga masyarakat memilih untuk meminta ganti rugi tanaman atau ganti rugi lahan yang merupakan kawasan hutan dan secara hukum tidak dapat diperjual belikan, sehingga masyarakat memilih untuk mengambil kayu secara ilegal ketimbang memproduksi kayu secara legal melalui pohon hasil tanaman sendiri;
3. Untuk tutupan lahan, upaya rehabilitasi lahan yang dilakukan melalui penanaman bibit belum berpengaruh signifikan pada saat bersamaan karena pertumbuhannya masih pada tahap awal dan tajuk belum terbentuk optimal;
4. Laju degradasi perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh perizinan yang merupakan wewenang pemerintah pusat, tidak bisa dikendalikan;
5. Kualitas dan pemahaman SDM masih rendah dan kurang berkoordinasi secara berkala terhadap hambatan dan kondisi faktual yang dihadapi di lapangan.

f. Urusan Penyelenggaraan Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan pembangunan dalam urusan penyelenggaraan energi dan sumberdaya mineral meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT):
   - Masih tingginya biaya dari pembangunan infrastruktur EBT;
   - Keterbatasan lahan untuk pemanfaatan EBT khususnya PLTS dan PLTB;
   - Skema bisnis dan insentif yang belum optimal.
2. Belum optimalnya penatausahaan izin-izin usaha tambang:
   - Belum optimalnya mekanisme proses penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pertambangan;
   - Masih ada pemilik IUP yang belum memenuhi kewajiban admiistrasi dan/atau finansial;
   - Belum maksimalnya pengawasan IUP;
   - Pertambangan tanpa izin (PETI) masih marak terjadi.
3. Belum optimalnya upaya - konservasi cekungan air tanah:
   - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan air tanah;
   - Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah.

g. Urusan Penyelenggaraan Perindustrian

Permasalahan pembangunan dalam urusan perindustrian meliputi sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing, kualitas dan inovasi produk industri;
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pelaku usaha;
3. Minimnya akses permodalan industri kecil menengah terhadap perbankan; dan
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai bagi pelaku usaha.

h. Urusan Penyelenggaraan Perdagangan

Permasalahan pembangunan dalam urusan perdagangan meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri yang terintegrasi;
2. Fluktuasi harga barang konsumsi terutama harga bahan pokok sering berubah-ubah;
3. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
4. Produk industri lokal kurang berkembang karena kurangnya promosi; dan
5. Lemahnya daya saing produk lokal.

i. Urusan Penyelenggaraan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan dalam urusan transmigrasi meliputi sebagai berikut:

1. Permasalahan Terkait Lahan dan Aset

Terdapat masalah tumpang tindih lahan, di mana lahan transmigrasi bisa masuk dalam kawasan hutan atau bersengketa dengan masyarakat lokal.

2. Pengangguran dan Kemiskinan:

Angka pengangguran dan kemiskinan di kawasan transmigrasi, masih tinggi dan memerlukan perhatian serius. Kesejahteraan transmigran tidak selalu meningkat, terutama jika mereka meninggalkan lahan atau tidak mampu mengelola aset yang diberikan oleh pemerintah. Permasalahan sosial di lokasi penempatan transmigrasi seringkali muncul dan perlu disikapi.

3. Kualitas Kesehatan:

Masih terdapat permasalahan dalam optimalisasi kesehatan masyarakat, seperti kurangnya kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama terkait sanitasi (MCK) dan pengelolaan sampah. Fenomena gizi buruk pada anak-anak masih terjadi, menunjukkan rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi yang baik.

Keterbatasan penyediaan obat-obatan, fasilitas pendukung, dan kurangnya tenaga kesehatan yang memadai juga menjadi kendala serius dikawasan transmigrasi.

4. Infrastruktur

Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai, keterbatasan infrastruktur menuju Kawasan transmigrasi menjadi salah satu permasalahan di Sulawesi Tengah

5. Bimbingan dan penyuluhan masih belum optimal

Bimbingan dan penyuluhan untuk program transmigrasi di Sulawesi Tengah belum optimal hal disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta belum meratanya penyebaran informasi mengenai potensi dan tantangan transmigrasi di daerah tersebut.

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Penentuan isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Isu Strategis Global

Seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang pembangunan maka tantangan global ke depan semakin kompleks atau yang dikenal sebagai Megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan. Sementara itu adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*). Terdapat 10 Megatren Global yang dapat mempengaruhi pembangunan di Sulawesi Tengah dalam menuju 2045. Megatren Global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi sebagai berikut:

Seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang pembangunan maka tantangan global ke depan semakin kompleks atau yang dikenal sebagai Megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan. Sementara itu adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*). Terdapat 10 Megatren Global yang dapat mempengaruhi pembangunan di Sulawesi Tengah dalam menuju 2045. Megatren

Global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi sebagai berikut:

1. Perkembangan Demografi Global

Populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat yang tentunya memberikan tantangan terkait dengan penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan selain itu, kebutuhan terhadap pangan energi dan listrik akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang. Disamping itu meskipun jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya terus melambat hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara terutama negara maju terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok usia tua dengan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan kerja. Dalam perkembangan demografi Provinsi Sulawesi Tengah dimana mencermati dinamika penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang cenderung bertambah dan memiliki bonus demografi dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi tersebut maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Geopolitik dan Geoekonomi

Tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia adalah dinamika geopolitik global ke depan. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global seperti sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya seperti konflik di Selat Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut

Cina Selatan. Selain itu persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas, ditengah tensi geopolitik yang ada kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global. Nilai strategis kawasan Indo Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antar negara baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

3. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *internet of Things* (IoT) *blockchain*, hyper connection, artificial intelligence (AI), distributed Ledger teknologi (DLT), *produktion lifecycle management*, *robotik process automation* (RPA), *Edge computing auto robotic system*, 3D dan *future teknologies*. Kesiapan dan adaptif dari masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi di masa depan akan mempengaruhi di berbagai sektor pembangunan misalnya pendidikan dengan inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence*, pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis Meskipun demikian tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia permodalan dan infrastruktur penunjang faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan sehingga dapat menyebabkan tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging ekonomis yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh misalnya pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat pemukiman dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri jasa dan Perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengolahan perkotaan karena kompak Kompleks melalui efisiensi layanan.

5. Konstelasi Perdagangan Global

Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan Intra-Asia yang menunjukkan trend yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat global value chain (GVC) dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai pangsa pasar yang substansial dan kompetensi SDM industri yang berkualitas khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Sulawesi Tenga ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Sulawesi Tengah.

Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan negara yang dapat beradaptasi dengan kemudian teknologi dan digital memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

6. Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara pergeseran komposisi demografi yang menuju *again Society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan *Central Bank Digital Curincy* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset krypto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro moneter dan sistem keuangan di masa depan.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah Model Kelas

Pertumbuhan kelas menengah dunia diperkirakan akan semakin meningkat dan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik, selain itu akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan kerja baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup *new lifestyle*. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi pekerja melalui *virtual metaverse* serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel

dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam diantaranya air, pangan dan energi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan sumber daya alam global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan Iklim

Perubahan iklim kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis Global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as- usual* (BaU) menuju ke praktek yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor seperti sektor energi industri lahan kelautan dan pesisir pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan alat pembangunan global di masa mendatang stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama dunia. Kelangkaan

sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau sm*all modular reaktor* (SMR). teknologi elektrolisis *Green hidrogen* dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif terutama untuk transportasi berat seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker dan transportasi udara sebagai pengganti avtur serta pemanfaatan GH2 sebagai *feed stock* industri petrokimia dan *green amonia* untuk pupuk.

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama, yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, mendorong dan menjadikan banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dibumi melalui proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama yaitu : ekonomi antariksa *(space economy)*, kelestarian antariksa *(space sustainabillity)*, dan keamanan antariksa *(space security).*

Pemanfaatan antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US$469,0 miliar pada Tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US$1,0 triliun hingga Tahun 2040. Oleh karena itu, negara-negara berkembang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi sumber daya manusia.

B. Isu Strategis Nasional

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara. Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebijakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Sebagai upaya pencapaian sasaran isu nasional terkait memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia stateginya adalah :

1. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional diarahkan untuk memperkuat Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan intemalisasi, institusionalisasi, dan aktudisasi Pancasila, serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, ditopang pula dengan penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dicapai melalui (a) penguatan

wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (b) pelaksanaan gerakan nasional KITA BERSAUDARA; dan (c) peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.

2. Penguatan komunikasi publik dan media diarahkan untuk menciptakan ekosistem komunikasi, kebebasan pers, dan media massa yang berintegritas. Arah kebijakan ditopang dengan peningkatan kapasitas lembaga, kompetensi, dan etika insan pers, termasuk penyehatan media arus utama, serta penguatan kelembagaan dan sistem komunikasi publik nasional, pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital. Penguatan komunikasi publik dicapai melalui (a) penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S); dan (b) penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
3. Penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.
4. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan serta (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.
5. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia, serta perlindungan hak asasi manusia tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia,

humanis, inklusif, dan gender; pendidikan hak asasi manusia bagi aktor negara dan non negara; pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia; penghapusan praktik diskriminasi; dan penguatan mekanisme penanganan pengaduan hak asasi manusia pada kementerian/lembaga/daerah. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegasan hak asasi manusia dicapai melalui (a) internalisasi hak asasi manusia untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender; serta (b) perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan praktik diskriminasi.

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan. Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita. Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat.

Atas dasar hal tersebut di atas, pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 merumuskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam mendukung proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain untuk melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan kepentingan nasional, serta menjaga stabilitas kawasan dari segala bentuk ancaman dan gangguan dilaksanakan melalui (a) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essensial force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (c) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan (e) meningkatkan kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan melalui pemeliharaan dan perawatan.
2. Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam rangka mewujudkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing dilaksanakan melalui (a) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (b) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, dan (c) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*.
3. Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa dilaksanakan melalui (a) penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat komponen cadangan, serta (b) pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara.
4. Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri serta pencegahan ekstremisme berbasis ideologi dan kekerasan yang mengarah pada terorisme

dilaksanakan melalui (a) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme; (b) penguatan kepabilitas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan dalam negeri (c) koordinasi sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (d) penguatan kontra radikalisasi; (e) penguatan deradikalisasi terorisme; serta (f) penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis.

5. Keamanan siber, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dilaksanakan melalui (a) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (b) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (c) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (d) operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.
6. Penguatan ancamanan laut dan *hidro-oseanografi* dalam rangka penguatan smeillance dan penegakan hukum di laut serta penyediaan *update* data. Survei untuk keselamatan pelayaran dilaksanakan melalui (a) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut; (c) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia, dan *choke point* (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut; serta (e) pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan *hidro-oscanograft*.
7. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui (a) melakukan peningkatan kemampuan penanganan konflik sosial dan pengamanan objek vital, dan (b) melakukar peningkatan efektivitas penyelesaian tindak pidana.
8. Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi kebijakan sebagai

berikut (a) percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam *skema good neighbor police*; (b) penguatan kepemimpinan di tingkat global melalui peran aktif dalam fora dan organisasi intenasional, pembangunan postur diplomasi, serta pelibatan diaspora lndonesia. Peran aktif Indonesia di tingkat global di antaranya dilakukan dengan mendorong penjagaan perdamaian dunia, menjunjung hak untuk menentukan nasib sendiri (*sef determination*), dan penguatan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan Palestina; (c) penguatan kerja sama pembangunan internasional; (d) penguatan diplomasi ekonomi; (e) kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil; serta (f) proses aksesi Indonesia ke *Organisation for Economic Co-operation and Development.*

9. Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, melalui pengembangan *eco-region* sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, yang sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh, dengan pendekatan *nexus* pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan untuk (a) memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri melalui pengembangan dan pemuatan sentra-sentra produksi pangan, wanatani largo oresto, revitalisasi tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (b) peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan badan urusan logistik; (c) menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh rakyat agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif; (d) mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; (e) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/ pembudidaya ikan/petani hutan; serta (f) pembangunan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan nature-*based solutions*, pengelolaan benteng lahan terpadu, *piloting* bantuan langsung petani, kesehatan lahan (*soil healtf*, dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan Pertanian regeneratif. dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif. Beberapa intervensi kebijakan swasembada pangan, terutama (a) pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan secara berkelanjutan, termasuk di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua,

Papua Selatan, dan daerah/kawasan lain yang berpotensi; (b) penguatan cadangan pangan; (c) pengembangan pangan akuatik (*blue food*, pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati; (d) penganekaragaman konsumsi pangan; (e) pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan; (f) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (g) Penanganan kerawanan pangan; (h) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan, riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi dan bantuan langasung yang adaptif dan inklusif; (i) penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; serta (j) pengembangan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

10. Swasembada energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional. Upaya mewujudkan swasembada energi dilaksanakan melalui reformasi subsidi, intensifikasi produksi minyak bumi dan gas, akselerasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan termasuk nuklir, dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan, dan intensifikasi biofuel dalam rangka untuk mencapai swasembada energi tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (a) peningkatan penyediaan energi, (b) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi serta (c) penguatan implementasi transisi energi berkeadilan.
11. Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan *Food, energi, water nexus* dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa terkait pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan. Upaya mewujudkan swasembada air dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan konsep *source to sea* melalui penyelamatan mata air kritis; konservasi dan pengelolaan air tanah; konservasi daerah tangkapan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan; pembangunan dan pengelolaan tampungan air untuk pemanfaatan pertanian, peternakan, air minum, dan energi terbarukan; penyediaan pasokan air berkelanjutan sebagai tumpuan pengembangan lumbung pangan dan pertumbuhan sektor produktif melalui penerapan *smart water* management dan prinsip *toater accunting* untuk menjaga neraca air pada tingkat wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit/kritis/tertekan; tindak lanjut pemanfaatan air baku dan irigasi dari bendungan terbangun; pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana melalui integrasi pendekatan struktural dan

non struktural (seperti solusi berbasis alam), revitalisasi sungai, serta percepatan persiapan *giant sea pall* sebagai bentuk pengamanan terpadu wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan; serta penyediaan layanan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) aman bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung dengan transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, Penguatan fungsi dan kelembagaan regulator, pengelolaan aset yang terintegrasi, penetapan dan penerapan tarif/retribusi yang adil dan transparan, operasionalisasi yang efisien, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan *enabling enviroment* lainnya. Langkah-langkah ini diwujudkan melalui penerapan pendekatan pengelolaan peningkatan nilai kawasan program percepatan penyediaan air minum, dan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman, dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan dan pembiayaan, serta masyarakat. Dalam rangka mencapai swasembada air tersebut beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan yaitu (a) pembangunan dan pengelolaan tampungan air, (b) penyediaan pasokan air berkelanjutan, (c) pengelolaan risiko daya rusak air, (d) konservasi sumber daya air, (e) pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir, (f) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis *Cili-Wide Inclusiue Sanitation*, (g) penguatan tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan, (h) penguatan peran masyarakat dan ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi dan kolaborasi.

12. Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Selanjutnya, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional bertujuan untuk meningkatkan ekspor halal berdaya saing global dan dilakukan melalui penguatan kerja sama jaminan produk halal global serta keda sama dengan berbagai stakeholders intenasional termasuk dengan negara-negara anggota organisasi kerja sama islam dan berbagai *standing committee* serta organ di bawahnya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal dilakukan melalui akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan lembaga dan sumber daya manusia pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal,

penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal dan penghitungan Pendapatan Domestik Bruto Syariah.

Untuk meningkatkan peran dan kapasitas keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, penguatan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan perbankan syariah seperti dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion dan diversifikasi produk berfokus pada pengembangan instrumen baru yang menonjolkan keunikan prinsip syariah; penguatan pasar modal syariah dengan inovasi pengembangan instrumen untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan (hijau dan biru); dan Penguatan industri keuangan non-bank syariah, dengan pengembangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, finansial teknologi, tembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan khusus syariah (seperti pegadaian syariah dan skema syariah lainnya). Untuk mendukung perlindungan sosial dan perekonomian nasional, penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta keuangan syariah, salah satunya dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Keseluruhan upaya penguatan ekonomi syariah di atas didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan literasi, peningkatan digitalisasi dan pengelolaan data, penyediaan insentif serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Dengan demikian, penguatan ekonomi syariah dilaksanakan melalui penguatan (a) industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah halal; (b) ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (c) ekosistem halal; (d) keuangan syariah; dan (e) dana sosial syariah.

13. Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk mendorong transformasi di berbagai sektor-sektor strategis guna meningkatkan kualitas dan layanan digital serta meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Adapun pertumbuhan kontribusi ekonomi digital ini tetap akan didukung oleh peningkatan dan distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas serta adopsi digital di berbagai sektor secara optimal yang dilaksanakan melalui kebijakan, yaitu (a) penguatan

faktor pendukung ekonomi digital, dan (b) penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

14. Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati, mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati yang diselaraskan dengan Indonesian *Biodiversity Strates/and Action Plan* 2025-2029. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya dilakukan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, namun juga area reservasi. Potensi pengembangan area preservasi di Indonesia sangat besar, termasuk pada kawasan bentang alam, cagar alam geologi, dan geopark dengan upaya pelestarian keanekaragaman ekosistem. Pengembangan area preservasi dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi yang terintegrasi. selain itu, potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati juga masih perlu didorong dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi. Rencana dan strategi yang dapat mendukung arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut dalam lima Tahun ke depan diwujudkan melalui (a) perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b) pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (c) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (d) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi; serta (e) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan untuk memastikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, arah kebijakan ini juga akan memastikan penataan ruang yang berkeadilan untuk mencapai seluruh target pembangunan nasional arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (b) peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota; (c) peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (d) Peningkatan kualitas lahan; (e) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (f) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan

berbahaya dan beracun, dan limbah radioaktif; (g) penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan dan penataan ruang; serta (h) penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

16. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerosesan akhir) yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai utama di berbagai tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang *dean and clear*, serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi dan konsisten dari mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset. Pengelolaan sampah harus menjadi standar pelayanan minimal yang didukung dengan penguatan kebijakan, perbaikan dalam tata kelola, kinerja kelembagaan dan keuangan daerah, serta komitmen kepala daerah, diawali dengan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan layak secara finansial*/financial uriable*, pemisahan operator dan regulator, penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan *standar tipyng fee*. Pekerjaan/*green jobs* didorong untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, efisiensi energi dan sumber daya alam, serta pembangunan rendah karbon melalui bisnis proses dan praktik industri yang ramah lingkungan. Pekerjaan hijau *green jobs* juga didorong untuk memenuhi kriteria kerja layak, seperti kecukupan gaji, kondisi kerja yang aman, serta pelindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Keseimbangan permintaan tenaga kerja hijau untuk pekerjaan hijau (*green jobs*) dan penyediaan tenaga kerja hijau yang berkualitas sangat penting diwujudkan untuk mendukung keberhasilan implementasi ekonomi hijau, termasuk visi *net zero emission* pada Tahun 2060 melalui transisi energi yang berkeadilan.

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima Tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan Peningkatan ekosistem digital.

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), Penyandang Disabilitas

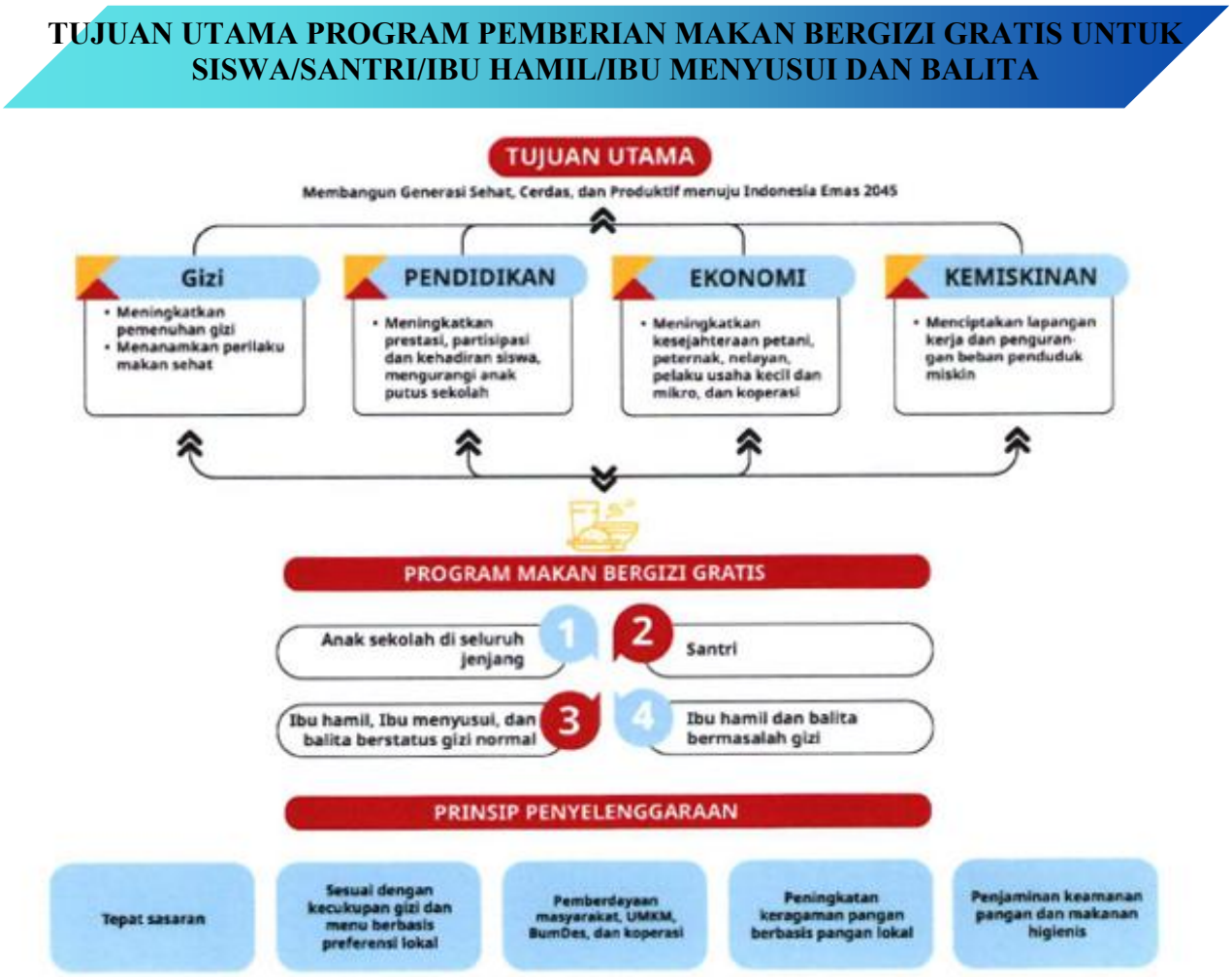
Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pembangunan harus diawali

dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan. Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar setiap manusia dalam berbagai situasi dan kondisi mampu mengoptimalkan segenap potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara lahir dan batin. Pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Pembangunan dan pembentukan modal manusia bertujuan untuk memastikan setiap individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di setiap tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat pembangunan, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi.

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: (1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; (2) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; dan (3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-

sekolah yang perlu renovasi. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas.



Gambar 2.119
Tujuan Utama Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis Untuk Siswa/Santri/Ibu Hamil/Ibu Menyusui dan Balita

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, tidak hanya menjadi negala penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya

secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, negara berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan renten menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan sosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapasitas, motivasi,

dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

g. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Toleransi antar umat beragama diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, serta memperkukuh toleransi antar umat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

J. Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia)

Badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara, ditandai dengan ditandatanganinya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Tujuan dibentuknya Danantara adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Tugas utama Danantara ialah mengelola dividen BUMN. Sementara kewenangannya ialah:

1. Mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dividen BUMN
2. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen
3. Bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional
4. Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional
5. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset atas persetujuan presiden

K. Perpindahan Ibu Kota Negara

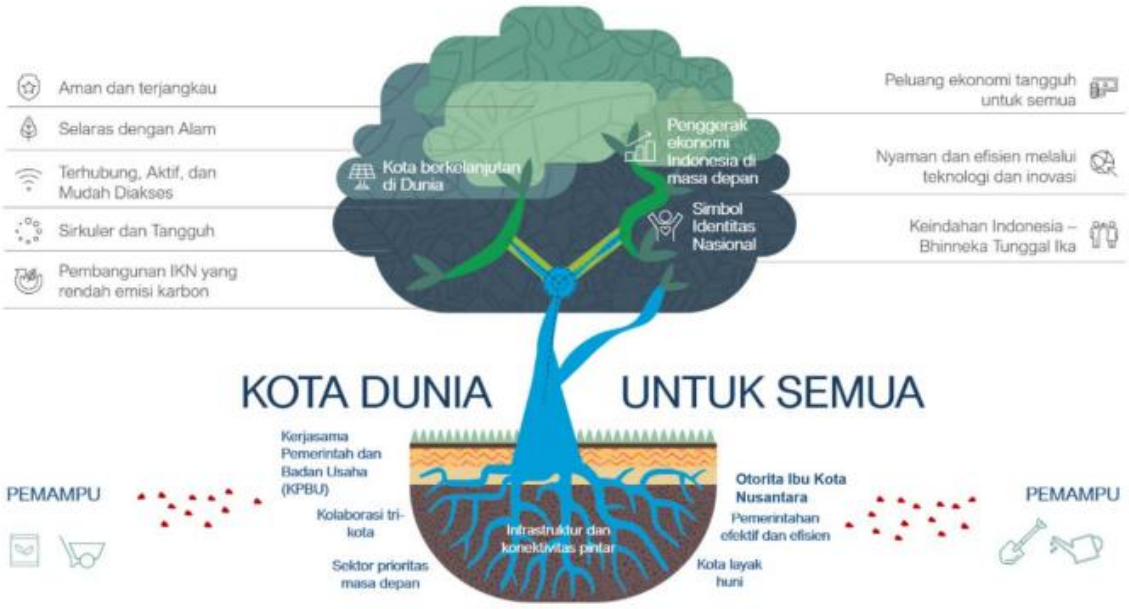
Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita menjadi bangsa yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur pada Tahun 2045. Visi Indonesia 2045 tersebut dibangun di atas empat pilar utama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa, serta mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, dan gambaran masa depan bangsa Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhkan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Kota Negara yang baru perlu direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Ibu Kota Negara yang akan dibangun adalah Ibu Kota Negara yang mempunyai ciri utama:

1. identitas nasional: pusat kegiatan yang menjadi manifestasi dari identitas, karakter sosial budaya, persatuan, dan kebesaran bangsa Indonesia. Ibu Kota Negara harus mencerminkan keunikan dan keberagaman bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan: kota yang mengelola sumber daya secara efisien, memberikan informasi secara tepat dan terbuka, serta memberikan layanan yang prima kepada warganya. Hal ini dicapai melalui pengelolaan aktivitas sosial budaya dan ekonomi kota secara seimbang dengan daya dukung lingkungan, penggunaan air dan sumber daya energi secara efisien, pengolahan limbah, pengembangan moda transportasi terpadu, penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serta sinergi antara lingkungan alami dan buatan;
3. kota yang modern dengan standar internasional: kota yang progresif, inovatif, inklusif dan kompetitif dari segi pelayanan publik, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan arsitektur, perencanaan kota, penataan dan perumahan, dan infrastruktur, serta terhubung dengan berbagai pusat kota lain di tataran global;
4. pusat pemerintahan dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan cerdas (*smart*) dimana lembaga-lembaga pemerintahan pusat menerapkan cara kerja baru

yang lebih lincah, profesional, adaptif, dan inovatif dengan mengoptimalkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);

5. pusat pengembangan ekonomi baru yang mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia dengan mengembangkan industri bersih, bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berteknologi tinggi, serta mendorong penguatan rantai nilai global;
6. kota yang sehat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua penduduknya (laki-laki dan perempuan), menjamin perlindungan bagi kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau men5rusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia/lansia), serta menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang responsif gender, ramah perempuan dan peduli anak, serta inklusif untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan seluruh anggota keluarga dan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas;



Gambar 2.120
Visi Ibu Kota Negara Baru

C. Isu Regional Sulawesi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025– 2045 pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi penunjang Superhub

ekonomi nusantara, pintu gerbang Internasional KTI dan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Selain itu, menjadi peluang munculnya kota-kota dengan peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Sulawesi sebagai penyangga berdirinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan. Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, dan Isu strategis pembangunan kewilayahan berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, regional Sulawesi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.96
Isu Strategis Wilayah Sulawesi

Isu Strategis	Potensi Wilayah
Meskipun sektor pertambangan dan industry pengelolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja belum optimal	Posisi geografis terletak di antara ALKI II dan III yang dapat mendukung peran Sulawesi sebagai HUB dan pintu gerbang internasional KTI
Produktivitas dan daya saing tenaga kerja belum optimal, Sebagian karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapngan kerja	Pembahasan IKN di Kalimantan membuka peluang besar bagi wilayah Sulawesi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah penyangga
Tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian	Potensi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan
Kurang memadainya sarana dan prasarana layanan dasar dan belum meratanya konektivitas antar daerah	Potensi pertambangan dan pengelolahan nikel dan tembaga yang mendukung pengembangan dan implemtansi energi baru terbarukan

Dinamika ekonomi, kondisi sosial budaya, perkembangan teknologi, tantangan tata kelola pemerintahan, serta berbagai perkembangan lain yang terjadi baik ditingkat lokal, nasional, dan global dalam lima Tahun mendatang akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan di wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan potensi dan isu utama pembangunan yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan untuk wilayah Sulawesi dalam jangka menengah.

Berdasarkan permasalahan dan capaian pembangunan, secara umum pembangunan belum dirasakan secara merata di wilayah Sulawesi. Beberapa Provinsi memiliki nilai indikator diatas rata-rata nasional, namun ada beberapa indikator juga masih berada dibawah rata-rata nasional. Olehnya berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan masih adanya hambatan dan menjadi isu strategis nasional untuk wilayah regional Sulawesi.

Tabel 2.97
Isu Strategis Regional Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara Berbasis Sumber Daya Alam

Kawasan Komoditas Unggulan	Kawasan Perkotaan	Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan Hasil Pertambangan dan Smelter Terintegrasi Tambang)	Kawasan konservasi (Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir danKepulauan)	Kawasan Afirmasi
1. Pengembangan Kawasan berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dansekitarnya dan Pengembangan Kawasan Perikanan Bitung di KotaBitung, Sulawesi Utara 2. Pengembaangan Kawasan Pertanian Jagung, Kelapa dan Garam di Kab.Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab.Bone Bolango. Provinsi Gorontalo 3. Peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan kopi) yang berkelanjutan di Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandardan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Kab. Pasangkayu danKota Mamaju, Sulawesi Barat **4. Pengembangan kawasan ekonomi (pertanian dan industri pengolahanhasil pertanian) di Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab.Donggala dan sekitarnya di Sulteng.** **5. Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) Sulawesi Tengah, Kawasan Hilirisasi Rumpt Laut Sulawesi Tengah.** 6. Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Tangkap di SulawesiTenggara dan Kawasan Lumbung Pangan di Sulawesi Tenggara.	Pembangunan Wilayah Metropolitan yang berkelanjutan di WM Manado(Bimindo), Sulawesi Utara sebagai Gerbang Perdagangan Asia Timur danPasifik dan Peningkatan Kawasan Pertumbuhan Maminasata - Pare-Pare,Sulawesi Selatan. **Kawasan Perkotaan Kecil (bahodopi, Morowali), Sulawesi Tengah**	**1. KI Stardust Estate Investment, KI IMIP Morowali, dan Morut KI IHIPHuabao - (nikel dan hasil pertambangan lainnya), Sulawesi Tengah** 2. Kawasan Smelter terintegrasi Tambang Sorowako, SulawesiSelatan 3. KI IPIP Pomalaa, KI VDNIP Konawe (nikel, aspal, pertanian,perkebunan, dan perikanan), Sulawesi Tenggara 4. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang di Sulawesi Utara dan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi di Sulawesi Tenggara dengan implementasi blue,green, circular economy **5. Kawasan Hilirisasi Gas Bumi, Sulawesi Tengah**	1. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Pesisir danKepulauan di Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya **2. Pengembangan Kawasan Perairan Togean-Banggai dansekitarnya, Sulteng** 3. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Kepulauan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, sertaKawasan Pulau-Pulau Kecil Sulsel	Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Perbatasan diKab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah 2023 sebesar 11,91 persen tertinggi se-Regional Sulawesi dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor yang menjadi penyumbang dalam tingginya pertumbuhan ekonomi yaitu pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Namun dirasakan dampaknya sangat minim bagi kesejahteraan masyarakat serta pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi antara lain karena adanya distribusi manfaat yang tidak merata misalnya kenaikan dalam sektor pertambangan dan pengolahan sering kali menguntungkan sebagian kecil populasi, seperti pemilik perusahaan atau pekerja yang memiliki keterampilan khusus, kemudian, sektor ini juga tidak menyediakan lapangan kerja yang stabil atau berkualitas tinggi, karena pekerjaan yang tersedia hanya bersifat musiman atau kontrak tanpa ada penawaran pelatihan atau pengembangan keterampilan berkelanjutan. Selain hal tersebut di atas, sektor pertambangan dan industri pengolahan cenderung berpusat di lokasi tertentu dan mungkin tidak memacu pertumbuhan sektor ekonomi lokal yang lebih luas, seperti pertanian, perdagangan, atau jasa, yang juga penting untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.98
Isu Strategis Regional Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Perlindungan Lingkungan

Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas	Pengembangan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Kecamatan Prioritas Nasional, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat dan Perlindungan Pemulihan Lingkungan	Eliminasi Stunting, Pengendalian Penyakit menular, Penyakit Tropis dan Lainnya	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul, Pelatihan dan Pendidikan Vokasi, dan Revitalisasi SaranaPrasarana Sekolah
1. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Mapalus Sulawesi Utara 2. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gulira, Sulawesi Selatan **3. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Morowali, Sulawesi Tengah**	1. PKSN, Tohuna dan Melonguane Sulawesi Utara Kecamatan perbatasan Prioritas : 1. Kab. Sangihe dan Kep. Talaud Sulut **2. Kab. Buol dan Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah** 3. Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo Kawasan Transmigrasi (KT) : 1. KT Ulumanda, Tobadak, SULUT 2. KT Sulamata, Gorontalo **3. KT Tompalore dan KT Bungku, Sulawesi Tengah** 4. KT Mutiara dan KT Anawua, Sultra	**1. Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah** 2. Kawasan Pesisir, Gorontalo 3. Kawasan Pengembangan Pulau Kecil, Sulbar **4. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kota Palu**	**1. Seluruh Provinsi di Regional Sulawesi** **2. Eliminasi Schsistosomiosis : Sulawesi Tengah**	**Seluruh Provinsi di Regional Sulawesi**

Kondisi infrasturkur diwilayah Sulawesi, baik infrastruktur dasar, maupun konektivitas masih belum optimal. Pelabuhan yang menjadi simpul utama belum perberan optimal sebagai Hub transshipment KTI karena belum optimalnya pengembangan Kawasan ekonomi pada hinterland. Belum tuntasnya pembangunan jalan trans Sulawesi, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibiltas.

Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja;

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini antara lain adanya ketidaksesuaian keterampilan yang diberikan kepada tenaga kerja mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh perubahan teknologi atau evolusi industri yang cepat, dimana keterampilan yang diberikan pada saat pekerja mengikuti pelatihan mungkin sudah tidak relevan lagi dikemudian harinya. Kemajuan teknologi yang cepat dapat menyebabkan keterampilan yang sudah ada menjadi using. Hal lain yaitu urangnya informasi yang cukup untuk dimiliki oleh pekerja mengenai peluang kerja yang tersedia ataupun keterampilan yang dibutuhkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Selain keterampilan teknis, *soft skills* seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama tim juga

sangat penting. Kurangnya pelatihan dalam *soft skills* ini dapat menghambat produktivitas dan efektivitas tenaga kerja.

Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan;

Hubungan dominasi sektor pertanian dengan tingkat kemiskinan dijelaskan dalam beberapa penyebabnya antara lain: pendapatan rendah dari sektor pertanian dibanding dengan sektor industri atau jasa akibat hasil pertanian dipengaruhi oleh faktor cuaca, harga komoditas yang fluktuatif serta kurangnya pemanfaatan teknologi modern serta karena sifatnya musiman, jadi penghasilan pekerja sektor pertanian tidak memiliki penghasilan yang tetap. Selain itu, yang menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan dari sektor pertanian adalah petani umumnya di Sulawesi Tengah memiliki akses yang terbatas ke teknologi terbaru serta infrastruktur yang kurang memadai sehingga menghambat produktivitas dan pendapatan mereka. Kepemilikan tanah dan struktur kepemilikan juga tidak merata karena sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh pemodal yang besar serta petani dengan modal yang kecil hanya mampu menyewa lahan atau tanah garapan sehingga kesulitan dalam meningkatkan produksi mereka.

Tingginya ketimpangan antarkelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah;

Kesenjangan ekonomi antar wilayah kepulauan dengan daratan juga masih menjadi isu pembangunan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitas (WM), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) masih belum memberikan dampak secara optimal dalam mempercepat penurunan persentase penduduk miskin di Wilayah Sulawesi. Kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi juga belum optimal dikembangkan sebagai daerah penyanggah dari pusat-pusat pertumbuhan. Ketimpangan antarkelompok dan wilayah seringkali disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Ketika infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, tidak tersebar secara merata, wilayah yang kurang berkembang atau terpinggirkan akan mengalami kesulitan dalam

mengakses berbagai layanan dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini tentunya akan berdampak pada ekonomi, kesehatan dan pendidikan, pembangunan sosial serta mobilitas dan konektivitas.

Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai;

Isu ini merupakan isu kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat, faktornya karena keterbatasan infrastrutkur, sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, aksesibilitas yang minim serta adanya ketimpangan sosial. Hambatan pada aspek SDM kesehatan dan pendidikan akibat keterbatasan sarana dan prasarana masih dialami oleh sebagian besar Provinsi di wilayah Sulawesi, seperti Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan likuefaksi)

Pulau Sulawesi terletak di daerah yang aktif secara tektonik, dimana beberapa lempeng tektonik bertemu dan saling bertabrakan, juga berada di sekitar jalur Cincin Api Pasifik, yang dikenal dengan daerah dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi. Selain itu, karakteristik topografi dan geologi Pulau Sulawesi dengan pegunungan dan lembah yang dalam dapat memperburuk dampak bencana alam, salah satunya akibat struktur geologi yang kompleks dimana proses tanah kehilangan kekuatan dan kestabilan dari getaran gempa bumi sangat rentan. Wilayah Sulawesi memiliki lima perairan pesisir yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo, Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Laut Banda yang masuk dalam rangkaian tektonik.

D. Isu Strategis Sulawesi Tengah

Penekanan permasalahan dan isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah berangkat dari kondisi, pemetaan dan tantangan ke depan serta memadukan dengan isu global, Nasional serta regional Sulawesi. Saat ini, tantangan terbesar yang semakin kompleks di tengah euforia hilirisasi industri yang merupakan strategi pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya mengantisipasi fenomena tersebut jika tidak mau tenggelam dalam euforia yang berlebihan. Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan

cadangan nikel terbesar di Indonesia harus mencari alternatif lain dalam rangka pengembangan ekonomi. Potensi sektor Pertanian sudah seharusnya lebih dikembangkan dengan catatan wajib dibarengi dengan fondasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, agar mampu mengolah potensi sektor pertanian dan pertambangan. Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah tersebut, maka dirumuskan isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas mutlak diperlukan. Transformasi sosial yang dititik beratkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. **Masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan bidang kesehatan**, antara lain: (a) masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia, (b) pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal, (c) penyakit menular masih tinggi, (d) penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, (e) adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya, (f) disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sementara dibidang pendidikan juga masih terdapat sejumlah **tantangan di bidang pendidikan**, diantaranya: (a) belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi, (b) kualitas pendidikan masih relatif rendah yang disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, (c) keterbatasan dan distribusi guru yang berkualitas belum sepenuhnya merata, (d) produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tantangan ini dapat dilihat dari adanya sejumlah indikator sebagai berikut: (a) akses pendidikan belum merata, (b) Kualitas pendidikan masih rendah, (c) proporsi PTK bersertifikat

masih kurang, (d) proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah.

Sementara dibidang perlindungan sosial juga masih terdapat sejumlah **tantangan perlindungan sosial.** Perlindungan sosial berfokus pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain: (a) masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, (b) risiko bencana alam dan non alam, (c) perubahan iklim, (d) terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, (e) belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta (f) rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, (g) penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat kepesertaan aktif dan (h) literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejumlah tantangan yang masih dihadapi antara lain: (a) akurasi program bantuan sosial masih rendah, (b) ancaman bencana dan dampak perubahan iklim, (c) kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, (d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah, (e) belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan dan (f) program jaminan sosial belum optimal dan inklusif.

Sejumlah **tantangan di bidang Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** difokuskan pada upaya untuk mendorong kemampuan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, saling mendukung, dan memiliki komunikasi yang baik, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada masyarakat, serta menekankan pada upaya kesetaraan hak, kesempatan, dan partisipasi penuh bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi antara lain: (a) Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, (b) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang

disabilitas dan lansia belum optimal, (c) Ketimpangan gender yang masih tinggi, dan (d) Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.

Pembangunan **kebudayaan** merupakan upaya untuk menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya suatu masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat identitas, warisan, dan karakter bangsa, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi berbasis budaya. Dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan tersebut sejumlah isu yang menjadi tantangan antara lain: (a) karakter dan jati diri bangsa menghadapi ancaman negatif budaya global, (b) pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (c) kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat, yang ditandai dengan masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2. Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pertambangan

Pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah jangka menengah dalam rangka menuju Provinsi dengan pendapatan tinggi dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Industrialisasi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (*supply*) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (*Research, Development, and Demonstration*) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas atau pun dari sisi permintaan (*demand*). Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan tinggi karena sebagian besar angkatan kerja Sulawesi Tengah berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, laju peningkatan nilai tambah di beberapa sub sektor industri padat karya pun relatif terbatas. Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pertambangan bahkan penyerapan tenaga kerja

berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor tersebut masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal ini disebabkan antara lain adalah disebabkan karena dukungan pendanaan untuk mendukung peningkatan produktivitas khususnya benih, pupuk dan alsintan yang seyogyanya sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Pusat tidak *in-line* dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Sulawesi Tengah. Selain hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi, lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. BUMN sebagai agen pembangunan masih bersifat eksklusif dalam melaksanakan penugasan pembangunan. Diharapkan BUMN dan UMKM dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan dapat mendorong Indonesia berperan di pasar global dihadapkan pada berbagai isu antara lain masih belum optimalnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terbatasnya pasar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia domestik maupun global, masih rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian, serta regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah baik pusat maupun daerah yang belum optimal. Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu diakselerasi utamanya pada isu ketergantungan pada energi fosil dan rendahnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, emisi GRK pada sektor pembangkit dan transportasi yang sangat tinggi, keterbatasan dukungan pendanaan dan investasi, keterbatasan infrastruktur kelistrikan, serta keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri. Pendekatan ekonomi hijau dan biru belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya. Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif. Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih

jauh untuk optimalisasinya. Selain itu, rendahnya akses hunian layak dan layanan perkotaan yang menimbulkan permukiman kumuh dan urban sprawl berdampak pada belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping masih juga terdapat ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sektor pertanian dan pertambangan seperti: padi, kakao, kelapa dalam, sapi potong, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, tingkat produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya.

Rendahnya tingkat produktivitas sektor unggulan daerah lebih disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (a) proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan; (b) peralatan dan modal sangat minim menyebabkan tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah menyebabkan kecenderung penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, komoditas sektor unggulan harus memiliki kriteria tertentu dan memiliki daya saing sehingga dapat menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, diantaranya yaitu (a) komoditas unggulan harus mampu menjadi motor penggerak utama pembangunan perekonomian, yakni dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran; (b) komoditas unggulan mempunyai keterkaitan dari hulu sampai hilir dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya; (c) seharusnya komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek- aspek lainnya; (d) komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi; dan (f) arah pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Jika dilihat dari struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha pada Tahun 2024, maka Sektor pertanian, perikanan dan kelautan memberikan andil yang cukup besar yaitu 15,80 persen yang menempati posisi kedua dari sektor industri pengolahan sebesar 41,18 persen (BPS Sulteng, 2025).

Sampai saat ini, sektor pertambangan dan penggalian, khususnya nikel dan gas bumi terus mendominasi, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dan hasil tangkap perikanan untuk kesejahteraan para petani dan nelayan. Langkah kedepannya yaitu memajukan sektor pertanian seperti pemanfaatan sumber daya pertanian (modal, teknologi, pasar, informasi, lahan, alsintan) secara optimal, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, pembinaan skill dan talenta petani millennial serta sektor perikanan dan kelautan, seperti peningkatan hasil tangkap laut melalui sarana dan prasarana (kapal ikan, alat tangkap, *smart fishing*) yang modern, teknologi budidaya perikanan dan konservasi habitat-habitat pesisir yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan hal yang terpenting dalam upaya percepatan kesejahteraan petani dan nelayan juga masyarakat secara luas dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan dalam berinvestasi.

Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam serta wisata budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan *cottage, restaurant* dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membukan lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi *business as usual* atau hanya menjadi *trend followers* tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia.

Isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (*carrying capacity*), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.

Upaya peningkatan pembangunan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkesinambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas. Dalam pengembangan pariwisata, maka dukungan ekonomi kreatif sangat diperlukan dan dalam pengembangan pariwisata tetapi dalam pengelolaanya masih terdapat hal hal berikut ini :

1. Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal.
- Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50 dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023).
- Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor terendah dengan 2,5 skala 100.
2. Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan.
3. Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual.
4. Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual.
5. Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal.

Selain hal tersebut di atas, sektor pariwisata perlu di dukung oleh UMKM. Dalam pengembangan UMKM masih terdapat permasalahan yaitu :

1. Rendahnya kontribusi dan jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
2. Rendahnya pemanfaatan riset dan adopsi teknologi pada UMKM.
3. Belum optimalnya akses UMKM terhadap pembiayaan dan pemasaran.
4. Rendahnya wirausaha yang berorientasi untuk berkembang atau naik kelas.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sangat tinggi selama kurun beberapa Tahun terakhir, bahkan berada di atas rata-rata nasional, namun masih bersifat ekslusif karena belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Pembangunan ekonomi dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu (i) Industri Pengolahan; (ii) Pertanian; (iii) Pertambangan dan Penggalian; (iv) Konstruksi dan (v) Perdagangan Besar dan Eceran belum memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan fiskal daerah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pembangunan Ekonomi terdapat pembangunan ekonomi Biru yang perlu mendapatkan perhatian yang disebabkan oleh :

1. Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir belum maksimal.
2. Rendahnya produktivitas, nilai tambah, daya saing ekonomi biru yang tercermin pada rendahnya kontribusi PDB maritim terhadap PDRB Provinsi.
3. Rendahnya Kualitas, Keterjangkauan, dan Keamanan Pangan Akuatik/Pangan Biru.
4. Rendahnya jumlah dan kualitas riset, penggunaan teknologi, inovasi, ketersediaan data dan informasi terkait kemaritiman dan perairan darat.
5. Kurangnya pendanaan dan tata kelola pada sektor-sektor penghasil barang, penghasil jasa, dan upaya konservasi di kawasan perairan dan pesisir.

3. Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas diarahkan pada peningkatan tata kelola ASN dengan meningkatkan kualitas SDM ASN serta menerapkan sistem merit dan manajemen talenta ASN. Sementara itu dilakukan peningkatan kualitas layanan publik terpadu (fisik dan non fisik) yang inklusif

berbasis digital. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan dilaksanakan berbasis digital dan inovatif yang didukung oleh penguatan impelementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah, peningkatan Integritas ASN, penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk kemandirian fiskal berbasis elektronik serta penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk terwujudnya *Open Government Partnership*. Stabilitasi ekonomi daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan, serta stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Serta meningkatkan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan bidang tata kelola pemerintahan yaitu menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Tengah dimana integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal, di samping biaya politik tinggi dan pendanaan dari negara yang belum memadai. Selain hal tersebut di atas **masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik** dimana belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik. Selain hal tersebut masih lamahnya kontrol dalam pencegahan disektor sektor rawan korupsi serta rendahnya budaya anti korupsi yang akhirnya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Belum adanya sistem penilaian Perangkat Daerah/lembaga/daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas. Belum optimalnya peran APIP untuk dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan peningkatan manajemen risiko. Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah, belum memadainya SDM di bidang regulasi, dan partisipasi pembentukan regulasi yang belum optimal.

Isu-isu tata kelola pemerintahan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik yaitu berupaya optimal untuk mewujudkan aspek-aspek pembentuk zona integritas. Aspek-aspek tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi sebagai langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan daerah. Birokrasi pemerintah daerah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Olehnya itu untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Namun untuk konteks daerah masalah pelayanan publik sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut di atas, mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah daerah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.

Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip *good governance* dan komunikasi birokrasi.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tantangan tentang hal ini, dikarenakan tuntutan profesionalitas ASN yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Di kondisi saat ini, tata kelola pemerintahan perlu dibenahi lagi untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Perkembangan kehidupan masyarakat di masa mendatang ditunjukkan dengan semakin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan, semua itu diakibatkan efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif. Negara- negara dengan tingkat kapabilitas teknologi informasi yang tinggi akan memiliki daya inovasi dan daya saing yang sangat besar yang sanggup menentukan arah perkembangan ekonomi dalam skala global.

4. Kondusivitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 Tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang utama, divergensi ekonomi global, tekanan dari sisi domestik, rendahnya penerimaan perpajakan, belum optimalnya kualitas belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah. Terakhir, dangkalnya pendalaman sektor keuangan, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan non bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan. Selain hal tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yaitu **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** yaitu keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas: infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi, kinerja sistem logistik nasional belum optimal, pembangunan wilayah tidak merata, ketimpangan pembangunan antar daerah dan kebutuhan pendekatan.

Perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal *supply side*: masih rendahnya daya saing ekspor domestik, masih belum terintegrasinya fasilitasi dan informasi terkait perdagangan, keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa, masih belum optimalnya ekosistem persaingan usaha, daya saing produk sektor jasa yang masih rendah, minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global, adanya kebijakan dekarbonisasi

(decarbonization policies) di beberapa negara. tantangan lainnya belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi dan konektivitas ekonomi domestik: infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, kekurangan pembiayaan, terutama dengan sumber daya keuangan terbatas, perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi, biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas domestik perlu diperkuat, masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha, terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi, tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur, koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi modal transportasi, perlunya penguatan pondasi dalam percepatan transformasi digital, belum meratanya infrastruktur konektivitas digital dan kumputasi yang berkualitas, penguatan pengelolaan ekosistem infrastruktur, termasuk tata kelola dan regulasi, belum optimalnya adopsi perkembangan perangkat teknologi infrastruktur digital dan infrastruktur penyiaran, terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet, penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI), adopsi digital bagi pelaku umkm belum optimal dan inovasi dan pengembangan keuangan digital (*FinTech*).

5. Potensi Bencana Daerah yang Cukup Tinggi dan Ancaman Degradasi Lingkungan

Seiring dengan meningkatnya populasi, maka dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan.

Saat ini, Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil. Dampak seiring dengan meningkatnya populasi, Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan,

keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan.

6. Disparitas Pembangunan Antar Wilayah

Disparitas wilayah menjadi fokus dan prioritas pembangunan daerah. Isu disparitas wilayah ini merujuk pada ketidakseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan antar berbagai daerah dalam suatu wilayah, baik itu antar kabupaten/kota, maupun antar daerah perkotaan dan perdesaan. Disparitas ini mencerminkan perbedaan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, kependudukan dan fisik.

Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan Peningkatan sarana dan prasaran sumber daya air pemerataan pembangunan antar wilayah, ini diperkuat upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerja sama antar daerah, penuntasan RDTR kabupaten/kota, serta peningkatan infrastruktur pelayanan dasar.

Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sulawesi Tengah masih menjadi salah satu isu strategis. Kondisi geografis Sulawesi Tengah berupa kepulauan, perbukitan, pedalaman dan hutan membuat sulit dalam penataan aksesibilitas dan konektivitas atau jaringan penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan sulitnya suatu daerah untuk dijangkau sehingga terjadi perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, muncul berbagai permasalahan klasik yang ditemui daerah dan masyarakat, seperti tingginya daerah rawan pangan, harga barang-barang pokok tinggi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak maksimal, kemampuan digitalisasi rendah, pembangunan tidak merata serta kondisi keamanan daerah yang rentan terhadap ancaman. Demikian juga dengan konektivitas yang rendah akan menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak merata karena terhambat pada terbatasnya tata kelola jaringan penghubung antara wilayah-wilayah yang minus ekonomi dengan sentra-sentra produksi atau pusat-pusat ekonomi.

Penguatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka diperlukan tercapaianya kondisi aksesibilitas dan konektivitas yang ideal sehingga dapat mendukung perkembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Pengembangan wilayah pedesaan di Sulawesi Tengah masih memerlukan dukungan aksesibilitas yaitu kemudahan atau keterjangkauan oleh wilayah lain atau keterjangkauan pedesaan terhadap wilayah sekitarnya. Jika aksesibilitas terbangun maka akan membuka peluang besar untuk potensi pengembangan wilayahnya. Adapun konektivitas dapat diartikan sebagai keberadaan aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah yang berarti akses terhadap keanekaragaman informasi yang tersedia dalam skala global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.

Upaya yang hendak dilakukan dalam rangka isu strategis tersebut, yaitu: pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-moda supplay chain system* yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Ketersediaan infrastruktur dan literasi (kemampuan penguasaan) digital di Sulawesi Tengah, masih minim dikarenakan masih banyaknya daerah di kabupaten/kota yang masih ber status '*blank spot*". Hal yang paling prioritas yaitu tersedianya infrastruktur digital yang menjangkau hingga daerah-daerah pedesaan di kepulauan, pegunungan, pedalaman dan area hutan. Biaya pengadaan infrastruktur adalah tergolong mahal sehingga diperlukan langkah awal berupa perencanaan yang baik, terarah dan terukur.

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini dan di kemudian hari karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Kemampuan literasi digital yang baik akan membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus

dalam dunia teknologi dan meningkatkan kesempatan untuk sukses dalam bidang yang terkait dengan TIK.

Saat ini, isu infrastruktur dan digital di Sulawesi Tengah dikategorikan minim karena masih kurangnya akses ke perangkat teknologi dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknologi terutama bagi kaum milenial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi digital, sehingga tidak tertarik untuk meningkatkan kemampuan. Pemanfaatan teknologi informasi teknologi juga belum sepenuhnya, seperti rendahnya kemampuan masyarakat untuk terhindar dari korban penipuan dan berita hoaks di platform daring yang tidak terlepas dari masih rendahnya literasi keamanan digital warga sehingga diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkanya. Pihak pemerintah daerah, pihak swasta dan mitra pembangunan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi digital di Sulawesi Tengah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Selain hal tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yaitu dimana **perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masih** belum optimal dalam memberikan kontribusi ekonomi. disebabkan potensi ekonomi perkotaan yang belum teroptimalisasi secara maksimal, pertumbuhan ekonomi perkotaan yang belum berkontribusi pada kawasan sekitar, pola pembangunan perkotaan yang tersebar, penggunaan lahan perkotaan yang belum efisien, pengendalian pemanfaatan ruang yang belum, terlaksana secara efektif. Pemenuhan layanan perkotaan yang belum memadai dan inklusif: ketersediaan rumah layak huni terjangkau belum memadai dimana pemenuhan layanan air minum dan akses, sanitasi layak terjangkau belum merata Pengelolaan dan penanganan sampah belum berkelanjutan, Rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur dan jaringan aksesibilitas kawasan perkotaan, rendahnya penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan, sarana pendidikan dan kesehatan belum memadai dan merata. Masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan: rendahnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja penduduk perkotaan, penanganan sektor ekonomi informal perkotaan yang belum optimal, tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi, tingkat kriminalitas yang tinggi di perkotaan. Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana: tingkat pencemaran lingkungan perkotaan yang tinggi, risiko bencana alam dan nonalam yang tinggi di perkotaan, tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan

kolaboratif. Belum adanya regulasi yang khusus mengatur perkotaan secara terpadu: belum sinkronnya kebijakan pembangunan perkotaan antar lembaga sektoral dan antar pusat daerah, belum lengkapnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang di daerah, rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif perkotaan, rendahnya kapasitas fiskal daerah dan rendahnya kualitas belanja daerah, belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik, belum terintegrasi dan belum memenuhinya standar data perkotaan dengan data lainnya.

7. Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar

Peningkatan sarana dan prasarana dan utilitas umum serta rumah layak huni yang terjangkau dan pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan layanan air siap minum dan sanitasi aman pada tahap ini juga diarahkan pada peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain hal tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yaitu **percepatan transisi energi masih mengalami kendala** diakibatkan ketergantungan terhadap energi fosil, emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi, potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil, kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai, keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi, pemanfaatan energi baru yang belum berkembang, dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran, ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan, ketergantungan pada produksi impor, belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga, Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi, Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi).

8. Inovasi Pembiayaan Pembangunan dalam Mendukung Kesinambungan

Kesinambungan pembangunan, diarahkan pada upaya peningkatan inovasi pembiayaan daerah melalui mitra pembangunan untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah yang adaptif serta sumber pembiayaan alternatif.

E. RUMUSAN ISU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kontekstual (lingkungan dinamis yang meliputi Global, Nasional dan Regional), isu KLHS, serta pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada yang dilakukan antara lain melalui penjaringan aspirasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.99
Kesimpulan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi sumber daya alam	Hilirisasi Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan Belum Optimal	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal	Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan	Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pertambangan
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	Hilirisasi Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan Belum Optimal	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal	Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Memantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital dan ekonomi biru	Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan	Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pertambangan
Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal	Perkembangan Teknologi	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Tingginya ketimpangan antarkelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	Inovasi Pembiayaan Pembangunan dalam Mendukung Kesinambungan
Lingkungan hidup berkualitas	Potensi Bencana Daerah yang cukup Tingi serta Adanya Ancaman	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan	Perubahan Iklim	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam	Potensi Bencana Daerah yang Cukup

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Degradasi Lingkungan Hidup.	kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim		Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	(gempa, tsunami, banjir dan likuefaksi)	Tinggi dan Ancaman Degradasi Lingkungan
Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Potensi Bencana Daerah yang cukup Tingi serta Adanya Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	• Konstelasi perdagangan global • Perubahan Iklim • Perkembangan Demografi Global	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan likuefaksi)	Potensi Bencana Daerah yang Cukup Tinggi dan Ancaman Degradasi Lingkungan
Demografi	Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Relatif Masih Rendah;	Peningkatan kualitas daya saing SDM dan peningkatan layanan serta inftrastruktur pendidikan dan kesehatan	Perkembangan Demografi Global	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Zl, Penyandang Disabilitas	Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai	Kualitas Sumberdaya Manusia belum Berdaya Saing
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	• Peningkatan urbanisasi dunia • Tata Kelola Keuangan Global • Pertumbuhan Kelas Menengah Model Kelas	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai	**Tata kelola pemerintahan** Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				Generasi Zl, Penyandang Disabilitas)		pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan
Ketersediaan RTRW dan dukungan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan strategis nasional dan Provinsi	Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal	• Perkembangan Demografi Global • Konstelasi Perdagangan Global	• Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berlmalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi • Perpindahan Ibu Kota Negara • Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia)	Tingginya ketimpangan antarkelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	Disparitas Pembangunan Antar Wilayah
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Keuangan Global	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Kondusivitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perkembangan perkotaan pada simpul-simpul pusat pertumbuhan wilayah da konektivitas regional	Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal	• Peningkatan Urbanisasi Dunia • Perkembangan Teknologi	• Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berlmalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi • Perpindahan Ibu Kota Negara	Tingginya ketimpangan antarkelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2025-2030 telah menjadi Visi daerah yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi RPJMD 2025-2029 selaras dengan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 yaitu **Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Visi tersebut memiliki makna dalam 20 tahun kedepan. Pertama, Sulawesi Tengah yang Maju, dimaknai sebagai Provinsi Sulawesi Tengah mencapai tingkat pembangunan daerah yang maju yaitu sebagai pusat ekonomi global Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan antar wilayah yang merata, peningkatan pelayanan publik yang inovatif yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). Kedua, Sulawesi Tengah yang Sejahtera, dimaknai sebagai Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencapai pendapatan yang tinggi sehingga kesejahteraan meningkat. Ketiga, Sulawesi Tengah yang Berkelanjutan, dimaknai Sulawesi Tengah sebagai wilayah Indonesia yang hijau, ekologis, dan produktif.

Dalam tahap awal periode RPJPD 2025-2045 termuat dalam RPJMD 2025-2029 Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah perlu membenahi dan melakukan perkuatan fondasi sehingga nantinya dapat dilanjutkan pada tahapan akselerasi transformasi pada tahap ke 2 RPJMD 2030-2034 dan ekspansi global Tahap ke 3 RPJMD 2035-2039 di segala bidang pada akhir periode hingga terwujudnya Sulawesi Tengah Emas di Tahun 2045.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Sebelum menjabarkan Visi RPJMD, terlebih dahulu akan ditelaah Visi Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Substansi Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar sasaran pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan. Provinsi Sulawesi Tengah terus bertransformasi menjadi pusat ekonomi global di Kawasan Timur Indonesia dengan pembangunan antar wilayah yang merata, peningkatan pelayanan publik yang inovatif dan didukung oleh ketersediaan sarana prasarana (infrastruktur) serta sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi, berdaya saing, inovatif, dan memiliki derajat kesehatan yang baik serta kondisi kehidupan sosial yang harmoni.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya berhasil mencapai pendapatan tinggi sehingga kesejahteraan meningkat ditunjang oleh produktivitas pertanian, kemaritiman, pariwisata, pertambangan, perdagangan, jasa perkotaan dan industri berbasis sumber daya alam yang menjadi mesin pertumbuhan (*engine of growth*) ekonomi yang tinggi. Sulawesi Tengah sebagai wilayah Indonesia yang hijau, ekologis dan produktif memiliki kemampuan yang tinggi dalam pembiayaan pembangunan. Juga melaksanakan aktivitas ekonomi hijau, ekonomi biru dan bioekonomi yang dilakukan secara lestari dan seimbang serta melaksanakan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ketangguhan Masyarakat Sulawesi Tengah terhadap bencana. Hal ini akan

menjadikan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang aman, nyaman dan produktif serta layak huni.

Berangkat dari hal di atas, maka harapan dan cita-cita seluruh masyarakat agar Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju dan dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan dirumuskan visi Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dan telah menjadi visi pemerintah Provinsi sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu :

“ Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029 ”

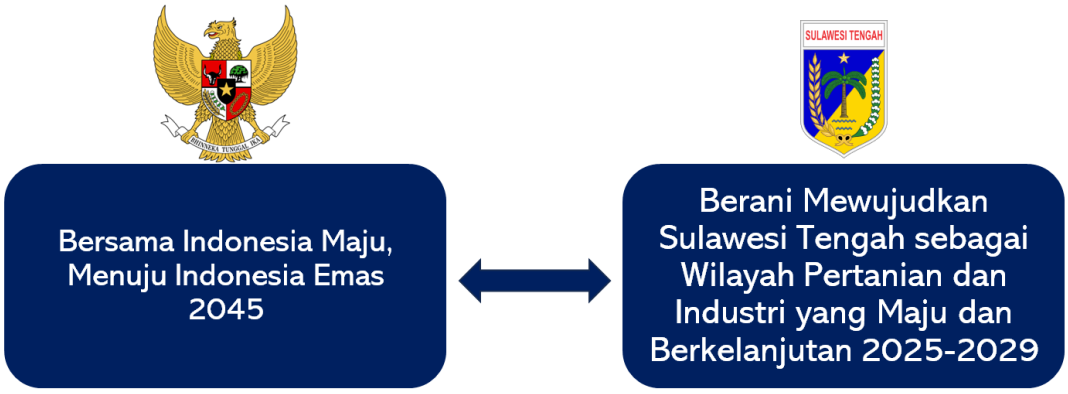
Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029.”	Berani	Memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang sejahtera.
	Sulawesi Tengah	Daerah dengan luas wilayah 61.605,718 km² yang memiliki potensi unggulan dan sumber daya alam yang melimpah.
	Pertanian	Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan potensi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura untuk mewujudkan swasembada pangan.
	Industri	Sulawesi Tengah sebagai daerah hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam.
	Maju	Mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju dengan strategi meningkatkan kualitas SDM yang sehat dan cerdas, meningkatkan PAD, menyediakan lapangan kerja, meringankan

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		beban masyarakat dan memperbaiki tata kelola layanan publik.
	Berkelanjutan	Membangun Sulawesi Tengah dengan dasar yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu dengan menerapkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 selaras dengan visi RPJMN Tahun 2025-2029. Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Hubungan visi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1
Keselarasan Visi RPJMN dan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam upaya mengukur pencapaian Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Sasaran Visi Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 tahap pertama sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Visi RPJMD	Target Sasaran	
		2025	2029
1	**Peningkatan Pendapatan Perkapita**		
	a. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	125 – 135,8	258,7
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	49,15	54,55
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	40,97 – 41,45	45,50 – 55,00
2.	**Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang**		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	09,90-10,80	6,2-7,2
	b. Rasio Gini (indeks)	0,298 – 0,302	0,280 – 0,284
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,72-1,8	2,4
	d. Pertumbuhan Ekonomi	7,0-10,7	12,95 – 14,20
3.	**Kepemimpinan dan Pengaruh di Nasional Meningkat**		
	a. Indeks Inovasi Daerah	75-80 Sangat Inovatif	77-83 Sangat Inovatif
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,43	3,82
4.	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**		
	a. Indeks Modal Manusia	0,51	0,55
5.	**Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission***		
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	72,47	81,30
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,75	82,60

Perumusan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga selaras dengan tujuan penataan ruang sebagaimana dimuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042. Dalam pencapaian Visi RPJMD dilaksanakan melalui serangkaian misi yang jelas dan menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat terwujud selama 5 (lima) tahun kedepan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna Visi maka ditetapkan 4 (empat) Misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penjelasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

No.	Misi	Penjelasan Misi RPJMD
1.	Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.	- Masyarakat Sehat; kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang berlangsung di Sulawesi Tengah memberikan perhatian kepada pemenuhan pelayanan dasar yang diwujudkan melalui pemberian kemudahan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat miskin. - Masyarakat Cerdas; pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan daerah, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing daerah, yang diwujudkan melalui bantuan operasional sekolah serta pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria. - Masyarakat Sejahtera; pembangunan sektor tenaga kerja merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja menjadi faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan

No.	Misi	Penjelasan Misi RPJMD
		berdaya saing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjamin ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian dan UMKM.
2.	Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	- Ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta optimalisasi potensi lokal, ekonomi kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta Menjamin Semua Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dapat Terjangkau.
3.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	- Pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang dirancang secara berkelanjutan akan mendukung daya dukung lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, serta memastikan pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan menjamin konektivitas antar daerah.
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan	- Tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi

No.	Misi	Penjelasan Misi RPJMD
	nilai religius dan kearifan lokal.	pada pelayanan publik akan menciptakan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. - Perbaikan layanan birokrasi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digitalisasi dan inovasi bagi seluruh sektor pelayanan publik dan peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029, disajikan pada tabel berikut:

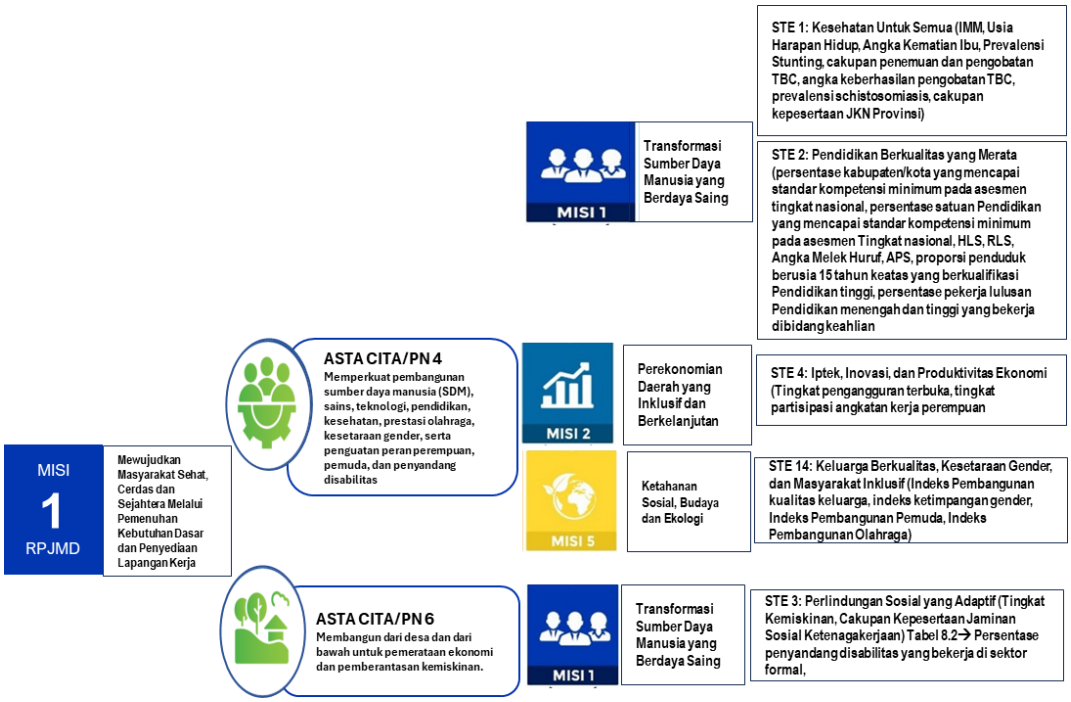
Tabel 3.4
Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025 – 2029

Visi	Misi
" Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029."	1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
	2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
	3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

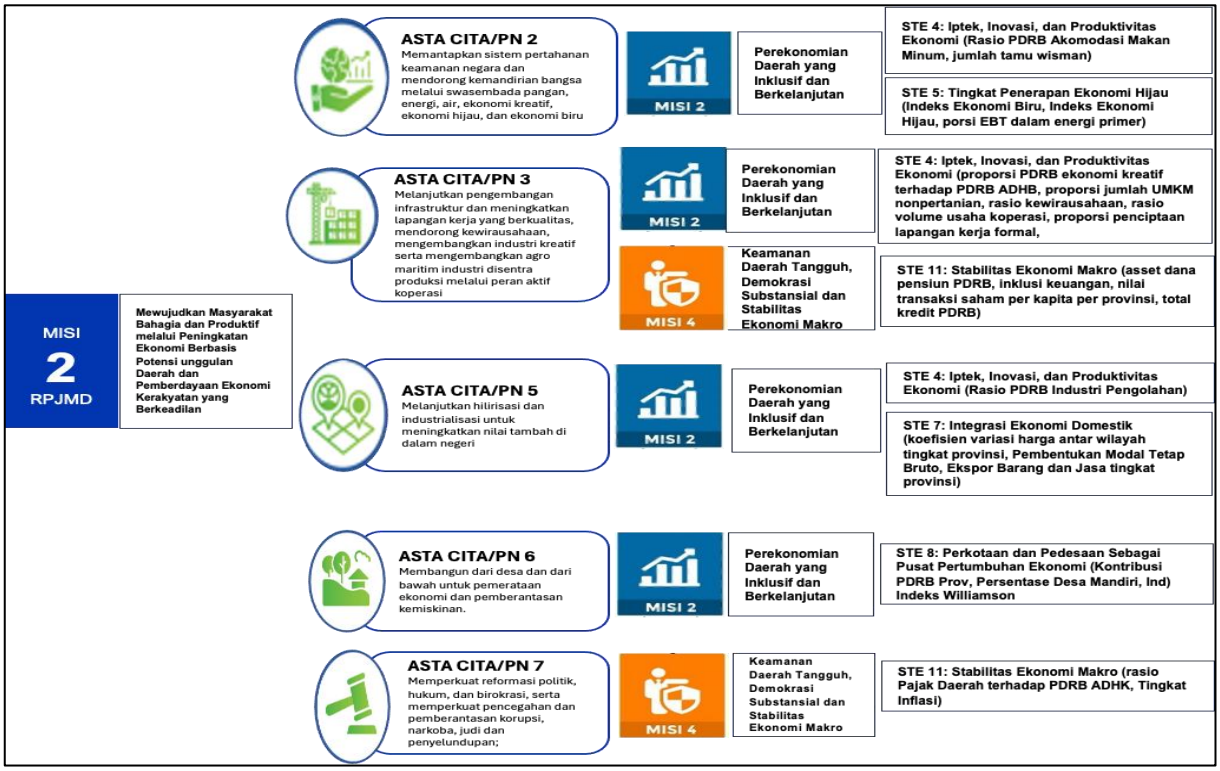
Dari keselarasan Visi dan Misi tersebut di atas diharapkan untuk perwujudan masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih maju dan berkelanjutan dapat dimaknai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,

tersedianya lapangan kerja, PAD meningkat serta perbaikan tata kelola layanan publik dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah juga menerapkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDG's).

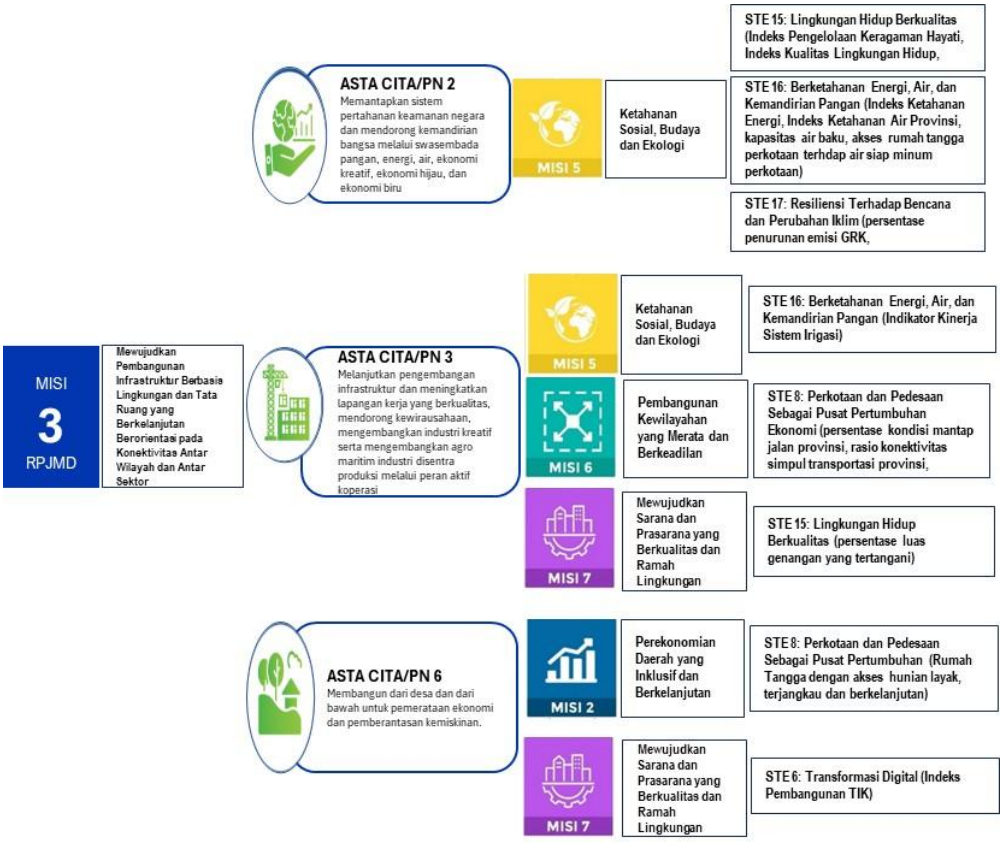
Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029, di samping berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2045, perlu juga memperhatikan RPJM Nasional, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi bagian integral dari program nasional. Dengan demikian, maka Misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional sesuai gambar dan tabel berikut:



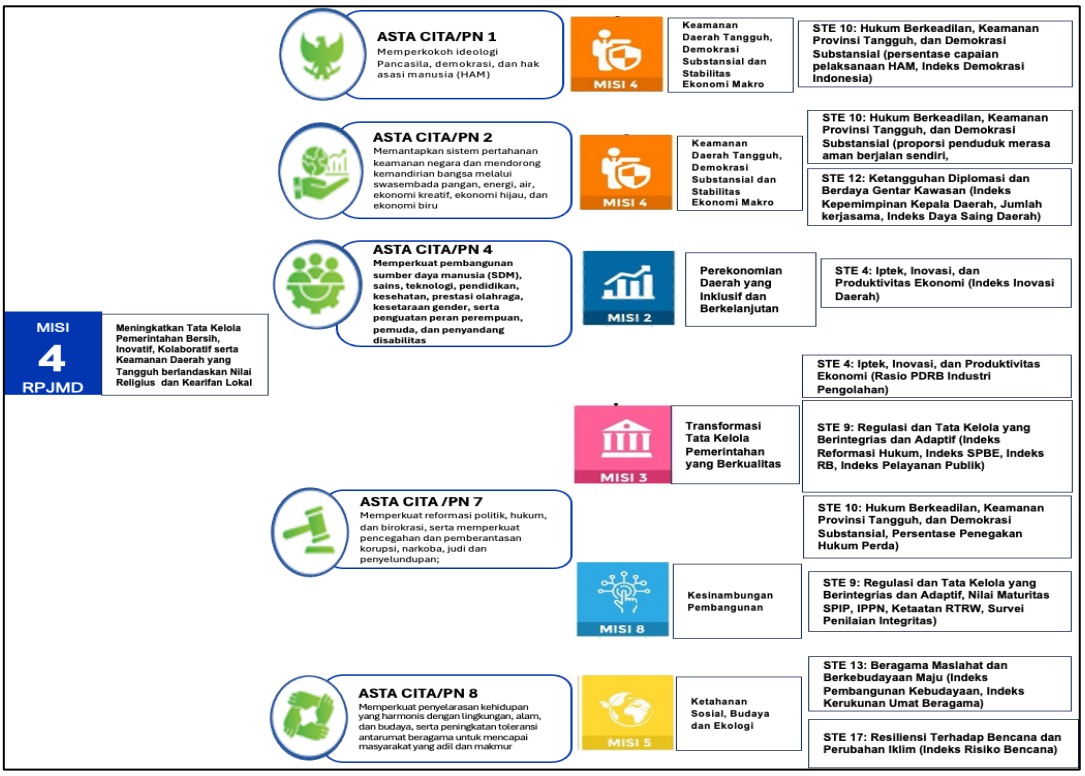
Gambar 3.2
Diagram Keselarasan Misi 1



Gambar 3.3
Diagram Keselarasan Misi 2



Gambar 3.4
Diagram Keselarasan Misi 3



Gambar 3.5
Diagram Keselarasan Misi 4

Tabel 3.5
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita/PN)	Misi RPJPD Tahun 2025-2045
Misi 1 Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.	**Astacita /PN 4** Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	**Misi 1** Transformasi SDM yang berdaya saing - STE 1: Kesehatan Untuk Semua; - STE 2 : Pendidikan berkualitas yang merata **Misi 2** Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan - STE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita/PN)	Misi RPJPD Tahun 2025-2045
		Misi 5 Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi - STE: 14 (Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.
	Astacita 6/PN 6 Membangun dari Desa dan dari bawah dan Pemberantasan Kemiskinan	**Misi 1** Transformasi SDM yang berdaya saing - STE 3: Perlindungan social yang adaptif
Misi 2 Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	**Astacita / PN 2** Menetapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**Misi 2** Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan - STE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi; - STE 5: Tingkat penerapan ekonomi hijau
	Astacita 3 / PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**Misi 2** Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan - STE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi; **Misi 4** Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah - STE 11 Stabilitas Ekonomi Makro

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita/PN)	Misi RPJPD Tahun 2025-2045
	Astacita 5 / PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. **Astacita 6 / PN 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. **Astacita 7 / PN 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	**Misi 2** Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan - STE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi; - STE 7: Integrasi ekonomi domestik; **Misi 2** Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan - STE 8: Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi **Misi 4** Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah - STE 11: Stabilitas ekonomi Makro
Misi 3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	**Astacita 2 / PN 2** Menetapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. **Astacita 3/PN 3**	**Misi 5** Ketahanan sosial, budaya dan ekologi. - STE 15: Lingkungan Hidup Berkualitas; - STE 16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; - STE 17: Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. **Misi 5**

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita/PN)	Misi RPJPD Tahun 2025-2045
	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Ketahanan sosial, budaya dan ekologi. - STE 16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; **Misi 6** Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan - STE 8: Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi **Misi 7** Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan - STE 15: Lingkungan Hidup Berkualitas;
	Astacita 6 / PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	**Misi 2** Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan - STE 8: Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; **Misi 7** Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan - STE 6: Transformasi Digital;
Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh	**Astacita 1/PN 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	**Misi 4** Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita/PN)	Misi RPJPD Tahun 2025-2045
berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.		- STE 10: Hukum berkeadilan, keamanan Provinsi Tangguh, dan demokrasi substansi
	Astacita / PN 2 Menetapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**Misi 4** Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah - STE 10: Hukum berkeadilan, keamanan Provinsi Tangguh, dan demokrasi substansi; - STE 12: Ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar Kawasan;
	Astacita /PN 4 Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	**Misi 2** Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan - STE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi;
	Astacita 7 / PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	**Misi 3** Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas - STE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi; - STE 9: Regulasi dan tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif - STE 10: Hukum berkeadilan, keamanan Provinsi Tangguh, dan demokrasi substansi; **Misi 8** Kesinambunagn Pembangunan

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita/PN)	Misi RPJPD Tahun 2025-2045
		- STE 9 Regulasi dan tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif
	Astacita 8 / PN 8 Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	**Misi 5** Ketahanan sosial, budaya dan ekologi. - STE 13: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; - STE 17: Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka perencanaan terintegrasi melalui desain kerangka berpikir logis sederhana dituangkan ke dalam rumusan Tujuan dan Sasaran berikut ini.

A. Tujuan dan Sasaran Misi I

Misi 1 Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari pilar utama pembangunan manusia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sebagai fondasi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan,

dengan sasaran utama menurunnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan serta meningkatnya angka partisipasi kerja.

Selain itu sasaran pembangunan Pemerintah Sulawesi Tengah juga diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keluarga yang berkualitas dan berdaya, dengan lingkungan sosial yang mendukung kesetaraan gender. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk individu yang sehat, produktif dan memiliki daya saing. Sementara itu, kesetaraan gender juga menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan dalam berbagai sektor pembangunan. Olehnya, dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan memastikan peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 1 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.6
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi I

Berdasarkan gambar di atas, Misi I dicapai melalui 2 (dua) Tujuan dan Sasarannya masing-masing yaitu:

1. **Tujuan 1 Mewujudkan kualitas masyarakat Sulawesi Tengah yang berdaya saing.**

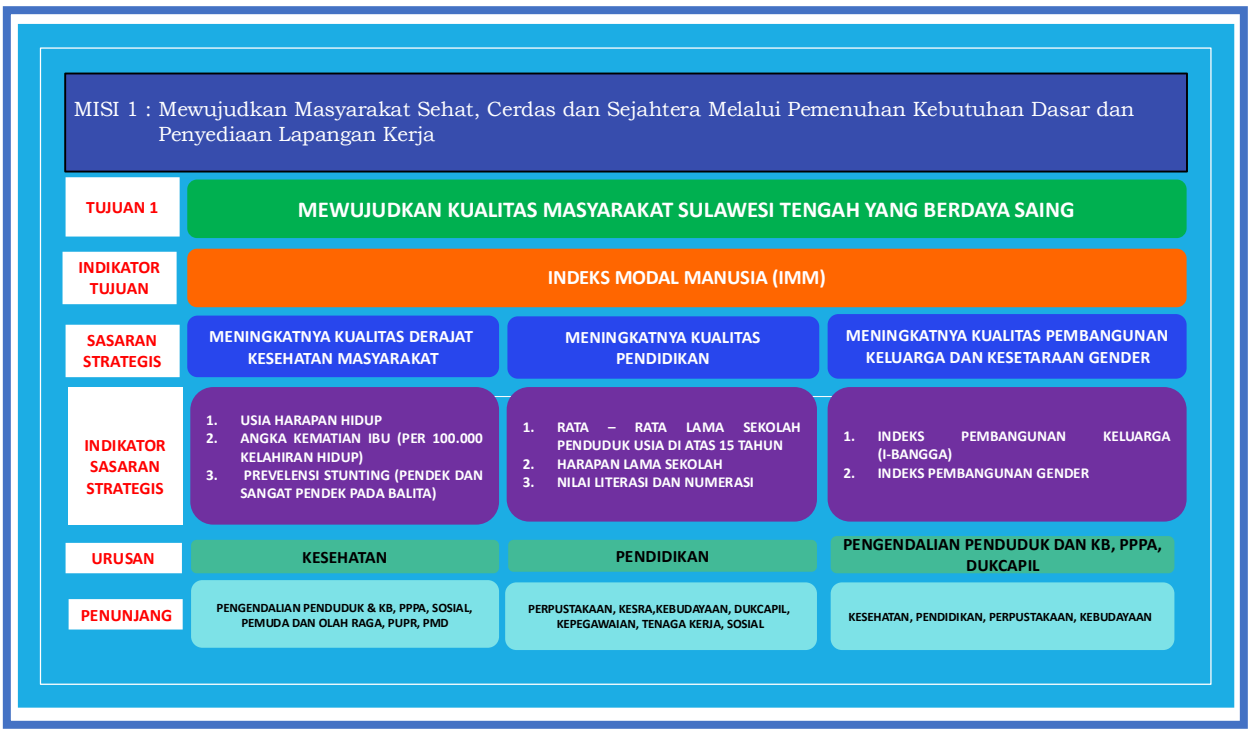
   Sasaran:

   a. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyrakat;
   b. Meningkatnya kualitas pendidikan dan;
   c. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender.

Perwujudan kualitas masyarakat Sulawesi Tengah merupakan pilar utama dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu tujuan strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah adalah mewujudkan kualitas masyarakat yang berdaya saing. Tujuan ini diarahkan untuk membentuk masyarakat yang sehat, terdidik, produktif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika global maupun kebutuhan pasar kerja. Untuk mengukur pencapaian tujuan ini secara terstruktur dan terukur, digunakan indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Indikator ini untuk mengukur konstribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas ekonomi suatu wilayah.

Dengan fokus pada peningkatan Indeks Modal Manusia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Langkah ini mencerminkan strategi jangka panjang untuk membentuk generasi unggul yang memiliki daya saing tinggi di tingkat regional, nasional, bahkan global. Secara praktis, tujuan ini juga mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam kerangka RPJMN dan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), khususnya pada tujuan terkait pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan pekerjaan layak. Melalui pendekatan holistik ini, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari sisi input, tetapi juga dari sisi hasil (*outcome*) yang terukur dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.7
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 1

Sasaran strategis pertama yaitu "*Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat* ", sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kesehatan yang baik merupakan pondasi utama bagi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator sasaran strategis diantaranya adalah: 1). usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik serta gaya hidup masyarakat yang semakin sehat. Upaya peningkatan usia harapan hidup dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan primer, pencegahan penyakit, serta penanganan faktor risiko kesehatan secara efektif, 2). Angka Kematian Ibu, penurunan angka kematian ibu merupakan tolok ukur penting dalam evaluasi keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Penanganan yang optimal mulai dari pelayanan antenatal, persalinan yang aman, hingga perawatan pasca persalinan menjadi fokus utama agar risiko kematian ibu dapat ditekan secara signifikan, 3). Prevalensi Stunting. Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius karena berpengaruh pada

kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penurunan prevalensi stunting dilakukan melalui intervensi gizi tepat waktu, peningkatan edukasi gizi bagi ibu dan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih.

Sasaran strategis kedua yaitu "*Meningkatnya kualitas pendidikan*", dimana pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu melalui sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pendidikan" sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat Sulawesi Tengah dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kualitas pendidikan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain 1). **Rata-rata Lama Sekolah** Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, yang berdampak langsung pada peningkatan keterampilan kerja, penyerapan informasi, dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi maupun sosial 2). **Harapan Lama Sekolah**, indikator ini menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak yang masuk sekolah pada usia tertentu. Peningkatan indikator ini mencerminkan optimisme dan kesiapan sistem pendidikan dalam menjamin akses dan kesinambungan layanan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Ini juga menjadi indikator penting bagi upaya pengurangan angka putus sekolah dan perluasan akses pendidikan yang inklusif 3). **Nilai Literasi dan Numerasi**, indikator ini menggambarkan capaian kompetensi dasar siswa dalam membaca dan berhitung sebagai hasil dari proses pembelajaran. Peningkatan nilai literasi dan numerasi menjadi ukuran langsung dari kualitas pembelajaran di sekolah. Kompetensi ini sangat penting sebagai dasar bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menghadapi tantangan dunia kerja serta kehidupan sosial yang semakin kompleks.

Pembangunan keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis ketiga yaitu "*Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender*" dalam RPJMD sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang harmonis, produktif, dan resilien. Pembangunan keluarga dan

kesetaraan gender dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain : 1). Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas dan ketahanan keluarga melalui tiga dimensi utama: Ketentraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana keluarga mampu menjalankan fungsi dasar secara optimal, termasuk fungsi keagamaan, sosial, ekonomi, perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan I-Bangga menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, 2). Indeks Pembangunan Gender (IPG), indikator ini digunakan untuk mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meningkatnya IPG mencerminkan terwujudnya peran dan akses perempuan yang setara dalam pembangunan, serta berkurangnya kesenjangan gender yang selama ini menjadi hambatan struktural dalam pembangunan manusia. Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi, tetapi juga faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Indikator tujuan dan sasaran strategis di atas diukur selama periode pembangunan jangka menengah daerah melalui target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 1 Misi 1

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Mewujudkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah Yang Berdaya Saing					
Indeks Modal Manusia (IMM)		Indeks	0,48	0,51	0,56
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat					
1	**Usia Harapan Hidup (UHH)**	Tahun	69,42	71,64	73,22
2	**Kesehatan Ibu dan Anak** : Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	%	264	176	101
3	**Kesehatan Ibu dan Anak :** Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%	26,1	24,9	17,9
Meningkatnya Kualitas Pendidikan					
1	**Hasil Pembelajaran** Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,04	9,39	9,90-10,00
2	**Hasil Pembelajaran** Harapan lama sekolah	Tahun	13,34	13,45 - 13,46	13,79

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
3	**Hasil Pembelajaran** Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :				
	- Literasi membaca	%	7,69 (2023)	7,69	7,69
	- Numerasi	%	7,69 (2023)	7,69	15,38
	Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional untuk:				
	- Literasi membaca	%	26,49	27,65-30,15	34,40-35,75
	- Numerasi	%	20,54	21,21-23,71	26,10-27,95
Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender					
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,20	61,86	65,16
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,63 (2023)	93,03	95,00

2. Tujuan 2: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.

Sasaran:

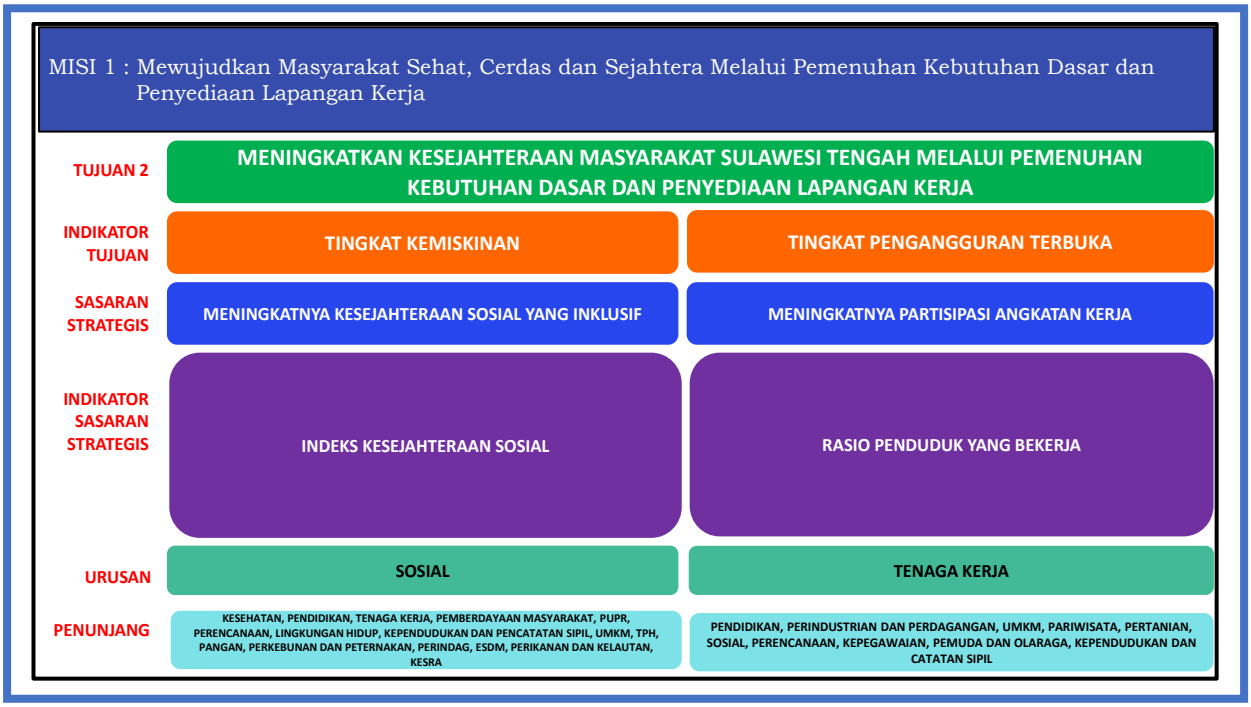
a. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif;

b. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

Melalui tujuan strategis ini diharapkan bahwa kesejahteraan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar secara merata, serta terciptanya akses terhadap kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Indikator tujuan yang dirumuskan untuk menggambarkan tujuan ini yaitu melalui Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah menunjukkan capaian yang semakin baik. Penurunan angka kemiskinan mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Pengurangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama karena kemiskinan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan indikator Tingkat Pengangguran

Terbuka menggambarkan tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Penurunan tingkat pengangguran mencerminkan meningkatnya efektivitas penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja lokal. Dengan meningkatnya akses terhadap pekerjaan yang layak, masyarakat dapat memiliki penghasilan tetap yang mendukung peningkatan taraf hidup dan mengurangi kerentanan ekonomi. Kerangka pikir logis digambarkan di bawah sebagai berikut :



Gambar 3.8
Logframe Tujuan 2 dan Sasaran pada Misi 1

Melalui **sasaran strategis pertama** yaitu "*Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif*", maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, seperti keberdayaan, kesetaraan, serta jaminan perlindungan bagi kelompok rentan. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS), yaitu indikator komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat. IKS mencakup beberapa dimensi utama, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar sosial, kualitas hidup kelompok rentan, partisipasi soasial dan ketersediaan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Peningkatan IKS mencerminkan terciptanya

masyarakat yang lebih inklusif, yaitu masyarakat yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh warganya, tanpa diskriminasi dan tanpa meninggalkan kelompok marginal.

Sasaran strategis kedua adalah "*Meningkatnya partisipasi angkatan kerja*" yang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam aktivitas ekonomi. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja berarti membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Sasaran strategis ini diukur melalui rasio penduduk yang bekerja, yakni persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja dalam berbagai sektor ekonomi. Rasio ini menjadi cerminan seberapa efektif sistem ekonomi dan pasar tenaga kerja daerah dalam menyerap tenaga kerja serta memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Peningkatan angka partisipasi kerja tidak hanya berarti bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan, keterlibatan perempuan, dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar.

Adapun target jangka menengah daerah yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Sasaran dan Indikator pada Tujuan 2 Misi 1

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Lapangan Kerja					
1	Tingkat Kemiskinan	%	11,04	9,90 – 10,80	6,10 – 7,10
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,94	2,25-2,94	2,05 – 2,71
Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif					
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	NA	51	62
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Keja					
1	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	96,85	96,90	98,55

B. Tujuan dan Sasaran Misi 2

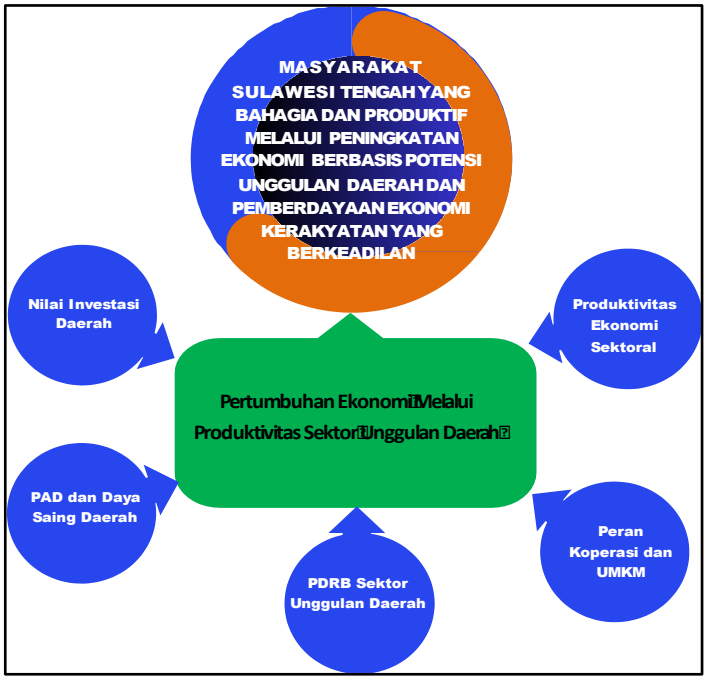
Misi 2: Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Perwujudan dari masyarakat Sulawesi Tengah yang bahagia dan produktif dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah, PDRB sektor unggulan daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya nilai investasi daerah, PDRB sektor industri pengolahan, pendapatan asli daerah dan daya saing serta produktivitas ekonomi sektoral.

Selain itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan tersebut juga memerlukan penguatan sektor unggulan yang merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam upaya meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah tersebut bertumpu pada sasaran meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pariwisata serta meningkatnya peran koperasi dan UMKM. Semuanya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan juga merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan antara lain menurunnya ketimpangan pendapatan antar wilayah, dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi pendapatan, misalnya dalam hal peningkatan sektor Koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif atau melaui diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mendorong industri baru di berbagai wilayah, sehingga dapat membantu meningkatkan PDRP Per Kapita di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 2 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.9
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2

Berdasarkan gambar di atas, Misi 2 dicapai melalui Tujuan dan Sasarannya masing-masing yaitu:

1. **Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah.**

   Sasaran:

   a. Meningkatnya nilai investasi daerah;
   b. Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah;
   c. Meningkatnya Peran koperasi dan UMKM;
   d. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
   e. Meningkatnya daya saing daerah dan produktivitas ekonomi sectoral.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan utama dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Produktivitas unggulan daerah meliputi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, dan industri kreatif yang selama ini menjadi pilar ekonomi

lokal. Dengan optimalisasi sumber daya alam, inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dan akses pasar, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk unggulan Sulawesi Tengah di pasar regional, nasional, maupun internasional. Indikator utama untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan investasi, dan mendorong produktivitas sektor-sektor strategis

Melalui kelima sasaran yang dirumuskan di atas, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pencapaiannya digambarkan melalui indikator sasaran strategis sebagai berikut :



Gambar 3.10
Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Sasaran strategis pertama pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 adalah "*Meningkatnya Nilai Investasi Daerah*". investasi merupakan motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, sasaran strategis ini menjadi fokus penting dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai investasi diukur berdasarkan jumlah

modal yang masuk ke daerah baik dalam bentuk investasi domestik maupun asing, yang berkontribusi pada pengembangan sektor ekonomi prioritas. Peningkatan nilai investasi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, stabilitas kebijakan, serta kemudahan berusaha yang menarik bagi para investor.

Sebagai upaya memperkuat pondasi ekonomi daerah, Sulawesi Tengah memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah” menjadi prioritas strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini antara lain :

1. **Rasio PDRB Industri Pengolahan**, sebagai sektor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk di sektor industri pengolahan melalui teknologi dan inovasi;
2. **Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat dan sumber penghidupan utama di Sulawesi Tengah. Pemerintah akan menitikberatkan pada Pengembangan pertanian yang maju dan berkelanjutan, konservasi sumber daya kehutanan, dan optimalisasi potensi perikanan;
3. **Rasio PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian**, yang memberikan kontribusi sumber daya alam strategis bagi pembangunan daerah. Pemerintah akan melakukan pengelolaan sumber daya pertambangan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan;
4. **Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum**, sebagai indikator pengembangan sektor pariwisata dan jasa yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Pemerintah akan fokus pada pengembangan destinasi wisata dan pelayanan yang profesional untuk mendukung sektor akomodasi dan kuliner;
5. **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**, yang mencerminkan perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan

kreativitas sebagai pendorong diversifikasi ekonomi yang difokuskan pada pembinaan dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Sasaran strategis ketiga adalah "*Meningkatnya peran koperasi dan UMKM. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*" merupakan tulang punggung perekonomian Sulawesi Tengah, yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat basis ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, meningkatkan peran koperasi dan UMKM menjadi sasaran strategis dalam RPJMD yang bertujuan memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui **rasio volume usaha koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**, yang menunjukkan kontribusi ekonomi sektor koperasi dan UMKM terhadap keseluruhan perekonomian daerah. Peningkatan rasio ini menandakan bahwa koperasi dan UMKM semakin mampu berkembang, memperluas pasar, serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian Sulawesi Tengah.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, "*Meningkatkan pendapatan daerah*", khususnya melalui peningkatan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, menjadi sasaran strategis keempat pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang bertujuan memperkuat kemandirian fiskal dan memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah menjadi indikator kinerja utama untuk mengukur pencapaian sasaran ini. Peningkatan rasio PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan lokal melalui pengelolaan sumber daya daerah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sasaran strategis kelima pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah "*Meningkatnya daya saing daerah dan produktivitas ekonomi sektoral*". Sasaran ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Sulawesi

Tengah. Sasaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem yang menjadi modal utama pembangunan daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi:

- **Indeks Daya Saing Daerah**, yang menilai kemampuan daerah dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, inovasi, serta kualitas sumber daya manusia;
- **Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)**, yang mengukur kontribusi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam perekonomian daerah, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang ramah lingkungan;
- **Indeks Ekonomi Hijau Daerah**, yang menilai penerapan prinsip pembangunan hijau dalam berbagai sektor ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Peningkatan indikator tersebut menandakan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inovatif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan secara ekologis. Hal ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap berbagai tantangan global.

Dalam mendukung proses pencapaian tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 tersebut diatas maka telah dirumuskan target tujuan dan sasaran jangka menengah daerah, yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 2

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktivitas Unggulan Daerah					
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	9,89	12,72 - 13,28	12,99 – 14,30
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah					
1	Nilai Investasi	Rp Juta	139.900.000	140.000.000	140.500.000
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah					
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	41,18	40,97 – 41,45	48,51-51,10
2	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	21,57	16,00	16,35

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
3	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Miliyar Rupiah	55.198,23	62.373,9999	114.920,050
4	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,32	0,32-0,45	0,56
5	Proporsi PDRB Ekonomi kreatif terhadap PDRB ADHB	%	2,85	3,76	4,19
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM					
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,36	0,65	1,33
Meningkatnya Pendapatan Daerah					
1	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	38,07	38,79	40,23
Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral					
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,3	3,43	3,92
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	%	47,8	49,15	55,90
3	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	51,65	66,16	71,17

C. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas antar Wilayah dan antar Sektor.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi konektivitas antar wilayah dan antar sektor dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan konektivitas. Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tengah. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan sosial masyarakat, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tata ruang yang terintegrasi.

Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan mengedepankan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, serta mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Hal

ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi dampak perubahan iklim, yang menjadi tantangan utama pembangunan saat ini.

Selain itu, orientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor menjadi strategi penting untuk meningkatkan sinergi dan integrasi dalam sistem pembangunan daerah. Konektivitas yang baik antar wilayah akan memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas manusia, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Sementara konektivitas antar sektor mendorong kolaborasi lintas sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan, sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sinergi dari peningkatan kualtas lingkungan hidup dan infrastruktur dasar dan konektivitas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 3 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.11
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3

Berdasarkan gambar di atas, Misi 3 dicapai melalui 2 (dua) Tujuan dan Sasarannya masing-masing yaitu:

1. **Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan daerah terhadap bencana**

Sasaran:

a. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah;
b. Menurunkan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emission;
c. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang;
d. Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana.

Menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana merupakan aspek strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Tujuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi dan memelihara ekosistem sekaligus meminimalkan risiko dan dampak bencana alam maupun bencana akibat perubahan iklim, demi keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian alam. Pencapaian tujuan ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencerminkan tingkat kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Indeks Risiko Bencana menggambarkan tingkat kerentanan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengancam kehidupan dan pembangunan.

Dengan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah berupaya menjaga ekosistem yang sehat melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan rehabilitasi lingkungan. Sementara upaya menurunkan Indeks Risiko Bencana meliputi peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, penguatan sistem peringatan dini serta pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.

Dalam upaya pencapaiaan tujuan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah terhadap bencana, maka dirumuskan 5 sasaran strategis beserta indikator kinerja dari tujuan dan masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :



Gambar 3.12
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 3

Sasaran strategis pertama pada misi 3 (tiga) tujuan 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 yaitu "*Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah*". Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi Sulawesi Tengah, baik sebagai sumber kehidupan masyarakat maupun sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah menjadi sasaran strategis untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya hayati secara bijaksana dan berkelanjutan.

Indikator utama dalam mengukur pencapaian sasaran ini adalah Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, yang mencerminkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam konservasi, restorasi, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, termasuk flora, fauna, serta ekosistem yang ada. Peningkatan indeks ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Sasaran strategis kedua pada Misi 3 (tiga) tujuan 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 yaitu "*Menurunkan Intensitas emisi GRK menuju*

Net Zero Emission". Menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan langkah strategis Sulawesi Tengah dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Sasaran ini sejalan dengan komitmen nasional dan global untuk mencapai target Net Zero Emission sebagai upaya menekan laju pemanasan global dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Penurunan Intensitas Emisi GRK, yang mengukur tingkat pengurangan emisi GRK per satuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penurunan intensitas ini menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah serta praktik-praktik ramah lingkungan di sektor-sektor ekonomi utama. Upaya menurunkan intensitas emisi GRK tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi teknologi hijau, efisiensi sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi hijau. Selain itu, pengurangan emisi GRK membantu meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran strategis ketiga pada Misi 3 (tiga) tujuan 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu "*Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang*". Pemanfaatan ruang yang berkualitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan ruang di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan tata kelola wilayah.

Indikator kinerja yang menjadi acuan pencapaian sasaran ini adalah Persentase Ketaatan RTRW, yang mengukur tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang oleh berbagai pihak terhadap peraturan dan zonasi yang telah diatur dalam RTRW. Ketaatan yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan tata ruang secara konsisten dan terintegrasi, menghindari konflik penggunaan lahan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang berdampak langsung pada tertib administrasi wilayah, penataan kota dan desa yang lebih baik,

serta terselenggaranya pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Selain itu, pemanfaatan ruang yang optimal juga mendukung konservasi sumber daya alam dan pengurangan risiko bencana.

Sasaran strategis keempat pada Misi 3 (tiga) tujuan 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 yaitu "*Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana*". Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Oleh karena itu, peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana menjadi sasaran strategis dalam pembangunan daerah, guna melindungi masyarakat, aset pembangunan, serta menjamin keberlanjutan proses pembangunan.

Sasaran ini diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah, yaitu indikator yang mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam mengantisipasi, merespons, serta memulihkan diri dari dampak bencana secara cepat dan efektif. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin tangguh pula daerah dalam menghadapi risiko bencana. Peningkatan ketangguhan daerah tidak hanya fokus pada aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dari upaya pencapaian sasaran ini.

Pencapaian dan target kinerja jangka menengah daerah pada indikator tujuan dan sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 1 Misi 3

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan daerah Terhadap Bencana					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	79,98	81,75	82,81
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	226,78	180,59	172,21
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah					
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	N/A	0,60	0,628
Menurunnya Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission					
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	77,96	87,49

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang					
1	Persentase Ketaatan RTRW	Indeks	76,4	32,00	100,00
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,39	0,44	0,54

Catatan : Indikator Persentase Ketaatan RTRW terjadi perubahan definisi operasional berdasarkan hasil perhitungan dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mulai tahun 2025-2030.

2. **Tujuan 2 Meningkatkan kualitas dan Kuantitas infrastruktur dasar dan konektivitas**

   Sasaran :

   a. Meningkatnya layanan infrastruktur jalan dan jembatan;
   b. Meningkatnya layanan infrastruktur Keciptakaryaan dan sumber daya air;
   c. Meningkatnya layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
   d. Meningkatnya kualitas simpul transportasi;
   e. Konsumsi Listrik Per Kapita;

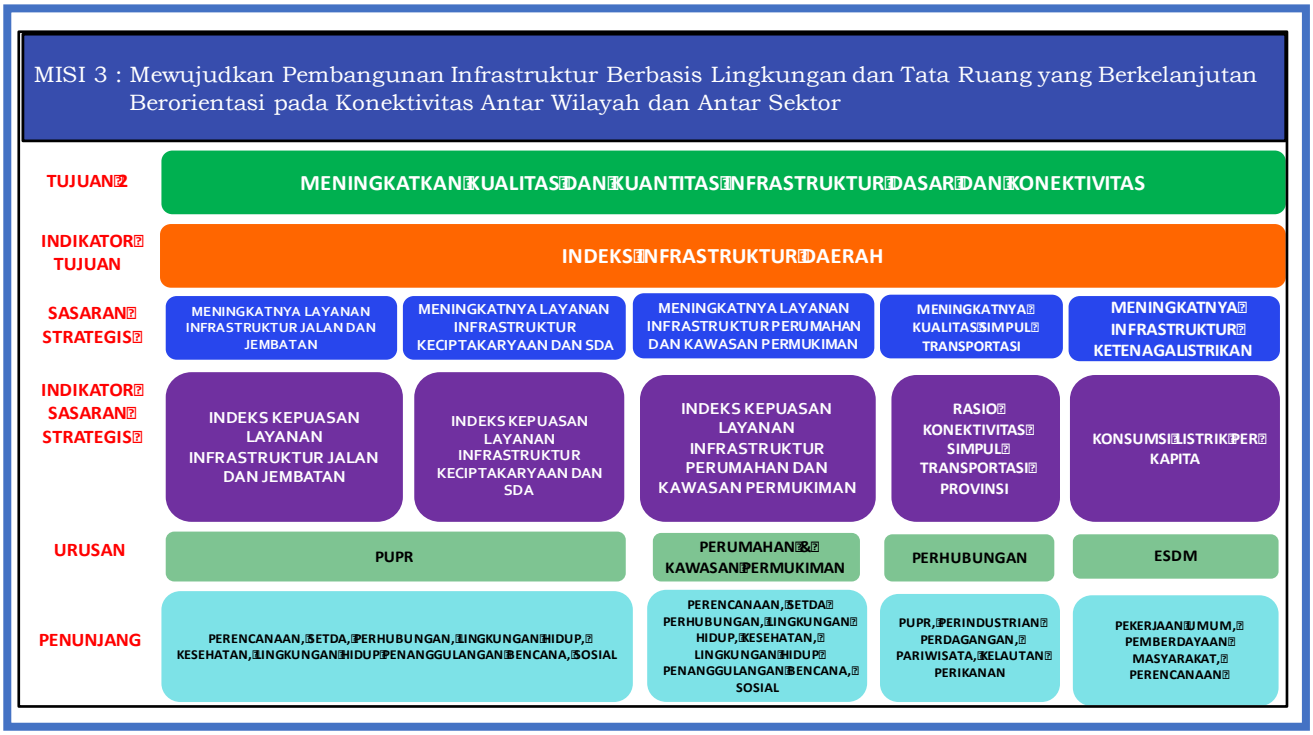
Infrastruktur dasar yang berkualitas dan konektivitas antarwilayah yang baik merupakan prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas sebagai bagian integral dari visi pembangunan daerah.

Tujuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai, aman, dan berkelanjutan, baik di sektor transportasi, energi, air bersih, sanitasi, permukiman, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan konektivitas antarwilayah - terutama antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan terpencil atau tertinggal - diharapkan mampu memperkuat integrasi ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Pencapaian tujuan ini diukur melalui Indeks Infrastruktur Daerah, yang mencerminkan kondisi, cakupan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur di berbagai

sektor. Indeks ini menjadi ukuran komprehensif untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur dan membangun sistem konektivitas yang mendukung mobilitas barang, jasa, dan manusia secara efisien dan merata.

Rumusan tujuan 2 dan sasaran strategis pada Misi 3 dapat dilihat pada diagram kinerja berikut :



Gambar 3.13
Logframe Tujuan 2 dan Sasaran pada Misi 3

Sasaran strategis pertama pada Misi 3 tujuan 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan layanan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu sasaran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, mempercepat arus barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Jalan dan jembatan berperan vital sebagai tulang punggung mobilitas dan integrasi antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam menghubungkan kawasan pertanian, industri, dan pariwisata dengan pasar dan pusat distribusi.

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan layanan infrastruktur jalan dan jembatan melalui pembangunan baru, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan yang ada. Layanan infrastruktur yang andal dan layak akan berdampak langsung pada peningkatan

efisiensi logistik, penurunan biaya transportasi, dan percepatan pemerataan pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang mencerminkan persepsi masyarakat pengguna terhadap kualitas, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin baik pula respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap infrastruktur dasar transportasi.

Sasaran strategis kedua pada Misi 3 tujuan 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan layanan infrastruktur keciptakaryaan dan sumber daya air merupakan sasaran penting dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta menjaga ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Infrastruktur keciptakaryaan mencakup sarana dan prasarana permukiman seperti air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase dan bangunan gedung strategis provinsi, sementara infrastruktur sumber daya air mencakup air baku, irigasi, bendungan, embung, serta pengendali banjir dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan tersedianya layanan infrastruktur yang layak, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung sektor-sektor produktif, khususnya pertanian dan ketahanan air.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air, yang merepresentasikan penilaian masyarakat terhadap kinerja layanan infrastruktur tersebut dalam hal ketersediaan, keandalan, aksesibilitas, dan dampaknya terhadap keseharian masyarakat. Nilai indeks ini menjadi refleksi dari seberapa jauh pembangunan infrastruktur telah memenuhi ekspektasi masyarakat.

Sasaran strategis ketiga pada Misi 3 tujuan 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 yaitu peningkatan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka menciptakan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan perumahan yang memadai serta kawasan

permukiman yang tertata menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan serta penanggulangan kawasan kumuh.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap hunian layak dan infrastruktur dasar permukiman, seperti air bersih perpipaan, sanitasi, sistem drainase, jaringan jalan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Perbaikan layanan ini juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan daerah terpencil.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, dan kemudahan akses terhadap layanan perumahan dan permukiman. Nilai indeks yang meningkat menunjukkan bahwa layanan infrastruktur yang disediakan pemerintah semakin memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran strategis keempat pada Misi 3 tujuan 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya rasio konektivitas simpul transportasi, dimana simpul transportasi memiliki peran strategis dalam memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk. Keberadaan simpul transportasi yang terintegrasi dan berkualitas tinggi sangat penting dalam memperkuat konektivitas wilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas simpul transportasi menjadi salah satu sasaran prioritas dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Sasaran ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan simpul-simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan, dan bandar udara, agar dapat terhubung secara fungsional dan efisien dengan jaringan transportasi lainnya, serta mampu melayani pergerakan orang dan barang secara optimal. Konektivitas yang baik antar simpul transportasi akan menciptakan sistem transportasi multimoda yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan memperluas akses terhadap layanan publik, pusat ekonomi, serta kawasan produksi dan distribusi. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi, semakin tinggi rasio ini, semakin baik integrasi dan efektivitas sistem transportasi dalam mendukung konektivitas wilayah.

Akses terhadap energi listrik yang andal dan merata merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Sasaran strategis kelima pada Misi 3 tujuan 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya infrastruktur ketenagalistrikan melalui indikator konsumsi listrik per kapita, dimana mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar energi bagi seluruh penduduk, termasuk di wilayah terpencil, tertinggal dan sulit dijangkau.

Indikator konsumsi listrik per kapita digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan energi listrik oleh penduduk dalam suatu wilayah selama satu tahun. Indikator ini merepresentasikan:

- Tingkat elektrifikasi dan ketersediaan pasokan listrik,
- Kegiatan ekonomi rumah tangga dan sektor produktif,
- Akses terhadap teknologi dan layanan berbasis listrik.

Nilai konsumsi listrik per kapita yang tinggi umumnya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan modernisasi kehidupan sosial, termasuk terpenuhinya akses listrik bagi masyrakat. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi juga perlu dikelola agar tetap efisien dan ramah lingkungan.

Keberhasilan pencapaian tujuan ini dijabarkan dalam target indikator setiap tahunnya selama periode jangka menengah, yang terangkum dalam tabel di bawah.

Tabel 3.10
Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 2 Misi 3

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas					
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	34,15	73,75	82,06
Meningkatnya layanan infrastruktur jalan dan jembatan					
1	Indeks Kepuasan layanan infrastruktur jalan dan jembatan	indeks	N/A	76,61	81,61
Meningkatnya layanan infrastruktur Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air					
1	Indeks Kepuasan layanan infrastruktur Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air	indeks	N/A	79,25	84,00
Meningkatnya layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman					

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
1	Indeks Kepuasan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	indeks	N/A	76,61	81,61
Meningkatnya Konektivitas Simpul Transportasi					
1	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,600	0,614	0,665
Meningkatnya Infrastruktur Ketenagalistrikan					
1	Konsumsi Listrik Per kapita (KWh)*	Kwh/kapita	598,7	666,30	1120,50

Keterangan:
*) angka target belum menggunakan data proyeksi penjualan non PLN dan pemakaian sendiri

C. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Pencapaian Misi 4 diarahkan ini untuk menegaskan komitmen Pemerintah Sulawesi Tengah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan bersih yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, misi ini menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman, serta mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintahan, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berdampak luas bagi pembangunan daerah.

Aspek keamanan daerah yang tangguh juga menjadi fokus utama, di mana pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum dengan pendekatan yang humanis dan berbasis nilai-nilai religius serta kearifan lokal yang menjadi identitas budaya masyarakat Sulawesi Tengah. Pendekatan ini memperkuat kohesi sosial dan memperkaya proses pembangunan dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui misi ini, diharapkan Sulawesi Tengah dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif sekaligus menciptakan suasana aman dan harmonis yang

mendukung kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam upaya pencapaian misi 4 ini maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :



Gambar 3.14
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4

Berdasarkan gambar di atas, Misi 4 dicapai melalui 2 (dua) Tujuan dan Sasarannya masing-masing yaitu:

1. **Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bersih, inovatif dan kolaboratif**

   Sasaran:

   a. Meningkatnya kualitas demokrasi daerah dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan dan akuntabel di Sulawesi Tengah. Tujuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, di mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dijunjung tinggi serta hak-hak publik dilindungi secara penuh. Pemerintahan yang bersih menjadi aspek penting yang diupayakan dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menjadi fokus untuk memperkuat sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan sektor lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan inklusif. Pencapaian tujuan ini diukur melalui **Indeks Demokrasi Indonesia**, yang menilai kemajuan dalam melakukan pembaruan birokrasi menuju pemerimtah yang profesional, responsif dan bebas dari korupsi.

Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, bersih, dan kolaboratif, Sulawesi Tengah akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan sosial.

Gambaran kinerja penyelenggaraan Misi 4 ini tergambar pada diagram tujuan dan sasaran kinerja sebagai berikut :



Gambar 3.15
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 4

Sasaran strategis pertama pada tujuan 1 Misi 4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu "*Meningkatnya kualitas demokrasi daerah dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan*", dimana peningkatan yang diharapkan dapat menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan dan akuntabel serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, tidak hanya menekankan pada aspek prosedural pemilu dan partisipasi warga negara, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas kelembagaan demokrasi.

Sasaran strategis kedua pada tujuan 1 Misi 4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu "*Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas*", dimana Tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan pondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini menekankan pentingnya perbaikan sistem dan kinerja pemerintahan secara menyeluruh agar mampu memberikan pelayanan publik yang prima, merumuskan kebijakan berbasis data dan evidence, serta menjalankan fungsi pemerintahan secara efisien dan inovatif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui beragam indikator strategis yang mencerminkan berbagai dimensi kualitas tata kelola pemerintahan, yaitu:

- Indeks Pelayanan Publik, sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal kecepatan, transparansi, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna layanan.
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mengukur tingkat kematangan implementasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini mencerminkan integrasi sistem informasi, efisiensi proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung layanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel..
- Indeks Inovasi Daerah, yang menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik.
- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah, mencerminkan keterpaduan dan kualitas proses perencanaan pembangunan yang berbasis data dan berorientasi hasil.
- Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas/ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-SPIP), yang mengukur efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan terkendali.
- Indeks Reformasi Hukum, yang menunjukkan kemajuan dalam membangun sistem hukum yang adil, efektif, dan berpihak pada masyarakat.

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi tolok ukur perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.
- Indeks Profesionalitas ASN, merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pegawai ASN memenuhi standar profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik.
- Tingkat Digitalisasi Arsip, sebagai indikator transformasi tata kelola kearsipan yang modern dan efisien dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
- Indeks Inovasi Daerah, sebagai indikator yang mengukur tingkat inovasi untk memacu pemerintah daerah agar lebih kreatif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.
- Indeks Inklusi Keuangan, sebagai indikator kemampuan masyarakat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal, yang juga mencerminkan keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang inklusif.
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berbagai indikator ini saling mendukung dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berintegritas. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang ditempuh mencakup penguatan digitalisasi layanan publik, perbaikan manajemen kinerja, reformasi kelembagaan, pengembangan SDM aparatur, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tercapainya sasaran ini, Sulawesi Tengah akan mampu menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya melayani, tetapi juga

mampu berinovasi, menjaga kepercayaan publik, serta menjamin efektivitas pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis ini disajikan pada tabel berlikut.

Tabel 3.11
Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 1 Misi 4

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,44 (BB)	80,44	105,44
Meningkatnya kualitas demokrasi daerah dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan					
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	79,13 (2023)	80 - 81	82,55 – 85,90
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas					
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,34	3,48	3,62
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,90	70	71,88
3	Indeks kualitas kebijakan	indeks	48 (2023)	55,0	67,0
4	Nilai Sakip	Nilai	74,48	77,39	87,96
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,91	3,15-3,35	2,20
6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	Indeks	92,63	93,00	97,00
7	Indeks Integritas nasional (Survey Penilaian Integritas (SPIP))	Indeks	67,89	68 – 70,58	74,83 – 87,9
8	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,88	78,0	85,2
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	71,71	72,00	77,00
10	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,22	75-80	78-84
11	Inklusi Keuangan	%	N/a	85,05	88,94
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	77,59	77,85	82,00

Catatan : Instrumen evaluasi indikator indeks SPBE akan mengalami perubahan menjadi indeks Pemerintah Digital (surat Kemenpan RB Nomor B/66/PD.02/2025, tanggal 21 April 2025) sehingga target disesuaikan dengan target RPJMN 2025-2029.

2. **Tujuan 2 Mewujudkan masyarakat yang toleran, harmonis serta berkarakter budaya maju**

Sasaran:

a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
b. Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan dan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

Tujuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk membangun kehidupan sosial masyarakat yang toleran, harmonis serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kebudayaan lokal sebagai bagian penting dari pembangunan manusia seutuhnya dengan tetap memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum. Kualitas kehidupan yang bermaslahat mencerminkan kehidupan yang membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik secara spiritual, sosial, maupun budaya.

Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator utama, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama, yang mencerminkan tingkat toleransi, saling pengertian, dan kerja sama antar kelompok keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks ini menjadi tolok ukur penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman agama yang ada di Sulawesi Tengah.

Kerangka pikir logis dari tujuan dan sasaran straegis pada Misi 4 ini tergambar sebagai berikut:



Gambar 3.16
Logframe Tujuan 2 dan Sasaran pada Misi 4

Sasaran strategis pertama pada tujuan 2 Misi 4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu "*Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum*", dimana ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat utama bagi terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sasaran ini bertujuan menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan berpartisipasi dalam pembangunan tanpa gangguan dari potensi konflik, kriminalitas, atau pelanggaran hukum. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang mencerminkan persepsi dan kondisi objektif terkait rasa aman, kepatuhan terhadap aturan, serta kecepatan dan efektivitas penanganan gangguan keamanan dan ketertiban oleh aparat dan instansi terkait. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik pula kualitas kehidupan masyarakat dalam aspek sosial dan keamanan.

Upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, meliputi:

- Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan ketertiban, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana;
- Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan swakarsa, forum komunikasi masyarakat, dan revitalisasi nilai-nilai sosial budaya yang menjunjung perdamaian;
- Peningkatan koordinasi antar lembaga dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, pelaporan, dan penindakan pelanggaran ketertiban umum.

Dengan meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, diharapkan tercipta iklim sosial yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial secara umum, serta memperkuat stabilitas daerah sebagai fondasi bagi kemajuan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Sasaran strategis kedua pada tujuan 2 Misi 4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu "*Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan dan ketahanan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal*", dimana upaya strategis Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk menjadikan kebudayaan sebagai pilar utama dalam membentuk identitas daerah, memperkuat ketahanan

sosial, serta mendorong inovasi dan daya saing masyarakat. Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai kekuatan hidup yang mampu menjadi penggerak pembangunan manusia dan daerah secara berkelanjutan.

Sasaran ini diarahkan untuk mengembangkan kebudayaan yang inklusif, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, dengan mengedepankan pelestarian nilai-nilai lokal, pemberdayaan pelaku budaya, serta integrasi kebudayaan dalam berbagai sektor pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dengan terwujudnya pembangunan kebudayaan yang maju, Sulawesi Tengah akan mampu memperkuat identitas daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membangun fondasi sosial dan spiritual yang kokoh untuk mendukung pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan. Melalui sasaran ini, pemerintah daerah mendorong penguatan kebijakan kebudayaan yang berbasis data, mendorong keterlibatan aktif komunitas budaya, mendukung pendidikan karakter berbasis budaya lokal, serta menciptakan ekosistem kebudayaan yang kondusif bagi pelestarian dan inovasi.

Upaya pencapaian tujuan 2 dan 2 (dua) sasaran strategis pada Misi 4 ini ditampilkan target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 2 Misi 4

Tujuan/Sasaran /Indikator		Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2030
Mewujudkan masyrakat yang toleran, harmonis serta berkarakter budaya maju					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,47 (2023)	79,23-79,24	81,09
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum					
1	Indeks Ketentraman dan ketertiban umum	Indeks	50,57	50,99	53,26
Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan dan ketahanan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51,42 (2023)	52,52-52,59	55,02

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama

Periode 2025–2029, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.13 sebagaimana terlampir.

Tabel 3.13
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029

Visi : Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029												
No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	sp		Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	
			MENINGKATNYA KUALITAS DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	**Usia Harapan Hidup (UHH)**	Tahun	71,64	71,96	72,27	72,59	72,96	73,22	
				Kesehatan Ibu dan Anak : Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	176	161	146	131	116	101	
				Kesehatan Ibu dan Anak : Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%	24,9	22,5	21,2	19,8	18,50	17.9	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	**Hasil Pembelajaran** Harapan lama sekolah (Tahun)	Tahun	13,45 - 13,46	13,53	13,59	13,66	13,70 - 13,72	13,79	
				Hasil Pembelajaran Rata-rata lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (Tahun)	Tahun	9,39	9,47	9,59	9,80	9,87-9,88	9,90-10,00	
				Hasil Pembelajaran Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
				- Literasi membaca	%	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	
				- Numerasi	%	7,69	7,69	7,69	7,69	15,38	15,38	
				Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional Untuk:								
				- Literasi membaca	%	27,65 - 30,15	29,00 - 30,25	30,35 - 31,50	31,70 - 32,9	33,05 - 35,55	34,40 -35,75	
				- Numerasi	%	21,21 - 23,71	22,21 - 23,95	23,21 - 24,1	24,21 - 25,15	25,21 - 27,71	26,10 - 27,95	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KESETARAAN GENDER	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,86	62,52	63,18	63,84	64,5	65,16	
				Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,03	93,43	93,83	94,23	94,63	95,00	
		MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA (2)		Tingkat Kemiskinan	%	9,90 - 10,80	9,80 - 10,70	9,50 - 10,45	9,00 - 10,00	6,20 - 7,20	6,10-7,10	
			MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF	Indeks Kesejahteraan sosial	Indeks	50	53	56	58	61	62	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,25 - 2,94	2,22 - 2,75	2,18 - 2,74	2,15 - 2,73	2,09 - 2,72	2,05 - 2,71	
			MENINGKATNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	96,90	97,15	97,30	97,45	98,00	98,55	

Visi : Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029												
No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIFITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH		Pertumbuhan Ekonomi	%	12,72 - 13,28	10,3 - 12,1	11,0 - 11,5	11,55 - 12,75	12,95 - 14,20	12,99 - 14,30	
			MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DAERAH	Nilai Investasi	Rp Juta	139.900.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000	
			MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	40.97 – 41.45	41,50 - 42,48	42,5 - 43,99	43,50 - 45,49	47,00 - 50,99	48,51 - 51,10	
				PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	16,00	16,07	16,14	16,21	16,28	16,35	
				PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Milyar Rupiah	62.373,9999	70.482,62	79.645,36	89.999,26	101.699,16	114.920,05	
				Pengembangan Pariwisata : Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,32 – 0,45	0,37	0,415	0,46	0,51 - 0,64	0,56	
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB	%	3,76	3,850	3,93	4,02	4,10	4,19	
			MENINGKATNYA PERAN KOPERASI DAN UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	%	0,65	0,79	0,92	1,06	1,19	1,33	
			MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	38,79	39,21	39,57	39,85	40,04	40,23	
			MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI SEKTORAL	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,43	3,53	3,63	3,72	3,82	3,92	
				Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	%	49,15	50,5	51,85	53,2	54,55	55,9	
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	66,16	67,33	68,42	69,37	70,22	71,17	
3	Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETANGGUHAN DAERAH TERHADAP BENCANA (1)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	81,75	81,96	82,18	82,39	82,6	82,81	
			MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH	Indeks Pengelolaan Keanegaragaman Hayati Daerah	indeks	0,600	0,606	0,611	0,617	0,622	0,628	
			MENURUNNYA INTENSITAS EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISION	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	(%)	77,96	80,58	83,2	85,26	85,77	87,49	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMANFAATAN RUANG	Persentase Ketaatan RTRW	persen	32	37,00	51,00	64,00	99,00	100,00	
				Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	indeks	180,59	178,92	177,24	175,57	174,88	172,21	
			MENINGKATNYA KETANGGUHAN DAERAH TERHADAP BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS (2)		Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	73,75	75,43	77,04	78,69	80,41	82,06	

Visi : Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029												
No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Indeks	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
			MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN SUMBER DAYA AIR	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air	Indeks	79,25	80,00	81,25	82,00	83,25	84,00	
			MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
			MENINGKATNYA KONEKTIVITAS SIMPUL TRANSPORTASI	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,614	0,624	0,635	0,645	0,655	0,665	
			MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	Konsumsi Listrik Perkapita	Kwh	666,30	694,53	799,88	919,79	1.094,68	1.120,50	
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, BERSIH, INOVATIF DAN KOLABORATIF (1)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,44	85,44	90,44	95,44	100,44	105,44	
			MENINGKATNYA KUALITAS DEMOKRASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	80 - 81	80,50 - 81,31	80,90 - 81,62	81,00 - 81,93	82,24 - 85,49	82,55 - 85,90	
			TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,48	3,51	3,54	3,56	3,59	3,62	
				Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	70,38	70,75	71,13	71,5	71,88	
				Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	55	58	60	62	65	67	
				Nilai Sakip	Nilai	77,39	79,34	81,39	83,49	85,64	87,96	
				Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintah Digital)	Indeks	3,15-3,35	1,20	1,50	1,70	2,00	2,20	
				Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	Indeks	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	
				Indeks Integritas Nasional (Survey Penilaian Integritas/SPIP)	Indeks	68 - 70,58	61,37 - 71,0	62,73 - 72,5	64,1 - 73,4	73,46 - 87,5	74,83 - 87,9	
				Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,00	78,70	80,00	81,80	83,50	85,20	
				Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	

Visi : Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029												
No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Indeks Inovasi Daerah	Indeks	75-80	75,5 - 80,5	76,0 - 81,5	76,5 - 82,5	77 - 83	78-84	
				Inklusi keuangan	%	85,05	85,86	86,67	87,48	88,29	89,1	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	77,85	78	78,02	78,05	78,09	82,00	
		MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TOLERAN, HARMONIS SERTA BERKARAKTER BUDAYA MAJU (2)		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	79,23-79,24	79,6	79,98	80,35	80,72-80,82	81,09	
			MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	50,99	51,25	51,95	52,26	52,98	53,26	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKATYANG BERAKAR PADA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52,52 - 52,59	53,02	53,52	54,02	54,52-54,72	55,02	

Sumber : BPS, Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenkominfo, Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029, data diolah.
Catatan : Instrumen evaluasi indikator indeks SPBE akan mengalami perubahan menjadi indeks Pemerintah Digital (surat Kemenpan RB Nomor B/66/PD.02/2025, tanggal 21 April 2025) sehingga target disesuaikan dengan target RPJMN 2025-2029

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Asta Cita merupakan delapan cita-cita pembangunan nasional yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Asta Cita mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor untuk mencapai Visi Indonesia 2045 melalui delapan prioritas pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD. Setiap daerah wajib mengadaptasi Asta Cita ke dalam misi RPJMD agar pembangunan daerah selaras dengan visi pembangunan nasional. Misi RPJMD sendiri merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan langkah-langkah utama pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, Asta Cita menjadi acuan utama dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan di tingkat daerah.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025 – 2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan. Strategi prioritas pembangunan nasional dalam pencapaian sasaran pembangunan terdiri dari 3 strategi utama pembangunan nasional (Trisula RPJMN 2025-2029) yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang kemudian dijabarkan melalui *strategi tematik-sektoral* yang merupakan turunan operasional dari tiga strategi utama sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional

<table>
<tr>
<td>Strategi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan
1. Produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
2. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya, ekspor, dan berkelanjutan;
3. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau;
5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Transformasi digital;
7. Investasi (FDI ekspor dan non-APBN);
8. Belanja negara untuk peningkatan produktivitas; dan
9. Deregulasi kebijakan fiskal dan moneter termasuk stabilitas harga dan nilai tukar.</td>
<td>Strategi Penurunan Kemiskinan
1. Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk targeting program-program pemerintah baik di pusat dan daerah;
2. Menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan inklusif;
3. Kartu Kesejahteraan sebagai integrator bansos dan subsidi;
4. Penguatan wirausaha dan penciptaan lapangan kerja (Kartu Usaha); dan
5. Penguatan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.</td>
</tr>
<tr>
<td>Strategi Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM)
1. Pencegahan stunting terutama pada 1000 HPK;
2. Pencegahan dan deteksi dini penyakit serta pembudayaan hidup sehat;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan akses layanan pendidikan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan; dan
6. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.</td>
<td>Strategi Pencapaian Sasaran TPT
1. Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya dan produktif;
2. Pengembangan lapangan kerja hijau dan berbasis teknologi;
3. Pengembangan peluang kewirausahaan;
4. Perluasan kesempatan tenaga kerja Indonesia berketerampilan menengah-tinggi di pasar kerja global;
5. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara konsisten;
6. Reskilling dan upskilling untuk memenuhi dinamika
7. pekerjaan baru (teknologi, pekerjaan hijau);
8. Pemagangan dan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
9. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), termasuk data ketenagakerjaan, yang kredibel;
10. Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, inklusif dan memfasilitasi dinamika perubahan pola bekerja; dan
11. Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif bagi pekerja, termasuk bagi pekerja migran Indonesia.</td>
</tr>
<tr>
<td>Strategi Penurunan Ketimpangan
1. Pengunaan DTSEN untuk penargetan bantuan dan jaminan sosial;
2. Penyaluran bantuan sosial dan sembako untuk menjaga daya beli masyarakat tidak mampu;
3. Mempermudah akses aset, lahan, modal, dan mendorong inklusi keuangan lewat pendampingan dan pelatihan;
4. Memperluas pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja di sektor jasa, manufaktur, dan digital yang sesuai dengan kebutuhan kawasan industri dan potensi lokal; dan
5. Peningkatan tax ratio dan pengurangan relaksasi pajak untuk redistribusi kekayaan.</td>
<td>Strategi Pembangunan Rendah Karbon
1. Penurunan emisi GRK dari sektor energi;
2. Penurunan emisi GRK sektor berbasis lahan;
3. Peningkatan cadangan karbon di di ekosistem karbon biru;
4. Peningkatan upaya dekarbonisasi industri;
5. Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah; dan
6. Penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta nilai ekonomi karbon</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
1. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai/danau;
2. Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota;
3. Peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut;
4. Peningkatan kualitas lahan;
5. Peningkatan kualitas ekosistem gambut;
6. Pengelolaan B3, limbah B3, dan limbah radioaktif;
7. Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan
8. Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang; dan
9. Penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan</td>
</tr>
</table>

Sumber: Buku Saku Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan daerah menempati posisi strategis sebagai penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dengan strategi serta program kerja daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskannya dengan strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang dituangkan melalui Trisula pembangunan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam strategi tematik-sektoral yang saling terkait dan komplementer. Keseluruhan strategi tematik-sektoral ini akan dirumuskan lebih lanjut ke dalam strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dalam bentuk pentahapan pembangunan, dengan menyesuaikan pada potensi wilayah, permasalahan mendasar, serta prioritas pembangunan daerah sehingga mampu mempercepat pencapaian target nasional sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara inklusif dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Pentahapan Pembangunan Misi 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Tujuan: Mewujudkan kualitas masyarakat Sulawesi Tengah yang berdaya saing				
Sasaran: Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat				
Pemetaan wilayah prioritas AKI dan stunting; penguatan posyandu; distribusi suplemen gizi	Pelatihan tenaga kesehatan desa; peningkatan layanan PONED dan cakupan PMT	Pelayanan kesehatan ibu dan anak terpadu berbasis keluarga	Perluasan cakupan layanan dan kunjungan rumah	Integrasi layanan kesehatan ibu-anak dalam sistem layanan dasar desa
Penyusunan pedoman skrining PTM dan edukasi gaya hidup sehat	Skrining PTM dasar di posyandu, sekolah, dan tempat kerja	Penguatan deteksi dini dan layanan penanganan PTM di Puskesmas	Penyediaan alat diagnostik dan pengembangan sistem rujukan PTM	Integrasi pengendalian PTM ke dalam layanan primer dan pendidikan masyarakat
Pemetaan tenaga kesehatan dan sarana TIK layanan kesehatan	Pelatihan tenaga medis dan penguatan sistem informasi kesehatan	Implementasi layanan kesehatan digital (telemedis) di daerah minim SDM	Penguatan sistem rujukan digital dan SIMPUS desa	Replikasi sistem layanan digital ke seluruh kabupaten/kota
Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana fasilitas kesehatan, dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan
Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan				
Pemberian beasiswa afirmatif dan berprestasi; pemberian bantuan biaya pendidikan; pemetaan sekolah minus layanan	Pemberian beasiswa afirmatif dan berprestasi; pemberian bantuan biaya pendidikan; pemetaan sekolah minus layanan	Pemberian beasiswa afirmatif dan berprestasi; pemberian bantuan biaya pendidikan; pemetaan sekolah minus layanan	Pemberian beasiswa afirmatif dan berprestasi; pemberian bantuan biaya pendidikan; pemetaan sekolah minus layanan	Pemberian beasiswa afirmatif dan berprestasi; pemberian bantuan biaya pendidikan; pemetaan sekolah minus layanan
- Pemanfaatan media ajar digital; penguatan literasi numerasi siswa - Pemerataan kualitas dan akses pendidikan inklusif di seluruh wilayah - Pengembangan sekolah unggulan berbasis komunitas	- Pemanfaatan media ajar digital; penguatan literasi numerasi siswa - Pemerataan kualitas dan akses pendidikan inklusif di seluruh wilayah - Pengembangan sekolah unggulan berbasis komunitas	- Pemanfaatan media ajar digital; penguatan literasi numerasi siswa - Pemerataan kualitas dan akses pendidikan inklusif di seluruh wilayah - Pengembangan sekolah unggulan berbasis komunitas	- Pemanfaatan media ajar digital; penguatan literasi numerasi siswa - Pemerataan kualitas dan akses pendidikan inklusif di seluruh wilayah - Pengembangan sekolah unggulan berbasis komunitas	- Pemanfaatan media ajar digital; penguatan literasi numerasi siswa - Pemerataan kualitas dan akses pendidikan inklusif di seluruh wilayah - Pengembangan sekolah unggulan berbasis komunitas

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Pelatihan guru dalam pembelajaran literasi-numerasi kontekstual	Pengembangan dan distribusi modul serta pelaksanaan kelas intensif	Evaluasi literasi dan numerasi di sekolah dengan AKM rendah	Integrasi asesmen diagnostik kelas dan mentoring guru literasi-numerasi	Penguatan budaya baca dan numerasi berbasis rumah tangga dan komunitas
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
• Pemutakhiran data penduduk usia pendidikan • Pemetaan Anak Tidak Sekolah (ATS) (belum pernah sekolah, putus sekolah, tidak melanjutkan). • Penyusunan peta jalan Wajib Belajar 13 Tahun. • Pelatihan dasar guru & sertifikasi awal, pengenalan literasi digital.	• Implementasi awal program wajib belajar 13 tahun, perluasan akses layanan menengah. • Penjangkauan ATS melalui kolaborasi sekolah, desa, dan masyarakat. • Peningkatan kompetensi guru: pedagogik adaptif dan integrasi kurikulum merdeka. • Revitalisasi SMK pada sektor prioritas daerah.	• Sertifikasi guru lanjutan dan peningkatan keterampilan penggunaan teknologi pembelajaran digital. • Penguatan *link and match* SMK–DUDI, termasuk magang siswa dan guru. • Pengembangan pendidikan inklusif dengan sarana prasarana ramah disabilitas di seluruh kabupaten/kota	• Penguatan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun melalui pemenuhan guru, fasilitas sekolah menengah, dan perluasan layanan di daerah terpencil. • .*Reskilling* & *upskilling* guru SMK berbasis kebutuhan industri, dengan program magang industri berskala lebih luas. • Penerapan standar kompetensi minimal guru (sertifikasi + keterampilan digital) sebagai syarat dalam penilaian kinerja.	• Penyelesaian sertifikasi guru bagi seluruh tenaga pendidik yang belum tersertifikasi. • Pelatihan intensif digital teaching skills (LMS, aplikasi pembelajaran berbasis AI, blended learning). • Program penguasaan teknologi adaptif untuk guru SMK & sekolah inklusif (laboratorium modern, TIK difabel). • Integrasi penuh SMK dengan ekosistem industri daerah melalui kurikulum berbasis kompetensi dan jejaring kerja sama industri.
Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan pembangunan gender				
Penyusunan peta masalah dan rencana aksi berbasis dimensi iBangga; penguatan kader penyuluh keluarga di desa/kelurahan	Pelaksanaan program pendampingan keluarga rentan (ekonomi, kesehatan, pendidikan) di kabupaten/kota dengan capaian iBangga terendah; pelatihan kader keluarga untuk peningkatan	Pengembangan pusat layanan keluarga terpadu di tingkat kabupaten/kota yang menyediakan konseling, pelatihan keterampilan ekonomi, dan edukasi kesehatan reproduksi	Integrasi program pemberdayaan ekonomi keluarga (UMKM, akses permodalan) dengan program peningkatan kesehatan ibu-anak dan gizi keluarga; penguatan kampung KB berbasis pemberdayaan lokal	Pelembagaan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan keluarga berbasis data terpadu (Satu Data Keluarga) untuk menjaga peningkatan iBangga secara

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	komunikasi efektif dan pengasuhan positif			berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota
Penyusunan data terpilah gender dan pelatihan perencanaan responsif gender di Perangkat Daerah	Penguatan kelembagaan responsif gender: PUG, pokja gender dan forum perempuan daerah	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran desa	Pelatihan dan penguatan ekonomi perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan	Penguatan kelembagaan PUG di tingkat desa/kelurahan melalui pembentukan jejaring dan penganggaran berbasis gender
Implementasi pendidikan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan melalui sekolah dan media publik	Pembentukan dan pendampingan Forum Anak dan Forum Gender di tingkat desa	Pelatihan aparat dan guru dalam penanganan kasus kekerasan dan responsif gender	Penyediaan layanan rehabilitasi, hukum, dan psikososial untuk perempuan dan anak	Implementasi penuh Provinsi Layak Anak dan kabupaten/kota responsif gender
Penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah responsif gender dan ramah anak	Pengoperasian rumah aman dan pusat layanan terpadu perempuan dan anak	Integrasi layanan perlindungan ke dalam sistem layanan desa dan sekolah	Pengembangan sistem pelaporan dan penanganan berbasis aplikasi	Penguatan nilainilai nonkekerasan melalui materi pembelajaran dan komunitas lokal
Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja				
Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang Inklusif				
Pelaksanaan pemetaan rumah tangga miskin dan rentan berbasis *by name by address*	Pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis sistem digital	Pelaksanaan integrasi program bantuan sosial berdasarkan kondisi riil masyarakat	Pembentukan jejaring komunitas lokal sebagai pelaksana layanan sosial dasar	Replikasi sistem perlindungan sosial berbasis komunitas di seluruh kabupaten/kota
Pelaksanaan program padat karya produktif untuk usia kerja	Pengembangan sistem pelaporan dan monitoring digital berbasis wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi program kesejahteraan sosial	Pembentukan kemitraan antara pemerintah dan lembaga sosial lokal	Penguatan peran pemerintah desa dalam perlindungan kelompok rentan

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Pemetaan dan identifikasi kelompok rentan (disabilitas, lansia, anak terlantar, korban kekerasan, dll.) Pelibatan dunia usaha (CSR) dalam program sosial berbasis wilayah	Pengembangan layanan perlindungan sosial berbasis komunitas	Penyediaan layanan mobil sosial desa/kelurahan untuk akses kelompok rentan	Penguatan mekanisme rujukan sosial berbasis desa	Implementasi sistem insentif untuk kader sosial dan fasilitator lapangan di desa
Sasaran: Meningkatnya partisipasi angkatan kerja				
Pelaksanaan pemetaan sektor unggulan padat karya dan kebutuhan tenaga kerja	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelaksanaan pelatihan vokasi	Penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri dan teknologi	Pembentukan program kemitraan kerja bersama DUDI dan startup	Pengembangan layanan penempatan kerja berbasis digital dan mobile
Pelaksanaan program padat karya produktif untuk usia kerja	Pelaksanaan program magang dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan muda	Peningkatan akses tenaga kerja terampil melalui kerja sama luar negeri (G to G)	Implementasi program inkubasi wirausaha baru berbasis lokal	Ekspansi program mobilitas tenaga kerja antar wilayah berbasis kualifikasi

Sumber: Analisis Tim Penyusun , 2025

Tabel 3.16
Pentahapan Pembangunan Misi 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas sektor unggulan daerah				
Sasaran: Meningkatnya nilai investasi daerah				
Pemetaan potensi investasi daerah dan kawasan strategis	Pengembangan profil investasi daerah digital	Penyelenggaraan forum investasi regional dan promosi peluang investasi strategis	Kemitraan aktif antara pemda dengan investor dan diaspora daerah	Replikasi platform digital promosi investasi ke seluruh kabupaten/kota
Penyusunan regulasi insentif investasi daerah berbasis potensi unggulan	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan investasi	Penataan kelembagaan perizinan dan kemudahan berusaha (OSS daerah)	Digitalisasi proses perizinan terpadu untuk investor	Evaluasi dan penguatan sistem iklim investasi daerah berbasis performa kabupaten/kota
Sasaran: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah				
Pemetaan rantai pasok sektor unggulan (pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata)	Pelatihan hilirisasi produk unggulan dan pendampingan kelompok tani/nelayan	Pembangunan infrastruktur produksi dan pascapanen sektor unggulan	Penguatan ekosistem sektor kreatif, wisata, dan pengolahan lokal berbasis digital	Penguatan sistem dukungan pertumbuhan sektor unggulan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota
Persiapan dan Pelaksanaan Penguatan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Pengembangan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Peningkatan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Penguatan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Pemantapan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif
Revitalisasi BUMDes dan koperasi sektor produksi	Penguatan model klaster komoditas unggulan wilayah	Peningkatan akses pasar nasional dan ekspor	Penguatan branding dan pemasaran produk unggulan berbasis wilayah	Penguatan peran daerah dalam pengembangan sektor unggulan melalui koordinasi lintas sektor dan wilayah

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Sasaran: Meningkatnya peran koperasi dan UMKM				
Persiapan dan Pelaksanaan Penguatan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Pengembangan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Peningkatan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Penguatan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Pemantapan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata
Pendataan dan klasifikasi koperasi aktif dan potensial	Pelatihan manajemen usaha dan digitalisasi koperasi	Penguatan jejaring antar koperasi dan akses permodalan	Pemberdayaan koperasi sektor riil untuk hilirisasi dan distribusi komoditas lokal	Replikasi koperasi sektor produktif unggulan di seluruh kabupaten/kota
Penyusunan roadmap pengembangan koperasi berbasis potensi daerah	Dukungan fasilitas sarana usaha koperasi	Penguatan regulasi daerah tentang koperasi berbasis ekonomi kerakyatan	Penguatan kontribusi koperasi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi lokal	Penguatan sistem tata kelola koperasi melalui pelaporan berbasis teknologi informasi daerah
Meningkatnya pendapatan daerah				
Pemetaan potensi sumber PAD baru dan optimalisasi basis data wajib pajak dan retribusi melalui digitalisasi layanan perpajakan daerah	Modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis elektronik (e-tax, e-retribusi) dan integrasi pembayaran dengan kanal digital nasional	Peningkatan kinerja BUMD melalui penajaman model bisnis, kemitraan swasta, dan diversifikasi produk/jasa unggulan daerah	Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset daerah melalui KPBU dan penyewaan aset daerah yang belum termanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan daerah	Integrasi sistem pengelolaan pendapatan daerah lintas sektor dengan analitik keuangan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal berkelanjutan
Sasaran: Meningkatnya daya saing daerah dan produktivitas ekonomi sektoral				
Pemutakhiran baseline daya saing daerah dan produktivitas sektoral	Penyelarasan program pelatihan dan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi lokal	Digitalisasi ekosistem ekonomi lokal dan kemudahan usaha bagi sektor strategis	Penguatan industri hijau dan ekonomi biru berbasis potensi wilayah pesisir dan pertanian	Penguatan pengukuran kinerja dan insentif daerah berbasis indeks daya saing dan ekonomi hijau/biru
Pemetaan potensi pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dan biru (*blue economy*)	Pendampingan dan insentif bagi pelaku ekonomi sirkular dan industri hijau	Pengembangan kawasan ekonomi hijau dan economi biru model percontohan	Penyusunan regulasi daerah mendukung transisi ekonomi berkelanjutan	Replikasi model pembangunan berkelanjutan ke seluruh wilayah berbasis indeks dan hasil evaluasi

Sumber: Analisis Tim Penyusun , 2025

Tabel 3.17
Pentahapan Pembangunan Misi 3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana				
Sasaran: Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati daerah				
Pemetaan potensi keanekaragaman hayati dan kawasan lindung	Penyusunan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan spesies lokal	Penguatan peran masyarakat dalam konservasi berbasis kearifan lokal	Peningkatan kawasan perlindungan melalui kolaborasi lintas sektor	Penerapan sistem konservasi terintegrasi dengan perencanaan wilayah
Penataan akses masyarakat terhadap sumber daya hayati	Pembentukan bank plasma nutfah daerah	Pengembangan pusat edukasi keanekaragaman hayati di sekolah dan komunitas	Penguatan regulasi perlindungan flora dan fauna endemik	Pengembangan jejaring konservasi dengan mitra nasional dan internasional
Penyusunan Desain vegetasi dan desain infrastruktur taman kehati	Pembangunan taman kehati	Peningkatan taman kehati	Pengembangan taman kehati	Pengembangan taman kehati
Sasaran: Menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission				
Penetapan target penurunan emisi berdasarkan sektor utama	Pemanfaatan energi surya dan biogas di kawasan perdesaan	Penerapan teknologi efisiensi energi di kawasan industri	Pengembangan insentif daerah untuk aktivitas rendah karbon	Replikasi model transisi energi bersih ke daerah terpencil
Pengembangan program penanaman pohon masif di wilayah terdegradasi	Penggunaan kendaraan listrik untuk layanan publik secara bertahap	Konversi pemanas dan kompor rumah tangga ke energi ramah lingkungan	Penerapan teknologi rendah karbon dalam pembangunan infrastruktur	Integrasi sistem inventarisasi emisi dalam perencanaan pembangunan daerah
Sasaran: Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang				
Penataan kawasan strategis berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Penguatan pengawasan pemanfaatan ruang melalui sistem digital	Penyesuaian rencana detail tata ruang (RDTR) di wilayah pertumbuhan baru	Pengembangan kemitraan pemerintah-swasta dalam pemanfaatan ruang berkelanjutan	Replikasi sistem pemanfaatan ruang berbasis digital ke seluruh kabupaten/kota
Sinkronisasi program sektoral dengan zonasi dan ketentuan pemanfaatan ruang	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Integrasi perizinan ruang ke sistem layanan OSS dan TIK	Penguatan sinergi antar sektor dalam penggunaan ruang lintas fungsi	Pemutakhiran data spasial RTRW secara berkala dalam pengambilan keputusan pembangunan

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Mendukung percepatan penyusunan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota	Mendukung percepatan penyusunan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota	Mendukung percepatan penyusunan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota	Mendukung percepatan penyusunan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota	Mendukung percepatan penyusunan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota
Sasaran: Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana				
Pengembangan desa tangguh bencana dan pelatihan mitigasi masyarakat	Pengembangan gudang logistik darurat di wilayah strategis	Penerapan sistem peringatan dini multihazard antarwilayah Penyesuaian desain infrastruktur publik tahan bencana	Penguatan kolaborasi antar OPD dan lembaga kebencanaan nasional dalam respons bencana	Integrasi ketangguhan daerah dalam rencana pembangunan daerah berbasis risiko
Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
Penguatan sistim kelembagaan penanggulangan bencana	Penguatan sistim kelembagaan penanggulangan bencana	Penguatan sistim kelembagaan penanggulangan bencana	Penguatan sistim kelembagaan penanggulangan bencana	Penguatan sistim kelembagaan penanggulangan bencana
Pengurangan resiko bencana berbasis tata ruang dan lingkungan	Pengurangan resiko bencana berbasis tata ruang dan lingkungan	Pengurangan resiko bencana berbasis tata ruang dan lingkungan	Pengurangan resiko bencana berbasis tata ruang dan lingkungan	Pengurangan resiko bencana berbasis tata ruang dan lingkungan
Perlindungan masyarakat dan penanganan darurat bencana	Perlindungan masyarakat dan penanganan darurat bencana	Perlindungan masyarakat dan penanganan darurat bencana	Perlindungan masyarakat dan penanganan darurat bencana	Perlindungan masyarakat dan penanganan darurat bencana
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas				
Sasaran: Meningkatnya layanan infrastruktur jalan dan jembatan				
Penentuan prioritas penanganan jalan berdasarkan hasil pemetaan sebelumnya	Perbaikan jalan provinsi pada koridor logistik dan jalur distribusi produksi	Pelebaran dan penguatan badan jalan di kawasan industri dan pertanian	Peningkatan akses jalan antar pusat pertumbuhan ekonomi baru	Replikasi dan pemeliharaan rutin jalan provinsi secara sistematik
Integrasi data kerusakan jalan dengan sistem penganggaran pembangunan	Penggunaan bahan konstruksi ramah lingkungan untuk peningkatan jalan	Pembangunan jembatan dan drainase pendukung aksesibilitas	Pengembangan jaringan jalan di wilayah hinterland dan perbatasan	Optimalisasi sistem manajemen aset jalan provinsi berbasis digital

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
Sasaran : Meningkatnya layanan infrastruktur keciptakaryaan dan SDA				
Penyusunan atau pembaruan dokumen perencanaan teknis: Rispam, SSK, RTBL	Pelaksanaan proyek kewenangan provinsi (SPAM IKK, TPA, Sanitasi)	Pelaksanaan proyek kewenangan provinsi (SPAM IKK, TPA, Sanitasi)	Peningkatan dan Pengembangan air minum aman	Peningkatan dan Pengembangan air minum aman
Inventarisasi kawasan prioritas penanganan (kumuh, krisi air, rawan banjir)	Penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan	Peningkatan dan Pengembangan akses sanitasi aman dan infrastruktur persampahan serta penguatan kelembagaan	Peningkatan dan Pengembangan akses sanitasi aman dan infrastruktur persampahan serta penguatan kelembagaan
Mulai melaksanakan program Qick Wins (IPAL Komunal, TPS3R)	Peningkatan kapasitas tampungan embung desa dan bendungan kecil	Pemanfaatan teknologi irigasi tetes untuk efisiensi penggunaan air	Pengembangan sistem distribusi air baku multiguna	Integrasi sistem pengelolaan sumber daya air lintas sektor
Penyusunan kebijakan perlindungan daerah resapan dan mata air	Pembangunan sumur air tanah dangkal di wilayah defisit air	Peningkatan fasilitas pengendalian banjir di daerah rawan genangan	Optimalisasi pemanfaatan air irigasi untuk produksi pertanian	Penguatan kelembagaan pengelola air berbasis masyarakat
Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dan keciptakaryaan	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dan keciptakaryaan	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dan keciptakaryaan	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dan keciptakaryaan	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dan keciptakaryaan
Sasaran: Meningkatnya layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman				
Pemetaan ulang kawasan kumuh dan daerah dengan sanitasi terbatas	Pembangunan rumah layak huni berbasis komunitas	Penguatan kolaborasi pemerintah-swasta dalam penyediaan perumahan	Pembangunan sarana air bersih dan MCK di kawasan padat penduduk	Penerapan standar rumah sehat terintegrasi sanitasi di seluruh wilayah
Penyusunan kebijakan subsidi pembangunan rumah sederhana	Pembangunan jaringan sanitasi komunal di wilayah rawan sanitasi	Penyediaan sambungan rumah tangga untuk air minum layak	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan sanitasi	Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk sanitasi berkelanjutan

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana utilitas kawasan permukiman
Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Peningkatan luas penanganan kawasan kumuh	Peningkatan luas penanganan kawasan kumuh	Peningkatan luas penanganan kawasan kumuh	Peningkatan luas penanganan kawasan kumuh	Peningkatan luas penanganan kawasan kumuh
Sasaran: Meningkatnya kualitas simpul transportasi				
Penataan simpul transportasi berdasarkan rencana pengembangan sebelumnya	Peningkatan aksesibilitas simpul transportasi ke sentra ekonomi	Revitalisasi terminal dan pelabuhan pengumpul penumpang dan barang	Integrasi simpul transportasi dengan kawasan industri dan wisata	Replikasi pengembangan simpul transportasi terpadu di kabupaten/kota
Penyusunan standar teknis sarana dan prasarana simpul transportasi	Pembangunan fasilitas intermoda di kawasan padat transportasi	Penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan ramah lingkungan	Peningkatan kapasitas layanan dan teknologi informasi transportasi	Digitalisasi sistem informasi simpul transportasi provinsi
Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan
Sasaran: Meningkatnya infrastruktur ketegalistrikan				
Percepatan pembangunan jaringan listrik berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya	Pengembangan pembangkit energi mikrohidro dan surya	Penyediaan alat sambung listrik rumah tangga melalui program bantuan	Peningkatan kapasitas penyimpanan energi di kawasan terpencil	Replikasi dan penguatan layanan kelistrikan berbasis energi terbarukan
Pelatihan teknisi lokal untuk pemeliharaan jaringan listrik desa	Kerja sama dengan swasta untuk pengembangan mini grid	Peningkatan konsumsi listrik rumah tangga produktif	Penguatan regulasi penggunaan energi terbarukan rumah tangga	Pemanfaatan smart grid untuk optimalisasi konsumsi listrik per kapita

Sumber: Analisis Tim Penyusun , 2025

Tabel 3.18
Pentahapan Pembangunan Misi 4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif				
Sasaran: Meningkatnya kualitas demokrasi daerah dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan				
Pemetaan kondisi demokrasi daerah, termasuk kebebasan sipil, hak politik, dan kualitas lembaga demokrasi, serta pembentukan forum konsultasi publik di kabupaten/kota	Pelatihan aparatur dan fasilitator demokrasi desa/kelurahan, serta penguatan mekanisme konsultasi publik dalam perencanaan dan penganggaran daerah	Penerapan sistem aspirasi dan pengaduan publik berbasis digital yang terintegrasi dengan e-government untuk mendorong transparansi dan partisipasi warga	Peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi lokal dalam evaluasi kebijakan daerah serta penyelenggaraan forum musyawarah publik rutin	Pelembagaan partisipasi publik melalui regulasi daerah dan penguatan mekanisme demokrasi partisipatif berbasis data Indeks Demokrasi Indonesia
Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas				
Penguatan sistem informasi manajemen berbasis elektronik Penguatan kompetensi SDM aparatur daerah sesuai standar pelayanan minimum	Pengembangan standar kualitas pelayanan publik lintas sektor Penyesuaian alur kerja pelayanan dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat	Penguatan sistem integrasi data pembangunan antarsektor	Penerapan sistem manajemen kinerja terpadu berbasis data	Penguatan sistem layanan publik berbasis inklusi dan keuangan digital
Pemetaan dan integrasi pengaduan publik serta pemutakhiran standar pelayanan minimum	Penguatan kapasitas SDM frontliner dan penyusunan SOP pelayanan terpadu	Implementasi sistem layanan publik digital multi-kanal dan integrasi dengan SPBE	Peningkatan aksesibilitas layanan publik hingga ke desa berbasis perangkat mobile	Replikasi model pelayanan publik digital inklusif berbasis kebutuhan wilayah
Penyusunan roadmap reformasi hukum dan prioritas regulasi daerah	Pengembangan layanan konsultasi hukum berbasis digital	Penyederhanaan dan digitalisasi prosedur pelayanan peraturan perundang-undangan	Penyusunan sistem informasi pengelolaan produk hukum daerah terintegrasi (e-regulasi) yang terhubung dengan perencanaan dan penganggaran	Replikasi layanan advokasi hukum masyarakat dan pelembagaan kemitraan regulasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi/akademik
Penajaman cascading kinerja berbasis outcome serta penyelarasan RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah melalui	- Implementasi sistem manajemen kinerja elektronik (e-kinerja) yang terintegrasi dengan sistem	- Penerapan analisis kesenjangan kinerja (*performance gap analysis*)	- Penguatan pelaporan kinerja berbasis hasil (result-based reporting) dengan format analisis capaian yang	- Penguatan sistem pembelajaran kebijakan (*policy learning*) antar Perangkat Daerah melalui

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
pembinaan teknis, termasuk penguatan IKU dan perumusan logika intervensi berbasis hasil	perencanaan dan penganggaran - Penguatan kapasitas perencana daerah melalui pelatihan teknis integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis e-Planning dan SIPD	untuk mendorong perbaikan efektivitas program dan perencanaan berbasis capaian - Implementasi penuh sistem perencanaan pembangunan terintegrasi lintas sektor dan wilayah, dengan fokus pada konsistensi dokumen dan *logical framework* program	mendukung perbaikan kebijakan - Optimalisasi pemanfaatan data spasial, statistik sektoral, dan SDGs untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*)	forum evaluasi lintas perangkat daerah berbasis hasil kinerja dan praktik baik - Pelembagaan sistem perencanaan daerah berbasis data dan kinerja melalui knowledge management serta keterhubungan dengan perencanaan nasional (Satu Data dan Satu Perencanaan)
Penajaman cascading kinerja berbasis outcome serta penyelarasan RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah melalui pembinaan teknis, termasuk penguatan IKU dan perumusan logika intervensi berbasis hasil	Implementasi sistem manajemen kinerja elektronik (e-kinerja) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran	Penerapan analisis kesenjangan kinerja (*performance gap analysis*) untuk mendorong perbaikan efektivitas program dan perencanaan berbasis capaian	Penguatan pelaporan kinerja berbasis hasil (*result-based reporting*) dengan format analisis capaian yang mendukung perbaikan kebijakan	Penguatan sistem pembelajaran kebijakan (*policy learning*) antar Perangkat Daerah melalui forum evaluasi lintas perangkat daerah berbasis hasil kinerja dan praktik baik
Pemetaan tingkat kematangan SPBE dan penyusunan roadmap SPBE daerah yang mencakup arsitektur, layanan prioritas, dan keamanan informasi	Peningkatan infrastruktur TIK pemerintah daerah, termasuk pusat data, jaringan intranet daerah, dan penyediaan sarana akses untuk OPD	Implementasi integrasi layanan pemerintahan elektronik (*e-services*) lintas OPD dan penyederhanaan prosedur layanan publik berbasis digital	Penguatan interoperabilitas data dan penerapan sistem *single sign-on* SPBE, serta optimalisasi keamanan siber dan perlindungan data	Pelembagaan SPBE terpadu dengan pemanfaatan *big data analytics*, *cloud government*, dan *smart service* untuk mendorong tata kelola pemerintahan digital berkelanjutan
Pembangunan dan peningkatan jaringan internet desa diwilayah blank spot yang ada di Kabupaten se Sulawesi Tengah	Pembangunan dan peningkatan jaringan internet desa diwilayah blank spot yang ada di Kabupaten se Sulawesi Tengah	Pembangunan dan peningkatan jaringan internet desa diwilayah blank spot yang ada di Kabupaten se Sulawesi Tengah	Pembangunan dan peningkatan jaringan internet desa diwilayah blank spot yang ada di Kabupaten se Sulawesi Tengah	Pembangunan dan peningkatan jaringan internet desa diwilayah blank spot yang ada di Kabupaten se Sulawesi Tengah

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Penajaman cascading kinerja berbasis outcome serta penyelarasan RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah melalui pembinaan teknis, termasuk penguatan IKU dan perumusan logika intervensi berbasis hasil	Penguatan kapasitas perencana daerah melalui pelatihan teknis integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis e-Planning dan SIPD	Implementasi penuh sistem perencanaan pembangunan terintegrasi lintas sektor dan wilayah, dengan fokus pada konsistensi dokumen dan logical framework program	Optimalisasi pemanfaatan data spasial, statistik sektoral, dan SDGs untuk perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning)	Pelembagaan sistem perencanaan daerah berbasis data dan kinerja melalui *knowledge management* serta keterhubungan dengan perencanaan nasional (Satu Data dan Satu Perencanaan)
Pemetaan risiko integritas di seluruh Perangkat Daerah, termasuk area rawan korupsi dan fraud, serta pembentukan tim pengendalian integritas di perangkat daerah	Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan integritas, anti-fraud, dan manajemen risiko berbasis SPIP, serta penerapan kode etik ASN secara konsisten	Implementasi mekanisme pengendalian internal terintegrasi lintas Perangkat Daerah, termasuk whistleblowing system dan digitalisasi pengendalian SPIP	Optimalisasi monitoring dan audit berbasis risiko dengan memanfaatkan sistem SPIP elektronik dan risk-based supervision	Pelembagaan budaya integritas melalui manajemen risiko terintegrasi, sistem pengawasan berkelanjutan, dan peningkatan kolaborasi dengan KPK/BPKP untuk menjaga skor integritas tinggi
Pemantapan Dasar Profesionalitas ASN (Penataan data dan Pemetaan Kondisi ASN, identifikasi kesejangan komepentensi ASN serta Pengutatan Sistem Informasi Kepegawaian)	Penguatan Kapasitas ASN (Pengembangan kompetensi dan sistem Merit, Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi, implementasi uji kompetensi, serta penerimaan sistem merit secara bertahap dalam manajemen ASN.	Peneguhan Budaya Kinerja (penguatan budaya kerja dan sistem evaluasi kinerja, penerapan penilaian kinerja berbasis hasil, penegakkan disiplin ASN sesuai regulasi, serta intergrasi nilai-nilai ASN).	I novasi pengelolaan ASN berbasis digital dan inklusif (pemanfaatan teknologi dalam pemantauan indeks profesionalitas ASN, Inovasi layanan manajemen ASN, serta penerapan Reward dan punishment berbasis kinerja dan profesionalitas.	Evaluasi dan akselerasi capaian standar profesionalitas ASN (perbaikan kebijakan dan sistem pembinaan ASN, penyusunan roadmap pengembangan Profesionalitas ASN 5 tahun berikutnya).
Pemetaan kondisi arsip dinamis dan kebutuhan sistem arsip terintegrasi	Penguatan SDM pengelola arsip dan penyediaan platform arsip digital terstandar	Integrasi sistem arsip antar-Perangkat Daerah dengan penguatan akses kendali arsip daerah	Penguatan layanan keterbukaan informasi berbasis digital dan arsip	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan arsip melalui sistem elektronik terdesentralisasi
Penilaian kapasitas inovasi daerah dan pelatihan laboratorium inovasi	Pembentukan tim inovasi lintas Perangkat Daerah dan fasilitasi lomba inovasi layanan	Pendampingan pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah berbasis data dan kebutuhan lokal	Penguatan kelembagaan inovasi daerah dan sistem dokumentasi inovasi	Replikasi inovasi unggulan antar kabupaten/kota dan kemitraan multipihak
Penyusunan strategi inklusi keuangan daerah bersama mitra keuangan dan regulator	Edukasi literasi keuangan dan penguatan peran TPID serta BUMDesa	Pengembangan akses layanan keuangan digital di sektor informal dan desa	Penguatan kanal layanan UMKM, perempuan, dan	Perluasan cakupan inklusi keuangan berbasis desa

STRATEGI				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			petani melalui skema keuangan mikro	digital dan integrasi layanan publik
Pemetaan capaian IPKD pada 6 dimensi, penyusunan rencana aksi perbaikan, dan penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan di Perangkat Daerah	Implementasi penganggaran berbasis kinerja dan penataan dokumen perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan RKPD dan SIPD	Digitalisasi penuh pengelolaan keuangan melalui SIPD terintegrasi, termasuk transparansi laporan keuangan dan realisasi anggaran publik	Optimalisasi penyerapan anggaran tepat waktu, efisiensi belanja, dan penerapan pengendalian intern berbasis risiko pada seluruh Perangkat Daerah	Pelembagaan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas untuk menjaga dan meningkatkan skor IPKD secara berkelanjutan
Tujuan: Mewujudkan Masyarakat yang Toleran, Harmonis serta Berkarakter Budaya Maju				
Sasaran: Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
Penguatan fungsi satlinmas dan FKPM di tingkat kelurahan	Penataan dan revitalisasi kawasan aman berbasis komunitas	Penerapan teknologi deteksi dini kerawanan sosial	Pengembangan sistem perlindungan komunitas dan lingkungan pemukiman	Replikasi kawasan ketenteraman dan ketertiban mandiri di seluruh kabupaten/kota
		Kolaborasi antar sektor untuk penyelesaian konflik sosial		
Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan dan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal				
Pemetaan aset budaya dan warisan lokal Penetapan kawasan budaya prioritas di tiap kabupaten/kota	Pengembangan sanggar budaya dan pelatihan seni tradisi Pemberdayaan komunitas kreatif dan perempuan pelestari budaya	Digitalisasi dokumen warisan budaya daerah	Penguatan kelembagaan adat dan pemajuan ekspresi budaya lintas generasi	Replikasi pengelolaan budaya berbasis potensi ekonomi lokal dan komunitas

Sumber: Analisis Tim Penyusun , 2025

Strategi pada masing-masing pentahapan di atas selanjutnya dituangkan dalam arah kebijakan yang merupakan rangkaian kerja sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target serta tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan yang dibuat juga telah diselaraskan dengan isu strategis pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang mencakup **pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan** serta **swasembada pangan, air, dan energi dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan.** Arah kebijakan RPJMD untuk masing-masing misi disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.19
Arah Kebijakan Pembangunan
RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
1	Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan *antenatal care* (ANC), persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta pelayanan pasca persalinan untuk mencegah komplikasi dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 2. Memperkuat intervensi gizi spesifik pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif, suplementasi gizi ibu hamil, dan makanan tambahan bergizi seimbang. 3. Peningkatan upaya pencegahan stunting sejak remaja melalui penguatan edukasi kesehatan reproduksi, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, serta kampanye pencegahan perkawinan anak untuk memutus siklus stunting antar generasi 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan pangan, pertanian, dan perumahan) untuk mengintegrasikan intervensi pencegahan stunting di tingkat desa/kelurahan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		5. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 6. Penguatan integrasi pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ke tingkat desa 7. Penguatan deteksi dini penyakit tidak menular dan integrasi layanan kesehatan digital (telemedis). 8. Penguatan ketahanan dan keamanan kesehatan melalui pencegahan deteksi dan respon terhadap kedaruratan kesehatan dan perubahan iklim 9. Memperkuat dukungan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta integrasi program dengan jaminan kesehatan nasional dalam program pemeriksaan kesehatan gratis 10. Peningkatan efektifitas pengendalian penyakit menular melalui penguatan sistem surveilans terpadu, perluasan cakupan imunisasi dan deteksi dini serta penyediaan layanan diagnostik dan penanganan berbasis wilayah resiko tinggi 11. Eliminasi penyakit endemik Schistosomiasis di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso 12. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia; 13. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar serta peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah 14. Peningkatan kompetensi, ketersediaan serta distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan primer dan rumah sakit 15. Penguatan sistem tanggap darurat kesehatan tingkat daerah 16. Pembangunan dan penguatan pusat kesehatan di daerah terpencil	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		17. Peningkatan subsidi bagi kelompok masyarakat kurang mampu 18. Penguatan pendidikan menengah vokasi dan produktivitas tenaga kerja; 19. Peningkatan dukungan program Sekolah Rakyat 20. Optimalisasi program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan 21. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah seluruh jenjang pendidikan; dan 22. Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi dan Penguatan pendidikan berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics*) 23. Peningkatan akses internet dan bahan ajar digital untuk mendukung program literasi 24. Peningkatan kapasitas guru dalam pembelajaran berbasis literasi dan numerasi melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan. 25. Penguatan implementasi pembelajaran kontekstual dan diferensiatif yang berfokus pada peningkatan kemampuan dasar siswa dalam membaca dan berhitung. 26. Pemberian sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan agar siap masuk ke pasar kerja 27. Penyempurnaan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan pasar kerja global 28. Pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas, distribusi sarana pembelajaran, dan pelatihan guru kontekstual. 29. Pembangunan pusat pelatihan berbasis industri untuk pendidikan vokasi 30. Peningkatan akses dan kualitas sarana literasi masyarakat (perpustakaan daerah, taman baca masyarakat, dan literasi digital) yang inklusif dan merata. 31. Pengembangan program pemberdayaan literasi masyarakat berbasis komunitas, sekolah, dan keluarga untuk membangun	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		budaya membaca, menulis, dan literasi digital. 32. Integrasi program perlindungan sosial berbasis data digital dan jejaring komunitas lokal. 33. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, rentan, dan penyandang disabilitas. 34. Mendorong pemberdayaan sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses usaha, dan penguatan kelembagaan sosial berbasis komunitas. 35. Penguatan layanan konseling dan mobil sosial desa untuk kelompok rentan. 36. Memperluas jangkauan dan kualitas layanan pendampingan keluarga rentan 37. Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan keluarga melalui kampung KB berbasis potensi lokal serta pemanfaatan data terpadu keluarga (Satu Data Keluarga) untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan keluarga secara berkelanjutan. 38. Mengoptimalkan program pembinaan keluarga melalui penguatan fungsi keluarga, pendidikan orang tua, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 39. Meningkatkan akses layanan keluarga (kesehatan reproduksi, konseling keluarga, gizi, dan pendidikan anak usia dini) yang berkualitas dan terjangkau. 40. Mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) 41. Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan primer 42. Penguatan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. 43. Peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan melalui pemberdayaan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		ekonomi, pendidikan dan ketenagakerjaan 44. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak 45. Peningkatan program afirmasi bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya 46. Pembangunan dan Revitalisasi fasilitas olahraga di daerah perkotaan dan pedesaan 47. Pengembangan pusat pelatihan olahraga berbasis teknologi 48. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah melalui kewirausahaan, inovasi, kepemimpinan, dan penguatan organisasi kepemudaan yang produktif dan inklusif. 49. Penguatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan yang Profesional dan Terintegrasi 50. Pengembangan program pelatihan berbasis keterampilan teknis dan wirausaha 51. Perluasan kebijakan afirmatif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas	
2	Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	1. Penyederhanaan regulasi dan sistem perizinan investasi berbasis digital 2. Pelaksanaan promosi di forum nasional dan internasional 3. Peningkatan fasilitas dan layanan investasi di KEK 4. Penguatan sektor unggulan melalui pelatihan hilirisasi, pembangunan infrastruktur produksi, dan branding produk lokal. 5. Dukungan swasembada pangan 6. Penguatan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terpadu dan ramah lingkungan melalui pemantauan rutin, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan pemanfaatan teknologi deteksi dini berbasis informasi iklim dan ekologi serta pengembangan praktik pertanian adaptif	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		terhadap perubahan iklim (*Climate-Smart Agriculture*) pada Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli 7. Penerapan standar mutu dan sertifikasi produk pertanian 8. Penerapan teknologi berbasis blockchain dalam rantai pasok industri 9. Revitalisasi koperasi sektor riil, digitalisasi koperasi, dan penguatan kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal. 10. Peningkatan kapasitas dan intensifikasi pemungutan pajak serta retribusi 11. Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui inovasi ekonomi 12. Pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui kawasan percontohan, regulasi transisi, dan insentif industri hijau. 13. Penyaluran bantuan modal usaha berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi 14. Pembangunan infrastruktur distribusi pangan untuk daerah rawan ketahanan pangan 15. Fasilitasi pemberian sarana dan prasarana pertanian 16. Fasilitasi pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sesuai prioritas pembangunan daerah. 17. Pengembangan ekosistem ekonomi syariah berbasis UMKM lokal di sektor perdagangan, pertanian, dan perikanan 18. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan syariah daerah (BMT, koperasi syariah, unit usaha syariah BUMD) melalui pelatihan dan asistensi. 19. Pengembangan dan penguatan SDM pariwisata	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		20. Membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata; 21. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata 22. Diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan geopark serta destinasi pariwisata bahari yang mendukung Ekonomi Biru sebagai sumber pertumbuhan baru. 23. Pengembangan kebijakan insentif fiskal bagi investasi hijau 24. Penguatan ekosistem bisnis berbasis ekonomi sirkular 25. Fasilitasi akses permodalan bagi pelaku industri kreatif dan jasa 26. Penguatan ekosistem startup berbasis ekonomi digital dan industri kreatif 27. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan 28. Peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan, rantai dingin (*cold chain*), dan fasilitas pengolahan hasil perikanan. kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Parigi Moutong, Donggala, Morowali, Banggai Laut, dan Banggai 29. Peningkatan teknologi pasca-panen, dan penguatan kualitas standar ekspor serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha budidaya rumput laut sentra hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan 30. Pengembangan kawasan sentra garam 31. Fasilitasi sertifikasi produk pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk ekspor 32. Diversifikasi produk ekspor berbasis nilai tambah 33. Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis Mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara 34. Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai 35. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di daerah strategis	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		36. Pengembangan kawasan perkotaan kecil berbasis Industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi) 37. Pengembangan Kawasan Industri dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup 38. Implementasi teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan 39. Penerapan skema reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang berbasis teknologi 40. Penguatan riset dan pengembangan untuk diversifikasi produk hilirisasi 41. Dukungan pembiayaan Koperasi Merah Putih dan Sosalisasi dan Pendampingan serta peningkatan SDM Pengelola Koperasi Merah Putih 42. Mendukung program pengendalian inflasi di Daerah 43. Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial 44. Penguatan kelembagaan, tata kelola serta optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan potensi ekonomi strategis daerah 45. Mendorong kemitraan yang sinergis antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan mitra pembangunan lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 46. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik desa. 47. Pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes, inovasi desa, dan integrasi program pemberdayaan masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah.	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor	1. Peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem darat dan laut yang terintegrasi 2. Pengelolaan Cagar Biosfer secara berkelanjutan 3. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. 4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat; dan 5. Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Revitalisasi drainase untuk mengembali kan fungsi drainase dan pemasangan sistem pemantauan digital pada titik rawan genangan atau drainase utama 7. Penurunan emisi GRK pada sektor Folu/Lahan, Energi, IPPU dan Limbah 8. Pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan 9. Perlindungan keanekaragaman hayati melalui edukasi, konservasi lokal, dan jejaring mitra nasional. 10. Pemberian mekanisme insentif bagi kabupaten/kota atau pihak swasta yang berkontribusi dalam pengelolaan keanegaragaman hayati 11. Perlindungan hutan adat dan tanah ulayat 12. Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau. 13. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengeloalaan Hutan (KPH) 14. Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan *output* penguatan standarisasi untuk hilirisasi 15. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang, pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang 16. Penguatan data, informasi dan iptek keanekaragaman hayati 17. Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		18. Penguatan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi kepada kabupaten/kota 19. Transisi energi bersih di wilayah terpencil serta efisiensi energi di industri dan rumah tangga. 20. Penguatan kebijakan pengelolaan ekonomi sirkular untuk mengurangi emisi di sektor limbah 21. Kampanye perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi pemilahan sampah dari sumber secara berkelanjutan untuk mendukung pengurangan timbulan sampah dan peningkatan daur ulang. 22. Penguatan kebijakan insentif bagi industri dan komersil yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan 23. Pemanfaatan teknologi pemantauan jalan 24. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas transportasi perdesaan di kawasan hinterland dan perbatasan Kabupaten Morowali untuk menunjang akses ekonomi dan pelayanan dasar. 25. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan, jembatan, dan infrastruktur konektivitas lainnya; 26. Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan; 27. Penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, dan penguatan produktivitas lahan pertanian, peningkatan jaringan jalan produksi, akses logistik, dan fasilitas pemasaran hasil produksi di kawasan transmigrasi Tampo Lore (Poso), Bungku (Morowali), dan Palolo (Sigi) yang merupakan kawasan transmigrasi prioritas termasuk pula pengembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian. 28. Penyediaan hunian dan sanitasi berbasis komunitas dan teknologi tepat guna.	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		29. Peremajaan kota secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 30. Mendukung program 3 juta rumah 31. Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk pembangunan perumahan dan sanitasi 32. Penguatan konektivitas udara, laut, jalan dan darat 33. Ekspansi jaringan listrik dan energi terbarukan serta smart grid. 34. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air melalui irigasi, embung, dan teknologi hemat air. 35. Integrasi berbagai aspek pengelolaan air—mulai dari konservasi, distribusi, hingga pemanfaatan—dengan pendekatan lintas sektor dan terintegrasi, agar pengelolaan air bisa dilakukan secara holistik 36. Penguatan upaya rehabilitasi dan pelestarian ekosistem perairan serta kawasan resapan air. Hal ini penting untuk menjaga fungsi alami sungai, danau, dan waduk dalam mengatur siklus hidrologi serta mengurangi risiko banjir dan kekeringan 37. Pembangunan infrastruktur kelistrikan berbasis energi baru terbarukan (PLTS, PLTMH atau bioenergi 38. Penguatan untuk penyediaan listrik desa mandiri melalui program microgrid atau minigrid 39. Peningkatan pengendalian pengawasan keselamatan ketenagalistrikan (K2) pada usaha ketenagalistrikan 40. Perluasan jaringan internet berbasis satelit di daerah yang belum terjangkau 41. Penguatan konektivitas internet untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan dan administrasi pemerintahan berbasis digital 42. Peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam peningkatan infrastruktur jaringan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		43. Meningkatkan literasi digital dalam pemanfaatan internet dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan 44. Penguatan akses dan keamanan TIK publik, serta penerapan perlindungan data dan interoperabilitas sistem. 45. Peningkatan kapasitas tenaga teknis dan penyediaan peralatan tanggap darurat di daerah rawan bencana. 46. Pemetaan dan perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis risiko bencana 47. Optimalisasi tata ruang berbasis mitigasi bencana untuk mencegah kerusakan lingkungan dan permukiman. 48. Penguatan kurikulum pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah di daerah rawan bencana. 49. Pelaksanaan pelatihan dan simulasi rutin penanggulangan bencana berbasis komunitas di Kota Palu. 50. Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik; dan serta Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami khususnya di Kota Palu 51. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini terpadu 52. Perlindungan dan pemulihan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi; 53. Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut; 54. Memperkuat pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Taman Nasional Togean melalui pemantapan zonasi, pengawasan sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		55. Mengembangkan ekowisata berbasis konservasi di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tolitoli untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem 56. Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 57. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan ruang terbuka publik yang layak dan inklusif di kawasan perkotaan dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, olahraga, rekreasi, dan mitigasi bencana, dengan desain ramah anak, ramah disabilitas, serta memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. 58. Peningkatan infrastruktur terkait penataan bangunan dan *Infrastructure Reconstruction Sector Loan* (IRSL); 59. Mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik secara berkelanjutan; 60. Mendorong kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal	1. Peningkatan standardisasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan ramah masyarakat. 2. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital di seluruh perangkat daerah. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik melalui forum konsultasi dan dialog kebijakan. 4. Penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi lokal, termasuk peran DPRD, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil.	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		5. Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 6. Penguatan kelembagaan hukum daerah melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepatuhan aparatur. 7. Pengembangaan sistem analisis kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*). 8. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan strategis daerah. 9. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang terintegrasi. 10. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah berbasis outcome. 11. Peningkatan digitalisasi layanan pemerintah melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.Menguatkan kapasitas SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi. 12. Penyediaan layanan publik berbasis real-time yang dapat diakses dari berbagai platform. 13. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan melalui penyelarasan dan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan nasional. 14. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data dan inovasi sistem informasi pembangunan daerah. 15. Pengoptimalan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah. 16. Penguatan budaya kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 17. Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir berbasis merit sistem. 18. Pengembangan sistem kearsipan elektronik yang terintegrasi antar perangkat daerah.	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		19. Peningkatan keamanan, keterhubungan, dan keberlanjutan digitalisasi arsip daerah. 20. Penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja. 21. Pengembangan dan peningkatan inovasi daerah di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. 22. Pemberian penghargaan dan fasilitasi bagi perangkat daerah yang mengembangkan inovasi berdampak nyata. 23. Pengembangan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan. 24. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi UMKM dan kelompok rentan. 25. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip good governance. 26. Pengoptimalan penerapan sistem informasi keuangan daerah secara real-time dan terintegrasi. 27. Penguatan sistem deteksi dini, pencegahan konflik, dan penanganan gangguan ketertiban masyarakat. 28. Peningkatan kolaborasi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan pencegahan konflik sosial. 29. Pelibatan tokoh lintas agama dalam pendidikan toleransi serta penyusunan kolaborasi antar iman. 30. Penguatan lembaga adat dan komunitas dalam pembangunan budaya serta digitalisasi warisan budaya. 31. Pelatihan bagi pengelola lembaga budaya tentang inovasi dalam pelestarian budaya 32. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal melalui pemberian Insentif bagi komunitas budaya yang aktif dalam	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
		pelestarian warisan daerah dan penguatan hukum atas pelanggaran terhadap pelestarian budaya 33. Revitalisasi lembaga budaya daerah 34. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	

Sumber: Analisis Tim Penyusun , 2025

3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud nyata dan implementasi dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.20
Progam Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2030

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
1	2	3	4	5	6	7
Visi:						
BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2025-2029						
Misi 1:						
Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.						
	Tujuan 1.1:					
	Mewujudkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang berdaya saing			**Indeks Modal Manusia (IMM)**		
		Sasaran 1.1.1:				
		Meningkatnya kualitas derajat Kesehatan Masyarakat		**USIA HARAPAN HIDUP**		
				ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI SEHAT**	
				PREVELENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK PADA BALITA)		
				CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN PROVINSI		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (pasien) (Indeks)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSU UNDATA
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD (Nilai Akreditasi)		RSU MADANI
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase cakupan Antenatal Care sesuai standar (%)		DINAS KESEHATAN
				Persentase Ibu Hamil yang mendapat Suplemen gizi (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya pemahaman, penilaian dan penggunanaan informasi kesehatan dalam mengambil keputusan terkait pelayanan kesehatan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan	Persentase penduduk dengan literasi kesehatan (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya jumlah KabKota yang menyelenggarakan dan mencapai tatanan Kab/Kota sehat secara berkelanjutan	Persentase Kab/Kota Sehat (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya cakupan Deteksi Dini, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan Deteksi Dini penyakit menular (%)		DINAS KESEHATAN
				Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular (%)		DINAS KESEHATAN
				Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap (%)		DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/Kota yang menyelenggaraakan sistem surveilans (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan dasar	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi sesuai standar	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya ketersediaan logistik farmasi dan alat kesehatan yang rasioanal dan sesuai standar dalam upaya kesehatan masyarakat secara promotif	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya cakupan pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya praktek hidup sehat, mengurangi tingkat kejadian penyakit dan mencipt kan lingkungan yang mendukung kesehatan	Persentase anak umur 1 - 12 tahun minum obat pencegahan kecacingan di Kab/Kota minimal setahun sekali (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya Proporsi Sampel yang diperiksa sesuai standar	Persentase Sampel yang diperiksa sesuai standar (%)		DINAS KESEHATAN

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotens bencana provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi (%)		DINAS KESEHATAN
			Tercapainya tenaga kesehatan yang kompten, produktf, teemotivasi dan tersebar merata	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Persentase Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkanya pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi (%)		RSU UNDATA
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan RSUD yang Tersertifikasi (Persentase)		RSU MADANI
			Meningkatnya Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikat	Persentase SDM kesehatan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan dan SKP (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya ketersdiaan, keterjangkauan, mutu dan penggunaan obat serta alat kesehatan yang rasional dan sesuai standar	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
				Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)		DINAS KESEHATAN
				Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan (%)		DINAS KESEHATAN
			Tercapainya masyarakat yang mandiri, sadar kesehatan, berpartisipasi aktif dan memiliki perilaku hidup sehat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat) (%)		DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna) RSUD Undata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSU UNDATA
				Nilai Akreditasi RSUD Madani		RSU MADANI
			Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT Labkes		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (Persentase)		
				Persentase keluarga miskin dan rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
				Persentase anak yang memenuhi persyaratan pengangkatan anak		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pusat pembelajaran keluaran (PUSPAGA) yang terbentuk	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS P3A
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif	Persentase Kab/Kota yang ditetapkan Sebagai Kab/Kota Layak Anak (KLA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS P3A
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS P2KB
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS P2KB
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS P2KB
				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (*age Spesific Fertility Rate* /ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		
		Sasaran 1.1.2			**PROGRAM PRIORITAS : BERANI CERDAS**	
		Meningkatnya kualitas pendidikan		**RATA – RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN**		
				HARAPAN LAMA SEKOLAH		
				NILAI LITERASI		
				NILAI NUMERASI		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK USIA DIATAS 15 TAHUN	**PROGRAM PRIORITAS : BERANI CERDAS**	
				ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SMA SEDERAJAT		
				PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KEATAS YANG BERKUALITAS PENDIDIKAN TINGGI		
				PERSSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI YANG BEKERJA DI BIDANG KEAHLIAN		
				INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		
			Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menegah Atas	Nilai rapor pendidikan Sekolah Menengah Atas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Persentase lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)		
			Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase akses terhadap Pendidikan Khusus		
			Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Menegah	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, minat, bakat, dan kreativitas siswa		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Platform Teknologi	Persentase pemenuhan layanan platform teknologi		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal		
			Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks distribusi guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Meningkatnya Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Bahasa Daerah yang dilestarikan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS PENDIDIKAN
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase penerbitan izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Kebutuhan ASN, Perlindungan dan Pelayanan ASN	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Sasaran 1.1.3				
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender		**INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI SEJAHTERA**	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS P2KB
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS P2KB
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS P2KB
				Indeks Lansia Berdaya		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Spesific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS DUKCAPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS DUKCAPIL
				INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI**	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3A
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI SEJAHTERA	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS P2KB
			Meningkatnya Kualitas Data Terpilah	Persentase data terpilah yang termutahirkan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DP3A
				Persentase data terpilah yang terpublikasikan		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif	Persentase Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Kab/Kota Layak Anak (KLA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DP3A
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DP3A
				Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif		
	Tujuan 1.2					
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja			**TINGKAT KEMISKINAN**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI SEJAHTERA**	
		Sasaran 1.2.1				
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		**INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL**		
				PREVALENSI KETIDAK CUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCEF OF UNDERNOURISHMENT*) (%)		
				TINGKAT INFLASI		
				INDEKS DESA		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan sumbangan masyarakat lintas kabupaten/kota yang diterbitkan		
				Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial		
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial Dalam Panti Berbasisi Masyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase anak terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase lanjut usia terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) lainnnya di luar HIV/AIDS dan Napza dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase penyandang disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
				Persentase anak yang memenuhi persyaratan pengangkatan anak		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial		
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase pemenuhan infrastruktur untuk mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Panga Harapan Ketersedian	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN
				Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi		
				Persentase jumlah cadangan pangan		
				Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan		
			Meningkatnya Kulalitas Kebijakan Strategi Penanganan Inflasi		Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Administrasi Perekonomian
			Meningkatnya Kualitas Keijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Yang Ditindak Lanjuti			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Inklusi Keuangan			
			Meningkatnya Kuailitas Kebijakan Daerah Dalam Peningkatan Laba Bersih BUMD Sulawesi Tengah			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yang Ditindak Lanjuti			
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang venting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 Ha) yang tertangani	Persentase peningkatan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 Ha) yang tertangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERMUKIMAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI DAN UMKM
			Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi yang Terlatih	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN UMKM
				Pertumbuhan Wirausaha		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Akses UMKM Terhadap Sumberdaya Produktif	Pertumbuhan pelaku usaha hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha		
			Meningkatnya Kualitas SDM UMKM yang Terlatih	Persentase kualitas SDM UMKM yang terlatih		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI DAN UMKM
			Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase usaha mikro yang naik kelas (%)		
			Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase wirausaha baru (%)		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (%)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa (Angka)	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan dan produktivitas Aset Desa		
			Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan ekonomi kreatif		
			Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, Nilai Dimensi Lingkungan, Nilai Dimensi Aksebilitas	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan, Prodeskel, EPDesKel, LomDesKel, PINDesKel dan Penetapan, Penegasan Tapal Batas Desa		
				Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades)		
			Meningkatnya Nilai Dimensi Layanan Dasar	Nilai Dimensi Layanan Dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Meningkatnya Nilai Dimensi Sosial	Nilai Dimensi Sosial		
			Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan pemanfaatan TTG		
	Tujuan 1.2					
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja			**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI**	
		Sasaran 1.2.2				
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		**RASIO PENDUDUK BEKERJA**		
				PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS BEKERJA DI SEKTOR FORMAL		
				PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROVINSI		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase perusahaan yang diawasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya		
				Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
MISI 2: Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang	**Tujuan 2.1 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH**			**Pertumbuhan Ekonomi**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI**	
		Sasaran 2.1.1				
		Meningkatnya nilai Investasi daerah		**Nilai Investasi**		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase dokumen perencanaan peluang investasi yang tersedia	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
				Persentase permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peminat investasi dari kegiatan promosi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
				Persentase hasil tindak lanjut pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan		
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha PMA dan PMDN terhadap ketentuan penanaman modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM LNFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		Sasaran 2.1.2				
		MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH		**RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (%)**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI MAKMUR**	
				PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN		
				PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi		
				Cakupan bina pelaku IKM		
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA LNDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Terkololanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR D/	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
			Terlaksananya Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhan (%)		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya PAD	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
			Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Diperiksa	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Kasus Pelanggaran Kelautan Perikanan Yang Tertangani	Persentase tertanganinya pelanggaran kelautan perikanan		
			Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Di Tumbuhkan dan Dikembangkan	Persentase POKMASWAS Yang Ditumbuhkan dan Dikembangkan		
			Meningkatnya Serapan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan	Jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Penerapan Standar Mutu Perikanan	Persentase penerapan standar mutu perikanan		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Peningkatan produksi hortikultura		
			Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi	Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak		
			Meningkatnya Peredaran Benih Bersertifikat	Persentase benih bersertifikat yang beredar		
			Meningkatnya Potensi Produksi Daging dan Produksi Telur	Sapi (Kg)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Kambing (Kg)		
				Unggas (Kg)		
				Babi (Kg)		
				Produksi Telur (Kg)		
			Meningkatnya Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB)	Persentase peningkatan produksi benih Kebun Sumber Benih (KSB)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Kelapa Dalam (Kg/Ha)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Cengkeh (Kg/Ha)		
				Kakao (Kg/Ha)		
				Pala (Kg/Ha)		
				Kelapa Sawit (Kg/Ha)		
				Kopi (Kg/Ha)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Hasil Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan	Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan (Indeks)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya Hasil Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan	Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan (Indeks)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya Pekebun Sawit Yang Tervalidasi Untuk Mendapatkan STDB	Persentase Pekebun Sawit yang Mendapatkan STDB		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya Wilayah Yang Terfasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Perkebunan		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Standar Usaha Perkebunan	Persentase Perusahaan yang memenuhi standar usaha Perkebunan		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Menurunnya Intensitas Serangan OPT Tanaman Perkebunan pada Kelompok Terapan	Persentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Tanaman Perkebunan pada Kelompok Terapan		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Menurunnya Serangan OPT Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan OPT Perkebunan		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan ketahanan dan produktivitas pertanian, serta pengurangan kerugian akibat bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas	Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas		Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara Provinsi	Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA MINYAK DAN GAS BUMI	DINAS ESDM
				Jumlah Rekomendasi Terhadap Usulan IPR		
				Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah		
				Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah		
				Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah		
				Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah		
				Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya cakupan dan aksesibilitas layanan pengujian bahan tambang	Persentase Pengujian Bahan Tambang yang dilayani		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas KTH	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya luas layanan irigasi multikomoditas	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
				Pertumbuhan Wirausaha		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan piniam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang diberikan Layanan Perizinan	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Domain Layanan SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistika
				Domain Manajemen SPBE		
				Domain Tata Kelola SPBE		
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase Layanan Pengaujian dan Kalibarasi yang Terakreditasi dan Non Akreditasi		
			Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Desa (Angka)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan ekonomi kreatif (Angka)		
				RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN & MINUM (SEKTOR PARIWISATA)	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI**	
				PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF TERHADAP PDRB ADHB		
			Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (hari) (Hari)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINAS PARIWISATA
				Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per kunjungan/orang		
			Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Pengembangan Pariwisata : Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata	DINAS PARIWISATA
				Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara		
			Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB	Nilai tambah ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINAS PARIWISATA
				Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif		
				Jumlah tenaga kerja/pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi		
				Jumlah tenaga kerja/pelaku usaha ekonomi kreatif yang tersertifikasi		
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Sasaran 2.1.3: MENINGKATNYA PERAN KOPERASI DAN UMKM		**RASIO VOLUME USAHA KOPERASI TERHADAP PDRB**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI**	
				PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH NONPERTANIAN PADA LEVEL PROVINSI		
				PROPORSI JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA LEVEL PROVINSI		
				RASIO KEWIRAUSAHAAN DAERAH		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan piniam	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberikan layanan perizinan (%)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya kualitas SDM koperasi yang terlatih			
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN UMKM
				Pertumbuhan Wirausaha		
		Sasaran 2.1.4: MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH		**RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH**		Badan Pendapatan
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)		
			Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
		Sasaran 2.1.5: MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI SEKTORAL		**INDEKS DAYA SAING DAERAH**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI**	
				BLUE ECONOMY INDEX		
				GREEN ECONOMY INDEX		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan			
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah			
			Meningkatnya fasilitas pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah			
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase hasil kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
				Persentase pembinaan bimbingan teknis dan supervisi SDM dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah		
				Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan		
				Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan		
			Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
			Meningkatnya Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Higiene Sanitasi pada proses produksi atau Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Di UPT Veteriner	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Yang Diterbitkan (Dokumen)		
				Jumlah Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI MAKMUR	
			Terkololanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI		
				Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
				Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya PAD	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
			Meningkatnya Serapan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan	Jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Penerapan Standar Mutu Perikanan	Persentase penerapan standar mutu perikanan		
			Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Diperiksa	Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Kasus Pelanggaran Kelautan Perikanan Yang Tertangani	Persentase tertanganinya pelanggaran kelautan perikanan		
			Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Di Tumbuhkan dan Dikembangkan	Persentase POKMASWAS Yang Ditumbuhkan dan Dikembangkan		
			Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (hari) (Hari)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
				Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per kunjungan/orang		
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI LANCAR	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Rasio)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
				Konektivitas Laut (Unit)		
			Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	Persentase Kapal Pelayaran yang Layak Beroperasi (%)		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI MENYALA	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ESDM
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI SEJAHTERA	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Panga Harapan Ketersedian	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN
				Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi		
				Persentase jumlah cadangan pangan		
				Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase keluarga miskin dan rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial Dalam Panti Berbasisi Masyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase anak terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase lanjut usia terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) lainnnya di luar HIV/AIDS dan Napza dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase penyandang disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI SEHAT	
			Meningkatnya jumlah KabKota yang menyelenggarakan dan mencapai tatanan Kab/Kota sehat secara berkelanjutan	Persentase Kab/Kota Sehat (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Tercapainya tenaga kesehatan yang kompten, produktf, teemotivasi dan tersebar merata	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)		
			Meningkanya pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi (%)		
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan RSUD yang Tersertifikasi (Persentase)		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI CERDAS	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menegah Atas	Nilai rapor pendidikan Sekolah Menengah Atas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Persentase lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)		
			Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase akses terhadap Pendidikan Khusus		
			Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI	
			Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Unit)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS ESDM
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
				Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) (SBM/Milyar Rupiah)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
				Indeks Kualitas Air (Indeks)		
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCAANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah (%)		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI MAKMUR	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya PAD	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000)		
			Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Kelapa Sawit (Kg/Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
			Meningkatnya Pekebun Sawit Yang Tervalidasi Untuk Mendapatkan STDB	Persentase Pekebun Sawit yang Mendapatkan STDB	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
			Meningkatnya Wilayah Yang Terfasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Perkebunan		
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI SEJAHTERA	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial Dalam Panti Berbasisi Masyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase anak terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase lanjut usia terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) lainnnya di luar HIV/AIDS dan Napza dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase penyandang disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor	**Tujuan 3.1 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETANGGUHAN DAERAH TERHADAP BENCANA**			**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
		Sasaran 3.1.1 MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH		**INDEKS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI MAKMUR**	
			Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
				Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas KTH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
				Persentase Peningkatan Kelas KTH		
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
			Meningkatnya Kelestarian Dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah wilayah Daerah Aliran Sungai yang dipulihkan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	DINAS KEHUTANAN
			Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Konservasi di Area Preservasi (Orang)	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS KEHUTANAN
				Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IEPKK) (Indeks)		
				Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IEPKK) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
				Indeks Kualitas Air (Indeks)		
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
				Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Km²)		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)		
				Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)		
				Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)		
				Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)		
				Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)		
			Meningkatnya cakupan dan aksesibilitas layanan pengujian geologi dan sampel air tanah	Persentase Pengujian Geologi dan Sampel Air Tanah yang dilayani (Persentase)		
		Sasaran 3.1.2				
		MENURUNNYA INTENSITAS EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISION		**PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI MAKMUR**	
				PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK: KUMULATIF		
				PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK: TAHUNAN		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Peningkatan produksi hortikultura		
			Peningkatan ketahanan dan produktivitas pertanian, serta pengurangan kerugian akibat bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya Potensi Produksi Daging dan Produksi Telur	Sapi (Kg)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Kambing (Kg)		
				Unggas (Kg)		
				Babi (Kg)		
				Produksi Telur (Kg)		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI	
			Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Unit)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS ESDM
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
				Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) (SBM/Milyar Rupiah)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)		
			Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN
				Luas Lahan yang direhabilitasi		
				Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas KTH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
				Persentase Peningkatan Kelas KUPS		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		
			Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Konservasi di Area Preservasi (Orang)	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS KEHUTANAN
				Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IEPKK) (Indeks)		
				Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IEPKK) (Indeks)		
			Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Sanitasi	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Sanitasi Aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Terkololanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR D/	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Sasaran 3.1.3				
		MENINGKATNYA KUALITAS PEMANFAATAN RUANG		**PERSENTASE KETAATAN RTRW**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI MAKMUR**	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG
				Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (%)		
				Persentase PelaKsanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (%)		
				INDEKS RISIKO BENCANA		
		Sasaran 3.1.4: MENINGKATNYA KETANGGUHAN DAERAH TERHADAP BENCANA		**INDEKS KETAHANAN DAERAH**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI LANCAR**	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* (daerah)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)		
	Tujuan 3.2 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS			**INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI LANCAR**	
		Sasaran 3.2.1 MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN		**INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**		
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG
		Sasaran 3.2.2 MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN SDA		**INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN SDA**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI LANCAR**	
				KAPASITAS AIR BAKU		
			Meningkatnya Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman dari Abrasi dan Banjir ROB	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi dan Banjir ROB (%)		
				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi dan Banjir ROB (%)		
			Meningkatnya Penyediaan Kapasitas Air Baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)		
			Meningkatnya Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)		
			Meningkatnya Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
			Meningkatnya Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
		Sasaran 3.2.3				
		MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		**INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI LANCAR**	
				PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN		
				PERSENTASE RUMAH TANGGA HUNIAN LAYAK		
				AKSES RUMAH TANGGA PERKOTAAN TERHADAP AIR SIAP MINUM PERPIPAAN		
				PERSENTASE RUMAH TANGGA TERHADAP AKSES AIR BERSIH		
				PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN		
			Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
			Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Meningkatnya Fasilitasi Rumah Layak Huni Bagi Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERMUKIMAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemda Provinsi Yang Memperoleh Fasilitasi Rumah Layak Huni (%)		
			Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Yang Tertangani	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Yang Tertangani (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERMUKIMAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
			Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Yang Terfasilitasi PSU (%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERMUKIMAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
			Meningkatnya Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
			Meningkatnya Persentase Pengelolaan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
			Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Sanitasi	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Sanitasi Aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS CIPTA KARYA DAN SDA
		Sasaran 3.2.4				
		MENINGKATNYA KUALITAS SIMPUL TRANSPORTASI		**RASIO KONEKTIVITAS SIMPUL TRANSPORTASI PROVINSI**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI LANCAR**	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Rasio)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
				Konektivitas Darat (Persentase)		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)		
			Meningkatnya Kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan jalan	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Rasio)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
				Konektivitas Laut (Unit)		
			Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	Persentase Kapal Pelayaran yang Layak Beroperasi (%)		
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Jumlah Laporan Koordinasi Perkeretaapian Yang Dilaksanakan (Laporan)	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	DINAS PERHUBUNGAN
		Sasaran 3.2.5				
		MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN		**KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI MENYALA**	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
				Rasio Elektrifikasi (%)		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal	**TUJUAN 4.1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, BERSIH, INOVATIF**			**INDEKS REFORMASI BIROKRASI**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
		Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		**INDEKS DEMOKRASI PROVINSI**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI BERKAH**	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Nilai Aspek Kebebasan		
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Nilai Aspek Kesetaraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nilai Aspek Kesetaraan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)		
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Nilai Aspek Kebebasan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan		
				INDEKS REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	
		Sasaran 4.1.2 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS		**INDEKS PELAYANAN PUBLIK**		
				INDEKS REFORMASI HUKUM		
				INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
				NILAI SAKIP	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI BERINTEGRITAS**	
				INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		
				INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ DAERAH		
				INDEKS INTEGRITAS NASIONAL (SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS/SPIP)		
				INDEKS PROFESIONALITAS ASN		
				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP		
				INDEKS INOVASI DAERAH		
				INDEKS INKLUSI KEUANGAN		
				INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)		
			Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas kinerja terhadap kesinambungan pembnagunan	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Indeks)	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi
				Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)		
				Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
				Indeks Ber-AHKLAK Pemerintahan Daerah (Indeks)		
				Persentase Perangkat daerah dengan Nilai RB Minimal "B" (%)		
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase Permohonan Penjajakan Komunikasi yang Dilayani (Persentase)	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	BADAN PENGHUBUNG
				Persentase Peningkatan Kepuasan Atas Pelayanan Promosi UKM (Persentase)		
				Persentase Peningkatan Kepuasan Atas Pelayanan Fasilitasi Pentas Seni dan Budaya (Persentase)		
			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BIRO ADIMINISTRASI PIMPINAN
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN
				Persentase Capaian Bidang Urusan SPM (%)		
				Nilai Indikator Kolaboratif Untuk Kemajuan Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Proporsi Penduduk Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (%)	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Persentase Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi/Memperkuat Koordinasi untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi (%)	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	BIRO HUKUM
				Persentase Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter) yang berkualitas (%)		
				Persentase Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (%)		
				Persentase Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (%)		
			Meningkatnya Kulalitas Kebijakan Strategi Penanganan Inflasi		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BIRO EKONOMI
			Meningkatnya Kualitas Keijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Yang Ditindak Lanjuti			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Inklusi Keuangan			
			Meningkatnya Kuailitas Kebijakan Daerah Dalam Peningkatan Laba Bersih BUMD Sulawesi Tengah			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yang Ditindak Lanjuti			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan (%)	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO PEMBANGUNAN
			Meningkatnya Nilai Pembiayaan Inovatif Daerah CSR	Persentase Peningkatan Nilai Pembiayaan Inovatif Daerah (%)		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Fungsi Pembentukan PERDA	Ketepatan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (%)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Fungsi Penganggaran	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Fungsi Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Domain Layanan SPBE (Poin)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Domain Manajemen SPBE (Poin)		
				Domain Tata Kelola SPBE (Poin)		
			Menurunnya Terjadinya Penyelewangan Atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran Ataupun Proses dan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK / APIP Tahun Anggaran n-1 (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (%)	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Hasil Pengukuran Kinerja Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH
			Meningkatnya Kesesuaian antara RPJMD dan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan	Peresentase Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (%)		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Peresentase Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (%)		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)		
			Meningkatnya keterhubungan RPJMD dan Renstra Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RENSTRA PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (%)		
			Meningkatnya Sinergi Keselarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)		
			Meningkatnya keterhubungan RPJMD dan Renstra Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RENSTRA PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA (%)		
			Meningkatnya Sinergi Keselarasan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)		
			Meningkatnya keterhubungan RPJMD dan Renstra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RENSTRA PD Pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)		
			Meningkatnya Sinergi Keselarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Kebutuhan ASN, Perlindungan dan Pelayanan ASN	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian (Nilai)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas Pengembangan Karir	Nilai Kriteria Pengembangan Karir (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas mutasi dan promosi berdasarkan sistem merit	Nilai Kriteria Mutasi dan Promosi (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas Manajemen kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan sistem merit	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Nilai)		
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)		
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)		
				Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas data profil kompetensi dan potensi ASN	Nilai Kriteria Sub Aspek Pengembangan Karir ketersediaan profil pegawai dan talent pool (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Persentase Prangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Tingkat ketersediaan arsip yang dikelola (Nilai)		
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup (%)	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka (%)		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan			
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah			
			Meningkatnya fasilitas pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah			
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase hasil kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase pembinaan bimbingan teknis dan supervisi SDM dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah		
				Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan		
				Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan		
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				Persentase Penurunan SILPA		
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)		

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)		
			Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
				Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)		
			Meningkatnya Kualitas Penerimaan Pajak Daerah	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%)		
	TUJUAN 4.2: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TOLERAN, HARMONIS SERTA BERKARAKTER BUDAYA MAJU			**INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI BERINTEGRITAS**	
		Sasaran 4.2.1 MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
				Persentase Satgas Linmas yang terbentuk (%)		
				Persentase Laporan Tentang Potensi Gangguan Trantibumlinmas yang di Tindaklanjuti (%)		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Indeks ketertiban dan ketentraman (Indeks)		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		
		Sasaran 4.2.2				
		MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT YANG BERAKAR PADA NILAI-NILAI		**INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**	**PROGRAM PRIORITAS: BERANI BERKAH**	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
					PROGRAM PRIORITAS: BERANI HARMONI	
			Meningkatnya Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Bahasa Daerah yang dilestarikan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS PENDIDIKAN

Untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, 9 Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Setiap program prioritas tersebut diampu oleh perangkat daerah terkait yang memiliki tugas dan fungsi sesuai substansi program. Tabel berikut menyajikan persandingan antara 9 Program Prioritas Daerah, program sesuai nomenklatur Kepmendagri, serta perangkat daerah pengampunya.

Tabel 3.21
Keselarasan Antara Program Prioritas dengan Implementasi Program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
1	**Berani Cerdas**		
	1. Pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta; 2. Pemberian biaya SPP bagi siswa miskin di sekolah swasta SMA/SMK/SLB 3. Pemberian beasiswa bagi siswa cerdas, istimewa dan bakat istimewa. 4. Biaya uji kompetensi dan biaya prakerin bagi siswa SMK negeri maupun swasta; 5. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan/atau berprestasi dengan kategori: a. mahasiswa baru jalur prestasi nonakademik b. mahasiswa baru jalur afirmasi c. mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasiskan Prestasi (SNBP) d. mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasiskan Tes (SNBT) e. mahasiswa aktif jalur prestasi akademik	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Program Pembinaan Perpustakaan 6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 7. Program Kepegawaian Daerah 8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 11. Program Kesejahteraan Rakyat 12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Sosial 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Dinas Dukcapil 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Biro Kesejahteraan Rakyat 8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	f. mahasiswa aktif jalur afirmasi g. mahasiswa aktif jalur prestasi nonakademik 6. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa aktif miskin dan/atau berprestasi dalam masa penyelesaian studi. 7. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi guru, ASN serta pendidikan profesi 8. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Digital SMA/SMK, 9. Pelatihan "Vokasional Siap Kerja" bagi Generasi Milenial dan Gen-Z 10. *Sulteng Career Center* 11. Peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat dengan mendorong kenaikan Indeks Pembangunn Literasi Masyarakat (IPLM).		
2	**Berani Sehat**		
	1. Integrasi layanan kesehatan bersama BPJS, berobat Gratis menggunakan KTP 2. Pencegahan stunting 3. Dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis 4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum UNDATA dan MADANI 5. Mendorong Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani menjadi rumah sakit rujukan bertaraf internasional 6. Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Naseha Kami)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Undata DAN RSUD Madani 3. Dinas Sosial 4. DP3A 5. Dinas P2KB

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	7. Integrasi layanan kesehatan dengan rumah sakit lainnya di Kota Palu	7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 10. Program Pengendalian Penduduk 11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
3	**Berani Sejahtera**		
	1. Jaminan harga bahan pokok murah dan stabil 2. Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin melalui Program Pangan Daerah (PANADA) 3. Graduasi masyarakat miskin melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Graduasi 4. Revitalisasi Rutilahu 5. Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM 6. Mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG)	1. Program Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 6. Program Penanganan Bencana 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 10. Program Perekonomian dan Pembangunan 11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 12. Program Kawasan Permukiman	1. Biro Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pangan 4. Biro Administrasi Perekonomian 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas P2KB 11. Dinas Dukcapil 12. DP3A

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
		13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 15. Program Pengembangan UMKM 16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Penempatan Tenaga Kerja 18. Program Penataan Desa 19. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa 21. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22. Program Pengendalian Penduduk 23. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 24. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 25. Program Pendaftaran Penduduk 26. Program Pencatatan Sipil 27. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 28. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 29. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 30. Program Perlindungan Khusus Anak	

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
4	**Berani Lancar**		
	1. Pembangunan/peningkatan 1000 kilometer jalan desa untuk; peningkatkan konektivitas antarwilayah dengan menghubungkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta memperlancar akses menuju sentra-sentra pertanian, perikanan dan industri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan; 2. Peningkatan konektivitas penghubung antara wilayah barat Sulawesi Tengah menuju wilayah timur Sulawesi Tengah dengan mendukung konektivitas Tambu-Kasimbar; 3. Melaksanakan rekonstruksi, pemeliharaan dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket *Multi Year Contract (MYC)* yang berlokasi di Kabupaten/Kota; 4. Pembangunan Kawasan Agropolitan, kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang Tuna (TCT), kawasan sentra hirilisasi rumput laut, kawasan afirmasi, kawasan konservasi dan rawan bencana, dan kawasan pertumbuhan; 5. Peningkatan konektivitas penghubung antara Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut;	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Pengembangan Permukiman 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistern Penyediaan Air Minum 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Kawasan Permukiman 9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 10. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 12. Program Pengelolaan Pelayaran 13. Program Pengelolaan Perkeretaapian 14. Program Penanggulangan Bencana 15. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 2. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 3. Dinas Perhubungan 4. BPBD 5. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	6. Jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai akses air bersih		
5	**Berani Menyala**		
	1. Jaminan ketersediaan jaringan internet bagi desa yang masih termasuk dalam wilayah *blank spot*, 2. Jaminan ketersediaan akses listrik bagi masyarakat miskin dan penyediaan lampu jalan bagi daerah yang belum terjangkau penerangan jalan umum 3. Peningkatan kualitas layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan pasokan listrik Sulawesi Tengah	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persand ian
6	**Berani Makmur**		
	1. Berani Produktivitas melalui peningkatan produktivitas padi sebesar 5-6 Ton/Ha GKG 2. Berani Tangkap Banyak melalui pemberian bantuan alat tangkap nelayan 3. Program Petani Milenial 4. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memastikan ketersediaan Benih unggul, Pupuk serta mendorong medernisasi Alsintan 5. Mendukung Program resi gudang 6. Jaminan sosial bagi petani, nelayan dan pekerja lainnya 7. Berani Panen Raya, hasil panen melimpah dengan jaminan harga jual tinggi bagi petani 8. Pembangunan sentra pangan berbasis kawasan dan masyarakat	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 7. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. DinasTanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 6. Dinas Pangan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistika 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	9. Berani membangun lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan 10. Berani Inseminasi buatan untuk ternak 11. Berani KUR melalui pemberian modal usaha dengan bunga 0%	10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 12. Program Penyuluhan Pertanian 13. Program Perizinan Usaha Pertanian 14. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 15. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 16. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Minyak dan Gas Bumi 17. Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 18. Program Pengawasan Keamanan Pangan 19. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 20. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 21. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 22. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 23. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 24. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnva	10. Dinas Cipta Karya dan SDA 11. Dinas Kehutanan 12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
		26. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 27. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 28. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 29. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 30. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 31. Pengelolaan Persampahan 32. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 33. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 34. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH 35. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 36. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 38. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 39. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 40. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 41. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 42. Program Pengelolaan Hutan	
7	**Berani Berkah**		
	Dengan program unggulan : 1. Sulteng Berjamaah, 2. Sulteng Mengaji; 3. Insentif bagi guru mengaji, marbot, pendeta/tokoh agama dan pemangku adat; 4. Penyetaraan status pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan; 5. Perbaikan sarana prasarana keagamaan 6. Penguatan peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3. Program Kesejahteraan Rakyat 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6. Program Pembinaan Sejarah 7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 8. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Badan Kesbangpol 2. Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Kebudayaan
8	**Berani Harmoni**		
	1. **Berani Wisata** dengan Program Kunjungan Desa Wisata (Dewi) di Sulawesi Tengah melalui pariwisata partisipatoris, Seribu Megalith dan Geopark Poso, penetapan Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una Una	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pemuda dan Olahraga 3. DP3A 4. DPMPTSP

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional. Selain itu Berani Wisata juga mengusung konsep pariwisata partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulawesi Tengah melalui penyelenggaraan event-event Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong *one company one event; one cabor one event; one community one event* 2. **Berani Ekonomi Kreatif** melalui Sulteng Creative Center (SCC); melakukan inkubasi UMKM dengan fokus peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif 3. Pembentukan **Sulteng Creative Center** serta penyusunan roadmap SCC, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset Provinsi 4. **Berani 20.000 Wirausaha Baru** menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda 5. **Berani Carier center** melaksanakan bimbingan jabatan, Naker to campuss, Naker to school SMA dan SMK. 6. **Berani Berbudaya**; menanamkan nilai–nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan; Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat 7. **Berani Lestari**: Berani menjaga dan melesetarikan nilai-nilai kearifan lokal; Dalam mejaga kelestrarian kebudyaan dan ekonomi kreatif	4. Program Hubungan Industrial 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 11. Program Promosi Penanaman Modal 12. Program Pelayanan Penanaman Modal 13. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 14. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 15. Program Kerja Sama Penanaman Modal 16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 17. Program Pemasaran Pariwisata 18. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 19. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 20. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Koperasi dan UMKM 7. BRIDA 8. Dinas Kebudayaan

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	8. **Berani Produktif** dan Berekspresi: Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi 9. **Berani Bumdes Sukses** memfasilitasi Bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikutkan bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Bersama; peningkatan kualitas management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; penguatan pengelolaan usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha Bumdes/Bumdes 10. **Berani berinvestasi** mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi, memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; membuat kajian investasi hijau dan invesasi biru; 11. **Berani bermitra** dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas serta dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih 12. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana olahraga dengan mendukung pembangunan stadion olahraga atau *sport center*	21. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 22. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 23. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 25. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 26. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 27. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 28. Program Riset dan Inovasi Daerah 29. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 30. Pengembangan Kebudayaan 31. Pengembangan Kesenian Tradisional	
9	**Berani Berintegritas**		
	1. Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – *Call Center*,	1. Program Penataan Organisasi	1. Biro Organisasi 2. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	Siaga Laporan - *Command Center* 2. Implementasi Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan peningkatan kualitas penerapan SPBE 3. Budaya kerja birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani) 4. *Co-Working Space* (CWS) bagi ASN 5. Bantuan keuangan bagi pemerintah desa	2. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4. Program Pelayanan Penghubung 5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 6. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 7. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 8. Program Perekonomian dan Pembangunan 9. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 10. Program Kesejahteraan Rakyat 11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 13. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Program Kepegawaian Daerah 16. Program Pengelolaan Arsip 17. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Program Riset dan Inovasi Daerah 20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Seluruh Perangkat Daerah 4. Badan Penghubung 5. Biro Hukum 6. Sekretariat Dprd 7. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 8. Biro Administrasi Perekonomian 9. Biro Administrasi Pembangunan 10. Biro Kesejahteraan Rakyat 11. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian 12. Inspektorat Daerah 13. Bappeda 14. Badan Kepegawaian Daerah 15. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 16. Badan Riset Dan Inovasi Daerah 17. BPKAD 18. Satuan Polisi Pamong Praja 19. Seluruh Perangkat Daerah

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
		21. Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

Sumber: Analisis Tim Penyusun , 2025

Untuk menjalankan program prioritas diatas maka terdapat program unggulan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu sebagai berikut:

1. **Berani Cerdas**, dengan program unggulan Nambaso (Anak Bisa Sekolah Gratis) melalui:
   a. Pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta;
   b. Pemberian biaya SPP bagi siswa miskin di sekolah swasta SMA/SMK/SLB
   c. Pemberian beasiswa bagi siswa cerdas, istimewa dan bakat istimewa.
   d. Biaya uji kompetensi dan biaya prakerin bagi siswa SMK negeri maupun swasta;
   e. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan/atau berprestasi dengan kategori:
      - mahasiswa baru jalur prestasi nonakademik
      - mahasiswa baru jalur afirmasi
      - mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasiskan Prestasi (SNBP)
      - mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasiskan Tes (SNBT)
      - mahasiswa aktif jalur prestasi akademik
      - mahasiswa aktif jalur afirmasi
      - mahasiswa aktif jalur prestasi nonakademik
   f. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa aktif miskin dan/atau berprestasi dalam masa penyelesaian studi.
   g. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi guru, ASN serta pendidikan profesi
   h. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Digital SMA/SMK,
   i. Pelatihan “Vokasional Siap Kerja” bagi Generasi Milenial dan Gen-Z
   j. *Sulteng Career Center*

k. Peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat dengan mendorong kenaikan Indeks Pembangunn Literasi Masyarakat (IPLM).

2. **Berani Sehat** dengan program unggulan integrasi layanan kesehatan bersama BPJS, berobat gratis menggunakan KTP, pencegahan stunting, dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit, mendorong Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Umum Daerah Madani menjadi rumah sakit rujukan bertaraf internasional, Jaminan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami) serta integrasi layanan kesehatan dengan rumah sakit lainnya di Kota Palu.
3. **Berani Sejahtera**, dengan program unggulan jaminan kestabilan harga bahan pangan strategis; menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui Program Pangan Daerah (PANADA), Pemberdayaan masyarakat miskin menuju graduasi, revitalisasi rumah tidak layak huni (Rutilahu); program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM, dan mendukung program makan bergizi gratis (MBG)
4. **Berani Lancar**, dengan pembangunan/peningkatan 1000 kilometer jalan desa diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan menghubungkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta memperlancar akses menuju sentra-sentra pertanian, perikanan dan industri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan; upaya untuk mendukung konektivitas Tambu-Kasimbar sehingga dapat meningkatan konektivitas penghubung antara wilayah barat Sulawesi Tengah menuju wilayah timur Sulawesi Tengah; melaksanakan rekonstruksi, pemeliharaan dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket *Multi-Year Contract* (MYC); Kawasan Agropolitan, kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang Tuna (TCT), kawasan sentra hirilisasi rumput laut, kawasan afirmasi, kawasan konservasi dan rawan bencana, dan kawasan pertumbuhan; peningkatan jalan penghubung antara wilayah barat Sulawesi Tengah menuju wilayah timur; peningkatan konektivitas penghubung antara Kabupaten Banggai

Kepulauan dan Kabupten Banggai Laut; serta jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai akses air bersih

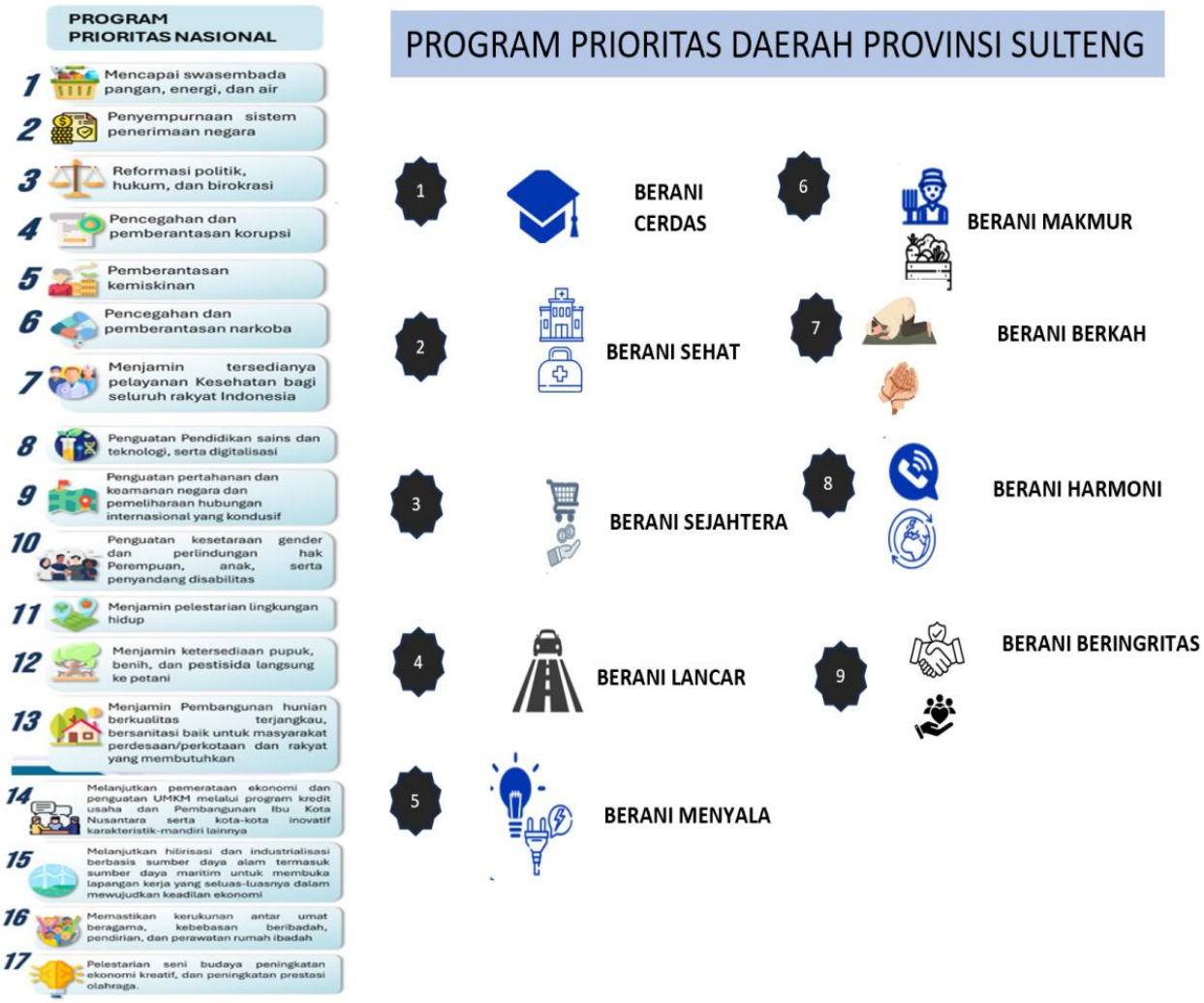
5. **Berani Menyala**, dengan program unggulan jaminan ketersediaan jaringan internet bagi desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank Spot; jaminan ketersediaan akses listrik bagi masyarakat miskin dan penyediaan lampu jalan umum bagi daerah yang belum terjangkau penerangan jalan serta peningkatan kualitas layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan Pasokan Listrik Sulawesi Tengah
6. **Berani Makmur,** dengan program unggulan Berani Produktivitas melalui peningkatan produktivitas padi sebesar 5-6 Ton/Ha GKG diwujudkan dengan dukungan intensifikasi pertanian, dan penguatan kelembagaan petani yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan nasional; Berani Tangkap Banyak melalui pemberian bantuan alat tangkap nelayan; Program Petani Milenial, Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memastikan ketersediaan benih unggul, Pupuk serta mendorong medernisasi Alsintan; Program Resi Gudang; Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan; Berani Panen Raya, hasil panen melimpah dengan jaminan harga jual tinggi bagi petani, Berani Inseminasi Buatan untuk meningkatkan produktivitas ternak serta Berani KUR melalui pemberian modal usaha dengan bunga 0%. Selain itu Berani Makmur juga akan mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon *menuju net zero emission*, pengelolaan terpadu antar bentang darat dan laut serta Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) ke kabupaten/kota
7. **Berani Berkah**, dengan program unggulan Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji; insentif bagi guru mengaji, marbot, pendeta/tokoh agama dan pemangku adat serta penyetaraan status pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan; perbaikan sarana prasarana keagamaan dan memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
8. **Berani Harmoni,** dengan program unggulan **Berani Wisata** dengan Dinas Pariwisata (berani wisata dan berani kreatif) sebagai *leading sector* Menetapkan 1 Kabupaten 1 desa Lokasi Prioritas Desa Wisata (DEWI) yang

akan dikembangkan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah. Selain itu Berani Wisata juga mengusung konsep pariwisata partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulawesi Tengah melalui penyelenggaraan event-event *Community-Based Tourism*, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong *one company one event*; *one cabor one event*; *one community one event*. **Berani Ekonomi Kreatif** melalui *Sulteng Creative Center* (SCC); melakukan inkubasi UMKM dengan fokus peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif. Pembentukan *Sulteng Creative Center* dengan menyusun Peraturan Gubernur tentang **Komite Ekonomi Kreatif** Sulawesi Tengah serta penyusunan roadmap SCC, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan dengan pemanfaatan asset Provinsi. **Berani 20.000 Wirausaha Baru** menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda. **Berani Carier center** melaksanakan bimbingan jabatan, *Naker to campuss*, *Naker to school* SMA dan SMK. **Berani Berbudaya;** Berani menanamkan nilai–nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan; Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat. **Berani Lestari**: Berani menjaga dan melesetarikan nilai-nilai kearifan lokal; Dalam mejaga kelestrarian kebudyaan dan ekonomi kreatif; **Berani Produktif dan Berekspresi:** Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi; **Berani Bumdes Sukses** memfasilitasi Bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikutkan bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Berasama; peningkatan kualitas management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; penguatan pengelolaan usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha Bumdes/Bumdes. **Berani berinvestasi** mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi - memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; membuat kajian investasi hijau dan investasi biru;

Berani bermitra dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas serta dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Selain berbagai program tersebut, program prioritas Berani Harmoni juga diarahkan untuk membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga di Sulawesi Tengah dengan mendukung stadion olahraga atau *sport center*.

9. **Berani Berintegritas**, dengan program unggulan Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – *Call Center*, Siaga Laporan - *Command Center*, Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE, Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani), *Co Working Space* (CWS) bagi ASN, Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa.

Sembilan Program Prioritas Daerah telah dirancang secara sinergis dan selaras dengan 14 Program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Penyelarasan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dengan menyesuaikan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran daerah agar sejalan dengan prioritas strategis nasional. Melalui integrasi ini, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di daerah tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap target pembangunan nasional secara holistik dan berkelanjutan. Gambaran perbandingan 14 Program Prioritas Nasional dalam Asta Cita dengan 9 Program Prioritas Daerah disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Gambar 3.17
Perbandingan Program Prioritas Nasional
dan Program Prioritas Daerah

Selain dituangkan ke dalam 9 Program Prioritas Daerah, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah juga dijabarkan lebih lanjut melalui 8 (delapan) Program "**Cepat**" yang merupakan akronim dari "**Cerdas, Produktif, dan Sehat**." Program "Cepat" ini menjadi bentuk konkret dari komitmen kepala daerah yang dirancang untuk menghasilkan dampak pembangunan nyata dalam waktu singkat dan strategis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Unggulan Nambaso (anak bisa sekolah gratis) yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan guna mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun melalui pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan kepada

siswa-siswi SMA/SMK sederajat. Selain itu, Program Nambaso juga diarahkan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah, sehingga diharapkan sekolah dan orang tua siswa tidak lagi terbebani dengan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah. Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah siswa SMA/SMK, Program Nambaso akan memberikan kemudahan akses program Pendidikan kesetaraan berupa Ijazah Paket C. Selanjutnya ketika selesai menempuh pendidikan menengah, lulusan SMA/SMK/sederajat memiliki 2 pilihan yakni bekerja atau kuliah. Program Wajib Belajar 13 Tahun akan ditingkatkan dengan meningkatan akses anak untuk memperoleh pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk mencapai SDM yang berkualitas, maka perlu untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui Program Bantuan Beasiswa dalam dan luar negeri bagi guru dan dosen berprestasi.
3. Digitalisasi pendidikan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang wajib ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan sarana pendidikan berbasis teknologi dan informasi dalam bentuk papan tulis berteknologi *touch screen* guna menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA/SMK.
4. Jaminan layanan kesehatan melalui Program “Naseha Kami” (Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin). Naseha Kami merupakan program perbaikan manajemen Kesehatan khusus untuk masyarakat miskin di RSUD Undata dan RS Madani. Maysarakat miskin yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan dan menunggak BPJS kesehatannya, cukup menggunakan KTP agar dapat berobat di rumah sakit. Melalui Program Naseha Kami, masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan BPJS atau yang menunggak iuran BPJS berhak mendapatkan jaminan kesehatan dalam bentuk rawat inap kelas 3 dan obat obatan gratis yang telah dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Tengah
5. Sulteng Peduli Stunting. Prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah berada di angka 26,1% berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024. Program Sulteng Peduli Stunting dimaksudkan untuk menekan angka besaran prevelensi stunting yang masih cukup tinggi dengan penguatan implementasi aksi

konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang menyasar 6 (enam) kelompok sasaran yaitu Ibu hamil, ibu nifaas dan ibu menyusui; baduta; balita; remaja putri, calon pengantin; serta rumah tangga dan masyarakat..

6. Ketenagakerjaan dan Industri :
    a. Perlindungan jaminan sosisal ketenagakerjaan bagi para pekerja informal;
    b. Memperketat sistem pengawasan ketenagakerjaan utamanya disektor industri, salah satunya dengan memperkuat fungsi pengawas ketenagakerjaan;
    c. Memberikan dukungan bantuan pinjaman tanpa bunga;
    d. Memperkuat sistem pengawasan pengupahan bagi para tenaga kerja, agar semua tenaga kerja mendapatkan upah sesuai dengan UMK/UMP;
    e. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perusahaan skala besar untuk terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat Program CSR.
7. Peningkatan Kapasitas LKM Desa : Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu dan RT/RW melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Pemerintah provinsi akan memberikan hibah melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi kecamatan yang diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas LKM Desa.
8. Birokrasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi budaya kearifan lokal dan nilai religius.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dijabarkan secara sistematis ke dalam 9 Prioritas Pembangunan Daerah dan 8 Program “Cepat” menjadi kerangka operasional yang saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua instrumen ini dirancang untuk saling terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, masing-masing prioritas dan program didukung oleh perangkat daerah pengampu yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi program yang dijalankan. Tabel berikut menyajikan keselarasan antara misi, 9 Prioritas Pembangunan Daerah, 8 Program “Cepat”, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana utama.

Tabel 3.22
Keselarasan Antara Misi, Program Prioritas dengan Implementasi Program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Misi	9 Program Prioritas	8 Program Cepat	Perangkat Daerah
(1). Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja	Berani Cerdas Berani Sejahtera	1. Peningkatan kualitas SDM melalui Pelaksanaan Program Nambaso (Anak Miskin Bisa Sekolah) 2. Peningkatan kualitas Tenaga Pengajar 3. Digitalisasi Pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Sosial 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Dinas Dukcapil 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Biro Kesejahteraan Rakyat 8. Dinas Pangan 9. Biro Administrasi Perekonomian 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 12. Dinas Koperasi dan UMKM 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14. Dinas P2KB 15. DP3A
(1). Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja	Berani Sehat Berani Sejahtera	4. Jaminan layanan kesehatan melalui Program “Naseha Kami” 5. Sulteng Peduli Stunting	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Undata DAN RSUD Madani 3. Dinas Sosial 4. DP3A 5. Dinas P2KB 6. Biro Kesejahteraan Rakyat 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pangan 9. Biro Administrasi Perekonomian

Misi	9 Program Prioritas	8 Program Cepat	Perangkat Daerah
			10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 12. Dinas Koperasi dan UMKM 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16. Dinas Dukcapil
(2). Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan	Berani Makmur Berani Harmoni		1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. DinasTanaman Pangan dan Hortikultura 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 6. Dinas Pangan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistika 9. Dinas Kebudayaan 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Dinas Cipta Karya dan SDA 12. Dinas Kehutanan

Misi	9 Program Prioritas	8 Program Cepat	Perangkat Daerah
			13. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 14. Dinas Lingkungan Hidup 15. Dinas Lingkungan Hidup 16. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 18. Dinas Pemuda dan Olahraga 19. DP3A 20. DPMPTSP 21. Dinas Pariwisata 22. Dinas Koperasi dan UMKM 23. BRIDA
(3). Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor	Berani Lancar Berani Menyala Berani Makmur		1. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 2. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 3. Dinas Perhubungan 4. BPBD 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 7. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9. Dinas Kelautan dan Perikanan 10. DinasTanaman Pangan dan Hortikultura 11. Dinas Perkebunan dan Peternakan 12. Dinas Pangan

Misi	9 Program Prioritas	8 Program Cepat	Perangkat Daerah
			13. Dinas Koperasi dan UMKM 14. Dinas Kebudayaan 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16. Dinas Cipta Karya dan SDA 17. Dinas Kehutanan 18. Dinas Lingkungan Hidup
(2). Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan (3). Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor	Berani Makmur Berani Harmoni Berani Lancar Berani Menyala	6. Ketenagakerjaan dan Industri 7. Peningkatan Kapasitas LKM Desa	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. DinasTanaman Pangan dan Hortikultura 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 6. Dinas Pangan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Kebudayaan 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas Cipta Karya dan SDA 11. Dinas Kehutanan 12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16. Dinas Pemuda dan Olahraga

Misi	9 Program Prioritas	8 Program Cepat	Perangkat Daerah
			17. DP3A 18. DPMPTSP 19. Dinas Pariwisata 20. BRIDA 21. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 22. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 23. Dinas Perhubungan 24. BPBD 25. Satuan Polisi Pamong Praja 26. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian
(4). meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	Berani Berkah Berani Berintegritas	8. Birokrasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi budaya kearifan lokal dan nilai religius	1. Badan Kesbangpol 2. Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Kebudayaan 4. Biro Organisasi 5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 6. Seluruh Perangkat Daerah 7. Badan Penghubung 8. Biro Hukum 9. Sekretariat DPRD 10. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 11. Biro Administrasi Perekonomian 12. Biro Administrasi Pembangunan 13. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian 14. Inspektorat Daerah 15. Bappeda 16. Badan Kepegawaian Daerah

Misi	9 Program Prioritas	8 Program Cepat	Perangkat Daerah
			17. Dinas Perpustakaan dan Arsip 18. Badan Riset dan Inovasi Daerah 19. BPKAD 20. Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Dalam upaya mencapai kegiatan prioritas utama dalam Dokumen Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan prioritas pembangunan daerah yang menjadi bagian prioritas daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, terdapat beberapa indikasi intervensi yang telah difokuskan berdasarkan lokasi prioritas pada setiap provinsi. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 83 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kegiatan Prioritas Utama, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23
Persandingan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	Berani Berintegritas
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*	Prioritas Nasional 2	-
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah		-
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan		-

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan		-
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya		Berani Makmur
7	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Berani Makmur
8	Pengembangan Pangan Hewani		Berani Makmur
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		Berani Makmur
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		Berani Makmur
11	Peningkatan Penyediaan Energi		Berani Makmur
12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi		Berani Lancar dan Berani Menyala
13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan		Berani Menyala
14	Konservasi Sumber Daya Air		Berani Lancar dan Berani Menyala
15	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		Berani Lancar dan Berani Menyala
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS		Berani Lancar, Berani Makmur
17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa		
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		Berani Berintegritas
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		Berani Harmoni, Berani Berintegritas
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		Berani Makmur
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik		Berani Makmur
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		Berani Lancar dan Berani Makmur
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut		Berani Makmur
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		Berani Lancar dan Berani Makmur
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		Berani Lancar dan Berani Makmur
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut		Berani Makmur

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	Berani Menyala
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital		Berani Berintegritas
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		-
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena		-
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba		-
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo		-
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim		-
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		Berani Sejahtera
35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	Berani Cerdas
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		Berani Cerdas
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		Berani Cerdas
38	Pengembangan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		Berani Cerdas
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		Berani Cerdas
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi		Berani Cerdas
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		Berani Cerdas
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		Berani Sehat
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting		Berani Sehat
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Berani Sehat
45	Penuntasan TBC		Berani Sehat
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		Berani Sejahtera

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		Berani Sejahtera
48	Eliminasi Penyakit Kusta dan Schistosomiasis		Berani Sehat
49	Investasi pelayanan kesehatan primer		Berani Sehat
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses		Berani Sehat
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		Berani Sehat
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		-
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		-
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		-
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Prioritas Nasional 5	Berani Makmur, Berani Harmoni
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga		-
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit		-
58	Pengembangan Hilirisasi Timah		Berani Makmur, Berani Harmoni
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit		Berani Makmur, Berani Harmoni
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa		Berani Makmur, Berani Harmoni
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut		Berani Makmur, Berani Harmoni
62	Pengembangan Industri Kimia		-
63	Pembangunan Industri Semikonduktor		-
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil		-
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja		-
66	Pengembangan Industri Dirgantara		-
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei		-
68	Pengembangan KIT Batang		-
69	Pengembangan KI Weda Bay		-
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	Berani Sejahtera
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		Berani Sejahtera

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Affirmatif		Berani Sejahtera
73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara		-
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		Berani Sejahtera dan Berani Lancar
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		Berani Sejahtera dan Berani Lancar
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	Berani Beritegritas
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN		Berani Beritegritas
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		Berani Beritegritas
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		Berani Beritegritas
80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		-
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	Berani Beritegritas
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		Berani Berkah
83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut		Berani Makmur, Berani Harmoni

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Kegiatan Prioritas Utama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga memiliki lokus pelaksanaan di daerah hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Dari 83 KPU yang ada, terdapat 54 kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan juga didukung oleh program prioritas daerah. Secara spesifik, dari 54 KPU dimaksud, terdapat 24 KPU yang lokus kegiatannya berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama di suatu daerah pada dasarnya dapat didukung oleh program-program prioritas daerah yang serupa dan terkait. Dukungan program-program prioritas daerah akan meningkatkan daya ungkit dari Kegiatan Prioritas Utama terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun persandingan prioritas pembangunan Sulawesi Tengah yang mendukung 24 Kegiatan Prioritas Utama di Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut ini:



Penurunan kematian ibu dan anak



Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan

BERANI SEHAT



Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Berkualitas



Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja

BERANI CERDAS



Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan



Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya

BERANI MENYALA



Konservasi Sumber Daya Air



Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)



Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan



Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati



Pengembangan Pangan Hewani



Pengembangan Hilirisasi Kelapa

BERANI MAKMUR



Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR



Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut



Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut



Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan



Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut



Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut



Pengembangan Hilirisasi Nikel

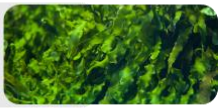


Penguatan Industri Logam Dasar, Besi, dan Baja



Pengembangan Hilirisasi Kelapa

BERANI HARMONI



Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut



Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 (data diolah)

Gambar 3.18
Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Sulawesi Tengah 2025-2029

3.2.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari penetapan lokasi prioritas dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang perlu diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah. Penyelarasan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa strategi pembangunan nasional dapat diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta potensi unggulan yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Dengan demikian, pembangunan di daerah tidak hanya mengikuti arahan nasional, tetapi juga mengoptimalkan peran lokal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah secara terpadu.

Arah kebijakan umum pembangunan kewilayahan di Sulawesi Tengah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang
b. Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, kebijakan kerja sama antar multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan penerapan desentralisasi asimetris

dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)

c. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik, didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi geospasial
d. Penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah
e. Percepatan pelaksanaan reforma agraria, sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah publikasi/stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital
f. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun termasuk pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
g. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
h. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi
i. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, termasuk generasi milenial dan generasi Z
j. Pemenuhan kebutuhan listrik dan transisi energi listrik yang rendah karbon, serta penguatan infrastruktur digital
k. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi
l. Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi termasuk peningkatan SDM Transportasi
m. Pemantapan fondasi keberlanjutan dan produktivitas sumber daya air
n. Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif, dan peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif

Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu, terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris.

Prioritas intervensi kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan, melalui:

a. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi supra-desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas;
b. Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil, dan pengembangan sistem permukiman yang memiliki kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup bersama;
c. Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Untuk mengurangi disparitas ekonomi yang cukup signifikan antara kabupaten penghasil pertanian dengan kabupaten industri, seperti Morowali dan Morowali Utara memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian. Maka dibutuhkan rumusan strategi pembangunan kewilayahan yang khusus untuk mengurangi kesenjangannya, sebagai berikut :

1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
   a. Mengembangkan potensi wilayah dengan mengidentifikasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki potensi unggulan, baik yang sudah ada maupun yang baru.
   b. Perluasan manfaat pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat ekonomi ke daerah pedalaman (hinterland) dan wilayah sekitarnya.
2. Percepatan Pembangunan Konektivitas
   a. Meningkatkan infrastruktur jalan dan transportasi dengan cara membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan serta sistem transportasi yang

menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah terbelakang serta pulau-pulau kecil.

b. Meningkatkan akses ke wilayah tertinggal melalui peningkatan konektivitas, manfaat pembangunan dan pelayanan dasar dapat disebarkan ke daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan IPTEK.
   a. Meningkatkan kompetensi SDM dengan menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri pertanian dan pengelolaan kawasan di setiap wilayah.
   b. Memanfaatkan teknologi: Menggunakan inovasi teknologi-teknologi produksi dan pasca pertanian untuk mendukung kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan.
4. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat
   a. Fokus pada pemberdayaan masyarakat pertanian melalui program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
   b. Mengembangkan usaha dan lapangan kerja dengan cara membuka kesempatan kerja melalui berbagai program seperti industri padat karya dan dukungan terhadap dunia usaha lokal.

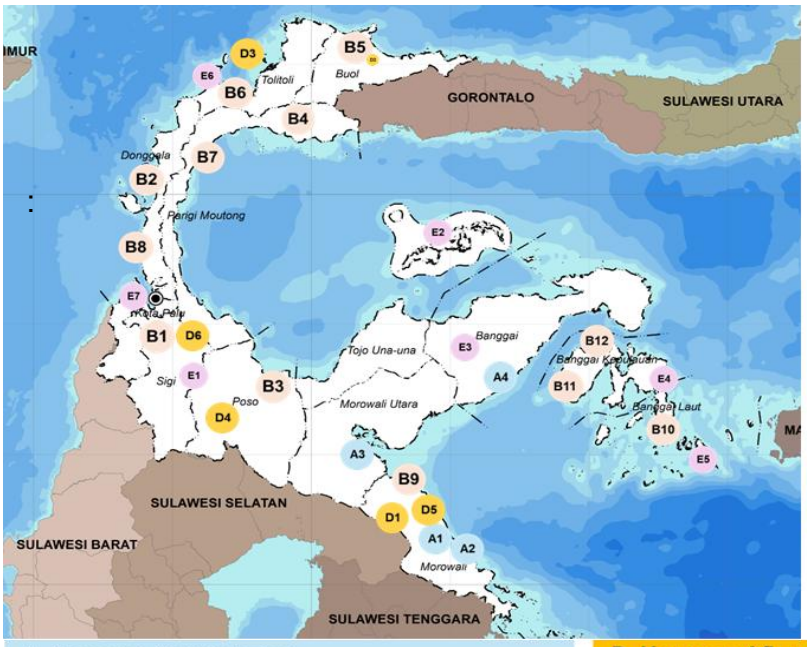
Dalam mendorong pembangunan wilayah dan kemandirian wilayah kedepan, maka dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah diidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan dan pemerataan wilayah beserta ekosistemnya melalui penyusunan daftar lokasi prioritas, dengan tujuan untuk:

a. Menterjemahkan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) dalam agenda kewilayahan;
b. Menterjemahkan prioritas transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola serta landasan transformasi ke dalam agenda pembangunan wilayah dan mengarahkan sumber pendanaan pembanguan (belanja K/L, transfer ke daerah)
c. Menterjemahkan visi, misi, dan program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih ke dalam 5 bentuk kelompok kawasan

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi prioritas yaitu:

1. Sektor pendorong dan komoditas unggulan wilayah yang menjadi modal dasar pembangunan ekonomi wilayah serta akan dipertimbangkan dalam mengembangkan ekosistem pembangunan ekonomi wilayah (sentra produksi-pengolahan- riset/inovasi- pasar (lokal/nasional/ global);
2. Kawasan strategis pusat pertumbuhan wilayah dan daerah afirmasi;
3. Pola dan struktur ruang RTRW;
4. Infrastruktur dasar dan konektivitas;
5. Risiko kebencanaan;
6. Daya dukung dan daya tampung lingkungan serta lokasi prioritas ketahanan iklim bidang kelautan, pesisir, air, dan pertanian;
7. Tema dan arah pembangunan wilayah di dalam RPJMN 2025-2029 maupun RKP 2025 yang sudah diintegrasikan dengan Visi, Misi dan Program Presiden Terpilih.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan Pulau Sulawesi yaitu **Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan IndustriBerbasis SDA,** dimana pembangunan Pulau Sulawesi diarahkan untuk menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional. Secara khusus, tema arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 adalah **Sentra Pertanian serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan**, seperti disajikan pada gambar berikut ini



SULAWESI TENGAH

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali (Bahodopi)
1. Kabupaten Morowali

Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara
2. Kabupaten Morowali
3. Kabupaten Morowali Utara

Kawasan Hilirisasi Gas Bumi
4. Kabupaten Banggai

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan
1. Kabupaten Sigi
2. Kabupaten Donggala
3. Kabupaten Poso
4. Kabupaten Parigi Moutong
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Tolitoli

Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)
7. Kabupaten Parigi Moutong
8. Kabupaten Donggala
9. Kabupaten Morowali
10. Kabupaten Banggai Laut
11. Kabupaten Banggai Kepulauan

Kawasan Sentra Hilirisasi Rumput Laut
12. Kabupaten Banggai Kepulauan

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)
1. KPP Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali

Kecamatan Perbatasan Prioritas
2. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Buol
3. Kecamatan Perbatasan, Kabupaten Toli-Toli

Kawasan Transmigrasi (KT)
4. KT Tampolore, Kabupaten Poso
5. KT Bungku, Kabupaten Morowali
6. KT Palolo, Kabupaten Sigi

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi:
Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah
1. Taman Nasional Lore Lindu, Kab. Sigi dan Kab. Poso
2. Taman Nasional Kepulauan Togean, Kab. Tojo Una-Una
3. Kabupaten Banggai
4. Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kabupaten Banggai Laut
6. Kabupaten Tolitoli

Kawasan Rawan Bencana:
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
7. Kota Palu

C. Kawasan Pariwisata
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahu 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi yang diturunkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2023 bahwa kawasan prioritas pembangunan pariwisata adalah:
Kawasan Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una Una

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 3.19
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

Tabel 3.24
Arah Pembangunan Kewilayahan Lokasi Prioritas
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan
A1	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali A1: Kabupaten Morowali	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan *output*: bantuan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya, pemugaran permukiman kumuh, bantuan prasarana dan sarana umum bidang perumahan, Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Sistem Pengelolaan Persampahan termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahodopi, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
A2 A3	Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara A2: Kabupaten Morowali A3: Kabupaten Morowali Utara	Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, melalui: a. Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao Industrial Park, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Stardust b. Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan output: pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali c. Peningkatan investasi kawasan, dengan output: penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal, percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan dan penataan kawasan industri, serta pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku d. Pengembangan kemitraan usah Pelebaran Jalan Akses Bandar Udara Morowali a dan rantai pasok, dengan output: kerjasama sektor industri kecil, menengah, dan aneka, fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan, pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar di KI Prioritas, dan inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri e. Penyediaan pendidikan dan pelatihan, dengan output: pembangunan gedung dan penyediaan peralatan pendidikan tinggi vokasi industri f. Pengembangan industri nikel sulfat, dengan output: penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel g. Pembangunan industri baterai, dengan output: fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor serta perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi h. Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan output: fasilitasi industri dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan restrukturisasi mesin/peralatan sentra IKM dan UPT logam, mesin, elektronika, dan alat angkut i. Pengembangan industri stainless steel, dengan output: monitoring dan evaluasi perkembangan industri, fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri j. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional, dengan output: penurunan emisi Gas Rumah Kaca,

No	Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan
		pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau k. Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan output: penguatan standarisasi untuk hilirisasi
A4	Kawasan Hilirisasi Gas Bumi Sulawesi Tengah A4: Kabupaten Banggai	Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai, melalui: a. Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi, dengan output: fasilitasi pembangunan infrastruktur regasifikasi gas bumi dan Liquefied Natural Gas (LNG) terminal serta dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi b. Transformasi kebijakan ekosistem investasi dan hilirisasi, dengan output: fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi serta penyusunan rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi
B1 B2 B3 B4 B5 B6	Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Sulawesi Tengah B1: Kabupaten Sigi B2: Kabupaten Donggala B3: Kabupaten Poso B4: Kabupaten Parigi Moutong B5: Kabupaten Buol B6: Kabupaten Tolitoli	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli, melalui: a. Penguatan konektivitas jalan, dengan output: preservasi ruas jalan Tolai– Sausu di Kabupaten Parigi Moutong dan Tagolu–Tentena di Kabupaten Poso b. Pemanfaatan sarana prasarana pendukung produksi pertanian, dengan output: penyediaan sarana prasarana pascapanen pertanian serta alat dan mesin pertanian pra panen c. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), dan gangguan lainnya, dengan output: pelatihan kelompok tani dan pembentukan regu pengendalian OPT d. Peningkatan mutu produk, dengan output: sertifikasi produk mutu pestisida dan pelatihan kelompok tani e. Penguatan regenerasi petani, dengan output: pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur, pelatihan pertanian bagi non aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, serta pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian f. Pelaksanaan bantuan langsung petani, dengan output: pemberian bantuan langsung petani untuk pembelian pupuk serta layanan validasi dan verifikasi pupuk g. Teknologi pertanian, dengan output: pembangunan irigasi perpipaan pertanian, pembangunan irigasi perpompaan pertanian, pengembangan jaringan irigasi pertanian, serta pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim h. Akses pembiayaan inklusif, dengan output: fasilitasi/pembinaan/pendampingan akses pembiayaan, penyediaan asuransi pertanian, serta fasilitasi dan pembinaan investasi i. Efisiensi rantai nilai, dengan output: fasilitasi pembinaan dan pendampingan efisiensi rantai nilai j. Pengembangan hilirisasi kelapa, dengan output: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, neraca komoditas kelapa dan produk turunannya, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, inkubasi koperasi, pengembangan industri pengolahan kelapa, restrukturisasi mesin/peralatan industri, dan pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro
B7 B8	Kawasan Perikanan dan Hilirisasi	Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala,

No	Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan
B9 B10 B11	Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) B7: Kabupaten Parigi Moutong B8: Kabupaten Donggala B9: Kabupaten Morowali B10: Kabupaten Banggai Laut B11: Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: a. Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: pengembangan Pelabuhan Bungin di Kabupaten Banggai Laut dan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan b. Penguatan konektivitas udara, dengan *output*: optimalisasi serta peningkatan layanan dan prasarana Bandara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut c. Pengembangan input produksi perikanan, dengan *output*: penyaluran benih ikan dan penyaluran calon induk unggul ikan d. Pengembangan sarana produksi perikanan, dengan *output*: penyaluran sarana penangkapan dan budidaya ikan e. Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan *output*: bantuan sarana pengembangan usaha nelayan, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, dan pendanaan usaha nelayan
B12	Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah B12: Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: a. Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: Pengembangan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan b. Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan *output*: fasilitasi rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, penyaluran bibit rumput laut, dan penyaluran sarana budi daya rumput laut
C1 C2	C1 - Kawasan Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una C2 - Kawasan Lore Lindu (Situs Megalit dan Geopark Danau Poso), Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi;	• Menuju Destinasi yang ditetapkan secara nasional • Peningkatan jaringan promosi dan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri • Pengembangan Industri pariwisata dan ekonomi kreatif • Pendampingan terhadap destinasi unggulan • Pembangunan Fasilitas dasar (Listrik, air bersih, jalan, dermaga) • Pembangunan Fasilitas di destinasi (Toilet, Klinik Kesehatan, Internet, Fasilitas Disabilitas, Tempat Ibadah, Jasa Akomodasi, Jasa Makan Minum, Galeri Cenderamata) • Peningkatan armada untuk konektivitas laut/pulau (Kapal wisata, speedboat) • peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wisata berkelanjutan khususnya dalam menangani kebersihan dan pengelolaan sampah • Tenaga kerja pariwisata dan Ekraf yang sesuai Standard Kerja Kompetensi Nasional
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas D1: Kabupaten Morowali Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Morowali, melalui:	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Morowali, melalui: a. Penyediaan layanan dasar, dengan *output*: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat b. Peningkatan aksesibilitas, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/*Lastmile* dan akses internet c. Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan d. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal ekowisata, dengan *output*: preservasi dan resiliensi adat istiadat

No	Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan
		budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim. e. Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis digital, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD
D2 D3	Kecamatan Perbatasan Prioritas D2: Kec.Paleleh Barat, Kec. Gadung, Kec. Bokat, Kec. Biau, dan Kec. Karamat, Kabupaten Buol D3: Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean, dan Kec. Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas
D4 D5 D6	Kawasan Transmigrasi (KT) D4: KT Tampolore, Kabupaten Poso D5: KT Bungku, Kabupaten Morowali D6: KT Palolo, Kabupaten Sigi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tampolore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, dan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, melalui: a. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman b. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian c. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi d. Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output: perpindahan dan penempatan transmigran
E1 E2 E3 E4 E5 E6	Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah E1: Lore Lindu, Kabupaten Sigi E2: Taman Nasional Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una E3: Kabupaten Banggai E4: Kabupaten Banggai Kepulauan E5: Kabupaten Banggai Laut E6. Kabupaten Tolitoli	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional (TN) Lore Lindu serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di TN Togean, Kabupaten Banggai, Tolitoli, melalui: a. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan output: penyusunan kebijakan penguatan pengelolaan areal dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), fasilitasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati untuk peningkatan efektivitas pengelolaan, serta pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi b. Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut, dengan output: penyusunan kebijakan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di daerah serta pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut c. Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil, dengan output: bantuan ekonomi produktif pesisir dan pulau-pulau kecil, dokumentasi data dan informasi potensi pesisir dan pulau-pulau kecil serta prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil d. Penguatan tata kelola industri, wisata bahari, dan jasa kelautan berkelanjutan, dengan output: fasilitasi pemetaan potensi biofarmakologi dan pemanfaatan air laut, penyusunan kebijakan berusaha jasa kelautan serta pengelolaan wisata bahari

No	Lokasi Prioritas	Arah Pembangunan
		e. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan output: rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove, pemulihan padang lamun / terumbu karang serta penyediaan prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil f. Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output: fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu E7: Kota Palu	Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa Palukoro, Matano, dan Saluki di Kota Palu, melalui: a. Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana dan peningkatan infrastruktur, dengan output: penguatan instrumen peringatan dini dan sistem informasi bidang kebencanaan b. Peningkatan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan output: peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan tanggap bencana, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam, serta pembinaan penguatan respond system peringatan dini bencana berbasis masyarakat c. Peningkatan infrastruktur, dengan output: penataan bangunan dan *Infrastructure Reconstruction Sector Loan* (IRSL) Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik d. Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

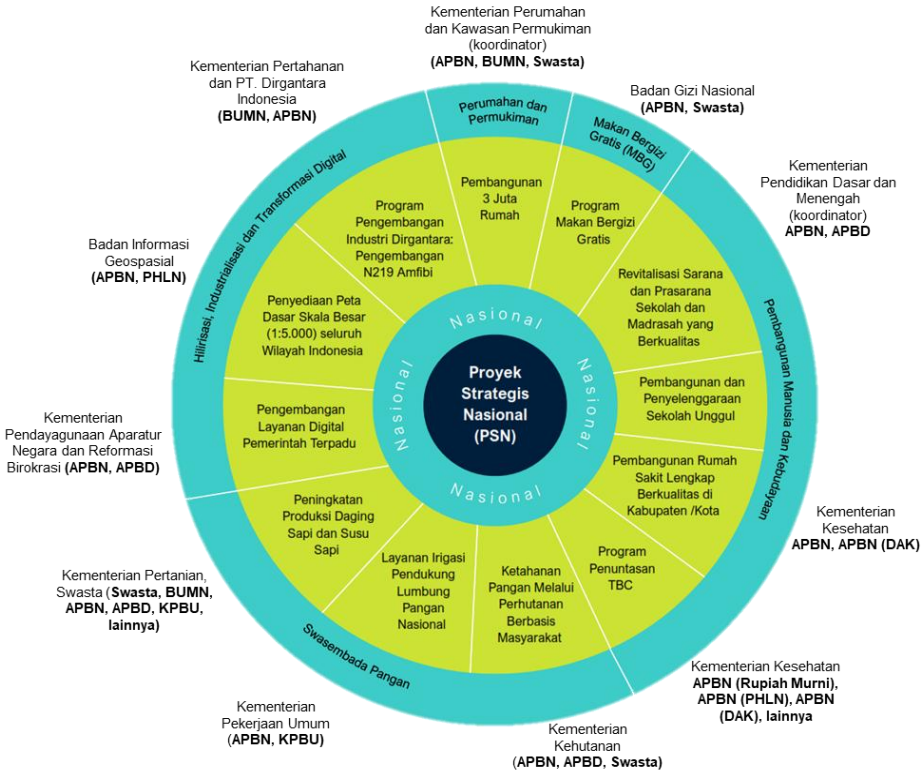
Sinergi dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Pembangunan kewilayahan tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara spasial, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan konektivitas kawasan. Oleh karena itu, sinergi dan dukungan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam bentuk:

a. Dukungan penyediaan lahan pada lokasi yang akan diintervensi.
b. Penyiapan dukungan masyarakat untuk meminimalisir dampak sosial.
c. Penyiapan RTRW/RDTR serta kelengkapan dokumen lainnya.
d. Percepatan perizinan yang menjadi kewenangan Pemda
e. Optimalisasi penganggaran (termasuk dana desa)
f. Penyiapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.
g. Penetapan kawasan pemukiman/perkotaan di kawasan pertumbuhan.

3.2.4 Dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN)

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

Dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional, pemerintah dapat memberikan kemudahan baik dalam bentuk perizinan maupun non perizinan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.



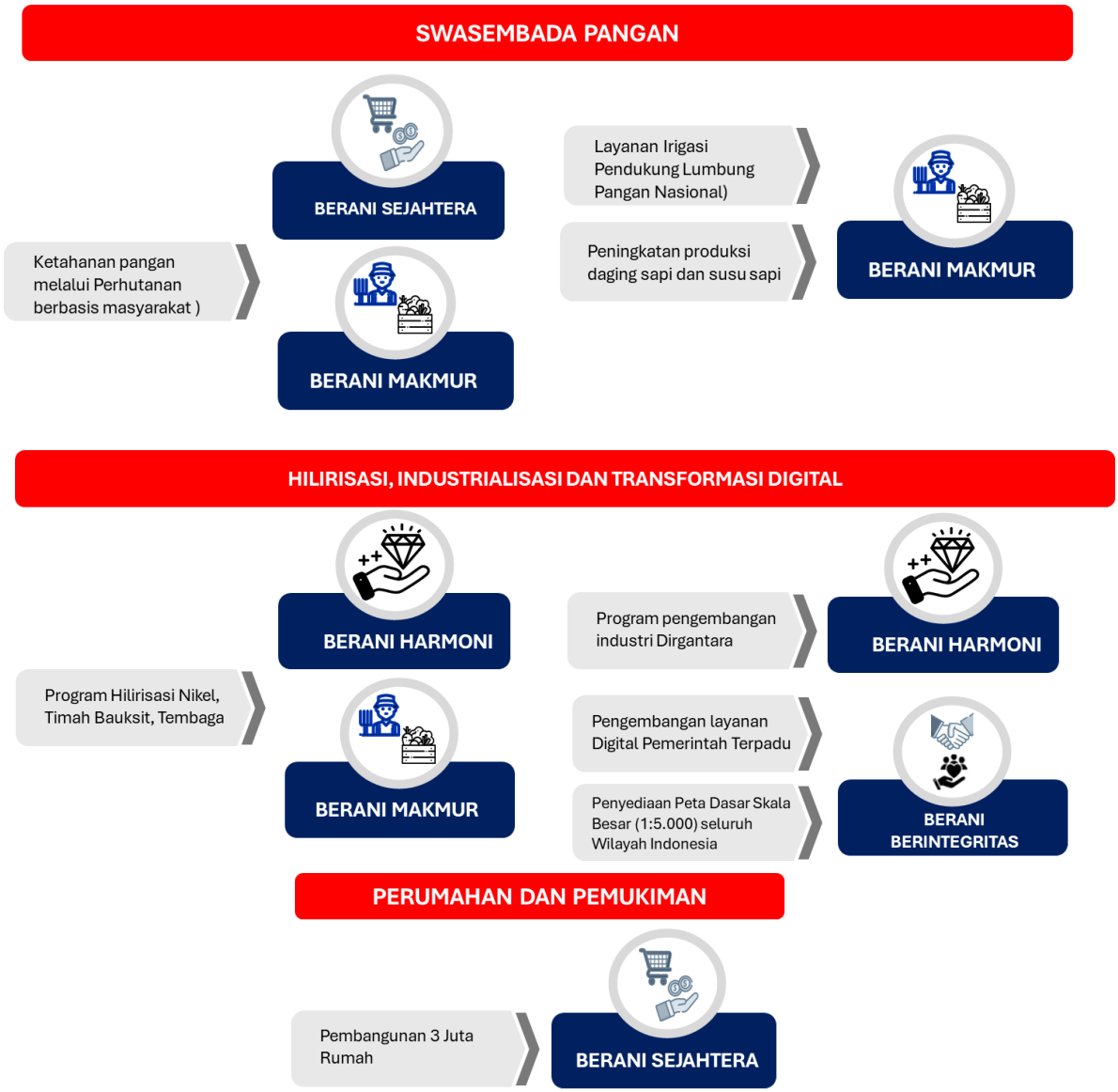
Gambar 3.20
Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dukungan ini mencakup berbagai proyek yang menjadi prioritas pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, serta balita. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif sejak dini, dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan dalam mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, serta program hilirisasi sumber daya alam yang bernilai tambah. Proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperluas akses terhadap layanan dasar yang berkualitas. Keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi PSN di tingkat regional.

Dalam pelaksanaan PSN dimaksud tersebut, diperlukan harmonisasi dan penyelarasan dengan program prioritas daerah sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.





Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, Analisis Tim Penyusun, 2025

Gambar 3.21
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

3.2.5 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2043

Selain arah kebijakan diatas, terdapat juga arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Sulawesi Tengah emas yakni Pembangunan berbasis klaster. Pembangunan dilakukan berbasis klaster perwilayahan seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 - 2042, yaitu:

a. **Klaster Perkotaan Pasigala** meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi;
b. **Klaster Agropolitan** yaitu **Agropolitan Bolipamuso** dan **Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara**. Agropolitan Bolipamuso meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso; Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
c. **Klaster Industri Morubang** meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; dan
d. **Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju** meliputi sebagian Kabupaten Bangai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una.



Gambar 3.22
Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah sebagai upaya meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tujuan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri,

pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis mitigasi bencana.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah tersebut didapat ditempuh melalui: Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik Sulawesi Tengah. Serta Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah dengan tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Pencapaian tersebut ditandai dengan **menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Tengah serta meningkatnya pelayanan dasar perumahan** (air minum, sanitasi layak, rumah layak huni korban bencana, penanganan Kawasan kumuh dan ketersediaan listrik) **dan pekerjaan umum** (kemantapan jalan)

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi)

   Arahan konsep pengembangan perkotaan Pasigala adalah sebagai berikut:

   a. Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi
   b. Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala
   c. Peningkatan sistem jaringan regional pada kawasan rawan bencana rendah dan kawasan bencana sedang
   d. Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional
   e. Pengembangan kota palu sebagai kota taman bumi atau Palu Geoprak city dengan fungasi utama perdagangan, jasa dan industri, pendidikan dan riset kebencanaan, unggulan pariwisata berbasis geowisata dengan mitigasi bencana (Ripparkot Palu)
   f. Pengembangan sarana dan parasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala
   g. Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Agropolitan Bolipamuso dan KPN

   Arahan konsep pengembangan Wilayah Klaster Agropilitas dan KPN adalah sebagai berikut:

   a. Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala;
   b. Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu: (1) Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata.
   c. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara;
   d. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata.
   e. Percepatan pengembangan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli.

3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Morubang (Morowali, Morowali Utara, dan Banggai), Arahan konsep pengembangan Wilayah Morubang adalah sebagai berikut:

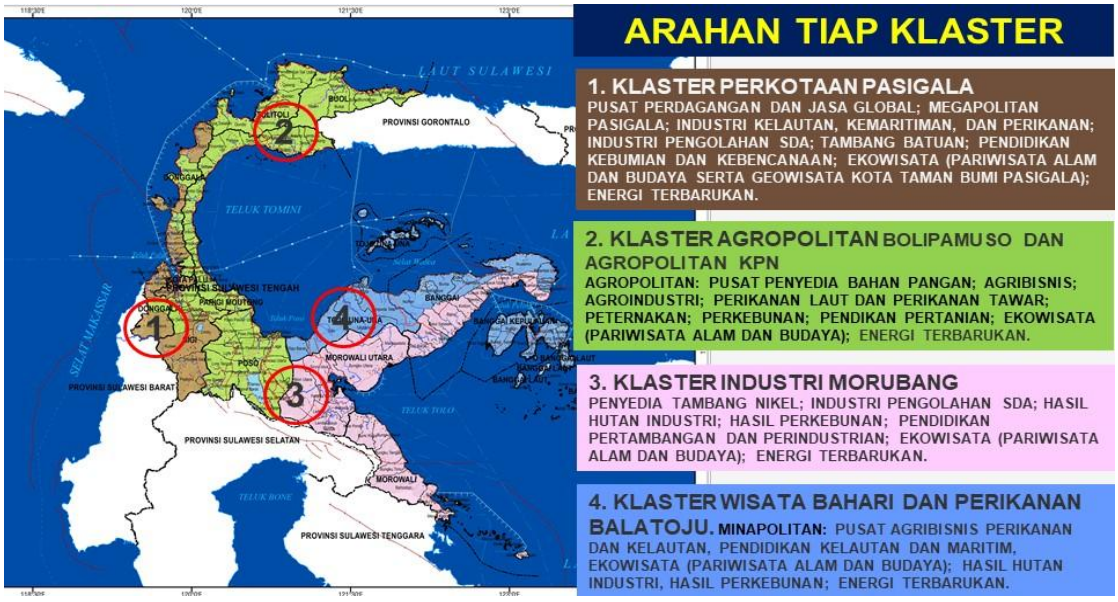
   a. Pengembangan kawasan industri memiliki dampak *multiplier efect* terhadap pengembangan permukiman dan pusat kegiatan;
   b. Hilirisasi perindustrian memerlukan aksesibilitas yang terpadu
   c. Penggunaan sabuk hijau terhadap pengembangan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan lindung
   d. Pengembangan sempadan pantai; dan
   e. Pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.

4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Balatoju (sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una)

   Arahan konsep pengembangan Wilayah Klaster Balatoju adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas obyek wisata bahari; pengembangan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana;
b. Pembuatan suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran;
c. Penetapan kawasan perlindungan setempat;
d. Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari;
e. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan
f. Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.

Upaya Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui pembangunan perwilayahan yang dielaborasi dari RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, kebutuhan pembangunan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penunjang ekonomi IKN, dan upaya pengembangan Sulawesi Tengah untuk mencapai Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045. Gambar berikut memperlihatkan arah kebijakan Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.



Gambar 3.23
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 Berdasarkan 4 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Detail dari Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 terdiri atas 3 Pilar yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. **Sulawesi Tengah** sebagai **Pusat Ekonomi Global KTI**
2. **Sulawesi Tengah** sebagai **Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA**
3. **Sulawesi Tengah** sebagai **Wilayah Indonesia yang Hijau, Ekologis, dan Produktif**

Tabel berikut memperlihatkan penerapan 3 Pilar Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045.

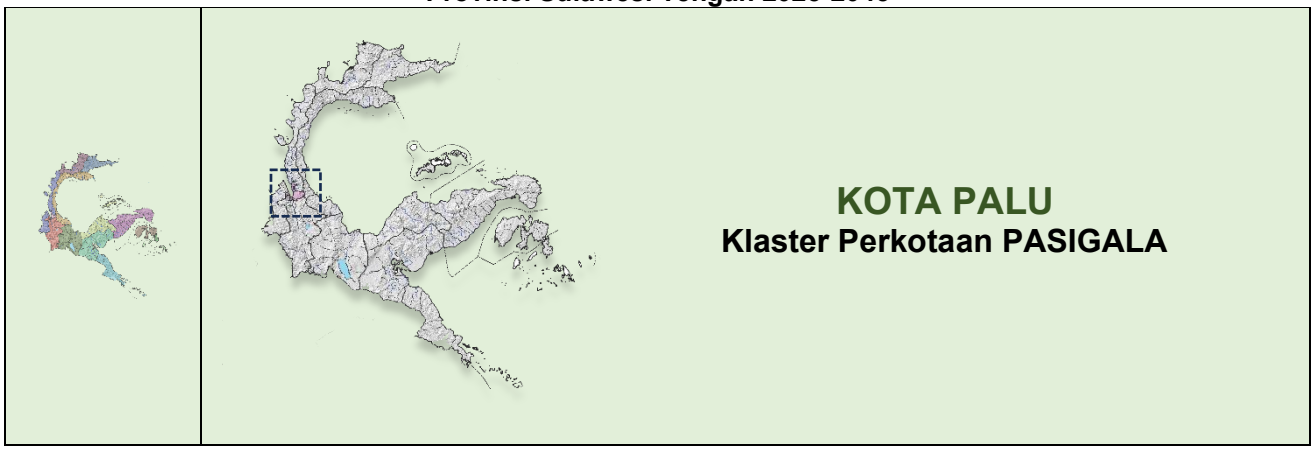
Tabel 3.25
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 untuk Indonesia Emas

	01. Kota Palu 02. Kabupaten Sigi 03. Kabupaten Donggala 04. Kabupaten Buol 05. Kabupaten Toli-Toli 06. Kabupaten Parigi Moutong 07. Kabupaten Poso 08. Kabupaten Morowali 09. Kabupaten Morowali Utara 10. Kabupaten Banggai 11. Kabupaten Banggai Kepulauan 12. Kabupaten Banggai Laut 13. Kabupaten Tojo Una-Una

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TENGAH 2025-2045
1	**SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Stabilitas • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Produktivitas Agropolitan berbasis Pertanian Moderen di BOLIPAMUSO, KPN • Minapolitan BALATOJU Berkelanjutan • Produktivitas Industri MORUBANG dan KEK PALU • Metropolitan PASIGALA pusat layanan perkotaan dan ekonomi global •*Geopark City* (Kota Taman Bumi) PASIGALA • Layanan kesehatan, RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Perdagangan dan jasa global • Layanan jasa pariwisata skala global.
2	**SULAWESI TENGAH** sebagai **PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA** **Pengembangan** • **Kawasan-Kawasan Agropolitan dan Minapolitan** dengan konsep Pertanian Moderen dengan produk: tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan • **Kawasan-Kawasan Industri** yang produktif dan dan KEK dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup • **Kawasan-Kawasan Pariwisata (KSP dan KPP).** **Produk:** • Hasil pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan; Hasil industri berbasis SDA; Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
3	**SULAWESI TENGAH** sebagai **WILAYAH INDONESIA YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF** **Penerapan**: Ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi; Mitigasi Bencana, Kota Hijau, dan Taman Bumi untuk pengembangan wilayah, kota yang aman, produktif dan berkelanjutan; pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan. **Pengembangan**: Industri dan penggunaan energi terbarukan; transportasi publik ramah lingkungan dan terintegrasi antar wilayah; Riset ekologi, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, kebumian dan kebencanaan bertaraf internasional; Riset khusus pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil Sulawesi Tengah; Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan; Peningkatan luasan RTH Publik dan RTH Privat pekarangan masyarakat, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, mengembangkan hutan produksi; Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, dan Produktif; Peningkatan kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK; Penguatan karakter dan jati diri sebagai wilayah yang hijau, ekologis, dan produktif.

Setiap wilayah memiliki kekhususan arah pengembangan wilayahnya. Tabel-tabel berikut memperlihatkan penerapan 3 Pilar Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 berdasarkan setiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.26
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PALU 2025-2045
1	**KOTA PALU** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, INDUSTRIALISASI KEMARITIMAN PERIKANAN DAN KELAUTAN, LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PARIWISATA BERTARAF INTERNASIONAL)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum • Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan yang kuat dan mengayomi warga • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Metropolitan PASIGALA • Produktivitas KEK PALU, Ekraf, UMKM, Korporasi Masyarakat Sertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Pusat perdagangan dan jasa global • Kerjasama riset pariwisata, kebumian dan kebencanaan bertaraf internasional • Sekolah vokasi, pendidikan tinggi kebumian, kebencanaan, mitigasi, dan pariwisata • Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global.
2	**KOTA PALU** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Perdagangan, Industri, dan Jasa Hulu-hilir hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, industrialisasi kemaritiman, kelautan dan perikanan, hasil hutan produksi, industri berbasis SDA, layanan pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
3	**KOTA PALU** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi • Pengembangan sebagai Kota Tangguh, Kota Pintar, Kota Taman Bumi (*Geopark City)*: konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan *Geopark* PASIGALA • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan energi terbarukan (matahari) • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kota Palu terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kaawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Peremajaan Pohon Kelapa di

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PALU 2025-2045
	Wilayah Pesisir • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.27
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sigi
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SIGI 2025-2045
1	**KABUPATEN SIGI** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (**PERDAGANGAN DAN JASA - AGROPOLITAN KPN: AGRIBISNIS dan AGROINDUSTRI; PARIWISATA)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum • Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Wilayah perkotaan sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Pusat Perdagangan dan jasa global • Agropolitan KPN berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perdagangan internasional, dan jasa lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi *smart farming* dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	**KABUPATEN SIGI** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA.
	Perdagangan dan jasa: kesehatan, pendidikan, pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan **(PERKOTAAN PASIGALA); Produksi**: Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, hutan produksi, pariwisata **(Agropolitan KPN).**
3	**KABUPATEN SIGI** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh, Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana *Geopark* PASIGALA; Penanganan eks area bencana • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik **Klaster Perkotaan PASIGALA**. • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Kebun Raya Sigi • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.28
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN DONGGALA 2025-2045
1	**KABUPATEN DONGGALA** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (PERDAGANGAN DAN JASA, AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI DAN PARIWISATA).
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah **<u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u>** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kota Donggala sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Perdagangan dan jasa global • Kawasan Agropolitan dan KPN berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • Produktivitas: EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset komoditas kelapa dan kakao, perdagangan internasional, jasa lingkungan, investasi dan pengembangan agropolitan Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi *smart farming* dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata Kabupaten Donggala terkoneksi dengan layanan pariwisata PASIGALA • Pengelolaan untuk kerja sama lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Pasar tematik dan ruang-ruang publik yang representatif di tiap kecamatan.
2	**KABUPATEN DONGGALA** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA.
	<u>Perdagangan dan Jasa</u> : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industrialisasi kemaritiman, perikanan dan kelautan. Hasil hutan produksi, layanan pendidikan, kesehatan, dan pariwisata **(Perkotaan PASIGALA); <u>Produksi</u>:** Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat hutan produksi, layanan pariwisata **(Agropolitan KPN)**.
3	**KABUPATEN DONGGALA** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi • Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh; Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana *Geopark* PASIGALA; Penanganan eks area bencana • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik **Klaster Perkotaan PASIGALA** • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Peremajaan pohon kelapa di wilayah pesisir • Penataan dan pengelolaan kawasan wisata: Kota Tua Donggala, *Sunset City* • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.29
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

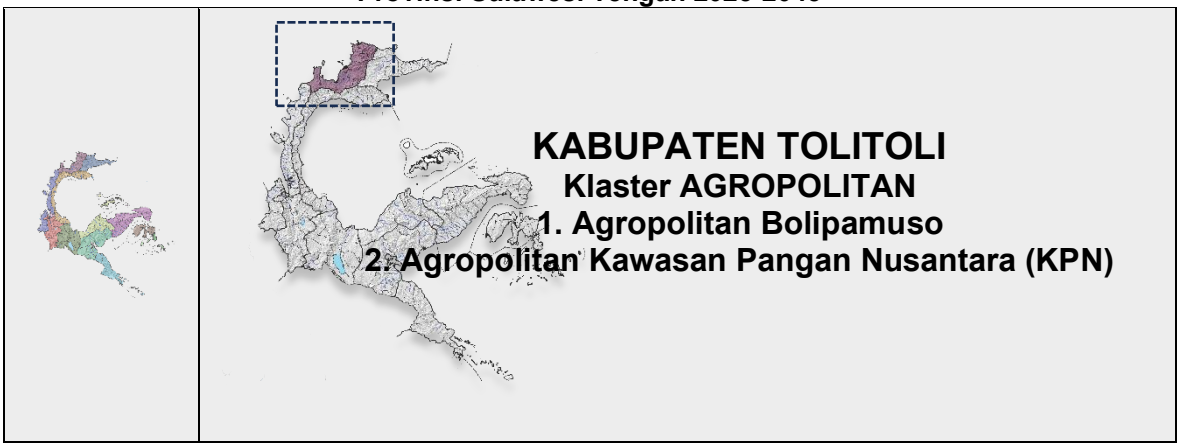




KABUPATEN BUOL
Klaster AGROPOLITAN
1. Agropolitan Bolipamuso
2. Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BUOL 2025-2045
1	**KABUPATEN BUOL** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi agribisnis pertanian, perikanan, peternakan)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan, perkebunan • Sekolah vokasi *smart farming* dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	**KABUPATEN BUOL** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Suplai produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dan layanan pariwisata.
3	**KABUPATEN BUOL** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di **Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO** • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura). Pengembangan Kebun Raya Buol • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

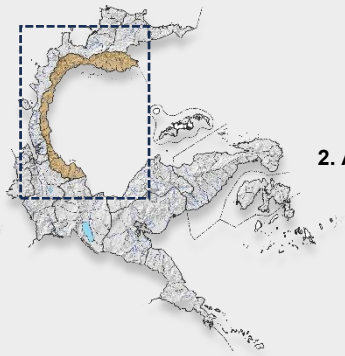
Tabel 3.30
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tolitoli
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI 2025-2045
1	**KABUPATEN TOLITOLI** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi agribisnis pertanian, agroindustri)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan, perkebunan • Sekolah vokasi *smart farming* dan lingkungan• Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	**KABUPATEN TOLITOLI** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Suplai produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.
3	**KABUPATEN TOLITOLI** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di **Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO** • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan agrowisata dan agroindustri cengkeh • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.31
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

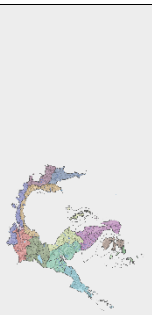


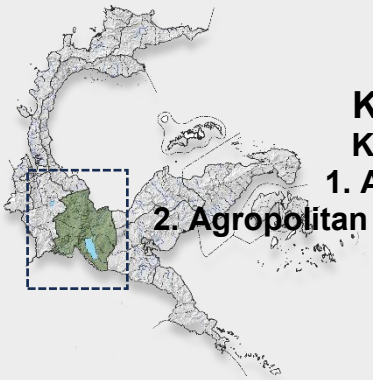


KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Klaster AGROPOLITAN
1. Agropolitan Bolipamuso
2. Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2025-2045
1	**KABUPATEN PARIGI MOUTONG** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI:** AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi pertanian dan agribisnis.
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan • Sekolah vokasi *smart farming* dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	**KABUPATEN PARIGI MOUTONG** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Suplai produk **:** Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industrialisasi kemaritiman, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.
3	**KABUPATEN PARIGI MOUTONG** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di **Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO** • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Wisata Pertanian Tanaman Pangan dan Agrowisata Durian • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.32
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Poso
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

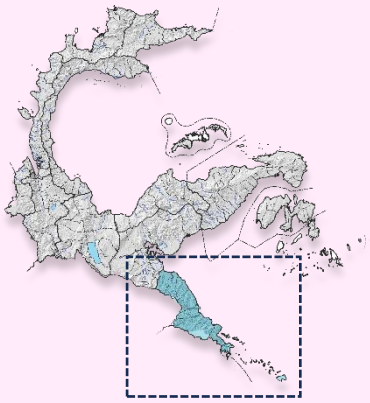




KABUPATEN POSO
Klaster AGROPOLITAN
1. Agropolitan Bolipamuso
2. Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)

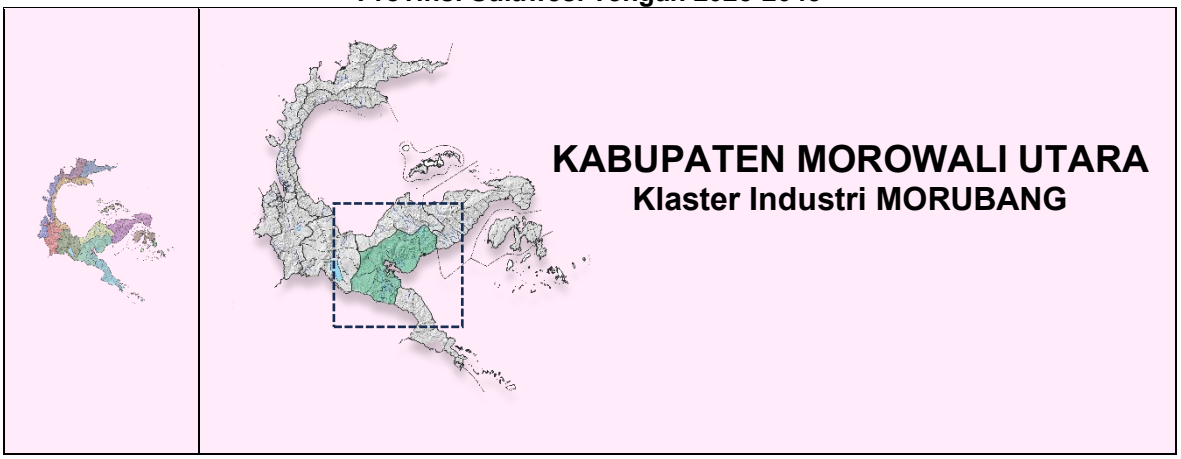
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN POSO 2025-2045
1	**KABUPATEN POSO** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI:** AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi pertanian, agribisnis, dan agroindustri
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan. Sekolah vokasi pertanian, agribisnis dan agroindustri • Riset pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil• Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi •Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	**KABUPATEN POSO** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA:
	Produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.
3	**KABUPATEN POSO** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Pengembangan **Negeri 1000 Megalit** dan ***Geopark* Danau Poso** • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di **Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO** • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan **Wisata Tanaman Hortikultura Lembah Napu** dan Sekitarnya • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif •Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.33
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 **KABUPATEN MOROWALI** **Klaster Industri MORUBANG**

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI 2025-2045
1	**KABUPATEN MOROWALI** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (INDUSTRI, PARIWISATA, SEKOLAH VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** Kawasan industri berkelanjutan: • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset pertambangan dan industri berkelanjutan • Riset dan pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi pertambangan dan industri • Layanan jasa pariwisata MORUBANG.
2	**KABUPATEN MOROWALI** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG
3	**KABUPATEN MOROWALI** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

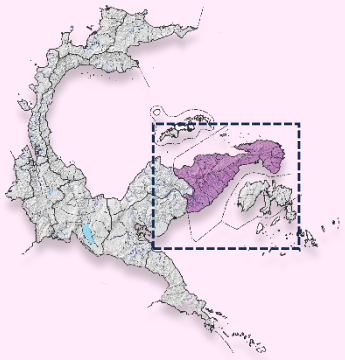
Tabel 3.34
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Morowali Utara
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2025-2045
1	**KABUPATEN MOROWALI UTARA** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (INDUSTRI, PARIWISATA, SEKOLAH VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI INDUSTRI)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** Kawasan industri berkelanjutan: • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset pertambangan dan industri berkelanjutan Riset dan pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi industri • Layanan jasa pariwisata MORUBANG berkelanjutan
2	**KABUPATEN MOROWALI UTARA** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG
3	**KABUPATEN MOROWALI UTARA** SEBAGAI WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang • Pengembangan dan Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi •Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan •Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.35
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

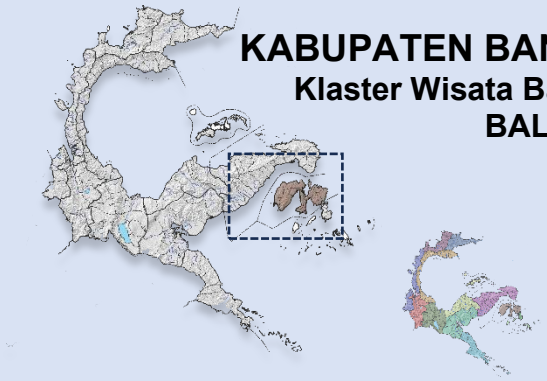




KABUPATEN BANGGAI
Klaster Industri MORUBANG
Klaster Wisata Bahari dan Perikanan
BALATOJU

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI 2025-2045
1	**KABUPATEN BANGGAI** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (**MORUBANG**: Industri, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan; **BALATOJU**: Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan** Kawasan industri berkelanjutan: • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset industri, perikanan dan kelautan, dan lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi lingkungan, kelautan dan perikanan • Layanan jasa pariwisata MORUBANG-BALATOJU.
2	**KABUPATEN BANGGAI** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG-BALATOJU.
3	**KABUPATEN BANGGAI** SEBAGAI BAGIAN WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang di Klaster Industri MORUBANG • Pengembangan Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.36
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2025-2045
1	**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan Kawasan Minapolitan** Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan **Pengembangan** UMKM, EKRAF, dan Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Minapolitan • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Banggai Kepulauan terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU
2	**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Produk : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU
3	**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN** SEBAGAI BAGIAN WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau, Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis • Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.37
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI LAUT 2025-2045
1	**KABUPATEN BANGGAI LAUT** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan Kawasan Minapolitan** Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan **Pengembangan** • UMKM, EKRAF, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan 178awasan178a dan 178awasan178an taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Banggai Laut terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU
2	**KABUPATEN BANGGAI LAUT** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA.
	Produk : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU.
3	**KABUPATEN BANGGAI LAUT** SEBAGAI BAGIAN WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau; Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis; Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi 178awasa ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas 178awasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

Tabel 3.38
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045





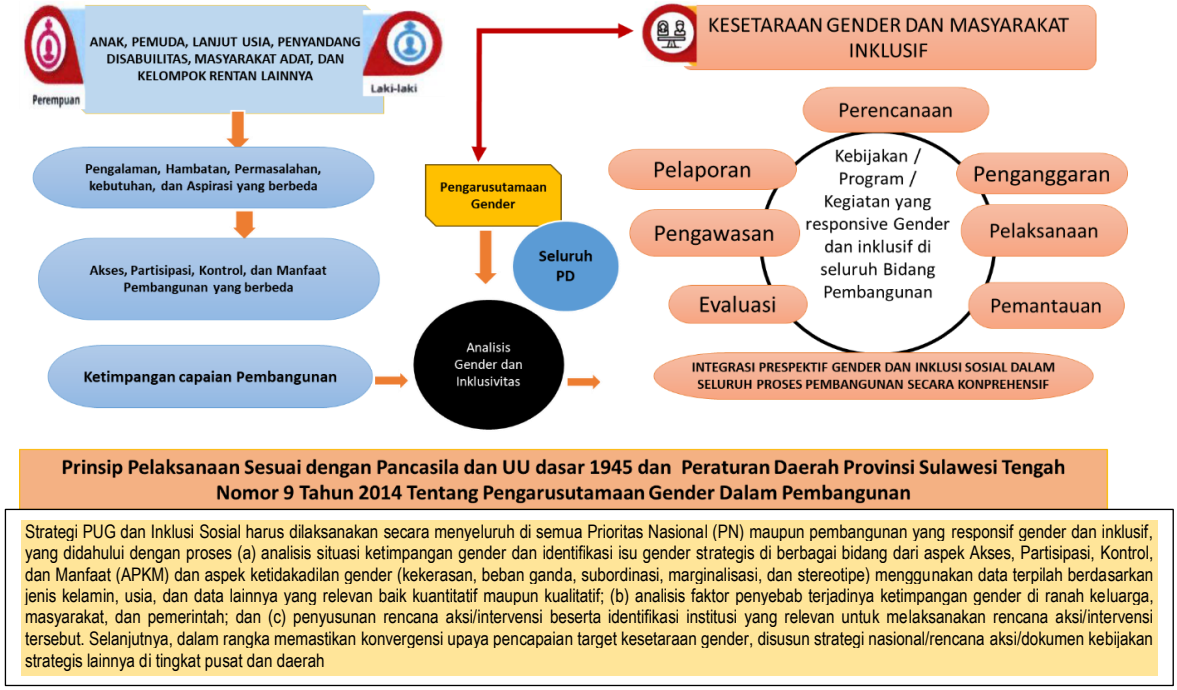
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Klaster Wisata Bahari dan Perikanan
BALATOJU

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2025-2045
1	**KABUPATEN TOJO UNA-UNA** Mendukung **SULAWESI TENGAH** sebagai **PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI** (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. **Pengembangan Kawasan Minapolitan** Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan **Pengembangan** • UMKM, EKRAF, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Tojo Una-Una terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU.
2	**KABUPATEN TOJO UNA-UNA** MENDUKUNG **SULAWESI TENGAH** SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Produk : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU.
3	**KABUPATEN TOJO UNA-UNA** SEBAGAI BAGIAN WILAYAH **SULAWESI TENGAH** YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau; Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis • Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim yang unik, fungsional, atraktif, dan menarik wisatawan • Pengembangan Kepulauan Togean sebagai destinasi wisata super prioritas nasional yang ramah lingkungan • Peengembanghan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai *landmark* Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

3.2.6 Program Lintas Perangkat Daerah dan Kewilayahan

1. Cross Cutting Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan

Disadari atau tidak, persoalan ketidakadilan gender sudah merasuk ke semua aspek kehidupan. Ketidakadilan pada satu aspek tidak lagi berdiri sendiri, tetapi berkelin dan dengan ketidak adilan pada aspek yang lain, sehingga dalam perumusan pemecahan masalahnya harus secara komperehensif dan sinergis. Di sinilah pentingnya menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial pada dasarnya bertujuan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat—baik laki-laki maupun perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok rentan lainnya—memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan. Konsep ini menuntut agar setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan memasukkan perspektif gender dan inklusivitas. Dengan demikian, potensi terjadinya ketimpangan akibat perbedaan kebutuhan, hambatan, maupun aspirasi dapat diminimalisasi, sekaligus memastikan hasil pembangunan dirasakan secara adil dan merata. Salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan antara lain 'Alur Kerja Analisis Gender' atau *Gender Analysis Pathway* (GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.



Gambar 3.24
***Cross Cutting* Pengarustamaan Gender**

Pada prinsipnya, PUG dan pemberdayaan perempuan sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks otonomi daerah, PUG tetap menjadi isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan, program dan kegiatan semua sektor manifestasi PUG dapat berwujud kegiatan khusus perempuan maupun tercermin dari indikator kinerja hasil sektor. Dengan kata lain, implementasi strategi PUG menjadi tanggungj awab seluruh Perangkat Daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah Sulawesi Tengah, penerapan PUG sejalan dengan arah kebijakan dan program prioritas yang dirumuskan dalam RPJMD. Melalui integrasi PUG, setiap program prioritas tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik semata, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, PUG berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat efektivitas program, memperluas dampak positif pembangunan, serta menjamin agar 9 Program Prioritas “Berani” benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Adapun wujud keterkaitan antara penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender dengan program program priroritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Berani Cerdas; konsep PUG terlihat dari upaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah perempuan, memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, serta mendorong partisipasi sekolah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
2. Berani Sehat; PUG terwujud melalui layanan kesehatan yang responsif gender, seperti pencegahan dan penurunan stunting pada anak perempuan dan laki-laki, layanan kesehatan reproduksi remaja, serta penyediaan fasilitas kesehatan ramah disabilitas dan inklusif bagi ibu hamil maupun lansia.
3. Berani Sejahtera; Perspektif gender tampak dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pelatihan UMKM yang menjangkau perempuan dan pemuda, serta program bantuan pangan bergizi yang memperhatikan kebutuhan gizi anak dan perempuan.
4. Berani Lancar; PUG diintegrasikan melalui pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, dan akses air bersih yang memperhatikan kebutuhan perempuan,

anak, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana ekonomi.

5. Berani Menyala; Konsep inklusivitas hadir dengan penyediaan listrik dan jaringan internet di desa terpencil, yang mendukung akses pendidikan daring bagi anak perempuan dan laki-laki, sekaligus membuka kesempatan ekonomi digital bagi kelompok muda dan perempuan perdesaan.
6. Berani Makmur; PUG terwujud dalam pemberdayaan petani milenial yang melibatkan perempuan dan pemuda, akses subsidi pupuk dan alsintan yang merata, serta perlindungan sosial bagi nelayan perempuan, petani kecil, dan kelompok rentan di sektor pertanian-perikanan.
7. Berani Berkah; Kesetaraan gender tampak dalam pemberian insentif bagi guru mengaji, tokoh agama, marbot, dan pemangku adat tanpa membedakan gender, serta dukungan terhadap lembaga keagamaan yang inklusif dan berperan dalam membangun harmoni sosial lintas kelompok.
8. Berani Harmoni; PUG mendukung pariwisata partisipatoris yang melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok adat lokal; pengembangan UMKM kreatif yang memberi ruang bagi perempuan pelaku usaha; serta penciptaan wirausaha baru yang mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.
9. Berani Berintegritas; PUG diimplementasikan melalui layanan publik yang transparan, digital, dan ramah terhadap kebutuhan kelompok rentan; peningkatan kapasitas ASN dengan perspektif gender; serta budaya birokrasi bersih yang memberi ruang partisipasi setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam pemerintahan.

2. Cross Cutting Program Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S)

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Strategi ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada 2029 dan 5% pada 2045 melalui penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta perbaikan sistem tata kelola, layanan, dan perilaku masyarakat. Target dan pendekatan ini merupakan kelanjutan

dari hasil evaluasi program 2018–2024. Pelaksanaan program sebelumnya menunjukkan sejumlah tantangan seperti lemahnya koordinasi, kurangnya pemahaman lintas sektor, ego sektoral, serta keterbatasan dalam konvergensi dan cakupan layanan. Evaluasi tahun 2024 memberikan pelajaran penting bahwa pencegahan harus lebih diutamakan dibanding hanya penanganan kasus stunting yang sudah terjadi. Selain itu, integrasi sistem pemantauan dan evaluasi serta penguatan kapasitas pelaksana di daerah menjadi prioritas perbaikan ke depan.

Stranas P3S dibangun di atas enam pilar strategi: komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi program dan kemitraan, ketahanan pangan dan gizi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pemantauan dan evaluasi. Enam pilar ini dioperasionalkan melalui perencanaan berbasis data, advokasi politik lintas level, pelibatan multisektor, hingga mekanisme insentif untuk kinerja daerah.

Kelompok sasaran intervensi terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas; anak usia 0 – 23 bulan; anak usia 24 – 59 bulan; remaja putri dan calon pengantin; keluarga dan masyarakat. Intervensi diarahkan untuk menjamin cakupan layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, air bersih, serta perubahan perilaku yang berkelanjutan. Konvergensi layanan dipastikan melalui sinkronisasi program pusat, daerah, hingga desa, serta pelibatan lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pendekatan wilayah dan rumah tangga digunakan untuk menjangkau sasaran prioritas secara lebih tepat dan efektif.

Untuk mengatasi prevalensi stunting yang masih tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan program prioritas yang menyentuh akar permasalahan secara sistemik, komprehensif, dan terukur. Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Penanggulangan Stunting tidak bisa diselesaikan dengan satu sektor saja tetapi harus multi sektor atau dilakukan dengan lintas perangkat daerah. Salah satu aspek krusial yang perlu diperkuat adalah sistem dan tata kelola data stunting. Saat ini, banyak kabupaten/kota masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan konsistensi data keluarga berisiko stunting, termasuk ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi perlu mendorong penguatan integrasi dan pemutakhiran data berbasis *by name by address* yang dilakukan secara berkala dan lintas sektor. Verifikasi lapangan, validasi bersama

desa/kelurahan, serta integrasi data midsalnya antara dari BKKBN (Elsimil) dan Kemenkes (e-PPGBM), dan Data Tunggal Sosiael Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjadi dasar untuk memastikan setiap intervensi tepat sasaran.

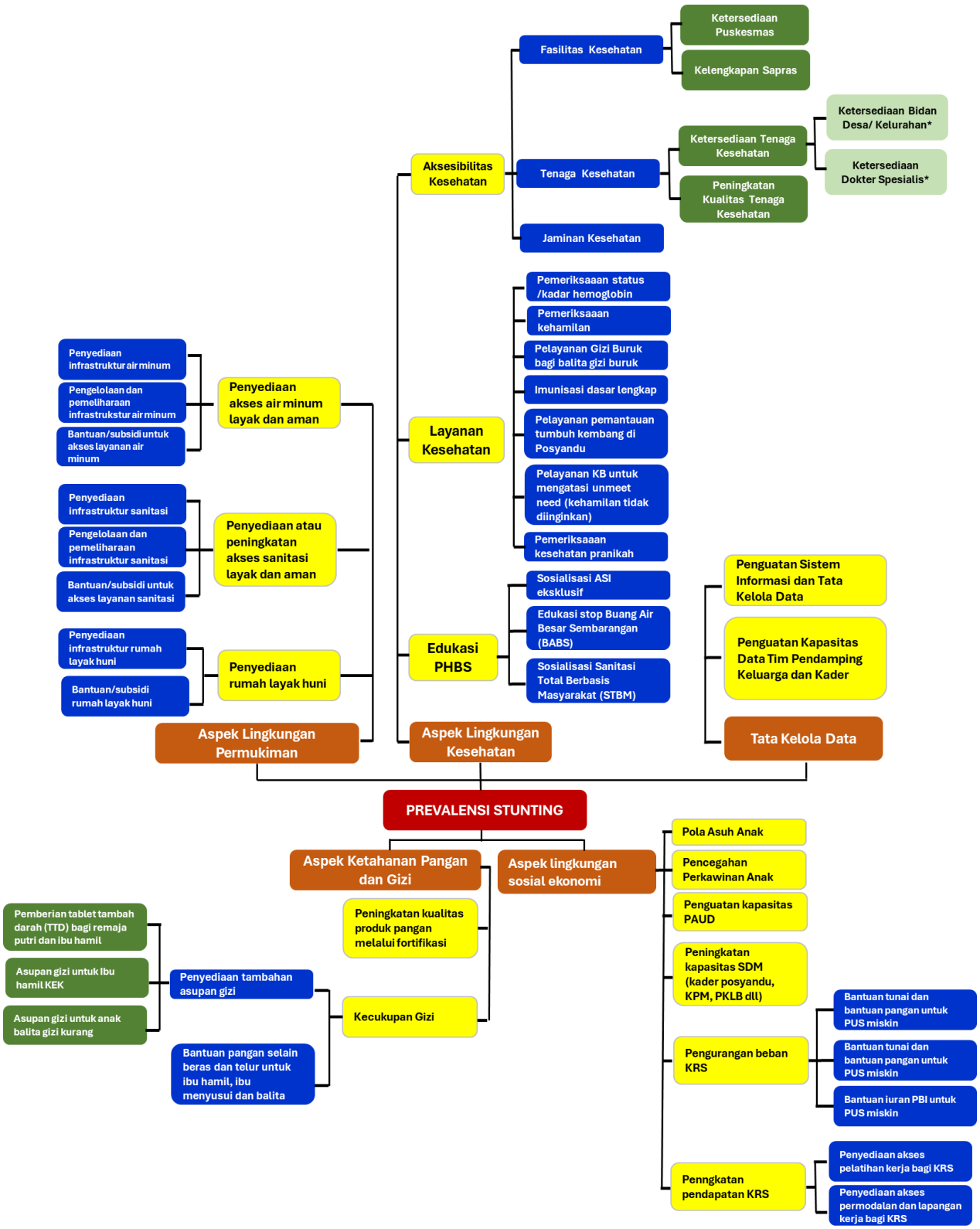
Selanjutnya, program prioritas juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas tenaga pelaksana di lapangan, yaitu tenaga kesehatan, tenaga gizi, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kader pembangunan manusia. Banyak di antaranya belum mendapatkan pelatihan yang komprehensif tentang intervensi gizi spesifik, komunikasi perubahan perilaku, serta penggunaan aplikasi pendukung seperti e-PPGBM dan Elsimil. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, supervisi berkala, dan pembekalan modul praktis sangat dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melanjutkan kerja sama dengan erguruan tinggi serta mitra pembangunan dalam memperkuat sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting di desa-desa lokus prioritas.

Seiring dengan penguatan data dan SDM, intervensi pencegahan stunting perlu menjadi prioritas utama dalam program RPJMD 2025–2029. Pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja dan calon pengantin melalui skrining gizi, pemberian tablet tambah darah, edukasi kesehatan reproduksi, serta penggunaan aplikasi Elsimil secara massif. Pada masa kehamilan, intervensi harus difokuskan pada pemenuhan gizi ibu, pemeriksaan ANC lengkap, dan edukasi pola makan bergizi seimbang. Untuk balita, program pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara berkala di posyandu menjadi komponen penting dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.

Pemerintah Provinsi juga harus memperkuat pendekatan konvergensi antar sektor dalam menjalankan intervensi sensitif, seperti penyediaan air minum dan sanitasi layak, akses ke layanan kesehatan dasar, edukasi gizi keluarga, dan pembangunan rumah layak huni. Untuk itu, integrasi program lintas perangkat daerah serta peran aktif pemerintah kabupaten/kota dan desa menjadi kunci keberhasilan. Melalui pra musrenbang tematik stunting seluruh program diarahkan ke wilayah dan kelompok sasaran yang telah terverifikasi berbasis data.

Dengan menempatkan penguatan sistem data, SDM pelaksana, dan intervensi pencegahan sebagai poros utama strategi, program penurunan stunting

di Sulawesi Tengah tidak hanya akan bersifat reaktif, tetapi mampu membangun fondasi ketahanan gizi jangka panjang. Komitmen kepala daerah, peran aparatur desa/kelurahan, dukungan anggaran yang memadai, serta pelibatan masyarakat dalam edukasi dan pengawasan menjadi modal penting untuk menurunkan prevalensi stunting ke angka di bawah 14% pada tahun 2029, sebagaimana target nasional yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Sinergi percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara lintas sektor disajikan pada pohon faktor berikut ini: Untuk memudahkan pelaksanaan lintas perangkat daerah maka dibuat skema *cross cutting* program yang bertujuan untuk memudahkan aksi konvergensi yang harus terlaksana secara multi sektoral dengan menggambarkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.



Gambar 3.25
Pohon Faktor Program Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting telah ditetapkan 31 indikator utama yang menyasar 6 sasaran intervensi sebagai tolok ukur keberhasilan program yang disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.39
31 Indikator Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

NO	SASARAN INTERVENSI	INDIKATOR INTERVENSI
1.	Ibu hamil,ibu menyusui, ibu nifas	Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi
2.		Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan
3.		Persentase Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam
4.		Persentase Ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan
5.		Persentase Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan
6.	Baduta Usia 0-23 bulan	Persentase Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini
7.		Persentase Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif
8.		Persentase Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)
9.		Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat AS
10.		Persentase Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk
11.		Persentase Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan
12.		Persentase Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
13.		Persentase Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap
14.		Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare
15.		Persentase Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (baduta)
16.	Balita usia 24-59 bulan	Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk
17.		Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan
18.		Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi

NO	SASARAN INTERVENSI	INDIKATOR INTERVENSI
19.		Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare
20.		Persentase Penemuan kasus pneumonia balita
21.		Persentase Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita
22.	Remaja Putri	Persentase Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)
23.		Persentase Remaja putri yang diskrining anemia
24.	Calon Pengantin	Persentase Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
25.		Persentase Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting
26.	Rumah Tangga dan Masyarakat	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman
27.		Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman
28.		Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional
29.		Persentase Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK
30.		Persentase Akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diterbitkan
31.		Persentase Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan Gizi)

Adapun wujud keterkaitan antara implementasi Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan program program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. **Berani Cerdas;** Percepatan penurunan stunting diwujudkan melalui peningkatan akses pendidikan kesehatan dan gizi di sekolah, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi seimbang bagi remaja, serta pencegahan pernikahan anak. Program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi siswa miskin turut memastikan anak dari keluarga berisiko stunting tetap bersekolah.
2. **Berani Sehat;** Program ini menjadi garda terdepan P3S dengan fokus layanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi lengkap, integrasi **layanan** dengan BPJS, serta skrining gizi remaja

putri dan calon pengantin melalui aplikasi *Elsimil*. RSUD dan puskesmas ditingkatkan kapasitasnya untuk pelayanan ANC lengkap dan gizi seimbang.

3. **Berani Sejahtera;** Konsep P3S tampak melalui penyediaan pangan bergizi bagi keluarga miskin, jaminan ketersediaan bahan pokok terjangkau, program makan bergizi gratis (MBG), serta pemberdayaan ekonomi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan gizi anak. Revitalisasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga mendukung **terciptanya** lingkungan sehat untuk tumbuh kembang anak.
4. **Berani Lancar**; Pencegahan stunting diperkuat melalui pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi layak, serta peningkatan konektivitas layanan dasar (pendidikan dan kesehatan). Ketersediaan jalan dan transportasi memudahkan akses keluarga berisiko stunting terhadap layanan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit.
5. **Berani Menyala**; Akses listrik dan internet berkontribusi pada edukasi gizi berbasis digital, layanan telemedisin, serta penguatan sistem data by name by address stunting. Desa tanpa listrik dan internet sulit menjangkau program edukasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, sehingga intervensi ini sangat relevan.
6. **Berani Makmur;** P3S diwujudkan melalui ketahanan pangan rumah tangga, modernisasi alsintan dan bibit unggul, serta pupuk untuk menjaga produksi pangan bergizi. Program petani milenial dan resi gudang juga mendukung ketersediaan pangan sehat, sementara jaminan sosial bagi petani dan nelayan menjaga stabilitas ekonomi keluarga berisiko stunting.
7. **Berani Berkah;** Pencegahan stunting didukung melalui peran tokoh agama dan adat dalam kampanye perubahan perilaku, edukasi pola asuh sehat, serta pencegahan pernikahan dini. Insentif bagi guru mengaji, pendeta, dan tokoh agama diarahkan juga untuk memperkuat peran mereka sebagai agen edukasi gizi dan kesehatan keluarga.
8. **Berani Harmoni**; Program wisata partisipatoris, ekonomi kreatif, dan 20.000 wirausaha baru memberikan peluang peningkatan pendapatan keluarga, sehingga mendukung pemenuhan gizi anak. Sulteng Creative Center dan UMKM berbasis **pangan** juga dapat diarahkan untuk memproduksi makanan bergizi lokal sebagai bagian dari intervensi sensitif stunting.

9. **Berani Berintegritas**; Percepatan penurunan stunting diperkuat melalui tata kelola data yang transparan, integrasi sistem informasi (e-PPGBM, Elsimil, DTSEN), serta monitoring berbasis SPBE. Budaya birokrasi yang inovatif memastikan alokasi anggaran responsif terhadap keluarga berisiko stunting, serta pengawasan program lebih akuntabel.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara parsial atau sektoral semata. Dalam konteks Sulawesi Tengah, tantangan kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan akses terhadap infrastruktur dasar. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan multidimensi dan lintas sektor, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, masyarakat sipil, lembaga filantropi dan komunitas lokal.

Strategi pertama adalah **penurunan beban pengeluaran**, yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Upaya ini dilakukan melalui pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta berbagai bantuan sosial dan subsidi. Di bidang pendidikan, program seperti beasiswa dan bantuan peralatan sekolah disediakan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan. Pengendalian inflasi juga menjadi bagian penting melalui operasi pasar dan penyediaan pasar murah, guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan menjadi bagian dari upaya menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga miskin terhadap tekanan kebutuhan hidup.

Strategi kedua adalah **peningkatan pendapatan**, yang difokuskan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana di sektor pertanian dan perikanan, termasuk kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan serta bantuan peralatan usaha. Sementara itu, peningkatan kompetensi masyarakat diarahkan pada penyediaan informasi pasar kerja, pelatihan kerja, program padat karya, serta bantuan permodalan untuk mendorong wirausaha. Akses terhadap

kesempatan kerja dan usaha juga ditingkatkan untuk memperluas jangkauan lapangan penghidupan masyarakat miskin.

Strategi ketiga adalah **pengurangan kantong kemiskinan**, yang difokuskan pada pembangunan dan penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar di wilayah-wilayah miskin. Ini mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta perumahan dan permukiman. Konektivitas antar wilayah juga diperbaiki untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. Di sisi lain, penyediaan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan listrik menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi.

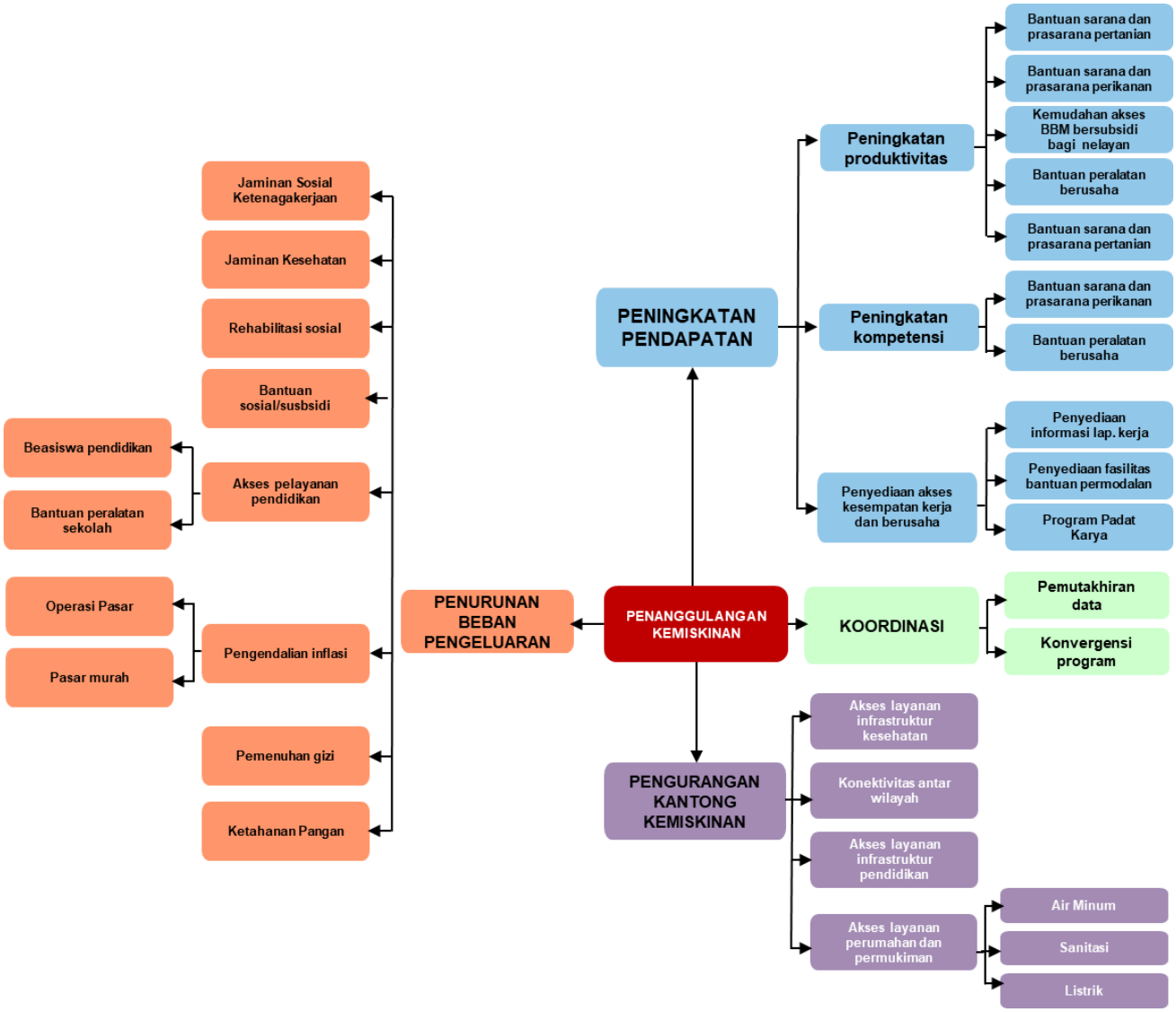
Seluruh strategi tersebut dijalankan secara terkoordinasi melalui dua langkah penting, yaitu pemutakhiran data dan konvergensi program. Pemutakhiran data bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, sementara konvergensi program mengintegrasikan berbagai program dari lintas sektor dan lembaga agar sinergis dan tepat sasaran. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya penggunaan data yang akurat dalam program pengenrasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menekankan pentingnya ketersediaan dan penggunaan data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. DTSEN bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data yang selama ini tersebar dan tumpang tindih, sehingga seluruh intervensi dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat secara lebih efisien dan akuntabel.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional. Salah satu pokok utama dari Inpres ini adalah penekanan pada pelaksanaan program yang bersifat terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data. Dalam hal ini, seluruh intervensi diarahkan untuk

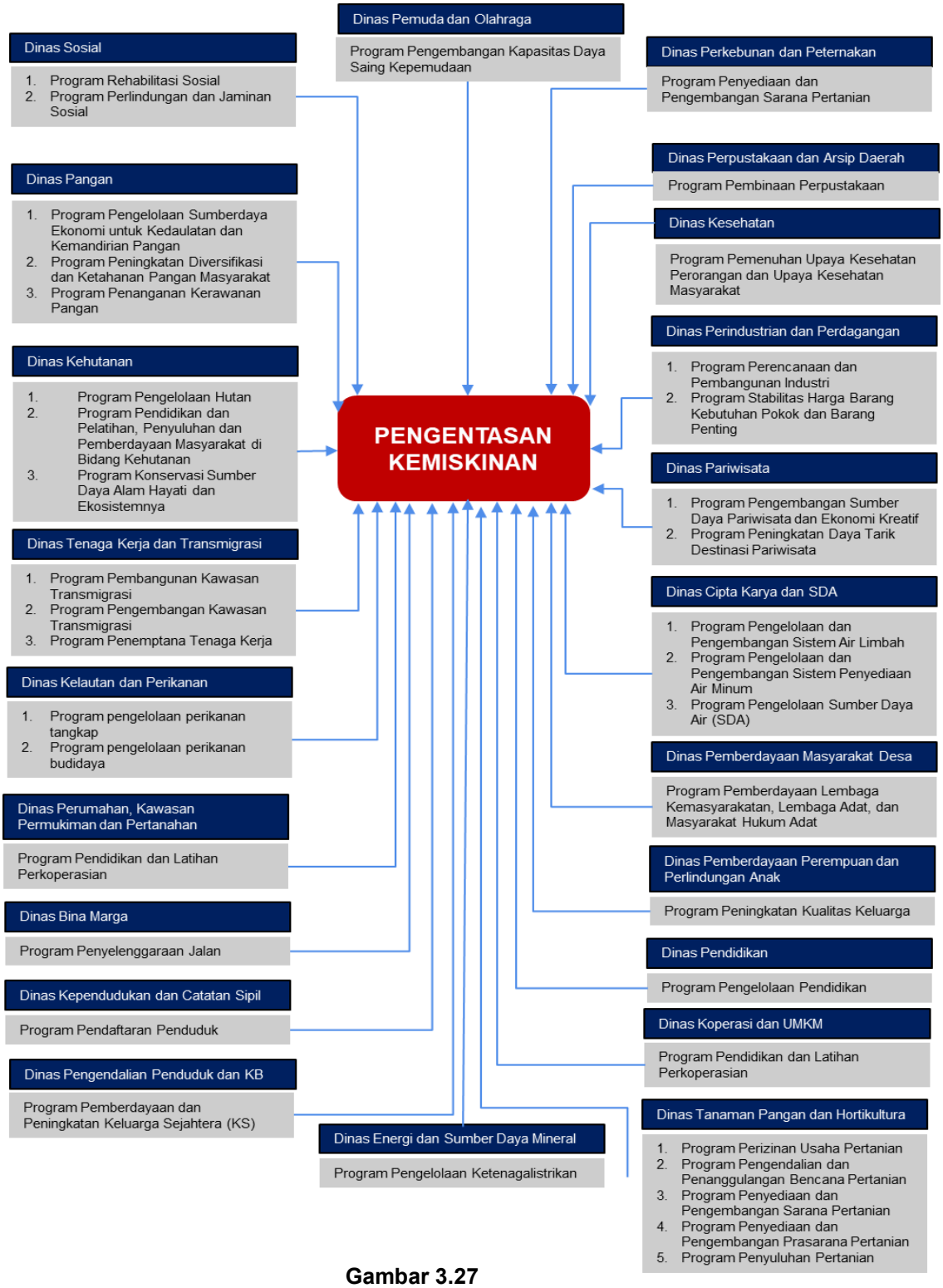
menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan. DTSEN menjadi alat untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin ekstrem secara akurat, memastikan bahwa bantuan dan program pemerintah menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Inpres ini juga mendorong optimalisasi pelaksanaan berbagai program seperti bantuan sosial, penyediaan layanan dasar gratis, sekolah rakyat, program perumahan rakyat, hingga pemberdayaan ekonomi produktif melalui koperasi dan UMKM. Selain itu, pendekatan padat karya, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dari strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Pemerintah menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan intervensi ini, baik di tingkat pusat maupun daerah.



Gambar 3.26
Pohon Faktor Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu

Intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui aksi konvergensi program lintas Perangkat Daerah yang terintegarsi dengan skema cross cutting program sebagai berikut.



Gambar 3.27
***Cross Cutting* Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi**
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

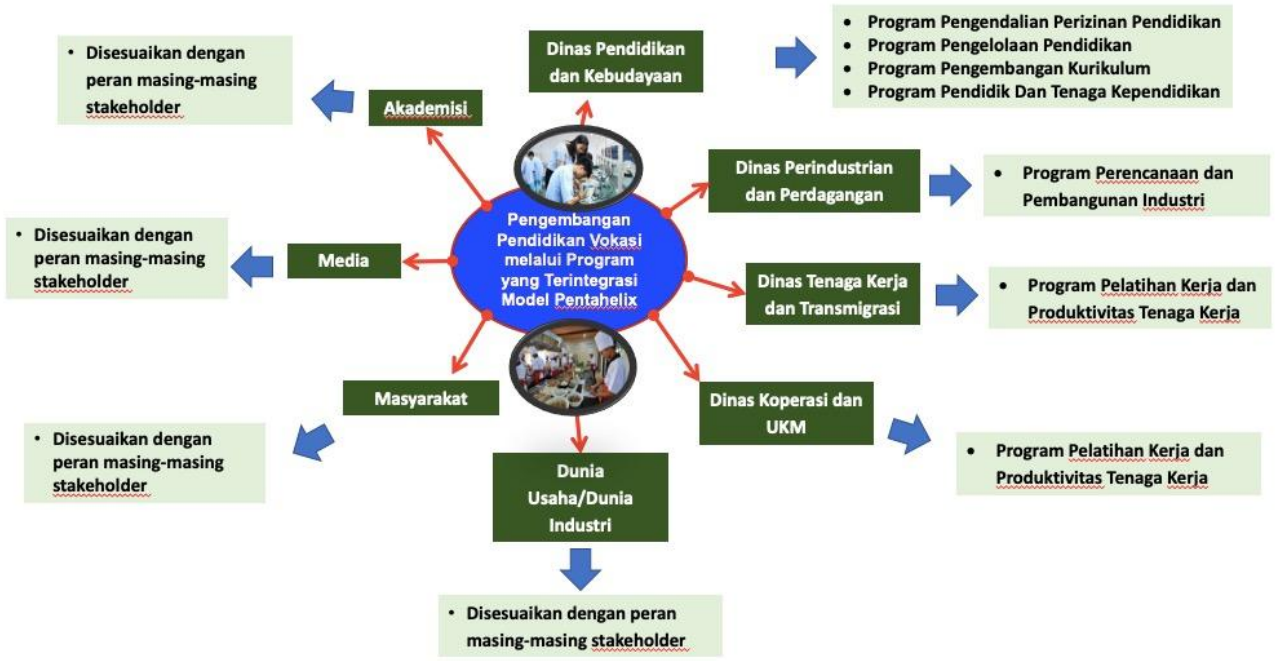
4. Cross Cutting Program Pendidikan Vokasi yang Terintegrasi Model Pentahelix

Pendidikan vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja dituntut mampu menghasilkan learning *outcome* yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Disamping itu pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan agen perubahan dalam meningkatkan ketahanan, dan daya saing masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan vokasi peru diposisikan dalam kerangka *Vocational Education for All* (VoEFA) yang terdiri dari 9 pilar: (1) Keluarga sadar vokasi; (2) Pendidikan vokasi sejak dini; (3) Pendidikan vokasi dalam lingkup jalur pendidikan (formal, non formal, informal), pelatihan, dan pengalaman kerja; (4) Pendidikan vokasi yang ramah dan layak bagi kaum difable; (5) Pendidikan vokasi responsif gender; (6) Pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa; (7) Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan perkembangan IPTEKS; (8) Pendidikan vokasi berbasis mutu; dan (9) Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antar siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat. Olehnya itu melalui kerjasama sinergis penta helix dalam kerangka VoEFA diharapkan tumbuh inovasi dan kreatifitas dalam menunjang daya tahan dan daya saing masyarakat Sulawesi Tengah. Berikut ini tabel yang menjelaskan *cross cutting* program pengembangan pendidikan vokasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.40
Cross Cutting Program Pengembangan Pendidikan Vokasi Model Pentahelix Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029

NO.	PERANGKAT DAERAH/ *STAKEHOLDER*	ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN	Program PD sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	1. Peningkatan Kualitas Kurikulum yang Inovatif, Dinamis, Adaftif, Prediktif dan Fleksibel sesuai kebutuhan Daerah 2. Penekanan Kurikulum pada bidang *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM), sehingga *link and match* dengan Industri di Sulawesi Tengah 3. Peningkatan SDM Guru Berbasis Ketrampilan dan Keahlian yang dibutuhkan Daerah 4. Peningkatan SDM Siswa Berbasis Keterampilan yang Dibutuhkan Daerah sekitar 5. Peningkatan Tata Kelola SMK 6. Pembentukan Bursa Kerja Khusus Di SMK 7. Peningkatan Sarana Prasarana yang fokus pada keterampilan yang dibutuhkan 8. Lulusan SMK yang Holistik (Kognitif, Afektif dan Psikomotorik)	• Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	1. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha/industri untuk menggunakan tenaga kerja lokal 2. Mengajak Industri melakukan pembinaan SMK sesuai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan	• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	1. Pengembangan Kewirausahaan *2.* Pelaksanaan *Job Fair* 3. Pengembangan Balai Latihan Kerja	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas TK
4.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	1. Pendampingan pada aspek produksi, pemasaran, akses permodalan, akses pembiayaan, teknologi tepat guna dan *marketing online.* 2. Menyusun baseline akselerasi UMKM yang tepat sesuai kebutuhan daerah	1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 2. Program Pemberdayaan UMKM 3. Program Pengembangan UMKM

NO.	PERANGKAT DAERAH/ *STAKEHOLDER*	ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN	Program PD sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406
5.	Dunia Usaha/Dunia Industri	1. Perekrutan SDM lokal sebagai pelaku industri 2. Peningkatan SDM sesuai Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri	Disesuaikan dengan peran masing-masing stakeholder
6.	Masyarakat	1. Berperan sebagai pelaku usaha yang bergerak langsung/tidak langsung di industri 2. Memonitor dampak industri terhadap budaya dan sosial masyarakat	
7.	Media	Mengkampanyekan: 1. SMK Hebat 2. SMK terampil dan Ahli 3. SMK Siap Kerja	
8.	Akademisi	Pemetaan dan Penelitian tentang Kebutuhan Tenaga Kerja Usaha dan Industri di Sulawesi Tengah	



Gambar 3.28
Cross cutting pengembangan pendidikan vokasi model pentahelix

5. Cross cutting Petani Milenial

pendapatan ekonomi Masyarakat khususnya kalangan petani di Sulawesi Tengah, perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani.

Untuk meningkatkan peran sektor pertanian, dimana petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha dituntut untuk mengembangkan usahatani yang produktif, menguntungkan dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan petani yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Petani diharapkan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

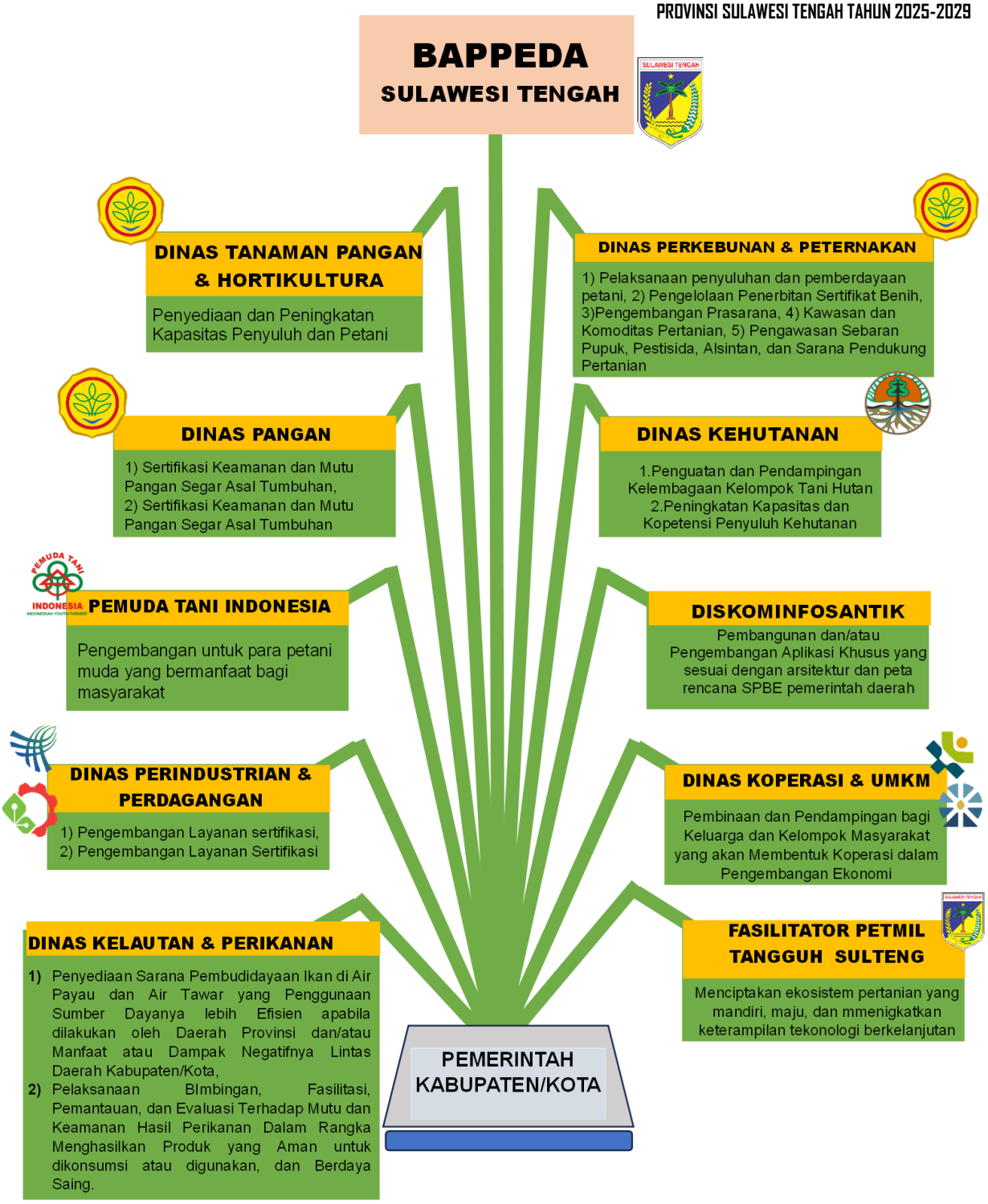
Permasalahan pertanian di Sulawesi Tengah yaitu masih rendahnya produktivitas pangan, karena semakin sedikitnya jumlah petani di daerah pertanian, menurut data petani rata-rata sudah berusia diatas 40 tahun, sektor Pertanian belum menjadi magnet pekerjaan untuk generasi milenial. Padahal Sulawesi Tengah merupakan daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan dengan konsekuensi Sulawesi Tengah harus menjadi Daerah Penyokong Bahan Pangan penduduk IKN. Hal ini sangat memungkinkan dikarenakan lahan-lahan millik pemerintah untuk digarap pertanian cukup banyak, dengan komoditas yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. Dengan perkembangan teknologi saat ini, diharapkan generasi milenial dapat adaptif untuk dapat di impelementasikan di sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian di Sulawesi Tengah memiliki permasalahan antara lain petani kesulitan dalam akses pasar, petani kesulitan dalam akses modal untuk biaya produksi, keterbatasan alat dan mesin pertanian serta Teknologi Digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Sulawesi Tengah.

Tujuan umum dari program petani milenial Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya menumbuhkembangkan kewirausahaan muda pertanian di Sulawesi

Tengah, mengubah wajah pertanian menjadi baru, agar generasi milenial tertarik menjadi petani dengan pemanfaatan teknologi digital, menciptakan pertanian maju, mandiri dan modern, mengurangi problem ketersediaan tenaga kerja pertanian di Sulawesi Tengah. Adapun tujuan khusus yaitu :

1. Mengakselerasi pelaksanaan Program Petani Milenial di Sulawesi Tengah;
2. Menumbuhkan minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
3. Meningkatkan kapasitas generasi muda dalam berusaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
4. Menumbuhkembangkan wirausaha muda pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Skema keterpaduan *(cross cutting)* petani milenial disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.29
Cross Cutting Program Berani Menjadi Petani Milenial

Adapun matriks keterpaduan program berani menjadi petani milenial (logical framework), untuk perangkat daerah dan stakeholder terkait disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.41
Logical Framework Program Petani Milenial

PELAKSANA	PROGRAM (SESUAI KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-3406)		INPUT (RENCANA AKSI)	OUTPUT/OUTCOME
	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penyuluhan Pertanian		Identifikasi/CPCL/ Verifikasi Petani Milenial 13 Kabupaten/Kota	Tersediannya jumlah Petani Melinial Pemula di 13 Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani	Sosialisasi Pengrekrutan Petani Milenial di 13 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pengrekrutan Petani Milenial
			Inventarisasi dan Pemetaan Petani Milenial 13 Kabupaten/Kota	Tersediannya Data Petani Milenial yang Meliputi: Data Usaha, Data Diri, Data Fasilitas dan Kebutuhan dalam Usaha
			Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani Milenial	Jumlah Petani Milenial yang Terlatih
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan Kelompok Perkebunan dan Peternakan	350 kelompok perkebunan dan peternakan
	Kegiatan Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Sub Kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani		
	Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	Sub Kegiatan Pendampingan dan pengawalan korporasi petani.	Jumlah kelompok tani yang telah memiliki badan usaha	55 gapoktan perkebunan dan peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah unit usaha yang memiliki sertifikat pembibitan perkebunan dan budidaya ternak	55 unit usaha perkebunan dan peternakan
	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		

PELAKSANA	PROGRAM (SESUAI KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-3406)		INPUT (RENCANA AKSI)	OUTPUT/OUTCOME
	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen kajian akademis perkebunan dan peternakan
	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah laporan Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	13 laporan
	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah anakan benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	25.000 pohon anakan benih kelapa 25.000 pohon anakan benih kakao
	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bimbingan
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	bimbingan

PELAKSANA	PROGRAM (SESUAI KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-3406)		INPUT (RENCANA AKSI)	OUTPUT/OUTCOME
	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
		Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	20.000 ekor ayam layer/petelur
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Sosialisasi Program Petani Milenial kepada UPT KPH dan Penyuluh Kehutanan (PNSdanP3K)
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani hutan		Pembentukan Tim Seleksi Petani Milenial Dishut Prov. Sulawesi Tengah
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		Inventarisasi Data Kelompok Tani Hutan dan KPS berdasarkan Kriteria Petmil
				Pendampingan Calon Petani Milenial hasil inventarisasi untuk melengkapi dan mendaftar pada website Kominfo
				Seleksi Calon Petmil oleh Tim Terpadu (bersama Bappeda dan Dinas TPH)

PELAKSANA	PROGRAM (SESUAI KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-3406)		INPUT (RENCANA AKSI)	OUTPUT/OUTCOME
	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
				Penunjukan /Penetapan Petani Milenial Bidang Kehutanan Berdasarkan Komoditi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	Kegiatan Sertifikasi HKI	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan sertifikasi	Sosialisasi dan Fasilitasi HKI Merk	350 IKM (Berbahan Dasar Hasil Pertanian)
	Kegiatan Sertifikasi PIRT	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan sertifikasi	Fasilitasi sertifikasi SPP-PIRT 13 Kabupaten/kota	Tersertifikasinya SPP-PIRT 350 IKM Petani Milenial Produk Pangan Olahan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rapat Teknis Pembuatan Dashboard Petani Milenial	Dashboard Petani Milenial
			Rapat Teknis Proses Bisnis Dashboard Petani Milenial	Hardisk Server
			Belanja Hardisk Server	Peningkatan Pengetahuan admin Perangkat Daerah Dashboard Petmil
			Sosialisasi Penggunaan / Admin Dashboard Petani Milenial	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Bimbingan Teknis Budidaya Air Payau	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila	Bantuan Budidaya Air Payau	Bertambahnya fasilitas sarana dukungan kegiatan budidaya
			Kelompok di Desa Petani Milenial	Terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas
			Bantuan Budidaya Air Tawar	Bertambahnya fasilitas sarana

PELAKSANA	PROGRAM (SESUAI KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-3406)		INPUT (RENCANA AKSI)	OUTPUT/OUTCOME
	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
		dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		dukungan kegiatan budidaya
			Kelompok di Desa Petani Milenial	Terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Peningkatan pengetahuan dasar kewirausahaan
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Sub Kegiatan Pelaksanaan BImbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Bantuan Alat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Terbentuknya jaringan kerjasama dalam kaitan pemasaran produk maupun pengembangan usaha
			Kelompok di Desa Petani Milenial	Terciptanya produk inovasi untuk meningkatkan nilai jual produk
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Bimbingan Teknis Gerakan Koperasi Modern bagi Petani Milenial untuk Pengembangan Ekonomi	Output: Jumlah Petani Milenial yang Memahami Koperasi Modern
				Outcome: Terciptanya Pemahaman Petani Milenial terhadap Koperasi Modern untuk

PELAKSANA	PROGRAM (SESUAI KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-3406)		INPUT (RENCANA AKSI)	OUTPUT/OUTCOME
	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Pengembangan Usaha
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Sosialisasi dalam rangka Sertifikasi Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di 13 Kabupaten/Kota;	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kegiatan FGD Pedagang Pangan Segar Milenial dalam Menghadapi Pasar Global;	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		1) Kegiatan Bimtek Pedagang dan Pelaku Usaha Pangan Segar Milenial dalam rangka Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan. 2) Kegiatan Operasional dalam rangka Identifikasi Pedagang Milenial Pangan Segar Berbasis Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 3) Kegiatan Operasional dalam rangka Monitoring Pedagang dan	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		

PELAKSANA	PROGRAM (SESUAI KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-3406)		INPUT (RENCANA AKSI)	OUTPUT/OUTCOME
	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
			Pelaku Usaha yang akan Disertifikasi.	

6. Cross cutting Pencapaian Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah program strategis yang menjadi bagian dari *Game Changer* untuk mencapai visi Indonesia 2045. Ekonomi biru termasuk dalam strategi kedua yang berfokus pada produktivitas di sektor ekonomi. Produktivitas menyiratkan transformasi ekonomi yang akan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia yang kuat dengan menerapkan manajemen sumber daya laut yang baik untuk mencapai sektor maritim yang berkelanjutan. Ekonomi biru diukur dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI) yang dibangun di atas 3 pilar yang menjadi komponen utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar tersebut adalah **ekonomi, sosial, dan lingkungan** dengan beberapa subsektor dan indikator yang mewakili masing-masing pilar. Selain 3 pilar tersebut, terdapat tambahan dua indikator penting lainnya, yaitu Teknologi dan Tata Kelola yang berfungsi sebagai pemungkin (enabler) yang akan mendukung akselerasi sektor-sektor ekonomi biru.

Ekonomi Biru merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan demi mendukungan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi biru meliputi berbagai sektor penting, termasuk perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru memiliki potensi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

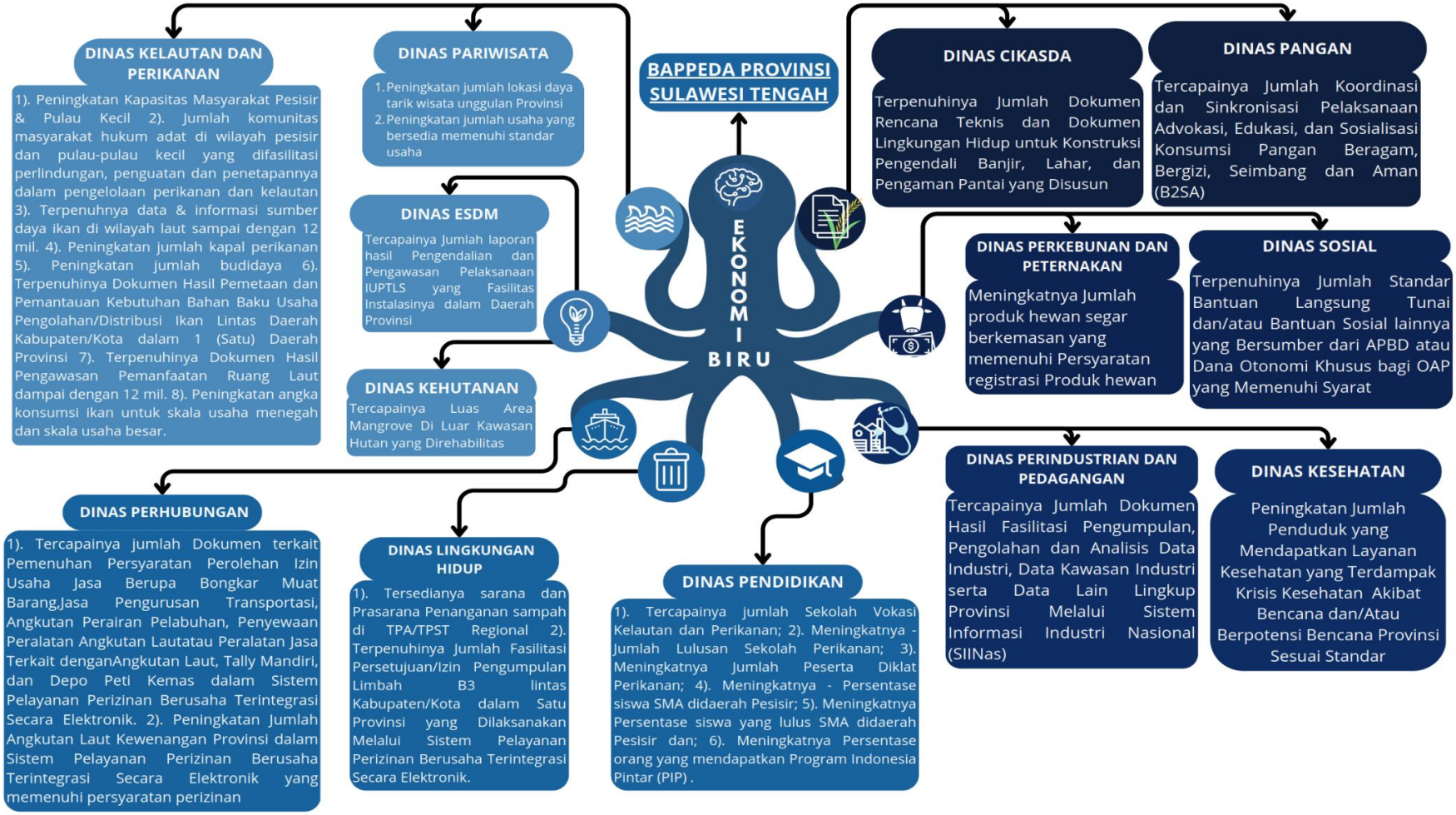
Melalui program Ekonomi Biru, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat regional dan nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sebagai bagian dari Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Sulawesi Tengah dikembangkan untuk memahami kondisi

ekonomi biru saat ini dan perkembangannya di tingkat daerah. Secara umum, IBEI memiliki tujuan sebagai berikut:

1. IBEI berfungsi sebagai instrumen untuk memantau kinerja sektor-sektor ekonomi biru di Sulawesi Tengah dan mengetahu peluang dan potensi mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia 2045.
2. IBEI dibangun berdasarkan dasbor indikator ekonomi makro terpilih daerah, yang dapat menyoroti kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait dengan sektor-sektor ekonomi biru. Kebijakan khusus daerah kemudian dapat ditetapkan untuk memenuhi target tertentu untuk setiap indikator.
3. IBEI mendorong koordinasi yang lebih baik di antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor-sektor ekonomi biru, seperti pariwisata, perikanan, dan transportasi.
4. IBEI juga dapat memberikan masukan mengenai kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang perlu difokuskan untuk mengatasi masalah ketimpangan atau target kebijakan daerah lainnya.

Adapun pola *crosscutting* pelaksanaan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) di Sulawesi Tengah untuk setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan ditampilkan pada Gambar 3.30**.** Sedangkan *logical framework* pelaksanaan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) di Sulawesi Tengah pada Tabel 3.42



Gambar 3.30
Cross Cutting Program Ekonomi Biru

Tabel 3.42
***Logical Framework* Pencapaian Indeks Ekonomi Biru**

Pelaksana (Perangkat Daerah)	**Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)**		**Indikator**	**Output/Outcome**
	Kegiatan	**Subkegiatan**		
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH				
Dinas Kelautan dan Perikanan	**Program :** **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** **Kegiatan :** Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **Sub Kegiatan :** Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **Sub Kegiatan :** Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **Sub Kegiatan :** Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan **Kegiatan** Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi **Sub Kegiatan :** Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat **Sub Kegiatan :** Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		- Kualitas Terumbu Karang yang Baik (%) - Kualitas Padang lamun yang Baik (%) - Kualitas Mangrove yang Baik (%) - Rehabilitasi Mangrove, Hutan Rawa dan Gambut (Ha) - Total Kawasan Perlindungan Laut (Ha) - Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru - Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove diluar Kawasan Hutan - Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah komunitas masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaannperikanan dan kelautan

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman **Sub Kegiatan :** Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman		Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan - Produksi Garam (ton)	
	Program : **Pengelolaan Perikanan Tangkap** **Kegiatan :** Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil **Sub Kegiatan :** Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan **Sub Kegiatan :** Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **Sub Kegiatan :** Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		- Produksi Perikanan Tangkap (ton) - Total Jumlah Nelayan (orang) - Jumlah Kapal Perikanan (unit)	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
	Program : **Pengelolaan Perikanan Budidaya** **Kegiatan :** Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat **Sub. Kegiatan:** Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		- Produksi Perikanan Budidaya Darat (ton) - Produksi Perikanan Budidaya Laut (ton)	Jumlah data dan Informasi kegiatan pembudidayaan ikan

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Sub. Kegiatan: Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dam air laut lintas daerah kabupaten/ kota **Kegiatan** : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut **Sub. Kegiatan:** Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan lintas daerah kabupaten/kota **Sub. Kegiatan:** Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut **Sub. Kegiatan:** Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut **Program :** **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** **Kegiatan :** Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **Sub Kegiatan** : Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **Sub Kegiatan** : Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		- Total Jumlah Pembudidaya Ikan (orang) - Produksi Rumput Laut (ton) - Rata - rata Konsumsi Harian Ikan Per Kapita (Kkal)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar **Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dam Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing			Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar
	Program : **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** **Kegiatan :** Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil **Sub Kegiatan :** Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
Dinas Pariwisata	**Program :** **Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** **Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi **Sub Kegiatan :** Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		- Jumlah Tempat/Titik Wisata Bahari (jumlah tempat)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **Sub Kegiatan** Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata		- Jumlah Perusahaan pada Kegiatan Wisata Air (jumlah perusahaan)	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha
Dinas Perhubungan	**Program :** **Pengelolaan Pelayaran** **Kegiatan :** Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinUsaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan AngkutanLaut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **Kegiatan :** Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provins		- Maritim Kargo (ton) - Angkutan Penumpang Laut (orang) - Angkutan Penumpang Laut di 25 Pelabuhan Strategis (orang)	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang,Jasa Pengurusan Transportasi,Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Lautatau Peralatan Jasa Terkait denganAngkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Dinas Lingkungan Hidup	**PROGRAM :** **Pengelolaan Persampahan** **Kegiatan :** Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional **Sub Kegiatan :** Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional **Program :** **Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3)** **Kegiatan :** Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		- Total Desa Pesisir yang Memiliki Pembuangan Sampah (jumlah desa) - Pembuangan Limbah di Laut (gr/m2) - Pembuangan Limbah di Darat(ton)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dinas ESDM	**Program :** **Pengelolaan Ketenagalistrikan** **Kegiatan :** Penatausahaan Izun Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		- Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang Terpasang (MW) - Listrik yang diHasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (GWh)	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Sub.Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		- Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air yang Terpasang (MW) - Listrik yang diHasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (GWh)	
Dinas Kehutanan	**PROGRAM:** **Pengelolaan Hutan** **Kegiatan :** Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara **Sub Kegiatan :** Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan		- Kualitas Mangrove yang Baik (%) - Rehabilitasi Mangrove, Hutan Rawa dan Gambut (Ha)	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitas
Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	**PROGRAM :** **Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** **Kegiatan :** Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		Total Desa Pesisir yang Memiliki Jamban/WC (jumlah desa)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun
Dinas Pangan	**Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** **Kegiatan :** Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Rata - rata Konsumsi Harian Protein Per Kapita (Kkal)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Program :** **Pengelolaan sistem informasi industri Nasional** **Kegiatan :** Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		- Total Ekspor Ikan (ton) - Pangsa Ekspor Ikan terhadap Total Ekspor (%) - Total Ekspor Ikan Budidaya (ton) - Ekspor Ikan Olahan (ton)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Dinas Sosial	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** **Kegiatan :** Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat **Sub Kegiatan :** Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat		- Persentase orang yang mendapatkan Program PKH didaerah Pesisir (%) - persentase orang yang memiliki asuransi Kesehatan di daerah Pesisir	Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD
Dinas Perkebunan dan Peternakan	**Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		- Rata - rata Konsumsi Harian Protein Per Kapita (Kkal)	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan

Pelaksana (Perangkat Daerah)	Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)		Indikator	Output/Outcome
	Kegiatan	Subkegiatan		
	Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan **Sub Kegiatan :** Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan			
Dinas Kesehatan	**Program :** **Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** **Kegiatan :** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **Sub Kegiatan :** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Persentase orang yang memiliki Asuransi Kesehatan diDaerah Pesisir (%)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar
Dinas Pendidikan	**Program Pengelolaan Pendidikan** Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		- Jumlah Sekolah Vokasi Kelautan dan Perikanan (jumlah sekolah) - Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan (orang) - Jumlah Peserta Diklat Perikanan (orang) - Persentase siswa SMA didaerah Pesisir (%)	- Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sekolah Vokasi Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya lulusan Sekolah Perikanan - Meningkatnya Peserta Diklat Perikanan - Meningkatnya Persentase siswa SMA didaerah Pesisir (%)

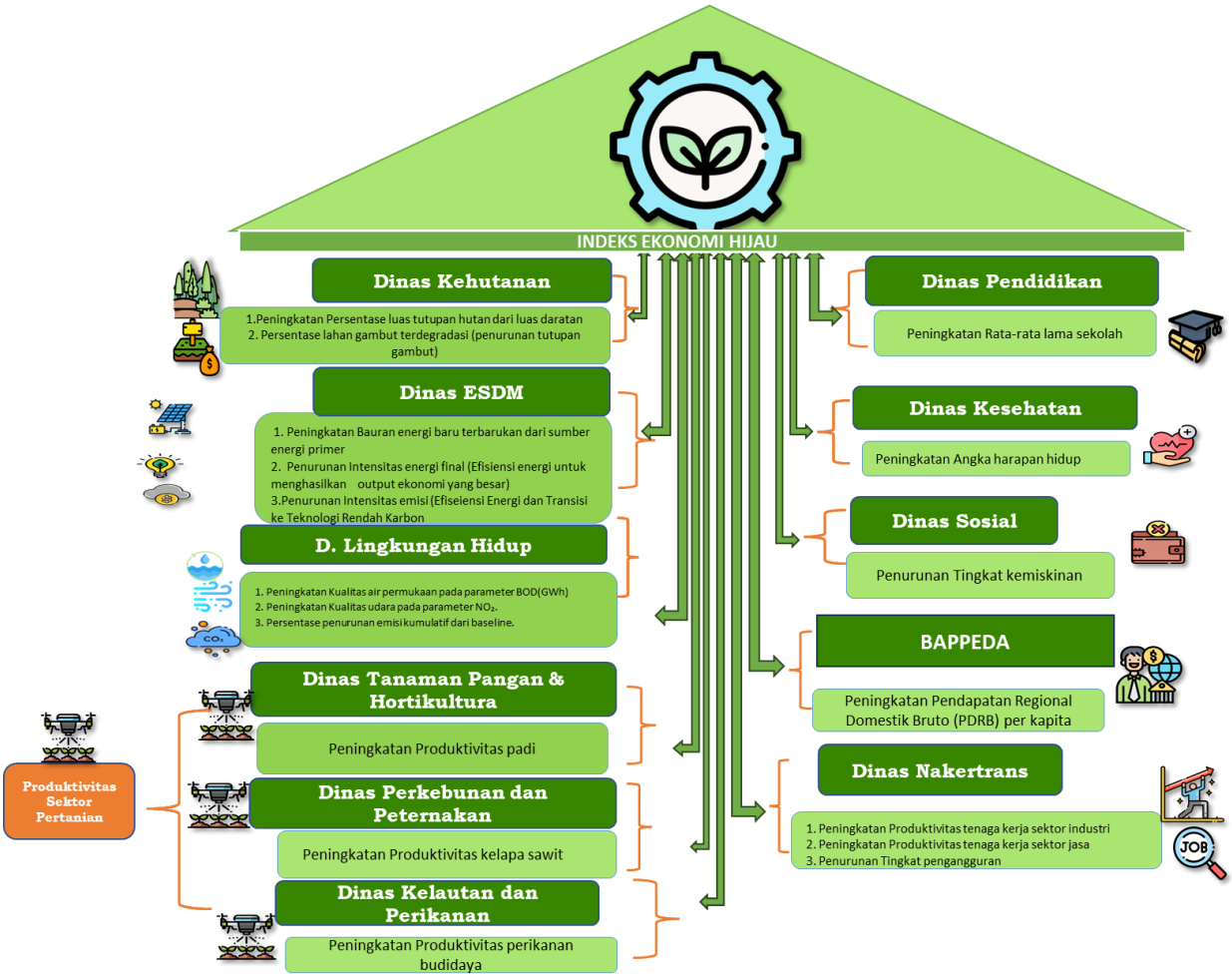
Pelaksana (Perangkat Daerah)	**Program (Sesuai Kepmendagri 050/378/2020)**		**Indikator**	**Output/Outcome**
	Kegiatan	**Subkegiatan**		
			- Persentase siswa yang lulus SMA didaerah Pesisir (%). - Persentase orang yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) (%)	- Meningkatnya Persentase siswa yang lulus SMA didaerah Pesisir (%). - Meningkatnya persentase orang yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) (%)

7. Cross cutting Pencapaian Indeks Ekonomi Hijau

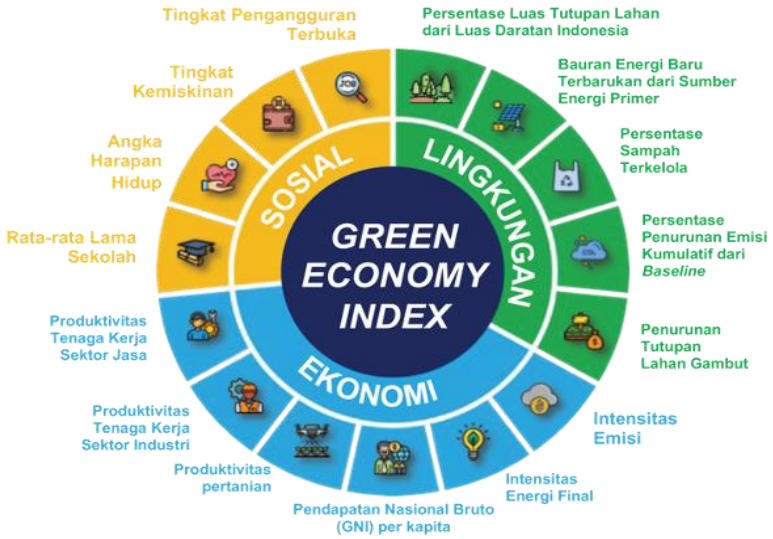
Green economy atau ekonomi hijau adalah gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan (Bappenas, 2000), selanjutnya ekonomi hijau dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial *(un partnership for action on green economy-un-page, 2000).*

Adapun konsep Ekonomi Hijau yaitu pembangunan yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial *(well-being and social equity)* dan secara signifikan menurunkan risiko lingkungan serta kelangkaan *ekologi (environmental risks and ecological scarcities)*. UNEP juga menekankan pemikiran pada pelestarian modal alam, yang meliputi ekosistem dan sumber daya alam *(united nations environment programme-UNEP,* 1990*).*

Sehubungan dengan kebijakan ekonomi hijau menjadi salah satu jalan menuju Indonesia Emas 2045 dan Sulawesi Tengah Emas 2045, maka diperlukan penghitungan terhadap komponen-komponen pilar penyusunnya seperti Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial untuk mendapatkan bobot indeks, tetapi sebelum penghitungan maka dibutuhkan kesepakatan dan kesepahaman atas angka *data base* (data awal) penghitungan dan tentunya kesepakatan dan komitmen dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah dalam menetapkan target indikator setiap komponen penyusun pilarnya. Selain itu, bagi daerah diperlukan hitungan tagging program dan kegiatan dinas/biro/badan yang mendukung pembangunan ekonomi hijau *(green budget tagging)* yang digunakan untuk mendesign perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi. Cross cutting ekonomi hijau dapat dilihat pada Gambar 3.31. Adapun mekanisme keterpaduan pelaksanaan *(logical framework)* ekonomi hijau ditampilkan pada Tabel 3.43



Gambar 3.31
Cross Cutting Pencapaian Indeks Ekonomi Hijau



Tabel 3.43
Logical Framework Pencapaian Indeks Ekonomi Hijau

NO	PERANGKAT DAERAH	ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM PD SESUAI NOMENKLATUR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024.
1.	Dinas Kehutanan	1. Peningkatan Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan 2. Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut)	• Program Pengelolaan Hutan
2.	Dinas ESDM	1. Peningkatan Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer 2. Penurunan Intensitas energi final (Efisiensi energi untuk menghasilkan output ekonomi yang besar) 3. Penurunan Intensitas emisi (Efisiensi Energi dan Transisi ke Teknologi Rendah Karbon)	• Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
3.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Kualitas air permukaan pada parameter BOD(GWh) 2. Peningkatan Kualitas udara pada parameter NO_2. 3. Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline.	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengelolaan Persampahan
4.	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1. Perhitungan Target Indeks Ekonomi Hijau 2. Peningkatan PDRB Perkapita	• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Peningkatan Produktivitas Padi	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

NO	PERANGKAT DAERAH	ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM PD SESUAI NOMENKLATUR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024.
			• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Peningkatan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Peningkatan Produktivitas tenaga kerja sektor industri 2. Peningkatan Produktivitas tenaga kerja sektor jasa 3. Penurunan Tingkat pengangguran	• Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja
9.	Dinas Pendidikan	1. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah	• Program Pengelolaan Pendidikan
10.	Dinas Sosial	1. Penurunan Tingkat Kemiskinan	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11.	Dinas Kesehatan	1. Peningkatan Angka Harapan Hidup	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

8. Cross cutting Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menempatkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai agenda strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. PRK bukan hanya upaya teknis mengurangi emisi, tetapi juga gerakan bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan memastikan kesejahteraan masyarakat



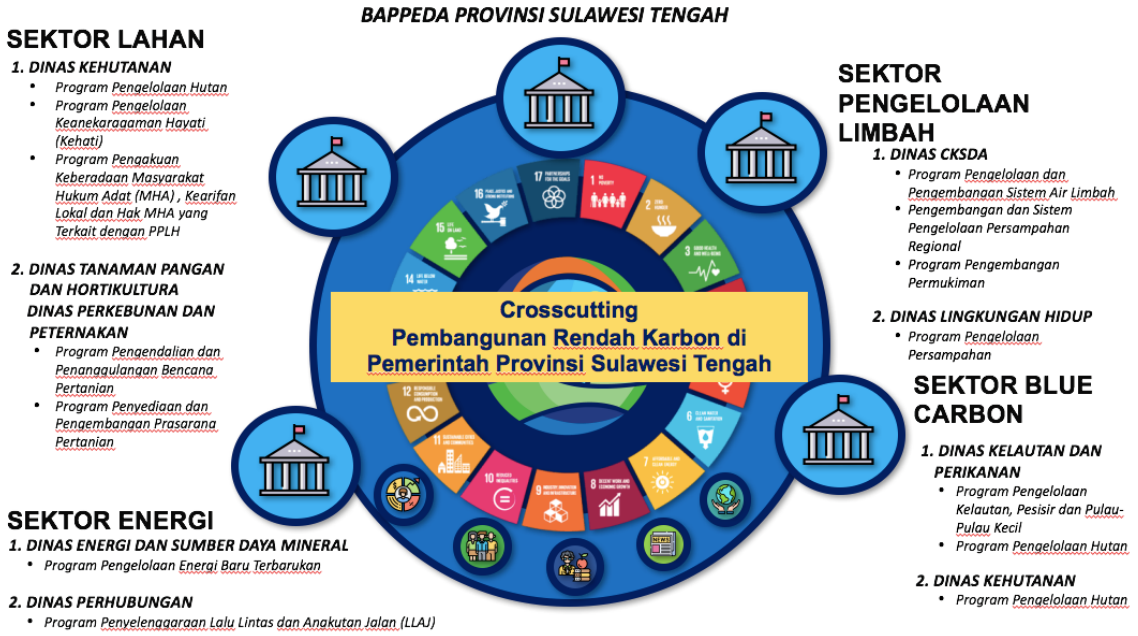
Gambar 3.32
Kolaborasi Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan rendah karbon di Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan agenda bersama yang melibatkan multi pihak. Upaya lintas sektor ini diperkuat oleh kolaborasi lintas aktor. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya menurunkan emisi, menjaga kelestarian alam, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat berjalan seimbang. Pemerintah pusat dan daerah berperan sesuai kewenangan pembangunan masing-masing, memastikan regulasi, program, dan kebijakan berjalan terpadu. Dukungan dari mitra pembangunan seperti LSM, NGO, dan lembaga donor sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas, pendanaan, serta inovasi program sesuai fokus mereka.

Pada sisi lain, akademisi turut memberi kontribusi melalui riset, kajian ilmiah, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Industri dan sektor swasta berperan melalui investasi berkelanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung aksi lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah mengarahkan kebijakan dan regulasi, sementara mitra pembangunan (LSM, NGO, dan lembaga donor) memberi dukungan teknis, finansial, dan inovasi. Akademisi menyediakan riset dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan,

sementara industri dan sektor swasta menjalankan investasi berkelanjutan dan program CSR.

Peran masyarakat dan pemuda sangat vital, terutama melalui aksi swadaya menjaga lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Sementara itu, media menjadi kanal penting dalam menyebarkan informasi, edukasi, serta mengawasi jalannya pembangunan rendah karbon. Tak kalah penting, dukungan dari filantropi memperkuat sumber daya pendanaan untuk program-program inovatif yang pro-lingkungan.Dengan adanya sinergi dari berbagai aktor ini, pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tengah diharapkan mampu memperkuat daya tahan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.



Gambar 3.33
Crosscutting Pembangunan Rendah Karbon Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda menginisiasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai upaya strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan secara lintas sektor (*crosscutting*) dengan melibatkan berbagai dinas teknis sesuai mandat dan kewenangan masing-masing.

Pada sektor lahan, Dinas Kehutanan berperan melalui program pengelolaan hutan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengakuan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan, berkontribusi dalam pengendalian bencana pertanian, penyediaan sarana produksi, serta pengembangan usaha tani yang ramah lingkungan. Pada sektor energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong pengembangan energi baru terbarukan, sementara Dinas Perhubungan mendukung efisiensi transportasi dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih berkelanjutan. Untuk sektor pengelolaan limbah, peran diemban oleh Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Permukiman melalui program pengelolaan air limbah serta persampahan regional, yang diperkuat oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sementara itu, sektor *blue* karbon difokuskan pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, serta rehabilitasi ekosistem pesisir. Dinas Kehutanan turut memperkuat peran ini melalui program pengelolaan hutan terkait rehabilitasi mangrove yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami.

Keseluruhan inisiatif lintas sektor ini terintegrasi dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menjadi pijakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kolaborasi antar dinas, pemangku kepentingan, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan visi Sulawesi Tengah yang tangguh, berdaya saing, dan rendah karbon.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah tahun 2025-2030 adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penjabaran program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, dimana tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab kepala daerah periode 2030-2034. Penjabaran program kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi kewenangan masing-masing.

Tabel 4.1

Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.196.194.588.577,44		1.249.193.910.032,27		1.340.594.979.092,81		1.442.871.161.755,56		1.557.611.357.933,66	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					751.349.643.461,94		783.382.468.534,5		841.198.337.747,03		908.368.776.696,22		983.997.425.368,47	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	50	61	65	751.349.643.461,94	70	783.382.468.534,5	75	841.198.337.747,03	80	908.368.776.696,22	85	983.997.425.368,47	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	77	80		82		85		87		90		1.01.0.00.0.00.01.0001 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	77	80		82		85		87		90		1.01.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	77	80		82		85		87		90		1.01.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	77	80		82		85		87		90		1.01.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	77	80		82		85		87		90		1.01.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	77	80		82		85		87		90		1.01.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	77	80		82		85		87		90		1.01.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					443.629.480.152,41		464.552.092.264,82		498.041.203.766,68		533.019.792.777,69		571.986.529.266,57	
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menegah Atas	Nilai rapor pendidikan Sekolah Menengah Atas (Nilai)	64,078	66,876	68,056	124.216.254.442,56	69,236	130.074.585.834,24	70,416	139.451.537.054,88	71,596	149.245.541.977,92	72,776	160.156.228.194,72	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Persentase lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	79,48	79,82	80,16	144.179.581.049,81	80,5	150.979.429.985,9	80,84	161.863.391.224,03	81,18	173.231.432.652,66	81,52	185.895.622.011,78	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase akses terhadap Pendidikan Khusus (%)	57,74	62,74	67,74	88.725.896.030,4	72,74	92.910.418.453,2	77,74	99.608.240.753,4	82,74	106.603.958.555,4	87,74	114.397.305.853,2	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional (%)	57	62	67	13.308.884.404,56	72	13.936.562.767,92	77	14.941.236.112,98	82	15.990.593.783,34	87	17.159.595.877,98	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Menegah	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, minat, bakat, dan kreativitas siswa (%)	100	100	100	53.235.537.618,24	100	55.746.251.071,68	100	59.764.944.451,92	100	63.962.375.133,36	100	68.638.383.511,92	1.01.0.00.0.00.01.0001 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, minat, bakat, dan kreativitas siswa (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, minat, bakat, dan kreativitas siswa (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, minat, bakat, dan kreativitas siswa (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, minat, bakat, dan kreativitas siswa (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, minat, bakat, dan kreativitas siswa (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Meningkatnya Kualitas Layanan Platform Teknologi	Persentase pemenuhan layanan platform teknologi (%)	100	100	100	19.963.326.606,84	100	20.904.844.151,88	100	22.411.854.169,47	100	23.985.890.675,01	100	25.739.393.816,97	1.01.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					102.560.952,24		106.263.907,92		114.371.843,76		125.101.159,92		137.320.315,92	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	0	0	100	102.560.952,24	100	106.263.907,92	100	114.371.843,76	100	125.101.159,92	100	137.320.315,92	1.01.0.00.0.00.01.0001 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	0	0	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	0	0	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	0	0	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	0	0	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	0	0	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.01.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					667.742.406,5		691.851.195,02		744.639.441,2		814.494.673,04		894.049.789,62	
Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks distribusi guru (Indeks)	0,214	0,304	0,394	667.742.406,5	0,484	691.851.195,02	0,574	744.639.441,2	0,664	814.494.673,04	0,754	894.049.789,62	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
														1.01.0.00.0.00.01.0001 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					333.871.203,27		345.925.597,51		372.319.720,6		407.247.336,51		447.024.894,8	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan	Persentase penerbitan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	34,22	45,19	56,15	333.871.203,27	67,11	345.925.597,51	78,07	372.319.720,6	89,04	407.247.336,51	100	447.024.894,8	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
														1.01.0.00.0.00.01.0001 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					111.290.401,08		115.308.532,5		124.106.573,54		135.749.112,18		149.008.298,28	
Meningkatnya Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Bahasa Daerah yang dilestarikan (%)	0	0	52	111.290.401,08	64	115.308.532,5	76	124.106.573,54	88	135.749.112,18	100	149.008.298,28	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
														1.01.0.00.0.00.01.0001 - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					589.285.661.700		600.115.828.654,56		644.025.127.165,01		693.158.857.014,85		748.280.329.633,39	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					421.422.289.700		426.172.199.053		450.269.710.144,5		479.851.497.589,12		512.865.096.934,79	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76	78	80	185.150.001.557	82	185.851.440.557	84	199.449.826.060	86	214.666.179.363	88	231.736.892.385,07	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna) (Nilai)	93	93	93,5	233.222.288.143	94	237.259.203.593	94,5	247.534.321.217,5	95	261.649.094.402,12	95,5	277.310.772.652,14	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Akreditasi RSUD (Nilai Akreditasi)	85	85	86		87		88		89		90		1.02.0.00.0.00.01.0002 - RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT P2KT (%)	81	82	83	3.050.000.000	84	3.061.554.903	85	3.285.562.867	86	3.536.223.824	87	3.817.431.897,58	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT Labkes (%)	81	82	83		84		85		86		87		1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPT Laboratorium Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPT Badan Pelatihan Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					163.933.372.000		170.007.454.362,56		189.699.526.047,51		209.117.508.659,73		231.075.096.963,26	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (pasien) (Indeks)	80	80,5	81	84.730.294.000	82	90.504.316.264,56	82,5	104.379.299.221,51	83	117.288.062.235,73	84	131.943.176.851,53	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD (Indeks)	0	80	80		80,5		81		81,5		82		1.02.0.00.0.00.01.0002 - RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase cakupan Antenatal Care sesuai standar (%)	71,5	63	66	1.315.000.000	69	1.319.981.865	72	1.416.562.349	79	1.524.634.208	80	1.645.876.375,5	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Ibu Hamil yang mendapat Suplemen gizi (%)	66,9	68	70		75		80		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya pemahaman, penilaian dan penggunanaan informasi kesehatan dalam mengambil keputusan terkait pelayanan kesehatan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan	Persentase penduduk dengan literasi kesehatan (%)	15,38	23,07	30,76	200.000.000	38,46	200.757.698	46,15	215.446.745	53,84	231.883.530	61,53	250.323.403,12	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya jumlah KabKota yang menyelenggarakan dan mencapai tatanan Kab/Kota sehat secara berkelanjutan	Persentase Kab/Kota Sehat (%)	7,7	32,8	38,5	950.000.000	46,2	953.599.066	53,8	1.023.372.040	61,5	1.101.446.766	69,2	1.189.036.164,81	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya cakupan Deteksi Dini, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan Deteksi Dini penyakit menular (%)	77,66	78,51	80	4.450.000.000	83	4.466.858.782	83	4.793.690.081	85	5.159.408.533	85	5.569.695.719,38	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular (%)	66,8	68,6	70		72		74		76		78		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap (%)	80,5	83	85		90		93		95		98		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kab/Kota yang menyelenggaraakan sistem surveilans (%)	69,2	76,9	84,6		92,3		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan dasar	Persentase Puskesmas yang terakreditasi paripurna (%)	47,9	49,31	54,7	2.000.000.000	59,36	2.007.576.980	68,4	2.154.467.451	73,05	2.318.835.298	82,19	2.503.234.031,18	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi sesuai standar	Persentase Rumah Sakit yang mendapatkan pendampingan dalam rangka akreditasi (%)	100	100	100	66.600.000.000	100	66.852.313.458	100	71.743.766.154	100	77.217.215.368	100	83.357.693.238,12	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya ketersediaan logistik farmasi dan alat kesehatan yang rasioanal dan sesuai standar dalam upaya kesehatan masyarakat secara promotif preventiv	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL (%)	68,4	69,2	70,7	938.079.000	73,05	941.632.903	75,3	1.010.530.336	77,6	1.087.625.348	79,9	1.174.115.638,36	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya cakupan pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%)	71	44	47	800.000.000	49	803.030.793	53	861.786.981	55	927.534.119	57	1.001.293.612,47	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif (%)	63,1	65	70		75		80		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya praktek hidup sehat, mengurangi tingkat kejadian penyakit dan mencipt kan lingkungan yang mendukung kesehatan	Persentase anak umur 1 - 12 tahun minum obat pencegahan kecacingan di Kab/Kota minimal setahun sekali (%)	90,2	80	85	549.999.000	90	552.082.666	95	592.477.472	100	637.678.547	100	688.388.106,96	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Proporsi Sampel yang diperiksa sesuai standar	Persentase Sampel yang diperiksa sesuai standar (%)	81	82	83	750.000.000	84	752.841.368	85	807.925.295	86	869.563.236	87	938.712.761,69	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPT Laboratorium Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotens bencana provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi (%)	4,9	11,9	33,1	650.000.000	21,7	652.462.519	26,6	700.201.922	12,2	753.621.471	6,3	813.551.060,14	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.920.000.000		2.922.348.864		2.967.884.910		3.018.838.942		3.076.002.549,34	
Tercapainya tenaga kesehatan yang kompten, produktf, teemotivasi dan tersebar merata	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0,64	1	1,25	470.000.000	1,5	471.780.590	1,75	506.299.851	2	544.926.295	2,25	588.259.997	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)	74,26	78	80		82		84		86		88		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkanya pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi (%)	70	71	72	2.300.000.000	73	2.300.000.000	74	2.300.000.000	75	2.300.000.000	76	2.300.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan dan SKP	Persentase SDM kesehatan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan dan SKP (%)	100	10	15	150.000.000	25	150.568.274	25	161.585.059	25	173.912.647	100	187.742.552,34	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPT Badan Pelatihan Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					400.000.000		401.515.396		430.893.490		463.767.059		500.646.806	
Meningkatnya ketersdiaan, keterjangkauan, mutu dan penggunaan obat serta alat kesehatan yang rasional dan sesuai standar	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	96,77	97	97,5	400.000.000	98	401.515.396	98,5	430.893.490	99	463.767.059	99,5	500.646.806	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	71,2	73	75		80		85		90		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					610.000.000		612.310.979		657.112.573		707.244.765		763.486.380	
Tercapainya masyarakat yang mandiri, sadar kesehatan, berpartisipasi aktif dan memiliki perilaku hidup sehat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	60	65	70	610.000.000	75	612.310.979	80	657.112.573	85	707.244.765	90	763.486.380	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat) (%)	46,1	53,8	61,5		69,2		76,9		84,6		92,3		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					372.267.254.966,25		392.481.335.631,71		421.198.425.408,52		453.332.341.890,51		489.382.297.854,08	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					94.961.737.786		110.516.571.781,28		115.273.249.141,41		118.891.515.019,76		126.300.110.757,79	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	77,9	78	80	59.004.048.393	81	62.065.562.708	82	65.363.228.459	83	68.920.660.784	84	72.763.836.341	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	77	78	80		81		82		83		84		1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip (Nilai)	74,48	77,39	79,34	35.957.689.393	81,39	48.451.009.073,28	83,49	49.910.020.682,41	85,64	49.970.854.235,76	87,96	53.536.274.416,79	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78,2	78,2	86		87		88		89		90		1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78,2	78,2	86		87		88		89		90		1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78,2	78,2	86		87		88		89		90		1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					52.205.043.003		52.480.771.356,94		57.969.432.734,36		65.006.128.104,93		70.884.632.445,09	
Meningkatnya Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	25	25	30,76	6.697.200.167	35,52	7.256.057.467,18	42,28	8.640.987.858,42	48,04	9.371.220.108,75	53,08	10.504.843.834,64	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	15	15	16,51		18,02		19,53		21,04		22,55		1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	25	25	30,76		35,52		42,28		48,04		53,08		1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II
Meningkatnya Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman dari Abrasi dan Banjir ROB	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi dan Banjir ROB (%)	15	15	16,51	12.315.397.500	18,02	12.226.982.678,03	19,53	11.970.714.822	21,04	13.055.678.067,14	22,55	13.605.002.147,47	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi dan Banjir ROB (%)	15	15	16,51		18,02		19,53		21,04		22,55		1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II
Meningkatnya Penyediaan Kapasitas Air Baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,196	0,6	0,65	0	0,73	0	0,82	400.000.000	0,93	400.000.000	1	400.000.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Meningkatnya Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	0	62,9	63,65	33.192.445.336	64,65	32.997.731.211,73	65,75	36.957.730.053,94	66,85	42.179.229.929,04	68,25	46.374.786.462,98	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	0	62,9	63,65		64,65		65,75		66,85		68,25		1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	0	62,9	63,65		64,65		65,75		66,85		68,25		1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.141.346.650		1.141.346.650		1.809.574.000		3.039.574.000		4.539.574.000	
Meningkatnya Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	16,67	24,28	36,79	1.141.346.650	49,08	1.141.346.650	61,83	1.809.574.000	74,34	3.039.574.000	86,86	4.539.574.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	16,67	24,28	36,79		49,08		61,83		74,43		86,86		1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
														1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					725.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Meningkatnya Persentase Pengelolaan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	10,08	10,08	12,5	725.000.000	25	750.000.000	37,5	750.000.000	50	750.000.000	100	750.000.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.500.000.000		1.600.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Sanitasi	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Sanitasi Aman (%)	7,08	7,16	8,37	1.500.000.000	9,58	1.600.000.000	10,79	1.100.000.000	15	1.100.000.000	16,21	1.100.000.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					7.447.760.000		7.446.005.000		5.446.005.000		5.446.005.000		5.446.005.000	
Meningkatnya Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	66,26	66,91	67,55	7.447.760.000	68,18	7.446.005.000	68,8	5.446.005.000	69,4	5.446.005.000	69,98	5.446.005.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					52.825.041.000		32.634.760.227,44		36.757.974.628,08		38.761.260.175,83		39.575.196.073,54	
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	82,12	83,43	84,74	52.825.041.000	86,07	32.634.760.227,44	87,42	36.757.974.628,08	88,8	38.761.260.175,83	90,2	39.575.196.073,54	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.250.000.000		1.238.916.660,46		2.214.735.120,12		3.032.311.515,78		4.416.363.487,88	
Meningkatnya Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	10	15,5	1.250.000.000	21	1.238.916.660,46	26,5	2.214.735.120,12	32	3.032.311.515,78	37,5	4.416.363.487,88	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					700.000.000		700.000.000		1.200.000.000		2.041.430.216		2.350.493.286	
Meningkatnya Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	0	24,29	26,93	700.000.000	29,57	700.000.000	32,22	1.200.000.000	34,86	2.041.430.216	37,4	2.350.493.286	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
														1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					154.807.099.817,25		177.504.387.325,59		191.493.104.716,55		206.920.360.208,21		225.016.254.603,78	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kemantapan Jalan (%)	63,93	66,52	67	154.807.099.817,25	68,5	177.504.387.325,59	70	191.493.104.716,55	71,5	206.920.360.208,21	73	225.016.254.603,78	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kemantapan Jalan (%)	65	66,52	67		68,5		70		71,5		73		1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.352.113.355		3.234.288.315		3.592.175.034		4.171.878.825		4.501.834.100	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	43	46,25	60,47	2.352.113.355	74,69	3.234.288.315	88,91	3.592.175.034	100	4.171.878.825	100	4.501.834.100	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.352.113.355		3.234.288.315		3.592.175.034		4.171.878.825		4.501.834.100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang (%)	0	32,64	41,04	2.352.113.355	44,86	3.234.288.315	88,68	3.592.175.034	100	4.171.878.825	100	4.501.834.100	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (%)	0	16,49	42,8		59,29		84,35		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Pelasanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (%)	0	9,2	74,4		77,6		92,8		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Provinsi Sulawesi Tengah
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					198.327.920.395,16		174.883.311.439,67		187.727.280.179,86		202.102.452.804,79		267.900.841.939,63	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.452.098.667,16		18.752.182.613,67		18.437.280.179,86		18.912.452.804,79		19.270.841.939,63	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	24	100	100	17.452.098.667,16	100	18.752.182.613,67	100	18.437.280.179,86	100	18.912.452.804,79	100	19.270.841.939,63	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					47.400.000.000		70.880.000.000		70.930.000.000		70.930.000.000		81.880.000.000	
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Meningkatnya Fasilitasi Rumah Layak Huni Bagi Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	91,2	91,68	92,28	47.400.000.000	94,21	70.880.000.000	96,14	70.930.000.000	98,07	70.930.000.000	100	81.880.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemda Provinsi Yang Memperoleh Fasilitasi Rumah Layak Huni (%)	0	0	16,67		33,33		50		66,67		100		1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					30.260.000.000		28.760.000.000		29.060.000.000		29.260.000.000		51.050.000.000	
Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Yang Tertangani	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Yang Tertangani (%)	0,89	1,66	3,58	30.260.000.000	5,76	28.760.000.000	8,21	29.060.000.000	10,93	29.260.000.000	13,91	51.050.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					103.215.821.728		56.491.128.826		69.300.000.000		83.000.000.000		115.700.000.000	
Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Yang Terfasilitasi PSU (%)	15,03	16,02	16,52	103.215.821.728	17,01	56.491.128.826	17,51	69.300.000.000	18	83.000.000.000	18,5	115.700.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					35.865.885.862,88		37.322.924.342,5		40.053.769.536,12		43.109.537.096,79		46.537.699.551,92	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31.742.938.098,88		31.862.653.687		33.334.696.474		34.859.996.758,79		36.793.569.593,92	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	58,42	68,7	68,4	17.399.042.565,88	70	17.709.107.688	70,5	18.713.722.975	71	19.457.715.135,79	72	20.254.931.593,92	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	64,23	65	67,5	14.343.895.533	70	14.153.545.999	72,5	14.620.973.499	75	15.402.281.623	75	16.538.638.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.000.000.000		1.550.000.000		1.900.000.000		2.300.000.000		2.850.000.000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	247.265.000	100	454.530.000	100	574.530.000	100	764.530.000	100	1.010.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	435.000.000	100	585.000.000	100	665.000.000	100	745.000.000	100	869.530.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Laporan Tentang Potensi Gangguan Trantibumlinmas yang di Tindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Satgas Linmas yang terbentuk (%)	100	100	100	155.000.000	100	215.000.000	100	275.000.000	100	325.000.000	100	355.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	142.735.000	100	245.470.000	100	285.470.000	100	315.470.000	100	415.470.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Sarana Prasarana Penanganan Trantibumlinmas	Persentase Sarana Prasarana Penanganan Trantibumlinmas Yang Terpenuhi (%)	100	100	100	20.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.122.947.764		2.514.095.152		3.266.206.274		3.849.540.338		4.244.129.958	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	722.947.764	100	759.095.152	100	933.270.803	100	1.179.914.343	100	1.438.931.061	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	20	30	45	750.000.000	55	922.500.000	65	1.355.810.471	85	1.429.900.995	100	1.501.396.046	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	650.000.000	100	832.500.000	100	977.125.000	100	1.239.725.000	100	1.303.802.851	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.000.000.000		1.396.175.503,5		1.552.866.788,12		2.100.000.000		2.650.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* (daerah)	13	13	13	700.000.000	13	1.096.175.503,5	13	1.252.866.788,12	13	1.800.000.000	13	2.350.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					63.028.460.299,33		67.515.616.417,1		72.455.601.690,2		77.983.357.999,13		84.184.761.168,46	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					29.586.731.769,33		31.691.144.818,1		34.008.111.710,2		36.600.873.056,13		39.510.001.269,46	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	68	70,05	27.823.211.769,33	72	29.802.062.194,1	74	31.980.748.242,2	76	34.418.821.756,13	78	37.154.476.894,46	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	90	92	1.763.520.000	94	1.889.082.624	96	2.027.363.468	97	2.182.051.300	98	2.355.524.375	1.06.0.00.0.00.01.0001 - UPT Panti Sosial Anak
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	90	92		94		96		97		98		1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	90	92		94		96		97		98		1.06.0.00.0.00.01.0003 - UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	90	92		94		96		97		98		1.06.0.00.0.00.01.0004 - UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					820.000.000		878.384.000		942.681.707		1.014.608.320		1.095.269.680	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	PERSENTASE REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG DITERBITKAN (Persentase)	100	100	100	820.000.000	100	878.384.000	100	942.681.707	100	1.014.608.320	100	1.095.269.680	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)	5	5	6		7		8		9		10		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	0	50		60		70		80		90		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitas dalam Pelayanan Sosial (%)	0	0	50		60		70		80		90		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					18.370.000		19.677.944		21.118.369		22.729.701		24.536.712	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Jiwa)	8	8	10	18.370.000	12	19.677.944	14	21.118.369	16	22.729.701	18	24.536.712	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.888.580.000		6.309.538.894		6.772.064.203		7.290.224.188		7.872.164.417	
Meningkatnya rehabilitasi sosial Dalam Panti Berbasisi Masyarakat	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	1.590.000.000	100	1.704.900.000	100	1.830.365.760	100	1.971.474.150	100	2.130.573.751	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Anak Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Persentase Anak Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	4.298.580.000	100	4.604.638.894	100	4.941.698.443	100	5.318.750.038	100	5.741.590.666	1.06.0.00.0.00.01.0001 - UPT Panti Sosial Anak
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
	Persentase Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0003 - UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0004 - UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					24.914.778.530		26.688.710.761		28.642.324.389		30.827.733.737		33.278.538.570	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0,05	0,06	0,06	24.914.778.530	0,06	26.688.710.761	0,07	28.642.324.389	0,07	30.827.733.737	0,07	33.278.538.570	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0,02	0,02	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0	0	1		1,06		1,1		1,14		1,16		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Anak Yang Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Anak (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.250.000.000		1.339.000.000		1.437.014.800		1.546.659.026		1.669.618.416	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.250.000.000	100	1.339.000.000	100	1.437.014.800	100	1.546.659.026	100	1.669.618.416	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					550.000.000		589.160.000		632.286.512		680.529.971		734.632.104	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	100	100	100	550.000.000	100	589.160.000	100	632.286.512	100	680.529.971	100	734.632.104	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					80.156.905.809		85.044.554.077		90.670.489.018		97.452.086.522		104.911.919.076	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					34.202.293.324		36.325.521.592		38.975.634.933		43.077.693.109		48.730.435.980	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A (Nilai)	76,35	75,5	78,5	34.202.293.324	80,5	36.325.521.592	82,5	38.975.634.933	83,5	43.077.693.109	85	48.730.435.980	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPT.BLK-PP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	76,5	78,5		80,5		82,5		83,5		85		2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	76,5	78,5		80,5		82,5		83,5		85		2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					216.500.000		233.820.000		252.525.600		272.727.648		313.636.795	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	23,08	23,08	23,08	216.500.000	46,15	233.820.000	61,54	252.525.600	84,62	272.727.648	100	313.636.795	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
														2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					10.400.000.000		12.087.500.000		13.199.840.000		14.255.827.200		15.316.293.349	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	3,92	11,96	11,96	10.400.000.000	12,71	12.087.500.000	13,83	13.199.840.000	14,95	14.255.827.200	17,57	15.316.293.349	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
														2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					21.053.226.485		21.290.826.485		22.331.434.485		23.475.291.125		23.572.656.296	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (%)	94,58	52,06	52,06	21.053.226.485	56,14	21.290.826.485	60,61	22.331.434.485	65,56	23.475.291.125	75,36	23.572.656.296	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
														2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					11.909.886.000		12.416.886.000		13.101.254.000		13.435.763.440		13.847.395.056	
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja (%)	72	73	74	11.909.886.000	75	12.416.886.000	76	13.101.254.000	77	13.435.763.440	78	13.847.395.056	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
														2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					2.375.000.000		2.690.000.000		2.809.800.000		2.934.784.000		3.131.501.600	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase perusahaan yang diawasi (%)	50	51	52	2.375.000.000	53	2.690.000.000	54	2.809.800.000	55	2.934.784.000	56	3.131.501.600	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya (%)	65	68	73		76		79		82		85		2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya (%)	70,01	73,5	77,18		81,04		85,1		89,35		93,81		2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					16.877.938.796,96		18.062.041.366,66		19.383.605.518,6		20.862.412.473,43		22.521.436.067,08	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.800.938.796,96		13.799.041.366,66		14.652.605.518,6		15.512.412.473,43		16.472.436.067,08	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70,67	72	74	12.800.938.796,96	76	13.799.041.366,66	78	14.652.605.518,6	80	15.512.412.473,43	82	16.472.436.067,08	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					757.000.000		784.000.000		856.000.000		950.000.000		1.058.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9,12	9,22	9,32	757.000.000	9,52	784.000.000	9,72	856.000.000	9,92	950.000.000	10,12	1.058.000.000	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					713.000.000		734.000.000		790.000.000		865.000.000		949.000.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	0.014:0.013	0.013:0.012	0.012:0.011	475.000.000	0.011:0.010	489.000.000	0.010:0.009	526.000.000	0.009:0.008	576.000.000	0.008:0.007	632.000.000	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Sesuai Ketentuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	70	71	72	238.000.000	74	245.000.000	76	264.000.000	78	289.000.000	80	317.000.000	2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					794.000.000		870.000.000		1.066.000.000		1.326.000.000		1.621.000.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pusat Pembelajaran Keluaran (PUSPAGA) Yang Terbentuk (%)	7,14	10,2	14,29	794.000.000	21,43	870.000.000	28,57	1.066.000.000	35,71	1.326.000.000	42,86	1.621.000.000	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					238.000.000		252.000.000		273.000.000		298.000.000		324.000.000	
Meningkatnya Kualitas Data Terpilah	Persentase Data Terpilah Yang Termutahirkan (%)	25	25	30	238.000.000	35	252.000.000	40	273.000.000	45	298.000.000	50	324.000.000	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Data Terpilah Yang Terpublikasikan (%)	60	60	65		70		75		80		85		2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					646.000.000		666.000.000		716.000.000		784.000.000		860.000.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif	Persentase Kab/Kota Yang Ditetapkan Sebagai Kab/Kota Layak Anak (KLA) (%)	38,46	61,58	69,23	646.000.000	76,92	666.000.000	84,62	716.000.000	92,31	784.000.000	100	860.000.000	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					929.000.000		957.000.000		1.030.000.000		1.127.000.000		1.237.000.000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	0.031:0.030	0.030:0.029	0.029:0.028	929.000.000	0.028:0.027	957.000.000	0.027:0.026	1.030.000.000	0.026:0.025	1.127.000.000	0.025:0.024	1.237.000.000	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	70	71	72		74		76		78		80		2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					25.969.830.119,02		27.791.790.901,59		29.825.261.749,56		32.100.679.729,06		34.653.394.335,32	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.944.830.119,02		12.405.090.901,59		12.859.029.749,56		13.636.906.669,06		15.176.655.872,32	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	16,34	45	50	11.944.830.119,02	60	12.405.090.901,59	65	12.859.029.749,56	68	13.636.906.669,06	72	15.176.655.872,32	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	16,34	45	50		60		65		68		72		2.09.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					1.400.000.000		1.806.000.000		2.212.180.000		2.618.545.400		3.025.101.762	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (%)	100	100	100	1.400.000.000	100	1.806.000.000	100	2.212.180.000	100	2.618.545.400	100	3.025.101.762	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					9.225.000.000		9.949.700.000		10.219.622.000		10.504.864.760		10.792.762.912	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Panga Harapan Ketersedian (Skor)	85,29	88,3	89,4	9.225.000.000	90	9.949.700.000	90,1	10.219.622.000	90,15	10.504.864.760	90,5	10.792.762.912	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor)	85,29	88,3	89,4		90		90,1		90,15		90,5		2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	668,7	100	100		100		100		100		100		2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan (%)	1,29	5	5		5		5		5		5		2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.000.000.000		2.189.000.000		2.249.170.000		2.310.545.100		2.383.161.454	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	15,34	14,49	13,6	2.000.000.000	12,75	2.189.000.000	11,85	2.249.170.000	10,96	2.310.545.100	9	2.383.161.454	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1.400.000.000		1.442.000.000		2.285.260.000		3.029.817.800		3.275.712.335	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	86,65	87	88	1.400.000.000	89	1.442.000.000	90	2.285.260.000	91	3.029.817.800	92	3.275.712.335	2.09.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					976.600.000		1.001.800.000		1.027.000.000		1.052.200.000		927.400.000	
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu (%)	0	0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					366.400.000		391.600.000		416.800.000		442.000.000		317.200.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Yang Terfasilitasi (%)	35,71	46,63	66,67	366.400.000	75	391.600.000	80	416.800.000	83,33	442.000.000	85,71	317.200.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					74.000.000		74.000.000		74.000.000		74.000.000		74.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untu Pembangunan (%)	0	0	100	74.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					264.400.000		264.400.000		264.400.000		264.400.000		264.400.000	
Meningkatnya Redistribusi Tanah Yang Terinfestarisasi	Persentase Redistribusi Tanah Yang Terinfestarisasi (%)	79,79	100	100	264.400.000	100	264.400.000	100	264.400.000	100	264.400.000	100	264.400.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					46.800.000		46.800.000		46.800.000		46.800.000		46.800.000	
Meningkatnya Legalitas Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat Yang Ditetapkan (%)	0	0	100	46.800.000	100	46.800.000	100	46.800.000	100	46.800.000	100	46.800.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Penatagunaan Tanah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah Yang Tersusun (%)	0	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					15.590.560.891,88		16.860.921.128,65		18.094.601.667,86		19.475.068.411,55		21.023.767.442,59	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.963.054.291,88		14.013.737.064,65		15.054.916.237,86		16.120.565.222,55		17.010.523.593,59	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	68	70	12.963.054.291,88	72	14.013.737.064,65	74	15.054.916.237,86	76	16.120.565.222,55	78	17.010.523.593,59	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	68	70		72		74		76		78		2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					39.733.000		43.186.000		46.212.000		49.589.000		471.757.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	39.733.000	100	43.186.000	100	46.212.000	100	49.589.000	100	471.757.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.010.412.100		1.098.235.064		1.175.189.430		1.261.066.189		1.357.150.849	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,63	80,96	81,16	1.010.412.100	81,36	1.098.235.064	81,56	1.175.189.430	81,76	1.261.066.189	81,96	1.357.150.849	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80	80,31	80,61		80,91		81,21		81,51		81,81		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,63	61,83	62,03		62,23		62,43		62,63		62,83		2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80	80,31	80,61		80,91		81,21		81,51		81,81		2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					109.917.500		115.124.000		119.688.000		224.781.000		230.478.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	8	10	12	109.917.500	14	115.124.000	16	119.688.000	18	224.781.000	20	230.478.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					230.521.300		250.557.000		268.114.000		287.707.000		309.628.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	45	50	55	230.521.300	60	250.557.000	65	268.114.000	70	287.707.000	75	309.628.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					472.670.600		513.754.000		549.753.000		589.927.000		634.875.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	79,31	80,28	83,1	472.670.600	85,92	513.754.000	88,73	549.753.000	91,55	589.927.000	94,37	634.875.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					117.757.200		127.992.000		136.961.000		146.969.000		158.167.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	20	25	117.757.200	30	127.992.000	35	136.961.000	40	146.969.000	45	158.167.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					245.323.350		266.645.000		285.329.000		306.179.000		329.508.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	20	20	25	245.323.350	30	266.645.000	35	285.329.000	40	306.179.000	45	329.508.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					143.319.800		155.776.000		166.692.000		178.873.000		192.502.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	40	45	50	143.319.800	55	155.776.000	60	166.692.000	65	178.873.000	70	192.502.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					207.851.750		225.915.000		241.747.000		259.412.000		279.178.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	38	38,2	39	207.851.750	40	225.915.000	41	241.747.000	42	259.412.000	43	279.178.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.895.039.247,18		11.782.795.931,09		12.644.920.006,44		13.609.621.626,62		14.691.887.803,08	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.745.039.247,18		9.332.795.931,09		9.969.920.006,44		10.609.621.626,62		11.266.887.803,08	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	58,27	59	60	8.745.039.247,18	62	9.332.795.931,09	65	9.969.920.006,44	67	10.609.621.626,62	70	11.266.887.803,08	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					675.000.000		725.000.000		775.000.000		875.000.000		1.025.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%)	20	25	30	675.000.000	34	725.000.000	37,5	775.000.000	41	875.000.000	45	1.025.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					675.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	68	70	72,13	675.000.000	74,5	750.000.000	77	800.000.000	80	850.000.000	82,75	1.000.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					550.000.000		725.000.000		800.000.000		950.000.000		1.050.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	550.000.000	100	725.000.000	100	800.000.000	100	950.000.000	100	1.050.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					250.000.000		250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					38.027.200.000		40.696.141.095,51		43.673.797.945,18		47.005.743.391,7		50.743.740.491,66	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.661.807.432		17.416.370.000		18.745.240.000		20.503.750.000		22.506.430.000	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	77,44	80,44	85,44	13.661.807.432	90,44	17.416.370.000	95,44	18.745.240.000	100,44	20.503.750.000	105,44	22.506.430.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					3.050.700.200		3.862.740.000		4.146.700.000		4.535.710.000		4.978.730.000	
Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa (Angka)	15	15	15	3.050.700.200	15	3.862.740.000	15	4.146.700.000	15	4.535.710.000	15	4.978.730.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan dan produktivitas Aset Desa (Angka)	18	18	20		20		20		20		20		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					479.849.850		460.920.000		496.090.000		542.630.000		595.630.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi Dalam Peningkatan Kerja Sama Desa	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Desa (Angka)	10	10	10	479.849.850	10	460.920.000	10	496.090.000	10	542.630.000	10	595.630.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan ekonomi kreatif (Angka)	10	10	10		10		10		10		10		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					5.056.001.050		5.270.350.000		5.587.820.000		6.039.250.000		6.068.400.000	
Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, Nilai Dimensi Lingkungan, Nilai Dimensi Aksebilitas	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa (Angka)	10	10	68	2.574.001.050	67	2.788.350.000	67	3.044.000.200	67	3.295.430.200	67	3.274.580.200	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan, Prodeskel, EPDesKel, LomDesKel, PINDesKel dan Penetapan, Penegasan Tapal Batas Desa (Nilai)	15	15	15		15		15		15		15		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) (Angka)	17	17	17		17		17		17		17		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi Dalam Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi (Angka)	77	77	78	2.482.000.000	78	2.482.000.000	78	2.543.819.800	78	2.743.819.800	78	2.793.819.800	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					15.778.841.468		13.685.761.095,51		14.697.947.945,18		15.384.403.391,7		16.594.550.491,66	
Meningkatnya Nilai Dimensi Layanan Dasar	Nilai Dimensi Layanan Dasar (Angka)	131	131	131	13.803.440.000	132	11.136.761.095,51	133	11.612.697.945,18	134	12.315.403.391,7	134	12.894.550.491,66	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Nilai Dimensi Sosial	Nilai Dimensi Sosial (Angka)	53	53	53	1.325.401.468	53	1.650.000.000	53	2.086.250.000	53	2.070.000.000	53	2.500.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan pemanfaatan TTG (Nilai)	6	6	6	650.000.000	6	899.000.000	6	999.000.000	6	999.000.000	6	1.200.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.261.158.548,67		13.108.449.194,05		14.067.568.719,4		15.140.806.535,74		16.344.835.806,17	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.461.628.548,67		11.108.449.344,05		11.532.568.719,4		12.245.806.535,74		12.559.835.806,17	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	64	70	71	10.461.628.548,67	72	11.108.449.344,05	73	11.532.568.719,4	74	12.245.806.535,74	75	12.559.835.806,17	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					440.871.600		525.000.000		735.000.000		830.000.000		855.000.000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita (Angka)	2,31	2,23	2,2	440.871.600	2,17	525.000.000	2,14	735.000.000	2,12	830.000.000	2,1	855.000.000	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					394.186.500		400.000.000		490.000.000		665.000.000		1.050.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	80,8	81,55	82,3	394.186.500	83,04	400.000.000	83,76	490.000.000	84,48	665.000.000	85,18	1.050.000.000	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	12,8	12,29	11,78		11,27		10,76		10,25		9,74		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					964.471.900		1.074.999.850		1.310.000.000		1.400.000.000		1.880.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Seiahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Indeks)	83,13	84,45	85,66	964.471.900	86,78	1.074.999.850	87,81	1.310.000.000	88,76	1.400.000.000	89,65	1.880.000.000	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	60,48	62,07	62,59		63,1		63,6		64,09		64,58		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Spesific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun (Angka)	38	32,65	31,8		30,95		30,1		28,25		29		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	12,64	17,64	22,64		27,64		32,64		37,64		39,64		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					56.545.361.862,84		42.319.738.827,04		45.416.191.139,28		48.881.066.611,18		52.768.193.418,5	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					26.016.584.235,84		25.419.738.827,04		27.466.191.139,28		29.481.066.611,18		30.668.193.418,5	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	66	70	72	26.016.584.235,84	74	25.419.738.827,04	76	27.466.191.139,28	78	29.481.066.611,18	80	30.668.193.418,5	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	66	70	72		74		76		78		80		2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					7.908.681.952		9.600.000.000		9.575.000.000		10.250.000.000		11.500.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Rasio)	0,417	0,427	0,437	1.262.149.798	0,448	2.565.000.000	0,458	2.987.000.000	0,468	3.204.000.000	0,478	3.898.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
	Konektivitas Darat (Persentase)	1	2	3		4		5		6		7		2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	1	2	3		4		5		6		7		2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan jalan	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan (%)	12	20	25	6.646.532.154	30	7.035.000.000	40	6.588.000.000	45	7.046.000.000	50	7.602.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					22.603.595.785		6.900.000.000		7.925.000.000		8.600.000.000		9.600.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Rasio)	0,177	0,187	0,187	22.293.675.185	0,197	5.810.000.000	0,197	6.565.000.000	0,207	7.080.000.000	0,207	7.820.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
	Konektivitas Laut (Unit)	1	2	3		4		5		6		7		2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A
Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	Persentase Kapal Pelayaran yang Layak Beroperasi (%)	40	50	60	309.920.600	70	1.090.000.000	80	1.360.000.000	90	1.520.000.000	100	1.780.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					16.499.890		400.000.000		450.000.000		550.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Persentase hasil koordinasi perkeretaapian yang dilaksanakan (%)	50	50	60	16.499.890	70	400.000.000	80	450.000.000	90	550.000.000	100	1.000.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					35.808.543.498,17		36.685.004.596,25		39.369.174.449,65		42.372.713.135,44		45.742.281.776,37	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.055.198.149,17		13.374.741.259,25		14.353.344.848,65		15.448.384.998,44		16.676.873.565,37	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	63,84	68	70	13.055.198.149,17	75	13.374.741.259,25	80	14.353.344.848,65	85	15.448.384.998,44	95	16.676.873.565,37	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5.222.079.258		5.349.896.502		5.741.337.938		6.179.353.997		6.670.749.425	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	10,31	11	15	5.222.079.258	20	5.349.896.502	30	5.741.337.938	40	6.179.353.997	50	6.670.749.425	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					17.531.266.091		17.960.366.835		19.274.491.663		20.744.974.140		22.394.658.786	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi (Level)	0	4	4	17.531.266.091	4	17.960.366.835	4	19.274.491.663	4	20.744.974.140	5	22.394.658.786	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Level)	0	3	3		4		4		4		5		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi (Level)	0	2	3		3		4		4		5		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas (Persentase)	0	0	23		38		54		77		100		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					24.937.695.940,66		26.687.245.468,06		28.639.898.892,38		30.824.883.601,59		33.276.144.175,2	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.664.809.398		16.641.723.824,04		17.575.077.458,59		18.621.130.818,12		19.767.203.181,75	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	58,71	63,06	67,91	15.358.521.756	72,11	16.274.434.047,9	76,86	17.221.503.525,71	81,46	18.255.669.027,33	86,41	19.388.280.632,51	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,51	90,01	91,15	306.287.642	92	367.289.776,14	94,5	353.573.932,88	95,7	365.461.790,79	96,9	378.922.549,24	2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPT Balai Pelatihan
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					156.382.468,97		253.447.388,31		324.114.501,63		404.987.979,52		497.655.643,21	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan piniam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang diberikan Layanan Perizinan (%)	13,16	13,24	14,71	156.382.468,97	16,18	253.447.388,31	17,65	324.114.501,63	19,12	404.987.979,52	20,59	497.655.643,21	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					1.206.106.463,2		1.334.034.572,64		1.427.171.295,03		1.533.759.640,14		1.655.892.300,82	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	13,46	16,95	22,39	1.206.106.463,2	23,13	1.334.034.572,64	24,63	1.427.171.295,03	26,12	1.533.759.640,14	27,61	1.655.892.300,82	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					121.855.017		197.489.142,78		252.553.776,22		315.571.328,36		387.779.047,89	
Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi sehat (%)	26,92	28,05	29,85	121.855.017	30,6	197.489.142,78	31,34	252.553.776,22	32,09	315.571.328,36	32,84	387.779.047,89	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					212.382.360,19		259.977.952,44		363.190.619,27		453.725.501,81		557.624.307,89	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0,8	0,84	0,97	212.382.360,19	1,12	259.977.952,44	1,38	363.190.619,27	1,51	453.725.501,81	1,83	557.624.307,89	2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPT Balai Pelatihan
Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi yang Terlatih	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0,8	0	0,97	0	1,12	0	1,38	0	1,51	0	1,83	0	2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPT Balai Pelatihan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					2.931.888.936,26		2.877.133.701,08		3.121.699.278,45		3.401.587.163,53		3.722.292.508,23	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	12,67	26,47	41,18	368.333.344	17,65	121.913.612,88	23,53	191.678.014,91	26,47	251.624.334,49	38,24	320.368.411,81	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	0,4	0,65	2.563.555.592,26	0,79	2.755.220.088,2	0,92	2.930.021.263,54	1,06	3.149.962.829,04	1,19	3.401.924.096,42	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.475.543.383,46		2.765.306.287,13		3.065.845.717,92		3.395.459.342,12		3.773.524.140,34	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0	0,11	0,12	1.201.000.000	0,13	1.231.970.318,43	0,14	1.192.313.791,18	0,15	1.269.708.613,48	0,16	1.340.577.099,07	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	1,87	2,18		2,23		2,4		2,55		2,7		2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPT Balai Pelatihan
Meningkatnya Akses UMKM Terhadap Sumberdaya Produktif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Hasil Pendampingan Yang Memiliki Kemampuan Mengakses Sumber daya Produktif Usaha (%)	0	0,14	0,15	1.062.161.023,27	0,16	1.212.355.882,12	0,17	1.463.055.016,6	0,18	1.612.851.078,04	0,19	1.802.687.826,14	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas SDM UMKM Yang Terlatih	Persentase Kualitas SDM UMKM Yang Terlatih (%)	0,73	0,8	0,87	212.382.360,19	0,93	320.980.086,58	0,98	410.476.910,14	1,1	512.899.650,6	1,5	630.259.215,13	2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPT Balai Pelatihan
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.168.727.913,58		2.358.132.599,64		2.510.246.245,27		2.698.661.827,99		2.914.173.045,07	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	5,76	6,85	1.000.000.000	7,75	1.000.000.000	8,45	1.000.000.000	8,95	1.000.000.000	9,23	1.000.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas (%)	0	0,012	0,019	1.084.021.137,58	0,022	1.235.110.106,15	0,026	1.356.451.846,27	0,029	1.506.751.799,95	0,033	1.678.666.067,87	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase wirausaha Baru (%)	0	0,17	0,19	84.706.776	0,2	123.022.493,49	0,21	153.794.399	0,22	191.910.028,04	0,24	235.506.977,2	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					16.546.771.076		17.707.639.971,27		19.003.273.268,01		20.453.064.053,64		22.079.535.386,74	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.896.771.076		14.687.639.971,27		15.533.273.268,01		16.528.064.053,64		17.654.535.386,74	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	79,89	80	80,25	13.896.771.076	80,5	14.687.639.971,27	80,75	15.533.273.268,01	81	16.528.064.053,64	81,25	17.654.535.386,74	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					450.000.000		500.000.000		575.000.000		650.000.000		725.000.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia (%)	100	100	100	450.000.000	100	500.000.000	100	575.000.000	100	650.000.000	100	725.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan (%)	89	90	90		90		91		91		91		2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					550.000.000		630.000.000		725.000.000		825.000.000		950.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi (%)	100	100	100	550.000.000	100	630.000.000	100	725.000.000	100	825.000.000	100	950.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					700.000.000		800.000.000		920.000.000		1.025.000.000		1.125.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	92	93	93	700.000.000	94	800.000.000	94	920.000.000	95	1.025.000.000	95	1.125.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan (%)	89	90	90		90		90		90		90		2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					600.000.000		690.000.000		800.000.000		925.000.000		1.050.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal (%)	47	55	60	600.000.000	65	690.000.000	70	800.000.000	75	925.000.000	80	1.050.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		575.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	90	92	92	350.000.000	93	400.000.000	93	450.000.000	94	500.000.000	95	575.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					32.183.220.000		34.575.888.170,89		37.105.738.114,25		39.936.595.538,3		43.112.438.904,09	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.111.670.000		13.422.400.170,89		14.446.530.114,25		15.801.760.038,3		17.345.170.004,09	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	50	55	60	13.111.670.000	65	13.422.400.170,89	70	14.446.530.114,25	75	15.801.760.038,3	80	17.345.170.004,09	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.394.430.000		3.451.170.000		3.638.190.000		3.885.690.000		3.705.438.900	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	0,52	0,51	0,43	1.850.000.000	0,5	2.845.075.500	0,57	2.948.381.000	0,64	3.113.239.400	0,71	2.973.303.210	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan	persentase sarana pemuda yang termanfaatkan (%)	21,25	23,75	25	300.000.000	43,75	345.000.000	62,5	396.750.000	81,25	476.363.000	93,75	391.634.950	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
	persentase prasarana pemuda yang termanfaatkan (%)	20	20	20		40		60		80		80		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Peran Organisasi Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi) (%)	58,33	60	62,5	244.430.000	65	261.094.500	68,33	293.059.000	71,67	296.087.600	79,17	340.500.740	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					16.268.600.000		17.284.118.000		18.570.908.000		19.756.805.500		21.521.410.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase medali yang diperoleh dalam event (%)	50	58	60	15.100.000.000	64	15.310.230.000	78,57	16.428.080.000	80	17.385.107.500	82	18.966.958.125	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
	persentase induk olahraga yang berprestasi (%)	10,53	11,58	12,11		12,63		13,16		14,74		15,79		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga	persentase sarana olahraga yang termanfaatkan (%)	40	46,67	50	1.168.600.000	57,14	1.973.888.000	62,5	2.142.828.000	90	2.371.698.000	93,33	2.554.451.875	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan (%)	71,43	78,57	85,71		85,71		85,71		92,86		100		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					408.520.000		418.200.000		450.110.000		492.340.000		540.420.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	8,51	9,5	10,51	408.520.000	12,35	418.200.000	14,35	450.110.000	16,35	492.340.000	18,35	540.420.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					746.011.322		764.270.928		820.191.135		882.764.856		952.964.203	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					746.011.322		764.270.928		820.191.135		882.764.856		952.964.203	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	746.011.322	100	764.270.928	100	820.191.135	100	882.764.856	100	952.964.203	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	30	43	55		68		80		93		100		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					746.011.323		764.270.929		820.191.136		882.764.857		952.964.202	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					746.011.323		764.270.929		820.191.136		882.764.857		952.964.202	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	67	44	44	746.011.323	52	764.270.929	65	820.191.136	70	882.764.857	82	952.964.202	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					18.664.975.000		19.800.422.461,29		21.249.180.549,43		22.870.315.273,34		24.689.011.585,71	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.941.000.000		12.889.072.461,29		13.808.930.549,43		14.814.715.273,34		15.841.161.585,71	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	61,8	65	67,5	11.941.000.000	70	12.889.072.461,29	72,5	13.808.930.549,43	75	14.814.715.273,34	82,75	15.841.161.585,71	2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	0	0	0		0		0		0		0		2.22.0.00.0.00.01.0001 - UPT. Taman Budaya dan Permuseuman
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.602.000.000		3.705.000.000		3.988.000.000		4.362.000.000		4.788.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	20	30	40	3.602.000.000	50	3.705.000.000	60	3.988.000.000	70	4.362.000.000	80	4.788.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Peningkatan Kepuasan Atas Pelayanan Fasilitasi Pentas Seni dan Budaya (Persentase)	14,28	18,75	21,05		21,73		23,21		25,37		27,98		2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					112.000.000		115.000.000		124.000.000		135.000.000		149.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	55	60	65	112.000.000	70	115.000.000	75	124.000.000	85	135.000.000	90	149.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					170.000.000		174.000.000		188.000.000		205.000.000		226.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi seiarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	34	37,67	39,33	170.000.000	40,67	174.000.000	42,33	188.000.000	44,67	205.000.000	46	226.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.216.000.000		1.251.000.000		1.347.000.000		1.473.000.000		1.617.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	13,77	17,71	21,65	1.216.000.000	25,59	1.251.000.000	29,52	1.347.000.000	33,46	1.473.000.000	37,4	1.617.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1.623.975.000		1.666.350.000		1.793.250.000		1.880.600.000		2.067.850.000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	25	38	42	1.623.975.000	54	1.666.350.000	60	1.793.250.000	70	1.880.600.000	75	2.067.850.000	2.22.0.00.0.00.01.0001 - UPT. Taman Budaya dan Permuseuman
	Persentase Capaian Ketercukupan Koleksi (%)	36,99	37,49	38,09		38,59		39,19		39,69		41,29		2.22.0.00.0.00.01.0001 - UPT. Taman Budaya dan Permuseuman
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					21.543.010.650		23.054.357.028,68		24.741.199.129,03		26.628.745.659,39		28.746.320.382,56	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19.108.291.984		20.448.831.074,01		21.945.031.949		23.619.254.313,8		25.497.507.858,1	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,45	76	77	19.108.291.984	78	20.448.831.074,01	79	21.945.031.949	78	23.619.254.313,8	80	25.497.507.858,1	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					2.046.954.437		2.190.558.189,79		2.350.837.037,43		2.530.186.238,35		2.731.392.051,49	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	67,48	68	70	2.046.954.437	72	2.190.558.189,79	74	2.350.837.037,43	76	2.530.186.238,35	78	2.731.392.051,49	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi (%)	2,83	3,22	347		3,86		4,12		4,5		4,76		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					387.764.229		414.967.764,88		445.330.142,6		479.305.107,24		517.420.472,97	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)	81,11	83,54	84,39	387.764.229	86,08	414.967.764,88	87,8	445.330.142,6	89,55	479.305.107,24	91,34	517.420.472,97	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.341.213.864		1.435.306.502,65		1.540.325.065,18		1.657.838.982,65		1.789.673.879,04	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					929.224.243		994.413.817,36		1.067.173.126,59		1.148.589.509,12		1.239.927.799,81	
Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Persentase Prangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar (%)	8,33	10,42	14,58	929.224.243	18,75	994.413.817,36	22,92	1.067.173.126,59	27,08	1.148.589.509,12	31,25	1.239.927.799,81	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
	Tingkat ketersediaan arsip yang dikelola (Nilai)	170,368	170,893	171,418		171,943		172,468		172,993		173,518		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					128.225.764		137.221.421,44		147.261.643,79		158.496.475,35		171.100.453,56	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	1,46	1,74	1,88	128.225.764	2,01	137.221.421,44	2,15	147.261.643,79	2,29	158.496.475,35	2,43	171.100.453,56	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					283.763.857		303.671.263,85		325.890.294,8		350.752.998,18		378.645.625,67	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup (%)	0	0	100	283.763.857	100	303.671.263,85	100	325.890.294,8	100	350.752.998,18	100	378.645.625,67	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka (%)	0	0	100		100		100		100		100		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					64.431.805.252,15		68.577.581.139,42		73.595.268.289,02		79.209.971.625,99		85.508.917.730,48	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					32.799.356.252		34.492.883.798		35.838.817.236		37.249.667.974		38.762.503.040	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	0	0	68,5	32.799.356.252	69	34.492.883.798	69,5	35.838.817.236	70	37.249.667.974	70,5	38.762.503.040	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	83	84		85		86		87		88		3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPTD. Balai Perbenihan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	81	82		83		84		85		86		3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81	83	83		84		85		86		87		3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,75	83	85,8		86		86,25		86,5		86,75		3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	83	83		83,2		83,3		83,4		83,6		3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	83	83		83		84		85		86		3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81	83	83		84		84		85		85		3.25.0.00.0.00.01.0007 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81	83	83		83		83		83		83		3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81	83	83		84		86		88		90		3.25.0.00.0.00.01.0009 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					4.190.000.000		4.607.000.000		5.070.000.000		5.655.545.539		6.214.000.000	
Terkololanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir Yang Terkelola Secara Berkelanjutan (%)	0	17,987	17,9882	4.190.000.000	17,9898	4.607.000.000	17,9914	5.070.000.000	17,993	5.655.545.539	17,9946	6.214.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Doboto, Tomini, Morowali, Banggai Dalaka) (%)	0	45	47		49		52		55		60		3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I
	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Doboto, Tomini, Morowali, Banggai Dalaka) (%)	0	55	58		60		62		65		67		3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II
	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Doboto, Tomini, Morowali, Banggai Dalaka) (%)	54	54	56,5		58,5		61		63		65		3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III
	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Doboto, Tomini, Morowali, Banggai Dalaka) (%)	0	55	58		60		62		65		67		3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Doboto, Tomini, Morowali, Banggai Dalaka) (%)	45	45	47		49		52		55		60		3.25.0.00.0.00.01.0007 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V
	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Doboto, Tomini, Morowali, Banggai Dalaka) (%)	50	50	55		63		65		80		85		3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI
	Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Doboto, Tomini, Morowali, Banggai Dalaka) (%)	60	60	63,5		64,51		65,34		65,8		67		3.25.0.00.0.00.01.0009 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					17.882.449.000,15		18.917.697.341,42		21.525.630.430,02		23.554.758.112,99		26.452.414.690,48	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	292.255,7	277.368,95	307.261,94	14.282.449.000,15	285.748,3	14.417.697.341,42	290.034,53	16.725.630.431,02	294.385,04	18.655.258.112,99	298.800,82	21.352.414.690,48	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya PAD	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000) (Angka)	1.140.474	1.063.274	1.096.854	3.350.000.000	1.098.354	4.187.500.000	1.099.854	4.466.666.666	1.101.354	4.559.222.222	1.102.854	4.745.833.333	3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I
	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000) (Angka)	389.431,8	1.000.000	1.033.500		1.085.175		1.140.000		1.196.000		1.260.000		3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II
	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000) (Angka)	494.567	495.000	495.000		500.000		520.000		550.000		560.000		3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III
	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000) (Angka)	202.262,27	250.000	260.000		280.000		300.000		320.000		340.000		3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV
	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000) (Angka)	470.000	1.099.728	800.000		805.000		810.000		815.000		820.000		3.25.0.00.0.00.01.0007 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V
	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000) (Angka)	470.000	483.000	520.000		525.000		530.000		535.000		550.000		3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI
Terlaksananya Pelayanan Di Pelabuhan Perikanan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan (%)	100	100	100	250.000.000	100	312.500.000	100	333.333.333	100	340.277.778	100	354.166.667	3.25.0.00.0.00.01.0009 - UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					4.500.000.000		4.600.000.000		5.360.000.000		5.600.000.000		6.380.000.000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	791.156,47	818.643,73	833.870,21	2.000.000.000	892.708,91	1.900.000.000	901.636	2.210.000.000	910.652,36	2.300.000.000	919.758,88	2.480.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya PAD	Pendapatan Asli Daerah (Rp. 1000) (Angka)	1.463.265	1.500.000	2.000.000	2.500.000.000	2.025.000	2.700.000.000	2.050.000	3.150.000.000	2.100.000	3.300.000.000	2.150.000	3.900.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPTD. Balai Perbenihan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.800.000.000		3.000.000.000		3.250.000.000		3.700.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Diperiksa	Persentase Pelaku Usaha Yang Diperiksa Kepatuhannya (%)	100	50	55	500.000.000	60	535.000.000	65	580.000.000	70	658.000.000	75	716.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kasus Pelanggaran Kelautan Perikanan Yang Tertangani	Persentase Tertanganinya Pelanggran Kelautan Perikanan (%)	100	100	100	1.800.000.000	100	1.935.000.000	100	2.080.000.000	100	2.382.000.000	100	2.569.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Di Tumbuhkan dan Dikembangkan	Persentase POKMASWAS Yang Ditumbuhkan dan Dikembangkan (%)	100	80	80	500.000.000	80	530.000.000	80	590.000.000	80	660.000.000	80	715.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.260.000.000		2.960.000.000		2.550.820.623		3.450.000.000		3.700.000.000	
Meningkatnya Serapan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan Yang dikonsumsi (Ton)	241.118,68	0	257.640,73	1.560.000.000	265.901,75	2.160.000.000	274.162,78	1.500.000.000	282.423,8	2.150.000.000	290.684,83	2.050.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Penerapan Standar Mutu Perikanan	Persentase Penerapan Standar Mutu Perikanan (%)	50	50	50	700.000.000	55	800.000.000	62	1.050.820.623	68	1.300.000.000	75	1.650.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					42.940.405.428,82		34.983.860.425,82		37.543.560.899,14		40.407.820.539,24		43.621.136.723,45	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.663.766.428,16		13.280.676.280,82		13.719.544.310,14		14.273.178.690,24		15.448.540.667,45	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	62,38	65	60	15.663.766.428,16	70	13.280.676.280,82	72	13.719.544.310,14	74	14.273.178.690,24	75	15.448.540.667,45	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					7.485.000.000,5		6.092.790.000		6.537.563.670		7.534.418.509		8.593.654.780	
Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (hari) (Hari)	3,75	3-5	3-5	7.485.000.000,5	3-5	6.092.790.000	5-7	6.537.563.670	5-7	7.534.418.509	5-7	8.593.654.780	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per kunjungan/orang (US $) (US$)	0	500	600		700		800		900		1.000		3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					11.325.000.000		7.218.550.000		7.891.504.150		7.643.258.465		7.889.397.513	
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Pengembangan Pariwisata : Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) (Ribu Orang)	23.973	25.000	28.750	11.325.000.000	33	7.218.550.000	38.000	7.891.504.150	43.700	7.643.258.465	50.300	7.889.397.513	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Juta Orang) (Rp Juta/Orang/Bulan)	9.216.969	9.000.000	9.925.000		10.850.000		11.775.000		12.700.000		13.625.000		3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					6.241.639.000,16		5.276.844.145		5.968.448.769		6.687.814.875		7.343.478.763	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp) (Rp)	111.400.000.000	125.000.000.000	143.750.000.000	6.241.639.000,16	165.300.000.000	5.276.844.145	190.100.000.000	5.968.448.769	218.600.000.000	6.687.814.875	251.400.000.000	7.343.478.763	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					2.225.000.000		3.115.000.000		3.426.500.000		4.269.150.000		4.346.065.000	
Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	0	8.418	9.259	2.225.000.000	10.184	3.115.000.000	10.285	3.426.500.000	10.387	4.269.150.000	10.490	4.346.065.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	0	2.338	2.571		2.828		3.110		3.421		3.763		3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata Yang Tersertifikasi (Orang)	145	100	200		300		400		500		600		3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi (Orang)	70	100	200		300		400		500		600		3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					326.268.886.015,59		332.120.907.813,65		356.421.543.437,74		383.613.525.691,95		414.119.292.499,93	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					92.479.615.058,5		93.581.658.794,54		98.055.684.337,95		102.803.039.540,81		107.859.309.497,86	
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	0	3,3	1.374.829.710,99	3,5	1.070.448.267,01	3,7	1.162.276.864,92	3,9	1.267.042.135,67	4	1.386.774.243,75	3.27.0.00.0.00.02.0001 - UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	85,2	85,5		86		86,2		86,5		87		3.27.0.00.0.00.02.0002 - UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	0	3,3		3,5		3,7		3,9		4		3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPT Pembibitan Ternak
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	4,5	4,5	4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		3.27.0.00.0.00.02.0004 - UPT Veteriner
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	76,61	77,5		80		85		88,3		90		3.27.0.00.0.00.02.0005 - UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	66,5	66,75	50.514.630.731	67,75	52.680.815.960	68,25	54.785.136.598	68,75	56.973.571.822	68,75	59.260.521.610	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	62	64		66		68		70,05		70,05		3.27.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	62	64		66		68		70,05		70,05		3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	62	64		66		68		70,05		70,05		3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	60	62	64		66		68		70,05		70,05		3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPT Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	69,2	72	77	40.590.154.616,51	81	39.830.394.567,53	85	42.108.270.875,03	90	44.562.425.583,14	91	47.212.013.644,11	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					180.354.824.525,9		183.725.447.017,09		193.573.650.775,47		204.741.948.207,19		216.871.884.235,3	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2,9	1,2	1,25	129.665.143.350,16	1,3	144.258.245.416,62	1,35	150.720.748.158,92	1,4	158.026.372.176,64	1,45	165.741.810.658,78	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	15,28	1,25	1,3		1,35		1,4		1,45		1,5		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2,9	1,2	1,25		1,3		1,35		1,4		1,45		3.27.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	15,28	1,25	1,3		1,35		1,4		1,45		1,5		3.27.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2,9	1,2	1,25		1,3		1,35		1,4		1,45		3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	15,28	1,25	1,3		1,35		1,4		1,45		1,5		3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi	Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak (Ekor)	500	600	700	2.459.772.992,9	800	1.915.189.726	900	2.079.484.622,48	1.000	2.266.925.133,52	1.100	2.481.143.522,53	3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPT Pembibitan Ternak
Meningkatnya Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Persentase Luas Areal Intensifikasi Komoditi Perkebunan (%)	76,68	77,45	78,22	9.983.355.921,62	79,01	7.773.083.429,78	79,8	8.439.898.795,43	80,59	9.200.654.093,28	81,4	10.070.091.406,64	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Peredaran Benih Bersertifikat	Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar (%)	0	85	87	2.026.696.314,92	89	1.577.994.380,48	90	1.713.362.913,36	92	1.867.801.958,79	95	2.044.304.270,52	3.27.0.00.0.00.02.0002 - UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Meningkatnya Populasi Dan Produksi Ternak	Sapi (Ekor)	207,356	231,892	240,002	17.881.796.095,05	248,408	13.922.842.580,43	257,102	15.117.216.145,3	260	16.479.851.237,27	263	18.037.153.298,53	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Sapi (Kg)	4.066.149	4.147.472	4.230.421		4.315.030		4.401.330		4.489.357		4.579.144		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Kambing (Ekor)	77,135	116,239	131,931		149,082		167,867		177,5		177,503		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Kambing (Kg)	663.931	677.210	690.754		704.569		718.660		733.033		747.694		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Babi (Ekor)	129,891	131,585	132,243		132,904		133,568		134,236		134,239		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Unggas (Kg)	15.126.866	15.429.403	15.737.991		16.052.751		16.373.806		16.701.282		17.035.308		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Babi (Kg)	2.036.165	2.076.888	2.118.426		2.160.795		2.204.010		2.248.091		2.293.053		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Unggas (Ekor)	12.319.919	13.472.768	13.951.960		14.496.324		15.131.032		16.832.159		16.838.165		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Produksi Telur (Kg)	24.419.044	24.594.545	24.840.531		25.088.936		25.339.826		25.351.075		25.593.224		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB)	Persentase Peningkatan Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) (%)	0	41	12	840.703.656,56	12	654.575.446,72	12	710.728.319,62	12	774.791.923,65	12	848.007.697,4	3.27.0.00.0.00.02.0005 - UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Kelapa Dalam (Ton)	193,745	197,246	214,792	17.497.356.194,69	215,604	13.623.516.037,06	216,431	14.792.211.820,36	217,363	16.125.551.684,04	218,284	17.649.373.380,9	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Cengkeh (Ton)	22,768	25,833	29,878		44,112		50,949		63,652		72,726		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Kakao (Ton)	125,919	125,202	189,415		201,924		215,627		231,02		248,874		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Pala (Ton)	1,025	1,323	1,494		1,526		1,559		1,559		1,626		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Kopi (Ton)	2,744	3,17	3,596		4,021		4,447		4,873		5,299		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
	Kelapa Sawit (Ton)	143,723	144,398	144,398		154,561		166,928		182,292		200,976		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					20.377.527.265,01		19.661.989.249,97		20.823.150.128,5		22.081.160.848,98		23.447.294.143,03	
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	75,05	77,42	77,81	13.986.806.593	78,6	14.686.146.923	88,87	15.420.454.269	99,54	16.191.476.982	99,54	17.001.050.833	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan	Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan (Indeks)	0	40	45	2.056.721.445,51	50	1.601.372.075,01	55	1.738.746.067,63	60	1.895.473.098,92	65	2.074.590.259,71	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan	Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan (Indeks)	0	13,63	18,18	2.251.884.794,35	22,72	1.753.327.089,42	27,27	1.903.736.570,4	31,81	2.075.335.509,76	36,36	2.271.449.189,47	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Perkebunan	Persentase Penyediaan Prasarana Perkebunan (%)	0	40	45	1.726.445.009	50	1.344.217.435,23	55	1.459.531.370,64	60	1.591.090.557,48	65	1.741.444.378,59	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pekebun Sawit Yang Tervalidasi Untuk Mendapatkan STDB	Persentase Pekebun Sawit yang Mendapatkan STDB (%)	0	0	60	355.669.423,15	70	276.925.727,31	80	300.681.850,83	90	327.784.700,82	100	358.759.482,26	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					4.228.342.984,78		3.292.205.852,26		3.574.628.325,78		3.896.838.046,86		4.265.078.866,23	
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	99,8	98	98	1.050.879.570,7	98	818.219.308,4	98	888.410.399,52	98	968.489.904,56	98	1.060.009.621,75	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Persentase Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)	87,5	83	85	985.628.880,91	87	767.414.843,49	89	833.247.664,41	91	908.354.912,79	93	994.192.033,39	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Di UPT Veteriner	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)	0	710	725	2.191.834.533,17	770	1.706.571.700,37	795	1.852.970.261,85	810	2.019.993.229,51	835	2.210.877.211,09	3.27.0.00.0.00.02.0004 - UPT Veteriner
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					3.218.517.644,57		2.972.008.897,28		3.162.438.093,6		3.371.501.405,51		3.601.641.078,65	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	95	95,15	95,25	1.717.261.115	95,5	1.803.124.171	95,75	1.893.280.380	96	1.987.944.399	96,5	2.087.341.619	3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	85	85,15	85,25		85,5		85,75		86		86,5		3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Persentase Penanganan Serangan OPT Perkebunan (%)	100	100	100	300.251.305,91	100	233.776.945,26	100	253.831.542,72	100	276.711.401,3	100	302.859.891,93	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan	Persentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Tanaman Perkebunan pada Kelompok Terapan (%)	34,76	34,76	35	975.816.744,22	38	759.775.072,08	41	824.952.513,84	44	899.312.054,23	47	984.294.648,77	3.27.0.00.0.00.02.0001 - UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan
Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Standar Usaha Perkebunan	Persentase Usaha Perkebunan Yang Memenuhi Standar Usaha Perkebunan (%)	100	100	100	225.188.479,44	100	175.332.708,94	100	190.373.657,04	100	207.533.550,98	100	227.144.918,95	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.233.518.505		1.245.853.690		1.258.312.227		1.270.895.349		1.283.604.304	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	25	0	25	1.233.518.505	25	1.245.853.690	25	1.258.312.227	25	1.270.895.349	25	1.283.604.304	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					24.376.540.031,83		27.641.744.312,51		35.973.679.549,44		45.448.142.293,6		56.790.480.374,86	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	7,34	2,53	13,05	23.776.037.420	15,01	27.174.190.422	17,66	35.466.016.464	21,45	44.894.719.491	23,5	56.184.760.591	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	33,33	40	60		60		80		80		85		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
														3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPT Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya Kapasitas Kelompok Perkebunan Dan Peternakan	Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas (%)	0	6,25	8,92	600.502.611,83	10,71	467.553.890,51	13,39	507.663.085,44	17,17	553.422.802,6	20,53	605.719.783,86	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					88.960.004.138,22		94.345.029.969,92		101.248.070.827,35		108.972.451.678,9		117.638.173.757,94	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					76.179.643.319,22		80.028.219.104,99		85.140.371.700,67		90.055.081.260,21		95.972.167.966,18	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66	76.179.643.319,22	67	80.028.219.104,99	68	85.140.371.700,67	69	90.055.081.260,21	70	95.972.167.966,18	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Tahura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPT KPH Dampelas Tinombo
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPT KPH Dolago Tanggunung
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPT KPH Toili Baturube
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPT KPH Banawa Lalundu
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPT KPH Kulawi
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPT KPH Sintuwu Maroso
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPT KPH Sivia Patuju
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPT KPH Balantak
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPT KPH Pulau Peling
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPT KPH Tepo Asa Aroa
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPT KPH Tepe Asa Maroso
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPT KPH Gunung Dako
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPT KPH Pogogul
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					9.000.045.121		10.054.103.020,93		11.318.099.065,68		13.292.301.758,69		15.223.240.969,76	
Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257	9.000.045.121	2.024.000.542	10.054.103.020,93	2.064.480.553	11.318.099.065,68	2.105.770.164	13.292.301.758,69	2.147.059.775	15.223.240.969,76	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	15.813	17.013	18.413		20.013		21.813		23.813		26.013		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	2.500	5.998	6.723		6.728		6.728		6.728		6.728		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPT KPH Dampelas Tinombo
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPT KPH Dampelas Tinombo
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPT KPH Dampelas Tinombo
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPT KPH Dolago Tanggunung
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	30	35	200		200		200		200		200		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPT KPH Dolago Tanggunung
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPT KPH Dolago Tanggunung
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPT KPH Toili Baturube
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	50	124	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPT KPH Toili Baturube
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPT KPH Toili Baturube
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPT KPH Banawa Lalundu
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	20	22	34		34		34		34		34		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPT KPH Banawa Lalundu
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPT KPH Banawa Lalundu
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPT KPH Kulawi
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	50	78	30		35		35		35		35		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPT KPH Kulawi
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPT KPH Kulawi
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPT KPH Sintuwu Maroso
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	50	70	60		60		60		60		60		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPT KPH Sintuwu Maroso
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPT KPH Sintuwu Maroso
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPT KPH Sivia Patuju
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	50	50	50		50		50		50		50		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPT KPH Sivia Patuju
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPT KPH Sivia Patuju
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPT KPH Balantak
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	30	31	60		60		60		60		60		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPT KPH Balantak
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPT KPH Balantak
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPT KPH Pulau Peling
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	40	40	40		40		40		40		40		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPT KPH Pulau Peling

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPT KPH Pulau Peling
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPT KPH Tepo Asa Aroa
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	20	20	20		20		20		20		20		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPT KPH Tepo Asa Aroa
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPT KPH Tepo Asa Aroa
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPT KPH Tepe Asa Maroso
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	150	170	250		250		250		250		250		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPT KPH Tepe Asa Maroso
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPT KPH Tepe Asa Maroso
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPT KPH Gunung Dako
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	20	25	45		45		45		45		45		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPT KPH Gunung Dako
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPT KPH Gunung Dako
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Rp)	1.906.489.011	1.945.406.134	1.984.314.257		2.024.000.542		2.064.480.553		2.105.770.164		2.147.059.775		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPT KPH Pogogul
	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	20	25	140		140		140		140		140		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPT KPH Pogogul
	Penurunan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	99,53	97,21	94,43		91,65		88,87		86,1		83,32		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPT KPH Pogogul
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					777.964.800		883.728.640		985.817.536		1.157.796.828		1.325.959.237	
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Konservasi di Area Preservasi (Orang)	600	720	840	777.964.800	960	883.728.640	1.080	985.817.536	1.200	1.157.796.828	1.320	1.325.959.237	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IEPKK) (Indeks)	70	70,05	71		71,05		72		72,05		73		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IEPKK) (Indeks)	70	70,05	71		71,05		72		72,05		73		3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Tahura
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					2.881.906.098		3.243.426.404		3.651.188.105		4.288.060.547		4.911.560.726	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83	2.881.906.098	12,72	3.243.426.404	12,72	3.651.188.105	12,72	4.288.060.547	12,72	4.911.560.726	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	12.203	14.603	17.053		19.303		21.553		24.003		26.553		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPT KPH Dampelas Tinombo
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPT KPH Dampelas Tinombo
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPT KPH Dampelas Tinombo
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPT KPH Dolago Tanggunung
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPT KPH Dolago Tanggunung
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPT KPH Dolago Tanggunung
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPT KPH Toili Baturube
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPT KPH Toili Baturube
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPT KPH Toili Baturube
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPT KPH Banawa Lalundu
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPT KPH Banawa Lalundu
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPT KPH Banawa Lalundu
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPT KPH Kulawi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPT KPH Kulawi
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPT KPH Kulawi
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPT KPH Sintuwu Maroso
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPT KPH Sintuwu Maroso
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPT KPH Sintuwu Maroso
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPT KPH Sivia Patuju
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPT KPH Sivia Patuju
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPT KPH Sivia Patuju
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPT KPH Balantak
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPT KPH Balantak
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPT KPH Balantak
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPT KPH Pulau Peling
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPT KPH Pulau Peling
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPT KPH Pulau Peling
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPT KPH Tepo Asa Aroa
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPT KPH Tepo Asa Aroa
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPT KPH Tepo Asa Aroa
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPT KPH Tepe Asa Maroso
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPT KPH Tepe Asa Maroso
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPT KPH Tepe Asa Maroso
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPT KPH Gunung Dako
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPT KPH Gunung Dako
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPT KPH Gunung Dako
	Luas fasilitasi pengusulan akses legal kepada masyakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (Ha)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPT KPH Pogogul
	Persentase Peningkatan Kelas KTH (%)	8,58	10,06	11,83		12,72		12,72		12,72		12,72		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPT KPH Pogogul
	Persentase Peningkatan Kelas KUPS (%)	5,04	5,32	10,08		11,48		12,04		12,04		12,04		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPT KPH Pogogul
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					120.444.800		135.552.800		152.594.420		179.211.285		205.244.859	
Meningkatnya Kelestarian Dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah wilayah Daerah Aliran Sungai yang dipulihkan (Wilayah)	1	1	1	120.444.800	1	135.552.800	1	152.594.420	1	179.211.285	1	205.244.859	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					43.680.002.353,28		46.744.452.559,75		50.164.652.500,13		53.991.795.852,39		58.285.338.763,44	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.376.355.627,28		26.454.880.255,75		27.938.007.336,13		29.400.559.137,39		30.881.931.083,44	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	63,43	65	66	16.376.355.627,28	67	26.454.880.255,75	68	27.938.007.336,13	69	29.400.559.137,39	70	30.881.931.083,44	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.29.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pelayanan Teknis Laboraturium
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.29.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.29.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.29.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.29.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	63,43	65	66		67		68		69		70		3.29.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					522.456.650		1.435.620.802		1.728.732.882		2.017.838.670		2.362.664.912	
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	933.000.000	933.000.000	983.000.000	519.456.650	1.028.000.000	1.235.620.802	1.176.000.000	1.416.232.882	1.424.000.000	1.627.213.670	1.717.000.000	1.874.383.662	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (KmÂ²)	2.341	2.341	2.452		2.531		2.706		3.141		3.671		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	933.000.000	933.000.000	983.000.000		1.028.000.000		1.176.000.000		1.424.000.000		1.717.000.000		3.29.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	933.000.000	933.000.000	983.000.000		1.028.000.000		1.176.000.000		1.424.000.000		1.717.000.000		3.29.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	933.000.000	933.000.000	983.000.000		1.028.000.000		1.176.000.000		1.424.000.000		1.717.000.000		3.29.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III
	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	933.000.000	933.000.000	983.000.000		1.028.000.000		1.176.000.000		1.424.000.000		1.717.000.000		3.29.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	933.000.000	933.000.000	983.000.000		1.028.000.000		1.176.000.000		1.424.000.000		1.717.000.000		3.29.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V
Meningkatnya cakupan dan aksesibilitas layanan pengujian geologi dan sampel air tanah	Persentase Pengujian Geologi dan Sampel Air Tanah yang dilayani (Persentase)	0	0	100	3.000.000	100	200.000.000	100	312.500.000	100	390.625.000	100	488.281.250	3.29.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pelayanan Teknis Laboraturium
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					670.581.650		1.360.620.802		1.574.357.882		1.845.963.670		2.142.937.662	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara Provinsi	Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Hektar)	0	16.979,05	16.979,05	667.581.650	16.979,05	1.235.620.802	18.879,05	1.416.232.882	18.879,05	1.627.213.670	18.879,05	1.874.383.662	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Rekomendasi Terhadap Usulan IPR (Dokumen)	0	6	20		19		42		42		41		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Hektar)	0	16.979,05	16.979,05		16.979,05		18.879,05		18.879,05		18.879,05		3.29.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
	Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Hektar)	0	16.979,05	16.979,05		16.979,05		18.879,05		18.879,05		18.879,05		3.29.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
	Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Hektar)	0	16.979,05	16.979,05		16.979,05		18.879,05		18.879,05		18.879,05		3.29.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III
	Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Hektar)	0	16.979,05	16.979,05		16.979,05		18.879,05		18.879,05		18.879,05		3.29.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
	Luas WPR Yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Hektar)	0	16.979,05	16.979,05		16.979,05		18.879,05		18.879,05		18.879,05		3.29.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V
Meningkatnya cakupan dan aksesibilitas layanan pengujian bahan tambang	Persentase Pengujian Bahan Tambang yang dilayani (Persentase)	0	0	100	3.000.000	100	125.000.000	100	158.125.000	100	218.750.000	100	268.554.000	3.29.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pelayanan Teknis Laboraturium
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					15.356.406.990		12.450.000.000		14.150.000.000		15.350.000.000		16.750.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Unit)	58	100	100	15.356.406.990	100	12.450.000.000	100	14.150.000.000	100	15.350.000.000	100	16.750.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	9,38	13	14		15		16		17		18		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) (SBM/Milyar Rupiah)	285.600	189.225	183.709,5		178.194		172.678,5		167.163		161.647,5		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	9,38	13	14		15		16		17		18		3.29.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	9,38	13	14		15		16		17		18		3.29.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	9,38	13	14		15		16		17		18		3.29.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	9,38	13	14		15		16		17		18		3.29.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	9,38	13	14		15		16		17		18		3.29.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					10.754.201.436		5.043.330.700		4.773.554.400		5.377.434.375		6.147.805.106	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	99,27	99,74	99,8	10.754.201.436	99,85	5.043.330.700	99,9	4.773.554.400	99,95	5.377.434.375	100	6.147.805.106	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,27	99,74	99,8		99,85		99,9		99,95		100		3.29.0.00.0.00.01.0002 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,27	99,74	99,8		99,85		99,9		99,95		100		3.29.0.00.0.00.01.0003 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,27	99,74	99,8		99,85		99,9		99,95		100		3.29.0.00.0.00.01.0004 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,27	99,74	99,8		99,85		99,9		99,95		100		3.29.0.00.0.00.01.0005 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
	Rasio Elektrifikasi (%)	98,5	99,2	99,8		99,85		99,9		99,95		100		3.29.0.00.0.00.01.0006 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					24.302.331.143,29		25.865.868.113,35		27.608.327.123,54		29.477.395.535,25		31.767.787.663,99	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.265.806.064,29		21.719.333.920,35		22.598.710.559,54		23.956.790.471,25		25.678.358.699,99	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	71,8	72	72,2	20.265.806.064,29	72,4	21.719.333.920,35	72,6	22.598.710.559,54	72,8	23.956.790.471,25	73	25.678.358.699,99	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	76,61	76,61	85		85		86		86		86		3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,54	90	92		95		95		98		98		3.31.3.30.0.00.01.0002 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78,44	78,69	78,94		79,19		79,44		79,69		79,94		3.31.3.30.0.00.01.0003 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					156.517.350		184.346.000		315.058.000		346.563.500		381.220.000	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	156.517.350	100	184.346.000	100	315.058.000	100	346.563.500	100	381.220.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					96.664.400		101.498.500		191.039.000		210.143.500		231.157.500	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	10	10	96.664.400	10	101.498.500	10	191.039.000	10	210.143.500	10	231.157.500	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					1.507.706.250		1.646.116.000		1.810.152.500		1.991.168.000		2.190.284.500	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	5,7	5,5	4,8	1.507.706.250	4	1.646.116.000	3,7	1.810.152.500	3,2	1.991.168.000	2,7	2.190.284.500	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					525.454.500		551.728.550		732.225.600		805.449.100		885.993.000	
Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	21.337,24	23.470,96	25.818,06	525.454.500	26.592,6	551.728.550	27.390,38	732.225.600	28.212,09	805.449.100	29.622,7	885.993.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.475.349.529		1.531.768.643		1.801.587.464		1.991.770.964		2.207.712.964	
Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk					1.475.349.529		1.531.768.643		1.801.587.464		1.991.770.964		2.207.712.964	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Layanan Pengaujian dan Kalibarasi yang Terakreditasi dan Non Akreditasi (%)	83	86	87		88		89		90		91		3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
														3.31.3.30.0.00.01.0002 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.0.00.01.0003 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					274.833.050		131.076.500		159.554.000		175.510.000		193.061.000	
Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	10	10	274.833.050	10	131.076.500	10	159.554.000	10	175.510.000	10	193.061.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.817.366.950		1.925.781.500		2.216.783.000		2.623.121.000		2.885.430.500	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.667.163.350		1.718.065.500		1.931.571.500		2.309.388.000		2.540.326.000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	92,8	93,4	93,27	1.667.163.350	93,5	1.718.065.500	93,73	1.931.571.500	93,97	2.309.388.000	94,21	2.540.326.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Angkatan Kerja yang terfasilitasi (%)	0	0	100		100		100		100		100		3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
	Cakupan bina pelaku IKM (%)	14,34	15	15,75		16,5		17,25		18		18,75		3.31.3.30.0.00.01.0002 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
														3.31.3.30.0.00.01.0003 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					105.945.900		111.244.000		139.341.500		153.276.000		168.603.000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	100	100	105.945.900	100	111.244.000	100	139.341.500	100	153.276.000	100	168.603.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					44.257.700		96.472.000		145.870.000		160.457.000		176.501.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	88	89	90	44.257.700	91	96.472.000	92	145.870.000	93	160.457.000	94	176.501.500	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.683.500.000		2.369.500.000		3.139.480.000		3.514.798.400		4.084.068.160	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					425.000.000		756.000.000		816.480.000		881.798.400		1.014.068.160	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan (%)	60	60	60	425.000.000	60	756.000.000	75	816.480.000	75	881.798.400	80	1.014.068.160	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					585.000.000		940.000.000		1.373.000.000		1.483.000.000		1.720.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase luas kawasan yang berkembang (%)	23,08	23,08	30,77	585.000.000	46,15	940.000.000	61,54	1.373.000.000	76,92	1.483.000.000	100	1.720.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					673.500.000		673.500.000		950.000.000		1.150.000.000		1.350.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	33,33	30,77	38,46	673.500.000	38,46	673.500.000	46,15	950.000.000	46,15	1.150.000.000	46,15	1.350.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					724.570.886.746,34		826.100.280.126,43		886.544.417.860,68		954.180.340.890,26		1.030.058.799.345,14	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					109.258.018.351,34		117.474.448.913,17		126.269.196.273,68		136.173.937.356,35		147.301.818.431,09	
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	90	90,3	76.214.824.228,34	90,7	81.561.814.183,91	91	87.529.532.206,76	92	94.207.303.318,82	90,5	101.698.869.267,83	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	75	76	1.350.197.895	77	1.451.586.057,61	78	1.563.989.544,66	79	1.692.687.069,65	80	1.841.191.113,43	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	88,6	88,68	1.354.268.178	88,85	1.457.974.806,26	89,03	1.555.695.504	89,21	1.676.775.973,91	89,39	1.797.703.000,05	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	89	89	1.413.244.300	90	1.546.933.969,91	91	1.605.840.807,2	92	1.747.493.078,09	93	1.829.223.400,26	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83	85	87	925.000.000	89	1.005.399.855	91	1.075.849.414	93	1.109.467.797	95	1.242.429.445	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83	85	87	2.625.483.750	89	3.019.306.313,99	91	3.469.202.159,86	93	3.993.032.598,69	95	4.591.987.488,72	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,83	85	86	1.375.000.000	87	1.480.923.021,26	88	1.593.066.037	89	1.718.811.669,91	90	1.860.170.497,05	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/ Jasa Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	89	90	1.000.000.000	91	1.076.409.725,26	92	1.181.930.423	92	1.297.739.891,91	93	1.424.897.527,05	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,095	80,5	82	4.000.000.000	85	4.325.930.605,21	88,5	4.642.450.465,6	88,75	4.996.630.601,45	89	5.393.973.337,69	4.01.0.00.0.00.01.0009 - Biro Admnistrasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	77,44	80,44	85,44	7.000.000.000	90,44	7.570.378.559,12	95,44	8.124.288.314,8	100,44	8.744.103.552,55	105,44	9.439.453.340,95	4.01.0.00.0.00.01.0010 - KDH
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah					5.000.000.000		5.407.413.256,52		5.803.063.082		6.245.788.251,82		6.742.466.672,11	4.01.0.00.0.00.01.0011 - WKDH
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah					7.000.000.000		7.570.378.559,12		8.124.288.314,8		8.744.103.552,55		9.439.453.340,95	4.01.0.00.0.00.01.0012 - TU Pimpinan
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1.500.000.000		1.627.296.903		1.719.601.118		1.825.154.234		1.946.335.809	
Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas kinerja terhadap kesinambungan pembangunan	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Indeks)	54	54	65	1.500.000.000	78	1.627.296.903	83	1.719.601.118	88	1.825.154.234	96	1.946.335.809	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	36	37,97	38		38,5		38,75		39		39,25		4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,53	11,68	11,88		12,18		12,53		12,93		13,5		4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	83,5	85		86,5		88		89		91		4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Ber-AHKLAK Pemerintahan Daerah (Indeks)	67	68	69		70		71		72		73		4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Perangkat daerah dengan Nilai RB Minimal "B" (%)	20	20	40		60		80		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					1.799.802.105		1.955.084.294		2.091.940.197		2.242.159.529		2.406.562.890	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah (%)	-	100	100	1.799.802.105	100	1.955.084.294	100	2.091.940.197	100	2.242.159.529	100	2.406.562.890	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM (%)	95	95	96		97		98		99		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Indikator Kolaboratif Untuk Kemajuan Daerah (Nilai)	-	75	78		81		84		87		91		4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					606.580.578.768		699.179.113.830		750.107.699.562		807.075.482.961		870.974.428.546	
Meningkatnya Proporsi Penduduk Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (%)	40,38	42,67	43,54	537.363.293.286	44,42	598.768.331.389	45,3	645.896.917.121	46,17	698.404.700.520	47,7	716.838.244.432	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis Penanganan Kemiskinan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Dimensi Kesetaraan (Indeks)	76	77	78	69.217.285.482	79	100.410.782.441	80	104.210.782.441	81	108.670.782.441	82	154.136.184.114	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					1.586.755.700		1.697.513.984		1.875.997.042		1.999.979.873		2.216.256.603	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Persentase Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi/Memperkuat Koordinasi untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi (%)	100	100	100	894.998.700	100	961.453.672	100	1.068.543.506	100	1.130.534.921	100	1.272.699.241	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter) yang berkualitas (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Capaian Implementasi Litigasi dan Hak Asasi Manusia	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	0	60	62,5	691.757.000	65	736.060.312	67,5	807.453.536	70	869.444.952	71,5	943.557.362	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.575.000.000		1.698.306.773,26		1.825.682.127		2.013.426.328,91		2.128.803.891,05	
Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian dan Ekonomi Syariah	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)	100	100	100	525.000.000	100	566.102.262,42	100	610.617.238	100	672.045.735,91	100	710.328.521,91	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
	Total dana pihak ketiga (%)	0	12,85	15,83		18,81		21,78		24,76		25,63		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%) (%)	0	0,03	0,06		0,08		0,1		1,12		1,14		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	0	3.094.537	4.366.487		5.638.436		6.910.386		8.182.336		9.454.286		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
	Total Kredit/PDRB (%) (%)	0	14,17	16,33		18,5		20,66		22,82		24,98		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
	Aset Perbankan Syariah/PDRB (Persentase)	0,87	0,95	1,01		1,14		1,24		1,42		1,53		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,46	0,49	0,52		0,55		0,58		0,61		0,64		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	6,388	9,195	9,275		9,355		9,446		9,516		9,586		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)	100	100	100	525.000.000	100	566.102.253,42	100	606.504.180	100	670.238.475	100	709.646.852,28	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)	100	100	100	525.000.000	100	566.102.257,42	100	608.560.709	100	671.142.118	100	708.828.516,86	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah
Meningkatnya kualitas pelayanan di Biro Ekonomi					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yang Ditindak Lanjuti					0		0		0		0		0	
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					1.125.000.000		1.222.783.607		1.308.465.504		1.404.082.456		1.511.062.839	
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	3,31	3,33	3,43	1.125.000.000	3,53	1.222.783.607	3,63	1.308.465.504	3,73	1.404.082.456	3,83	1.511.062.839	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/ Jasa Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1.145.731.822		1.245.731.822		1.345.836.037		1.446.118.152		1.573.530.336	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan (%)	84,51	84,6	84,69	731.596.872	84,86	801.596.872	85,04	861.701.087	85,22	931.983.202	85,4	1.034.395.386	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Nilai Pembiayaan Inovatif Daerah CSR	Persentase Peningkatan Nilai Pembiayaan Inovatif Daerah (%)	0	0	20	414.134.950	25	444.134.950	30	484.134.950	35	514.134.950	40	539.134.950	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					152.269.473.071,86		163.289.314.986,18		175.236.873.996,86		188.605.981.604,8		203.604.332.048,9	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					102.621.262.881,86		108.684.073.241,18		115.156.593.298,86		122.272.691.722,8		130.121.949.422,9	
Meningaktnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70	71	73	102.621.262.881,86	74	108.684.073.241,18	75	115.156.593.298,86	76	122.272.691.722,8	77	130.121.949.422,9	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					49.648.210.190		54.605.241.745		60.080.280.698		66.333.289.882		73.482.382.626	
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Fungsi Pembentukan PERDA	Ketepatan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (%)	100	100	100	4.850.000.000	100	5.775.000.000	100	7.150.000.000	100	9.000.000.000	100	11.150.000.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Fungsi Penganggaran	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	600.000.000	100	1.200.000.000	100	1.650.000.000	100	1.950.000.000	100	2.400.000.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Fungsi Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	44.198.210.190	100	47.630.241.745	100	51.280.280.698	100	55.383.289.882	100	59.932.382.626	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
5.01 - PERENCANAAN					37.275.693.498,08		38.660.157.393,11		41.488.845.307,29		44.654.097.144,94		48.205.086.313,18	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.673.684.557,08		28.776.160.316,11		30.939.680.697,29		33.163.288.305,94		35.675.952.343,18	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85,75	86,5	87,25	27.673.684.557,08	88	28.776.160.316,11	88,75	30.939.680.697,29	89,5	33.163.288.305,94	90,25	35.675.952.343,18	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.757.638.890		2.764.248.577		2.941.142.073		3.366.238.172		3.771.151.262	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	-	100	100	2.617.033.140	100	2.623.642.577	100	2.800.536.073	100	3.116.238.172	100	3.471.151.262	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Hasil Pengukuran Kinerja Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	0	93	94	140.605.750	95	140.606.000	96	140.606.000	97	250.000.000	98	300.000.000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					6.844.370.051		7.119.748.500		7.608.022.537		8.124.570.667		8.757.982.708	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RENSTRA PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (%)	-	100	-	4.189.516.450	-	4.302.684.002	-	4.492.280.398	-	4.662.174.259	100	4.872.043.488	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RENSTRA PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA (%)	-	100	-	1.762.580.951	-	1.762.581.736	-	1.762.581.736	-	1.762.581.736	100	1.777.742.172	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RENSTRA PD Pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	-	100	-	892.272.650	-	1.054.482.762	-	1.353.160.403	-	1.699.814.672	100	2.108.197.048	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.02 - KEUANGAN					1.346.474.829.718,81		1.546.259.445.045,12		1.659.034.810.259,6		1.785.605.288.251,97		1.878.082.136.825,2	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					621.912.669.852,81		707.637.461.652,44		751.754.343.799,32		803.732.135.328,38		854.554.976.080,48	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	51,84	52,75	53,61	76.062.735.183,91	55,38	77.460.276.232,43	57,15	82.957.792.544,82	58,92	89.078.789.923,05	60,69	95.912.316.355,89	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85	85	85,3	539.199.747.052,9	85,7	624.420.059.657,01	86,2	662.787.659.527,5	86,8	708.388.409.209,33	87,5	752.118.556.703,59	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai IPKD Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	14,741	10	10		10		10		10		10		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kulitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	86,1	86,15	6.650.187.616	86,2	5.757.125.763	86,25	6.008.891.727	86,43	6.264.936.196	86,58	6.524.103.021	5.02.0.00.0.00.01.0001 - UPT Wil. I Palu
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,5	82,6	82,65		82,7		82,75		82,93		83,08		5.02.0.00.0.00.01.0002 - UPT Wil. II Parigi Moutong
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,4	87,5	87,55		87,6		87,65		87,83		87,98		5.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT Wil. III Poso
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,1	88,2	88,25		88,3		88,35		88,53		88,68		5.02.0.00.0.00.01.0004 - UPT Wil. IV Morowali
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,1	88,2	88,25		88,3		88,35		88,53		88,68		5.02.0.00.0.00.01.0005 - UPT Wil. V Banggai
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,7	84,8	84,85		84,9		84,95		85,13		85,28		5.02.0.00.0.00.01.0006 - UPT Wil. VI Banggai Kepulauan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,7	84,8	84,85		84,9		84,95		85,13		85,28		5.02.0.00.0.00.01.0007 - UPT Wil. VII Toli-Toli
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,3	88,4	88,45		88,5		88,55		88,73		88,88		5.02.0.00.0.00.01.0008 - UPT Wil. VIII Buol
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,2	85,3	85,35		85,4		85,45		85,63		85,78		5.02.0.00.0.00.01.0009 - UPT Wil. IX Tojo Una-Una
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,2	84,3	84,35		84,4		84,45		84,63		84,78		5.02.0.00.0.00.01.0010 - UPT Wil. X Donggala
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,1	87,2	87,25		87,3		87,35		87,53		87,68		5.02.0.00.0.00.01.0011 - UPT Wil. XI Sigi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,3	86,4	86,45		86,5		86,55		86,73		86,88		5.02.0.00.0.00.01.0012 - UPT XII. Morowali Utara
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,6	87,7	87,75		87,8		87,85		88,03		88,18		5.02.0.00.0.00.01.0013 - UPT XIII. Banggai Laut
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					715.443.669.716		828.674.811.062,06		896.585.912.304,26		970.291.212.191,93		1.010.832.585.866,84	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Nilai)	8,928	8,08	9,231	1.550.000.000	9,38	5.073.030.048	9,55	5.080.096.143	9,78	5.094.916.382	10,18	5.114.857.873	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (Nilai)	19,643	19,8	19,951		20		20		20		20		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Batas Maksimal Defisit APBD□ (Nilai)	0	10	10		10		10		10		10		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah (Nilai)	15	15	15,15	712.343.669.716	15,3	819.028.750.966,06	15,5	886.925.720.018,26	15,8	960.601.379.427,93	16,15	1.001.102.870.120,84	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Nilai)	4,281	4,44	4,59		4,74		4,95		5,44		5,68		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Nilai IPKD Dimensi Opini BPK Atas LKPD (Nilai)	15	10	10	1.550.000.000	10	4.573.030.048	10	4.580.096.143	10	4.594.916.382	10	4.614.857.873	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					6.050.000.000		4.575.480.416		4.590.254.216		4.601.561.824		4.669.857.873	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9,76	9,76	9,8	6.050.000.000	9,9	4.575.480.416	10	4.590.254.216	10,1	4.601.561.824	10,2	4.669.857.873	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) (Indeks)	2,13	2,13	2,97		3,05		3,13		3,28		3,34		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.068.490.150		5.371.691.914,62		6.104.299.940,02		6.980.378.907,66		8.024.717.004,88	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD (%)	93,94	94,19	94,44	299.999.750	94,69	528.899.692,5	94,94	602.945.643,25	95,19	687.358.037,51	95,44	790.461.740,63	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	291.120.000	100	431.877.600	100	492.340.464	100	561.268.128	100	645.458.348	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	31,04	35,29	36,71	300.000.750	43,63	993.063.939	45,75	1.132.093.652	52,46	1.290.586.763	56,04	1.484.174.778	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100	1.864.122.910	100	2.286.813.289,12	100	2.598.695.667,77	100	2.971.656.143,15	100	3.416.247.155,25	5.02.0.00.0.00.01.0001 - UPT Wil. I Palu
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0002 - UPT Wil. II Parigi Moutong
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT Wil. III Poso
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0004 - UPT Wil. IV Morowali
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0005 - UPT Wil. V Banggai
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0006 - UPT Wil. VI Banggai Kepulauan
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0007 - UPT Wil. VII Toli-Toli
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0008 - UPT Wil. VIII Buol
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0009 - UPT Wil. IX Tojo Una-Una
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0010 - UPT Wil. X Donggala
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0011 - UPT Wil. XI Sigi
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0012 - UPT XII. Morowali Utara
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0013 - UPT XIII. Banggai Laut
Meningkatnya Kualitas Penerimaan Pajak Daerah	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	26,95	16,03	2,99	313.246.740	8,4	1.131.037.394	8,4	1.278.224.513	8,4	1.469.509.836	8,4	1.688.374.983	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.03 - KEPEGAWAIAN					17.678.875.709		18.919.169.468,15		20.303.448.002,69		21.852.431.244,45		23.590.183.245,06	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.658.875.709		15.723.169.468,15		16.520.748.002,69		17.463.856.244,45		18.192.435.745,06	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	64	65	67	14.623.875.709	70	15.688.169.468,15	73	16.477.248.002,69	75	17.416.681.244,45	78	18.141.401.995,06	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (%)	80	81	82	35.000.000	85	35.000.000	87	43.500.000	90	47.175.000	92	51.033.750	5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.020.000.000		3.196.000.000		3.782.700.000		4.388.575.000		5.397.747.500	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Kebutuhan ASN, Perlindungan dan Pelayanan ASN	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian (Nilai)	104	105	105	920.000.000	107	882.000.000	107	1.102.000.000	111	1.418.400.000	111	1.538.060.000	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Pengembangan Karir	Nilai Kriteria Pengembangan Karir (Nilai)	45	50	55	650.000.000	55	715.000.000	60	785.500.000	67,5	851.125.000	67,5	1.402.517.500	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
														5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
Meningkatnya kualitas mutasi dan promosi berdasarkan sistem merit	Nilai Kriteria Mutasi dan Promosi (Nilai)	22,5	22,5	27,5	740.000.000	27,5	790.000.000	27,5	964.500.000	30	1.054.625.000	30	1.157.033.750	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
														5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
Meningkatnya kualitas Manajemen kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan sistem merit	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Nilai)	82,5	82,5	87,5	365.000.000	95	449.000.000	95	516.200.000	102,5	583.700.000	107,5	701.375.000	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Kualitas data profil kompetensi dan potensi ASN	Nilai Kriteria Sub Aspek Pengembangan Karir ketersediaan profil pegawai dan talent pool (Nilai)	10	10	10	345.000.000	10	360.000.000	10	414.500.000	15	480.725.000	15	598.761.250	5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					27.045.954.931,21		28.943.413.212,07		31.061.146.006,47		33.430.851.616,45		36.089.344.331,91	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.172.789.285,21		18.718.340.320,88		20.402.990.949,76		22.239.260.135,23		24.240.793.547,41	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	66	67	68	17.172.789.285,21	69	18.718.340.320,88	70	20.402.990.949,76	71	22.239.260.135,23	72	24.240.793.547,41	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					9.873.165.646		10.225.072.891,19		10.658.155.056,71		11.191.591.481,22		11.848.550.784,5	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar (%)	78	100	100	3.087.999.796	100	3.165.919.777,64	100	3.268.852.557,63	100	3.399.049.287,8	100	3.558.963.723,72	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Mnajerial dan Fungsional (%)	61,56	64	65		66		67		68		69		5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	70	71	72	6.785.165.850	73	7.059.153.113,55	74	7.389.302.499,08	75	7.792.542.193,42	76	8.289.587.060,78	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	0,5	0,58	0,66		0,73		0,79		0,85		0,91		5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	30,34	31,34	34,02		35,95		37,36		38,31		39,25		5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					15.092.826.499,35		16.151.691.261,03		17.333.478.841,44		18.655.878.280,35		20.139.433.562,7	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.842.840.899,35		13.217.496.060,03		14.193.576.503,44		14.845.833.012,35		15.685.545.552,7	
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	77,44	80,44	85,44	12.842.840.899,35	90,44	13.217.496.060,03	95,44	14.193.576.503,44	100,44	14.845.833.012,35	105,44	15.685.545.552,7	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					2.249.985.600		2.934.195.201		3.139.902.338		3.810.045.268		4.453.888.010	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	20	25	30	2.249.985.600	55	2.934.195.201	65	3.139.902.338	75	3.810.045.268	90	4.453.888.010	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Pembinaan Bimbingan Teknis Dan Supervisi SDM Dan Infrastruktur Resit Dan Inovasi Di Daerah (%)	20	25	30		55		65		75		90		5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan (%)	20	25	30		55		75		80		90		5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	20	25	30		55		65		75		90		5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					10.691.287.077,44		11.400.219.096,66		12.234.350.775,17		13.167.729.397,47		14.214.855.360,16	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.558.463.331,44		10.192.278.574,66		10.938.027.613,17		11.772.507.622,47		12.708.682.569,16	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	62,14	65	67,5	9.558.463.331,44	70	10.192.278.574,66	72,5	10.938.027.613,17	75	11.772.507.622,47	77,5	12.708.682.569,16	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					1.132.823.746		1.207.940.522		1.296.323.162		1.395.221.775		1.506.172.791	
Outcome Program Menyesuaikan dengan Daerah	Persentase Permohonan Penjajakan Komunikasi yang Dilayani (Persentase)	100	100	100	1.132.823.746	100	1.207.940.522	100	1.296.323.162	100	1.395.221.775	100	1.506.172.791	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Peningkatan Kepuasan Atas Pelayanan Promosi UKM (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Peningkatan Kepuasan Atas Pelayanan Fasilitasi Pentas Seni dan Budaya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					29.734.343.803,01		31.820.410.906,89		34.510.054.558,14		37.142.883.040,07		40.096.564.421,75	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22.734.343.803,01		23.820.410.906,89		25.310.054.558,14		27.142.883.040,07		28.696.564.421,75	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	82,06	82,5	83	22.734.343.803,01	83,5	23.820.410.906,89	84	25.310.054.558,14	84,5	27.142.883.040,07	85	28.696.564.421,75	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.500.000.000		4.000.000.000		4.600.000.000		5.000.000.000		5.700.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM RPJMD (2025-2029)	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya Terjadinya Penyelewangan Atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran Ataupun Proses dan Kewenagan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK / APIP Tahun Anggaran n-1 (%)	76,06	80	80	3.500.000.000	80	4.000.000.000	80	4.600.000.000	80	5.000.000.000	80	5.700.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,287	3,4	3,5		3,6		3,7		3,8		4		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Nilai)	3,228	3,25	3,3		3,35		3,4		3,45		3,5		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.500.000.000		4.000.000.000		4.600.000.000		5.000.000.000		5.700.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP (Indeks)	Level 2	Level 2	Level 3	3.500.000.000	Level 3	4.000.000.000	Level 3	4.600.000.000	Level 3	5.000.000.000	Level 3	5.700.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	3,1	3,3		3,5		3,7		3,9		Dikelola (Managed)		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.793.008.034,28		17.836.902.056,88		19.141.993.206,97		20.602.367.163,53		22.240.711.398,78	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.242.763.032,28		10.762.637.454,88		10.811.593.301,97		11.629.840.229,53		12.512.640.670,78	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	50	55	60	10.242.763.032,28	65	10.762.637.454,88	70	10.811.593.301,97	75	11.629.840.229,53	75	12.512.640.670,78	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.534.769.313		1.657.550.858		2.913.686.161		3.117.644.192		3.335.879.286	
Meningkatanya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	60	60	65	1.534.769.313	73,75	1.657.550.858	82,5	2.913.686.161	91,25	3.117.644.192	100	3.335.879.286	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	87,11	88	88,75		89,5		90,25		91		91,1		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.012.987.063		2.174.026.028		2.174.026.028		2.326.207.850		2.489.042.400	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	60	65	2.012.987.063	73,75	2.174.026.028	82,5	2.174.026.028	91,25	2.326.207.850	100	2.489.042.400	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Nilai)	76,48	77,5	78,5		79,5		81		83		83,3		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.803.919.313		1.948.232.858		1.948.232.858		2.084.609.158		2.230.531.799	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	74,78	76,5	78	1.803.919.313	80	1.948.232.858	82	1.948.232.858	84	2.084.609.158	84,2	2.230.531.799	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	60	60	65		73,75		82,5		91,25		100		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					339.240.000		366.379.200		366.379.200		451.024.780		610.063.422	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	74,78	76,5	78	339.240.000	80	366.379.200	82	366.379.200	84	451.024.780	84,2	610.063.422	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	60	60	65		73,75		82,5		91,25		100		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					859.329.313		928.075.658		928.075.658		993.040.954		1.062.553.821	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	87,11	88	88,75	859.329.313	89,5	928.075.658	90,25	928.075.658	91	993.040.954	91,1	1.062.553.821	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	80	82	84		86		88		90		90		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
TOTAL KESELURUHAN					5.836.499.300.121,17		6.245.969.550.169,92		6.702.974.895.468		7.214.355.808.778,27		7.788.056.789.668,26	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran dari setiap misi yang berbentuk *impact*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari lebih dari satu indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dibagi menjadi dua yakni **Indikator Kinerja Utama (IKU)** daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi **Indikator Kinerja Daerah (IKD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK)** pada akhir periode masa jabatan.

A. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD, yang berfungsi sebagai pedoman monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah. Berikut penetapan target Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD 2025-2029	KONDISI Awal (2024)	TARGET RPJMD					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	120,75	125 – 135,8	170,84	200,48	230,12	258,70	287,28
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	47,80	49,15	50,50	51,85	53,20	54,55	55,9
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,18	40,97-41,45	42,79 - 43,0	43,50 - 44,0	44,50 - 45,0	45,50 - 55,0	45,95 - 55,5
4	Tingkat Kemiskinan (%)	11,04	9,90 – 10,80	9,85-10,75	9,75 - 10,45	7,50 - 8,95	6,20 - 7,20	6,10-7,10
5	Rasio Gini (Indeks)	0,309	0,298-0,302	0,299	0,293-0,299	0,291-0,298	0,280-0,284	0,270-0,280
6	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,71	1,72-1,80	1,90	2,04	2,20	2,4	2,45
7	Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,89	7,0 – 10,7	8,3-11,0	11,0 - 11,5	11,55 - 12,75	12,95 - 14,20	12,99-14,30
8	Indeks Inovasi Daerah	55,22 Inovatif	75-80 Sangat Inovatif	75,5-80,5 Sangat Inovatif	76,0-81,5 Sangat Inovatif	76,5-82,5 Sangat Inovatif	77-83 Sangat Inovatif	78-84 Sangat Inovatif
9	Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3,43	3,53	3,63	3,72	3,82	3,92
10	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	72,47	74,99	77,2	79,26	81,30	82,2
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,74	81,75	81,96	82,18	82,39	82,6	82,81
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,94	2,25 - 2,94	2,22 - 2,75	2,18 - 2,74	2,15 - 2,73	2,09 - 2,72	2,05 - 2,71
14	Indeks Risiko Bencana (IRB)	226,78	180,59	178,92	177,24	175,57	174,88	172,21
15	Indeks Infrastruktur Daerah	NA	73,75	75,43	77,04	78,69	80,41	82,06
16	Indeks Reformasi Birokrasi	77,44	80,44	85,44	90,44	95,44	100,44	105,44
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76.47 *	79,23-79,24	79,60	79,98	80,35	80,72-80,82	81,09

B. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pembangunan di daerah.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas 4 (empat) aspek yakni **aspek geografi dan demografi kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.**

Selanjutnya penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2030

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,100	0,600	0,606	0,611	0,617	0,622	0,628
	Kualitas Lingkungan Hidup							
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,74	81,75	81,96	82,18	82,39	82,60	82,81
3	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,6	11	14,5	18	21,5	25	28,5
4	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	0	57	67,5	78	88,5	99	99,5
	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan							
	Ketahanan Energi							
5	Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (Prevalencef of Undernourishment) (%)	10,51	9,05	8,62	8,19	7,76	7,33	6,9
6	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	226,78	180,59	178,92	177,24	175,57	174,88	172,21
7	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)							
	- Kumulatif	NA	19,76	20,96	22,15	23,35	24,54	25,9
	- Tahunan	NA	28,94	31,89	34,84	37,79	40,74	44,95
8	Potensi Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Ton CO2Eq)	0	169.929,78	213.207,09	258.662,61	307.147,88	358.869,22	414.922,31
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air	78,20	79,25	80,00	81,25	82,00	83,25	84,00
10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NA	76,61	77,61	78,61	79,81	80,61	81,61

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	3,44	30,29	32	33	34	37,88 - 44	41,76 - 44,5
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,08	5-7,5	5,84-8,65	6,68-9,75	7,52-12,75	8,36-15,00	9,2-15,92
14	Indeks Ketahanan Daerah	0,39	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54
15	Persentase Ketaatan RTRW	76,4	32	37,00	51,00	64,00	99,00	100,00
16	Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)	598,7	666,30	694,53	799,88	919,79	1.094,68	1.120,50
17	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	372,08	313,65	282,85	255,07	230.02	207,43	187,05
II.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,89	7,0 – 10,7	8,3-11,0	11,0 - 11,5	11,55 - 12,75	12,95 - 14,20	12,99-14,30
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,04	9,90 – 10,80	9,85-10,75	9,75 - 10,45	7,50 - 8,95	6,20 - 7,20	6,10-7,10
3	PDRB Perkapita (HB Rp Juta)	120,75	125 – 135,8	170,84	200,48	230,12	258,70	287,28
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,94	2,25 - 2,94	2,22 - 2,75	2,18 - 2,74	2,15 - 2,73	2,09 - 2,72	2,05 - 2,71
5	Rasio Gini (Indeks)	0,309	0,298-0,302	0,299	0,293-0,299	0,291-0,298	0,280-0,284	0,270-0,280
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,49*	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56
7	Usia Harapan Hidup (tahun)	70,84	71,64	71,96	72,27	72,59	72,96	73,22
8	Pengeluaran Ril Perkapita (Rupiah) (%)	10.536.000	10.923.000	11.310.000	11.697.000	12.084.000	12.471.000	12.858.000
9	Nilai Tukar Petani Gabungan (persen)	116,17	117,15	118,15	119,15	120,15	121,15	122,15
10	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka)	264	176	161	146	131	116	101
11	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	68	95	95	95	95	95	95
12	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	71	90	90	90	90	90	90
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	26,1	24,9	22,5	21,2	19,8	18,5	17,9
14	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,04	9,39	9,47	9,59	9,80	9,87-9,88	9,90-10,00
15	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,34	13,45 - 13,46	13,53	13,59	13,66	13,70-13,72	13,79
	Hasil Pembelajaran:							
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
16	- Literasi Membaca	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	- Numerasi	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	15,38	15,38
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
18	- Literasi Membaca	26,49	27,65 – 30,15	29,0 - 30,25	30,35 - 31,50	31,70 - 32,90	33,05 – 35,55	34,40 - 35,75
19	- Numerasi	20,54	21,21 – 23,71	22,21 - 23,95	23,21 - 24,10	24,21 - 25,15	25,21 – 27,71	26,10 - 27,95
20	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas Pendidikan tinggi (%)	11,89	12,57	12,70	12,84	12,97	13,10	13,23
21	Persentase pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian (%)	79,48	76,43	77,78	79,12	80,47	81,81	83,16
22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71.70	72.00	73.00	75.00	77.00	80.00	83.00
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	17,34	30,33 – 33,86	33,50 - 37,90	36,66 - 39,66	39,83 - 42,85	42,99 - 45,95	43,15-46,95
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,93*	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99,1
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76.47 *	79,23-79,24	79,60	79,98	80,35	80,72-80,82	81,09
26	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,42 *	52,52 - 52,59	53,02	53,52	54,02	54,52-54,72	55,02
27	Indeks Perlindungan Anak	58.54 *	60.51	6247	64.44	66.40	68.37	70.33
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	NA	72,21	72,88	73,55	74,21	74,88	75,55
29	Indeks Pembangunan Keluarga	61,20	61,86	62,52	63,18	63,84	64,5	65,16
30	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,461	0,447	0,430	0,420	0,410	0,397	0,380
31	Indeks Kesejahteraan Sosial	NA	51	53	56	58	61	62
32	Indeks Pembangunan Gender	92,89	93,03	93,43	93,83	94,23	94,63	95,00
33	Indeks Pembangunan Pemuda	60,00*	61,15	62,26	62,89	65,39	67,89	70,38
34	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,408	0,433	0,458	0,483	0,508	0,533	0,558
35	Prevalensi Schistosomiasis	0,47	<1	<1	<1	<1	<1	<1
36	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat fasilitasi daru Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau	NA	3,5	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan							
37	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota/provinsi	NA	8	9,5	11	12,5	14	15,5
III.	**ASPEK DAYA SAING**							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,18	40,97 – 41,45	41,5 - 42,48	42,5 - 43,99	43,5 - 45,49	47,00 - 50,99	48,51 - 51,1
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32	0,32 – 0,45	0,37	0,415	0,46	0,51 - 0,64	0,56
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	23,97	25,00	29,68	34,35	39,03	43,70	45,00
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB (%)	2,85	3,76	3,845	3,93	4,02	4,10	4,19
5	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Milyar Rupiah)	55.198,2	62.374,00	70.482,62	79.645,36	89.999,26	101.699,16	114.920,05
6	PDRB Sektor Kehutanan (Milyar Rupiah)	2.839,612	2.846,66	2.853,72	2.860,77	2.867,77	2.874,87	2.881,92
7	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,19	3,21	3,28	3,36	3,43	3,50	3,57
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (persen)	71,10	71,50	71,90	72,50	73,50	74,50	75,50
9	Indeks Inovasi Daerah (angka)	55,22	75-80	75,5-80,5	76,0-81,5	76,5-82,5	77-83	78-84
10	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,65	66,16	67,33	68,42	69,37	70,22	71,17
11	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	47,80	49,15	50,50	51,85	53,20	54,55	55,9
12	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	9,38	13,3-16,50	14,0-18,63	15,1-20,75	16,5-22,88	17,0 – 25,0	18,1 - 25,90
13	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,76*	5,77	6,00	6,24	6,47	6,7	6,93
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,54	35-42,4	36,85	38,7	40,55	42,4 - 42,84	44,25
15	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	159,47	90,74 - 92,16	92,80 – 94,15	94,91 – 96,50	96,50 – 98,79	98,80 – 101,20	101,20 – 103,16
16	Indeks Infrastruktur Daerah	NA	73,75	75,43	77,04	78,69	80,41	82,06
17	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	81,79	66,32	68,01	69,70	71,39	73,08	74,74
18	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	23,62	23,78	24,05	24,32	24,59	24,5924,59	25,13
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,47	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63
20	Tingkat Inflasi (%)	1,29	2,6-3,3	2,4-3,2	2,2-3,1	2,0-3,0	1,8-4,4	1,60

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,40	55,02	56,2	57,38	58,56	59,74	60,15
22	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	2,63	2,70	2,78	2,87	2,96	3,06	3,12
23	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,21	1,31	1,51	1,72	1,92	2,12	2,32
24	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,36	0,65	0,79	0,92	1,06	1,19	1,33
25	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,09*	2,26	2,42	2,58	2,74	2,9	3,06
26	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	28,00	35,00	36,75	38,5	40,25	42,00	43,75
27	Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	96,85	96,90	97,15	97,30	97,45	98,00	98,55
28	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi	7,4	11,1	10,93	10,75	10,58	10,4	10,23
29	Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%)	9,35	10,09	10,75	11,42	12,08	12,74	13,40
30	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
31	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi Rupiah)	2.895.384,64	3.094.537,51	3.566.841,38	4.039.145,25	4.511.449,12	4.983.752,99	5.456.056,86
32	Total Kredit/PDRB (%)	13,90*	14,2	15,10	16,00	16,00	17,79	18,69
33	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	74	75	76	77	78	79	80
34	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	58	50,99	51,49	51,99	52,48	52,98	53,48
35	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Rp Juta)	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000
36	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		4,02-5,60	2,89-5,70	5,76-6,00	6,63-7,00	7,50-8,30	7,90-8,40
37	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	38,07	38,79	39,21	39,57	39,85	40,04	40,23
38	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,770	0,614	0,624	0,635	0,645	0,655	0,665
39	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) (Indeks)	1,50	1,45	1,34	1,23	1,11	1,00	0,89
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Reformasi Hukum		70	70,38	70,75	71,13	71,5	71,88

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintah Digital)	2,91	3,15-3,35	1,20	1,50	1,70	2,00	2,20
3	Indeks Pelayanan Publik	4,34	3,48	3,51	3,54	3,66	3,59	3,62
4	Indeks Integritas Nasional (Survey Penilaian Integritas (SPI))	67,89	68-70,58	61,37 - 71,0	62,73 - 72,5	64,1 - 73,4	73,46 – 87,5	74,83 - 87,9
5	Persentase Penegakan Perda	100	70-100	71-100	72,5 - 100	75 - 100	76 - 100	77 - 100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	NA	60	62,5	65	67,5	70	71,5
7	Indeks Demokrasi Provinsi	79,13*	80 - 81	80,5- 81,31	80,9 - 81,62	81,0 - 81,93	82,24 - 85,49	82,55 - 85,9
8	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	50,57	50,99	51,25	51,95	52,26	52,98	53,26
9	Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3,43	3,53	3,63	3,72	3,82	3,92
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	53,25*	53,25 - 58	54,25 - 58,75	55,25 - 59,5	56,25 - 60,25	61 - 65	61,75 - 66,25
11	Inklusi keuangan (%)	80,71	81-85,05	85,86	86,67	86,67	86-88,29	89,10
12	Indeks Reformasi Birokrasi	77,44	80,44	85,44	90,44	95,44	100,44	105,44
13	Indeks Kualitas Kebijakan	48	55	58	60	62	65	67
14	Nilai SAKIP	74,48	77,39	79,34	81,39	83,49	85,64	87,96
15	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	92, 63	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
16	Indeks Profesionalitas ASN	NA	78,00	78,70	80,00	81,80	83,50	85,20
17	Tingkat Digitalisasi Arsip	71,71	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	NA	77,85	78	78,02	78,05	78,09	82,00
19	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)							
1	**Pendidikan**							
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	74,16	76	77,31	78,63	79,94	81,25	82,56
2	Angka Putus Sekolah (APUS) SMA/SMK (angka)	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
3	A1 Skor Kemampuan Literasi SMA	65,95	66,55	67,15	67,75	68,35	68,95	69,55
4	A1 Skor Kemampuan Literasi SMK	62,62	63,92	65,22	66,52	67,82	69,12	70,42
5	A1 Skor Kemampuan Literasi SDLB	63,24	64,84	66,44	68,04	69,64	71,24	72,84
6	A1 Skor Kemampuan Literasi SMPLB	77,40	77,90	78,40	78,90	79,40	79,90	80,40
7	A2 Skor Kemampuan Literasi SMALB	69,52	70,02	70,52	71,02	71,52	72,02	72,52
8	A2 Skor Kemampuan Numerasi SMA	55,71	57,31	58,91	60,51	62,11	63,71	65,31

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	A2 Skor Kemampuan Literasi SMK	53,39	55,59	57,79	59,99	62,19	64,39	66,59
10	A2 Skor Kemampuan Literasi SDLB	60,63	61,23	61,83	62,43	63,03	63,63	64,23
11	A2 Skor Kemampuan Literasi SMPLB	68,77	69,02	69,27	69,52	69,77	70,02	70,27
12	A2 Skor Kemampuan Literasi SMALB	61,07	61,57	62,07	62,57	63,07	63,57	64,07
13	A4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	79,48	79,82	80.16	80,50	80,84	81,18	81,52
14	A6 Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	80,95	81,49	82,03	82,57	83,11	83,65	84,19
15	B11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 – 18	74,16	74,80	75,44	76,09	76,73	77,37	78,01
16	B14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 – 18 Penyandang Disabilitas	56,24	64,99	73,74	74,83	75,92	77,01	78,10
17	Iklim Inklusivitas SMA	57,03	58,53	60,03	61,53	63,03	64,53	66.03
18	Iklim Inklusivitas SMK	54,94	57,24	59,54	61,84	64,14	66,44	68,74
19	Iklim Inklusivitas SDLB	58,15	59,45	60,75	62,05	63,35	64,65	65,95
20	Iklim Inklusivitas SMPLB	72,63	74,03	75,43	76,83	78,23	79,63	81,03
21	Iklim Inklusivitas SMALB	65,67	67,27	68,87	70,47	72,07	73,67	75,27
22	Iklim keamanan SMA	69,86	79,15	80,35	81,55	82,75	83,95	85,15
23	Iklim keamanan SMK	67,01	68,21	69,41	70,61	71,81	73,01	74,21
24	Iklim keamanan SDLB	75,08	75,58	76,08	76,58	77,08	77,58	78,08
25	Iklim keamanan SMPLB	72,31	73,51	74,71	75,91	77,11	78,31	79,51
26	Iklim keamanan SMALB	73,58	74,88	76,18	77,48	78,78	80,08	81,38
27	Iklim kebhinekaan SMA	71,84	72,84	73,84	74,84	75,84	76,84	77,84
28	Iklim kebhinekaan SMK	68,25	69,55	70,85	72,15	73,45	74,75	76,05
29	Iklim kebhinekaan SDLB	64,15	65,15	66,15	67,15	68,15	69,15	70,15
30	Iklim kebhinekaan SMPLB	70,25	72,05	73,85	75,65	77,45	79,25	81,05
31	Iklim kebhinekaan SMALB	73,25	75,25	77,25	79,25	81,25	83,25	85,25
32	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
	- Literasi Membaca	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
	- Numerasi	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	15,38	15,38
33	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- Literasi Membaca	26,49	27,65 – 30,15	29,0 - 30,25	30,35 - 31,50	31,70 - 32,90	33,05 – 35,55	34,40 - 35,75
	- Numerasi	20,54	21,21 – 23,71	22,21 - 23,95	23,21 - 24,10	24,21 - 25,15	25,21 – 27,71	26,10 - 27,95
34	Persentase pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian (%)	79,48	76,43	77,78	79,12	80,47	81,81	83,16
2	**Kesehatan**							
1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	26,1	24,9	22,5	21,2	19,8	18,5	17,9
2	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka)	4,76	4,15	3,85	3,65	3,45	3,00	2,55
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka)	264	176	161	146	131	116	101
4	Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio)	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
5	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio)	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35
6	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio)	5,30	5,31	5,32	5,33	5,34	5,35	5,36
7	Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis : Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis (treatment coverage)	68	95	95	95	95	95	95
8	Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis : Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	71	90	90	90	90	90	90
9	Prevalensi Schistosomiasis	0,47	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	101	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99,1
11	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio)	11,35	11,40	11,50	11,60	11,70	11,80	11,90
12	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio)	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
13	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka)	7,8	6,15	6,00	5,85	5,65	5,00	4,35
14	Angka Kematian Balita	7,8	7,5	7,4	7,5	6,8	6,5	6,0
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	58	60	77	80	82	85	86

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0
17	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	10,2	10,1	10,0	9,90	9,80	9,75	9,70
16	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	100	100	100	100	100	100	100
19	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	40,50	44,44	50.65	52.50	55,50	60,35	65,20
20	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	29	30	31,5	32,5	33	34,5	35
21	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4	18.29	17.4	15,5	14,5	13,5	12,5
22	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	38	40	41,5	42	43,5	44	44,5
23	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	67	70	75	80	85	90	100
24	Cakupan imunisasi bayi lengkap	78	80	85	85	90	95	100
25	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	81,1	82	83	84	86	90	95
26	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Suplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	83	85	87	89	92	95	98
27	Persentase hipertensi dalam pengobatan	71,5	72	75	78	80	85	87
28	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	52,30	57	60	65	70	75	80
29	Persentase KB pasca persalinan	55	57	60	65	70	75	80
30	Praktek Inisiani Menyusu Dini (IMD)	75	92	93	94	95	96	97
31	Usia 6 - 23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) beragam	83	87	89	91	93	95	97
32	Anak usia 0 - 59 bulan Gizi Buruk mendapat tata laksana gizi buruk	82	83	84	85	87	88	90
33	Anak 6 - 59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	78	82	85	87	90	93	95
34	Anak usia 0 - 23 bulan mendapatkan imunisasi lengkap	52,30	57	60	65	70	75	80

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Anak usia 0 - 23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	85	85	90	90	95	95	95
36	Anak usia 24 - 59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	85	85	90	90	95	95	95
37	Anak usia 0 - 23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	75	80	85	85	90	90	90
38	Anak usia 24 - 59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	75	80	85	85	90	90	90
39	Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24 - 59 bulan	54,86	60	62	64	66	68	70
40	Skrining anemia terhadap remaja putri	66,2	86	70	73	75	77	80
41	Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap air minum	16,23	30	35	40	45	50	55
42	Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap sanitasi aman	5,09	30	40	50	60	70	80
43	Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	NA	69.23	76.92	84.61	92.3	100	100
44	Persentase Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	61.53	69.23	76.92	84.61	92.03	100
45	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	80	84	85	90	99	99	99
46	Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	NA	61.53	69.23	76.92	84.61	92.03	100
47	Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	NA	53.8	61.53	69.23	76.92	84.61	92.3
48	Persentase Kab/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	NA	53.8	61.53	69.23	76.92	84.61	92.3
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1	Persentase Kondisi Mantap jalan Provinsi (%)	64,98	65,00	67,00	68,50	70,00	71,50	73,00
2	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,08	5-7,5	5,84-8,65	6,68-9,75	7,52-12,75	8,36-15,00	9,2-15,92
3	Presentase rumah tangga terhadap akses air bersih (cakupan sulawesi tengah) (%)	87,86	88,16	88,46	88,76	89,06	89,36	89,66

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks)	61,21	61,21	61,96	62,96	64,21	65,46	66,96
5	Ketahanan Air : Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,55	0,60	0,65	0,73	0,82	0,93	1,04
6	Persentase Ketaatan RTRW	76,4	32	37	51	64	99	100
7	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1	0,70	0,71	0,79	0,86	0,93	1
8	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi	10	12,56	15,45	17,84	21,23	24,12	27,02
9	Persentase kualitas sistem dan pengolahan persampahan diwilayah kewenangan provinsi	10,08	10,08	12,5	25	37,5	50	100
10	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	66,26	66,91	67,55	68,18	68,8	69,4	69,98
11	Persentase kualitas infrastruktur permukiman	82,12	83,43	84,74	86,07	87,42	88,8	90,2
12	Persentase infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan strategis provinsi	NA	17,15	21,22	25,29	29,36	33,43	37,5
13	Indeks Infrastruktur Kebinamargaan	NA	0,18	0,28	0,46	0,64	0,82	1,00
14	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	NA	19,44	52,74	60,58	88,61	100	100
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	58,09	66,32	68,01	69,70	71,39	73,08	74,74
2	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	91,20	91,68	92,28	94,21	96,14	98,07	100,00
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh Fasiltasi rumah layak huni	NA	0	16,67	33,33	50,00	66,67	100
4	Presentase Luasan Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang tertangani	0,89	1,66	3,58	5,76	8,21	10,93	13,91
5	Presentase Permukiman yang Terfasilitasi PSU	15,03	16,02	16,52	17,01	17,51	18,00	18,50
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**							
1	Nilai Dimensi Strategi Indeks Trantibum	10,1	10,12	10,34	10,46	10,66	10,86	10,9

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Nilai Dimensi SDM Indeks Trantibum	24,60	24,74	24,74	24,99	24,99	25,22	25,6
3	Nilai Dimensi Sistem Indeks Trantibum	15,87	16,14	16,42	16,55	16,85	16,92	17
4	Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Respon Time Rate	7,69	15,38	23.07	30.76	38,46	46,15	53,84
5	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70-100	70-100	70-100	70-100	70-100	75-100	75-100
6	IndeksPenyelenggaraanTrantibumlinmas Sub Urusan Bencana	58,42	63	70	72	70,5	71	72
6	**Sosial**							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	NA	51	53	56	58	61	62
2	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	NA	14	14	15	16	16	17
3	Nilai Dimensi Peranan Sosial	NA	16	16	17	18	19	19
4	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	NA	21	22	24	24	26	26
5	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	100	100	100	100	100	100
7	**Tenaga Kerja**							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	168	163	158	153	148	143	138
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (persen)	64,00	65,92	67,90	69,93	72,03	74,19	76,35
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (persen)	89,80	90,30	90,80	91,30	91,80	92,30	92,80
4	Keselamatan dan perlindungan (persen)	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)	104,70	95,00	96,14	97,29	98,46	99,64	100,82
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (persen)	168,00	92,00	93,10	94,22	95,35	96,50	97,64
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)							
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (persen)	45,00	45,00	48,60	52,49	56,69	61,22	65,76

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (persen)	85,00	90,00	92,25	94,56	96,92	99,34	100,00
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (persen)	86,00	90,00	91,80	93,64	95,51	97,42	99,33
11	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK (persen)	85,00	86,00	87,72	89,47	91,26	93,09	94,91
12	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	65,69	67,00	69,01	71,08	73,21	75,41	77,61
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	71,10	72,00	72,72	73,45	74,18	74,92	75,67
14	Persentase Pekerja Informal	65,70	66,65	66,15	65,47	64,61	63,55	62,27
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,461	0,447-0,444	0,434 – 0,432	0,421– 0,419	0,409 – 0,397	0,396-0,394	0,394-0,386
2	Indeks Pembangunan Gender	92,89	93,03	93,43	93,83	94,23	94,63	95,00
3	Indeks Perlindungan Anak	58.54 *	60.51	6247	64.44	66.40	68.37	70.33
4	Anggaran Responsif Gender	9,12	9,30	10,35	11,12	11,86	12,05	12,40
9	**Pangan**							
1	Persentase penanganan daerah rawan pangan (persen)	15,34	14,49	13,6	12,75	11,85	10,96	10,07
2	Skor PPH Ketersedian (Skor)	85,29	88,30	89,40	90,00	90,10	90,15	90,50
3	Skor PPH Konsumsi (Skor)	85,29	88,30	89,40	90,00	90,10	90,15	90,50
4	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (%)	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah (%)	668,70	100	100	100	100	100	100
6	Inflasi Pangan Bergejolak(%)	1,29	5	5	5	5	5	5
7	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	86,65	87	88	89	90	91	92

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	**Pertanahan**							
1	Persentase kasus sengketa yang terfasilitasi	35,71	35,71	66,67	75,00	80,00	83,33	85,71
11	**Lingkungan Hidup**							
1	Indeks kualitas air (poin)	97,31	97,50	97,95	98,50	98,95	99,50	100,05
2	Indeks kualitas udara (poin)	101,54	101,44	101,34	101,24	101,14	101,04	100,94
3	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	79,83	79,92	79,97	80,02	80,07	80,12	80,17
4	Emisi GRK Sektor Limbah (TonCO_2eq)	382,91	362,91	352,91	342,91	332,91	322,91	312,91
5	Indeks kinerja pengelolaan sampah (Poin)	38	38,2	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0
6	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina (Persen)	NA	7,14	14,29	21,43	28,57	35,71	42,86
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
1	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	95,4	96	97	98	99	100	100
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	42,8	50	5,5	60	65	70	75
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	57	61	63	65	67	70	73
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Cerai bagi Penduduk yang Bercerai	57	61	63	65	67	70	73
5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	58	62	65,5	70	75	80	85
6	Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	1,91	3	5	8	10	12	15
7	Rate Net Recent Migrasi	924	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
1	Indeks Desa	72.31	72.47	72.63	72.79	72.95	73.11	73.27
2	Persentase Desa Mandiri (ID)	23.62	23.78	23.89	24.05	24.32	24.86	25.40
3	Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat status Desa	NA	30.77	61.54	92.31	100	0	0
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	NA	72,21	72,88	73,55	74,21	74,88	75,55
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (skala 0-100)	61,20	61,86	62,52	63,18	63,84	64,50	65,16

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita)	2,26	2,23	2,22	2,17	2,14	2,12	2,10
4	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara kerja KB modern (%)	80,80	81,55	82,30	83,03	83,76	84,48	85,18
5	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (*Age Spesific Fertility Rate*/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	38,8/1000	32,65/1000	31,80/1000	30,95/1000	30,10/1000	29,25/1000	28,40/1000
6	Indeks Lansia Berdaya	60,48 (PK 2024)	62,07	62,59	63,10	63,60	64,09	64,58
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	83,13	84,45	85,66	86,78	87,81	88,76	89,65
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	12,64	17,64	22,64	27,64	32,64	37,64	39,64
9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	61,8	62,1	62,40	62,8	63,20	63,8	64,1
15	**Perhubungan**							
1	Persentase layanan transportasi Darat & Laut	NA	30	40	50	60	70	80
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	NA	70	70	80	80	90	100
16	**Komunikasi dan Informatika**							
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	82,16	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	95,00
2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	5,56	5,77	6,00	6,24	6,47	6,7	6,93
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	62,76	64,00	69,00	74,00	80,00	85,00	90,00
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintah Digital)	2,91	3,15-3,35	1,20	1,50	1,70	2,00	2,20
5	Domain Layanan SPBE(poin)	3,49	3,60	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
6	Domain Manajemen SPBE (poin)	1,36	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00
7	Domain Tata Kelola SPBE	2,6	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
8	Domain Kebijakan Internal SPBE	3,4	3,5	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00
17	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**							
1	Persentase Koperasi aktif	54	55	56	57	58	59	60
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	3,00	4,72	4,92	5,12	5,32	5,57	5,82
3	Persentase Koperasi Berkualitas	12.67	9.63	12.04	14.45	16,86	19,27	21,68

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	3,0	3.33	3.53	3.73	3,93	4,13	4,33
18	**Penanaman Modal**							
1	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	50	51	52	53	54	55	56
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (proyek)	2.730	2.750	2.770	2.790	2.810	2.830	2.850
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Rp Juta)	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000
4	Kenaikan/Penurunan Nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4.590	4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	4.650
19	**Kepemudaan dan Olah Raga**							
1	Indeks Pembangunan Pemuda	60,00*	61,15	62,26	62,89	65,39	67,89	70,38
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Kemasyarakatan	2,53	4,53	6,53	8,53	10,53	12,53	14,53
3	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,408	0,433	0,458	0,483	0,508	0,533	0,558
4	Dimensi Ruang Terbuka IPO	0,792	0,817	0,842	0,867	0,892	0,917	0,942
5	Dimensi Ekonomi IPO	0,776	0,801	0,826	0,851	0,876	0,901	0,926
6	Dimensi SDM IPO IPO	0,038	0,063	0,088	0,113	0,138	0,163	0,188
7	Dimensi Partisipasi IPO	0,276	0,301	0,326	0,351	0,376	0,401	0,426
8	Dimensi Performa IPO	0,048	0,073	0,098	0,123	0,148	0,173	0,198
9	Dimensi Kebugaran Jasmani IPO	0,179	0,204	0,229	0,254	0,279	0,304	0,329
10	Dimensi Kesehatan IPO	0,421	0,446	0,471	0,496	0,521	0,546	0,571
11	Dimensi Perkembangan Personal IPO	0,535	0,560	0,585	0,610	0,635	0,660	0,685
12	Dimensi Literasi Fisik IPO	0,608	0,633	0,658	0,683	0,708	0,733	0,758
20	**Statistik**							
1.	Indeks pembangunan Statistik	1,77	2,00	2,00	2,23	2,30	2,50	2,60
21	**Persandian**							
1.	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) (Indeks)	433	400	404	80	600	650	761
22	**Kebudayaan**							
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,42*	52,52 - 52,59	52,60-53,01	53,10-53,44	53,50-53,86	54,21 - 54,28	54,29 - 55,30
2	Nilai Ekonomi Budaya IPK	42*	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.10
3	Nilai Pendidikan IPK	78,22*	74.00	75.00	76.00	77.00	78.00	78.30
4	Nilai Ketahanan Budaya IPK	79.24*	75.00-75.59	76.00-76.50	77.00-77.50	78.00-78.50	79.00-79.29	79.30-79.86

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Nilai Warisan Budaya IPK	26.24*	39	40	41	42	43	44.50
6	Nilai Ekspresi Budaya IPK	39.00*	35	36	37	38	39	40.10
7	Nilai Budaya Literasi IPK	58.29*	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.10
8	Nilai Gender IPK	62.78*	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00
23	**Perpustakaan**							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71.70	72.00	73.00	75.00	77.00	80.00	83.00
2	Nilai Dimensi Kepatuhan IPLM	21.51	21.6	21.9	22.5	23.1	24	24.9
3	Nilai Dimensi Kinerja IPLM	50.19	50.40	51.10	52.50	53.90	56.00	58.10
4	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	67,48	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
24	**Kearsipan**							
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	63.49	70	71	72	73	74	75
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	71,71	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
3	Nilai Aspek Kebijakan	22,71	22,74	22,76	22,78	22,8	23	23,2
4	Nilai Implementasi Kebijakan	49	49,26	50,24	51,22	52,2	53	53,8
25	**Kelautan dan Perikanan**							
1	Produksi Perikanan (ton)	1.083.412,17	818.921.123	1.191.132,15	1.178.457,21	1.191.670,53	1.205.037,40	1.218.404
2	Persentase produksi (persen)	66,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Produksi Perikanan Budidaya	803.370,46	818.643,76	883.870,21	892.708,91	901.636,00	910.652,36	919.758,88
4	Produksi Perikanan Tangkap	291.013,15	277364,95	307.261,94	285.748,30	290.034,53	294.385,04	298.800,82
5	Produksi Perikanan yang diolahan (Kg)	249.379,7	277.364,95	257.640,73	265.901,75	274.162,78	282.423,80	290.684,83
6	Konsumsi Ikan (Kg/Kap /Thn)	74,72	40,65	43,4	44,5	45,6	46,7	47,6
7	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku, %)	3,06	3,00	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05
8	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku, Rp. Milyar)	-	11.295,15	11.746,96	12.216,83	12.705,51	13.213,73	13.742,28
9	Nilai Tukar Nelayan (%)	93,77	101,05	101,86	102,67	103,49	104,32	105,16
10	Nilai Tukar Pembudidaya (%)	92,19	101,03	101,54	102,04	102,55	103,07	103,58
11	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku,Rp Milyar)	-	11.295,15	11.746,96	12.216,83	12.705,51	13.213,73	13.742,28
12	Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	-	0,1803	0,1804	0,1806	0,1808	0,181	0,1812
13	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	93,49	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	**Pariwisata**							
1	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (hari)	3,75	3-5	3-5	3-5	5-7	5-7	6-8
2	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per kunjungan/orang (US $)		500	600	700	800	900	1000
3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Juta Orang)	9.216.969	9.000.000	9.925.000	10.850.000	11.775.000	12.700.000	13625000
4	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata		8.418	9.259	10.184	10.285	10.387	10489
5	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata Yang Tersertifikasi	145	100	200	300	400	500	600
6	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	111.400.000.000	125.000.000.000	143.750.000.000	165.300.000.000	190.100.000.000	218.600.000.000	251.400.000.000
7	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif		2.388	2.571	2.828	3.110	3.421	3.732
8	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi	70	100	200	300	400	500	600
27	**Pertanian**							
1	Kontribusi Sektor Pertanian secara umum terhadap PDRB (ADHB) (persen)	15,80	16,00	16,07	16,14	16,21	16,28	16,35
2	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	2,06	1,23	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29
3	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (Rupiah-Milyar)	7.767,68	7.578,82	7.951,63	8.342,77	8.753,15	9.183,71	9614,27
4	Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,50	1,51
5	Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (Rupiah-Milyar)	5.465,20	5.716,82	5.901,50	6.301,72	6.618,32	6.952,20	7.355,50
6	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura perhektar (Ton/Ha):							
	a. Padi	4,43	4,55	5,25	5,50	5,75	6,00	6,15
	b. Jagung	4,66	4,67	4,68	4,69	5,01	5,05	5,15
	c. Kedelai	1,43	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,50
	d. Ubi Kayu	22,39	25,15	25,65	26,17	26,69	27,22	27,52
	e. Ubi Jalar	12,17	17,52	17,78	18,05	18,32	18,60	19,75
	f. Bawang Merah	5,36	5,37	5,38	5,39	5,40	5,41	5,46
	g. Cabe Besar	7,72	7,74	7,76	7,78	7,80	7,82	8,62

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	h. Cabe rawit	6,74	6,75	6,76	6,77	6,78	6,79	7,24
	i. Durian	16,84	16,92	16,95	16,97	17,00	17,10	17,15
7	NTP Tanaman Pangan	95,39	95,75	96,47	97,19	97,22	98,65	100,08
8	NTP Hortikultura	135,84	136,04	136,24	136,44	136,64	136,84	137,04
9	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (ADHB) (persen)	7,26	7,36	7,46	7,56	7,66	7,76	7,86
10	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB) (persen)	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	1,69
11	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton/Ha):							
	a. Kelapa Dalam	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22
	b. Cengkeh	0,42	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61
	c. Kopi	0,54	0,70	0,79	0,87	0,95	1,04	1,12
	d. Kakao	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
	e. Pala	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
	f. Kelapa Sawit	3,49	3,68	3,78	3,87	3,97	4,07	4,16
12	NTP Tanaman Perkebunan	133,65	133,75	133,85	133,95	134,05	134,15	134,25
13	NTP Peternakan	104,33	104,93	105,53	106,13	106,73	107,33	107,93
14	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,65	66,16	67,33	68,42	69,37	70,22	71,17
28	**Kehutanan**							
1	Indeks Kualitas Lahan	96,43	89,80	89,87	89,94	90,01	90,08	90,15
2	PDRB Sektor Kehutanan (Milyar Rupiah)	2.839,612	2.846,66	2.853,72	2.860,77	2.867,77	2.874,87	2.881,92
3	Peningkatan sumbangan PDRB subsector Kehutanan (Persen)	8	10	12	14	16	18	20
4	Nilai traksaksi ekonomi kelompok masyakat kehutanan	43.465	47.814	52.585	57.850	63.635	69.998	76.361
5	Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi di area preservasi (%)	18,46	22,15	25,85	29,54	33,23	36,92	40,62
6	Persentase penurunan kerusakan hutan	99,53	97,21	94,43	91,65	88,87	86,10	83,32
7	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	9,81	10,56	11,43	12,42	13,54	14,78	16,14
29	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
1	Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)	598,7	666,30	694,53	799,88	919,79	1.094,68	1.120,50
2	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	372,08	313,65	282,85	255,07	230.02	207,43	187,05
3	Rasio Elektrifikasi	99,27	99,74	99,8	99,85	99,9	99,95	100

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar	64,18	67,16	70,89	74,62	78,36	82,09	87,06
5	Persentase peningkatan konservasi cekungan air tanah	56.25	56.25	62.5	68.75	75	81.25	87,5
6	Kapasitas Pembangkit Energi Terbarukan yang Terpasang (dalam watt per kapita)	101,67	105	107.03	105.94	105.26	104.25	104,97
30	**Perdagangan**							
1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	10.540,90	11.041,52	11.543,86	12.046,11	12.548,26	12.850,33	13.152,40
31	**Perindustrian**							
1	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US$ juta)	17.828,09	18.398,59	18.969,09	19.539,59	20.110,09	20.113,29	20.116
2	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa)	135.160	135.417	135.674	135.931	136.188	136.445	136.702
3	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	14,34	15,00	15,75	16,50	17,25	18,00	18,75
32	**Transmigrasi**							
1	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	52,25	52,50	53,81	55,16	56,54	57,95	59,36
2	Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	50,39	55,00	56,93	58,92	60,98	63,11	65,25
3	Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	383	400	440	484	532	586	639
33.	**Perencanaan Pembangunan**							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	92, 63	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
2	Nilai Kompnonen Perencanaan Kinerja Pada Nilai SAKIP	22,55	23,25	23,95	24,65	25,35	26,05	26,75
3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Nilai SAKIP	20,51	21,21	22,01	22,81	23,61	24,41	25,21
34.	**Keuangan**							
1	Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,13	2,76	2,97	3,05	3,13	3,28	3,43
3	Presentase PAD terhadap pendapatan (persen)	38,07	38,79	39,21	39,57	39,85	40,04	40,23
35.	**Kepegawaian dan Diklat**							
1	Indeks Profesionalitas ASN	76,88	78	78,7	80	81,8	83,5	85,2
2	Indeks Sistem Merit	264	264	0,68	0,68	0,78	0,78	0,81

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	26,77	25.87	26	27	28	29	30
4	Nilai sub aspek sistem merit pengembangan Kompetensi ASN		0,059	0,065	0,071	0,083	0,089	0,095
36.	**Riset dan Inovasi Daerah**							
1	Skor Kapabilitas Inovasi Daerah	2,71	2,74	2,76	2,78	2,80	2,82	2,84
2	Skor Satuan Pemerintah Daerah (SPD)	13,92	15,12	15,62	16,13	16,63	17,14	17,64
3	Skor Satuan Inovasi Daerah (SID)	41,30	44,88	46,38	47,87	49,37	50,86	52,36
37.	**Pengawasan**							
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pada Nilai SAKIP	19,89	21,25	21,5	21,75	22	22,5	22,5
2	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,29	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,00
3	Indeks Integritas Nasional (Survey Penilaian Integritas (SPI))	67,89	68-70,58	61,37 - 71,0	62,73 - 72,5	64,1 - 73,4	73,46 – 87,5	74,83 - 87,9
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase Penyelesaian TLHP oleh BPKP	76%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh Komisii Pemberantasan Korupsi (KPK)	85	85	85	85	85	85	85
7	Persentase Capaian dan Ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh KPK	97.48%	97%	98%	98%	98%	98%	98%
8	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mendapatkan Zona Integrritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)	0	1	2	3	4	5	6
9	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Kemenpan-RB	100%	85%	86%	87%	88%	89%	90%
10	Persentase capaian dan ketepatan waktu Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) oleh Kemenpan-RB	51.42%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase Capaian Tindak Lanjut Pelimpahan Pengaduan Masyarakat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Tidak ada Pelimpahan (NA)	85%	85%	86%	86%	87%	87%
12	Persentase Penyelesaian TLHP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	86%	85%	85%	85%	85.50%	85.50%	86%
13	Persentase Penyelesaian TLHP oleh Inspektorat Provinsi	81%	86%	86.25%	86.50%	86.75%	87%	87%
14	Persentase Penyerapan Anggaran Pengawasan pada Inspektorat Daerah	91.52%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
15	Jumlah Sertifiikasi/ Pelatihan/ Pendidikan yang dimiliki Inspektur Daerah	1	1	2	3	3	3	4
16	Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan dan pelatihan minimal 120 jam/tahun	NA	90%	90%	90%	90%	90%	100%
17	Persentase Pemenuhan dan Ketepatan Laporan Rutin dan insidental kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	NA	90%	91%	92%	93%	94%	95%
18	Penghargaan atau Apresiasi yang diterima terkait pengawasan di daerah	0	1	1	1	1	1	1
38.	**Kesekretariatan Daerah**							
1	Indeks Pelayanan Publik	4,34	3,48	3,58	3,68	3,7	3,78	3,88
2	Indeks Reformasi Hukum	87,90	70	70,38	70,75	71,13	71,5	71,88
3	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	74	75	76	77	78	79	80
4	Persentase Capaian Aksi HAM	NA	60	62,5	65	67,5	70	71,5
5	Indeks Kualitas Kebijakan	48	55	58	60	62	65	67
6	Indeks Reformasi Birokrasi	77,44	80,44	85,44	90,44	95,44	100,44	105,44
7	Aset Perbankan Syariah/PDRB (%)	0,87	0,95	1,01	1,14	1,24	1,42	1,53
8	Indeks Zakat Nasional (Indeks)	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64
9	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Provinsi (Produk)	6.388	9.195	9.275	9.355	9.446	9.516	9.586

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Sasaran/Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Nilai LPPD	3,2349	3,2053	3,2127	3,2349	3,2405	3,2553	3,2553
11	Nilai Sakip Komponen Pelaporan Kinerja	11,35	11,68	11,88	12,18	12,53	12,93	13,50
39.	**Sekretariat DPRD**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	89	90	91	92	93
40	**Penanggulangan Bencana**							
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,39	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54
41	**Kesatuan Bangsa Politik**							
1	Indeks Demokrasi Provinsi	79,13*	80 - 81	80,5 - 81,31	80,9 - 81,62	81,0 - 81,93	82,24 - 85,49	82,55 - 85,9
2	Nilai Aspek Kebebasan	87,11*	88,00	88,75	89,50	90,25	91,00	91,10
3	Nilai Aspek Kesetaraan	74,78*	76,50	78,00	80,00	82,00	84,00	84,20
4	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	76,48*	77,50	78,50	79,50	81,00	83,00	83,30
5	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	80	82	84	86	88	90	90

Keterangan:
*) : Data yang digunakan masih tahun 2023 belum terdapat rilis resmi tahun 2024
NA = belum terdapat metode perhitungan pada tahun 2024 (indikator baru digunakan pada tahun 2025)

BAB V
PENUTUP

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 adalah **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029.** Visi ini menggambarkan arah dan tekad bersama seluruh komponen daerah untuk menghadirkan kemajuan pembangunan yang terencana, terukur, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi yaitu (1) mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan Sejahtera; (2) mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; (3) mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor dan (4) meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam pelasanaan penyelengggaran urusan pemerintahah. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Pusat dan kab/kota serta berbagai pemangku kepentingan.

Provinsi Sulawesi Tengah terus bertransformasi menjadi pusat ekonomi global di Kawasan Timur Indonesia dengan pengelolaan potensi unggulan dan pengelolaan industri sumberdaya alam y ang memiliki daya saing tinggi yang dikelola secara berkelanjutan yang didukung sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi, berdaya saing, inovatif, dan memiliki derajat kesehatan yang tinggi serta kondisi kehidupan sosial yang harmoni, ketersediaan sarana prasarana dasar dan infrastruktur yang memadai serta adanya reformasi birokrasi.

Untuk memastikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini berjalan dengan baik sehingga tercapainya visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029** maka perlu diarahkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintah setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dalam

menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah pada tahun 2029 akan menyusun RKPD Tahun 2030. Penyusunan RKPD Tahun 2030 dilakukan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Apabila teknis penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah di akhir periode RPJMD Tahun 2025-2030 terdapat regulasi dari pemerintah pusat akan dilakukan dengan memedomani kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD tahun 2030 dapat berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 karena dokumen ini telah memuat kebijakan termasuk program sampai dengan Tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan menyelaraskan semua dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah maka diperlukan kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, sehingga akan terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam kinerja maupun penganggaran serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan;
2. RPJMD harus menjadi pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat.
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
4. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Perda RPJMD Tahun 2025-2029.
5. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, mulai tahun 2026 hingga 2030. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

6. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD dan RKPD secara berkala. Pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD bersumber dari evaluasi hasil RKPD.
8. Kepala perangkat daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah bersumber dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
9. Bila berdasarkan hasil Evaluasi terhadap RPJMD perlu dilakukan perubahan RPJMD, maka dilakukan sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
10. Pemerintah daerah melakukan manajemen risiko strategis pemerintah daerah serta manajemen risiko strategis dan operasional perangkat daerah.
11. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dan inovatif, serta penguatan manajemen investasi untuk mendanai pembangunan baik dari dari sektor publik maupun non publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pelaksanaan RPJMD akan melibatkan partisipasi masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan. Untuk itu perlu dibangun komunikasi publik yang baik dan berkesinambungan.
13. RPJMD akan menjadi pedoman dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap tahun.
14. Bila dalam pelaksanaannya dinilai perlu untuk melakukan perubahan sasaran pada tahun-tahun tertentu tetapi tidak mengubah sasaran akhir RPJMD untuk program yang bersangkutan, maka atas persetujuan Gubernur, penetapan perubahan sasaran tersebut dimuat dalam RKPD tahun yang bersangkutan;
15. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
16. Dalan rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah;
17. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Sulwesi Tengah sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang adil,

inklusif, dan berkelanjutan. PUG diintegrasikan kedalam empat misi pembangunan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang responsif gender, pertumbuhan ekonomi yang memeberi ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki, pembangunan infrastruktur serta pengelolaan lingkungan yang ramah gender, serta reformasi birokrasi yang transparan yang berlandaskan nilai-nilai religius dengan tetap menjunjung prinsip kesetaraan. Melalui penerapan PUG, diharapkan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara merata. Komitmen ini hanya dapat terwujud melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat, sehingga pembangunan Sulawesi tengah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan bersama dengan prinsip *no one left behind*;

18. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 tidak terlepas dari berbagai ketidakpastian dan potensi hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan agar perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, adaptif, serta mampu memberikan hasil yang berkelanjutan serta dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

RPJMD Tahun 2025–2029 hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja sama. Pembangunan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan ikhtiar bersama seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

DAFTAR ISTILAH

Angkatan Kerja	:	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
Asta Cita	:	Istilah yang merujuk pada delapan cita-cita atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintahan saat ini, khususnya oleh Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Asta Cita merupakan fondasi bagi visi dan misi kepemimpinan Kepala Negara.
Backlog rumah	:	Kondisi di mana terjadi kesenjanga antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan; secara sederhana, backlog rumah adalah defisit atau *gap* antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia
Bauran energi	:	Kombinasi dari berbagai sumber energi yang digunakan dalam suatu wilayah atau sistem; dapat mencakup berbagai jenis energi primer seperti minyak bumi, gas alam, batubara, energi baru dan terbarukan (EBT), dan energi nuklir; bauran energi mencakup semua penggunaan energi secara langsung, termasuk di sektor transportasi, perumahan, dan industri, bukan hanya pembangkitan listrik.
Bonus demografi	:	Kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non- produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dalam suatu wilayah. Kondisi ini menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar karena adanya banyak tenaga kerja, konsumen, dan pelaku usaha potensial.
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	:	Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain; Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung fokus pada kemampuan lingkungan untuk menghasilkan atau menyediakan sumber daya, sementara Daya Tampung fokus pada

		kemampuan lingkungan untuk menampung atau menetralkan limbah atau zat lain.
Disparitas pembangunan	:	Ketimpangan pembangunan; fenomena di mana terjadi ketimpangan yang besar dalam indikator pembangunan seperti tingkat pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat.
Ekonomi Hijau	:	Konsep ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang melibatkan investasi pada teknologi bersih, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien pada lingkungan ekologi daratan.
Ekonomi Biru	:	Konsep ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut, kelautan, dan pesisir secara berkelanjutan. Hal tersebut mencakup berbagai sektor seperti perikanan, akuakultur, transportasi laut, energi terbarukan dari laut, pariwisata pesisir, dan bioteknologi laut.
Emisi GRK	:	Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang memiliki potensi untuk meningkatkan efek rumah kaca, sehingga menyebabkan pemanasan global; peningkatan emisi GRK dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan bermotor, produksi ternak, penggunaan pupuk kimia, penggundulan hutan, dan berbagai aktivitas industri.
Energi Baru Terbarukan (EBT)	:	Energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbarui secara alami, seperti matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi.
Rasio Gini / Indeks Gini	:	Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (semua pendapatan terkonsentrasi pada satu atau beberapa orang). Artinya, semakin besar dan mendekati angka 1, maka ketimpangan ekonomi di suatu wilayah semakin besar.

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	:	Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	:	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengukur kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. IDSD mencakup aspek-aspek seperti kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia.
Indeks Inovasi Daerah (IID)	:	Sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IID mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu, menggunakan seperangkat variabel dan indikator. Tujuan IID adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi inovasi yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan urusan pemerintahan daerah.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	:	Ukuran yang digunakan untuk menilai untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan; IKP disusun dari beberapa indikator yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
Indeks Modal Manusia (IMM)	:	Pengukuran yang dilakukan untuk menilai potensi produktivitas SDM (Sumber Daya Manusia) di suatu wilayah. IMM mengukur seberapa besar potensi ekonomi dan profesional warga suatu wilayah dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan.
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	:	Tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. IPP mencakup berbagai aspek pelayanan, seperti kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan dampak layanan terhadap masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi	:	Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan. Indeks ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi tersebut.
Indikator Kinerja Daerah (IKD)	:	Sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Indikator Kinerja Program (IKP)	:	Alat ukur yang digunakan untuk menaksir keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. IKP berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana tujuan program tercapai, baik dari segi output, outcome, maupun dampak.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, tim, atau individu telah mencapai tujuan atau target tertentu. IKU digunakan untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memantau kemajuan terhadap target strategis, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	:	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Indikator Utama Pembangunan (IUP)	:	Tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan di suatu wilayah. IUP membantu mengukur kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembangunan manusia.
Indeks Modal Manusia (IMM)	:	Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relative terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh *World Bank* (*Human Capital Index*).
Infant Mortality Rate (IMR)	:	Angka Kematian Bayi (AKB); jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu; IMR/AKB digunakan sebagai indikator penting untuk menilai tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu masyarakat,

khususnya terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Inklusif : Mencakup semua orang tanpa pembedaan; merupakan pendekatan yang melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang mungkin sebelumnya terpinggirkan. Istilah ini berasal dari kata “inclusion” dalam bahasa Inggris yang berarti “mengajak masuk” atau “mengikutsertakan”.

Inklusi keuangan : Kondisi di mana semua anggota masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah dan daerah terpencil, memiliki akses terhadap layanan keuangan formal (lembaga keuangan dan perbankan). Ini berarti masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, dan layanan keuangan digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Ketahanan pangan : Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mereka memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk hidup sehat dan aktif. Konsep ini meliputi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : Ukuran persentase kenaikan atau penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun); menunjukkan seberapa cepat perekonomian suatu wilayah tumbuh atau justru menyusut; merupakan indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Literasi digital : Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya.

Lingkungan strategis : Situasi internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu entitas (wilayah, unit organisasi, maupun individu) dalam pengambilan keputusan dan strategi. Lingkungan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan alam yang dapat berdampak langsung pada kebijakan dan perubahan dalam unit tersebut.

Output dan Outcome	:	Output adalah hasil langsung atau produk dari sebuah kegiatan atau proses, sementara outcome adalah dampak atau pengaruh jangka panjang dari hasil tersebut. Output seringkali mudah diukur secara kuantitatif, sedangkan outcome lebih luas dan dapat berupa manfaat atau perubahan yang lebih besar.
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	:	Indikator ekonomi yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun.
Pembangunan inklusif	:	Pendekatan pembangunan yang memastikan semua orang, termasuk kelompok yang terpinggirkan, dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya secara setara. Ini berarti menciptakan akses dan kesempatan yang sama untuk semua orang, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik.
Perkotaan	:	Wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian, yang berfungsi sebagai tempat permukiman, pusat pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wilayah perkotaan juga bisa mencakup kota induk dan daerah pinggirannya.
Perdesaan	:	Wilayah yang kegiatan utamanya adalah pertanian (daerah agraris), termasuk pengelolaan sumber daya alam, dan berfungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
Proyek Strategis Nasional (PSN)	:	Proyek-proyek infrastruktur yang dianggap penting oleh Pemerintah (Pusat) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah;
Rasio elektrifikasi	:	Perbandingan jumlah rumah tangga yang telah berlistrik dengan total jumlah rumah tangga di Indonesia.
Rasio ketergantungan (dependency ratio)	:	Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun);

		rasio ini mengukur beban tanggungan ekonomi berupa penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	:	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Sekolah vokasi	:	Lembaga pendidikan yang fokus pada pelatihan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik untuk mempersiapkan siswa atau mahasiswa untuk bekerja di bidang tertentu.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	:	Ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal; merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
STEAM	:	*Science, technology, engineering, art, dan mathematics;* merupakan bentuk pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, rekayasa (engineering), seni, dan matematika untuk mengatasi masalah yang ditemui.
Stunting	:	Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (khususnya balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya baik dari aspek tinggi badan dan berat badannya.
Tata kelola pemerintahan	:	Proses dan struktur yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, dengan fokus pada praktik dan prinsip-prinsip yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	:	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah; TPT mengukur seberapa besar bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan.
Total Fertility Rate (TFR)	:	Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya; digunakan untuk memperkirakan jumlah rata-rata

anak yang akan dimiliki seorang wanita jika ia melahirkan sesuai dengan tingkat kesuburan saat ini;

TFR mengacu pada rata-rata, bukan pada jumlah anak yang sebenarnya akan dimiliki oleh setiap individu wanita; Masa reproduksi wanita sendiri biasanya dihitung dari usia 15 hingga 49 tahun (World Bank).

Transformasi digital : Proses mengadopsi teknologi digital untuk mengubah cara beroperasi, berinteraksi, dan menciptakan nilai baru dalam setiap kegiatan. Proses ini mencakup penggunaan teknologi komputer dan/atau kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan operasi dan memberikan nilai lebih.

Usia Harapan Hidup (UHH) : Perkiraan rata-rata tahun yang akan dijalani oleh seseorang setelah mencapai usia tertentu, atau rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu;

UHH adalah indikator penting untuk mengukur kualitas hidup dan kesehatan suatu populasi, serta mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
2025